PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

TAHUN 2016-2021






"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan perkembangan kondisi daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 3

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juni 2018
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

KUSPRIGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 140-4/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki kondisi sosial maupun ekonomi dari waktu kewaktu. Pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi-dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu stuktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 264 ayat (1) dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih periode 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 telah dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu. Sebagaimana amanat dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan representasi penjabaran Visi dan Misi kami (Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan H. Mochamad Nur Arifin), sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan vsi dan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan, serta strategi hingga arah kebijakan pembangunan. Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD ini turut pula mengakomodir seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman di wilayah Kabupaten Trenggalek. Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan konsistensi, yang melahirkan pelayan publik yang prima.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek bersama-sama Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan proses penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dari mulai pelaksanaan Sosialisasi, *Hearing* Pra Pembahasan Perubahan RPJMD, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang hingga proses pembahasan Raperda Perubahan RPJMD. Selain itu kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dan jajaran pimpinan Perangkat Daerah yang telah merumuskan Perubahan RPJMD ini dan bersama-sama berkomitmen mencapai target kinerja yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan mewujudkan visi misi RPJMD yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Diharapkan dokumen Perubahan RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka mewujudkan masyarakat dan wilayah Kabupaten Kabupaten Trenggalek yang maju dan sejahtera. Semoga Allah SWT merestui semua upaya dan karya kita bersama.

Trenggalek, 29 Juni 2018

BUPATI TRENGGALEK

EMIL ELESTIANTO DARDAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-27
1.5. Maksud dan Tujuan I-28

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografis dan Demografi II-1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-1
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-1
2.1.4. Kondisi Demografi II-11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-14
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi II-14
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-16
2.2.1.3. PDRB per Kapita II-19
2.2.1.4. Laju Inflasi II-20
2.2.1.5. Indeks Gini (*Gini Ratio*) II-21
2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan II-22
2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-26
2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-27
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-31
2.2.2.1. Pendidikan II-31
2.2.2.2. Kesehatan II-32
2.2.2.3. Sosial II-35
2.2.2.4. Tenaga Kerja II-36
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-37
2.2.3.1. Kebudayaan II-37
2.2.3.2. Kepemudaan dan Olahraga II-37

2.3. Aspek Pelayanan Umum II-38
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-40
2.3.1.1. Pendidikan II-40
2.3.1.2. Kesehatan II-43
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-46
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-50
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-53
2.3.1.6. Sosial II-55
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-58
2.3.2.1. Tenaga Kerja II-58
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... II-59
2.3.2.3. Pangan II-60
2.3.2.4. Pertanahan II-61
2.3.2.5. Lingkungan Hidup II-62
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-62
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-63
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-64
2.3.2.9. Perhubungan II-64
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika II-65
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-66
2.3.2.12. Penanaman Modal II-68
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga II-69
2.3.2.14. Statistik II-69
2.3.2.15. Persandian II-69
2.3.2.16. Kebudayaan II-70
2.3.2.17. Perpustakaan II-70
2.3.2.18. Kearsipan II-71
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan II-71
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan II-71
2.3.3.2. Pariwisata II-74
2.3.3.3. Pertanian II-77
2.3.3.4. Kehutanan II-80
2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral II-82
2.3.3.6. Perdagangan II-83
2.3.3.7. Perindustrian II-84
2.3.3.8. Transmigrasi II-86
2.3.4. Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan II-86

2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-89
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-89
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur II-91
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-97
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-97

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Pendapatan Daerah III-1
3.1.2. Belanja Daerah III-5
3.1.3. Pembiayaan Daerah III-7
3.1.4. Neraca Daerah III-7
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-11
3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah III-11
3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah III-12
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah III-12
3.3. Kerangka Pendanaan III-12
3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah III-14
3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah III-17
3.3.3. Kerangka Pendanaan III-20

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah IV-2
4.2. Isu-isu Strategis IV-13
4.2.1. Isu Internasional IV-13
4.2.2. Isu Nasional IV-17
4.2.3. Isu Regional IV-21
4.2.4. Isu Wilayah Perbatasan IV-23
4.2.5. Isu Berdasarkan Kebijakan RPJPD, RTRW dan KLHS IV-24
4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Trenggalek IV-28

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi V-2
5.2. Misi V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran V-6
5.4. Identifikasi Indikator dan Target Sasaran V-12

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Strategi VI-1
6.2. Arah dan Kebijakan VI-35

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum VII-1
7.2. Program Pembangunan Daerah VII-14
7.2.1. Program Lintas Perangkat Daerah..... VII-17
7.2.2. Program Kewilayahan..... VII-61

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1. Indikator Kinerja Utama IX-2
9.2. Indikator Kinerja Daerah IX-3

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan X-2

BAB XI PENUTUP
Penutup XI-1

LAMPIRAN

Indikasi Rencana Program yang disertai dengan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I-1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota I-3
2. Gambar I-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I-6
3. Gambar I-3. Keterkaitan Dokumen RPJPD dan RPJMD I-10
4. Gambar I-4. Deskripsi Pelaksanaan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 ..... I-12
5. Gambar I-5. Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I-13
6. Gambar I-6. Hierarki Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam RPJMD dan Renstra-PD I-16
7. Gambar I-7. Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah I-17
8. Gambar I-8. Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032 ..... I-21
9. Gambar I-9. Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032 ..... I-21
10. Gambar I-10. Rencana Struktur dan Pola Ruang RTRW Nasional (Sumber : RTRWN) I-23
11. Gambar I-11. Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur I-25
12. Gambar I-12. Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur I-25
13. Gambar II-1. Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek II-1
14. Gambar II-2. Peta Geologi dan Sesar II-4
15. Gambar II-3. Peta Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi II-9
16. Gambar II-4. Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek II-11
17. Gambar II-5. Peta Kematian Ibu di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ..... II-44
18. Gambar II-6. Peta Desa ODF Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ..... II-46
19. Gambar II-7. Peta Jaringan Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek II-48
20. Gambar II-8. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek II-86
21. Gambar II-9. Peta Rencana Hierarki Jalan II-92
22. Gambar II-10. Peta Rencana Jalan Kawasan Selingkar Wilis II-93
23. Gambar II-11. Peta Rencana Jaringan Listrik..... II-94
24. Gambar II-12. Peta Rencana Jaringan Energi..... II-95
25. Gambar II-13. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi II-96
26. Gambar IV-1 Pola Hubungan antara Permasalahan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan IV-2
27. Gambar IV-2. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) IV-16
28. Gambar IV-3. Ilustrasi 17 Tujuan (Goals) *Sustainable Development Goals* (SDGs) IV-18
29. Gambar IV-4. Tiga Dimensi Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 ..... IV-22
30. Gambar IV-5. Isu-Isu dan Arahan Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 ..... IV-24

31. Gambar IV-6. Ketimpangan Antarkawasan Dalam Pengembangan WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang IV-24
32. Gambar IV-7. Peta Komoditas Unggulan Kawasan Selingkar Wilis IV-25
33. Gambar IV-8. Pilar Pembangunan Daerah Yang Berkualitas IV-30
34. Gambar IV-9. Pola Pikir Pencapaian Reformasi Birokrasi IV-33
35. Gambar IV-10. Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan IV-39
36. Gambar IV-11. Konsep Pengembangan Prigi Menjadi Kota Maritim Baru IV-40
37. Gambar IV-12. WPS Pusat Pertumbuhan Yogyakarta-Prigi-Blitar- Malang IV-42
38. Gambar IV-13. Keterkaitan Perencanaan Tata Ruang dan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) IV-44
39. Gambar IV-14. *Universal Acces (100-0-100)* IV-45
40. Gambar IV-15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang IV-56
41. Gambar IV-16. Ilustrasi "Gotong Royong" dalam penanggulangan Kemiskinan IV-56
42. Gambar V-1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah V-1
43. Gambar V-2. Pohon Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) .. V-6
44. Gambar VI-1. Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional VI-2
45. Gambar VI-2. Garis Besar Strategi Pembangunan Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 ... VI-3
46. Gambar VI-3. Pembagian Fungsi pemerintahan Berdasarkan *Skill* Set dan Program Fungsional VI-37
47. Gambar VII-1. Paradigma Baru Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah VII-1
48. Gambar VII-2. Perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial VII-16
49. Gambar VII-3. Skema "SMART REGENCY" di Kab. Trenggalek VII-17
50. Gambar VII-4. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*Smart Regency*" VII-18
51. Gambar VII-5. Illustrasi Pengembangan WAJAR 12 Tahun VII-20
52. Gambar VII-6. Skema "GERBANG ANGKASA BIRU" VII-21
53. Gambar VII-7. Jejaring Program Kab/Kota Sehat VII-24
54. Gambar VII-8. Implementasi "GEMA MELEKAT" VII-25
55. Gambar VII-9. Arah Pembangunan Sektor Kesehatan VII-25
56. Gambar VII-10. Ilustrasi Pengembangan RSUD dr. Soedomo Trenggalek VII-26
57. Gambar VII-11. Dokumentasi "GENCAR" VII-27
58. Gambar VII-12. Dokumentasi Penyaluran Air Bersih Saat Kekeringan VII-30
59. Gambar VII-13. Dokumentasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana VII-32
60. Gambar VII-14. Visualisasi usaha pertanian terpadu VII-34
61. Gambar VII-15. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah *"Pertanian Terpadu Plus"* VII-35
62. Gambar VII-16. Ilustrasi Pengembangan Pertanian Terpadu VII-35
63. Gambar VII-17. Skema Integrasi Pengembangan Pertanian Terpadu VII-36
64. Gambar VII-18. Pengembangan Kakao Land dan Rumah Coklat VII-37
65. Gambar VII-19. International Durio Forestry VII-38
66. Gambar VII-20. Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis VII-39
67. Gambar VII-21. Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan RINTIS DESA VII-40
68. Gambar VII-22. Dokumentasi Konservasi Mangrove VII-41
69. Gambar VII-23. Dokumentasi Konservasi Penyu VII-42
70. Gambar VII-24. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah *"Trenggalek Membangun"* VII-43

71. Gambar VII-25. Langkah-langkah Strategis Trenggalek menuju 100-0-100 ..... VII-44
72. Gambar VII-26. Implementasi Trenggalek “My Darling” VII-46
73. Gambar VII-27. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah “Trenggalek GEMILANG” VII-49
74. Gambar VII-28. Infografik Trenggalek “GEMILANG” Produk Non Agro VII-49
75. Gambar VII-29. Infografik Trenggalek “GEMILANG” Produk Agro VII-50
76. Gambar VII-30. Dokumentasi Pasar Daerah di Kab. Trenggalek VII-53
77. Gambar VII-31. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah “GERTAK” VII-55
78. Gambar VII-32. Ilustrasi Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan VII-58
79. Gambar VII-33. Program Desa Adopsi dan Ngantor Di Desa VII-60
80. Gambar VII-34. Konsep Segitiga Pembangunan Wilayah VII-61
81. Gambar VII-35. Potensi Pengembangan Maritim Baru Prigi VII-62
82. Gambar VII-36. Kondisi Kawasan Perdagangan di Kecamatan Panggul VII-63
83. Gambar VII-37. Skema Keterkaitan Desa-Kota dalam Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan VII-66
84. Gambar VII-38. Ilustrasi Pengembangan Kawasan Perdagangan VII-72
85. Gambar VII-39. Layout Bendungan Tugu VII-73
86. Gambar VII-40. Lokasi dan Proses Pembangunan Bendungan Tugu VII-74
87. Gambar VII-41. Ilustrasi Anjungan Cerdas, Bendungan Tugu VII-75
88. Gambar VII-42. Konsep Anjungan Cerdas di Kawasan Strategis Bendungan Tugu VII-76
89. Gambar VII-43. Layout Bendungan Bagong VII-77
90. Gambar VII-44. Peta Rencana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur VII-79
91. Gambar VII-45. Peta Jaringan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Trenggalek VII-81
92. Gambar VII-46. Peta Kawasan Selingkar Wilis VII-82
93. Gambar VII-47. Peta Ruas Jalan Selingkar Wilis di Kabupaten Trenggalek VII-83
94. Gambar VII-48. Dokumentasi Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek VII-86
95. Gambar VII-49. Sasaran Pembangunan Perdesaaan VII-87

DAFTAR TABEL

1.	Tabel I-1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	I-14
2.	Tabel I-2.	Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis	I-18
3.	Tabel I-3.	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Trenggalek	I-19
4.	Tabel II-1.	Nama Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan	II-2
5.	Tabel II-2.	Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek	II-3
6.	Tabel II-3.	Banyaknya Bendungan Menurut Klasifikasi dan Panjang Saluran	II-4
7.	Tabel II-4.	Potensi Sumber Air di Kab. Trenggalek	II-5
8.	Tabel II-5.	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Trenggalek	II-6
9.	Tabel II-6.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Th. 2015-2017	II-7
10.	Tabel II-7.	Nama Pulau di Kabupaten Trenggalek	II-8
11.	Tabel II-8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017	II-12
12.	Tabel II-9.	Karakteristik Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2017	II-12
13.	Tabel II-10.	SDM Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2016-2017 Berdasarkan Kel. Umur	II-13
14.	Tabel II-11.	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2011-2016 (persen)	II-15
15.	Tabel II-12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011–2016	II-16
16.	Tabel II-13.	Capaian PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 (juta rupiah)	II-17
17.	Tabel II-14.	Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 (persen)	II-18
18.	Tabel II-15.	PDRB Perkapita Kab. Trenggalek Tahun 2011-2016 Menurut Lap. Usaha	II-19
19.	Tabel II-16.	Perkembangan Indeks Gini di Kab. Trenggalek Tahun 2011-2016	II-22
20.	Tabel II-17.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2016-2017	II-23
21.	Tabel II-18.	Data Agregat Kemiskinan Mikro Per Kecamatan Di Kabupaten Trenggalek Menurut Status Kesejahteraan Tahun 2017	II-25
22.	Tabel II-19.	Perkembangan TPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2017	II-27
23.	Tabel II-20.	Angka Partisipasi dan Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2017	II-31
24.	Tabel II-21.	Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017	II-36
25.	Tabel II-22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja (%)	II-36
26.	Tabel II-23.	Upah Minimum Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2018	II-37
27.	Tabel II-24.	Jumlah Event Seni dan Budaya Tahun 2011-2017	II-37
28.	Tabel II-25.	Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2011-2017	II-38
29.	Tabel II-26.	Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA Se- Kab. Trenggalek Tahun 2011-2017	II-40

30. Tabel II-27. Kondisi Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013–2017 ..... II-40
31. Tabel II-28. Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2017 ..... II-41
32. Tabel II-29. Rasio Murid Per Sekolah, Rasio Murid Per Ruang Belajar dan Rasio Guru Per Sekolah Tahun 2011-2017 ..... II-42
33. Tabel II-30. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan II-42
34. Tabel II-31. Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek II-43
35. Tabel II-32. Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek II-47
36. Tabel II-33. Kondisi Infrastruktur Kebinamargaan dan Pengairan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017 ..... II-48
37. Tabel II-34. Kondisi Irigasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017 ..... II-49
38. Tabel II-35. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum II-50
39. Tabel II-36. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang II-50
40. Tabel II-37. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-51
41. Tabel II-38. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan kepada Pelanggan (m^3) II-52
42. Tabel II-39. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Minum Tahun 2014-2017 ..... II-52
43. Tabel II-40. Potensi Sumber Air di Kabupaten Trenggalek II-53
44. Tabel II-41. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-54
45. Tabel II-42. Capaian Indikator Urusan Sosial II-57
46. Tabel II-43. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan II-58
47. Tabel II-44. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-60
48. Tabel II-45. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan II-60
49. Tabel II-46. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan II-61
50. Tabel II-47. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup II-62
51. Tabel II-48. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-63
52. Tabel II-49. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-63
53. Tabel II-50. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB II-64
54. Tabel II-51. Moda Transportasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017 ..... II-64
55. Tabel II-52. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan II-65
56. Tabel II-53. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika II-66
57. Tabel II-54. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2011-2017 ..... II-67
58. Tabel II-55. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2017 ..... II-67
59. Tabel II-56. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-69
60. Tabel II-57. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik II-69
61. Tabel II-58. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian II-69
62. Tabel II-59. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan II-70
63. Tabel II-60. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan II-70
64. Tabel II-61. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan II-71

65. Tabel II-62. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2017 ..... II-71
66. Tabel II-63. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan II-73
67. Tabel II-64. Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek..... II-74
68. Tabel II-65. Obyek Wisata Budaya II-74
69. Tabel II-66. Objek Wisata Minat Khusus II-75
70. Tabel II-67. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017 ..... II-76
71. Tabel II-68. Produksi Hasil Pertanian (ton)..... II-77
72. Tabel II-69. Produksi Hasil Perkebunan (ton)..... II-78
73. Tabel II-70. Produksi Sayur- Sayuran (kwintal) II-78
74. Tabel II-71. Produksi Buah-Buahan (kwintal) II-79
75. Tabel II-72. Potensi Produksi Peternakan Tahun 2011-2017..... II-79
76. Tabel II-73. Produksi Daging Telur dan Susu di Kab. Trenggalek II-80
77. Tabel II-74. Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Trenggalek (ha) II-81
78. Tabel II-75. Produksi Kehutanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016..... II-81
79. Tabel II-76. Jenis dan Persebaran Potensi Bahan Tambang dan Mineral II-82
80. Tabel II-77. Gambaran Umum Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Trenggalek II-83
81. Tabel II-78. Profil Industri Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017 ..... II-85
82. Tabel II-79. Keberangkatan Transmigran Tahun 2007-2017 ..... II-86
83. Tabel II-80. Jumlah PNSD di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017 (orang)..... II-87
84. Tabel II-81. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2013 – 2017 ..... II-90
85. Tabel II-82. Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek..... II-91
86. Tabel II-83. Jumlah Trafo dan Pelanggan Jaringan Listrik Tahun 2016 ..... II-94
87. Tabel II-84. Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017 ..... II-97
88. Tabel II-85. Rata-Rata Perijinan Terbit..... II-97
89. Tabel II-86. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Trenggalek Tahun 2014–2017..... II-98
90. Tabel II-87. Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017..... II-99
91. Tabel III-1. Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah) III-4
92. Tabel III-2. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah)..... III-5
93. Tabel III-3. Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah) III-7
94. Tabel III-4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 ..... III-8
95. Tabel III-5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 ..... III-10
96. Tabel III-6. Realisasi dan Perkiraan/Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (*dalam jutaan rupiah*) III-16
97. Tabel III-7. Realisasi dan Perkiraan/Proyeksi Pengeluran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (*dalam jutaan rupiah*) III-19

98. Tabel III-8. Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (*dalam milyar rupiah*) III-20
99. Tabel III-9. Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun 2016-2021 (*dalam jutaan rupiah*) III-22
100. Tabel IV-1. Tren Global dalam Permintaan Makanan, Energi, Produk Kesehatan dan Barang Konsumsi IV-15
101. Tabel IV-2. Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Kancah Global IV-19
102. Tabel IV-3. Peluang Ekonomi Indonesia IV-19
103. Tabel IV-4. Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek IV-27
104. Tabel IV-5. Kriteria Penentuan Isi-isu Strategis IV-31
105. Tabel IV-6. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis IV-31
106. Tabel V-1. Perbandingan Visi RPJMD dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kab. Trenggalek V-3
107. Tabel V-2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 ..... V-4
108. Tabel V-3. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Nawacita, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Trenggalek V-5
109. Tabel V-4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-10
110. Tabel V-5. Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya V-12
111. Tabel VI-1. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1 ..... VI-4
112. Tabel VI-2. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2 ..... VI-20
113. Tabel VI-3. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3 ..... VI-22
114. Tabel VI-4. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4 ..... VI-26
115. Tabel VI-5. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5 ..... VI-29
116. Tabel VI-6. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 6 ..... VI-30
117. Tabel VI-7. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 7 ..... VI-33
118. Tabel VI-8. Arah Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 ..... VI-35
119. Tabel VI-9. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 ..... VI-41
120. Tabel VII-1. Stakeholder yang terlibat dalam Program KLA VII-28
121. Tabel VII-2. Industri Formal vs Industri Non Formal VII-48
122. Tabel VII-3. Pembebasan Lahan JLS VII-80
123. Tabel VII-4. *Progress* Realisasi Fisik Pembangunan JLS di Jawa Timur VII-81
124. Tabel VII-5. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 ..... VII-89
125. Tabel VIII-1. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 ..... VIII-11
126. Tabel IX-1. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IX-2
127. Tabel IX-2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 ..... IX-4

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik II-1. Piramida Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2017 ..... II-13
2. Grafik II-2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2016 ..... II-16
3. Grafik II-3. PDRB Per Kapita Kab. Trenggalek Tahun 2011-2016 (juta rupiah) II-20
4. Grafik II-4. Inflasi Kab Trenggalek, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011–2015..... II-21
5. Grafik II-5. Data dan Informasi Kemiskinan Makro di Kabupaten Trenggalek II-24
6. Grafik II-6. IPM Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017 ..... II-27
7. Grafik II-7. Angka Harapan Hidup (Eo) Tahun 2011 – 2017 (tahun) II-28
8. Grafik II-8. EYS (Expected Years of Schooling : Angka Harapan Lama Bersekolah) Tahun 2011 – 2017 (tahun) II-29
9. Grafik II-9. MYS (Mean Years of Schooling : rata-rata lama sekolah) (tahun) II-29
10. Grafik II-10. Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)..... II-30
11. Grafik II-11. Angka Kematian Bayi Di Trenggalek Tahun 2001-2017..... II-32
12. Grafik II-12. Angka Kematian Ibu Melahirkan Di Trenggalek dan Provinsi Jawa Tmur Tahun 2001-2017..... II-33
13. Grafik II-13. Prevalensi Bayi Gizi Buruk di Kab Trenggalek Tahun 2017 ..... II-33
14. Grafik II-14. Data Balita Stunting DI Kab Trenggalek Tahun 2014-2017..... II-34
15. Grafik II-15. Prevalensi Balita Stunting Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ..... II-35
16. Grafik II-16. Persentase Cakupan UCI di Kab Trenggalek Tahun 2010-2017..... II-45
17. Grafik II-17. Jumlah Investasi di Kabupaten Trenggalek (milyar rupiah) II-68
18. Grafik II-18. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2017 (orang)..... II-75
19. Grafik II-19. Capaian PAD Pariwisata Tahun 2011-2017 ..... II-77
20. Grafik II-20. Perkembangan Jumlah IKM dan Kerajinan (unit) Tahun 2011-2017 ..... II-85
21. Grafik II-21. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017..... II-88
22. Grafik III-1. Komposisi Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 III-2
23. Grafik III-2. Komposisi PAD Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015..... III-3
24. Grafik III-3. Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 ..... III-3
25. Grafik III-4. Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 ..... III-4
25. Grafik III-5. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 ..... III-6
26. Grafik IV-1. Capaian Kinerja Ekonomi Jawa Timur IV-23

BAB I

PENDAHULUAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 4 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Juni 2018

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 – 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Desember 2015, Kabupaten Trenggalek telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut telah ditetapkan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan H. Mochamad Nur Arifin sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sebagaimana amanat dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Namun seiring dengan adanya dinamika pembangunan dan kondisi daerah, maka perlu adanya perubahan RPJMD 2016-2021.

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang berkualitas. Setidaknya perencanaan yang berkualitas tersebut meliputi: 1) dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan, 2) efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil; 3) komprehensif, yang diindikasikan dengan adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauhmana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsistensi menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberkelanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu; 4) partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; 5) transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat :

a. Visi, misi, dan program kepala daerah;
b. Arah kebijakan keuangan daerah;
c. Strategi pembangunan daerah;
d. Kebijakan umum;
e. Program Perangkat Daerah;
f. Program lintas Perangkat Daerah;
g. Program kewilayahan;
h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan Dokumen RPJMD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana **Pendekatan Teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. **Pendekatan Politis** memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan **Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)*** dan **Bawah-Atas *(bottom-up)***, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi.

Dokumen RPJMD nantinya merupakan dokumen publik, sehingga keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan begitu, diharapkan RPJMD dapat diakses oleh semua *stakeholders* dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

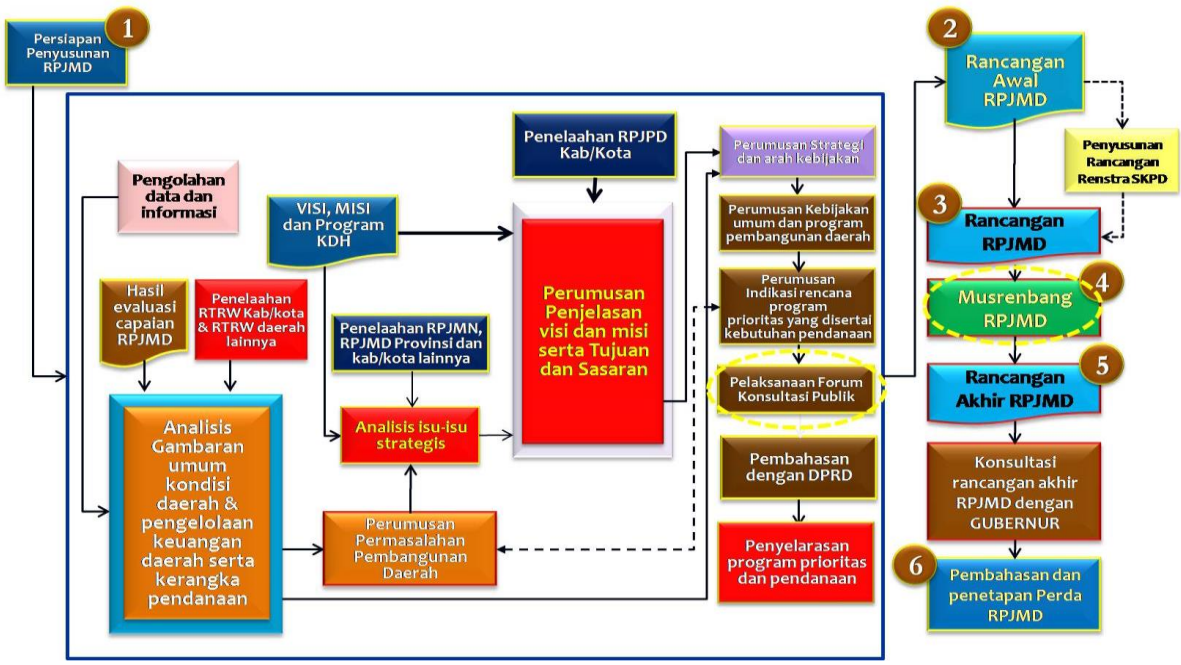
Sebagai dokumen resmi daerah, RPJMD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

a. Pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun;
b. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD);
c. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappedalitbang;
d. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
e. Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat posisi strategis dokumen RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RPJMD sehingga dapat dihasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas.

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025. RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III dari RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"**. Selain RPJPD, RPJMD ini juga memperhatikan rencana tata ruang (Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Adapun skema tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar I-1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
6. Penetapan RPJMD.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam setiap periode tahunan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam perkembangannya sejak RPJMD Tahun 2016-2021 diundangkan, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial yang merupakan dampak dari krisis ekonomi global yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Trenggalek serta adanya perubahan kebijakan nasional sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Adapun secara rinci pertimbangan perlunya Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa seluruh Kepala Daerah agar menyesuaikan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka program-program di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan indikator pencapaiannya serta Perangkat Daerah pelaksana program tersebut perlu dilakukan penyesuaian, dimana hal ini merupakan perubahan yang mendasar dan merupakan perubahan kebijakan nasional;
3. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah disusun dan dirumuskan program - program berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, akan tetapi program-program tersebut disusun dengan asumsi struktur organisasi Perangkat Daerah yang lama sehingga dibutuhkan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Perangkat Daerah yang baru;
4. adanya rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, diperlukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; dan
5. adanya perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi global sehingga mempengaruhi perekonomian nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Trenggalek, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian beberapa rumusan indikator dan target kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

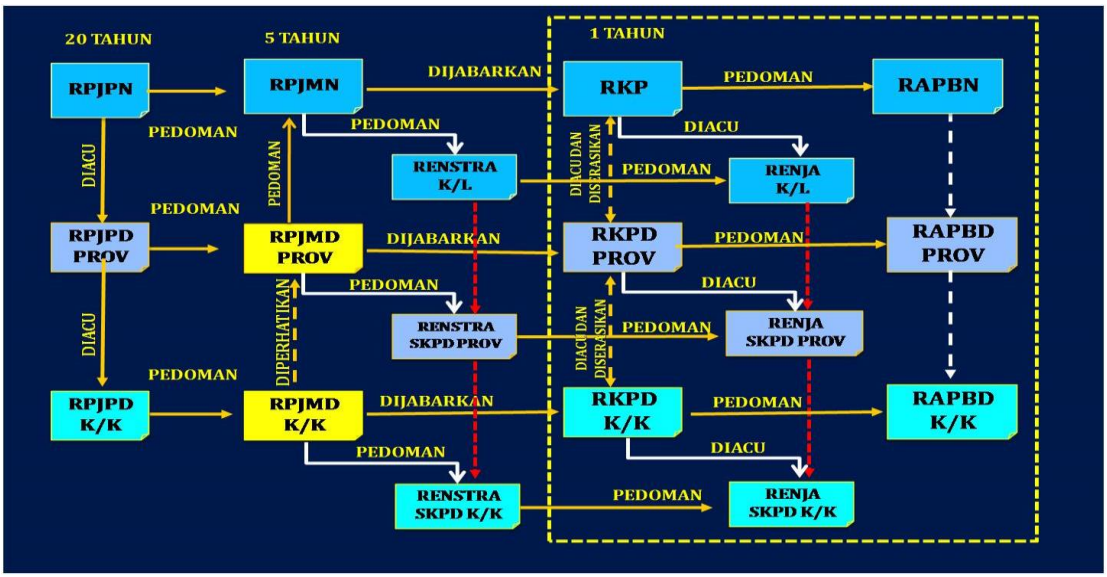
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, harus menyelaraskan dan mensinergikan antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur yang juga telah diacu dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur juga akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada **Gambar** berikut :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar I-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJP Nasional Tahun 2005-2025

Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi RPJP Nasional 2005-2025 adalah : **"INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR".**

Sedangkan misi RPJPN 2005-2025 adalah :

1. Mewujudkan masyarakat, berahlak, mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan :

1. **RPJM pertama** (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2. **RPJM kedua** (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian;
3. **RPJM ketiga** (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat; dan
4. **RPJM keempat** (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJP Nasional 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global;
3. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK;
4. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju; dan
5. Reformasi hukum dan birokrasi.

RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. RKP sebagaimana yang dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, harus memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang pada RPJP Nasional.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 adalah : "**MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA TIMUR PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945**".

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia; pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan investasi, serta pengembangan pariwisata;
2. **Misi Kedua**, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa;
3. **Misi Ketiga**, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan;
4. **Misi Keempat**, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan;
5. **Misi Kelima**, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang; dan
6. **Misi Keenam**, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta pembangunan keuangan daerah.

Periodesasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Timur terbagi dalam empat tahapan, yaitu : Tahap Pertama (2005-2009); Tahap Kedua (2010-2014); Tahap Ketiga (2015-2019); dan Tahap Keempat (2020-2024). Tahap Ketiga sebagai rujukan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Trenggalek ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan RPJPD Provinsi Jawa Timur merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih baik termasuk Kabupaten Trenggalek. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, juga telah memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang pada RPJP Provinsi Jawa Timur.

RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJPD mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"**. Visi tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang, Visi Kabupaten Trenggalek dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dengan mengutamakan agrobisnis dan agroindustri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah;
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada pelayanan prima; dan
7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam lingkup kawasan.

Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Agenda yang dijalankan meliputi :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2. Peningkatan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
3. Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatan pelayanan prima;
8. Efektifitas penanggulangan bencana; dan
9. Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Dokumen RPJPD merupakan acuan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah). Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagaimana pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar I-3. Keterkaitan Dokumen RPJPD dan RPJMD

RPJM Nasional Tahun 2015-2019

VISI Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 adalah : **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".** Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Nawa Cita :

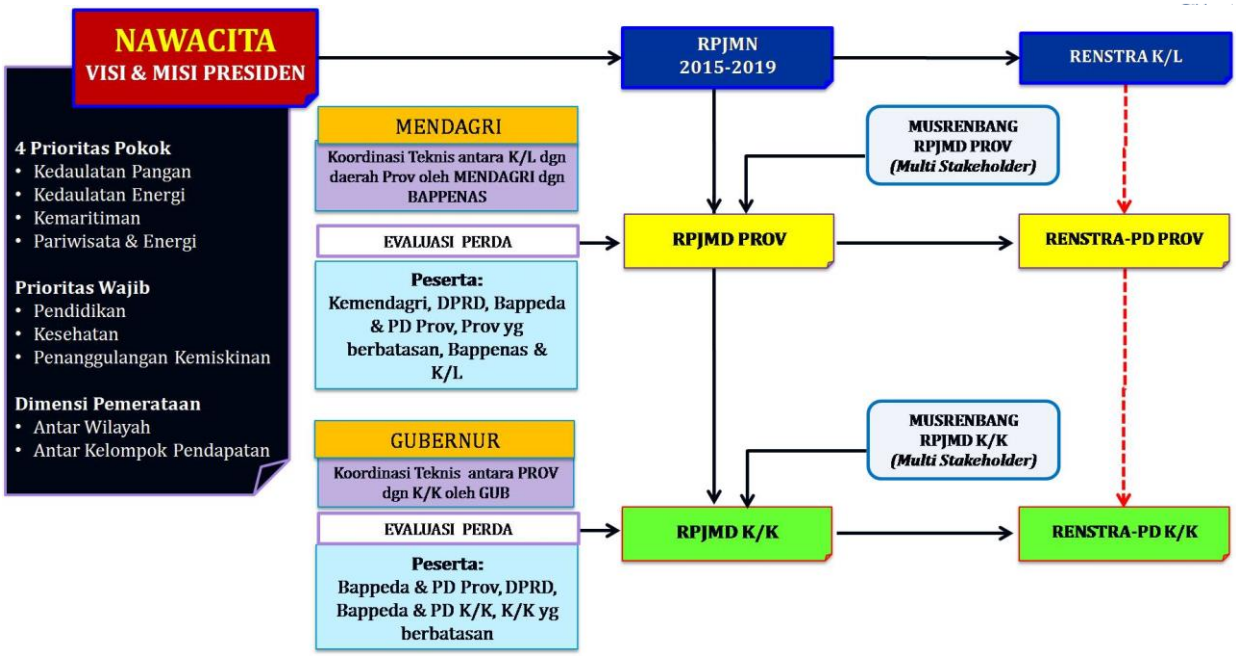
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Adapun Deskripsi Pelaksanaan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dijelaskan dalam **Gambar** berikut :



Gambar I-4. Deskripsi Pelaksanaan RPJM Nasional Tahun 2015-2019

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG								
7 MISI								
Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.		Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas								
Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakuka n revolusi karakter bangsa	Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama)			**BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)**			**BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)**		
1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)	5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)	9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)	1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2.Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3.Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4.Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.	5. Membangun pemberdayaa n buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur	10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembanga n industri manufaktur	1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa	2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial	3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga



Gambar I-5. Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN 2010-2014. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah : **"JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK".**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik". Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu "Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat" yang dijabarkan melalui : 1) Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 2) Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, 3) Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang, 4) Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 5) Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Pengukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Jawa Timur lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam **Tabel** berikut:

Tabel I-1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian			Target			Akhir Periode RPJMD Thn. 2019
		Thn. 2014	Thn. 2015	Thn. 2016	Thn. 2017	Thn. 2018	Thn. 2019	
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	5,86	5,44	5,55	5,56-5,86	5,61-5,96	5,66-6,06	**5,66-6,06**
2	Indeks Gini	0,37	0,40	0,40	0,390-0,400	0,385-0,400	0,380-0,400	**0,380-0,400**
3	Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)	18,63	16,61	17,03	18,00-18,20	18,20-18,40	18,40-18,60	**18,40-18,60**
4	Persentase Penduduk Miskin	12,28	12,28	11,85	11,80-11,50	11,50-11,20	11,20-10,90	**11,20-10,90**
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,14	68,95		69,50-69,75	69,75-70,00	70,00-70,25	**70,00-70,25**
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,83	91,07	91,77	92,39-92,90	92,91-93,50	93,51-94,01	**93,51-94,01**
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,19	4,47	4,21	4,17-4,08	4,08-3,99	3,99-3,90	**3,99-3,90**
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	56,48	61,70	63,98	63,98-65,49	65,49-67,00	67,00-68,52	**67,00-68,52**
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	80,00	81,00	81,00-82,00	82,00-83,00	83,00-84,00	**83,00-84,00**
10	Indeks Reformasi Birokrasi	61,04	63,00	65,00	65,00-67,00	67,00-69,00	69,00-71,00	**69,00-71,00**
11	Indeks Kesalehan Sosial				>60	>60	>60	**>60**

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

RPJMD Kabupaten Sekitar

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Pacitan dan Ponorogo. Kabupaten Pacitan dan Ponorogo adalah Kabupaten yang merupakan Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Tanggal 9 Desember Tahun 2015 bersama dengan Kabupaten Trenggalek. Dalam sinergi pembangunan regional dibutuhkan sinergi antara RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan RPJMD Kabupaten sekitar.

Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh Bupati Syahri Mulyo, SE dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM. RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013. Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2014-2018 adalah : **"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TULUNGAGUNG MELALUI PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA".** Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa. Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 – 2018, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan;
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratis;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain;
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan,perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan; dan
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

RPJMD Kabupaten Pacitan nantinya disusun berdasarkan visi dan misi Drs. H. Indartato, MM – Drs. H. Yudi Sumbogo saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 lalu. Adapun visi pada RPJMD Kabupaten Pacitan adalah "**MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT**". Dari visi tersebut, diturunkan menjadi hasta tama atau delapan agenda prioritas utama. Adapun, hasta tama tersebut meliputi layanan pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan infrastuktur dasar berkelanjutan. Kemudian perbaikan tata kelola pemerintah dan peningkatan kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan.

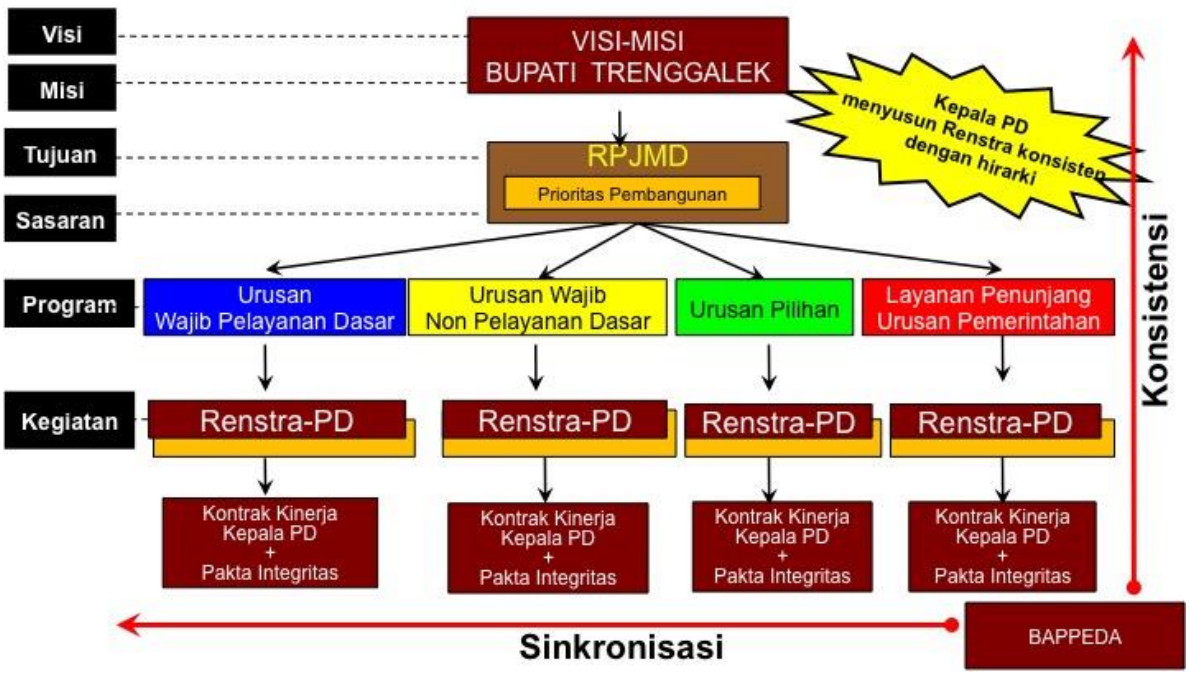
Pilkada Kabupaten Ponorogo, menghasilkan pasangan Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Drs. H. Soedjarno, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2016 – 2021. Visi pada Rancangan RPJMD adalah "**PONOROGO BERBENAH, PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**". Visi selama lima tahun ke depan ini terbagi dalam tahapan-tahapan pencapaian yaitu di Tahun 2016 sebagai tonggak pertama adalah Mewujudkan Ponorogo yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan berdaya Saing; di Tahun 2017 adalah Pembenahan Infrastruktur dan Modernisasi Pertanian melalui pengembangan produk pertanian organik; di Tahun 2018 adalah Peningkatan Infrastruktur dan pengembangan agribisnis Organik yang didukung oleh SDM berkualitas; di Tahun 2019 adalah Pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, religi, dan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang kuat; di Tahun 2020 adalah Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan; dan di Tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini adalah Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat (2), Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menyusun Visi dan Misi sebagaimana periode yang lalu sehingga tugas dan fungsi yang dilaksanakan harus mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

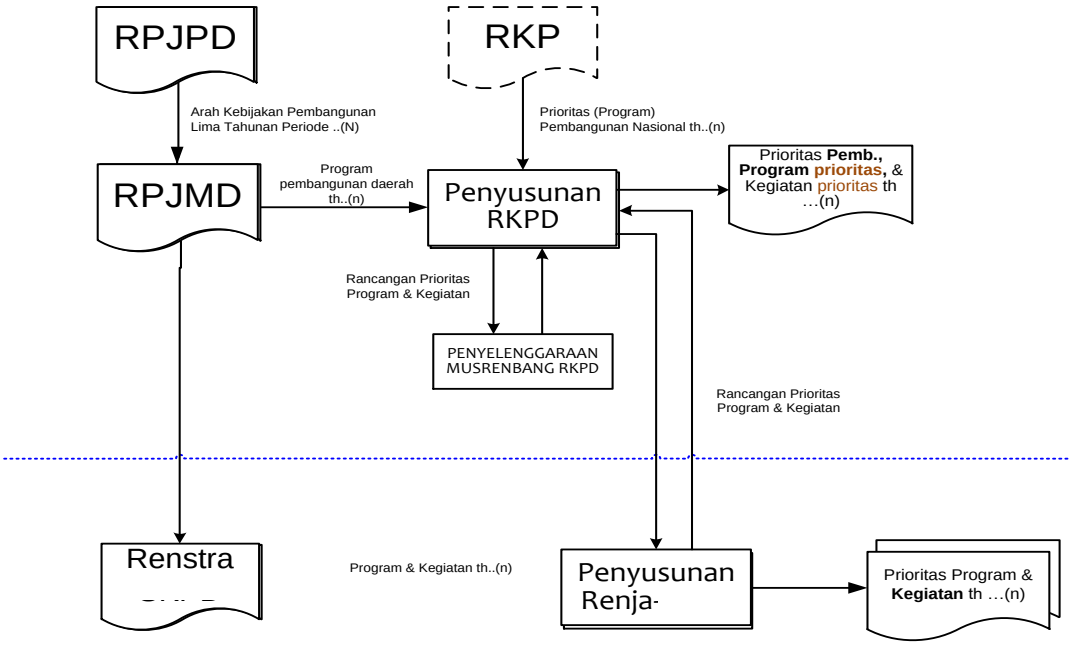


Gambar I-6. Hierarki Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam RPJMD dan Renstra-PD

RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kab. Trenggalek

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar I-7. Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas.

Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodesasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Rencana sistem kegiatan perkotaan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Isu-isu strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi serta kebijakan penataan ruang diatasnya seperti RTRWN dan RTRWP. Pertimbangan isu-isu strategis dan kebijakan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel I-2 Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis

Kebijakan/Isu Strategis	Lokasi	Sumber
Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai PKW	Kecamatan Trenggalek	PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	Profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Konsep pengembangan segitiga pembangunan Kabupaten Trenggalek Trenggalek-Prigi-Panggul	Trenggalek (Kecamatan Trenggalek) Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	RPJMD Kabupaten Trenggaelk (2016-2021)
Penetapan PKLp	Kecamatan Durenan	RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032
Penetapan PPK	Kecamatan Kampak	RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Melalui serangkaian isu-isu strategis, hasil analisis, dan dinamika pembangunan yang terjadi arahan rencana maka pusat di kegiatan di Kabupaten Trenggalek terdiri atas

- Kecamatan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Kecamatan Watulimo, khususnya wilayah Prigi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi untuk kedepannya dapat ditentukan menjadi PKW (PKWp)
- Kecamatan Panggul sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Kecamatan Durenan, Karangan, Tugu, sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan
- Kecamatan Pogalan, Gandusari, dan Kampak sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal Promosi Promosi (PKLp), 3 (tiga) Pusat Kegiatan Kawasan (PPK). Masing-masing pusat kegiatan memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I-3. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Trenggalek

Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi Utama
PKW	Kecamatan Trenggalek	Ibukota kabupaten Pusat Pemerintahan Perdagangan dan jasa skala regional Perkantoran Pengembangan permukiman Pelayanan sosial Pertumbuhan wilayah kabupaten
PKWp	Kecamatan Watulimo (Prigi)	Pusat perikanan tangkap Industri pengolahan perikanan Pelabuhan perikanan samudra Pariwisata skala regional Pelabunan pengumpul
PKL	Kecamatan Panggul	Perdagangan dan jasa skala kabupaten Sentra industri rumah tangga Perkebunan Pertanian Perikanan Pengembangan permukiman
PKLp	Kecamatan Durenan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan sampai dengan kabupaten Sentra industri oleh-oleh Pengembangan permukiman
	Kecamatan Karangan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan sampai dengan kabupaten Sentra industri rumah tangga Pengembangan permukiman
	Kecamatan Tugu	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan sampai dengan kabupaten Sentra industri rumah tangga Pengembangan permukiman
PPK	Kecamatan Pogalan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan Perkebunan Pertanian Sentra industri rumah tangga Pengembangan permukiman
	Kecamatan Gandusari	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan Perkebunan Pertanian Sentra agrobisnis Pengembangan permukiman
	Kecamatan Kampak	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kecamatan Perkebunan Pertanian Sentra agrobisnis Pengembangan permukiman

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/provinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

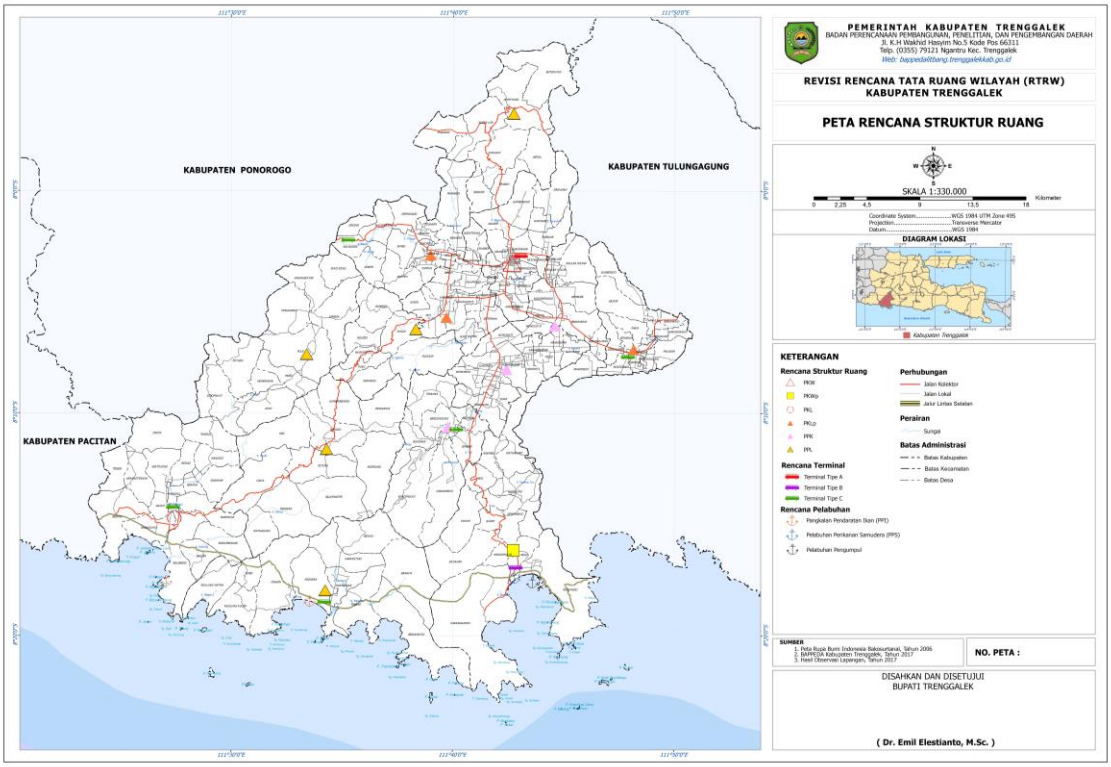
1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan utama dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa sebelumnya, maka ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Antara lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas durenan, serta kawasan strategis bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan lindung karst. Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis sempadan JLS.

Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu:

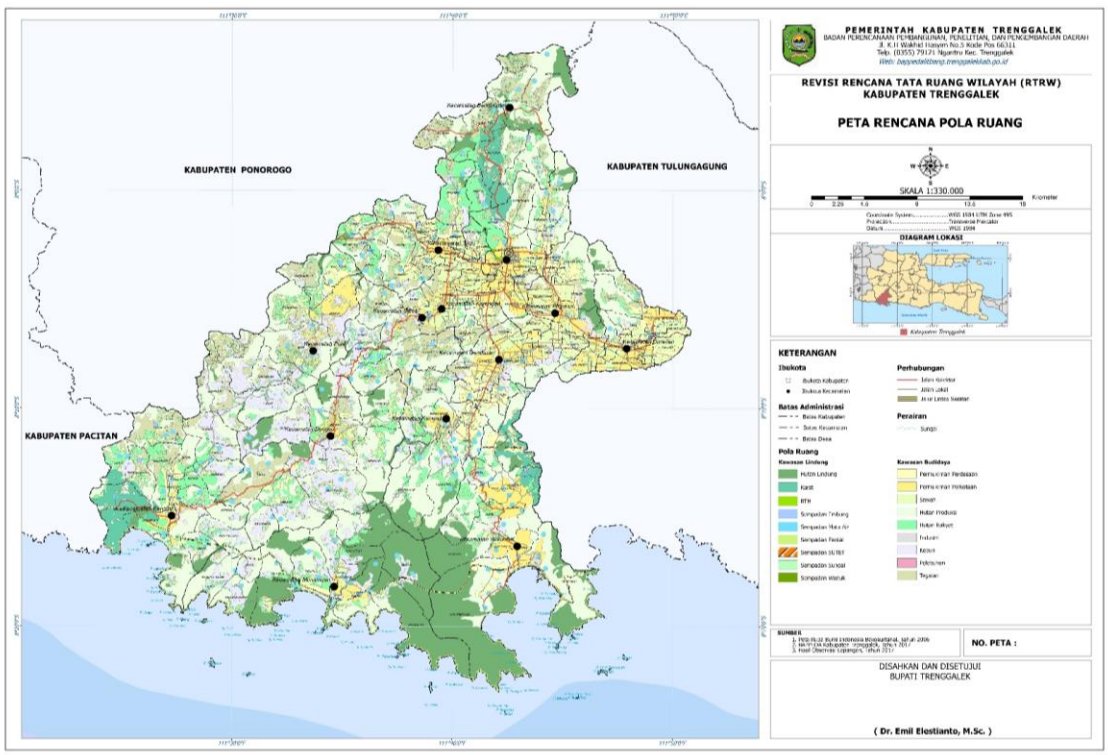
1. Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga produk yang dijual di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu.
3. Mengembangkan pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.
4. Mengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola perjalanan wisata.
5. Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana
6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur regional.
7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan budidaya.
9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman.

RTRW adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025. Arah kebijakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 yang berbasis kewilayahan (spasial) termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, program pengembangan agropolitan dan minapolitan serta program pengembangan berbasis *cluster* harus mengacu dokumen RTRW agar terjadi sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pola dan Struktur Ruang pada Dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032 ditampilkan pada **Gambar** berikut.



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar I-8. Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar I-9. Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Secara garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Trenggalek sesuai produk Rencana Tata Ruang yang hirarkinya berada pada tingkat di atasnya, dan produk Rencana Tata Ruang kabupaten sekitar, diantaranya:

1. **Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)**

   Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

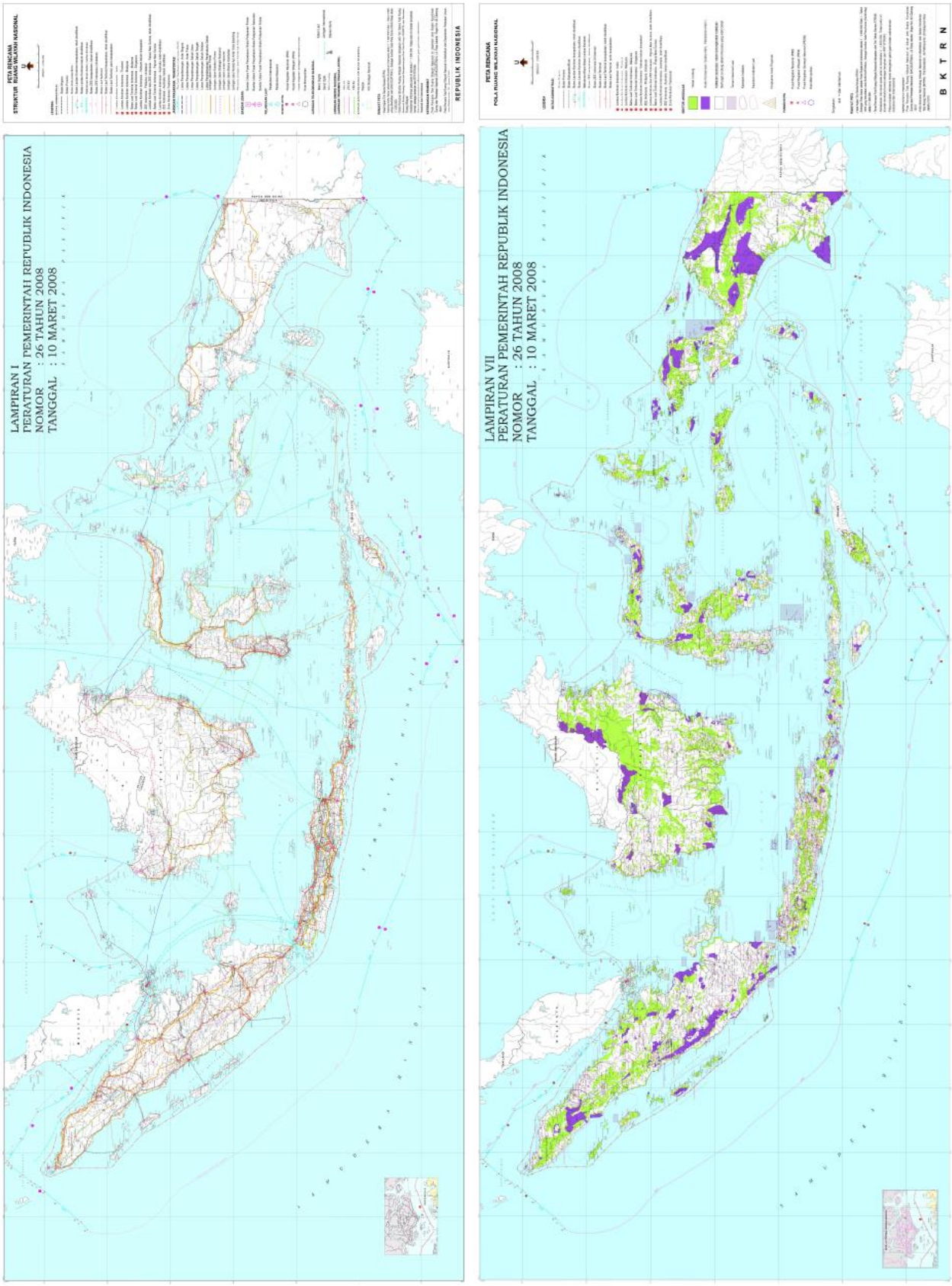
   Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

   Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

   Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

   Rencana struktur ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 meliputi:

   a. sistem perkotaan nasional;
   b. sistem jaringan transportasi nasional;
   c. sistem jaringan energi nasional;
   d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
   e. sistem jaringan sumber daya air.



Gambar I-10. Rencana Struktur dan Pola Ruang RTRW Nasional (Sumber : RTRWN)

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 yang terdiri atas:

1) Sistem pusat pelayanan;

Rencana sistem pusat terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi WP-nya dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan meliputi:

a. PKN : Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang;
b. PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan;
c. PKWP : Pasuruan dan Batu;
d. PKL : Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, **Trenggalek**, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil; dan
e. Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan rencana sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki. Pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki memiliki hubungan dengan:

a. pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
b. perkotaan sebagai pusat pelayanan sub-WP; dan
c. ibukota kabupaten masing-masing.

Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan. Keterkaitan antara sistem pelayanan perkotaan dan sistem pelayanan perdesaan dapat berbentuk sistem agroindustri.

Pengembangan sistem agropolitan dan sistem dapat dilaksanakan oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota.

2) Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

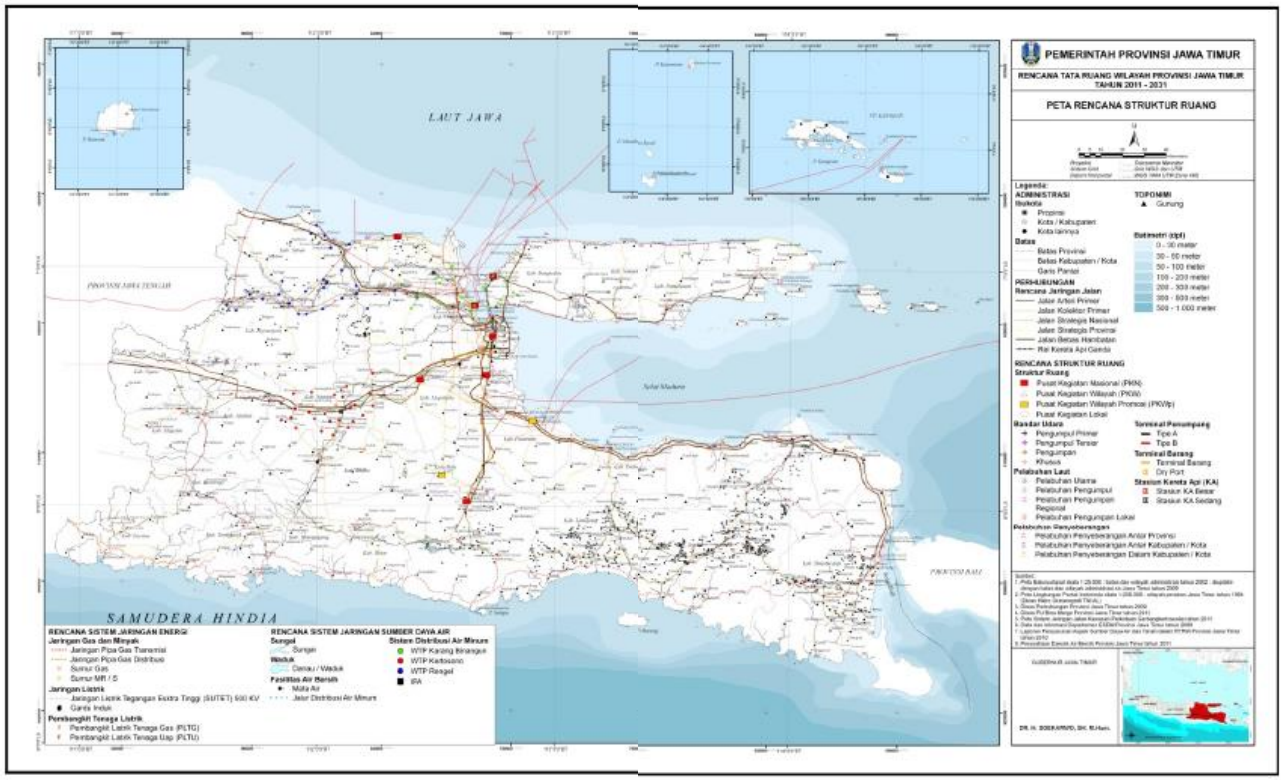
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;
b. rencana sistem jaringan energi;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
e. rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Sedangkan Rencana pola ruang wilayah provinsi Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 yang terdiri atas:

a. rencana kawasan lindung;
b. rencana kawasan budi daya; dan
c. rencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jawa Timur merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. RTRW ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun Provinsi Jawa Timur belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perda RTRWnya. Dalam RTRW tersebut, Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanya disebutkan secara umum dan belum dilengkapi dengan data dan peta yang akurat.



Gambar I-11. Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur



Gambar I-12. Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai gerbang ekonomi bagi Indonesia Bagian Timur menghadapi isu strategis :

1) Globalisasi yang berdampak pada kecenderungan perkembangan wilayah menuju perkotaan dan degradasi pedesaan;
2) Interaksi antar wilayah berdampak pada sulitnya koordinasi penataan ruang antar lembaga di Jawa Timur;
3) Aglomerasi berbagai aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesenjangan antar wilayah dan munculnya perkotaan-perkotaan baru yang tidak direncanakan;
4) *Primacy* yang makin tinggi dibandingkan kota lainnya. Gejala *urban primacy* ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung konvergen mengarah ke Kota Surabaya dari wilayah sekitarnya;
5) Konurbasi dari kota Surabaya ke arah wilayah *hinterland*-nya; dan
6) Bila gejala *primacy* dan konurbasi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kota-kota inti metropolitan akan mengalami kemunduran yang mengarah pada peningkatan biaya rata-rata jangka panjang. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup regional akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.

Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam RTRW Jawa Timur, antara lain :

1) Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan,
2) Perizinan,
3) Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan
4) Pengenaan Sanksi.

Provinsi Jawa Timur sudah melakukan penyerasian antara RTRWP, RPJPD dan RPJMD melalui:

1) Penyerasian Perda RTRWP Jawa Timur dengan kebijakan sektoral dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur. RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan visi agrobisnis, diserasikan dengan RTRW Jawa Timur dalam bentuk kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis. Sehingga RTRWP Jawa Timur menjadi matra ruang dari arahan kebijakan pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJPD Jawa Timur.
2) Penyusunan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 secara hierarki mengacu pada RPJPD. Pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP.
3) Sinkronisasi muatan RTRWP dengan rencana sektoral yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.

3. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Sekitarnya**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Sekitarnya meliputi :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo ditetapkan dengan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032; dan
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan yang dijelaskan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi 5 (lima) tahun lalu dan perkiraan 5 (lima) tahun yang akan datang, yang antara lain sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Trengalek yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan pembangunan yang disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu-isu strategis yang didasarkan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan periode yang lalu.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, yang disertai penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sementara program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan rincian rancangan program-program yang akan digunakan dalam RPJMD yang disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX. PENUTUP
Berisikan tentang pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya dan kaidah pelaksanaan berupa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, **maksud** penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional.

Sedangkan **tujuan** dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021; dan
5. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

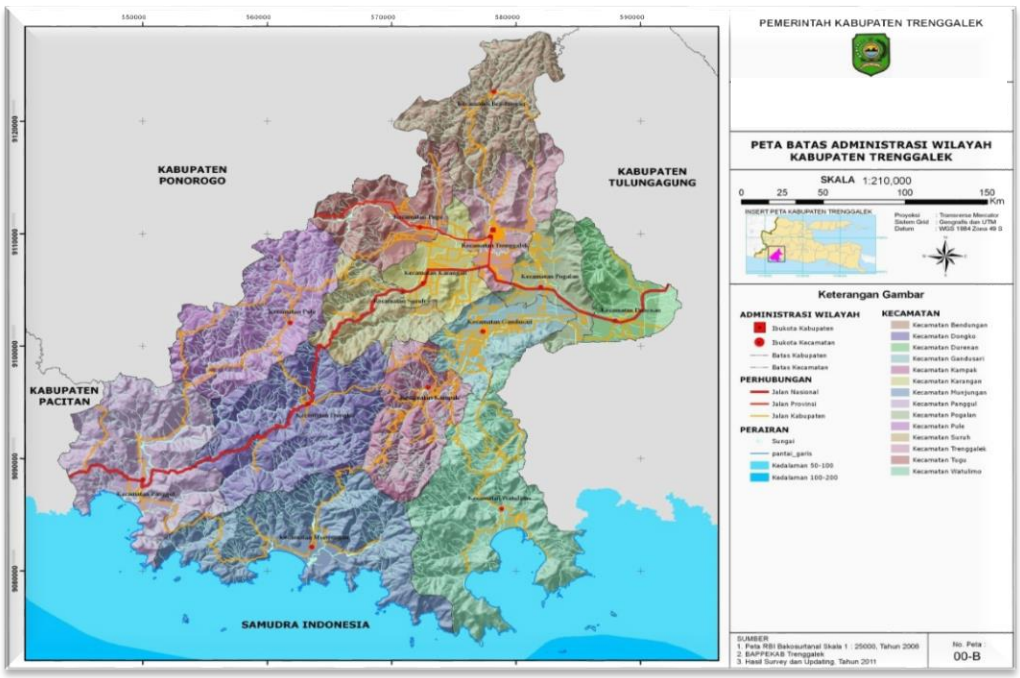
Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah melalui basis data beberapa tahun terakhir dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Basis data ini akan dijadikan dasar penyusunan rumusan permasalahan dan isu-isu strategis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Trenggalek ± 126.140 ha dan secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24-112°11' Bujur Timur dan 7°53' – 8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo



Gambar II-1. Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek

Wilayah Administrasi

Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 rukun warga dan 4.502 rukun tetangga. Dari 14 kecamatan hanya 4 kecamatan yang mayoritas topografinya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 kecamatan lainnya mayoritas topografinya berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. Adapun **Tabel** yang menjelaskan wilayah Kabupaten Trenggalek per kecamatan dan peta administrasi Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

Tabel. II-1. Nama Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah				Luas wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	13.156	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	353	15.480	12,27
3.	Watulimo	12	36	80	338	15.444	12,24
4.	Kampak	7	23	77	249	7.900	6,26
5.	Dongko	10	39	114	469	14.120	11,19
6.	Pule	10	34	117	379	11.812	9,36
7.	Karangan	12	32	81	296	5.092	4,04
8.	Suruh	7	27	40	188	5.072	4,02
9.	Gandusari	11	49	126	328	5.496	4,36
10.	Durenan	14	47	78	296	5.716	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	4.180	3,31
12.	Trenggalek	13	33	72	242	6.116	4,85
13.	Tugu	15	45	99	322	7.472	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	9.084	7,2
Jumlah		**157**	**540**	**1.290**	**4.502**	**126.140**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2018

Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek 48,30% diantaranya merupakan hutan negara dibawah penguasaan Perum Perhutani yang banyak berbatasan dengan lahan pemerintah maupun masyarakat. Di beberapa lokasi pernah terjadi sengketa dan permasalahan terkait dengan pengakuan hak maupun pengelolaan lahan. Diantaranya sudah difasilitasi penyelesaiannya dengan damai dengan sistem pengelolaan bersama, dimana Perum Perhutani mengelola tegakan pokok sedangkan masyarakat memanfaatkan sekitar dengan tanaman tumpang sari. Namun demikian, di beberapa lokasi masih berpotensi dan masih rawan terjadinya permasalahan atas pengakuan hak dan pengelolaan lahan antara masyarakat dengan Perum Perhutani.

Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ± 28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0 – 15 % adalah ± 42.291,38 ha. Kawasan yang bertopografi datar sebagian besar terletak di Wilayah Kabupaten Trenggalek meliputi Kecamatan Trenggalek, Karangan, Pogalan, Durenan, dan Tugu. Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat **Tabel** di bawah ini.

Tabel II-2. Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Sumber: RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Klimatologi

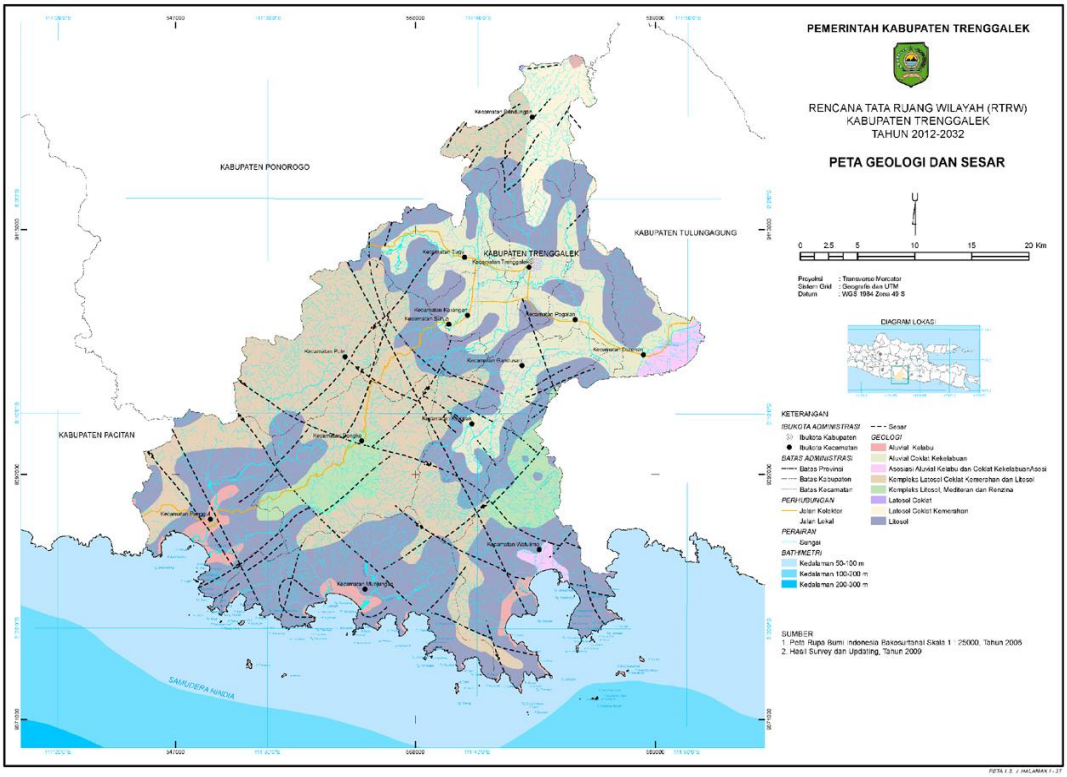
Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Tahun 2015 Kabupaten Trenggalek juga mengalami kemarau cukup panjang akibat fenomena *El Nino*. Mengingat begitu kompleksnya dampak langsung dan tidak langsung dari bencana kekeringan maka semua pihak harus menyiapkan diri menghadapinya. Pemerintah wajib menyiapkan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa hingga musim kemarau berakhir, stok bahan kebutuhan pokok dalam status aman dan air bersih tersedia dalam jumlah yang cukup.

Geologi

Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain :

- *Miosenne sedimentary* : di semua kecamatan
- *Miosenne limostone* : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan
- *Andesit* : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan
- Liat dan Pasir *(alluvium)* : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan
- *Undifferentioned vulcanic* : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.



Sumber : RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Gambar. II-2. Peta Geologi dan Sesar

Hidrologi

Secara hidrologis, Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 0,042 M^3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M^3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dam dan lain-lain.

Tabel dibawah ini menjelaskan banyaknya bendungan menurut klasifikasi dan panjang saluran di Kab. Trenggalek.

Tabel II-3. Banyaknya Bendungan Menurut Klasifikasi dan Panjang Saluran

No.	Klasifikasi	Jumlah Bendungan	Panjang Saluran (m)		
			Permanen	Semipermanen	Sementara
1.	Bendungan Besar	-	-	-	-
2.	Bendungan Sedang	15	32.359	13.253	8.050
3.	Bendungan Kecil	76	170.256	166.860	114.586
4.	Danau	-	-	-	-
5.	Embung	10	-	-	-
Jumlah		**101**	**202.615**	**180.113**	**122.636**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2017

Air merupakan bagian dari kehidupan yang tak dapat dipisahkan, terutama air dimanfaatkan sebagai air minum untuk memenuhi asupan cairan tubuh, fungsi utama lainnya air layaknya digunakan untuk memasak, mandi, mencuci dan banyak lagi kegunaan air untuk kehidupan. Oleh sebab itu, ketersediaan air bersih harus diprioritaskan mulai dari perdesaan hingga perkotaan. Mengingat air adalah merupakan komponen pokok dari kebutuhan manusia, maka sumber air bersih ini sangatlah diperlukan. Kondisi air saat ini menjadi perhatian global karena akses, kuantitas dan kualitas air semakin menurun oleh berbagai penyebab. Untuk mencegahnya, dipandang perlu untuk dilakukan konservasi dan upaya-upaya penghematan sumber daya air, penanaman kesadaran melalui pendidikan dan sosialisasi terkait sumber daya air.

Potensi sumber air di Kabupaten Trenggalek sebanyak 361 dengan lokasi data rata-rata debit air sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel II-4. Potensi sumber air di Kabupaten Trenggalek

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUMBER AIR	RATA-RATA DEBIT AIR (Liter/detik)
1.	Panggul	53	107,00
2.	Munjungan	4	10,00
3.	Watulimo	18	27,00
4.	Kampak	6	71,00
5.	Dongko	10	26,00
6.	Pule	67	240,00
7.	Karangan	14	16,00
8.	Gandusari	11	48,00
9.	Durenan	6	21,00
10.	Pogalan	9	19,00
11.	Trenggalek	22	26,00
12.	Tugu	72	79,00
13.	Bendungan	50	68,00
14.	Suruh	19	19,00
Total		**361**	**777,00**

Sumber : RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Jumlah sumber air terbayak ada di Kecamatan Tugu, sedangkan sumber air paling sedikit ada di Kecamatan Munjungan. Sumber air di Kabupaten Trenggalek perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Air tanah atau juga disebut air artesis merupakan air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, diantara dua lapisan kedap air. Air tanah dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih melalui pengeboran ataupun sumur di permukiman penduduk. Keberadaan air tanah sangat tergantung pada curah hujan dan kemampuan peresapan air ke dalam tanah. Kondisi air tanah di Kabupaten Trenggalek cukup bervariasi. Potensi air tanah terbesar terdapat di Kecamatan Bendungan. Sedangkan produktifitas air tanah sedang terletak di kawasan dataran. Selain air tanah dalam, Kabupaten Trenggalek juga memiliki air permukaan. Air permukaan sebagian besar berupa sungai besar dan anak sungai. Setiap sungai tentunya memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kondisi lingkungan DAS akan mempengaruhi debit sungai. Luas DAS di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini.

Tabel II-5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Trenggalek

No.	*Nama Sungai*	*Panjang Sungai (Km)*	*Debit Air (m^3/detik)*
1	Bagong	22,5	5,441
2	Sukun	11,00	Tidak ada alat ukur
3	Prambon	13,50	1,482
4	Kedungmoro	8,50	0,042
5	Klumutan	4,00	Tidak ada alat ukur
6	Jolok	2,25	Tidak ada alat ukur
7	Ngasinan	41,50	3,131
8	Klitik	7,25	Tidak ada alat ukur
9	Munjungan	5,50	4,082
10	Anjok	2,00	Tidak ada alat ukur
11	Darungan	4,50	Tidak ada alat ukur
12	Ngepeh	8,00	0,516
13	Duren	7,50	Tidak ada alat ukur
14	Mlinjon	19,00	4,781
15	Jati	15,00	1,668
16	Tawing	27,00	0,120
17	Gedangan	36,50	5,778
18	Konang	17,00	3,209
19	Ngulung	6,00	Tidak ada alat ukur
20	Bungur	2,00	Tidak ada alat ukur
21	Craken	5,00	Tidak ada alat ukur
22	Tumpak Nongko	14,00	Tidak ada alat ukur
23	Songo	4,00	Tidak ada alat ukur
24	Karanggandu	3,50	Tidak ada alat ukur
25	Bubuk	2,00	Tidak ada alat ukur
26	Ngemplak	10,50	Tidak ada alat ukur
27	Sowan	5,50	Tidak ada alat ukur
28	Dongko	13,50	Tidak ada alat ukur

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Pada wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat banyak aliran sungai, baik besar maupun kecil. Di bagian utara terdapat 2 (dua) sungai besar yang mengalir ke selatan, yaitu Sungai Bagong dan Sungai Pinggir. Sungai Ngasinan merupakan muara beberapa sungai yang cukup besar, yaitu dari utara Sungai Bagong yang bermuara di Kelurahan Tamanan dan Sungai Prambon yang bermuara di Kecamatan Tugu, dan barat Sungai Pinggir yang bermuara di Kecamatan Tugu dan dari selatan Sungai Nglongah (Mlinjon) yang bermuara di Kecamatan Trenggalek, sebelum masuk DAM Dawung menyatu dengan Sungai Munjungan. Sungai-sungai yang berada di DAS Brantas sebagian besar digunakan untuk irigasi dan sebagian masuk ke PLTA Niyama. Sedangkan di bagian selatan terdapat sungai besar yang mengalir ke Samudera Indonesia, yaitu Sungai Gedangan berhulu di Kecamatan Pule, Dongko dan Panggul; Sungai Konang di Kecamatan Dongko dan Panggul. Sungai Tumpak Nongko di Kecamatan Munjungan; Sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, untuk lahan pertanian masih lebih besar dibanding dengan lahan bukan pertanian dengan rata-rata 91% lahan pertanian dan 9,% digunakan untuk lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan pertanian pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 terus mengalami penurunan yaitu terlihat pada luasan lahan pertanian dengan jumlah luasan 115.146 Ha di tahun 2015, sebesar 114.634 Ha di tahun 2016 dan sebesar 114.616 Ha pada tahun 2017. Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada **Tabel** berikut ini:

Tabel II-6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017

No	Penggunaan Lahan		Luas (Ha) Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1	**Lahan Pertanian**		**115.146**	**114.634**	**114.616**
	1.1	**Lahan Sawah**			
		a. Irigasi Teknis	11.600	11.626	11.396
		b. Tadah Hujan	1.216	1.255	1.485
		c. Rawa Pasang Surut	-	-	-
		d. Rawa Lebak	-	-	-
		Jml Lahan Sawah	**12.816**	**12.881**	**12.881**
	1.2	**Lahan Bukan Sawah**			
		a. Tegal/kebun	25.440	25.666	25.579
		b. Ladang huma	1.655	1.435	1.435
		c. Perkebunan	2.536	2.536	2.536
		d. Ditanami/ hutan rakyat	5.756	5.754	5.754
		e. Padang Penggembalaan/padang rumput	-	-	-
		f. Sementara tidak diusahakan *)	-	-	-
		g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll)	66.943	66.362	66.431
		Jumlah Lahan Bukan Sawah	**102.330**	**101.735**	**101.735**
2	**Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)**		**10.994**	**11.506**	**11.524**
	Jumlah Total		**126.140**	**126.140**	**126.140**

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

**) Lebih dari 1 tahun tetapi <2 tahun, termasuk lahan sawah yg tidak diusahakan >2 tahun*

Wilayah Kabupaten Trenggalek terletak dalam lintasan rencana Jalan Lintas Selatan wilayah Jawa Timur yang membentang dari Kabupaten Pacitan sampai dengan Banyuwangi yang nantinya merupakan jalur transportasi utama lintas selatan Pulau Jawa bagian timur lewat jalur darat. Bagian selatan wilayah Kabupaten Trenggalek berhadapan dengan Samudera Hindia dan lautan bebas yang merupakan jalur transportasi laut utama dunia menuju Benua Australia.

Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) seluas ± 35.558 km^2 dan wilayah kepulauan yang tersebar di Kawasan Selatan Kabupaten Trenggalek. Jumlah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek sebanyak 57 pulau, yang keseluruhannya masih belum berpenghuni. Pulau terluar dari wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Pulau Panikan dan Pulau Sekel. Kawasan pesisir di beberapa lokasi dalam beberapa kurun waktu terakhir terjadi abrasi. Gelombang pasang air laut mengikis tebing, batu karang dan daratan. Di beberapa lokasi juga terjadi kerusakan hutan mangrove, baik akibat ulah manusia maupun faktor alam. Kondisi ini menuntut diadakannya konservasi dalam rangka melindungi kawasan lingkungan pesisir.

Tabel II-7. Nama Pulau di Kabupaten Trenggalek

No	Nama Pulau	Wilayah Kecamatan	No	Nama Pulau	Wilayah Kecamatan
1	KLOMPOK KIDUL	Munjungan	30	LUMBUNG	Panggul
2	SASAH	Munjungan	31	KARANGMALANG	Panggul
3	CIGAR	Munjungan	32	KUYON	Panggul
4	ALES	Munjungan	33	KONYELAN	Panggul
5	ANAK CIGAR	Munjungan	34	BANYUTARUNG	Panggul
6	PANIKAN	Munjungan	35	SRUWI LOR	Watulimo
7	WATUPAYUNG	Munjungan	36	SRUWI KIDUL	Watulimo
8	PERCAK	Munjungan	37	SEGUNUNG	Watulimo
9	PERCAK WETAN	Munjungan	38	KARANGPEGAT	Watulimo
10	PERCAK TENGAH	Munjungan	39	WATUDUKUN	Watulimo
11	PERCAK KULON	Munjungan	40	NGEMBENG	Watulimo
12	KALONGAN	Munjungan	41	WATULAJER	Watulimo
13	KALONGAN CILIK	Munjungan	42	SRUWI	Watulimo
14	KLOMPOK LOR	Munjungan	43	BRENGGOLO	Watulimo
15	PRENJONO	Munjungan	44	SIKLOPO	Watulimo
16	PRENJONO WETAN	Munjungan	45	SOSARI	Watulimo
17	PRENJONO KULON	Munjungan	46	SOSARI CILIK	Watulimo
18	WERU	Munjungan	47	SOSARI LOR	Watulimo
19	WATUPRAU	Munjungan	48	SOLIMO WETAN	Watulimo
20	ENDASBAJUL	Munjungan	49	SOLIMO TENGAH	Watulimo
21	KAPULOGO	Munjungan	50	SOLIMO KULON	Watulimo
22	KEMPONG	Munjungan	51	SOLIMO	Watulimo
23	WATUGAMPIRAN	Munjungan	52	BOYOLANGU	Watulimo
24	TEANG	Panggul	53	TAMENGAN	Watulimo
25	TEANG LOR	Panggul	54	ANAKAN	Watulimo
26	TEANG KIDUL	Panggul	55	MBATANG	Watulimo
27	GODO	Panggul	56	BABATAN	Watulimo
28	GODO CILIK	Panggul	57	SEKEL	Watulimo
29	JARAN	Panggul			

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2018

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

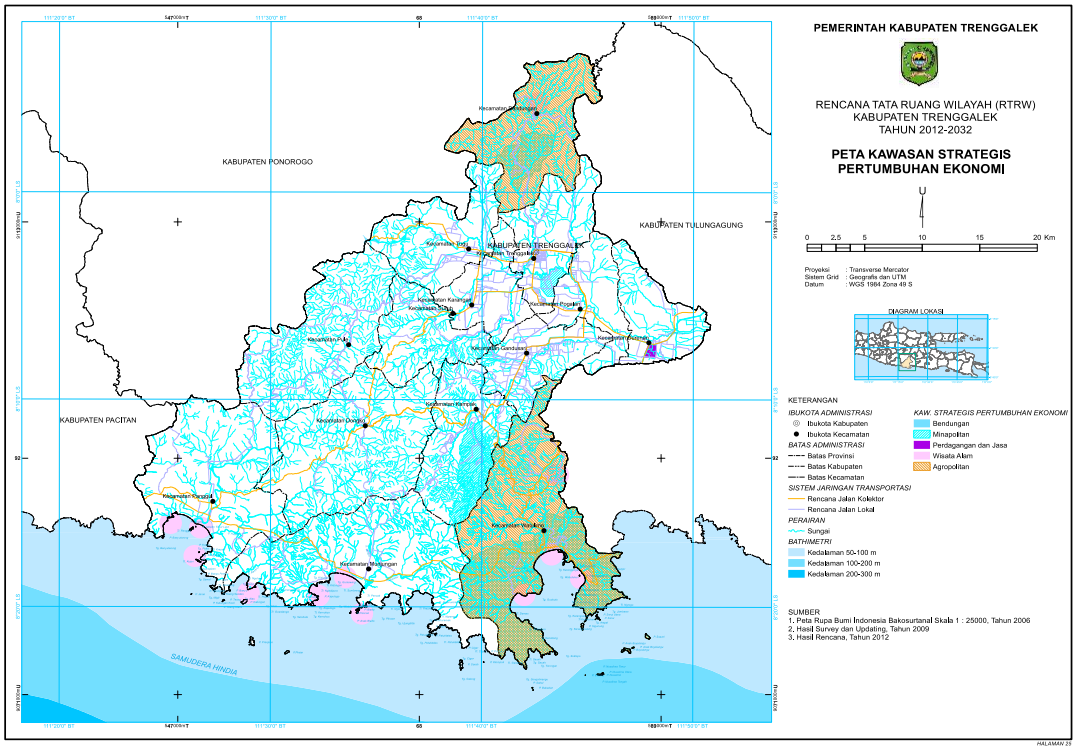
Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 diprioritaskan pada kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/propinsi/ kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pada RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 telah ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Antara lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis kerjasama regional (GOLEK PAWON dan Selingkar Wilis), kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas Durenan, serta kawasan strategis Bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai, dan kawasan lindung *karst*. Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan strategis sempadan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, di Kabupaten Trenggalek terdapat program strategis nasional berupa pembangunan Bendungan Bagong dan Bendungan Kampak. Selain itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, Kabupaten Trenggalek masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Nasional 12 yang meliputi Jogja-Prigi-Blitar-Malang.



Sumber : RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Gambar II-3. Peta Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan, serta kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan usaha didaerah yang bersangkutan.

Dalam penerapan strategi pembangunan ekonomi daerah, tentunya peran pemerintah cukup penting dan menonjol, dimana salah satu peran yang dapat dijalankan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah adalah dengan membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi. Hal ini akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dsb. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia). Keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

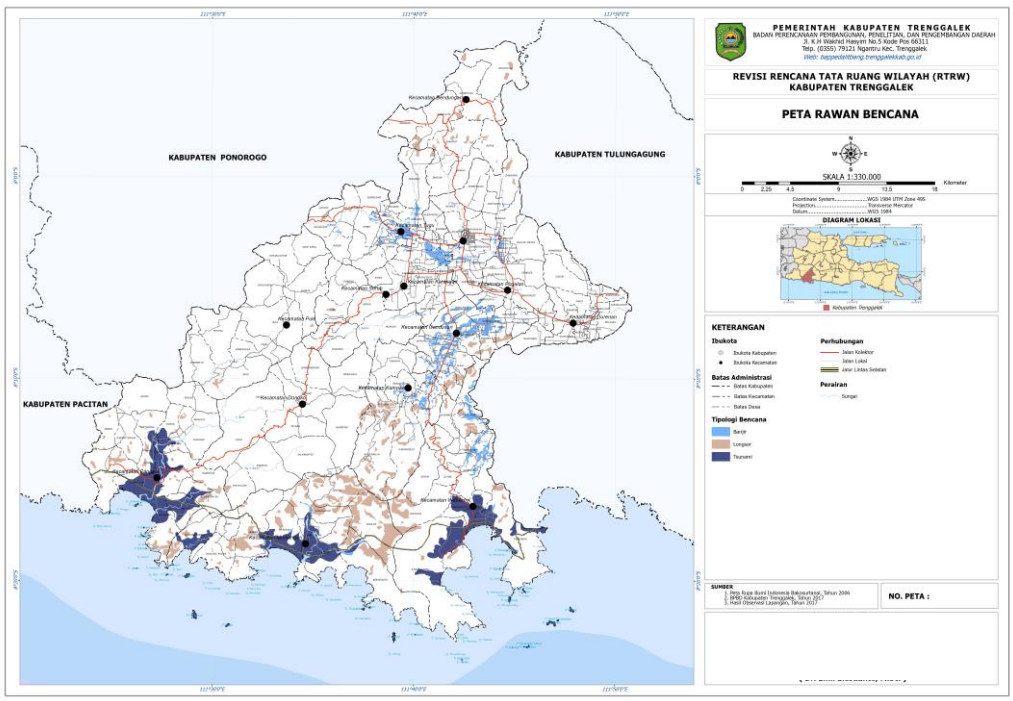
Sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten Trenggalek yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 (dua) faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Selain longsor, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah banjir di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah.

Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar ± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan.

Luasan kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1.689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2.145 ha. Peta kawasan potensi rawan bencana Kabupaten Trenggalek pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada **Gambar** berikut.



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Gambar II-4. Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2017 sebanyak 761.730 jiwa, terjadi penurunan sebesar 12.196 jiwa dibanding tahun 2016 yang tercatat sebanyak 773.926 jiwa. Hal ini disebabkan oleh :

a. Adanya penghapusan data ganda sebesar 5.075 jiwa;
b. Adanya pemutakiran data yaitu data penduduk yang tidak bergerak antara lain data yang tidak wajar serta penghapusan data karena kematian yaitu data penduduk yang secara riil sudah meninggal di masa lampau belum bisa dilaksanakan penghapusan database kependudukannya jika tidak disertai dengan penerbitan akta kematiannya namun dengan adanya pemutakiran data anomaly maka atas dasar surat permohonan penghapusan database kependudukan serta laporan kematian dari Kepala Desa maka sudah bisa dilaksanakan penghapusan database kependudukan tanpa harus menerbitkan akta kematiannya yaitu sebesar 7.235 jiwa; dan
c. Jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Trenggalek sebesar 4.772 jiwa. Hal ini lebih besar dari pada jumlah penduduk yang pindah dari Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 4.658 jiwa, sehingga terdapat selisih 114 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dapat disajikan sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel II-8. Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 - 2017

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	813.418	827.873	836.778	837.755	797.275	773.926	761.730
2	Laki – Laki	Jiwa	410.955	418.622	422.869	422.009	401.284	390.120	381.951
3	Perempuan	Jiwa	402.463	409.250	413.909	415.746	395.991	383.806	379.779

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek , 2018

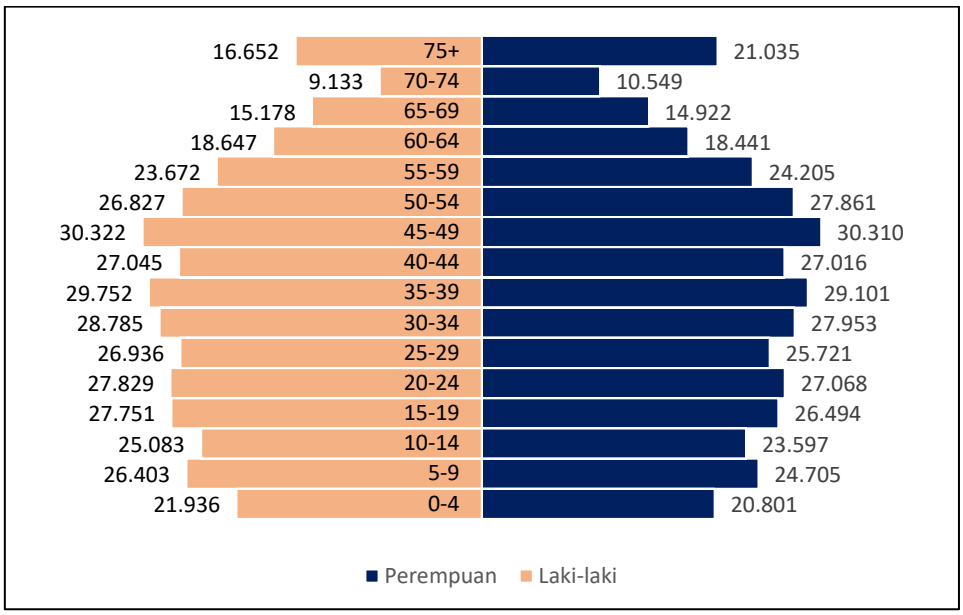
Jumlah penduduk pada Tahun 2017 terdiri dari laki-laki berjumlah 381.951 jiwa atau 50,14% dan penduduk perempuan berjumlah 379.779 jiwa atau 49,86% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagaimana **Tabel** berikut:

Tabel II-9. Karakteristik Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2017
(Hasil Registrasi Penduduk Akhir Desember 2017)

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)			Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	PANGGUL	41.123	40.593	81.716	621,13
2	MUNJUNGAN	27.515	26.718	54.233	350,34
3	PULE	29.180	28.790	57.970	490,77
4	DONGKO	34.783	33.896	68.679	486,40
5	TUGU	24.939	25.510	50.449	675,17
6	KARANGAN	25.528	25.874	51.402	1.009,47
7	KAMPAK	19.426	19.350	38.776	490,84
8	WATULIMO	36.788	36.216	73.004	472,70
9	BENDUNGAN	14.177	14.090	28.267	311,17
10	GANDUSARI	27.110	27.097	54.207	986,30
11	TRENGGALEK	33.642	34.047	67.689	1.106,75
12	POGALAN	27.621	27.447	55.068	1.317,42
13	DURENAN	26.401	26.487	52.888	925,26
14	SURUH	13.718	13.664	27.382	539,87
Jumlah		**381.951**	**379.779**	**761.730**	**603,88**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2018

Grafik II-1. Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2017



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2018

Dari piramida penduduk tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling tinggi pada kelompok umur 45-49 tahun yakni sebesar 60.632 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 30.322 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 30.310 jiwa, dan untuk kelompok umur 5-9 tahun jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kelompok umur jenis kelamin perempuan. Adapun kelompok umur penduduk jika dipersentase berdasarkan usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2016-2017 sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel II-10. SDM Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2016-2017 Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Th. 2016		Th. 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	0-4	44.387		42.737	
2	5-9	49.758	**18,67**	51.108	**18,71**
3	10-14	50.329		48.680	
4	15-19	54.814		54.245	
5	20-24	56.362		54.897	
6	25-29	54.253		52.657	
7	30-34	63.408	**44.66**	56.738	**43,51**
8	35-39	58.639		58.853	
9	40-44	58.159		54.061	
10	45-49	59.413		60.632	
11	50-54	55.137		54.688	
12	55-59	46.966	**25,42**	47.877	**26,29**
13	60-64	35.243		37.088	
14	65-69	29.061		30.100	
15	70-74	21.106	**11.25**	19.682	**11,48**
16	75+	36.891		37.687	
	Jumlah	**773.926**	**100**	**761.730**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Trenggalek. Ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunannya. Namun perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya tentang perekonomian suatu daerah. Terdapat kemungkinan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, tetapi sebagian masyarakat daerah tersebut tidak ikut menikmati pembangunan karena sebagian pendapatan dinikmati penduduk daerah lain.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya tahunan yang disajikan dalam besaran persen. Dalam pemahaman umum adanya pertumbuhan disebabkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebesar 5,00 persen, melambat dibanding Tahun 2015 yang sebesar 5,03 persen, Di bawah ini ditampilkan **Tabel** pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek menurut lapangan usaha Tahun 2011-2016.

Tabel II-11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (*persen*)

	Lapangan Usaha	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	5,78	4,58	4,33	4,23	3,50
B	Pertambangan dan Penggalian	3,32	0,55	1,41	2,98	4,14	3,54
C	Industri Pengolahan	3,78	5,68	5,60	7,07	6,16	4,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,73	9,12	1,98	0,19	-2,59	3,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,63	6,37	6,44	2,57	4,92	5,11
F	Konstruksi	8,00	7,02	8,64	6,49	2,88	5,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,14	6,33	5,99	4,08	5,32	5,91
H	Transportasi dan Pergudangan	5,79	8,69	9,64	9,47	6,84	6,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,14	7,71	7,42	7,46	7,32	7,40
J	Informasi dan Komunikasi	11,29	14,52	13,86	8,15	7,31	7,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,33	11,05	11,45	5,38	5,32	7,24
L	Real Estat	8,29	8,71	7,42	7,02	5,61	5,53
M,N	Jasa Perusahaan	6,71	6,65	5,63	8,02	5,57	5,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,27	2,14	1,48	0,98	5,21	5,26
P	Jasa Pendidikan	8,40	8,94	8,95	6,24	6,02	6,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,61	11,08	7,45	13,80	1,41	6,11
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,42	4,55	6,30	7,61	4,71	4,96
	Kab. Trenggalek	**5,94**	**6,21**	**6,00**	**5,28**	**5,03**	**5,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Dari **Tabel** di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,79 persen. Disusul lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,40 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 5 persen di tahun 2016 ialah Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,97 persen, Jasa Kesehatan sebesar 6,11 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,02 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,91 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,91 persen, Real Estat sebesar 5,53 persen, Jasa Perusahaan sebesar 5,42 persen, Konstruksi sebesar 5,16 persen, Administrasi Pemerintahan, Petanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,26 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,11 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,50 persen.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari Tahun 2011-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek masih berada di bawah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dicapai Provinsi Jawa Timur tetapi masih di atas kisaran laju pertumbuhan ekonomi nasional bahkan cenderung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel** dan **Grafik** dibawah ini.

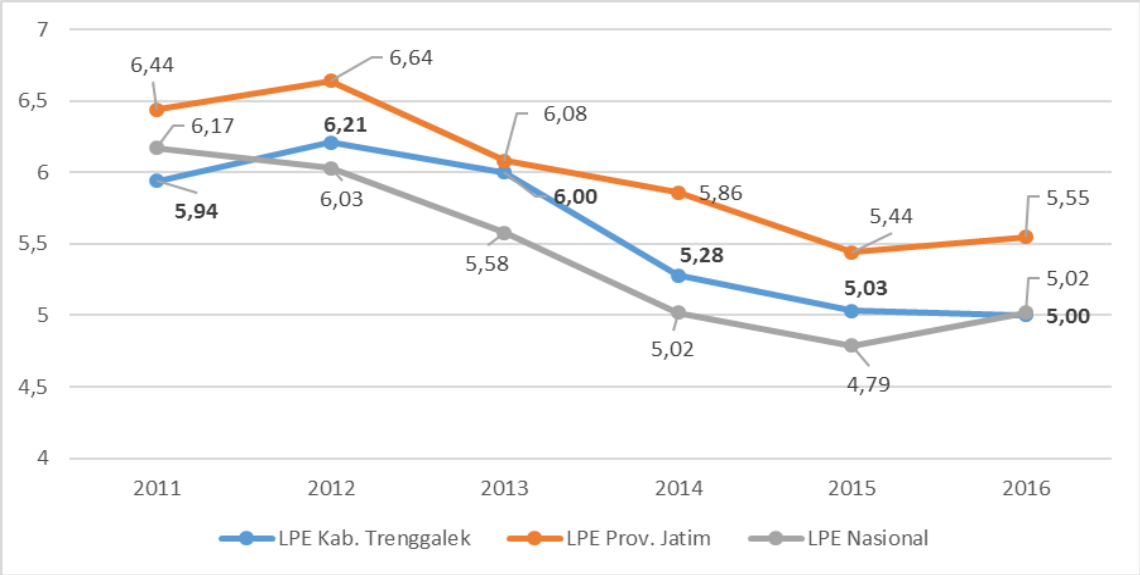
Tabel II-12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011–2016

LPE	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Kab. Trenggalek	5,94	6,21	6,00	5,28	5,03	5,00
Prov. Jatim	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55
Nasional	6,17	6,03	5,58	5,02	4,79	5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Berdasarkan **Tabel** laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional di atas jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagaimana disampaikan di bawah :

Grafik II-2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011–2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki *residen* atau *non-residen*. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (*riil*). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (*riil*) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan.

Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional maupun regional. Krisis finansial global yang terjadi pada Tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (AFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional. Adaptasi pencatatan statistik nasional salah satunya adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB di tingkat nasional dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB. Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

a) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b) Meningkatkan kualitas data PDRB;
c) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Adapun pergeseran harga tahun dasar, akan memberikan beberapa dampak antara lain:

a) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
b) Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Demikian juga untuk mengukur struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada Tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.14,9 Triliun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 mencapai Rp. 11 Triliun.

Tabel II-13. Capaian PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2016 (*Juta Rupiah*)

Tahun	*PDRB ADHB*	*PDRB ADHK*
2011	8.944.130,71	8.435.218,82
2012	9.969.195,17	8.959.464,30
2013	11.007.902,69	9.496.726,85
2014	12.298.014,92	9.998.366,00
2015	13.632.405,61	10.500.809,11
2016	14.915.998,47	11.026.549,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu 2011-2016 berdasarkan Tabel dibawah, ternyata didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDRB Trenggalek. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang pegunungan dan bukit, juga aktivitas masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada kategori lapangan usaha ini. Berikutnya, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dan Kategori C (Industri Pengolahan) juga besar peranannya terhadap perekonomian di Trenggalek. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha tersebut terhadap total PDRB.

Sumbangan terbesar pada Tahun 2016 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,92 persen. Sementara lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 15,43 persen dan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 14,02 persen. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil dengan capaian 0,05 persen.

Tabel II-14. Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 (*persen*)

	Lapangan Usaha	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,21	30,09	30,45	31,15	31,42	30,92
B	Pertambangan dan Penggalian	7,20	6,58	6,25	6,49	6,49	6,35
C	Industri Pengolahan	14,40	14,18	13,97	14,02	14,08	14,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
F	Konstruksi	7,27	7,33	7,44	7,67	7,40	7,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,75	16,23	16,04	15,25	15,04	15,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,23	1,27	1,33	1,36	1,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,65	1,67	1,71	1,76	1,82	1,89
J	Informasi dan Komunikasi	4,86	5,07	5,25	5,09	5,11	5,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,47	2,57	2,57	2,60	2,67
L	Real Estat	1,99	1,96	1,98	1,90	1,96	1,95
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,92	4,94	4,68	4,29	4,23	4,29
P	Jasa Pendidikan	4,26	4,48	4,67	4,63	4,58	4,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79	0,79	0,82	0,82	0,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,80	2,64	2,59	2,70	2,76	2,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah di wilayah tersebut. Nilai tambah yang biasa diciptakan oleh penduduk sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku pada tahun yang bersangkutan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut memberikan arti bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek cenderung membaik.

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku merupakan pendapatan per kapita penduduk yang mencerminkan pendapatan yang diterima masing-masing penduduk akibat keikutsertaannya dalam proses ekonomi. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang perduduk, sedangkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dapat menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per satu orang perduduk. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Trenggalek dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan capaian sebagaimana **Tabel** berikut :

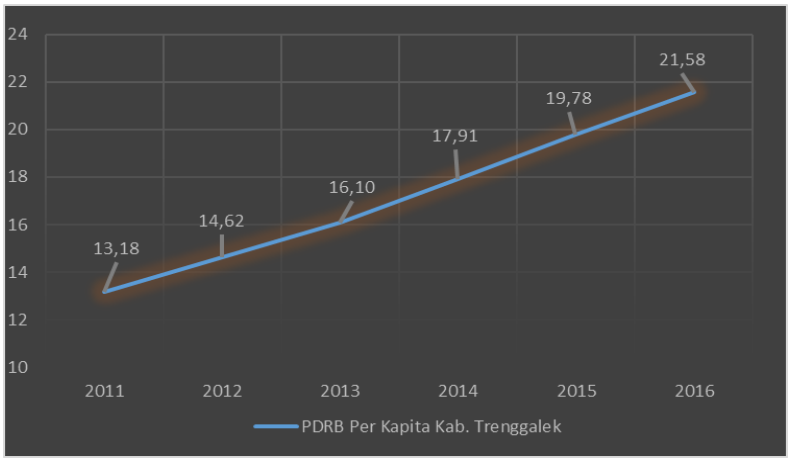
Tabel II-15. PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016
Menurut lapangan usaha (juta rupiah)

	Lapangan Usaha	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,85	4,40	4,90	5,58	6,21	6,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,96	1,01	1,16	1,28	1,37
C	Industri Pengolahan	1,90	2,07	2,25	2,51	2,78	3,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	0,96	1,07	1,20	1,37	1,46	1,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,21	2,37	2,58	2,73	2,98	3,33
H	Transportasi dan Pergudaan	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,24	0,27	0,32	0,36	0,41
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,74	0,84	0,91	1,01	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,31	0,36	0,41	0,46	0,51	0,58
L	Real Estat	0,26	0,29	0,32	0,34	0,39	0,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,65	0,72	0,75	0,77	0,84	0,92
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,65	0,75	0,83	0,91	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,37	0,39	0,42	0,48	0,55	0,58
	PDRB Perkapita	**13,18**	**14,62**	**16,10**	**17,91**	**19,78**	**21,58**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Jika total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2015, PDRB per kapita Trenggalek mencapai Rp.19,78 juta atau meningkat 10,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek mencapai Rp. 21,58 juta atau meningkat 9,10 persen jika dibandingkan Tahun 2015.

Grafik II-3. PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Dari grafik di atas tampak bahwa PDRB per kapita Kabupaten Trenggalek 5 (lima) tahun terakhir setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Trenggalek dari tahun ke tahun semakin membaik.

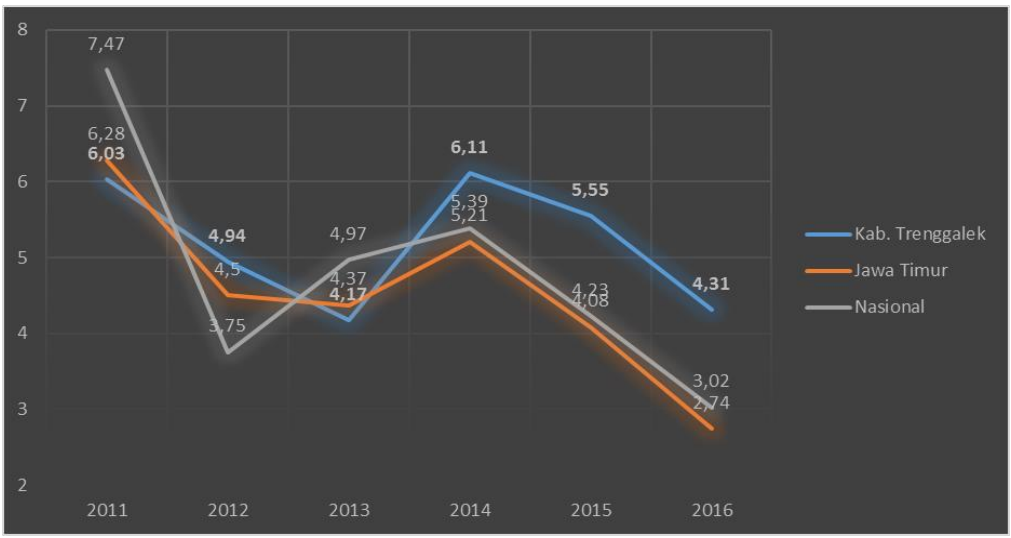
2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Laju inflasi pada Tahun 2011 sebesar 6,03%, pada Tahun 2012 sebesar 4,94%, pada Tahun 2013 sebesar 4,17%, pada Tahun 2014 sebesar 6,11% dan pada Tahun 2015 sebesar 5,55%, Tahun 2016 laju inflasi menurun menjadi sebesar 4,31%. Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi yang terjadi berkisar pada 5%-6% dan termasuk kategori ringan (<10%). Jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, khususnya pada Tahun 2015 inflasi Kabupaten Trenggalek di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk lebih jelasnya mengenai inflasi Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada **Grafik** di bawah ini :

Grafik II-4. Inflasi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 – 2015 (*persen*)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

2.2.1.5. Indeks Gini (*Gini Ratio)*

Indeks Gini atau atau *Gini Ratio* atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). *Gini Ratio* bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, *Gini Ratio* bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, *Gini Ratio* diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jika *Gini Ratio* bernilai kurang dari 0,3 maka berarti ketimpangan rendah, sedangkan *Gini Ratio* diantara atau sama dengan 0,3-0,5 itu berarti ketimpangan sedang, dan jika lebih dari 0,5 berarti menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2013 Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,35 mengalami penurunan pada Tahun 2014 menjadi 0,31. Pada Tahun 2015 *Gini Ratio* di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,37. Sedangkan Tahun 2016 Gini Ratio kembali menurun menjadi 0,36 lebih rendah jika dibandingkan Gini ratio Jawa Timur yang mencapai 0,40, itu menggambarkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan pendapatan Jawa Timur.

Tabel II-16. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
Trenggalek	0,34	0,32	0,35	0,31	0,37	0,36
Jawa Timur	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,37**	**0,39**	**0,40**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pengertian **Penanggulangan Kemiskinan** adalah : kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan **Program Penanggulangan Kemiskinan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan **kemiskinan** merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : pendapatan, pendidikan, lokasi, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Akibatnya, meski tergolong miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Terdapat 2 (dua) jenis data kemiskinan yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro atau yang biasa disebut Angka Kemiskinan adalah Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data kemiskinan yang memuat data rumah tangga miskin beserta karakteristiknya.

Data kemiskinan makro adalah data kemiskinan makro yang memuat Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Data ini diperoleh berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan tiap tahun di Indonesia, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga dapat dihitung *Headcount Index* (P0), yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

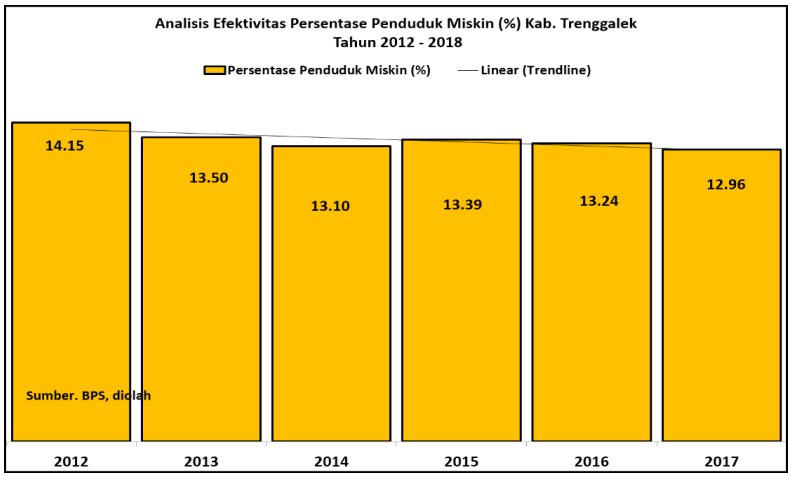
Berdasarkan data kemiskinan makro, penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2011-2017 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 101.200 jiwa (14,90%) kemudian untuk Tahun 2014 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 89.968 jiwa (13,10%). Sedangkan pada Tahun 2015 data terbaru dari BPS jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 92.170 jiwa (13,39%) dan kembali turun pada Tahun 2016 menjadi 91.490 jiwa (13,24%). Pada Tahun 2017 kembali turun menjadi 89.770 jiwa (12,96%). Dari data tersebut, angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun angka ini masih di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur (11,77%) dan Nasional (10,12%) sehingga perlu upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II-17. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017

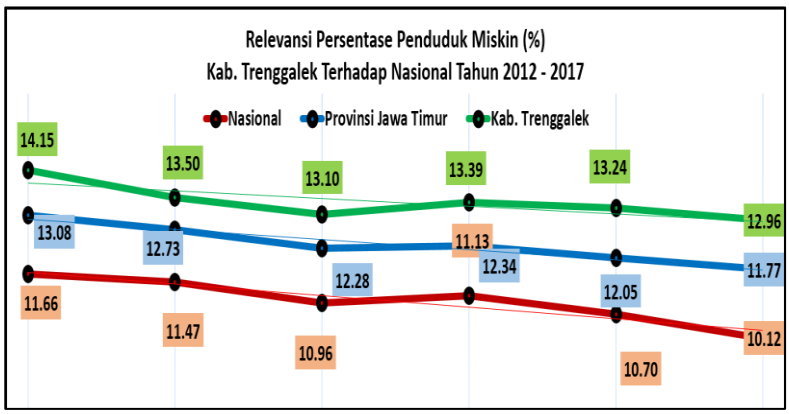
Kabupaten/ Kota	2016					2017					Perubahan P0	Kenaikan Garis Kemiskinan (%)
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp / Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)		
Pacitan	85,33	15,49	2,86	0,79	239,339	85,26	15,42	2,14	0,48	250,942	-0,07	4,85
Ponorogo	102,06	11,75	1,47	0,28	266,312	99,03	11,39	1,41	0,27	279,168	-0,36	4,83
Trenggalek	**91,49**	**13,24**	**1,74**	**0,37**	**275,426**	**89,77**	**12,96**	**1,71**	**0,40**	**288,779**	**-0,28**	**4,85**
Tulungagung	84,35	8,23	0,98	0,18	304,518	82,80	8,04	0,82	0,16	314,532	-0,19	3,29
Blitar	113,51	9,88	1,53	0,35	272,358	112,93	9,80	1,16	0,22	285,474	-0,08	4,82
Kediri	197,43	12,72	1,66	0,37	272,374	191,08	12,25	1,75	0,39	281,012	-0,47	3,17
Malang	293,74	11,49	1,57	0,33	282,933	283,96	11,04	1,83	0,43	294,904	-0,45	4,23
Lumajang	115,91	11,22	1,62	0,35	258,840	112,65	10,87	1,60	0,37	267,366	-0,35	3,29
Jember	265,10	10,97	1,33	0,29	299,823	266,90	11,00	1,33	0,28	310,650	-0,03	3,61
Banyuwangi	140,45	8,79	1,41	0,34	311,722	138,54	8,64	1,15	0,24	319,236	-0,15	2,41
Bondowoso	114,63	15,00	2,54	0,64	331,975	111,66	14,54	2,11	0,48	243,124	-0,46	3,36
Situbondo	89,68	13,34	1,79	0,39	270,406	88,23	13,05	1,77	0,38	276,924	-0,29	2,41
Probolinggo	240,47	20,98	3,24	0,80	372,569	236,72	20,52	3,34	0,84	384,343	-0,46	2,88
Pasuruan	168,06	10,57	1,56	0,33	306,311	165,64	10,34	1,67	0,44	315,145	-0,23	2,88
Sidoarjo	136,79	6,39	0,95	0,23	394,401	135,42	6,23	1,05	0,25	414,479	-0,16	5,09
Mojokerto	115,38	10,61	1,53	0,35	330,940	111,79	10,19	1,70	0,46	345,487	-0,42	4,40
Jombang	133,32	10,70	1,26	0,25	337,217	131,16	10,48	1,63	0,39	353,456	-0,22	4,82
Nganjuk	127,90	12,25	1,72	0,36	341,653	125,52	11,98	1,73	0,40	358,216	-0,27	4,85
Madiun	85,97	12,69	2,08	0,56	294,451	83,43	12,28	2,65	0,78	306,769	-0,41	4,18
Magetan	69,24	11,03	1,37	0,26	288,246	65,87	10,48	1,53	0,37	297,874	-0,55	3,34
Ngawi	126,65	15,27	2,30	0,52	264,706	123,76	14,91	1,98	0,40	277,539	-0,36	4,85
Bojonegoro	180,99	14,60	2,41	0,54	295,250	178,25	14,34	2,31	0,52	309,564	-0,26	4,85
Tuban	198,35	17,14	3,03	0,82	294,543	196,10	16,87	3,29	0,91	308,822	-0,27	4,85
Lamongan	176,92	14,89	2,40	0,66	321,002	171,38	14,42	2,53	0,66	335,783	-0,47	4,60
Gresik	167,12	13,19	2,19	0,56	393,447	164,08	12,80	2,51	0,71	441,261	-0,39	5,29
Bangkalan	205,71	21,41	4,00	1,13	334,338	206,53	21,32	3,49	0,91	349,073	-0,09	4,41
Sampang	227,80	24,11	4,19	1,05	296,268	225,13	23,56	3,32	0,72	307,606	-0,55	3,83
Pamekasan	142,32	16,70	2,38	1,54	292,631	137,77	16,00	1,66	0,33	302,431	-0,70	3,35
Sumenep	216,14	20,09	2,90	0,75	301,781	211,92	19,62	1,78	0,23	313,330	-0,47	3,83
Kota Kediri	23,64	8,40	0,96	0,20	400,096	24,07	8,49	0,99	0,19	420,712	0,09	5,15
Kota Blitar	9,97	7,18	1,04	0,20	356,147	11,22	8,03	0,93	0,24	383,021	-0,85	7,55
Kota Malang	37,03	4,33	0,54	0,09	426,527	35,89	4,17	0,56	0,12	454,061	-0,16	6,46
Kota Probolinggo	18,37	7,97	0,98	0,20	418,480	18,23	7,84	0,92	0,18	437,392	-0,13	4,52
Kota Pasuruan	14,93	7,62	1,35	0,32	362,224	14,85	7,53	0,58	0,09	378,593	-0,09	4,52
Kota Mojokerto	7,24	5,73	0,62	0,13	364,021	7,28	5,73	0,67	0,13	391,489	0,00	7,55
Kota Madiun	9,05	5,16	0,94	0,26	376,956	8,70	4,94	0,61	0,13	404,959	-0,22	7,43
Kota Surabaya	161,01	5,63	0,92	0,25	438,283	154,71	5,39	1,10	0,33	474,365	-0,24	8,23
Kota Blitar	9,05	4,48	0,55	0,11	398,401	877,00	4,31	0,59	0,12	424,354	-0,17	6,51
Jawa Timur	**4.703,30**	**12,05**	**1,98**	**0,47**	**321,761**	4.617,01	11,77	1,87	0,45	342,092	-0,28	6,32

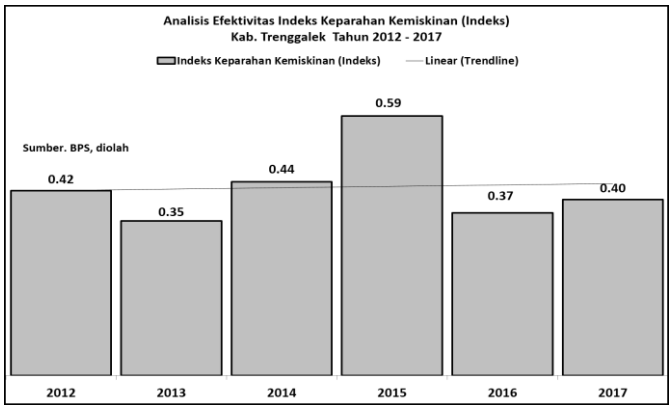
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2018

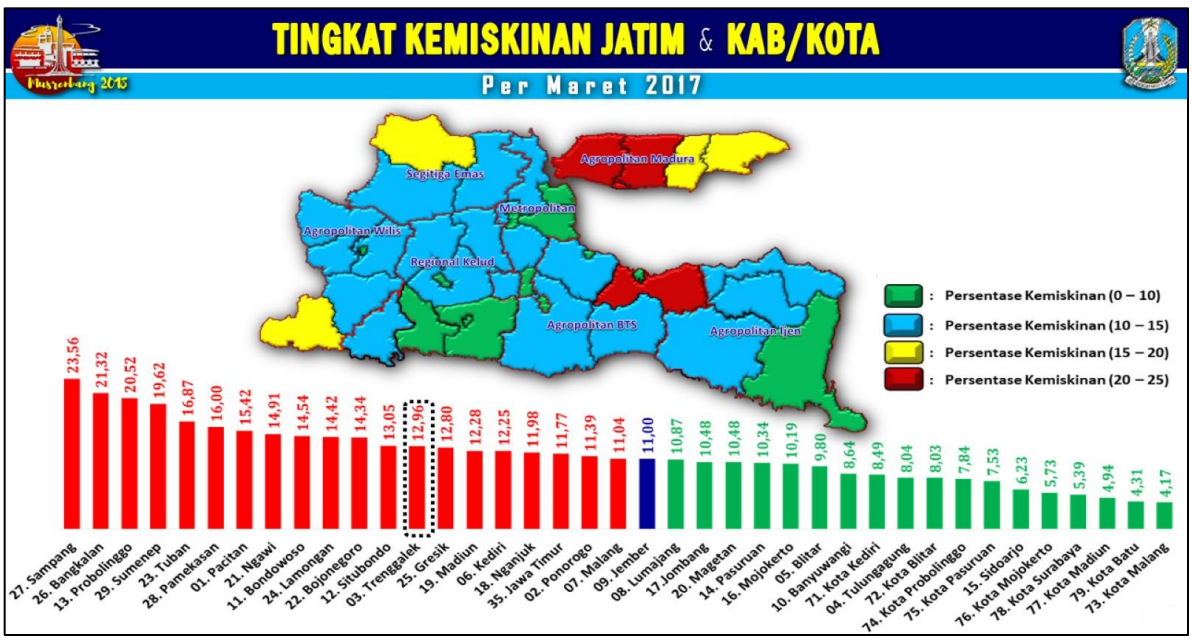
Grafik II-5. Data dan Informasi Kemiskinan Makro di Kabupaten Trenggalek











Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 (Diolah)

Data kemiskinan mikro adalah data kemiskinan yang memuat data rumah tangga miskin beserta karakteristiknya. Data ini diperoleh berdasarkan Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (BDT PPFM) Tahun 2017 yang merupakan hasil updating dari PBDT 2015 yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Perlu diketahui bahwa data Rumah Tangga Miskin terhadap total Rumah Tangga (persentase Penduduk Miskin terhadap jumlah penduduk) berdasarkan data PPLS, pendataannya terakhir dilaksanakan pada Tahun 2011, dan selanjutnya untuk Tahun 2012 sampai Tahun 2014 tidak dilakukan pendataan kembali. Baru pada tahun 2015 dilaksanakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015. Berdasarkan Data Agregat Kemiskinan Menurut Status Kesejahteraan Basis Data Perpadu (PBDT) Tahun 2017, Jumlah Rumah Tangga Sasaran desil 1-4 (40% terendah di Indonesia) di Kabupaten Trenggalek mencapai 83.078 Rumah Tangga. Sedangkan jumlah individu sasaran desil 1-4 di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 261.554 jiwa atau 34,34 % dari Total Jumlah Penduduk (hasil registrasi penduduk) di Kabupaten Trenggalek pada akhir Tahun 2017 yang mencapai 761.730 jiwa (Dispendukcapil Kab. Trenggalek).

Tabel II-18. Data Agregat Kemiskinan Mikro Per Kecamatan Di Kabupaten Trenggalek Menurut Status Kesejahteraan Tahun 2017
Sumber : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
PANGGUL	3.093	3.895	2.965	890	10.843	12.396	12.493	9.452	3.043	37.384
MUNJUNGAN	1.951	2.347	2.036	629	6.963	7.345	7.278	6.541	2.104	23.268
WATULIMO	780	1.236	1.229	463	3.708	2.839	3.500	3.285	1.302	10.926
KAMPAK	1.427	1.788	1.324	388	4.927	4.770	5.372	4.042	1.242	15.426
DONGKO	3.959	3.651	1.773	303	9.686	14.796	10.849	5.370	1.011	32.026
PULE	2.773	2.939	1.823	330	7.865	9.984	9.459	6.106	1.092	26.641
KARANGAN	588	1.484	1.645	682	4.399	1.930	4.120	4.636	2.176	12.862
SURUH	1.125	1.467	979	276	3.847	3.750	4.336	2.889	868	11.843
GANDUSARI	608	1.862	2.427	867	5.764	2.107	4.959	6.631	2.575	16.272
DURENAN	882	1.610	1.752	626	4.870	2.826	4.353	4.569	1.798	13.546
POGALAN	384	1.521	2.281	907	5.093	1.513	4.567	6.223	2.850	15.153
TRENGGALEK	700	1.265	1.370	652	3.987	2.411	3.526	3.729	1.885	11.551
TUGU	1.002	2.116	2.379	900	6.397	3.549	6.062	6.765	2.867	19.243
BENDUNGAN	2.069	1.815	728	117	4.729	7.587	5.332	2.106	388	15.413
TOTAL	**21.341**	**28.996**	**24.711**	**8.030**	**83.078**	**77.803**	**86.206**	**72.344**	**25.201**	**261.554**

Sumber : *Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.*

Keterangan :
Desil 1 : (Rumah Tangga/ Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
Desil 2 : (Rumah Tangga/ Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 20% terendah di Indonesia)
Desil 3 : (Rumah Tangga/ Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia)
Desil 4 : (Rumah Tangga/ Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia)

Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Pada periode lalu ada beberapa program yang diaplikasikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat seperti : PNPM Mandiri dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian juga ada program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti : Program JALIN KESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) dan sekarang ber-transformasi menjadi Program JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada periode yang lalu juga telah menyusun beberapa program-program inovasi dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya Program **TRENGGALEK** (*Trengginas Galang Ekonomi*) dan Program **APP** (*Anty Poverty Program*). Program-program semacam ini perlu terus dipertahankan dan didukung dengan program-program sejenis dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berperan mengkoordinasikan dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan tujuan utamanya adalah penurunan angka memiskinan.

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara umum konsep pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran penuh (pengangguran terbuka) dan pengangguran tidak penuh. Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

Salah satu penyebab masalah pengangguran yang tidak dapat dipungkiri adalah pola pikir pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Sementara di kedua lini tersebut, kesempatan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu pula kendala lainnya yang masih dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Penyebab lainnya lebih disebabkan iklim yang kurang bersahabat bagi petani yaitu panjangnya kemarau dalam setahun. Hal ini cukup beralasan mengingat mayoritas tenaga kerja di Trenggalek bergerak di sektor pertanian. Kemarau panjang mengakibatkan sebagian petani tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya atau menganggur.

TPT Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 mencapai 4,46% atau dapat dikatakan bahwa pada setiap 10.000 orang angkatan kerja terdapat 446 orang pengangguran, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2016 TPT Kabupaten Trenggalek turun menjadi sebesar 3,07%, dan pada tahun 2017 sebesar 3,48% dari target 4,35 – 4,40. Kenaikan TPT tahun 2016 ke 2017 ini akibat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan sektor perikanan yang tercatat sekitar 25.100 jiwa. Namun demikian jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur, angka TPT di Kabupaten Trenggalek tahun 2016 lebih kecil 1,14% dan pada tahun 2017 lebih kecil 0,52% sebagaimana dijelaskan pada **Tabel** berikut ini :

Tabel II-19. Perkembangan TPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2017

Kabupaten/Kota [1]	2008 [2]	2009 [3]	2010 [4]	2011 [5]	2012 [6]	2013 [7]	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)
Kabupaten Trenggalek	3,73	3,91	2,15	3,18	3,14	4,12	4,20	2,46	3,07	3,48
Jawa Timur 1)	**6,42**	**5,08**	**4,25**	**4,16**	**4,12**	**4,33**	**4,19**	**4,47**	**4,21**	**4,00**
Jawa Timur 2)	**4,84**									

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2008-2017
1) Menggunakan konsep baru/diperluas
2) Menggunakan konsep lama (hanya yang mencari kerja saja)

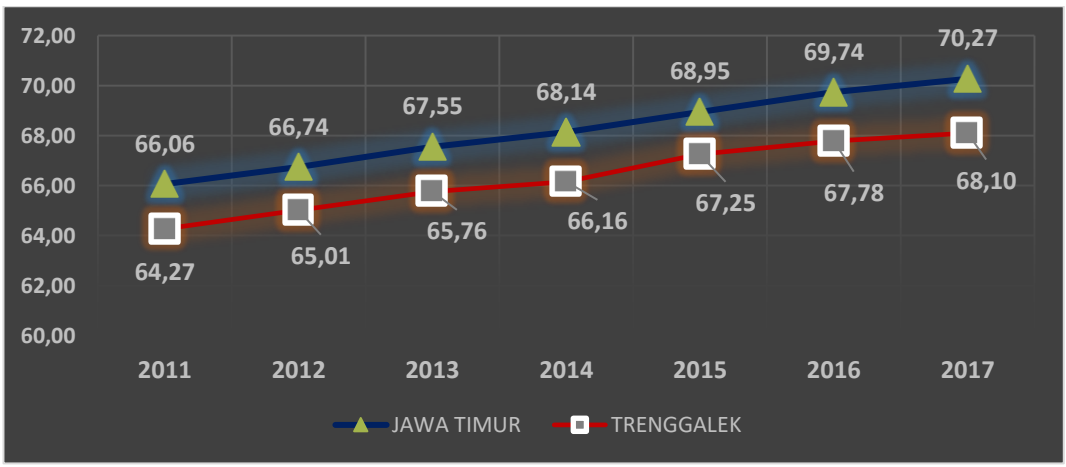
Berdasarkan data tersebut di atas, maka kedepan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Trenggalek seyogyanya lebih diarahkan pada upaya-upaya untuk penciptaan lapangan kerja baru, semisal peningkatan investasi baik oleh Pemerintah maupaun dari swata (Badan hukum publik/ privat) dengan salah satunya memperbesar struktur belanja modal yang lebih produktif.

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya IPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 sebesar 64,27 kemudian Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 65,01, IPM Tahun 2013 sebesar 65,76, pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 66,16, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 67,25, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 67,78, dan pada tahun 2017 IPM Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 68,10. IPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 lebih rendah dari pada capaian IPM Provinsi Jawa Timur. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2011 – 2017 terlihat pada **Grafik** dibawah :

Grafik II-6. IPM Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek (penghitungan metode baru), 2018

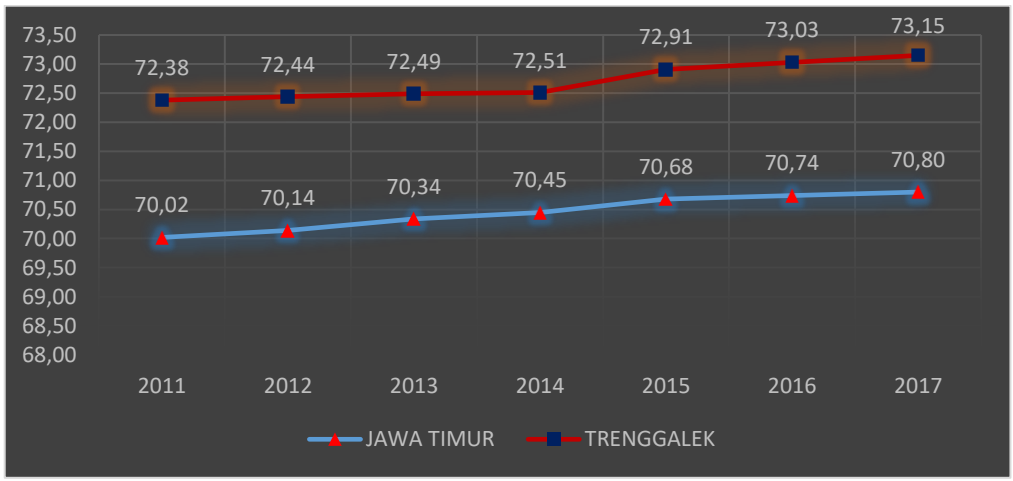
Capaian IPM tersebut di atas diperoleh dari 4 (empat) indikator pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), EYS (*Expected Years of Schooling* : angka harapan lama sekolah), MYS (*Mean Years of Schooling* : rata-rata lama sekolah) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Perbandingan capaian 4 (empat) indikator pembentuk IPM Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Sebagaimana penghitungan IPM menggunakan metode baru maka dapat dihasilkan capaian AHH di Kabupaten Trenggalek yaitu ada Tahun 2011 mencapai 72,38 tahun, pada Tahun 2012 sebesar 72,44 tahun, pada Tahun 2013 sebesar 72,49 tahun, pada Tahun 2014 sebesar 72,51 tahun, pada Tahun 2015 sebesar 72,91 tahun, pada Tahun 2016 sebesar 73,03 tahun dan pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 73,15 tahun. Hal ini mencerminkan kondisi harapan hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek relatif meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik II-7. Angka Harapan Hidup (Eo) Tahun 2011 – 2017 (*tahun*)

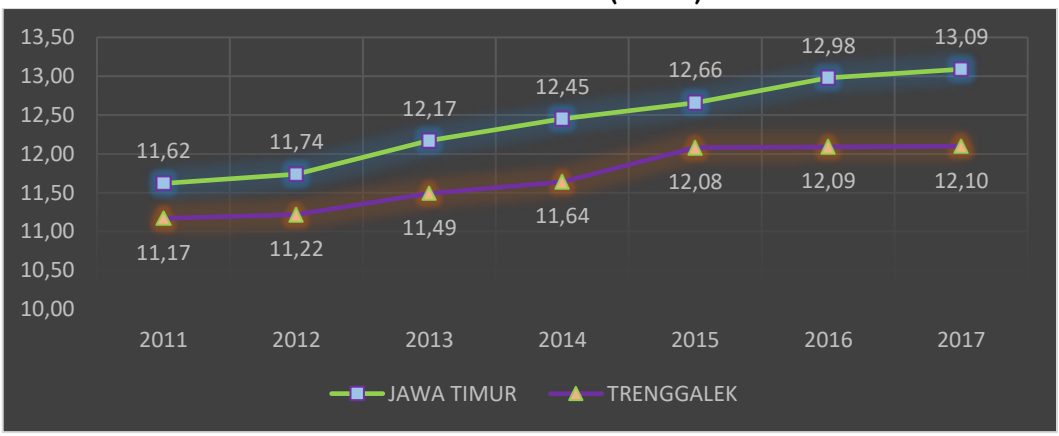


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek (penghitungan metode baru), 2018

2. EYS (*Expected Years of Schooling* : Angka Harapan Lama Bersekolah)

EYS (*Expected Years of Schooling* : Angka Harapan Lama Bersekolah) merupakan persentase penduduk usia 25 tahun keatas. EYS (*Expected Years of Schooling* : angka harapan lama bersekolah) di Kabupaten Trenggalek sebesar 11,17% pada Tahun 2011 dan meningkat menjadi 11,22% pada Tahun 2012, pada Tahun 2013 sebesar 11,49%, pada Tahun 2014 menjadi sebesar 11,64%, pada Tahun 2015 sebesar 12,08 %, pada Tahun 2016 sebesar 12,09% dan pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 12,10%. Berdasarkan grafik dibawah maka apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, Angka Harapan Lama Bersekolah Kabupaten Trenggalek tahun 2011-2017 masih dibawah Angka Harapan Lama Bersekolah pada Provinsi Jawa Timur.

Grafik II-8. EYS (*Expected Years of Schooling* : Angka Harapan Lama Bersekolah) Tahun 2011 – 2017 (*tahun*)

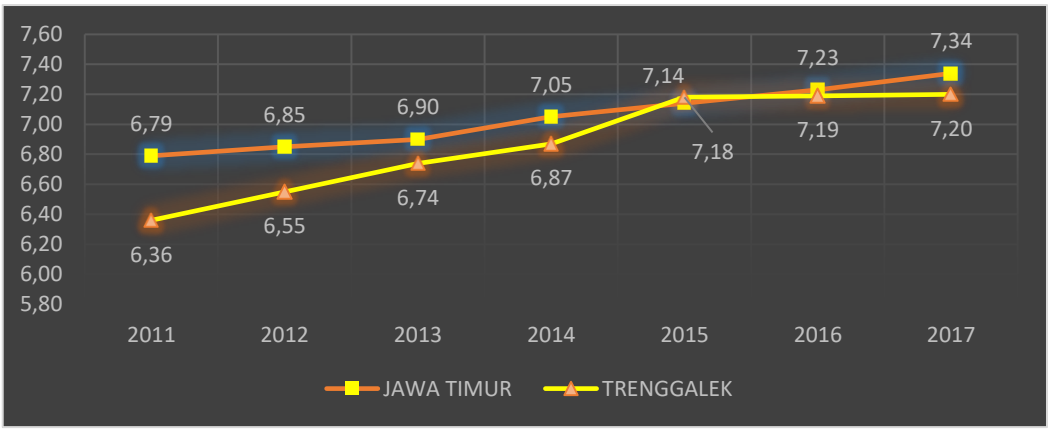


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek (penghitungan metode baru), 2018

3. MYS (*Mean Years of Schooling* : Rata-Rata Lama Sekolah)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 capaiannya lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur. Perkembangan MYS di Kabupaten Trenggalek sebagaimana grafik dibawah dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek capaiannya sebesar 6,36 tahun. Pada Tahun 2012 rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek sebesar 6,55 tahun, pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek sebesar 6,74 tahun, pada Tahun 2014 rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek sebesar 6,87 tahun kemudian pada tahun 2015 sebesar 7,18 tahun (lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 7,14 tahun). Sedangkan pada Tahun 2016 kembali naik sebesar 7,19 tahun dan pada Tahun 2017 meningkat kembali mencapai 7,20 tahun. Capaian ini berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 7,34 tahun.

Grafik II-9. MYS (*Mean Years of Schooling* : rata-rata lama sekolah) (*tahun*)

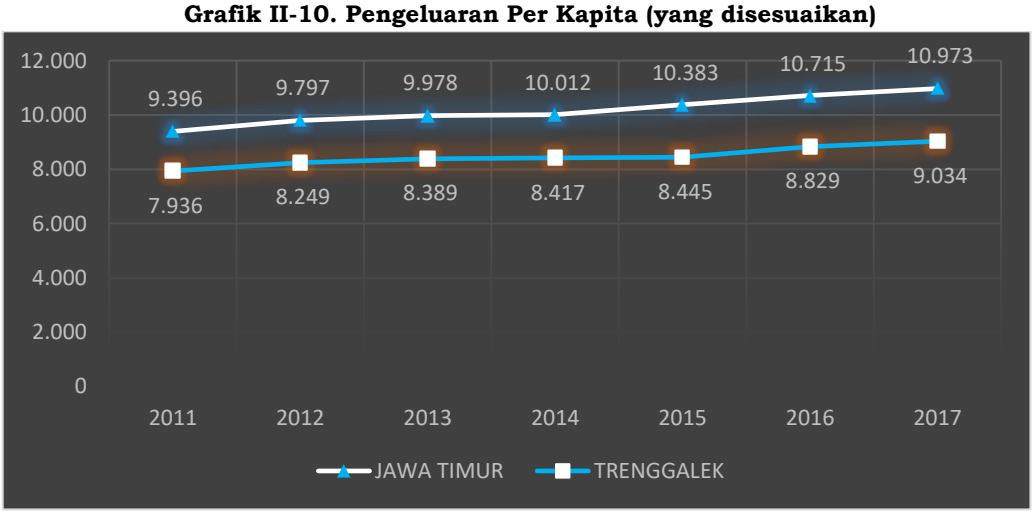


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek (penghitungan metode baru), 2018

4. Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)

Menurut BPS dalam penghitungan metode baru maka untuk mengukur dimensi standart hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga Kabupaten/Kota. Untuk itu dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas. Indikator Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan) adalah rata – rata biaya yang dikeluarkan setiap penduduk selama kurun waktu 1 tahun di Kabupaten Trenggalek. Perkembangan tingkat pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana grafik dibawah ini dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 pengeluaran per kapita mencapai 7.936, pada Tahun 2012 meningkat lagi menjadi 8.249, pada Tahun 2013 sebesar 8.389, pada Tahun 2014 meningkat menjadi 8.417, pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 8.445, pada Tahun 2016 kembali meningkat menjadi 8.829 dan pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 9.034. Namun secara umum pengeluaran per kapita Kabupaten Trenggalek masih dibawah Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Timur.

Grafik II-10. Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek (penghitungan metode baru), 2018

Dalam ruang lingkup pembangunan manusia, usaha peningkatan sumber daya manusia (SDM) jangan hanya diartikan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan (*training*) saja. Manusia sebagai sumber daya dan sekaligus modal dasar pembangunan, harus "dibangun" sejak dari usia dini, yakni mulai dari janin dalam kandungan seorang ibu. Sebab, dengan janin yang terawat, akan lahir bayi yang sehat. Dengan bayi yang sehat dan pendidikan keluarga yang baik akan tumbuh anak yang sehat dan cerdas, yang selanjutnya mengikuti siklus kehidupan, diharapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang sehat, cerdas kreatif dan akhirnya berkembang menjadi SDM yang berkualitas.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang akan dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan IPM dalam manajemen pembangunan akan lebih baik jika dilengkapi dengan suatu *data set* yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data basis pembangunan manusia. Sistem data basis tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali labih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisa situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumya, dan potensi yang dimilikinya sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang.

Pertimbangan lain yang mendasari pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah adalah bahwa sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia. Karena itu, IPM sangat sensitif terhadap perubahan yang sedang terjadi. Seperti pada masa krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia saat ini, maka nilai IPM turun sebagai akibat menurunnya tingkat pendapatan. IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maupun dengan Kabupaten/Kota secara Nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya indikator utama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan tenaga kerja.

2.2.2.1. Pendidikan

Sumber Daya Manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dipantau dari beberapa indikator pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Putus Sekolah (APS). Dari Tahun 2011-2017 capaian APM, APK dan APS dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Tabel** berikut:

Tabel II-20. Angka Partisipasi dan Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2017

No.	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Angka Partisipasi Murni (APM)**							
	- SD sederajat	96,84	91,27	93,16	93,76	90,71	95,18	95,25
	- SMP sederajat	79,55	83,23	80,42	81,86	80,15	82,75	83,00
	- SMA sederajat	46,67	62,28	55,82	58,93	54,40	62,84	85,22

No.	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**							
	- PAUD	64,72	81,83	80,53	76,18	82,03	84,10	85,77
	- SD sederajat	104,88	100,87	102,01	100,79	101,00	100,02	100,03
	- SMP sederajat	103,65	106,97	102,09	101,47	100,76	101,84	100,01
	- SMA sederajat	68,41	74,23	73,78	72,23	75,59	78,20	106,05
3	**Angka Putus Sekolah (APS)**							
	- SD sederajat	0,47	0,31	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00
	- SMP sederajat	0,51	0,43	0,60	0,27	0,28	0,20	0,19
	- SMA sederajat	0,41	0,35	0,48	0,28	0,24	0,24	0,27

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Agama Kab. Trenggalek, 2018

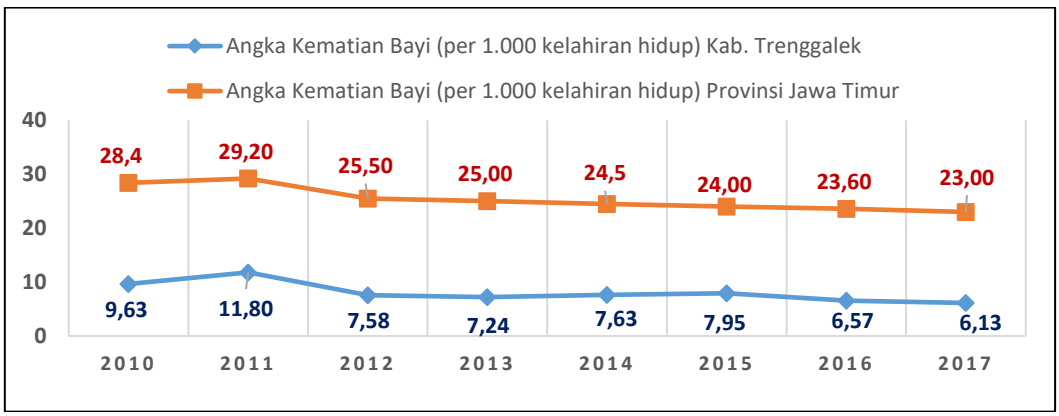
2.2.2.2. Kesehatan

Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2016 tercatat sebesar 6,57 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) 65,73 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2017 AKB Kabupaten Trenggalek sebesar 6,13 per 1.000 kelahiran hidup. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB antara lain melalui pemenuhan bidan di desa, peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga, serta pemenuhan sarana dan sarana, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Menurunnya AKI dan AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat.

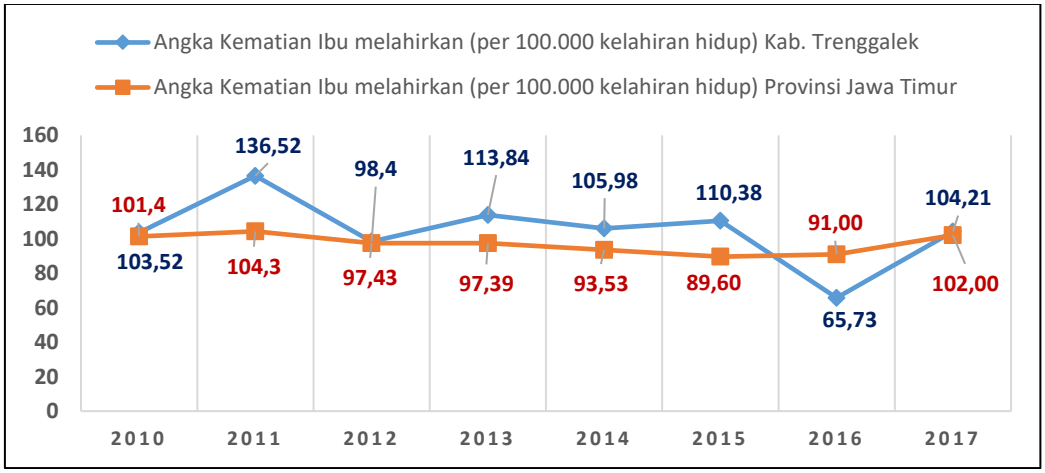
Kecenderungan kematian bayi dan kematian ibu di Kabupaten Trenggalek selama beberapa tahun terakhir seperti terlihat pada **Grafik**.

Grafik II-11. Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2017



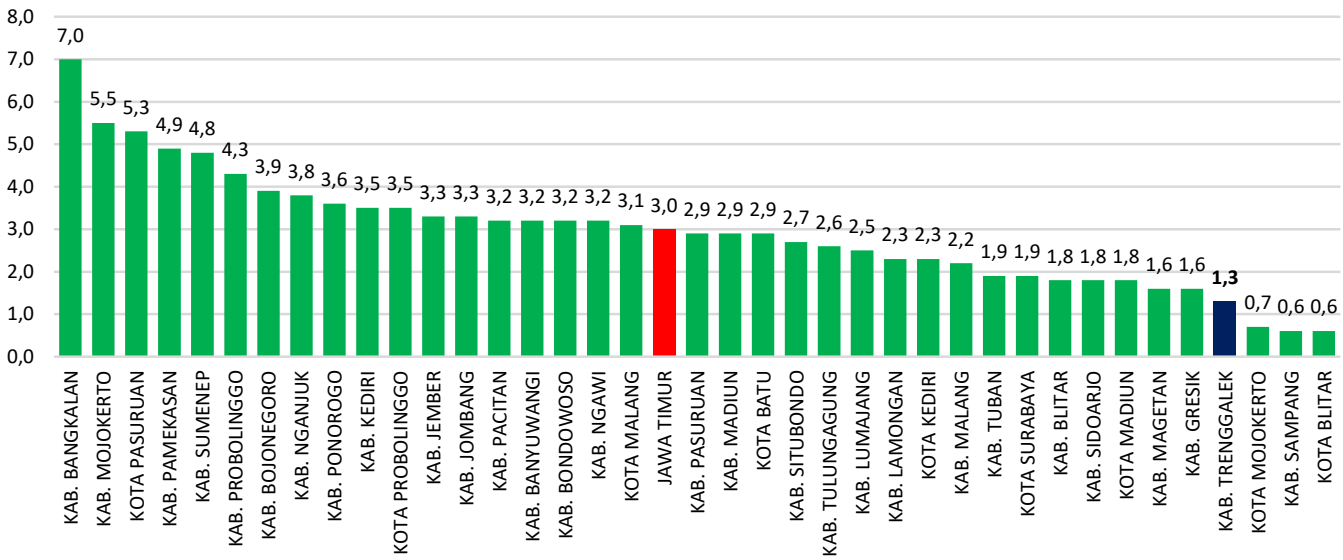
Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek, 2018

Grafik II-12. Angka Kematian Ibu Melahirkan
Di Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2017



Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator penting, antara lain Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Status gizi balita, anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur, serta Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Status gizi balita merupakan salah satu indikator SDGs yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus gizi buruk dapat diperoleh dari indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, kader Posyandu atau kasuskasus yang langsung dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan rumah sakit. Adapun prevelansi Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada **Grafik.** berikut :

Grafik II-13. Prevalansi Bayi Gizi Buruk Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

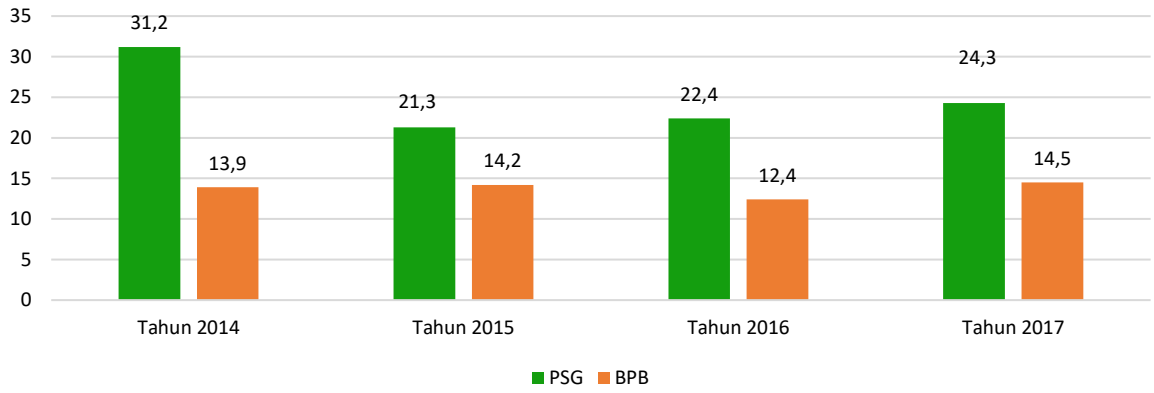


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek, 2018

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Data Riskesda 2013, 1 dari 3 anak Indonesia diidentifikasi stunting yang akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak si anak kurang maksimal dan dampaknya menyebabkan turunnya produktifitas.

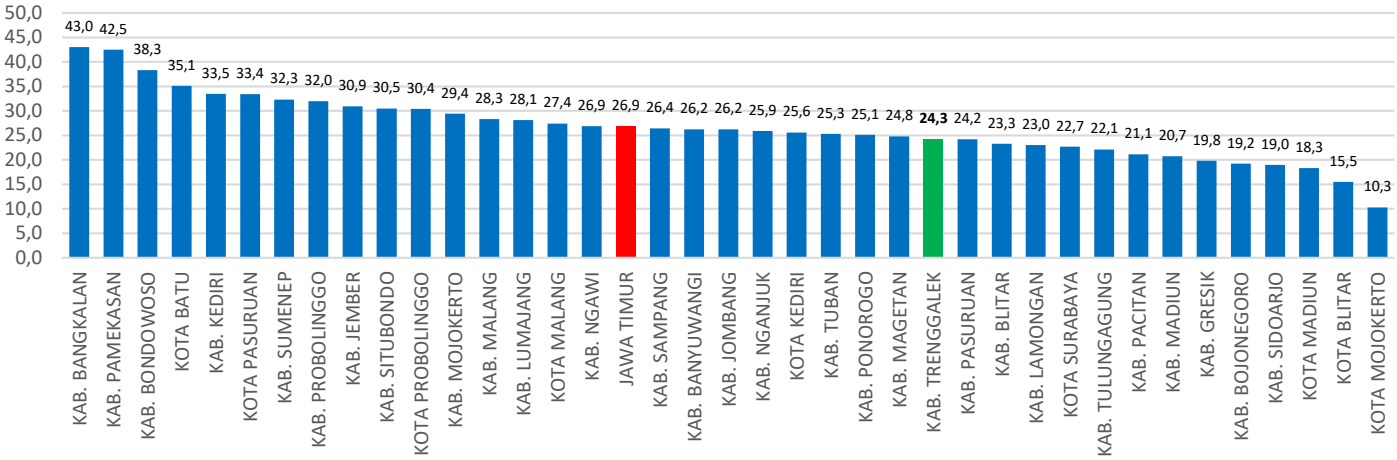
Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat. Untuk memastikan konvergensi program/intervensi dan sinergitas upaya intervensi stunting, maka Pemerintah Pusat menetapkan lokasi-lokasi untuk intervensi stunting di 100 kabupaten/kota dan 1.000 desa prioritas di Tahun 2018. Pemilihan lokus ini didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita stunting, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota) dan juga aksesibilitas fasilitas kesehatan. Pada saatnya nanti intervensi ini akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota. **Grafik** dibawah ini menjelaskan prevelansi balita Stunting di Kabupaten Trenggalek.

Grafik II-14. Data Balita Stunting Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2017



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek, 2018

Grafik II-15. Prevalansi Balita Stunting Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek, 2018

Indikator stunting, merupakan indikator yang digunakan untuk melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis). **Grafik** di atas menunjukkan bahwa kecenderungan prevalensinya fluktuatif dari tahun ke tahun, mulai tahun 2014 hingga tahun 2017.

Pada tahun 2017, prevalensi balita stunting sebesar 24,3, berada dibawah angka prevalensi balita stunting Provinsi Jawa Timur yang mencapai 26,9%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan penurunan angka stunting adalah berkaitan dengan perbaikan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian mikro nutrien (taburia), sosialisasi GEMARIKAN, program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

2.2.2.3. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan hak dan pelayanan dasar PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun capaian penanganan PMKS di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 adalah sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel II-21. Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017

No.	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Indeks Kesalehan Sosial**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58,00
2	**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**	N/A	N/A	N/A	N/A	2,18	1,74	1,71
3	**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**	N/A	N/A	N/A	N/A	0,59	0,37	0,40
4	**Jumlah PMKS (Jiwa)**	317.871	317.055	314.519	312.621	310.701	66.543	69.502
5	**Persentase PMKS yang ditangani (%)**	97.63	75.14	94.96	80.00	77,87	78,98	86,07

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2018

2.2.2.4. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Angka ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terliat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. TPAK dan TKK selama periode 2011–2017 berfluktuasi sebagaimana ditunjukkan **Tabel** berikut :

Tabel II-22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja (%)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)**	69.37	77.32	77.44	74.00	74,43	75,59	71,27
2	**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)**	96.82	96.86	95.88	95.80	95,54	96,93	96,52

Sumber : BPS dan Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2018

Upah minimum regional merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang baik terdapat jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan cukup banyak. Penetapan upah yang tinggi menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada di pasaran, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi.

Dampak positif kenaikan upah minimum diantaranya adalah : 1) Meningkatkan tingkat konsumsi domestik, 2) Memotivasi para pekerja, 3) Mendorong para pengusaha untuk berpikir kreatif dan inovatif, dan 4) Meningkatkan tingkat kebutuhan dan lowongan kerja. Sedangkan dampak negatif terhadap kenaikan upah minimum adalah : 1) Meningkatkan tingkat inflasi, 2) Bertambahnya jumlah pengangguran, 3) Kelebihan penawaran tenaga kerja. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana tiap tahunnya ada kenaikan sekitar 8-19 %. **Tabel** dibawah ini akan menjelaskan UMK Kabupaten dan persentase kenaikannya tiap tahun.

Tabel II-23. Upah Minimum Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2018

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UMK Kabupaten Trenggalek (Rp.)	700.000	760.000	903.900	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.388.000	1.509.000
Persentase kenaikan (%)	10,24	8,57	18,93	10,63	15,00	4,35	15,67	8,72

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2018

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui beberapa indikator sosial, diantaranya indikator kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga.

2.2.3.1. Kebudayaan

Adat-istiadat dan berbagai kesenian yang ada dan dilaksanakan di masyarakat menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai potensi yang dimiliki serta senantiasa harus dilestarikan. Sebagai upaya pelestarian ditempuh dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantaranya dengan penyelenggaraan event seni dan budaya. Berikut **Tabel** jumlah penyelenggaraan seni dan budaya Tahun 2011-2017 di Kabupaten Trenggalek :

Tabel II-24. Jumlah Event Seni dan Budaya Tahun 2011-2017

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah event /pergelaran seni budaya yang dikelola sebagai daya tarik wisata	6	9	17	9	**10**	12	15
Persentase sanggar/kelompok seni dan seniman yang aktif	7,00	20,00	90,00	65,00	**50,00**	56,00	64,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

2.2.3.2. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah dengan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Data terkait pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 dapat dilihat sebagimana **Tabel** berikut :

Tabel II-25. Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2011-2017

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	2	3	13	20	**20**	**20**	**20**
Jumlah pemuda wirausaha yang terbentuk	N/A	N/A	N/A	N/A	**40**	**80**	**70**
Jumlah penambahan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	2	2	2	2	**8**	**4**	**3**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Birokrasi menjadi salah satu mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014 menandai proses moderenisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (*fit*) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ASN diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan. Visi UU ASN ini diharapkan dapat mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek berikut :

1. **Struktural**. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat *top* manajemen hingga *lower* manajemen.
2. **Operasional**. OPD harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.
3. **Visi dan Misi**. OPD harus merumuskan visi dan misi dengan cara mengidentifikasi tentang apa yang harus dilakukan siapa yang akan melaksanakan.
4. **Strategi pelayanan**. Merupakan cara yang harus ditentukan SKPD dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi :

Penyusunan Standart Pelayanan

Suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya parisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

Dalam pemenuhan pelayanan publik, maka dibutuhkan suatu indikator untuk mengetahui kepuasan masyarakat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Maksud dan tujuan penyusunan IKM adalah 1) Penyusunan IKM terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran / pendapat masyarkat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah; dan 2) Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit penyelenggara, baik oleh masyarakat maupun instansi / unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public. Adapun sasaran dari Penyusunan IKM ini adalah penetapan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdayaguna dan berhasilguna pada unit penyelenggara pelayanan public, sedangkan ruang lingkup kegiatan adalah pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Manfaat penyusunan IKM adalah :

1. Mengetahui kelemahan / kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan
3. Sebgai bahan pentapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan
4. Mengetahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik
5. Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan.

Untuk mengevaluasi kinerja birokrasi maka perlunya indikator yang menggambarkan capaian kinerja birokrasi yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang didapat dari hasil penilaiaan Lembar Kerja Reformasi Birokrasi.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2016 terdapat 489 Taman Kanak-kanak (TK/RA), 559 Sekolah Dasar (SD/MI), 104 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), 65 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK). Sedangkan pada Tahun 2017 terdapat 491 Taman Kanak-kanak (TK/RA), 559 Sekolah Dasar (SD/MI), 105 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), 66 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK).

Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kurun waktu Tahun 2011-2017 sebagaimana **Tabel.** berikut :

Tabel II-26. Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA Se- Kab. Trenggalek Tahun 2011-2017

No.	*Tahun*	*Jumlah TK/RA*	*Jumlah SD/MI*	*Jumlah SMP/MTs*	*Jumlah SMA/MA/SMK*	*Total*
1.	2011	386	438	76	40	**940**
2.	2012	484	551	98	50	**1.183**
3.	2013	475	551	98	53	**1.177**
4.	2014	495	555	98	56	**1.204**
5.	2015	480	561	99	63	**1.203**
6.	2016	489	559	104	65	**1.217**
7.	2017	491	559	105	66	**1.221**

Sumber : Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

Salah satu pilar utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Perkembangan kondisi fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah selama 4 (empat) tahun terakhir (2013-2017) dapat dililihat pada **Tabel.** berikut:

Tabel II-27. Kondisi Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013–2017

No	Kondisi Ruang Kelas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas	%	Jumlah (Ruang Kelas	%
1.	**SD**										
1.1	Baik	615	22,13	667	23,50	615	21,46	802	27,82	837	29,06
1.2	Rusak Ringan	1.765	63,51	1.727	60,85	1.831	63,90	1.723	59,76	1.860	64,58
1.3	Rusak Sedang	191	6,87	192	6,77	181	6,31	180	6,24	-	-
1.4	Rusak Berat	208	7,48	252	8,88	238	8,30	178	6,17	183	6,35
	Total	**2.779**	**100,00**	**2.838**	**100,00**	**2.865**	**100,00**	**2.883**	**100,00**	**2.880**	**100,00**
2.	**SMP**										
2.1	Baik	104	12,62%	138	15,65%	146	16,53	201	22,06	207	22,82
2.2	Rusak Ringan	674	81,80%	698	79,14%	654	74,06	591	64,87	634	69,90
2.3	Rusak Sedang	21	2,55%	18	2,04%	18	2,04	49	5,38	-	-
2.4	Rusak Berat	25	3,03%	28	3,17%	28	3,17	70	7,68	66	7,28
	Total	**824**	**100,00**	**882**	**100,00**	**883**	**100,00**	**911**	**100,00**	**907**	**100,00**

No	Kondisi Ruang Kelas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas	%	Jumlah (Ruang Kelas	%
3.	**SMA**										
3.1	Baik	N/A	N/A	121	52,84	141	57,55	142	53,99	142	53,58
3.2	Rusak Ringan	N/A	N/A	107	46,72	104	42,45	115	43,73	115	43,40
3.3	Rusak Sedang	N/A	N/A	1	0,44	1	0,40	-	-	-	-
3.4	Rusak Berat	N/A	N/A	-	0,00	-	0,00	6	2,28	8	3,02
	Total	N/A	N/A	**229**	**100,00**	**245**	**100,00**	**263**	**100,00**	**265**	**100,00**
4.	**SMK**										
3.1	Baik	N/A	N/A	82	23,91	87	25,36	189	44,89	158	39,70
3.2	Rusak Ringan	N/A	N/A	250	72,88	236	46,72	227	53,92	236	59,30
3.3	Rusak Sedang	N/A	N/A	1	0,29	8	2,33	2	0,48	-	-
3.4	Rusak Berat	N/A	N/A	10	2,92	12	3,49	3	0,71	4	1,01
	Total	N/A	N/A	**343**	**100,00**	**343**	**100,00**	**421**	**100,00**	**398**	**100,00**
5.	**SLB**										
5.1	Baik	24	63,16	15	39,47	22	39,28	32	60,38	6	35,29
5.2	Rusak Ringan	14	36,84	23	60,53	22	39,28	21	39,62	4	23,53
5.3	Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Rusak Berat	-	-	-	-	12	21,44	-	-	7	21,18
	Total	**38**	**100,00**	**38**	**100,00**	**56**	**100,00**	**53**	**100,00**	**17**	**100,00**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru terhadap murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Tabel II-28. Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2017

Sekolah	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
SD/MI	1:12	1:12	1:11	1:12	1:12	1:11	1:13
SMP/MTs	1:12	1:12	1:13	1:13	1:13	1:13	1:15
SMA/MA	1:13	1:12	1:12	1:11	1:13	1:12	1:13
SMK	1:13	1:12	1:12	1:10	1:11	1:11	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

Di Kabupaten Trenggalek, pada kurun waktu Tahun 2011 - 2017 rasio guru - murid SD tidak mengalami banyak perubahan yaitu dari sekitar 1:11 sampai dengan 1:13. Pada tahun 2017 rasio guru 1:13, ini berarti ada sekitar 13 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar. Demikian halnya dengan rasio murid – guru SMP, yaitu dari sekitar 1:12 sampai dengan 1:15 murid setiap guru pada Tahun 2011-2017. Sementara itu pada periode yang sama, rasio murid - guru SMA mengalami sedikit fluktuasi, dari 11-13 murid setiap guru pada Tahun 2011-2015. Sedangkan SMK pada tahun 2011-2015 juga dari sekitar 11-13 murid setiap gurunya. Berdasarkan data BPS maka rasio murid per sekolah, rasio murid per ruang belajar dan rasio guru per sekolah dalam kurun waktu Tahun 2011-2017 sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel II-29. Rasio Murid Per Sekolah, Rasio Murid Per Ruang Belajar dan Rasio Guru Per Sekolah Tahun 2011-2017

Tahun	SD			SMP/MTs			SMA/ MA/SMK		
	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah	Murid per Sekolah	Murid per Ruang Belajar	Guru per Sekolah
2011	121	18	10	335	33	26	412	35	32
2012	120	18	10	335	33	26	412	35	32
2013	111	18	10	322	30	26	403	32	32
2014	106	17	9	313	28	26	370	31	34
2015	108	17	9	307	28	23	324	29	31
2016	107	17	9	306	28	24	356	27	32
2017	105	17	13	276	28	21	420	31	27

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

Rasio murid per sekolah yang tinggi terdapat di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Kampak. Sedangkan rasio guru per sekolah terbesar terdapat pada Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Trenggalek. Selain pendidikan formal dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan diselenggarakan juga melalui pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Keaksaraan Fungsional (Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C).

Tabel II-30. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Satuan	Tahun						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								
1.	APK PAUD	%	64,72	81,83	80,53	76,18	**82,03**	84,10	85,77
B.	**Pendidikan Dasar**								
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,84	91,27	93,16	93,76	**92,59**	95,18	95,25
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	79,55	83,23	80,42	81,86	**80,22**	82,75	83,00
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	104,88	100,87	102,01	100,79	**101,66**	100,02	100,03
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	%	103,65	106,97	102,09	101,47	**101,02**	101,84	100,01
5.	Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B	%	N/A	N/A	N/A	N/A	**43,03**	50,1	49,10
6.	Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	%	N/A	N/A	N/A	N/A	**77,21**	85,89	44,44
7.	Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	100,00

No.	Uraian	Satuan	Tahun						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.	Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan	Kategori Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	4,94	5,20
10.	Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan	Point	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	81,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

2.3.1.2. Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dilihat dari fasilitas kesehatan seperti jumlah kamar dan tempat tidur pasien, apotek, polindes, Pustu, Pusling, Posyandu; serta jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker, bidan, dan pengatur gizi.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 4 buah rumah sakit di ibu kota Trenggalek (yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit milik pemerintah, 2 buah Rumah Sakit swasta, dan 1 buah Rumah Sakit Bersalin), 6 Balai Pengobatan/Klinik, 22 buah Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 66 buah Puskesmas Pembantu dan 25 Puskesmas Keliling. Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kabupaten Trenggalek rata-rata melayani sebanyak 30.858 jiwa. Keberadaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas. Pada tahun 2017, di Kabupaten Trenggalek terdapat 163 dokter (42 dokter spesialis dan 121 dokter umum), 55 dokter gigi, 818 tenaga keperawatan, 380 bidan, 96 tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker), 73 tenaga kesehatan masyarakat, 65 tenaga gizi, 39 tenaga sanitasi, 98 teknisi medis dan 8 tenaga keterapian fisik (fisioterapis dan terapis wicara). Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu Tahun 2011-2017 secara kuantitas disajikan sebagaimana **Tabel** berikut.

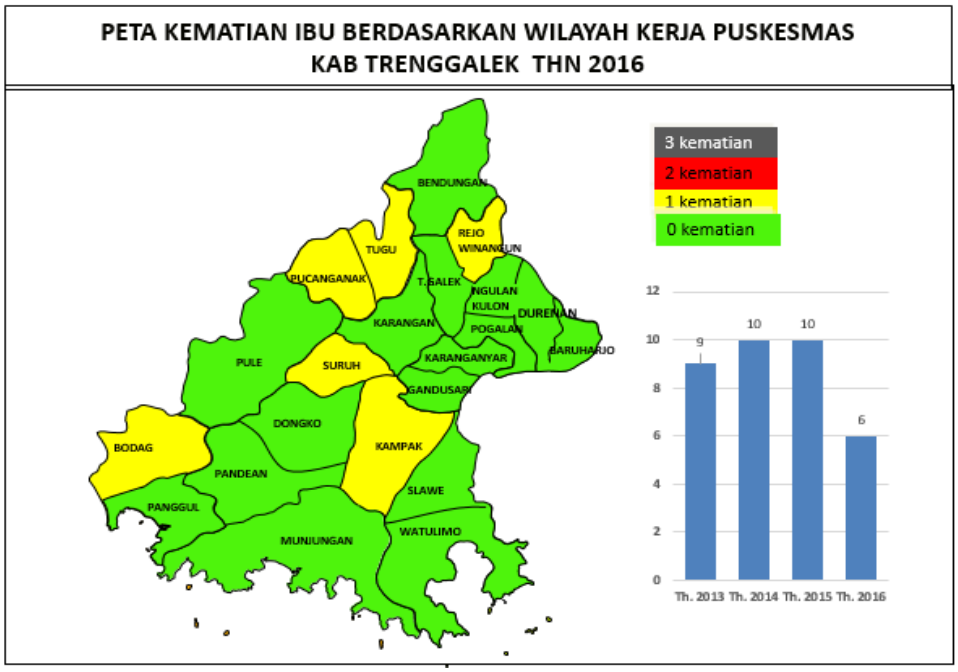
Tabel II-31. Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit / *Hospital*							
	- Jumlah / *Total*	4	4	4	4	4	4	4
	- Tempat Tidur / *Bed*	321	182	182	166	414	414	-
2	Puskesmas / *Public Health Center*	22	22	22	22	22	22	22
	- Puskesmas Perawatan	18	18	18	18	19	19	19
	- Tempat Tidur / *Bed*	253	276	276	281	318		345
	- Puskesmas Non Perawatan	4	4	4	4	3	3	3
3	Puskesmas Pembantu	66	66	66	66	66	66	66
4	Apotek / Drug Store	29	32	33	38	37	38	37
5	Polindes	111	113	113	113	118	104	109
6	Puskesmas Keliling	31	33	32	26	25	26	25
7	Posyandu	849	854	854	854	854	857	857

Sumber : Profil Kesehatan 2015, Dinkes Dalduk KB Kabupaten Trenggalek, RSUD Dr. Soedomo 2018

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dansumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)/Polindes. Di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2017 menurut hasil kompilasi data terdapat 857 posyandu (80,98% merupakan posyandu aktif) dan ponkesdes siaga aktif 157 desa/kel.

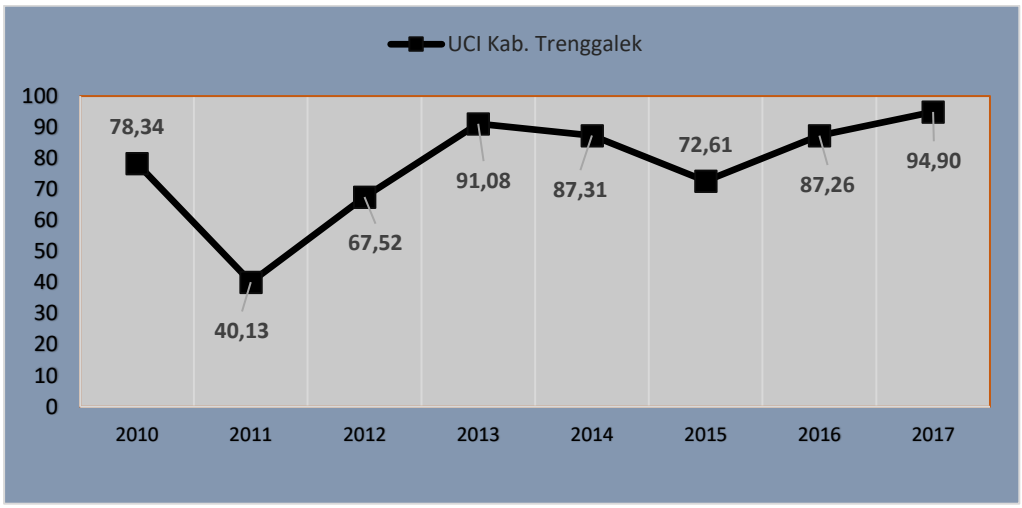
Permasalahan sektor kesehatan di Kabupaten Trenggalek yang utama adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu Hamil, sebagaimana **Gambar** berikut:



Gambar II-5. Peta Kematian Ibu di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I. Pada tahun 2014 tercapai 137 desa/kelurahan. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yaitu mencapai 137 desa/kelurahan. Kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan lagi, yaitu 114 desa/kelurahan. Pada tahun 2016 naik menjadi 137 desa/kelurahan dan pada Tahun 2017 naik menjadi 149 desa/kelurahan. Gambaran capaian UCI selama beberapa tahun terakhir sebagaimana **Grafik**. berikut ini.

Grafik II-16. Persentase Cakupan UCI di Kab. Trenggalek Tahun 2010-2017



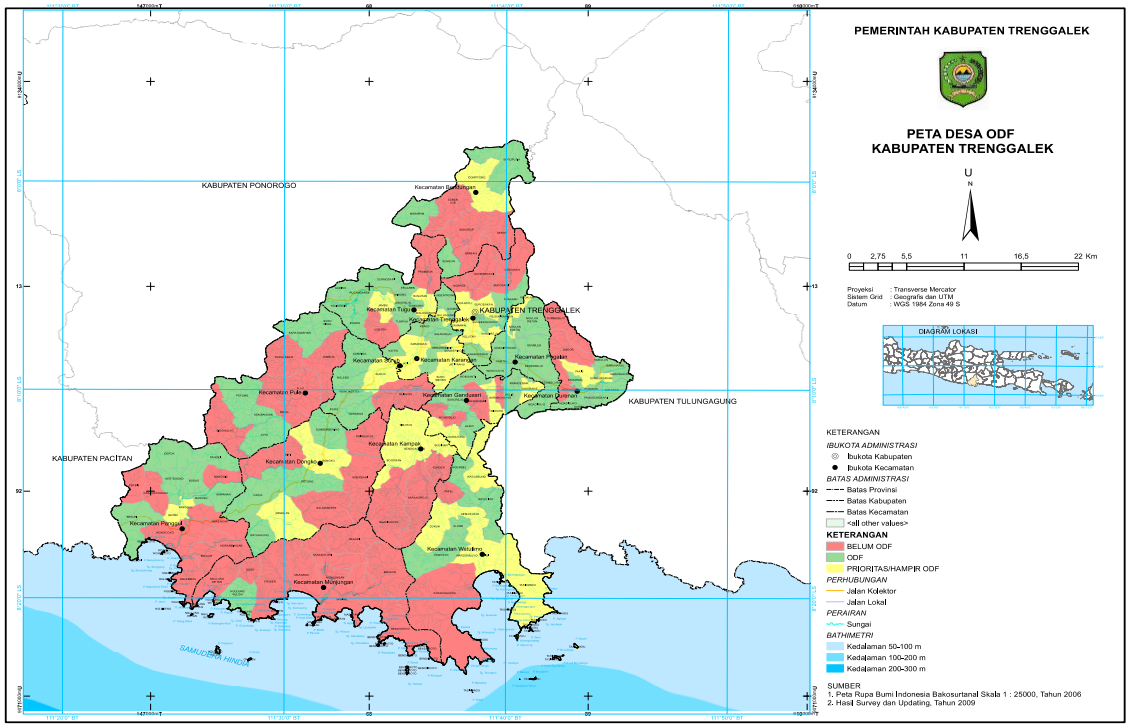
Sumber : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek, 2017

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan indikator *output*. Indikator *outcome* STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

Sedangkan indikator *output* STBM adalah sebagai berikut :

a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat;
b. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;
c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar; dan
e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Desa ODF (*Open Defecation Free*) atau **SBS** (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah Desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar STBM. Pada Tahun 2015 Desa/Kelurahan yang teridentifikasi sudah ODF sebanyak 70 Desa/ Kelurahan, pada tahun 2016 meningkat menjadi 92 Desa/Kelurahan dan kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 119 Desa/Kelurahan (75,80%). Adapun sebaran Desa ODF pada Tahun 2017 disajikan sebagaimana **Gambar** berikut ini.



Gambar II-6. Peta Desa ODF Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat agar pekr dasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut.

Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi

infrastruktur serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah, gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain.

Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 seluruhnya ada 1.045,20 km, terdiri dari jalan nasional 113,79 km, dan jalan kabupaten sepanjang 931,229 km. Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek adalah baik sepanjang 775,94 km, sedang 123,12 km, rusak ringan 65,03 km dan rusak berat 80,94 km. Jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Sedangkan berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Trenggalek di klasifikasikan menjadi jalan nasional, propinsi dan jalan kabupaten.

Prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu :

a. Jalan Kolektor Primer
   - Kolektor 1 (K-1) : jalan kolektor primer 1 yang melintasi Kab. Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Kab. Trenggalek dengan Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek dengan Ponorogo. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Tulungagung–Trenggalek sepanjang 22,85 km, ruas jalan Trenggalek- Batas Trenggalek sepanjang 54,54 km dan ruas jalan Raya Jarakan-Panggul sepanjang 3,08 km, ruas jalan Trenggalek-Batas Ponorogo sepanjang 12,95 km (ke arah Ponorogo) dan ruas jalan kota yang meliputi Jalan Soekarno Hatta, Jl. PB Sudirman, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Mayjen Soengkono serta Jalan Durenan- Prigi (18,70 km).
   - Kolektor 2 (K-2) : seluruh jalan kolektor primer 2 yang ada telah ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Kolektor 1 (K-1).

b. Jalan Lokal Primer
   Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang I dengan persil atau kota jenjang ke II dengan persil atau kota jenjang ke III dengan jenjang ke III atau kota jenjang ke III dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten Trenggalek adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

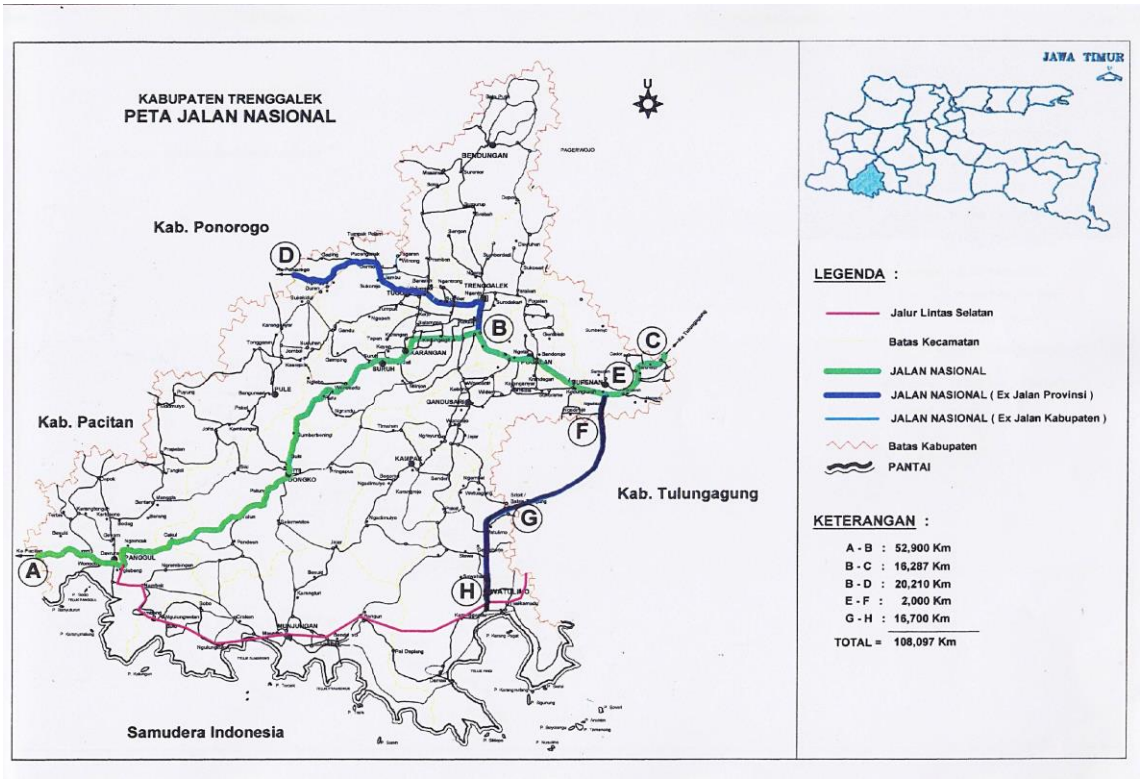
c. Jalan Lingkungan
   Jalan lingkungan di Kabupaten Trenggalek adalah jalan yang berada di lingkungan-lingkungan permukiman yang sebagian besar tersebar di kawasan pedesaan.

Jaringan jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini:

Tabel II-32. Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek

No. Ruas			Nama Ruas	Panjang (km)	Fungsi
070			Tulungagung-Trenggalek	22.85	KP-1
160	1		Trenggalek-Bts. Kab. Trenggalek	54.54	KP-1
160	11	K	Jl. Raya Jarakan-Panggul	3.08	KP-1
134			Bts Kab. Ponorogo/Trenggalek-Bts Kota Trenggalek	12,95	KP-1
134	11	K	Jl. Mayjen Soengkono (Trenggalek)	4,06	KP-1
134	12	K	Jl. Yos Soedarso (Trenggalek)	0,70	KP-1
134	13	K	Jl. Panglima Sudirman (Trenggalek)	0,54	KP-1
134	14	K	Jl. Soekarno Hatta (Trenggalek)	1,96	KP-1
135			Durenan-Prigi	30,40 (18,70)	

Sumber : 1). Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor:375/KPTS/M/2004 dan
2). Keputusan Menteri PUPR Nomor : 290/KPTS/M/2015



Gambar II-7. Peta Jaringan Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan transportasi jalan kepada masyarakat. Indikator kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebagai langkah dalam upaya capaian kinerja peningkatan jalan tiap tahunnya.

Kondisi Infrastruktur Kebinamargaan dan Pengairan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2017 dijelaskan sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel II-33. Kondisi Infrastruktur Kebinamargaan dan Pengairan Kabupaten Trenggalek Tahun 2012–2017

Nama	Nilai						Satuan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas							
1). Jalan Nasional	74.880	74.880	74.880	113.790	113.790	113,79	Meter
2). Jalan Propinsi	20.210	20.210	20.210	-	-	-	Meter
3). Jalan Kabupaten	949.930	949.930	949.930	931.230	931.230	931,23	Meter
4). Jalan Desa/Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Meter
II. Kondisi Jalan							
1). Aspal	831.832	820.017	920.493	911.461	911.461	-	Meter
2). Berbatu	57.450	54.180	-	-	-	-	Meter
3). Hotmix (Aspal Beton)	29.658	53.995			-	-	Meter
4). Cor Beton	2.990	8.738	29.437	38.469	38.469	23,5	Meter
5). Tanah	28.000	13.000	-	-	-	-	Meter
III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi							
1). Jalan Baik	410.670	497.230	596.974	617.085	661,366	661,173	Meter
2). Jalan Sedang	203.440	233.590	250.534	187.634	132,546	141,640	Meter
3). Jalan Rusak Sedang	273.870	162.870	73.339	93.225	91,757	24,771	Meter
4). Jalan Rusak Berat	61.950	56.240	29.083	51.986	45,56	102,435	Meter

Nama	Nilai						Satuan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
IV. Jembatan							
Jumlah Jembatan	458	458	459	460	460	460	Buah
1). Jembatan Beton	373	374	374	374	374	374	Buah
2). Jembatan Komposit	69	70	70	71	71	71	Buah
3). Jembatan Rangka Baja Besi/Dekplang	14	11	11	11	11	11	Buah
4). Jembatan Jembatan Gantung	2	3	4	4	4	4	Buah
V. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi							
1). Arteri	-	-	-	-	-	-	Meter
2). Kolektor	397.180	397.180	397.180	378.480	378.480	378.480	Meter
3). Jalan Lokal	552.750	552.750	552.750	552.750	552.750	552.750	Meter
VI. Panjang jalan yang memiliki:							
1). Trotoar	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Meter
2). Drainase/Saluran Pembuangan Air	-	-	-	-	-	-	Meter
3). Sempadan Jalan	-	-	-	-	-	-	Meter
VII. Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan							
1). Non Teknis	271.166	271.166	271.166	271.166	271.166	272.209	Meter
2). Teknis							
1. Primer	1.100	1.100	1.100	5.458	5.458	5.458	Meter
2. Sekunder	52.562	52.562	52.562	34.490	34.490	34.490	Meter
3. Tersier	185.812	185.812	185.812	501.938	501.938	501.939	Meter
3). Panjang Irigasi / Saluran	510.640	510.640	510.640	541.886	544.886	541.887	Meter
4). Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik	173.277	179.225	187.024	209.784	233.282	224.640	Meter
5). Panjang Irigasi Dalam Kondisi Sedang	204.256	206.256	205.165	95.547	104.124	97.539	Meter
6). Panjang Irigasi Dalam Kondisi Rusak	133.107	125.159	118.451	236.618	204.480	219.698	Meter
VIII. Drainase							
1). Jaringan sistem Drainase	959	959	959	959	959	959	Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2018

Dalam rangka pengembangan kawasan Pantai Selatan, maka pemerintah pusat merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ruas jalannya melewati 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. JLS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi di bidang pariwisata, pertambangan dan perikanan.

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sawah irigasi di Kabupaten Trenggalek dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian dengan luas baku sawah irigasi sebesar 10.866 Ha. Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2011-2017 dijelaskan pada **Tabel** berikut:

Tabel II-34. Kondisi Irigasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017

No	Uraian	Satuan	Luas Jaringan Irigasi						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Panjang Jaringan Irigasi / Saluran**	**m**	**510.640**	**510.640**	**510.640**	**510.640**	**541.886**	**544.886**	**541.887**
2.	**Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**m**	**168.530**	**173.277**	**179.225**	**187.024**	**209.784**	**233.282**	**224.640**
3.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Sedang	**m**	**203.712**	**204.256**	**206.256**	**205.165**	**95.547**	**104.124**	**97.539**
4.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Rusak	**m**	**138.358**	**133.107**	**125.159**	**118.451**	**236.618**	**204.480**	**219.698**
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		**%**	**33,00**	**33,93**	**35,10**	**36,63**	**38,71**	**43,00**	**46,21**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II-35. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	(%)	43,23	52,34	62,84	64,96	71,02	81,32
2.	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	(%)	80,79	82,78	85,43	90,07	94,58	97,00
3.	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	(%)	33,93	35,10	36,63	38,71	43,05	46,21
4.	Persentase volume turap talud/bronjong	(%)	N/A	N/A	N/A	20,00	24,40	31,29
5.	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	(%)	45,00	45,00	45,00	47,00	51,00	58,20
6.	Persentase masyarakat yang mendapat layanan air bersih/ air minum yang aman	(%)	N/A	N/A	N/A	43,31	62,61	65,98
7.	Persentase masyarakat yang terlayani sistem air limbah yang memadai	(%)	N/A	N/A	N/A	50,00	50,48	71,80
8.	Persentase layanan jaringan drainase yang memadai	(%)	N/A	6,30	17,14	80,06	85,03	90,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2018

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Trenggalek telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Sedangkan untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) telah disusun sebanyak 6 (enam) dokumen dari tahun 2011 sampai dengan 2016, namun demikian 6 (enam) dokumen tersebut belum diperdakan. Untuk Indikator Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 dijelaskan sebagaimana pada **Tabel** berikut:

Tabel II-36. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)	(%)	N/A	N/A	30,00	40,00	50,00	62,50	77,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2018

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, sehat, berwawasan lingkungan di Kabupaten Trenggalek meliputi: Rumah layak huni, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan permukiman kumuh dan Rumah tangga pengguna air bersih. Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 dijelaskan sebagaimana pada **Tabel** berikut:

Tabel II-37. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Indikator						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	13,65	18,29	23,08
2.	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	%	7,90	7,90	7,90	8,07	37,03	49,62	62,60
3.	Masyarakat Perdesaan yang Mendapat Layanan Air Bersih	Jiwa	N/A	N/A	N/A	N/A	128.282	511.126	526.061
4.	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,09	62,61	65,98
5.	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	52,88	61,50	80,33
6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	6,85	12,26	21,69	34,36	40,32	45,16	89,85
7.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,50	20,00	53,28

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar masih mengandalkan air bawah tanah melalui sumur. Hanya sebesar 0,94 % jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Produksi Air Minum pada tahun 2016 yang tercatat pada PDAM Kabupaten Trenggalek sebanyak 2.006.078 m^3. Hasil produksi disalurkan pada 7.857 pelanggan. Pelanggan yang terdistribusi air bersih PDAM dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel II-38. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan kepada Pelanggan (m^3)

NO.	PELANGGAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah tempat tinggal	827.602	907.557	1.099.964	1.446.634	1.787.404	1.824.251	1.927.856
2	Hotel/objek pariwisata	982	4.447	21.550	6.420	15.000	10.131	4.745
3	Rumah sakit dan badan sosial	29.857	22.474	32.641	33.962	41.077	34.236	53.787
4	Tempat peribadatan	12.552	22.288	35.707	37.806	47.078	39.806	34.726
5	Umum	23.012	22.107	2.232	4.240	13.427	28.666	15.665
6	Pertokoan, industri, perusahaan	4.525	19.352	6.379	32.406	26.355	31.318	48.900
7	Perkantoran	25.882	30.330	32.908	30.541	29.814	37.670	35.642
	Jumlah	**924.412**	**1.028,765**	**1.231.381**	**1.591.509**	**1.960.155**	**2.006.078**	**2.121.321**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Jumlah penduduk yang terlayani air minum pada Tahun 2014-2016 sebagaimana disajikan **Tabel** berikut mengalami penambahan dari 426.143 jiwa di Tahun 2014 meningkat menjadi 450.641 jiwa pada Tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 487.980 jiwa pada Tahun 2016. Penambahan ini dilaksanakan melalui Program dan kegiatan Jaringan Perpipaan Pedesaan, Jaringan Perpipaan Perkotaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

Tabel II-39. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Minum Tahun 2014-2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa)			
		2014	2015	2016	2017
1	Pengembangan SPAM (Jaringan Perpipaan Perdesaan)	111.379	128.282	147.577	180.848
2	Pengembangan SPAM PDAM (Jaringan Perpipaan Perkotaan)	48.953	54.953	64.710	69.515
3	Bukan Jaringan Perpipaan	265.811	267.406	275.693	275.693
	JUMLAH	**426.143**	**450.641**	**487.980**	**526.056**

Sumber: PDAM, Dinas PKPLH dan Dinas Kesehatan dan Dalduk KB Kab. Trenggalek, 2018

Potensi sumber air bersih untuk berbagai aktivitas di Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya banyak sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyaknya sumber mata air tersebut dapat menjadi daya saing dalam penyediaan air bersih untuk investor. Dengan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penetapan kawasan sempadan mata air sebagai kawasan lindung maka kualitas dan kuantitas sumber mata air akan terjaga. Potensi mata air yang ada di Kabupaten Trenggalek tersebar di 364 titik lokasi dengan rata-rata debit air sebesar 658 liter/detik. Persebaran mata air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel II-40. Potensi Sumber Air di Kabupaten Trenggalek

NO	KECAMATAN	MATA AIR (buah)					RATA-RATA DEBIT AIR (liter/detik)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panggul	80	40	60	77	77	81,00	61,00	81,00	292,6	338,80
2	Munjungan	2	3	2	6	6	9,00	9,00	9,00	17,7	21,50
3	Watulimo	8	10	8	8	8	21,00	21,00	21,00	53,5	71,50
4	Kampak	7	5	7	6	6	60,00	60,00	60,00	10,0	14,40
5	Dongko	21	10	21	21	21	20,00	20,00	20,00	106,9	107,00
6	Pule	62	60	62	63	63	235,00	235,00	235,00	162,7	172,10
7	Karangan	15	29	15	16	16	10,00	10,00	10,00	24,7	31,30
8	Suruh	23	7	23	30	30	18,00	18,00	18,00	34,1	47,90
9	Gandusari	8	7	8	10	10	35,00	35,00	35,00	36,8	50,80
10	Durenan	7	6	7	7	7	16,00	16,00	16,00	29,3	51,30
11	Pogalan	6	7	6	6	6	12,00	12,00	12,00	33,6	37,90
12	Trenggalek	24	21	24	22	22	15,00	15,00	15,00	72,7	72,70
13	Tugu	72	59	72	57	57	66,00	66,00	66,00	118,9	138,90
14	Bendungan	49	46	49	45	45	60,00	60,00	60,00	65,8	67,50
Jumlah		**384**	**310**	**364**	**374**	**374**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	**1.059,3**	**1223,60**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2017

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan satuan TNI. Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Salah satu yang indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Indeks Kebahagiaan yang merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial, yaitu : 1) kesehatan; 2) pendidikan; 3) pekerjaan; 4) pendapatan rumah tangga; 5) keharmonisan keluarga; 6) ketersediaan waktu luang; 7) hubungan sosial; 8) kondisi rumah dan aset; 9) keadaan lingkungan; dan 10) kondisi keamanan.

Adapun capaian indikator untuk urusan pemerintahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan sebagaimana **Tabel** dibawah ini.

Tabel II-41. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)	%	N/A	N/A	N/A	60,95	63,92	65,11
2.	Persentase konflik antar masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	%	-	55,80	75,00	67,70	-	-
4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ LSM yang aktif	%	35,00	40,00	45,00	35,00	37,00	42,31
5.	Jumlah Kerusuhan /Kericuhan yang ditangani	kali	N/A	-	-	-	-	-
6.	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk	WMK	N/A	-	-	1	-	1
7.	Persentase bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	%	3,18	6,37	14,65	14,65	14,65	17,20
9.	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan pasca bencana)	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kesbangpol, BNN, Satpol PP, BPBD dan Sekretariat Daerah, 2018

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya belum terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif dapat dilakukan melalui pendekatan *Harm Minimisation*, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu *supply control, demand reduction dan harm reduction*. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai instansi koordinator dalam rangka penanggulangan bencana memegang peran penting dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana mengingat Kabupaten Trenggalek merupakan daerah rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, dan puting beliung). Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek, pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, BPBD akan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebagai upaya mengantisipasi bencana kebakaran. Untuk setiap pos WMK akan ditempat satu unit armada pemadam kebakaran (Damkar) lengkap dengan personel serta peralatan pendukung lain seperti tersedia lokasi pengambilan air. WMK sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek, sebab musibah

kebakaran dan bencana lainnya akan datang dengan tiba-tiba dan tentunya membutuhkan kesiapan ekstra cepat dari Damkar dan masyarakat dalam menanggulanginya.

2.3.1.6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pengertian Penanggulangan Kemiskinan adalah : kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat telah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi :

a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
b. Program Indonesia Pintar; dan
c. Program Indonesia Sehat.

Ketiga program tersebut merupakan upaya pemerintah memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya perbaikan tersebut berupa pemberian:

a. Simpanan Produktif;
b. Kesempatan berusaha dan bekerja;
c. Keberlanjutan pendidikan anak; dan
d. Jaminan Kesehatan

Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif. Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih efisien.

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial Pemerintah telah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu :

a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar; dan
c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.

Kita mengetahui di periode lalu ada beberapa program yang diaplikasikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat seperti : PNPM Mandiri dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian juga ada program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti : Program JALIN KESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) dan sekarang ber-transformasi menjadi Program JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga telah menyusun beberapa program-program inovasi dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya Program TRENGGALEK

(Trengginas Galang Ekonomi) dan Program APP (*Anty Poverty Program*). Pelaksanaan Program APP di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu 10 tahun yaitu mulai Tahun 2005 s.d Tahun 2016 telah menangani keluarga miskin sebanyak 3.069 KK dengan alokasi dana total (APBD Provinsi & APBD Kabupaten) sebesar + Rp. 7,5 Miliar. Program-program semacam ini perlu terus dipertahankan dan didukung dengan program-program sejenis dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan penanganannya harus dilakukan lintas sektor, sehingga melahirkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangat tergantung pada efektifitas program dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu dibutuhkan data yang akurat, kemitraan produktif dan partisipasi dari segenap komponen masyarakat. Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah untuk menerima keadaan apa adanya karena keenganan mereka untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan jumlah orang miskin itu stagnan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Kemiskinan juga merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu percepatan penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan bahkan merupakan masalah global yang secara khusus tertuang dalam tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan.

Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

Ada beberapa *thematic issue* yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun satu hambatan klise yang sering terjadi di masyarakat adalah pola pikir di masyarakat yang bangga miskin ketika digulirkan bantuan ke masyarakat. Masalah kemiskinan ini bukan sekedar masalah program, berapa besar dana yang digulirkan tapi lebih pada masalah moral. Ada soft campaign yang harus diberikan pada masyarakat, bahwa ada yang lebih berhak menerima.

Pada umumnya kondisi ekonomi keluarga miskin juga terlahir dari keluarga miskin. Tingkat pendidikan keluarga miskin juga tidak berbeda dengan tingkat pendidikan orangtua mereka. Keluarga miskin cenderung tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya pada jenjang yang lebih tinggi. Kemiskinan secara alamiah menyebabkan keturunannya juga terhambat dalam mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, akses sanitasi dan air bersih yang layak. Artinya keluarga miskin sekarang ini juga berpeluang untuk melahirkan keluarga miskin berikutnya, bila tidak ada perubahan mendasar yang mengubah kehidupannya. Sehingga perlu ada upaya untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 mengacu pada 3 (tiga) strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni:

a. Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh;
b. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat; dan
c. Mengembangkan penghidupan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Untuk perencanaan program perlindungan sosial tahun 2016-2021 akan menggunakan hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang akan diupdate setiap tahun. BDT ini menjadi sistem basis data yang dapat digunakan yang menyediakan nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program dan bertujuan memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari BDT, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu meminimalisasi kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial. Agar data yang dihasilkan valid, akurat dan dapat digunakan sebagai alat dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan.

Upaya mensinergikan dan mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi catatan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah karena selama ini anggaran pro-fakir miskin (pro poor) tersebar di berbagai program/kegiatan Perangkat Daerah dan dijalankan secara sektoral/parsial. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus melaksanakan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, agar ada sinergitas program-program yang ada di lapangan sehingga efektif mengangkat harkat dan martabat fakir miskin.

Tabel II-42. Capaian Indikator Urusan Sosial

NO.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan nasional	%	N/A	N/A	82,55	82,55	91,78	92,97
2.	Persentase partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	%	9,52	7,91	8,42	8,42	16,77	17,54

Sumber : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2018

Realita kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membutuhkan perhatian, penanganan, pengurusan, serta penanggulangan yang khusus, sehingga mereka dapat memperoleh atau menikmati hak untuk bertahan hidup yang layak, tidak diperlakukan diskriminatif, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Kemiskinan telah menimbulkan dampak negatif beragam dalam kehidupan masyarakat yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dampak negatif kemiskinan antara lain secara sosial-ekonomi menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan mansyarakat terhadap pelayanan birokrasi, dan kemungkinan menurunnya mutu generasi yang akan datang. Hal ini tentunya harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dimana untuk membuktikan Negara hadir dalam penanganan masalah sosial.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Isu tentang ketenagakerjaan menjadi permasalahan penting mengingat konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun memiliki dampak pada segi sosial. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada permasalahan pengangguran. Pengangguran memiliki dampak secara ekonomi dimana secara agregat pengangguran berarti berkurangnya kapasitas produksi sebuah perekonomian karena sebagian sumberdaya yang tidak digunakan. Secara sosial, permasalahan pengangguran berkaitan dengan pengakuan dari masyarakat, yang lebih jauh menyangkut pada status sosial di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan yang tersedia. Adapun penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat sebagai salah satu indikator yang dicakup dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah indikator ketenagakerjaan. Informasi ini akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel dibawah ini akan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan.

Tabel II-43. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase jumlah tenaga kerja peserta pelatihan yang terampil	%	84,80	88,50	86,75	N/A	90,00	92,00
2.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	83,33	87,50	87,50	88,89	90,32	76,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Persentase penempatan tenaga kerja	%	65,93	37,32	89,95	90,96	82,00	91,00
4.	Persentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal	%	N/A	15,59	32,69	40,40	43,00	30,00
5.	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja	%	45,31	52,96	56,87	51,54	59,00	63,00
6.	Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	18,48	18,48	52,66	56,40	39,00	98,00
7.	Persentase perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase sarana Hubungan Industrial yang sudah dibentuk	%	N/A	N/A	31,25	31,25	35,42	40,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pandangan bahwa relasi gender merupakan persoalan individu dan sifatnya spesifik terhadap budaya tertentu, menghambat upaya pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan lokal. Masih ada kekurang-pahaman yang mendasar tentang manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender. Istilah "gender" tidak mudah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan sering disalah-artikan sebagai istilah yang merujuk pada perempuan saja atau sebagai konsep yang diimpor dari Barat. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu.

Upaya pengarusutamaan gender baik di Kabupaten Trenggalek masih terfokus hanya pada peningkatan partisipasi perempuan dan tidak terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan juga belum dipahami dengan baik. Pada Tahun 2015 dan 2017 Kabupaten Trenggalek memperoleh penghargaan nasional "**Kabupaten Layak Anak**" tingkat pratama, dimana ini merupakan gambaran umum bahwa ada upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan kawasan yang ramah anak.

Adapun **Tabel** berikut menjelaskan tentang capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel II-44. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,83	91,04	92,58	92,76	92,81	93,14
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,06	70,65	70,77	71,92	66,21	71,98
3.	Angka Melek Huruf Perempuan	%	N/A	N/A	N/A	92,00	99,90	99,90
4.	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	%	31,00	35,00	37,00	40,00	50,00	55,00
5.	Persentase Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	N/A	N/A	N/A	65,00	71,28	100,00

Sumber : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Penyediaan pangan di Kabupaten Trenggalek hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2016 sebagaimana dijabarkan pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel II-45. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

No.	Komoditi	Satuan	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1	Ketersediaan Pangan :						
	Padi	ton	181.476,39	155.908,69	170.660,66	196.451,00	181.393,00
	Jagung	ton	63.424,18	67.535,81	80.672,95	88.135,00	59.333,00
	Kedelai	ton	5.936,04	7.951,88	9.793,20	8.492,00	10.575,00
	Ubi Kayu	ton	336.309,30	361.774,45	298.117,95	174.805,00	218.818,00
2	Cadangan Pangan	ton	-	-	12,60	12,60	12,60
3	Pola konsumsi masyarakat yang berimbang sesuai skor PPH (Pola Pangan Harapan)	PPH	78,90	89,40	87,89	89,30	87,50

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak millik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang "terkuat dan terpenuh", maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Sedangkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari seluruh bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak 787 bidang tanah yang sudah bersertifikat masih sebanyak 491 bidang tanah atau 62,38%. Dan sebanyak 130 bidang tanah masih dalam tahap proses persertifikatan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari proses persertifikatan sejak tahun 2011 yang hingga saat ini masih belum selesai.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan jalan wilayah Popoh-Prigi-Panggul (Jalan Lintas Selatan) Pemerintah Kabupaten Trenggalek di tahun 2016 melakukan pembebasan lahan milik Perhutani seluas 208,38 Ha, tanah milik penduduk dan lain-lain yang dibebaskan seluas 37,846 Ha. Sedangkan tanah yang belum terbebaskan berupa tanah kawasan hutan dan tanah non kehutanan seluas 73,842 Ha atau seluas 22,99%.

Capaian Indikator Urusan Pertanahan untuk Tahun 2014-2017 dijelaskan sebagaimana pada **Tabel** berikut :

Tabel II-46. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Luas Pemda yang Lahan Bersertifikat (%)	23,50	62,98	87,98	47,52
2	Persentase Pembebasan Lahan untuk JLS (%)	30,22	35,64	35,64	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah dan Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Meningkatnya intensitas kegiatan di Kabupaten Trenggalek mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung wilayah pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup :

Tabel II-47. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	54,61	67,04	65,79
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	10,00	45,83	55,83
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	89,98	95,59	80,79
	c. Indeks Tutupan Vegetasi	Poin	61,53	61,53	62,00
2.	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	titik	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2018

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. IKLH dihitung dengan cara menggabungkan semua komponen indeks yang mencakup Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup. Peningkatan IKLH dapat dilakukan melalui (i) penyediaan satu taman satu komunitas/desa, (ii) pencanangan satu rumah satu pohon, (iii) kampanye pagar hijau, (iv) inisiasi pengembangan jalan yang berbunga dan berpohon buah-buahan (*urban trees*), (v) inisiasi kebijakan/peraturan mengenai gedung yang berwawasan lingkungan (*green building*), (vi) pengembangan pertanian di perkotaan (*urban farming*), (vii) perwujudan Kabupaten Trenggalek *green* & *clean*, (viii) penghargaan untuk individu yang peduli lingkungan, dan lain sebagainya.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk hasil registrasi penduduk Tahun 2017 sebanyak 761.730 jiwa, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik.

Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK pada tahun 2017 telah mencapai 99,95%. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kabupaten Trenggalek baru mulai terlaksana Tahun 2012. Kabupaten Trenggalek saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel II-48. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1.	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	%	94,71	91,90	99,95
2.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	B (70,37)	B (76,27)	B (77,13)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan arah pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan struktural masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi yang potensial menimbulkan permasalahan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT).

Tabel II-49. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	N/A	N/A	**0,64**	0,65	0,66
2	Jumlah Desa Maju	Desa	N/A	N/A	**21**	30	30
3	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	LPM	N/A	N/A	**3**	3	3
4	Persentase Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan	%	32,00	37,00	39,00	50,00	82,24
5	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Yang berdaya	%	N/A	N/A	**N/A**	19,29	41,93

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju. Jika dilihat perkembangannya, persentase peserta KB aktif di Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami penurunan. Jika pada Tahun 2011, persentase peserta KB aktif mencapai 86,53%, bahkan Tahun 2013 meningkat mencapai 91,20 %, Tahun 2015 hanya sebesar 75,00% sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 75,40% dan pada Tahun 2017 mencapai 81,37%. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kabupaten Trenggalek. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Tabel II-50. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Poin	2,1	2,3	2,3	2,08	2,08	2,08	2,03
2.	Persentase KB Aktif	%	86,53	85,87	91,2	84,77	75,00	75,40	81,37

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.9. Perhubungan

Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas transportasi berupa terminal luar kota dan terminal dalam kota (MPU) yang lokasinya terpisah. Terminal luar kota melayani kendaraan umum jarak jauh yaitu antar kabupaten dan antar provinsi, oleh sebab itu moda transportasi yang masuk dan keluar terminal ini berukuran besar yaitu bus beroda empat dan enam. Sarana angkutan umum yang melintasi kawasan perkotaan Trenggalek meliputi bus, *colt*, dan angkutan pedesaan. Sedangkan fasilitas transportasi yang ada berupa Terminal Bus dan Terminal Mobil Penumpang Umum (MPU) yaitu berupa Sub Terminal sebagai terminal mobil umum ukuran kecil (semacam Angkot/Angkutan Kota).

Moda Transportasi dan capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Trenggalek seperti pada **Tabel** berikut:

Tabel II-51. Moda Transportasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017

Jenis Data				Tahun							Satuan	Ket.
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Perhubungan												
A	Transportasi Darat											
	1	Angkutan Jalan		-	-	-	-	-	-	-	Unit	
	2	Terminal										
		a	Kelas A	-	-	-	1	1	1	1	Unit	
		b	Kelas B	1	1	1	-	-	-	-	Unit	

Jenis Data				Tahun							Satuan	Ket.
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
		c	Kelas C	5	5	5	6	6	6	6	Unit	
		d	Bus (Akap)	315	342	352	400	438	222	263	Unit	
		e	Jumlah Penumpang	261.082	228.387	218.542	267.706	280.021	266.020	216.726	Orang	
		f	Jumlah Jembatan Timbang	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
	3		Angkutan Penyeberangan									
		a	Dermaga	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		b	Komersil	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		c	Perintis	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		d	Kapal Motor	1.048	966	805	299	321	1.080	1.621	Unit	
		e	Kendaraan Roda Dua	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
B			Transportasi Laut									
	1		Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
	2		Yang Diusahakan									
		a	Peti Kemas	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		b	Semi Peti Kemas	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		c	Non Peti Kemas	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
	3		Yang Tidak Diusahakan									
		a	Kendaraan Ikan	2.068	2.068	2.105	1.185	1.185	-	-	Unit	PPN Prigi
		b	Kapal	-	-	-	-	-	-	-	Unit	
		c	Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	Orang	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II-52. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

NO.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase jumlah MPU yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase kendaraan wajib uji yang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan	%	50,13	50,65	51,19	51,78	33,16	33,29	33,47

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah tersedia selama ini, yaitu http://www.trenggalekkab.go.id, yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Trenggalek dapat secara mudah diakses oleh siapapun serta dan merupakan portal media komunikasi dimana masyarakat dapat mendapatkan

informasi dan dapat berpartisipasi dalam memberikan saran, rekomendasi serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Trenggalek menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran penyelenggara pemerintahan diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Trenggalek dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Pada Tahun 2013 juga telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) baik ditingkat Kabupaten dan masing-masing Perangkat Daerah yang akan menjadi sumber informasi secara struktural kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi yang memenuhi persyarakat dan prosedur yang telah ditentukan.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten Trenggalek sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai ***"SMART Regency"***, hal ini telah dimulai pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Fasilitas hotspot (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau spot di masing-masing kecamatan dengan bekerjasama dengan PT. Telkom. Perlu diukur Indeks *e-government* berdasarkan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) sebagai indikator yang mengukur implementasi SMART Regency. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika :

Tabel II-53. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks *e-Government*	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,82	3,09
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,00	100,00
3.	Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
4.	Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi dan Persandian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi terutama dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional yang belum berpihak kepada kelompok miskin maka sudah sepatutnya koperasi lebih diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait dengan penggunaan modal, bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi yang perlu diperhitungkan.

Persentase perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode 2011-2016, tercatat mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada Tahun 2011 persentase koperasi aktif hanya 52,91 % dari total 584 koperasi yang ada, sedangkan di Tahun 2013 persentase koperasi aktif di Kabupaten Trenggalek mencapai 71,50 % dari total 379 koperasi yang ada. Pada Tahun 2014 Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan cukup signifikan menjadi hanya 172 koperasi dari 609 koperasi yang ada, dan meningkat kembali sebesar 37,00% atau 224 koperasi. Sedangkan Tahun 2015 persentase koperasi aktif naik menjadi 190 koperasi atau 31,10%, dan persentase koperasi sehat sebanyak 19,64% dari keseluruhan koperasi yang ada dinilai sebagai koperasi sehat, namun hal ini masih dibutuhkan upaya yang lebih untuk mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang ada.

Tabel II-54. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2011-2017

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah koperasi	584	596	379	609	611	707	716
Jumlah Koperasi aktif	309	329	271	172	199	340	358
Jumlah Koperasi sehat	65	72	85	93	120	177	30
Persentase koperasi aktif (%)	**52,91**	**55,20**	**71,50**	**28,24**	**31,10**	**25,00**	**50,00**
Persentase koperasi sehat (%)	**11,13**	**12,08**	**22,43**	**15,27**	**19,64**	**25,03**	**4,18**

Sumber : Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2018

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif.

Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum membaiknya iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari kesulitan koperasi untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi, pemasaran, dan informasi. Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai kondisi baik yang terbentuk secara alami sebagai derivasi dari sistem perekonomian yang dilaksanakan, maupun yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dukungan iklim usaha yang kondusif bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis sangat diperlukan bagi mereka. **Tabel** berikut menggambarkan perkembangan UKM :

Tabel II-55. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016

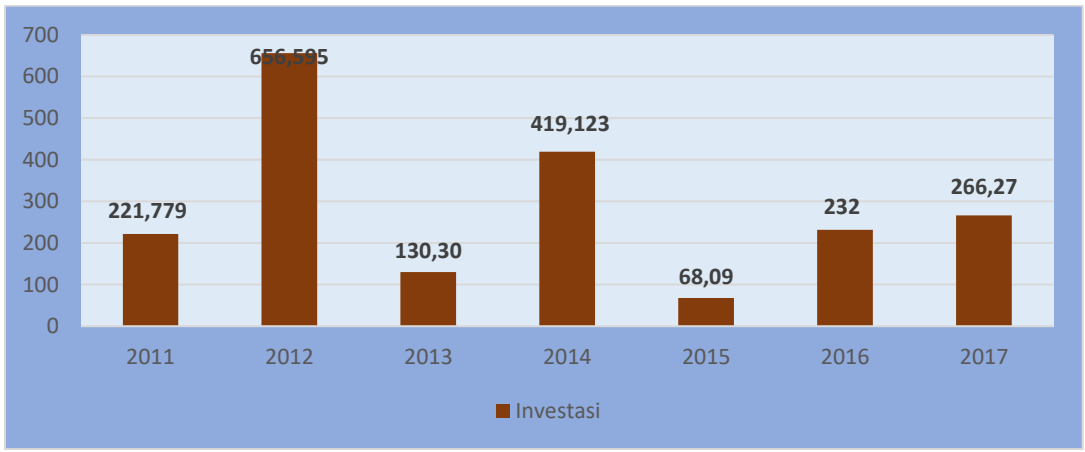
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pembinaan dan Pengembangan Usaha UMKM	28	74	99	27	296	365
Penumbuhan wirausaha baru	-	10	14	-	100	160
Pengembangan jaringan dan pemasaran produk UMKM	3	5	10	15	19	44
Penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM	-	-	69	119	110	160
Peningkatan standarisasi produk UMKM	-	50	50	-	25	42

Sumber : Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2017

2.3.2.12. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Adapun perkembangan jumlah investasi di Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan sebagaimana **Grafik** berikut :

Grafik II-17. Jumlah Investasi di Kabupaten Trenggalek (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek, 2018

Dari **Grafik** diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah investasi di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif yaitu pada Tahun 2011 sebesar 221,799 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2012 sebesar 656,595 milyar rupiah, pada Tahun 2013 sebesar 130,3 milyar rupiah, naik kembali pada Tahun 2014 sebesar 419,123 milyar rupiah, pada Tahun 2015 sebesar 165 milyar rupiah, pada Tahun 2016 jumlah investasi di Kabupaten Trenggalek mencapai 232 milyar rupiah, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 266,27 milyar rupiah.

Dengan adanya nilai investasi yang fluktuatif selama 4 (empat) tahun dan pada Tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan maka diperlukan langkah – langkah dan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan pelayanan perizinan dan penanaman modal, meningkatkan strategi promosi investasi, menerapkan teknologi informasi dan mempersiapkan perbaikan SDM tenaga kerja yang berkualitas.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan, seperti balai karang taruna dan penyediaan Co-Working space perlu ditingkatkan dalam rangka mewadai kreatifitas para pemuda.

Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa Kemenpora memiliki target RPJMN, seluruh Desa memiliki lapangan olahraga pada Tahun 2019. Hal ini tentunya dapat diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan jumlah atlet dan cabang olahraga berprestasi. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga :

Tabel II-56. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	%	**4,66**	5,75	28,29
2	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	orang	**21**	23	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.14. Statistik

Dokumen Kabupaten Trenggalek Dalam Angka selama periode 2011-2017 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Trenggalek dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Trenggalek yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Selain itu produk lain yang dihasilkan adalah IPM, Buku Profil Kabupaten Trenggalek dan Buku Saku. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Statistik :

Tabel II-57. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,50	100,00
2.	Jumlah produk dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.15. Persandian

Urusan Persandian adalah urusan baru dimana sebelumnya melekat di Urusan Otonomi Daerah dengan SKPD Pelaksana yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol). **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Persandian :

Tabel II-58. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perangkat Daerah dengan pelayanan Jaringan persandian dalam kondisi baik	Perangkat Daerah	31	32	33	34	35	40	40
2.	Persentase pelayanan Jaringan persandian di Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	64,58	66,67	68,75	70,83	72,92	75,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.16. Kebudayaan

Selain daerah wisata, Kabupaten Trenggalek juga dikenal sebagai daerah dengan budaya yang khas dan diharapkan terus berkembang hingga level nasional dan bahkan internasional. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan (seperti Festival Jaranan Turangga Yaksa) serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Kebudayaan :

Tabel II-59. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1	Persentase Benda Cagar Budaya/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	jenis	**19,00**	19,00	34,00
2	Jumlah Penyelenggaraan event dan gelar seni sebagai misi kebudayaan level regional dan nasional (event)	jenis	**2**	3	4
3	Persentase kesenian yang dilestarikan	seni budaya	**13,00**	14,00	52,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.17. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama kurun waktu Tahun 2011-2017 di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2011 jumlah kunjungan hanya mencapai 15.434 orang, kemudian kurun pada Tahun 2012 menjadi 14.795 orang. Pada Tahun 2013 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 16.334 orang dan kembali menurun menjadi 14.670 orang pada Tahun 2014 dan meningkat kembali pada Tahun 2015 menjadi 16.582 orang. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 14.753 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 29.674 orang.

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Perpustakaan Desa tumbuh cukup signifikan dimana pada Tahun 2011 hanya ada 19 perpustakaan desa dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 57 perpustakaan desa yang aktif. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Perpustakaan :

Tabel II-60. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Minat Baca	poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,37	2,41
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	15.434	14.795	16.334	14.670	16.582	16.750	29.673
3	Jumlah Perpustaaan Desa yang Aktif	unit	19	19	33	41	41	46	57

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku atau data Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2015 baru mencapai 14,58% dan pada tahun 2016 mencapai 16,67%. Sedangkan pada Tahun 2017 turun menjadi 10,00%. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional juga perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. **Tabel** dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Kearsipan :

Tabel II-61. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase data Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	%	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	16,67	10,00
2.	Persentase data/informasi/arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek sangat besar dengan panjang pantai mencapai 96,00 km dan luas wilayah laut ZEE mencapai ± 213.350 Ha. Potensi perikanan darat dan laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan para nelayan setempat. PPN Prigi kedepannya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang didukung dengan pengembangan Jalan Lintas selatan (JLS). **Tabel** berikut menjelaskan mengenai potensi kelautan dan perikanan Tahun 2012-2017.

Tabel II-62. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2017

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Pantai	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km
2	- Luas Wilayah laut 4 mil	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha
	- Luas Wilayah laut 12 mil (ZEE)	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha
	- Luas Wilayah laut 200 mil (ZEEI)	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha
3	Tingkat pemanfaatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Jumlah pulau – pulau kecil	57 buah	57 buah	57 buah	57 buah	57 buah	57 buah
5	Kawasan hutan bakau	140,60 Ha	141,00 Ha	169,60 Ha	169,60 Ha	171,5 Ha	171,5 Ha
6	Kawasan terumbu karang	122 Ha	122 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha
7	Jumlah armada perikanan	2.105 Unit	1.185 Unit	1.185 Unit	1.185 Unit	1.185 Unit	1.185 Unit
8	Jumlah alat tangkap	4.538 Unit	1.246 Unit	1.759 Unit	1.759 Unit	1.759 Unit	2.430 Unit

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9	Jumlah nelayan	9.962 Orang	9.656 Orang	9.656 Orang	9.656 Orang	9.656 Orang	9.788 Orang
10	Jumlah Pembudiyaan ikan	2.544 Orang	2.594 Orang	2.635 Orang	2.686 Orang	2.758 Orang	2.773 Orang
11	Jumlah pengolahan ikan	642 Unit	619 Unit	621 Unit	617 Unit	617 Unit	589 Unit
12	- Potensi areal tambak	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha
	- Termanfaatkan	17,6 Ha	17,6 Ha	17,6 Ha	6,8 Ha	6,8 Ha	6,91 Ha
13	- Potensi budidaya laut	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha
	- Termanfaatkan	40,5 Ha	-	-	-	-	-
14	- Potensi budidaya kolam	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha
	- Termanfaatkan	17,99 Ha	18,72 Ha	19,25 Ha	19,96 Ha	19,96 Ha	21,23 Ha
15	Potensi perairan umum	± 17 Ha					
	- Waduk		20,9 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha
	- Sungai		323,5 Km	297,506 Km	297,506 Km	297,506 Km	297,506 Km
16	Produksi hasil penangkapan						
	- Laut	37.070.400 Kg	36.550.160 Kg	18.532.230 Kg	24.733.490 Kg	24.733.490 Kg	18.472.490 Kg
	- Perairan umum	16.390 Kg	17.898 Kg	18. 100 Kg	18.350 Kg	19.210 Kg	20.300 Kg
17	Produksi budidaya di kolam	2.566.786 Kg	2.744.437 Kg	3.236.759 Kg	3.862.252 Kg	4.103.592 Kg	4.407.520 Kg
18	Produksi budidaya di tambak	-	-	-	4.100 Kg	26.218 Kg	27.210 Kg

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2018

Dari data produksi hasil kelautan dan perikanan Tahun 2011-2017, produksi hasil laut atau perikanan tangkap menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 24.751,84 ton menjadi 4.652,19 ton atau mengalami penurunan sebesar 20.099,65 ton atau sebesar 81,21% dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 18.492,79 ton. Sedangkan dari produksi perikanan budidaya dan perairan umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2016 produksi perikanan budidaya sebesar 4.129,81 ton atau mengalami peningkatan sebesar 263,46 ton atau sebesar sebesar 6,81% dan pada Tahun 2017 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.434,73 ton.

Jumlah rumah tangga perikanan hingga kini tercatat sebanyak 4.136 rumah tangga terdiri dari 1.807 rumah tangga perikanan tangkap laut, 300 Rumah tangga Perikanan Tangkap PUD, 2.017 rumah tangga perikanan budidaya kolam dan 12 Rumah tangga Perikanan Budidaya Tambak. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Panggul, Munjungan dan Watulimo. Indikator sasaran pembangunan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Angka Konsumsi Ikan. NTN merupakan Indeks yang diterima nelayan (It) dibandingkan dengan Indeks Harga yang dibayar (Ib). Sedangkan Angka Konsumsi Ikan dari Tahun 2011-2015 mengalami trend yang meningkat, dimana pada Tahun 2015 mencapai 23,51 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan ini masih tergolong rendah mengingat Kabupaten Trenggalek adalah Kabupaten berbasis maritim di pesisir selatan Jawa yang memiliki produksi perikanan yang cukup tinggi, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. **Tabel** dibawah ini menjelaskan tentang capaian kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan :

Tabel II-63. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,00	116,00
2.	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	20,43	21,07	22,66	22,88	23,51	24,01	28,12
4.	Produksi Perikanan :								
	Produksi Perikanan Budidaya								
	a. Pembesaran	ton	2.433,20	2.566,79	2.744,44	3.236,76	3.866,35	4.129,81	4.434,73
	- Kolam	ton	2.433,20	2.566,79	2.744,44	3.236,76	3.862,25	4.103,592	4407,52
	- Tambak	ton	-	-	-	-	4,10	26,218	27,21
	b. Produksi pembenihan	ekor	22.008.000	27.595.000	26.411.850	26.556.350	27.892.150	27.488.300	28.698.550
	c. RTP Pembudidaya	RTP	1.583	1.892	1.931	1.964	1.998	2.029	2.040
	d. Luas Kawasan Budidaya	Ha	17,14	17,99	18,72	19,25	27,96	28,96	28,14
	- Kolam	Ha	17,14	17,99	18,72	19,25	19,96	20,16	21,23
	- Tambak	Ha	-	-	-	-	8,00	8,80	6,91
	Produksi Perikanan Tangkap		41.101,18	37.086,79	36.568,06	18.550,35	24.751,84	4.652,19	18.492,79
	- Tangkap Laut	ton	41.085,70	37.070,40	36.550,16	18.532,23	24.733,49	4.632,98	18.272,49
	- Tangkap Perairan Umum Daratan	ton	15,48	16,39	17,90	18,12	18,35	19,21	20,30
5.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.953.951.950

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2018

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan lele, gurame, dan nila. Minapolitan berbasis perikanan budidaya berada di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan *hinterland*. Sedangkan kawasan minapolitan berbasis tangkap dikembangkan di Kecamatan Watulimo dengan Kecamatan Panggul dan Munjungan sebagai *hinterland*-nya.

Ada 4 (empat) komoditas unggulan dari perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek, yaitu Ikan Cakalang, Ikan Tuna, Layur dan Lobster dengan capaian produksi Tahun 2017 untuk Ikan Cakalang sebesar 79,27 ton, ikan tuna madidihang sebesar 232,24 ton, ikan tuna mata besar sebesar 1,978 ton, ikan layur sebesar 1,371,65 ton, dan lobster sebesar 0,66 ton. Capaian produksi tahun 2017 untuk ikan lele sebesar 3.633,602 ton, ikan gurami sebesar 337,51 ton, dan ikan nila sebesar 114,15 ton. Sedangkan untuk budidaya tambak dengan komoditas udang vanamme pada tahun 2016 mengahasilkan produksi sebesar 26,218 ton.

Dalam pengembangan sektor perikanan, selain program minapolitan juga dapat dikembangkan program agrominapolitan yang menggabungkan konsep pertanian dan perikanan dalam suatu kawasan pengelolaan terpadu sehingga dapat mewujudkan sistem agro/mina industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.3.3.2. Pariwisata

Obyek wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata minat khusus. Hingga akhir Tahun 2017 jumlah obyek wisata yang telah dikelola dan potensi objek wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 obyek wisata alam yang terdiri dari obyek wisata pantai, goa, pemandian, agrowisata, air terjun, dan telaga. Selain obyek wisata alam, di Kabupaten Trenggalek juga ada obyek wisata budaya dan minat khusus. Jenis obyek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini :

Tabel II-64. Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pantai Prigi	Wisata Alam	Watulimo
2	Pantai Karangongso	Wisata Alam	Watulimo
3	Pantai Damas	Wisata Alam	Watulimo
4	Pantai Cengkrong	Wisata Alam	Watulimo
5	Pantai Pelang	Wisata Alam	Panggul
6	Pantai Konang	Wisata Alam	Panggul
7	Pantai Blado	Wisata Alam	Munjungan
8	Pantai Ngampiran	Wisata Alam	Munjungan
9	Gua Lowo	Wisata Alam	Watulimo
10	Gua Suruban	Wisata Alam	Watulimo
11	Gua Ngerit	Wisata Alam	Kampak
12	Gua Gajah	Wisata Alam	Bendungan
13	Gua Kalimati	Wisata Alam	Dongko
14	Gua Pringapus	Wisata Alam	Dongko
15	Pemandian Tapan	Wisata Alam	Karangan
16	Wonowisata	Wisata Alam	Trenggalek
17	Agrowisata Dilem	Wisata Alam	Bendungan
18	Air Terjun Kalianak	Wisata Alam	Tugu
19	Air Terjun Jero Guih	Wisata Alam	Karangan
20	Telaga Beji Maron	Wisata Alam	Gandusari
21	Taman Kili-Kili	Wisata Alam	Panggul

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II-65. Obyek Wisata Budaya

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Upacara Larung Sembonyo	Wisata Budaya	Watulimo
2	Upacara Longkangan	Wisata Budaya	Munjungan
3	Prasasti Kamulan	Wisata Budaya	Durenan
4	Tradisi Tiban	Wisata Budaya	Trenggalek
5	Jaranan Turonggo Yakso	Wisata Budaya	Dongko
6	Tradisi Baritan	Wisata Budaya	Dongko
7	Tradisi Religi Kupatan	Wisata Budaya	Durenan dan Trenggalek
8	Bersih Dam Bagong	Wisata Budaya	Trenggalek
9	Bersih Belik Sumbergedong	Wisata Budaya	Durenan dan Trenggalek
10	Tradisi Ngitung Batih	Wisata Budaya	Dongko

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

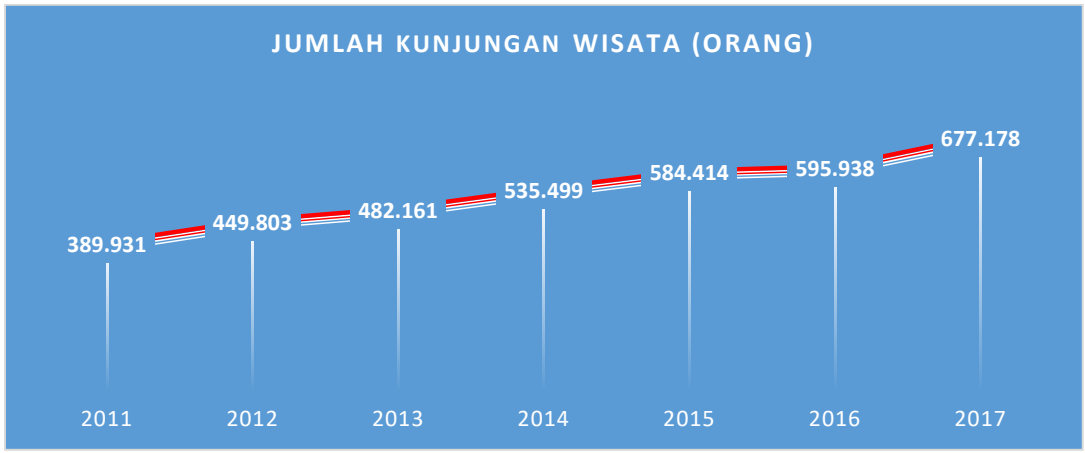
Tabel II-66. Objek Wisata Minat Khusus

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Panjat Tebing Gunung Linggo	Minat Khusus	Suruh
2	Panjat Tebing Gunung Sepikul	Minat Khusus	Watulimo

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

Jumlah kunjungan wisata di kabupaten Trenggalek di tahun 2017 sebesar 677.178 orang, naik dari tahun 2015 dan 2016 yang jumlahnya mencapai 584.414 orang dan 595.938 orang. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek wisata tentunya harus terus dilakukan untuk menjaga eksistensi Kabupaten Trenggalek sebagai daerah wisata dan tentunya jumlah wisatawan ini berpengaruh terhadap potensi peningkatan PAD yang dihasilkan.

Grafik II-18. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2017 (orang)



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

Obyek wisata di Trenggalek memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk masa kini dan mendatang. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Trenggalek sebanyak 677.178 orang dari 5 (lima) Obyek Wisata Unggulan, yaitu Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Pelang, Goa Lowo dan Kolam Renang Tirta Jwalita. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di Pantai Karanggongso sebanyak 436.847 orang. Jumlah kunjungan wisata masing-masing obyek wisata secara terinci sebagaimana diuraikan pada **Tabel** dibawah ini :

Tabel II-67. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017

No.	Obyek Wisata Unggulan	Lokasi	Jumlah Wisatawan (orang)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pantai Prigi	Kec. Watulimo	88.347	82.211	90.251	77.259	98.450
2	Pantai Karanggongso	Kec. Watulimo	288.165	341.405	358.596	393.903	436.847
3	Pantai Pelang	Kec. Panggul	19.380	29.187	48.805	50.335	68.664
4	Goa Lowo	Kec. Watulimo	38.267	38.263	43.025	34.344	28.062
5	Kolam Renang Tirta Jwalita	Kec. Trenggalek	48.002	44.433	43.737	40.098	45.155
Jumlah			**482.161**	**535.499**	**584.414**	**595.938**	**677.178**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

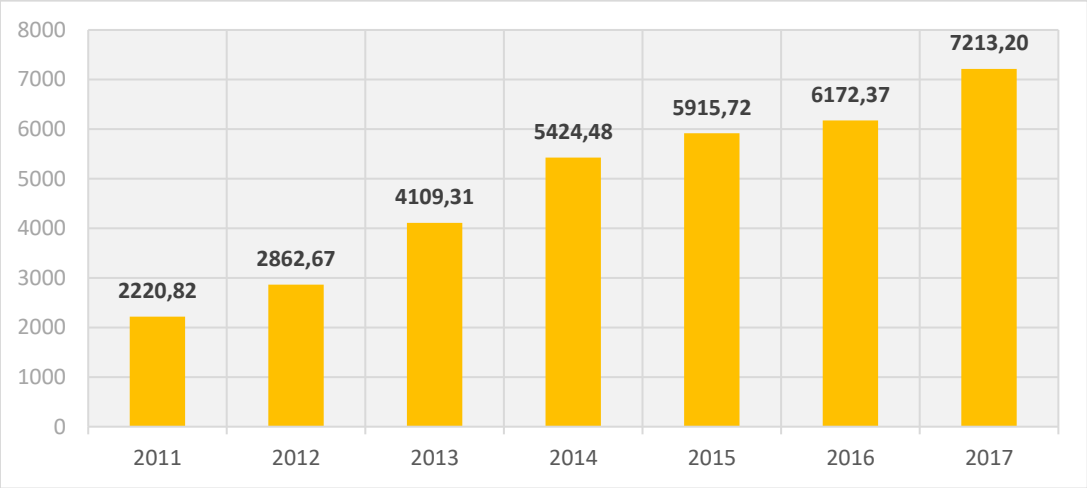
Adapun dari pengelolaan potensi pariwisata tersebut secara tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan besaran sebagaimana ditunjukkan **Grafik** dimana pada Tahun 2011 PAD sektor pariwisata hanya sebesar Rp. 2.220,82 Milyar, sedangkan pada Tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp. 7.213.20 Milyar naik 21,93% dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 5.915,72 Milyar.

Kegiatan kepariwisataan di Trenggalek telah menjadi sektor yang cukup strategis di dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari nilai manfaat yang besar kepada daerah tujuan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung . Nilai manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap sistem perekonomian suatu wilayah karena aktivitas pariwisata dapat berkembang menjadi aktivitas industri yang mampu menggerakkan sektor ekonomi. Manfaat tersebut bisa berupa penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata maupun berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti hotel, rumah makan, transportasi, jasa penukaran uang asing dan lain-lain.

Industri pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya, serta melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun terkadang ada beberapa pihak yang belum dapat bersinergi dalam misi pengembangan pariwisata. Sehingga sumber daya pariwisata yang dimiliki masih belum dapat dioptimalkan pengembangannya. Ada beberapa tempat-tempat di Kabupaten Trenggalek yang potensial dan dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Pengembangan obyek baru sangat diperlukan guna menambah destinasi alternatif bagi para wisatawan agar tidak menimbulkan kejenuhan. Obyek wisata tidak harus selalu berupa tempat atau situs. Tapi juga bisa berupa kegiatan atau aktivitas menarik yang bisa mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam urat nadi perekoniman di Kabupaten Trenggalek. Karena, pariwisata menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD meningkat, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakatnya juga akan membaik. Salah satu faktor penentunya adalah jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, para *stakeholder* pariwisata di Kabupaten Trenggalek harus bersinergi dalam menjalankan manajemen wisata dan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif.

Grafik II-19. Capaian PAD Pariwisata Tahun 2011-2017



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2018

2.3.3.3. Pertanian

Indikator sasaran pembangunan daerah Urusan Pertanian dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan PDRB sektor pertanian. NTP merupakan Indeks yang diterima petani (It) dibandingkan dengan Indeks Harga yang dibayar (Ib). Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 masih didominasi sektor pertanian dengan persentase mencapai 30,92 % dengan nilai kontribusi mencapai 4.611 Triliyun Rupiah.

Pertanian dan Perkebunan

Pada tahun 2017 produksi pertanian tanaman pangan untuk padi dengan hasil produksi mencapai 187.226 ton, jagung mencapai 66.897 ton, ubi kayu mencapai 223.245 ton, kacang tanah mencapai 858 ton, dan produksi kedelai mencapai produksi 11.551 ton. Apabila dilihat dari wilayah penghasil produksi tertinggi, maka untuk komoditas padi tertinggi pada wilayah Kecamatan Panggul, ubi kayu pada Kecamatan Dongko, kacang tanah pada wilayah Kecamatan Durenan, produksi jagung tertinggi pada Kecamatan Tugu dan produksi tertinggi kedelai pada Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gandusari.

Produksi Hasil Pertanian Tahun 2011-2017 dijelaskan pada **Tabel** berikut.

Tabel II-68. Produksi Hasil Pertanian (ton)

Uraian	Th 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
Padi	149.220	173.003	177.636	169.608	184.604	210.925	187.226
Jagung	64.438	79.663	63.423	76.294	90.959	98.668	66.897
Ubi kayu	350.463	402.063	336.309	425.617	350.727	205.653	228.245
Kacang tanah	2.857	1.593	3.559	2.059	2.907	2.347	858
Kedelai	7.019	7.528	5.933	8.367	10.326	9.202	11.551

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah kelapa, nilam, coklat, cengkeh, dan tebu. **Tabel** berikut menjelaskan jumlah produksi hasil perkebunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017.

Tabel II-69. Produksi Hasil Perkebunan (ton)

Uraian	Th 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	2017
Kelapa	10.609,75	10.652,50	8.689,25	10.475,75	10.399,75	15.960,14	11.509,73
Cengkeh	536,75	589,25	319,75	551,25	2.462,96	1.838,12	593,40
Kopi	170,25	179,25	174,5	179,75	291,95	316,32	304,19
Coklat	759,25	767,75	664,75	869,75	820,10	1.171,90	1.306,91
Nilam	-	828,50	360,75	313,75	-	920,00	2.743,20

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Komoditi sayuran pada umumnya terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 sebesar 4.342 kwintal, Tahun 2012 meningkat mencapai 5.074 kwintal, Tahun 2013 kembali turun menjadi 4.912 kwintal dan pada Tahun 2014 kembali meningkat menjadi 6.400 kwintal, pada Tahun 2015 sebesar 4.956 kwintal. Untuk buah-buahan, komoditi terbanyak produksinya pada Tahun 2015 adalah pisang dengan produksi 167.866 kwintal disusul durian dengan produksi 157.314 kwintal. Adapun **Tabel** berikut menjelaskan tentang jumlah produksi komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017.

Tabel II-70. Produksi Sayur- Sayuran (kwintal)

Jenis Sayur	*Th. 2011*	*Th. 2012*	*Th. 2013*	*Th. 2014*	*Th. 2015*	*Th. 2016*	*2017*
Bawang putih	-	-	-	-	-	-	-
Bawang merah	-	90	-	-	63	63	936
Kubis	-	-	-	-	-	-	-
Sawi	1.381	1.123	609	940	590	747	1.428
Kacang-kacangan	2.313	2.540	3.497	3.500	2.852	2.623	2.313
Lombok/ Cabe	4.342	5.074	4.912	6.400	4.956	3.933	6.778
Tomat	1.141	524	320	170	688	10	250
Terong	2.712	2.332	2.421	2.240	1.710	2.552	1.107
Buncis	1.027	572	789	580	524	965	1.938
Ketimun	634	516	550	940	3.148	1.800	1.346
Labu Siam	2.955	2.933	7.227	2.440	7.227	5.810	5.819
Kangkung	2.815	2.176	2.653	1.970	2.963	1.502	1.181
Bayam	674	339	340	470	537	490	351
Kentang	-	-	456	190	814	814	252
Jumlah	**19.994**	**18.219**	**23.774**	**19.840**	**26.072**	**17.769**	**23.699**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II-71. Produksi Buah-Buahan (kwintal)

Jenis Buah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alpokad	3.684	51.056	176.423	17.860	22.177	14.135	19.760
Mangga	53.225	72.654	61.364	58.160	96.795	10.101	41.253
Rambutan	11.778	25.309	87.078	16.790	23.059	2179	5.904
Duku	36	3.518	10.871	4.080	4.046	3.897	26
Jeruk	12	32	250	260	1.749	1.948	5.483
Salak	21.615	34.402	111.799	61.240	50.419	51.702	50.668
Durian	25.594	142.764	452.031	71.940	157.314	419.344	114.805
Jambu air	539	934	939	760	715	256	526
Jambu biji	446	1.484	1.023	970	905	1.444	1.104
Sawo	619	3.385	9.216	970	952	1.026	1.401
Papaya	3.651	3.929	4.824	9.330	6.703	7.032	10.587
Pisang	11.7658	118.991	260.484	250.470	167.866	161.759	209.424
Nanas	45	63	76	40	117	870	77
Manggis	2.542	5.076	15.179	620	19.766	34.519	27.465
Jumlah	**241.444**	**463.597**	**1.191.557**	**493.490**	**552.583**	**706.280**	**502.669**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Peternakan

Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dengan populasi tertinggi ada 7 (tujuh) hewan ternak, sebagaimana diuraikan pada lokasi konsentrasi sebagai berikut :

Tabel II-72. Potensi Produksi Peternakan Tahun 2011-2017

No.	Komoditas Unggulan	Jumlah Populasi (Ekor)							Lokasi Konsentrasi (Kecamatan)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sapi Potong	42.560	43.411	29.905	31.431	32.668	33.887	34.515	Bendungan, Panggul, Tugu, Karangan
2	Sapi Perah	5.405	5.554	4.347	4.567	4.831	5.191	4.921	Bendungan, Pule, Suruh
3	Kambing	226.470	229.377	233.965	340.635	362.287	383.369	398.012	Pule, Dongko, Panggul, Kampak
4	Ayam Potong	167.940	503.711	509.098	1.864.000	1.919.920	1.944.594	2.280.354	Kampak, Gandusari, Karangan, Durenan
5	Ayam Buras	575.682	792.386	824.081	853.450	908.517	952.033	986.092	Pule, Tugu, Dongko, Pogalan
6	Itik	94.274	90.368	92.179	165.200	172.532	179.193	185.179	Durenan, Gandusari, Pogalan, Tugu
7	Burung Puyuh	63.554	140.102	142.904	148.523	157.422	173.864	262.000	Durenan, Kampak, Gandusari, Karangan

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II-73. Produksi Daging Telur dan Susu di Kab. Trenggalek

No	Jenis Produksi	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Daging (Ton)**	**4.649,15**	**3.796,54**	**4.395,19**	**5.740,05**	**5.886,06**
	- Sapi	781,36	1.187,07	1.275,08	1.221,93	1.225,93
	- Kerbau	1,07	1,76	0,90	1,84	0,90
	- Kambing	798,09	868,92	843,11	839,47	848,54
	- Babi	-	-	-	-	-
	- Domba	50,88	44,23	46,17	53,89	52,71
	- Ayam Buras	881,37	843,03	1.112,16	1.171,93	1.151,51
	- Ayam Ras	2.144,33	1.995,80	2.393,75	2.424,66	2.496,28
	- Itik/Entok	42,93	42,8	102,20	80,22	110,19
2	**Telur (Ton)**	**1.917,52**	**2.103,66**	**2.729,27**	**2.838,14**	**3.419,19**
	- Ayam Buras	339,92	617,68	494,89	523,56	565,52
	- Ayam Ras	1.063,98	972,36	1.149,48	1.184,95	1.488,31
	- Itik/Entok	513,6	513,62	1.084,90	1.129,63	1.365,36
3	**Susu (Ribu Liter)**	**6.237.120,00**	**6.387.500,00**	**6.325.000,00**	**6.995.000,43**	**10.292.346,30**
JUMLAH/TOTAL		**6.243.609**	**6.244.824**	**6.928.180**	**7.003.055,06**	**10.301.651,55**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2018

Produksi Daging untuk ternak besar pada Tahun 2016 adalah Daging Sapi sebesar 1.221,93 ton dan Pada Tahun 2017 sebesar 1.225,93 ton yang menyebar di 14 Kecamatan. Untuk ternak kecil produksi terbesar adalah kambing sebesar 839,47 ton pada Tahun 2016 dan 848,54 ton pada Tahun 2017. Sedangkan produksi daging unggas terbesar adalah Ayam Ras sebesar 2.424,66 ton pada Tahun 2016 dan sebesar 2.496,28 ton pada Tahun 2017. **Tabel** berikut menjelaskan produksi daging komunitas peternakan untuk masing-masing kecamatan di Kab. Trenggalek.

Total produksi telur unggas pada Tahun 2017 mencapai 3.419,19 ton, naik jika dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 produksi telur unggas mencapai 2.838,14 ton. Pada Tahun 2017 telur ayam buras produksinya mencapai 565,52 ton, telur ayam ras mencapai 1.488,31 ton, telur itik/entok 1.365,36 ton.

Kecenderungan Produksi susu baik susu sapi maupun susu kambing dari tahun ke tahun volumenya semakin meningkat, dimana pada Tahun 2013 produksi susu mencapai 6,243 Juta liter, pada Tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,387 juta liter, pada Tahun 2015 sedikit turun menjadi 6,325 juta liter. Sedangkan produksi susu pada Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,995 juta liter dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 10,292 juta liter.

2.3.3.4. Kehutanan

Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar tersebut pengelolaan hutan lebih dititikberatkan kepentingan secara menyeluruh. Bumi dengan segala macam di dalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

Berdasarkan data kehutanan di Kabupaten Trenggalek memiliki total luas Hutan 62.024,50 ha. Terdapat 17.988,40 ha Hutan Lindung, dan 44.036,10 ha Hutan Produksi. Hutan terluas terdapat di Kec. Watulimo seluas 11.145,20 ha dengan klasifikasi Hutan Lindung seluas 5.826,60 ha dan Hutan Produksi seluas 5.318,60 ha. Sedangkan Kec. Pule, Panggul dan Suruh memiliki hutan rakyat yang terluas di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II-74. Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Trenggalek (ha)

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Wisata	Hutan Lainnya	Jumlah
1	PANGGUL	525,50	5.902,10	-	-	6.427,60
2	MUNJUNGAN	7.183,60	2.880,00	-	-	10.063,60
3	WATULIMO	5.826,60	5.318,60	-	-	11.145,20
4	KAMPAK	634,10	4.340,80	-	-	4.974,90
5	DONGKO	1.468,40	5.806,20	-	-	7.274,60
6	PULE	238,80	3.609,90	-	-	3.848,70
7	KARANGAN	92,80	609,60	-	-	702,40
8	SURUH	15,60	2.163,50	-	-	2.179,10
9	GANDUSARI	3,10	1.760,80	-	-	1.763,90
10	DURENAN	81,30	1.184,30	-	-	1.265,60
11	POGALAN	390,70	1.005,01	-	-	1.395,71
12	TRENGGALEK	74,90	2.152,40	-	-	2.227,30
13	TUGU	78,60	2.576,00	-	-	2.654,60
14	BENDUNGAN	1.374,40	4.726,80	-	-	6.101,20
	Jumlah	**17.988,40**	**44.036,01**	**-**	**-**	**62.024,41**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Komoditas unggulan kehutanan berupa kayu-kayuan yang ada di Kabupaten Trenggalek meliputi 4 (empat) komoditas unggulan (hasil produksi tertinggi) sebagaimana diuraikan **Tabel** di bawah ini :

Tabel II-75. Produksi Kehutanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

No.	Komoditas Unggulan	Produksi (m^3)
1	Sengon	61.368,00
2	Jati	4.383,43
3	Mahoni	3.506,74
4	Pinus	876,69
5	Campuran	17.533,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial). Teori pengelolaan hutan yang termasuk ke dalam kehutanan konvensional adalah penambangan kayu atau *Timber Extraction* (TE) dan perkebunan kayu atau *Timber Management* (TM). Kehutanan modern/sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau *Forest Resource Management* (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau *Forest Ecosystem Management* (FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain *Sustainable Forestry Management* (SFM). Ketiga teori pengelolaan hutan tersebut, secara evolutif berkembang, sejak dari mulai penambangan kayu (TE) hingga sampai pada pengelolaan ekosistem hutan (FEM).

Pengelolaan hutan berkelanjutan tentunya juga harus dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kehutanan seperti Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Indeks Kualitas Hutan/ Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen untuk menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dengan telah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Urusan Kehutanan, hanya pada pelaksanaan pengelolaan TAHURA (Taman Hutan Raya) kabupaten/kota, sementara kabupaten Trenggalek tidak memiliki TAHURA.

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Trenggalek sebenarnya memiliki kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Potensi tambang terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah batu gamping dan marmer. Jumlah potensi batu gamping sebesar 256 juta ton menyebar di Kecamatan Gandusari, Kampak, Panggul, Watulimo. Sedangkan potensi marmer sebesar 249,9 juta ton menyebar di Kecamatan Bendungan, Gandusari, Kampak, Panggul, Dongko, Watulimo. Potensi tambang di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel II-76. Jenis dan Persebaran Potensi Bahan Tambang dan Mineral

No.	Komoditas Unggulan	Jumlah Potensi (ton) Th. 2016	Lokasi Konsentrasi (Kecamatan)
1	Andesit Diorite	164.000.000	Seluruh Kecamatan
2	Pasir	500.000	Panggul, Tugu, Karangan, Watulimo
3	Kalsit	30.000	Panggul, Gandusari, Karangan
4	Batu Gamping	256.000.000	Gandusari, Kampak, Panggul, Watulimo
5	Feldspar	119.500.000	Kampak, Gandusari, Karangan
6	Tanah Liat	74.800.000	Tugu, Pogalan, Gandusari, Karangan
7	Kaolin	5.000.000	Suruh
8	Bentonit	1.500.000	Karangan, Suruh, Pule
9	Zeolit	2.000.000	Pule, Gandusari
10	Batu Tuffa dan Saus Stone	300.000	Gandusari, Suruh, Tugu
11	Piropillite	200.000	Bendungan, Karangan
12	Pasir Laut	10.000.000	Panggul, Munjungan, Watulimo
13	Emas	0,2	Bendungan, Pule, Kampak, Munjungan
14	Perak	0,5	Bendungan, Pule, Kampak, Munjungan
15	Besi	5.000.000	Dongko, Panggul
16	Mangan	500.000	Gandusari, Watulimo, Bendungan, Pogalan
17	Batubara	2.000.000	Watulimo
18	Marmer	249.900.000	Bendungan, Gandusari, Kampak, Panggul, Dongko, Watulimo

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2017

Berdasarkan kondisi geografis di Trenggalek terdapat potensi sumberdaya energi terbarukan (*renewable energy)* yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Prospek pengembangan sumber energi terbarukan seperti mikrohidro, angin, *solar cell*, gelombang laut dan pasang surut mempunyai peluang besar dan bersifat strategis mengingat sumber energi terbarukan merupakan sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan apabila dimanfaatkan untuk kebutuhan energi terutama daerah pedesaan yang terpencil akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pengelolaan sumberdaya energi terbarukan mengalami beberapa kendala diantaranya belum terinventarisasinya data-data yang ada secara terpadu. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik pedesaan, kebijakan pemanfaatan pengembangan potensi sumberdaya energi terbarukan dilakukan dengan konsep optimalisasi agar pengelolaan potensi daerah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Urusan ESDM, hanya pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam, sementara kabupaten Trenggalek tidak memiliki potensi panas bumi.

2.3.3.6. Perdagangan

Dalam menunjang perekonomian daerah telah dibangun pasar-pasar daerah. Lebih jelasnya, gambaran umum kondisi pasar daerah sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada **Tabel** berikut ini :

Tabel II-77. Gambaran Umum Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Trenggalek

NO.	NAMA PASAR	ALAMAT LENGKAP	LUAS LAHAN (m2)	LUAS BANGUNAN (m2)	JENIS PASAR	TAHUN BERDIRI	TAHUN TERAKHIR DIRENOVASI	KONDISI FISIK TERAKHIR
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	PON	Kelurahan Sumbergedong	12.000	6.000	Induk	1949	1975	Cukup
2	SORE	Kelurahan Sumbergedong	1.080		Penunjang	1960	1984	Cukup
3	JARAKAN	Desa Karangsoko	430	99	Penunjang	N/A	2017	Baik
4	BURUNG	Kelurahan Surodakan			Penunjang	N/A	N/A	Cukup
5	HEWAN	Kelurahan Tamanan	5.150	288	Induk	1973	2012	Cukup
6	BASAH/ SAYUR	Kelurahan Sumbergedong	1.881	2.600	Induk	2006	2009	Baik
7	MUNJUNGAN	Desa Munjungan	3.420	500	Induk	1985	2010	Cukup
8	BENDO	Desa Bendorejo	4.050	1.543	Induk	1986	2013	Baik
9	JONGKE	Desa Sukorame	3.740	743	Penunjang	1981	2014	Cukup
10	PULE	Desa Pule	8.800	361	Induk	1945	2014	Cukup
11	TUGU	Desa Dermosari	5.800	1.568	Induk	1982	1988	Cukup
12	KAMPAK	Desa Bendoagung	6.180	6.180	Induk	1986	2011	Baik
13	WATULIMO	Desa Slawe	1.892	891	Induk	1990	2014	Cukup
14	DONGKO	Desa Dongko	6.320	2.400	Induk	1985	2013	Cukup
15	KARANGAN	Desa Karangan	4.440	1.395	Induk	1981	2013	Cukup

NO.	NAMA PASAR	ALAMAT LENGKAP	LUAS LAHAN (m2)	LUAS BANGUNAN (m2)	JENIS PASAR	TAHUN BERDIRI	TAHUN TERAKHIR DIRENOVASI	KONDISI FISIK TERAKHIR
1	2	3	4	5	6	7	9	10
16	GANDUSARI	Desa Sukorejo	4.610	4.610	Induk	1986	2014	Cukup
17	PANGGUL	Desa Wonocoyo	6.320	5.000	Induk	1985	2012	Cukup
18	KAMULAN	Desa Kamulan	3.980	980	Penunjang	1986	2012	Cukup
19	DURENAN	Desa Durenan	11.270	3.407	Induk	1986	2013	Cukup
20	REJOWINANGUN	Desa Rejowinangun	1.020	557	Induk	1981	2012	Baik
21	SUKOSARI	Desa Sukosari	1.250	375	Penunjang	N/A	2014	Cukup
22	SUBUH	Kelurahan Surodakan	3.600		Pengecer	1996	2012	Baik

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2018

Berdasarkan data pasar daerah Kabupaten Trenggalek penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.009.718.008,- atau memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 1,29% dari Total PAD 155.214.915.898,82 pada Tahun 2015. Sedangkan data pasar daerah Kabupaten Trenggalek penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2016 sebesar Rp 2.043.301.790,- atau memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,91 % dari total PAD Rp 222.709.757.184,66,- pada tahun 2016. Sementara penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 sebesar Rp 2.071.549.270,- atau memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,81 % dari total PAD Tahun 2017 yang sebesar Rp 253.205.318.427,55.

Dalam melaksanakan urusan perdagangan pemerintah tetap akan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai pilar penggerak perekonomian. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berpusat pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana dalam pengelolaan sumberdayanya lebih diperankan oleh rakyat sendiri secara bersama dan swadaya dalam kegiatan ekonominya. Serbuan produk dan jasa asing yang kemudian mengubah perilaku dan gaya hidup konsumen saat ini harusnya dapat dilihat bukan sebagai hambatan akan tetapi tantangan untuk memasuki zona pasar baru dalam mengembangkan produk dan jasanya. Pengembangan kualitas mutu, *branding*, penguasaan informasi, orientasi pasar global dan sistem manajemen korporasi hendaknya dapat diadopsi sehingga nantinya diharapkan tidak saja menjadi tuan rumah ekonomi lokal juga mampu mengembangkan ekspansinya ke pasar regional, nasional dan internasional.

2.3.3.7. Perindustrian

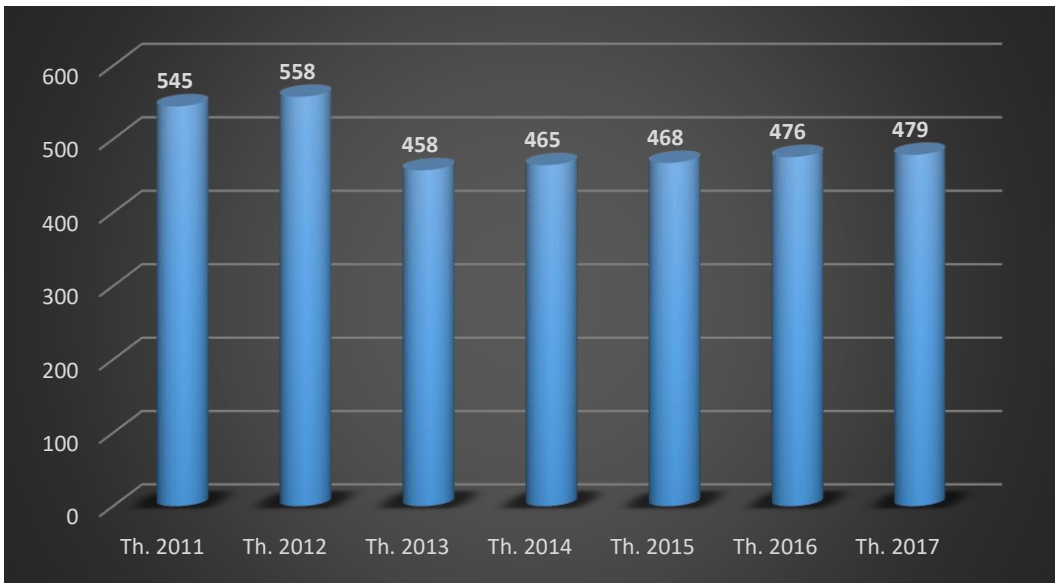
Perkembangan Industri Kecil, Menengah (IKM) dan kerajinan selama periode 2013-2017 menunjukkan trend naik. Jumlah IKM dan kerajinan tertinggi pada Tahun 2013 jumlah IKM sebanyak 458 unit, pada Tahun 2014 naik menjadi 465 unit, pada Tahun 2015 naik menjadi 468 unit, pada Tahun 2016 naik menjadi 468 unit dan pada Tahun 2017 tercatat jumlah IKM kembali meningkat menjadi 476 unit. Perkembangan Jumlah IKM Dan Kerajinan (unit) Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada **Grafik** sedangkan profil Industri Kab. Trenggalek secara keseluruhan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel** berikut.

Tabel II-78. Profil Industri Kab. Trenggalek Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Th 2013	Th 2014	Th 2016	Th 2016
1.	**Industri Besar**				
	a. Jumlah Unit	1	1	1	2
	b. Jumlah Tenaga Kerja	85	90	90	152
	c. Jumlah Nilai Investasi	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	40.444.933.547
	d. Jumlah Nilai Produksi	14.450.000.000	15.300.000.000	15.300.000.000	16.500.000.000
2.	**Industri Kecil dan Menengah**				
	a. Jumlah Unit	458	465	468	476
	b. Jumlah Tenaga Kerja	3.640	3.735	3.766	3.865
	c. Jumlah Nilai Investasi	35.213.305.396	35.907.061.896	36.060.730.896	39.277.099.396
	d. Jumlah Nilai Produksi	1.002.138.420.200	1.043.561.649.800	891.515.455.230	1.064.919.481.000
3.	**Sentra Industri**				
	a. Jumlah Sentra	95	105	107	120
	b. Jumlah Unit	8.467	9.183	9.211	9.246
	c. Jumlah Tenaga Kerja	19.255	20.645	20.722	20.482
	d. Jumlah Nilai Investasi	29.921.695.638	31.030.874.333	31.056.574.338	31.185.179.320
	e. Jumlah Nilai Produksi	760.000.557.320	775.834.687.320	776.846.437.320	805.652.517.335
4.	**Industri Non Formal**				
	a. Jumlah Unit	23.596	23.228	23.484	23.554
	b. Jumlah Tenaga Kerja	68.585	65.325	66.152	66.912
	c. Jumlah Nilai Investasi	49.871.162.453	49.958.874.953	61.956.003.020	66.128.103.020
	d. Jumlah Nilai Produksi	563.897.648.952	573.647.541.717	783.473.687.215	825.270.387.215
5.	**Jumlah Industri**				
	a. Jumlah Sentra	**95**	**95**	**107**	**120**
	b. Jumlah Unit	**32.064**	**32.877**	**33.164**	**33.281**
	c. Jumlah Tenaga Kerja	**87.925**	**39.795**	**90.730**	**90.791**
	d. Jumlah Nilai Investasi	**145.006.163.487**	**146.896.811.182**	**159.075.308.254**	**173.887.815.283**
	e. Jumlah Nilai Produksi	**2.340.486.626.472**	**2.408.343.878.837**	**1.683.661.892.550**	**2.672.684.887.550**
6.	Jumlah IKM kerajinan yang terbina dan jumlah IKM yang ikut dalam even pameran	-	-	**28**	**15**
7.	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal dan berdaya saing	18	34	**60**	**35**
8.	Jumlah IKM baru yang terbina	337	437	**20**	**40**
9.	Jumlah IKM pangan yang memiliki pengujian nutrisi	-	-	-	**-**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2018

Grafik II-20. Perkembangan Jumlah IKM dan Kerajinan (unit) Tahun 2011-2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2018

2.3.3.8. Transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu program baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Keberangkatan Transmigran asal Kabupaten Trenggalek mengalami perkembangan yang fluktuatif selama bebarapa tahun terakhir sebagaimana pada **Tabel** berikut ini:

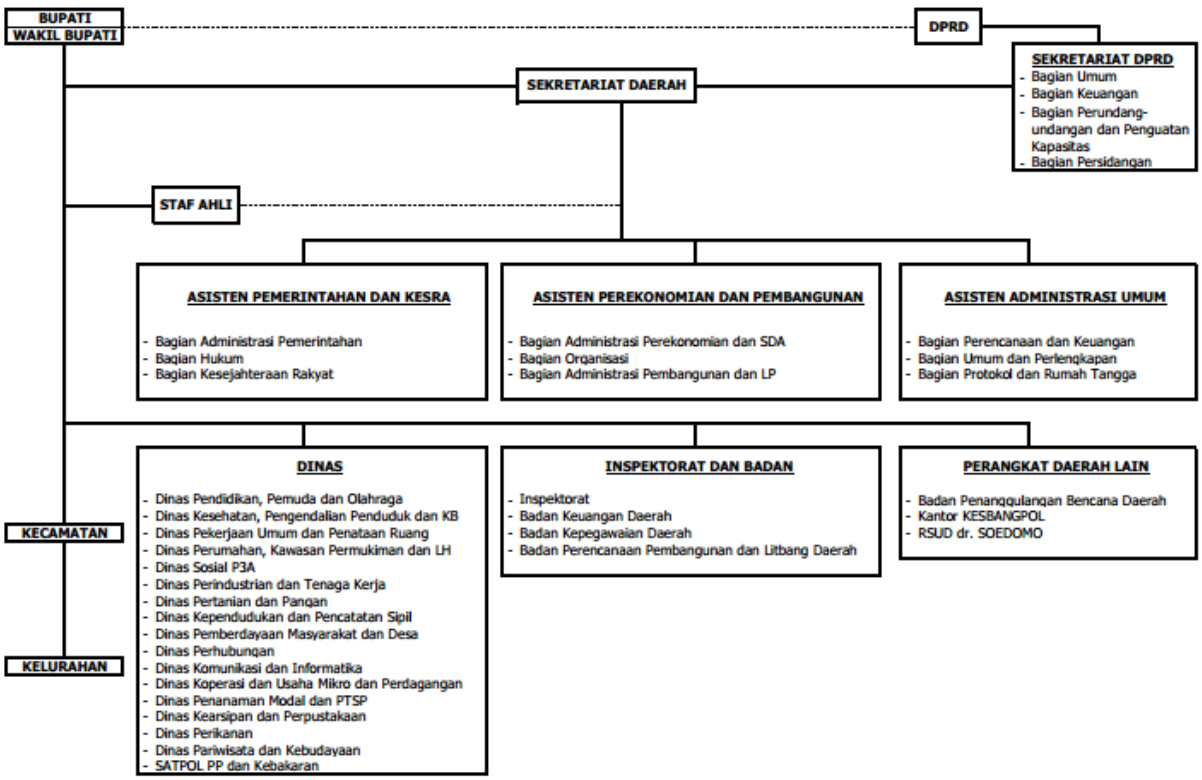
Tabel II-79. Keberangkatan Transmigran Tahun 2007-2017

Uraian	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Keberangkatan Transmigran (KK)	40	40	57	57	100	35	75	50	25	16	11

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2018

2.3.4. Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berikut bagan struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.



Sumber: Bag. Organisasi Setda Kabupaten Trenggalek, 2018

Gambar II-8. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam bidang pemerintahan, semangat reformasi birokrasi diaplikasikan dalam penataan aparatur pemerintah daerah baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*knowledge and skill*) dan sikap mental (*attitude*) yang baik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal.

Pada Tahun 2015 tercatat jumlah PNS Daerah Kabupaten Trenggalek berjumlah 9.527 orang, terdiri dari 4.996 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.531 orang berjenis kelamin wanita, sedangkan pada akhir tahun 2017 tercatat 7.982 orang jumlah ASN, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.080 orang dan 3.902 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya kerena pada Tahun 2011-2017 beberapa PNS pensiun sedangkan pada kurun waktu tersebut Kabupaten Trenggalek tidak mengadakan perekrutan CPNS karena ada moratorium yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

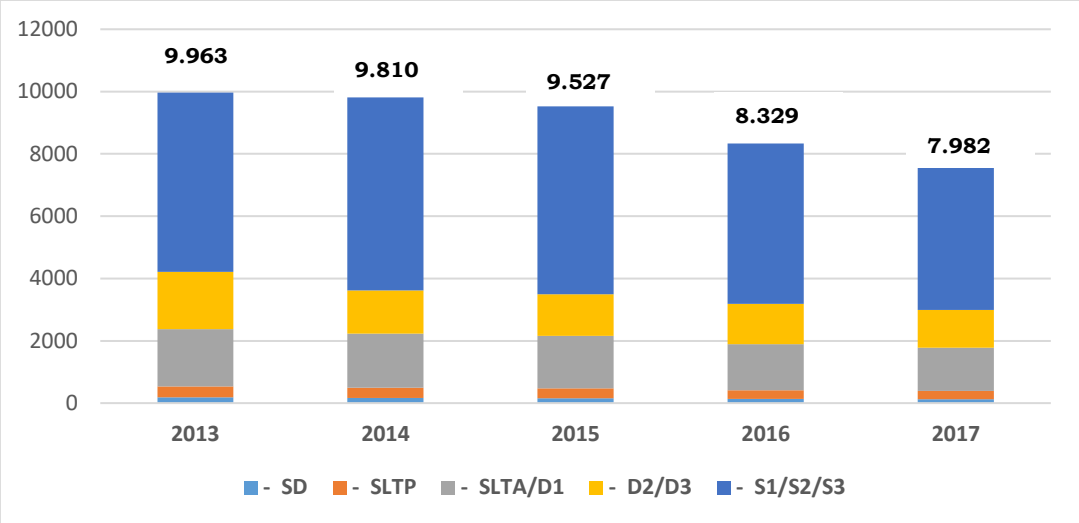
Tabel II-80. Jumlah PNSD di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017 (orang)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017			
					Laki-Laki	Perempuan	Total	%
Golongan:								
- Golongan I	378	369	291	250	203	7	210	2,63
- Golongan II	1.786	1.641	1.590	1.429	903	470	1.373	17,20
- Golongan III	3.581	3.794	3.836	3.395	1.545	1.802	3.347	41,93
- Golongan IV	4.218	4.006	3.810	3.255	1.429	1.623	3.052	38,24
Jumlah	**9.963**	**9.810**	**9.527**	**8.329**	**4.080**	**3.902**	**7.982**	**100,00**
Pendidikan:								
- SD	183	171	159	139	120	7	127	1,59
- SLTP	349	323	315	271	240	23	263	3,29
- SLTA/D1	1.847	1.738	1.686	1.487	943	447	1.390	17,41
- D2/D3	1.836	1.388	1.339	1.291	428	787	1.215	15,22
- S1/S2/S3	5.748	6.190	6.028	5.141	2.349	2.638	4.987	62,48
Jumlah	**9.963**	**9.810**	**9.527**	**8.329**	**4.080**	**3.902**	**7.982**	**100,00**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2018

PNS Daerah Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh Pegawai dengan latar pendidikan S1/S2/S3 sebesar 4.987 orang, hal ini menggambarkan kualitas SDM PNS Daerah Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya Persentase jumlah PNS Daerah dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Persentase PNS Daerah Kabupaten Trenggalek menurut golongannya didominasi oleh Golongan III dan Golongan IV, masing masing sebesar 41,93% dan 38,24%. Sedangkan PNS Daerah Kabupaten Trenggalek Golongan I dan Golongan II adalah sebesar 2,63% dan 17,20%.

Grafik II-21. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, 2018

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di level Perangkat Daerah yang menerapkan pelayanan publik (RSUD, Puskesmas, Dinas Pendapatan, KPPM) dan pemerintahan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berusaha menyediakan sarana prasarana yang memadai.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) telah diaplikasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) untuk mengimplementasikan usulan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten. Akan tetapi ke depan harus dikembangkan *Integrated Resources Management System* (IRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanan anggaran dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah disusunnya *Draft Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek juga telah menerapkan *Electronic Procurement (E-Procurement)* dalam proses pelelangan sejak Tahun 2011 yang diwali dengan pembentukan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2011.

Dalam konteks mewujudkan *e-Goverment*, telah dirintis tata kelola pemerintahan telah terintegrasi berbasis IT di beberapa sektor. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui penguatan fungsi kantor pelayanan perijinan dan penanaman modal. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih

terbatas. Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berakibat pada hilangnya semangat para pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan. Dengan adanya kemudahan akses, kemudian diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan, maka dipastikan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Trenggalek.

Potensi penguatan proses pembangunan terdapat pula di masyarakat, maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan Kabupaten Trenggalek, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi *online*. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan ditanggapi, serta aduan permasalahan harus sampai dan dicarikan solusinya.

Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan FORKOPIMDA, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten sekitar, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat harus terus ditingkatkan untuk menjamin lancarnya pembangunan daerah.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan kota, daerah dan wilayah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Berbagai potensi investasi ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing daerah, yang dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Kemampuan daya saing daerah dibentuk oleh faktor-faktor utama (input) dan kinerja perekonomian (*output*). Faktor-faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 1) lingkungan usaha produktif, 2) perekonomian daerah, 3) ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, 4) infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta 5) perbankan dan lembaga keuangan. Kinerja perekonomian (*output*) terdiri dari produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja dan PDRB perkapita. Pada akhirnya daya saing daerah memiliki *outcome* berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya, dan Sumber Daya Modal.

Pendapatan dan Belanja Pemerintah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pendapatan Kabupaten Trenggalek terus mengalami kenaikan. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 sebesar Rp Rp. 1,059 Triliyun, meningkat pada Tahun 2013 menjadi Rp. 1.206 Triliyun dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.498 Triliyun, kembali meningkat menjadi Rp. 1.545 Triliyun pada Tahun 2015. Sedangkan pada Tahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp. 1.632 Triliyun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tersebut masih jauh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (dana perimbangan). Pada Tahun 2016 realisasi PAD tercatat mencapai Rp. 182,174 Milyar, realisasi Dana perimbangan mencapai Rp. 1.217 Triliyun dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp. 233,170 Milyar.

Realisasi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dimana sebesar Rp. 1,044 Triliyun pada Tahun 2012, mengalami kenaikan pada Tahun 2013 menjadi Rp. 1.164 Triliyun, kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2014 menjadi Rp. 1.372 Triliyun, kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2015 menjadi Rp. 1.552 Triliyun. Sedangkan pada Tahun 2016 realisasi belanja mencapai Rp. 1.709 Triliyun, dimana realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 1.047 Triliyun dan realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 662,512 Milyar.

Sedangkan Pembiayaan *Netto* dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2013 mencapai Rp. 77,782 Milyar. Sedangkan realisasi pembiayaan pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 112,182 Milyar, kembali naik pada Tahun 2015 menjadi sebesar 241, 376 Milyar. Sementara pada Tahun 2016 pembiayaan *netto* turun menjadi Rp. 220,657 Milyar, dan pada Tahun 2017 kembali turun menjadi Rp. 142,704 Milyar. Adapun realisasi dan target pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017 disajikan dalam **Tabel** berikut :

Tabel II-81. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2013 – 2017

NO	Uraian	*Realisasi*				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Pendapatan**	**1.206.618.544.230,52**	**1.498.350.369.380,87**	**1.545.212.728.339,82**	**1.632.638.583.154,04**	**1.791.672.372.538,55**
1.1	Pendapatan asli daerah	77.740.119.338,52	132.951.069.331,87	155.214.915.898,82	182.174.291.709,04	253.205.318.427,55
1.2	Dana Perimbangan	865.666.372.488,00	940.434.481.091,00	977.071.592.537,00	1.217.293.690.903,00	1.194.709.714.127,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	263.212.052.404,00	424.964.818.958,00	412.926.219.904,00	233.170.600.542,00	343.757.339.984,00
II.	**Belanja**	**1.164.834.490.081,60**	**1.372.622.453.315,40**	**1.552.970.281.991,22**	**1.709.954.006.569,03**	**1.759.716.301.651,65**
2.1	Belanja Tidak Langsung	774.782.526.711,50	876.254.880.840,00	988.329.208.875,02	1.047.441.597.957,00	985.763.310.674,00
2.2	Belanja Langsung	390.051.963.370,10	496.367.572.475,40	564.641.073.116,20	662.512.408.612,03	773.952.990.977,65
III.	**Pembiayaan Netto**	**77.782.197.215,01**	**112.182.662.892,52**	**241.376.611.875,99**	**220.657.677.224,59**	**142.704.117.881,60**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	84.782.197.215,01	120.182.662.892,52	245.376.611.875,99	223.657.677.224,59	153.704.117.881,60
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	11.000.000.000,00

Sumber : Realisasi APBD Kab. Trenggalek Tahun 2013-2017

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 mencapai Rp. 1,791 Triliyun yang terdiri dari PAD yang mencapai Rp. 253,205 Milyar (dimana target ini melampaui target pada RPJMD), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,194 Triliyun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 343,757 Milyar.

Belanja daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan realisasi belanja tahun tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini diakibatkan oleh pelampauan penerimaan pencapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil), maupun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Bantuan Keuangan Provinsi dll). APBD secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

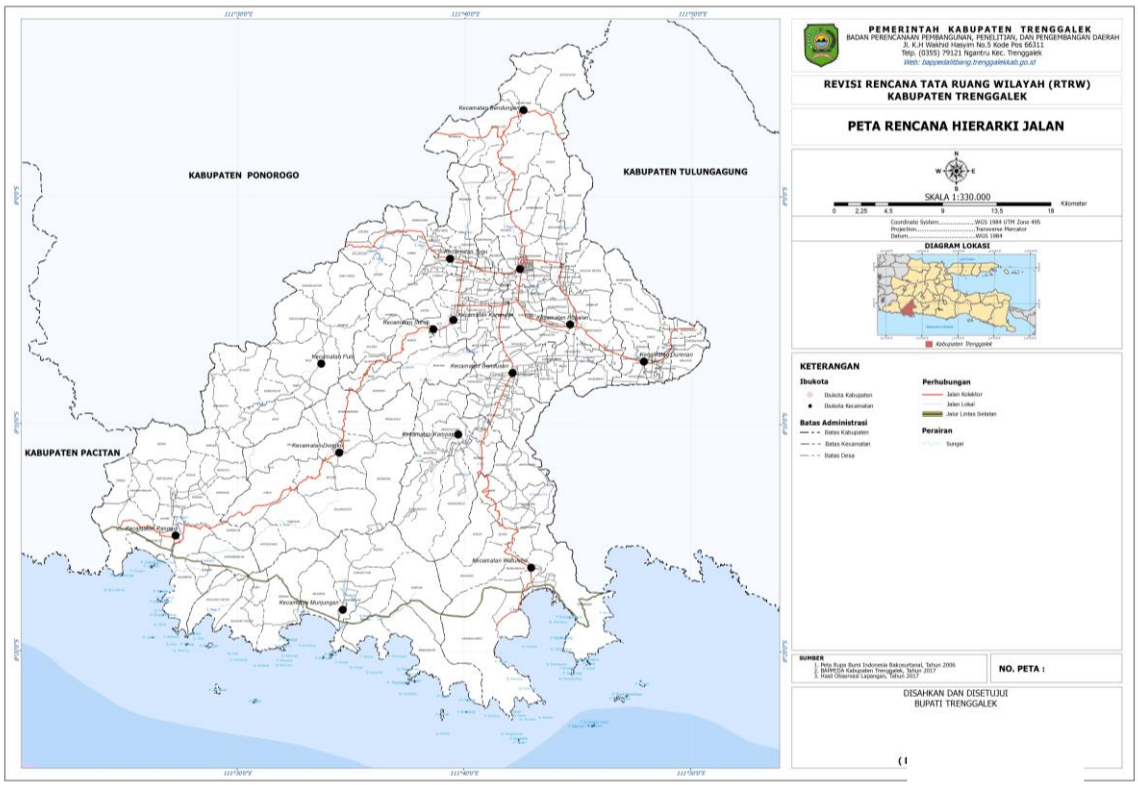
Jaringan Jalan

Berdasarkan data, kondisi prasarana jalan dengan panjang jalan di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2017 seluruhnya sepanjang 1.045,02 km, kondisi baik 74,25%, sedang 11,78%, rusak ringan 6,22% dan rusak berat 7,75%. Dengan adanya wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Trenggalek, maka jalan-jalan tersebut rentan mengalami bencana longsor. Oleh karena itu diperlukan rekayasa teknologi yang tepat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perbukitan.

Tabel II-82. Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek

Kondisi Jalan	*Jalan Nasional*		*Jalan Provinsi*		*Jalan Kabupaten*		*Total*	
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
Baik	18,70	16,43	-	-	757,238	81,32	775,94	74,25
Sedang	74,88	65,81	-	-	48,241	5,18	123,12	11,78
Rusak Ringan	20,21	17,76	-	-	44,807	4,81	65,02	6,22
Rusak Berat					80,943	8,69	80,94	7,75
Total	**113,79**	**100,00**	**-**	**-**	**931,229**	**100,00**	**1.045,02**	**100,00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2018

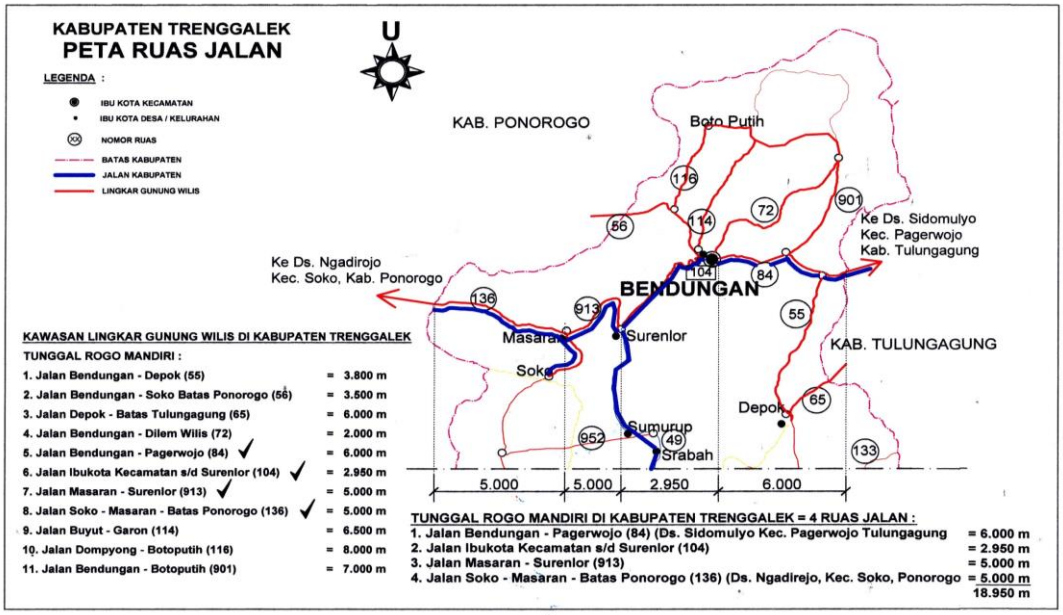


Sumber : Meteri Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar II-9. Peta Rencana Hierarki Jalan

Adapun rencana jalan strategis yang akan dibangun di Kabupaten Trenggalek diantaranya Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Jalan Selingkar Wilis. Untuk Jalan selingkar Wilis ada 4 (empat) ruas jalan yang sedang proses pembangunan atau peningkatan jalan yaitu :

1. Jalan Bendungan – Pagerwojo (84)
2. Jalan Ibu Kota Kecamatan- Surenlor (104)
3. Jalan Masaran-Surenlor (913)
4. Jalan Soko-Masaran-Batas Ponorogo (136)



Gambar II-10. Peta Rencana Jalan Kawasan Selingkar Wilis

Jaringan listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk keperluan penerangan maupun peralatan rumah tangga. Jumlah desa/kelurahan yang telah memperoleh jaringan listrik sebanyak 157 desa/kelurahan dari 157 desa/kelurahan yang ada. Meskipun jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, masih ada beberapa rumah tangga yang belum menikmati listrik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan jaringan energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil seperti energi mikrohidro.

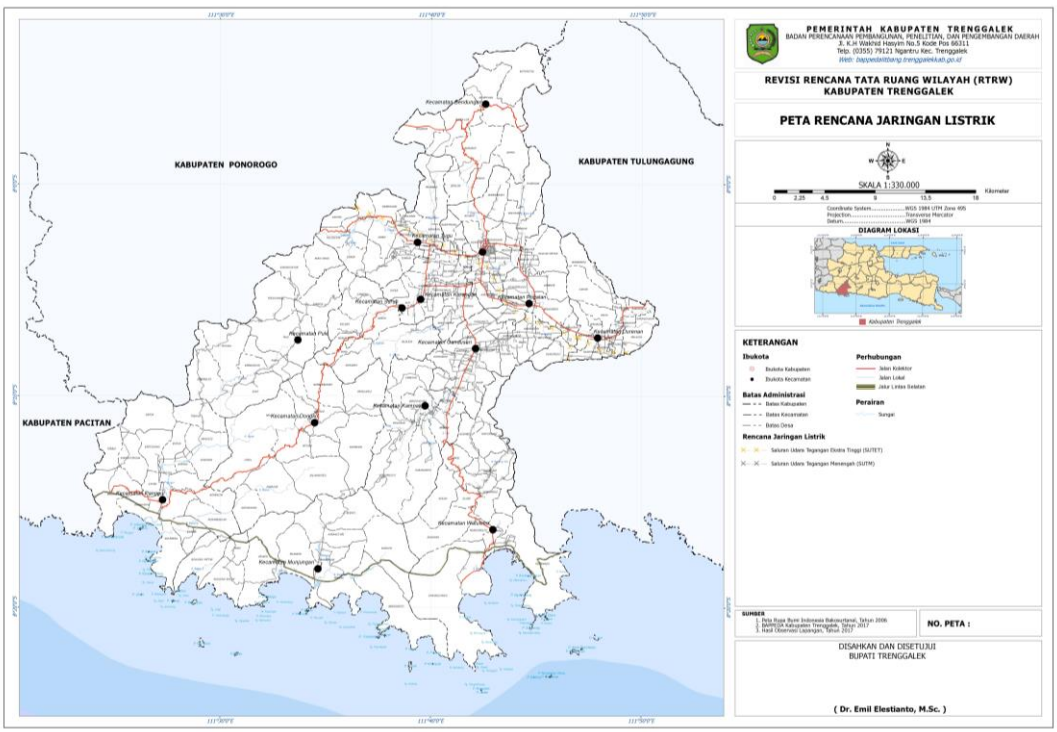
Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memperluas jangkauan pelayanannya hingga seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan listrik untuk penduduk kota sebagian besar sudah merata keseluruh wilayah kota yang ada namun beberapa daerah di kawasan perdesaaan belum terpenuhi pelayanan listrik hal ini dikarenakan jumlah sambungan dan kondisi geografi kawasan tersebut. Kabupaten Trenggalek memiliki 1 gardu induk sebagai pusat distribusi listrik ke seluruh wilayah kecamatan yang berlokasi di perkotaan Kecamatan Trenggalek. Selain itu terdapat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Esktra Menengah (SUTM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek sebagai pendukung SUTET tersebut.

Pada Tahun 2016, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Trenggalek sebesar 197.494 rumah tangga. Jumlah trafo sebesar 802 dan dapat menjangkau 157 desa di seluruh kecamatan. Namun demikian sebesar 13.611 rumah tangga dari total 193.105 rumah tangga atau 7,04 % yang belum menikmati listrik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan jaringan energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil seperti energi mikrohidro. Selengkapnya mengenai jumlah trafo dan pelanggan PLN pada tiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek dan Data Induk Jaringan PDPJ PLN Kabupaten Trenggalek dapat ditinjau pada Tabel berikut.

Tabel II-83. Jumlah Trafo dan Pelanggan Jaringan Listrik Tahun 2016

Kecamatan	Desa/Keelurahan	Trafo	Pelanggan
Panggul	17	100	23.321
Munjungan	11	26	6.795
Watulimo	12	90	16.754
Kampak	7	28	11.350
Dongko	10	46	6.538
Pule	10	118	17.574
Karangan	19	60	13.805
Suruh	0	25	5.265
Gandusari	11	57	11.350
Durenan	14	68	22.617
Pogalan	10	56	16.774
Trenggalek	13	27	5.840
Tugu	15	50	14.790
Bendungan	8	51	6.720
Total	**157**	**802**	**197.494**

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2017

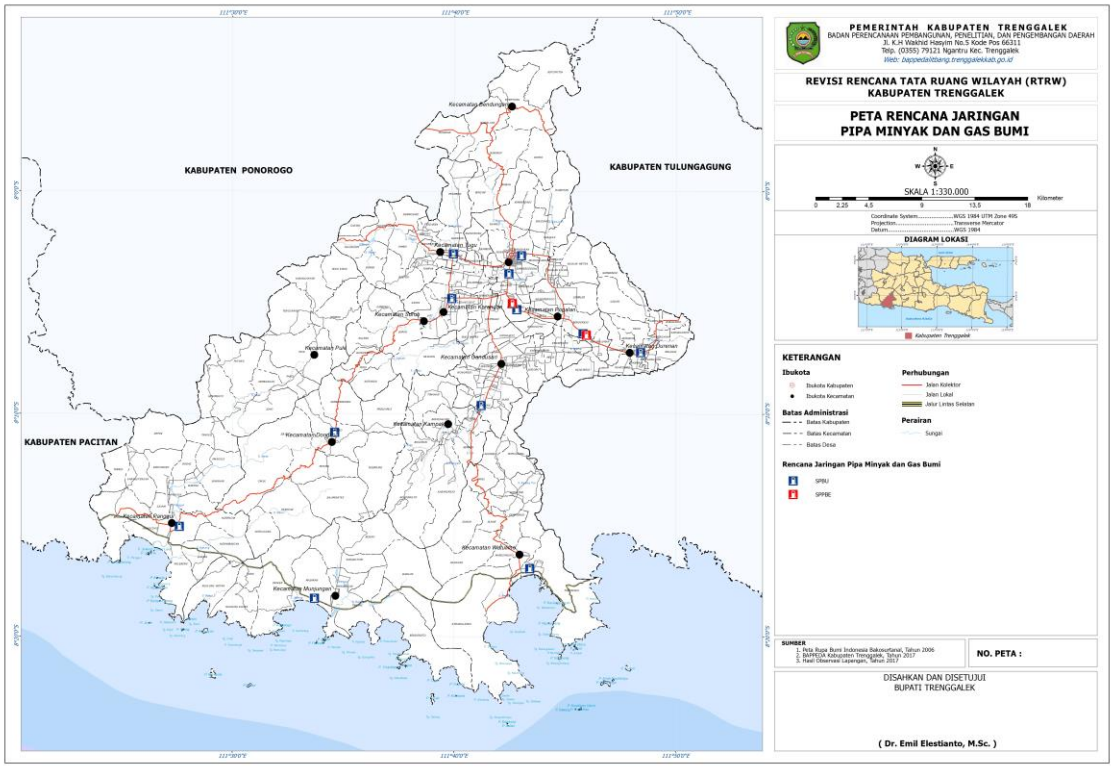


Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar II-11. Peta Rencana Jaringan Listrik

Jaringan Energi

Jaringan energi yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas sangat diperlukan dalam rangka menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Selain itu ketersediaan bahan bakar minyak juga merupakan magnet bagi pengembangan investasi di daerah. Bahan bakar minyak khususnya premium, solar dan pertamax dipasok melalui Pertamina dengan adanya SPBU di berbagai daerah. Jumlah SPBU dan SPBN di Kabupaten Trenggalek sampai akhir Tahun 2017 sebanyak 13 buah SPBU/SPBN. Adapun distribusinya memiliki kecenderungan mengikuti pola jaringan jalan utama di Kabupaten Trenggalek terpusat di kawasan perkotaan. Kecamatan Trenggalek memiliki SPBU paling banyak yaitu 3 (tiga) buah. Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Panggul, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Dongko dan Kecamatan Durenan masing-masing 1 buah. Sedangkan SPBN 2 (dua) buah terletak di Kecamatan Watulimo.

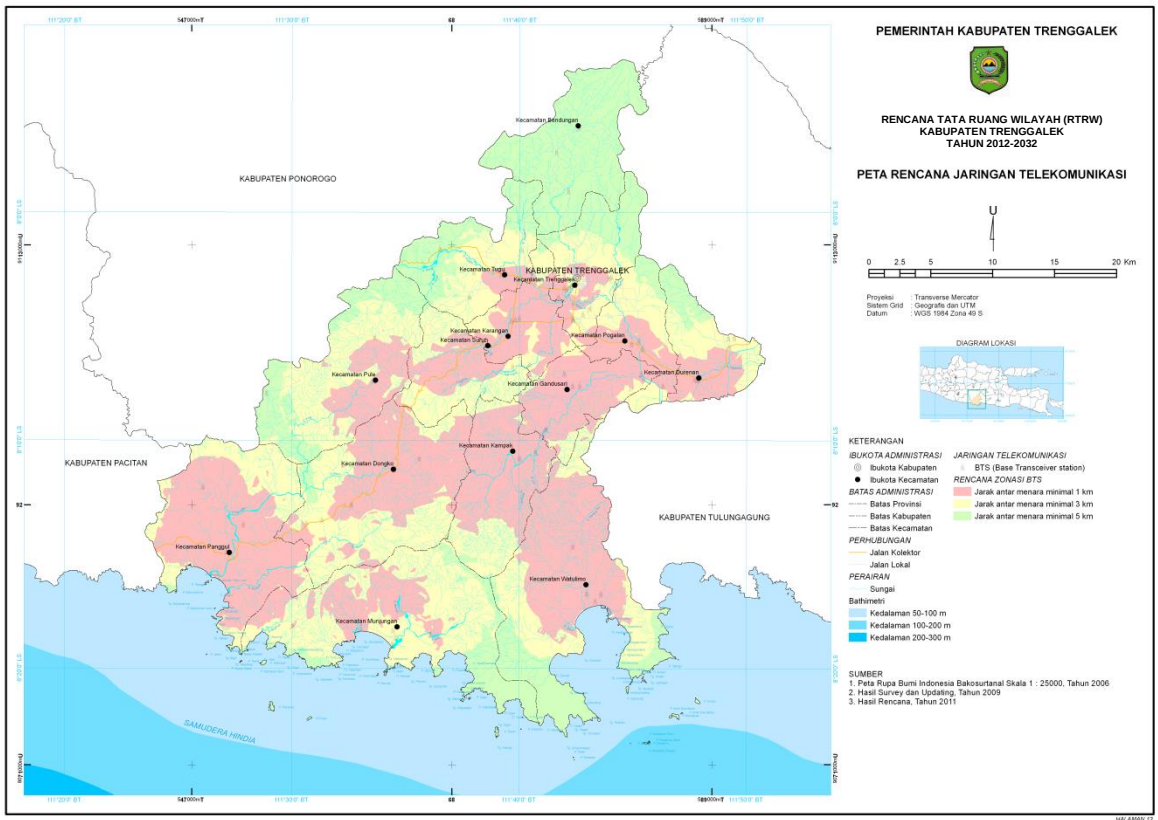


Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar II-12. Peta Rencana Jaringan Energi

Jaringan Telekomunikasi

Pada dasarnya jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel di Kabupaten Trenggalek merupakan jaringan oleh PT. Telkom sedangkan jaringan nirkabel merupakan jaringan satelit melalui menara BTS (*Base Tranceiver Station*). Jaringan kabel telepon memiliki kecenderungan mengikuti jaringan jalan utama yaitu jalan kolektor dan jalan lokal di Kabupaten Trenggalek. Meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan handphone maka semakin besar pula kebutuhan menara BTS. Pada umumnya BTS terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Trenggalek dimana penduduk terkonsentrasi. Pada Tahun 2017, teridentifikasi 122 menara yang ditempati 140 BTS yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek. Namun ada beberapa lokasi yang belum tercover oleh BTS sehingga perlu pembangunan menara BTS di kawasan tersebut di masa mendatang. Dengan tercovernya seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek oleh layanan telekomunikasi maka diharapkan arus informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.



Sumber : RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Gambar II-13. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Ada beberapa prespektif yang digunakan calon investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Pertama, adalah kondusif perspektif infrastruktur transportasi dan jalan, meliputi akses, kondisi, panjang dan lebar, Fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikas, kesiapan lahan atau tanah. Prespektif yang kedua adalah iklim kondusif perspektif suprastruktur. Variabel keamanan dan ketertiban umum. Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif. Angka kriminalitas dapat disajikan dalam **Tabel** sebagai berikut:

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	330	372	357	358	467	359	296
2.	Jumlah penduduk	813.418	827.373	836.778	818.797	797.275	773.926	761.730
3.	**Angka kriminalitas (1)/(2) x 10.000 penduduk**	**4,06**	**4,49**	**4,27**	**4,27**	**5,86**	**4,50**	**3,89**

Tabel II-84. Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017

Sumber: Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2018

Ada beragam pilihan lainnya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah dari perspektif ini. Salah satu kebijakan yang terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM). Secara teoritis, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian. Rata-rata perijinan terbit Tahun 2010-2014 adalah 3,25 hari dan sejak tahun 2015-2016 telah dicapai rata-rata perijinan terbit 3,00 hari. Sedangkan pada Tahun 2017 perijinan terbit 2 hari sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel** berikut.

Tabel II-85. Rata-Rata Perijinan Terbit

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Perijinan Terbit (hari)	6	5,38	3,68	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,00	3,00	2,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek, 2018

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai objek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumberdaya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan.

Rasio lulusan S1/S2/S3

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam **Tabel** berikut:

Tabel II-86. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Trenggalek Tahun 2014–2017

NO.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1	17.550	16.941	17.546	18.731
2.	Jumlah lulusan S2	573	587	637	718
3.	Jumlah lulusan S3	34	27	28	28
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	18.157	17.555	18.211	19.477
5.	Jumlah penduduk	837.755	797.275	773.926	761.730
6.	**Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) x 100**	**2,17**	**2,20**	**2,19**	**2,56**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 60 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-59 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam **Tabel** berikut:

Tabel II-87. Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011–2017

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun	148.174	148.782	149.208	149.834	150.334	150.760	151.128
2.	Jumlah penduduk usia >60 tahun	96.000	96.465	96.812	97.287	97.687	98.043	98.355
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	244.174	245.247	246.020	247.121	248.021	248.803	249.483
4.	Jumlah penduduk Usia 15-59 tahun	434.618	436.459	437.771	439.660	441.179	442.492	443.621
5.	Jumlah total penduduk	678.792	681.706	683.791	686.781	689.200	691.295	693.104
6.	**Rasio ketergantungan (3)/(4)**	**56,18**	**56,19**	**56,20**	**56,21**	**56,22**	**56,23**	**56,24**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2017 selalu meningkat, dimana pada Tahun 2011 Rasio Ketergantungan sebesar 56,18 dan Tahun 2017 meningkat menjadi 56,24. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan berdasar prinsip money follow program. Selain itu untuk mewujudkan tujuan bernegara secara optimal, keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah secara eksplisit tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

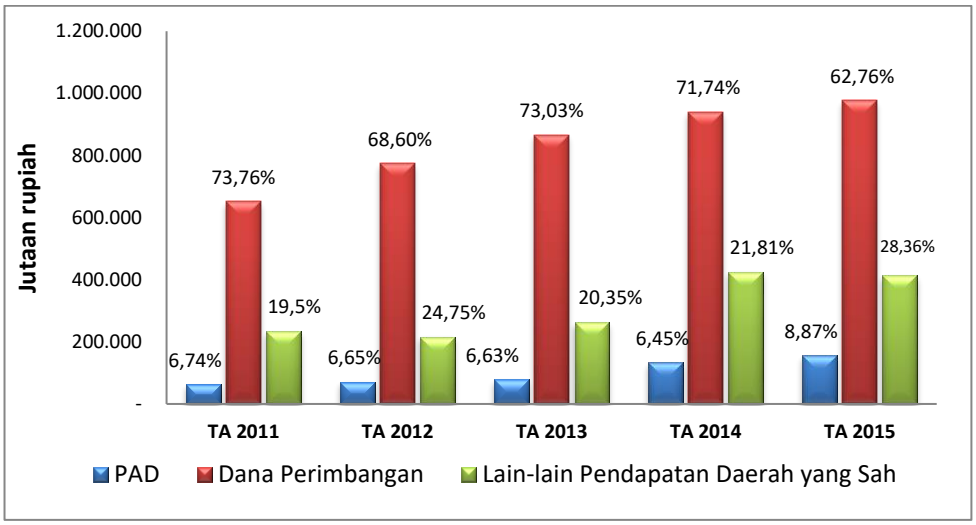
Gambaran kinerja APBD Kabupaten Trenggalek dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana dijabarkan berikut di bawah ini.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat sangat besar. Selama periode 2011-2015, Pendapatan Daerah Riil yang berasal dari Dana Perimbangan rata-rata mencapai 841,484 miliar per tahun. Sumbangan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek tersebut secara rata-rata 67,87 persen selama tahun 2011-2015 sedangkan Pendapatan Daerah yang berasal dari PAD relatif kecil dengan rata-rata berkisar 7,73 persen. Selebihnya, sekitar 24,40 persen dikontribusi oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Besarnya nilai dan proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencerminkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat sangat besar.

Meskipun Dana Perimbangan mendominasi Pendapatan Daerah Riil, namun upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah telah nampak. Hal ini terlihat dari peningkatan PAD hampir tiga kali lipat dari 63,084 miliar pada tahun 2011 menjadi 155,254 miliar pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,52 persen setiap tahun. Demikian halnya proporsi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, dari 73,76 persen pada tahun 2011 turun menjadi 62,76 persen pada tahun 2015. Sedangkan Lain-lain Penerimaan yang sah mengalami peningkatan yang signifikan dari 234,649 miliar pada tahun 2011 menjadi 412,926 miliar di tahun 2015 atau rata-rata meningkat 24,81 persen per tahun.

Grafik III-1. Komposisi Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Pendapatan Asli Daerah

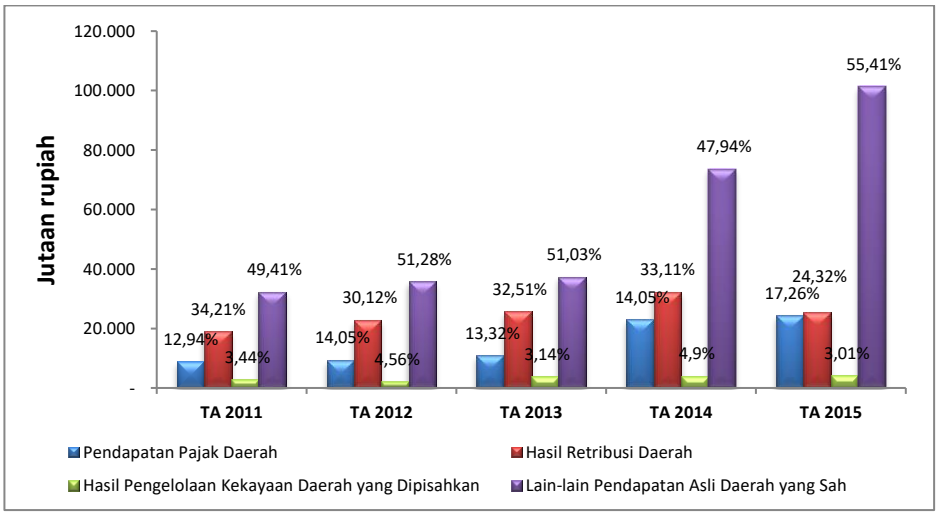
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riil Kabupaten Trenggalek ditopang oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, Pajak Daerah menyumbang PAD rata-rata sebesar 14,86 persen pertahun, Retribusi daerah menyumbang PAD rata-rata sekitar 27,27 persen pertahun dan Lain-lain PAD yang sah rata-rata sekitar 54,19 persen per tahun. Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan juga turut menyumbang PAD rata-rata sebesar 3,67 persen pertahun.

Dari empat sumber penyumbang PAD tersebut, Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan paling signifikan dan terbesar. Pada periode 2011-2015, pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari 32,346 miliar pada tahun 2011 menjadi 101,391 miliar pada tahun 2015. Hal ini ditopang dari penerimaan pengelolaan BLUD RSUD, Akademi Keperawatan maupun penerimaan BLUD Puskesmas.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Trenggalek masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama ini terkait dengan mobilisasi PAD sedapat mungkin diperkecil.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam upaya peningkatan PAD diantaranya berupa kualitas SDM, tingkat kebocoran, sistem dan prosedur administrasi perpajakan serta belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah.

Grafik III-2. Komposisi PAD Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015

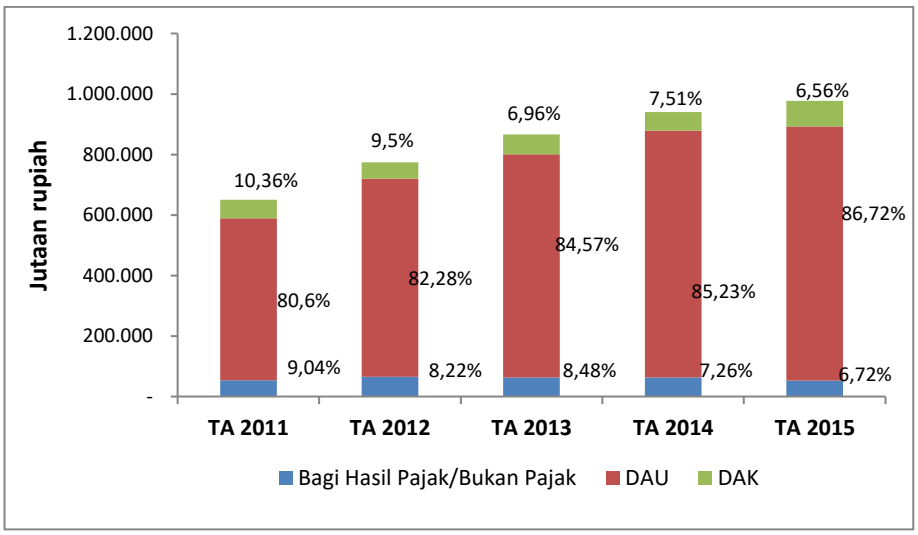


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) menempati urutan pertama dalam struktur Dana Perimbangan. DAU menyumbang rata-rata 84,94 persen setiap tahunnya selama periode 2011-2015. Komposisi dana perimbangan yang lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya menyumbang rata-rata 7,83 persen per tahun dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak menyumbang rata-rata 7,22 persen per tahun.

Grafik III-3. Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015

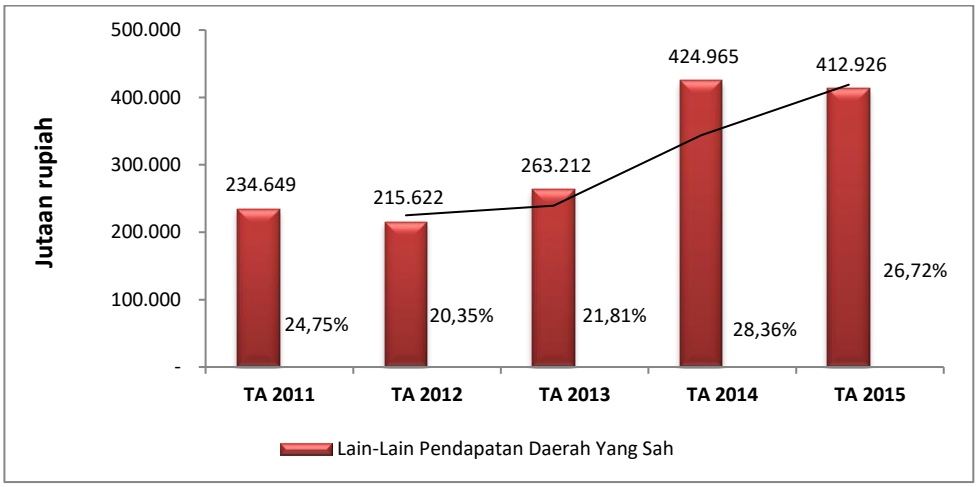


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat hampir tiga kali lipat pada kurun waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 234,649 miliar meningkat menjadi 412,926 milyar pada tahun 2015. Sumbangannya terhadap pendapatan daerah meningkat dari 24,75 persen di tahun 2011 menjadi 26,72 persen di tahun 2015. Dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi merupakan penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan yang sah. Dimana dari dana penyesuaian tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung kinerja tenaga pendidik yang proporsinya semakin meningkat tiap tahunnya, rata-rata 16,94 persen dari total pendapatan daerah selama tahun 2011-2015.

Grafik III-4. Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, 2017

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 per-obyek pendapatan dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel III-1. Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertum buhan (%)
		TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	
1	**Pendapatan Daerah**	**948.217,91**	**1.059.583,42**	**1.206.677,94**	**1.498.350,37**	**1.545.252,15**	**14,45**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**63.084,03**	**70.197,61**	**77.799,52**	**132.951,07**	**155.254,33**	**25,52**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.860,20	9.348,83	10.930,56	22.945,80	24.294,43	33,23
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.999,96	22.819,46	25.757,64	32.335,71	25.330,22	8,11
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.877,39	2.204,63	3.814,94	4.004,40	4.238,21	23,31
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.346,48	35.824,69	37.296,37	73.665,15	101.391,47	34,46

Kode	Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertum buhan (%)
		TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	
1.2	**Dana Perimbangan**	**650.484,60**	**773.763,70**	**865.666,37**	**940.434,48**	**977.071,59**	**10,87**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	53.471,44	65.591,20	62.877,09	63.241,65	53.085,21	0,80
1.2.2	Dana Alokasi Umum	535.245,06	654.342,62	737.814,63	815.508,14	839.497,99	12,36
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.768,10	53.829,88	64.974,66	61.684,69	84.488,40	8,30
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**234.649,29**	**215.622,10**	**263.212,05**	**424.964,82**	**412.926,22**	**24,81**
1.3.1	Pendapatan Hibah	922,52	754,80	2.000,00	3.000,00	5.000,00	326,82
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.944,37	36.815,58	44.264,34	77.928,01	74.385,75	18,80
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.888,01	147.647,10	193.892,01	290.528,32	262.481,39	28,26
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.894,39	30.404,62	23.055,70	53.508,49	71.059,07	39,25

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

3.1.2. Belanja Daerah

Dalam kurun waktu Tahun 2011-2015, anggaran belanja daerah Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan rata-rata 14,16 persen per tahun, yaitu 938,317 milyar pada Tahun 2011 meningkat menjadi 1,552 trilyun pada tahun 2015. Belanja daerah tersebut teralokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung yang meningkat jumlahnya tiap tahun. Proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah mengalami penurunan walaupun tidak signifikan tiap tahunnya, dengan besaran proporsi 68,62 persen pada tahun 2011 menjadi 63,64 persen pada tahun 2015. Penurunan proporsi belanja tidak langsung tersebut terhadap belanja daerah diimbangi dengan naiknya proporsi belanja langsung, 31,38 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 36,36 persen pada tahun 2015. Gambaran belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel III-2. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	
2	**Belanja Daerah**	**938.317,52**	**1.044.107,73**	**1.164.834,49**	**1.372.622,45**	**1.552.970,28**	**14,16**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**643.847,53**	**718.290,04**	**774.782,53**	**876.254,88**	**988.329,21**	**10,56**
2.1.1	Belanja Pegawai	571.040,81	657.708,75	702.299,10	791.215,82	805.327,38	9,09
2.1.3	Belanja Subsidi	425,74	337,94	481,26	337,49	-	-32,65
2.1.4	Belanja Hibah	15.367,91	10.867,26	17.273,46	15.090,90	33.112,88	20,33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.884,91	3.753,62	2.170,39	6.084,07	2.846,85	2,78
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.400,23	2.905,58	3.295,45	7.046,55	6.442,02	26,75
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	40.098,43	42.133,11	48.602,69	56.480,06	140.600,07	40,04
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.629,50	583,78	660,18	-	-	24,71

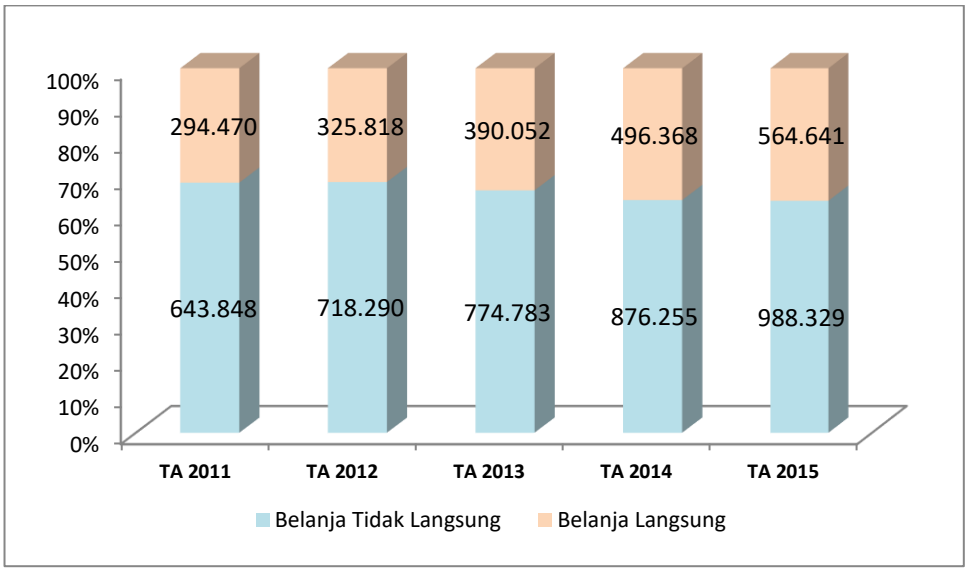
Kode	Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	
2.2	**Belanja Langsung**	**294.469,99**	**325.817,69**	**390.051,96**	**496.367,57**	**564.641,07**	**23,26**
2.2.1	Belanja Pegawai	29.349,01	30.942,35	33.924,31	36.721,64	41.889,60	14,54
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.877,63	160.116,95	149.367,26	178.683,56	195.614,76	17,74
2.2.3	Belanja Modal	126.243,35	134.758,38	206.760,39	280.962,37	327.136,71	30,71

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar 643,847 milyar meningkat menjadi 988,329 milyar pada tahun 2015. Belanja pegawai merupakan pendorong utama peningkatan belanja tidak langsung. Pada tahun 2011, belanja pegawai sebesar 571,040 miliar meningkat menjadi 805,327 miliar pada tahun 2015. Selama periode tersebut proporsi belanja pegawai dalam komposisi belanja tidak langsung rata-rata 88,54 persen selebihnya terdistribusi untuk belanja yang lain seperti bantuan sosial, hibah, subsidi, belanja bagi hasil kepada desa, belanja bantuan keuangan kepada desa dan penggunaan untuk belanja tidak terduga.

Realisasi belanja langsung tahun 2011-2015 teralokasikan pada belanja pegawai dengan rata-rata proporsi realisasi 8,85 persen, untuk belanja barang/jasa rata-rata proporsi realisasi sebesar 42,44 persen serta rata-rata proporsi realisasi untuk belanja modal sebesar 48,71 persen. Pada kurun waktu lima tahun tersebut belanja modal selalu meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 sebesar 126,243 milyar meningkat menjadi 327,136 milyar pada tahun 2015.

Grafik III-5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Dalam struktur anggaran, kelompok pembiayan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah kelompok anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Gambaran pembiayaan daerah riil Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) adalah sebagai berikut :

Tabel III-3. Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertum-Buhan (%)
		TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	
A	**Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah**						
1	**Pendapatan Daerah**	**948.217,91**	**1.059.583,42**	**1.206.677,94**	**1.498.350,37**	**1.545.252,15**	**14,45**
2	**Belanja Daerah**	**938.317,52**	**1.044.107,73**	**1.164.834,49**	**1.372.622,45**	**1.552.970,28**	**14,16**
	Defisit (1-2)	***9.900,40***	***15.475,68***	***41.843,45***	***125.727,92***	***(7.718,13)***	***18,11***
B	**Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto)**	**77.714,02**	**68.894,45**	**77.778,97**	**112.182,66**	**241.375,81**	**30,16**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**80.964,02**	**88.719,53**	**84.778,97**	**120.182,66**	**245.375,81**	**28,88**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	78.921,69	87.598,36	84.370,13	119.622,42	237.910,58	30,33
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	7.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500,00	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.542,33	1.121,17	408,84	560,24	465,23	-21,74
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**3.250,00**	**19.825,09**	**7.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**321,92**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	4.000,00	3.000,00	-	-62,50
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.250,00	17.000,00	3.000,00	5.000,00	4.000,00	317,48
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	2.825,09	-	-	-	-
A+B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**87.614,42**	**84.370,13**	**119.622,42**	**237.910,58**	**233.657,68**	**29,24**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami surplus anggaran pada tahun 2011-2014 dan defisit pada tahun 2015. Surplus anggaran pada tahun 2011 mencapai 9,9 miliar dan meningkat menjadi 125,727 miliar di tahun 2014. Hal ini mengindikasikan daya serap anggaran pemerintah cenderung rendah walaupun pada tahun 2015 mengalami defisit kembali.

3.1.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2014 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini.

Tabel III-4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014

No.	URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	81,55	89,64	84,74	119,38	231,15	28,46
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,17	0,72	0,12	0,19	0,04	52,54
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	1,67	2,54	0,42	0,03	0,00	(50,99)
1.1.4	Kas di BLUD	-	-	-	0,06	5,13	8.529,25
1.1.5	Kas di Bendahara JKN	-	-	-	-	4,21	-
1.1.6	Piutang Pajak	-	0,03	0,03	-	2,42	(69,53)
1.1.7	Piutang Retribusi	1,57	1,13	0,51	0,68	0,89	152,86
1.1.8	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	7,36	-
1.1.9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	0	0
1.1.10	Piutang Lainnya	3,62	2,05	9,86	13,90	2,75	388,52
1.1.11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-	-	(0,93)	-
1.1.12	Persediaan	7,83	9,36	19,81	34,89	44,89	64,83
	Jumlah Aset Lancar	**96,42**	**105,48**	**115,49**	**169,13**	**297,90**	**30,57**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	0	0
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	0	0
1.2.2	Investasi Non Permanen Lainnya	0,06	0,06	0,06	6,41	5,90	2.260,54
1.2.3	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-	-	-	-	(5,90)	-
1.2.4	Investasi Permanen	-	-	-	-	0	0
1.2.5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31,80	31,31	50,86	49,62	53,26	12,69
1.2.6	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**31,86**	**31,37**	**50,92**	**56,04**	**53,26**	**12,69**
1.3	**ASET TETAP**	-	-	-	-	0	0
1.3.1	Tanah	211,53	213,36	213,78	218,22	224,64	1,22
1.3.2	Peralatan dan Mesin	170,20	211,39	221,12	257,74	294,87	15,53
1.3.3	Gedung dan Bangunan	256,60	277,62	364,62	428,09	540,72	18,49
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	492,65	565,22	625,34	739,93	921,35	16,02
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	31,88	34,39	41,61	45,63	47,65	8,76
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	6,95	3,99	1,10	(57,53)
	Jumlah Aset Tetap	**1.162,86**	**1.301,98**	**1.473,42**	**1.693,61**	**2.030,32**	**13,69**
1.4	**DANA CADANGAN**	-	-	-	-	0	0
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	4,00	7,00	(12,50)
	Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**4,00**	**7,00**	**(12,50)**
1.5	**ASET LAINNYA**	-	-	-	-	0	0
1.5.1	Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan	0,41	1,08	-	0,03	0,03	18,09

No.	URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Rata-rata Pertumbuhan
1.5.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	4,39	2,25	2,25	2,25	2,25	(9,76)
1.5.3	Aset tidak Berwujud	-	-	-	0,05	0,05	-
1.5.4	Aset Lain-lain	11,70	11,44	10,24	2,78	17,33	84,20
	Jumlah Aset Lainnya	**16,50**	**14,77**	**12,49**	**5,11**	**19,66**	**37,43**
	JUMLAH ASET	**1.307,63**	**1.453,59**	**1.652,32**	**1.927,88**	**2.408,14**	**14,76**
2	**KEWAJIBAN**	-	-	-	-	0	0
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	-	-	-	-	0	0
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	2,79	2,75	0,49	0,00	2,58	586.789,18
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	0,68	-	-	-	(100,00)
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,60	3,34	1,88	6,51	9,17	184,22
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**3,40**	**6,77**	**2,37**	**6,51**	**11,75**	**59,82**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**3,40**	**6,77**	**2,37**	**6,51**	**11,75**	**59,82**
3	**EKUITAS DANA**	-	-	-	-	0	0
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	-	-	-	-	0	0
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	78,92	87,61	84,37	119,62	237,91	30,33
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	1,67	2,54	0,42	0,03	0,04	(24,81)
3.1.3	Cadangan Piutang	5,19	3,21	10,41	14,58	12,48	136,75
3.1.4	Biaya Dibayar di Muka	-	-	-	-	0	0
3.1.5	Cadangan Persediaan	7,83	9,36	19,81	34,89	44,89	64,83
3.1.6	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(0,60)	(4,02)	(1,88)	(6,51)	(9,17)	205,00
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**93,02**	**98,71**	**113,13**	**162,62**	**286,15**	**30,38**
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	-	-	-	-	0	0
3.2.1	Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang	31,86	31,37	50,92	56,04	53,26	12,69
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.162,86	1.301,98	1.473,42	1.693,61	2.030,32	13,69
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	16,50	14,77	12,49	5,11	19,66	37,43
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**1.211,21**	**1.348,12**	**1.536,83**	**1.754,75**	**2.103,24**	**13,43**
3.3	**EKUITAS DANA CADANGAN**	-	-	-	-	0	0
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	4,00	7,00	(12,50)
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**4,00**	**7,00**	**(12,50)**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**1.304,24**	**1.446,83**	**1.649,96**	**1.921,37**	**2.396,40**	**14,70**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.307,63**	**1.453,59**	**1.652,32**	**1.927,88**	**2.408,14**	**14,76**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2014, Kabupaten Trenggalek memiliki aset senilai Rp. 2,408 trilyun, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 14,76 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2014 mencapai Rp.2,030 trilyun dan rata-rata tumbuh 13,69 persen per tahun. Aset tetap ini pada tahun 2014 meliputi 84,31 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 11,75 milyar. Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2014. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 mencapai Rp. 2,396 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2010-2014 dengan rata-rata 14,70 persen.

Berdasarkan neraca tersebut diatas, analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio, diantaranya dengan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Melalui perhitungan dari rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*) maupun rasio total hutang terhadap total aset dari neraca Kabupaten Trenggalek dapat diketahui kemampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya dan kewajiban-kewajibannya.

Tabel III-5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014

No.	URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Rasio kewajiban Thd aset	0,260	0,466	0,143	0,338	0,488
2	Rasio kewajiban Thd Ekuitas	0,260	0,468	0,143	0,339	0,490
3	Rasio lancar (*current ratio*)	2.838,82	1.558,19	4.881,01	2.596,29	2.535,86
4	Rasio quick (*quick ratio*)	2.608,16	1.419,90	4.043,95	2.060,68	2.153,73
5	Rasio total hutang terhadap total aset (%)	0,26	0,47	0,14	0,34	0,49

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan Umum Anggaran yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015 melalui upaya optimalisasi fungsi-fungsi anggaran (APBD) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penyelenggaraan/tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (fungsi alokasi), serta memperhatikan/memenuhi rasa keadilan dan kepatutan (fungsi distribusi).

Selain dengan tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong dan memfasilitasi partisipasi para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan anggaran, mulai dari perencanan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini, penyelenggaraan Forum Musrenbang bersifat strategis dalam rangka menyerasikan antara aspirasi yang bersifat atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Disamping itu, anggaran yang disusun harus memenuhi asas disiplin dan tertib anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran.

Adapun Kebijakan Umum Anggaran yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Trenggalek periode tahun 2010-2015 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 :

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber C*orporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
g) Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
i) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan representasi dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Arah pembangunan secara umum tergambar dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada struktur belanja daerah. Kebijakan umum belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

a) Belanja yang dialokasikan terhadap kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan *(multiplier effect* yang besar dan *cost recovery)*;
b) Meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan pelayanan publik dibanding belanja untuk kepentingan aparatur;
c) Meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja non modal;
d) Meningkatkan proporsi belanja langsung yang mendukung kebijakan dan program prioritas daerah;
e) Mengarahkan belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu;
f) Mengarahkan belanja daerah pada peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
g) Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
h) Penggunaan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan. Adapun pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek kurun waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2010-2015 ditekankan pada :

1). Penerimaan Pembiayaan Daerah
   a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebagai sumber penerimaan APBD tahun berikutnya;
   b) Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
   c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
   d) Optimalisasi lembaga keuangan mikro, terutama yang beroperasi di wilayah perdesaan.
2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   a) Penyertaan modal pada BUMD;
   b) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Trenggalek

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Kebijakan pengalokasian yang perlu diperhatikan adalah :

a) Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi tersebut dipungut.
b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang terbaik bagi kas daerah.
c) Penerimaan Dana Alokasi Umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
d) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e) Penerimaan dana Bagi Hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana Bagi Hasil tersebut didapat.

Berdasar realisasi struktur pendapatan pada kurun waktu 2011-2015, dengan asumsi kondisi ekonomi makro stabil, maka pendapatan daerah bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan (khususnya Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (khususnya Bagi Hasil Pajak Propinsi) diharapkan meningkat lebih tinggi dari sumber-sumber pendapatan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan tambahan obyek pajak dan retribusi baru bagi daerah.

Di sisi belanja daerah, pengeluaran untuk Belanja Pegawai, khususnya Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan masih mendominasi proporsi belanja, maka alokasi untuk kebutuhan aparatur masih tinggi dibanding alokasi belanja lainnya. Karena itu efisiensi dan efektifitas serta ketepatan sasaran target pembangunan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.

Kebijakan umum pendapatan adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber C*orporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
g) Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
i) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Kebijakan perencanaan penerimaan pendapatan daerah yang akan dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek untuk 6 tahun ke depan, Tahun 2016-2021 diantaranya meliputi :

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021 melalui :
   a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
   b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
   c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
   d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
   f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
   g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
2. Kebijakan Pengelolaan Dana Perimbangan yang diterima dan dikelola Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 ditempuh melalui :
   a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
   b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU dan DAK pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU dan DAK pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan :
      - realisasi besaran DBH, DAU dan DAK tahun-tahun sebelumnya;
      - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
3. Kebijakan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :
   a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
   b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
d) Alokasi Dana Penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berkenaan. Apabila belum ada penetapan maka penganggarannya didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
e) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

4. Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :
   a) Untuk memenuhi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank;
   b) mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
   c) pengoptimalan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

   Dalam pengelolaan pembiayaan Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui strategi yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas diantaranya sebagai berikut :
   a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
   b) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
   c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
5. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
6. Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
7. Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Perencanaan perkiraan/proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel III-6** di bawah didasarkan pada pertumbuhan pendapatan daerah dari Tahun 2011–2015 yang selalu meningkat tiap tahunnya, data realisasi penerimaan daerah tahun 2016-2017, asumsi pertumbuhan ekonomi 5-6% serta inflasi Kabupaten Trenggalek sebesar 5-6%. Ditopang dengan asumsi capaian indikator makro ekonomi Nasional dalam keadaan stabil serta beberapa asumsi terkait penetapan angka-angka proyeksi, maka perkiraan/proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu meningkat tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,09%;
2. Dana Perimbangan sebagai penopang utama dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trengggalek diasumsikan fluktuatif penerimaannya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Namun diasumsikan penerimaannya hingga tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 5,35% dengan rincian sebagai berikut :
   a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksikan cenderung fluktuatif (naik turun) dengan rata-rata sebesar 7,61%;
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) juga diproyeksikan cenderung fluktuatif (naik turun) dengan rata-rata sebesar 5,65%;
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,47%, tetapi Tahun 2018-2021 diproyeksikan tetap besarannya sama dengan alokasi penerimaan Tahun 2018.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, besaran penerimaannya cenderung fluktuatif tiap tahunnya, realisasi penerimaan tahun 2016-2017 dan proyeksi penerimaan tahun 2018-2021 yang berupa dana bagi hasil provinsi, bantuan keuangan provinsi, hibah ke PDAM dan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat dengan asumsi rata-rata penerimaan sebesar 12,34%;
4. Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) cenderung menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan asumsi penerimaan tahun 2018 juga menurun dibanding tahun 2017. Asumsi tahun 2019-2021 cenderung tidak terjadi SiLPA, seiring dengan harapan semakin baiknya pengelolaan pengeluaran belanja pembangunan daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman untuk tiap tahunnya diproyeksikan sama dengan realisasi penerimaan Tahun 2016.

Tabel III-6. Realisasi dan Perkiraan/Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (*dalam jutaan rupiah*)

NO.	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	
A	**PENDAPATAN**	**1.632.638,56**	**1.791.672,37**	**1.759.995,12**	**1.984.419,46**	**2.134.020,96**	**2.289.795,06**	**7,11**
1,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**182.174,29**	**253.205,32**	**199.000,00**	**275.428,29**	**301.417,00**	**331.666,32**	**15,09**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.137,03	32.037,07	32.015,95	33.526,15	36.616,00	38.185,96	7,24
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.332,36	17.792,88	19.898,83	20.905,05	25.583,94	28.469,02	11,90
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.412,83	4.557,69	4.715,00	4.979,62	4.979,62	4.979,62	2,47
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.292,07	198.817,68	142.370,22	216.017,47	234.237,45	260.031,72	18,17
1,2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.217.293,67**	**1.194.709,71**	**1.270.019,51**	**1.358.574,05**	**1.466.186,84**	**1.574.711,63**	**5,35**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	65.902,38	57.297,57	78.219,62	78.219,62	88.422,41	89.796,20	7,61
1.2.3	Dana Alokasi Umum	901.379,78	885.545,44	885.545,44	974.099,98	1.071.509,98	1.178.660,98	5,65
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	250.011,51	251.866,71	306.254,46	306.254,46	306.254,46	306.254,46	4,47
1,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**233.170,60**	**343.757,34**	**290.975,61**	**350.417,12**	**366.417,12**	**383.417,12**	**12,34**
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000,00	23.786,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.536,96	102.169,37	82.924,55	94.924,55	101.924,55	108.924,55	7,35
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.943,54	181.671,06	144.827,46	170.827,46	170.827,46	170.827,46	16,26

NO.	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.690,10	36.130,91	3.720,00	24.161,51	34.161,51	44.161,51	100,35
B	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**233.860,49**	**153.704,12**	**37.202,82**	**202,82**	**15.202,82**	**202,82**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	233.657,68	153.545,05	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	202,81	159,07	202,82	202,82	202,82	202,82	1,19
	Jumlah (A+B)	**1.866.499,06**	**1.945.376,49**	**1.797.197,93**	**1.984.622,27**	**2.149.223,78**	**2.289.997,88**	**4,38**

Proyeksi penerimaan pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya mengalami perubahan. Realisasi pendapatan untuk Tahun 2016 sebesar 1,632 trilyun, dan meningkat menjadi 1,791 trilyun pada Tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD Tahun 2016-2021, pendapatan daerah menjadi 2,289 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Sedangkan dari sisi penerimaan pembiayaan, realisasi pada tahun 2016 sebesar 233,86 milyar rupiah dan pada akhir periode menjadi 202,82 juta rupiah. Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2016 masih ditopang dari penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) namun Tahun 2019-2021 diproyeksikan tidak ada SiLPA dengan asumsi karena adanya peningkatan pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja pembangunan yang semakin baik. Sehingga Tahun 2019-2021 dari sisi penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, khusus pada tahun 2020 terdapat pencairan dana cadangan yang dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebesar 15 milyar.

3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasi perencanaan penganggaran untuk anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 diarahkan sebagai berikut :

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;
6) Pembentukan dana cadangan;
7) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah;
8) Pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Perencanaan perkiraan/proyeksi pengeluaran belanja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.7** dibawah didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (BTL) diproyeksikan dengan telah memperhitungkan :
    a. Jumlah PNS/ASN untuk tahun 2018-2021 diasumsikan sama Tahun 2017 dengan susunan organisasi tata kerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang baru;
    b. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD/ASN serta pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14; kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
    c. tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH;
    d. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;

e. pengalokasian BOSDA untuk tambahan penghasilan guru honorer;
f. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
h. tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru.

2. Belanja Hibah dialokasikan untuk diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belanja Bantuan Sosial diasumsikan dialokasikan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan;
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diasumsikan naik tiap tahunnya yang dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa diasumsikan naik tiap tahunnya yang dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek;
6. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan dalam kisaran 1-10 milyar tiap tahunnya yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
7. Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang direncanakan sebesar 15 milyar dan dicadangkan penganggarannya mulai Tahun 2017-2019; dan
8. Penyertaan modal kepada PDAM yang pengeluarannya disesuaikan dengan besaran penerimaan hibah daerah untuk PDAM, penyertaan modal ke BPR Jwalita serta dimungkinkan untuk penyertaan modal ke Swasta/BUMD yang lain.

Tabel III-7. Realisasi dan Perkiraan / Proyeksi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (*dalam jutaan rupiah*)

NO.	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.055.989,57**	**985.763,31**	**1.070.325,38**	**1.135.944,07**	**1.231.421,84**	**1.294.225,31**	**4,31**
1.1	Belanja Pegawai	822.036,91	721.470,98	784.479,85	834.553,60	904.681,32	980.821,80	3,94
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Belanja Hibah	24.990,55	25.185,38	27.522,04	29.922,04	49.687,04	24.852,04	6,97
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.016,14	2.570,10	10.284,20	10.700,00	9.675,00	9.875,00	47,88
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.105,74	7.051,34	6.686,49	7.252,07	8.028,95	8.474,45	7,01
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	196.820,73	227.705,78	231.352,80	243.516,35	249.349,53	260.202,01	5,86
1.8	Belanja Tidak Terduga	19,50	1.779,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

NO.	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI				Rata-rata Pertum-buhan (%)
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	
B	**BELANJA LANGSUNG**	**653.964,43**	**773.952,99**	**714.372,56**	**835.178,20**	**909.801,94**	**990.772,57**	**9,08**
C	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.000,00**	**11.000,00**	**12.500,00**	**13.500,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**42,01**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	5.000,00	21,93
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.3.3. Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel III-8. Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
(*dalam milyar rupiah*)

No.	Uraian	Realisasi		Proyeksi			
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1	Pendapatan	1.632,64	1.791,67	1.760,00	1.984,42	2.134,02	2.289,80
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	233,66	153,55	37,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,56	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20
	Total kapasitas kemampuan keuangan daerah	**1.866,86**	**1.945,38**	**1.797,20**	**1.984,62**	**2.149,22**	**2.290,00**

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

- ***Prioritas I***,
  Program Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ***Prioritas II***,
  Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- ***Prioritas III***,
  Program Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam **Tabel** sebagai berikut :

Tabel III-9. Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun 2016-2021 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi							
		TA 2016	%	TA 2017	%	TA 2018	%	TA 2019	%	TA 2020	%	TA 2021	%
1	**Prioritas I**	**1.551.765,65**	**83,14**	**1.255.647,10**	**64,55**	**1.384.422,18**	**77,03**	**1.474.085,21**	**74,28**	**1.577.124,16**	**73,38**	**1.693.823,02**	**73,97**
	BTL (Wajib dan mengikat)	1.209.734,13	64,81	956.031,58	49,14	1.017.750,29	56,63	1.077.245,09	54,28	1.158.910,96	53,92	1.246.349,43	54,43
	BL (Wajib dan mengikat)	339.031,52	18,16	288.615,52	14,84	354.171,88	19,7	383.340,12	19,32	410.213,20	19,09	442.473,59	19,32
	Pengeluaran Pembiayaan Wajib	3.000,00	0,16	11.000,00	0,57	12.500,00	0,70	13.500,00	0,68	8.000,00	0,37	5.000,00	0,22
2	**Prioritas II**	**287.427,22**	**15,40**	**673.137,45**	**34,60**	**374.138,46**	**20,82**	**465.775,87**	**23,47**	**513.526,53**	**23,89**	**562.236,77**	**24,55**
3	**Prioritas III**	**27.306,19**	**1,46**	**16.591,94**	**0,85**	**38.637,29**	**2,15**	**44.761,19**	**2,26**	**58.573,09**	**2,73**	**33.938,09**	**1,48**
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Belanja Hibah	21.270,55	1,14	8.983,67	0,46	10.963,84	0,61	13.363,84	0,67	33.128,84	1,54	8.293,84	0,36
	Belanja Bantuan Sosial	6.016,14	0,32	2.570,10	0,13	10.284,20	0,57	10.700,00	0,54	9.675,00	0,45	9.875,00	0,43
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	3.258,44	0,17	7.389,25	0,41	10.697,35	0,54	5.769,25	0,27	5.769,25	0,25
	Belanja Tidak Terduga	19,50	0,00	1.779,72	0,09	10.000,00	0,56	10.000,00	0,50	10.000,00	0,47	10.000,00	0,44
	Total	**1.866.499,06**	**100,00**	**1.945.376,49**	**100,00**	**1.797.197,93**	**100,00**	**1.984.622,27**	**100,00**	**2.149.223,78**	**100,00**	**2.289.997,88**	**100,00**

BAB IV

ANALISIS
ISU-ISU STRATEGIS

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis dalam dokumen RPJMD merupakan isu-isi yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti, sebaliknya jika isu strategis tersebut tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi lebih sulit tercapai.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek tahun 2005 – 2025 adalah : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi, yaitu :

1. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dengan mengutamakan agrobisnis dan agroindustri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah;
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada pelayanan prima; dan
7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam lingkup kawasan.

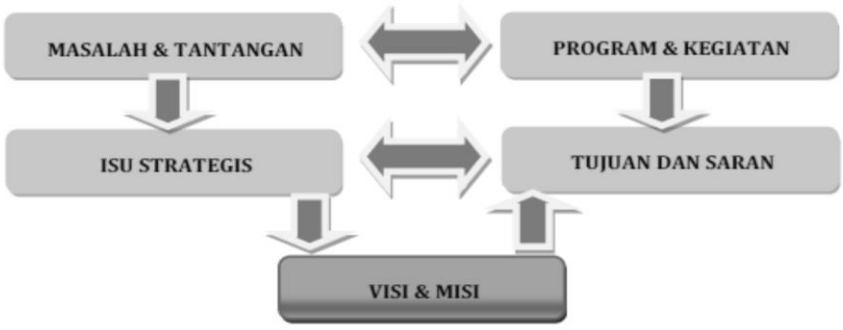
Pembangunan **Tahap Ketiga** (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Agenda yang dijalankan meliputi :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2. Peningkatan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
3. Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatan pelayanan prima;
8. Efektifitas penanggulangan bencana; dan
9. Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kabupaten Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam **Gambar** berikut.



Gambar IV-1. Pola Hubungan antara Permasalahan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan

Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu, pencapaian target pembangunan masih perlu dioptimalkan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Indikator makro Kabupaten Trenggalek sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung ataupun yang dianggap sebagai penunjang.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level Pemerintahan, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek secara umum selama kurun waktu Tahun 2010-2015, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional maupun regional.

Permasalahan daerah yang diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah sebagaimana berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan	
1.	**Pendidikan**	
	-	Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah;
	-	Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
	-	Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya;
	-	Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk daerah pegunungan;
	-	Masih rendahnya angka melanjutkan/angka transisi dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;

No.		Permasalahan
	-	Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa, ditengarahi tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berpontesi menimbulkan sengketa;
	-	Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar;
	-	Belum semua siswa dari keluarga miskin mendapatkan penanda Indonesia Pintar sebagai syarat penerima manfaat dari program Indonesia Pintar yang merupakan program nasional pengentasan kemiskinan; dan
	-	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan keorangtuaan/ pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan nasional.
2.	**Kesehatan**	
	-	Masih kurangnya SDM kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, apoteker, rekam medik, analis, keperawatan dan non medis lainnya);
	-	Belum semua fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdas) menempati tanah milik Pemda;
	-	Gedung untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Gedung Puskesmas, Gedung Pustu dan Gedung Poskesdes) masih memerlukan untuk direhab/dibangun baru;
	-	Belum Semua Puskesmas mempunyai peralatan medis/non medis sesuai standart Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;
	-	Belum mempunyai mobil promosi kesehatan dan mobil distribusi vaksin di dinas kesehatan;
	-	Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih endemis;
	-	Penyakit HIV/AIDS cenderung meningkat;
	-	Belum semua desa menjadi desa cakupan Universal Child Immunisation (UCI);
	-	Belum semua desa *Open Defecation Free* (ODF);
	-	Masih adanya kematian ibu karena melahirkan;
	-	Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular (DBD dan Diare), dan rendahnya penemuan penderita TB Paru dan Ispa pneumonia balita dibandingkan dengan target penemuan;
	-	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;
	-	BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia dan cacat bawaan merupakan faktor penyebab angka kematian bayi;
	-	Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk;
	-	Masih adanya kasus stunting;
	-	Masih ditemukannya kasus jiwa yang dipasung;
	-	Masih perlu peningkatan manajemen pelayanan kesehatan;
	-	Belum semua masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
	-	Belum semua masyarakat miskin masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
	-	Angka Kematian Kasar / *Gross Death Rate* (GDR) di Rumah Sakit masih di atas standar;
	-	Angka Kematian Murni / *Net Death Rate* (NDR) di Rumah Sakit masih di atas standar; dan
	-	Masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

No.	Permasalahan	
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	-	Belum optimalnya Kualitas layanan jalan dan jembatan Kabupaten;
	-	Kurangnya konektifitas layanan jalan dan jembatan di wilayah strategis;
	-	Belum optimalnya *database* jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
	-	Belum optimalnya jaringan irigasi dan layanan sarana prasarana sumber daya air;
	-	Belum optimalnya kelembagaan pengelola irigasi;
	-	Belum optimalnya penyediaan drainase perkotaan;
	-	Belum optimalnya sarana prasarana pekerjaan umum;
	-	Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung;
	-	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
	-	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang;
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
	-	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM);
	-	Belum tersedianya *database* keciptakaryaan;
	-	Belum optimalnya sistem dan pengelolaan persampahan;
	-	Belum optimalnya layanan sistem air limbah permukiman;
	-	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
	-	Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
	-	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
	-	Belum optimalnya prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman; dan
	-	Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	
	-	Masih lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM;
	-	Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara;
	-	Belum optimalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
	-	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM anggota Satpol PP;
	-	Belum semua anggota Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran bersertifikat Pelatihan;
	-	Belum optimalnya implementasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
	-	Masih kurangnya sarana, prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
	-	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
	-	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
	-	Masih tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba; dan
	-	Kurang optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

No.	Permasalahan	
6.	**Sosial**	
	-	Masih tingginya angka kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi sebagai akibat rendahnya kualitas SDM, faktor ketunaan/disabilitas, maupun faktor geografis (terisolir);
	-	Keberadaan anak terlantar, baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan / LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang memerlukan pelayanan dan perlindungan;
	-	Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi yang tercermin pada jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
	-	Data fakir miskin yang belum valid;
	-	Seiring bertambahnya angka harapan hidup, jumlah lanjut usia semakin meningkat. Sehingga memerlukan penanganan, utamanya lansia terlantar;
	-	Kondisi topografi dan geografi yang berbukit dan terletak di pesisir selatan menyebabkan Kabupaten Trenggalek rawan bencana;
	-	Keberadaan 5 (lima) jenis PMKS jalanan yang terdiri dari: pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila (termasuk eks WTS), gelandangan dan penderita psikotik;
	-	Masih banyak jumlah korban pasung, penderita psikotik dan penyandang cacat yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial;
	-	Masih banyak penyandang disabilitas yang belum mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial;
	-	Semakin berkurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta terbatasnya kapasitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
	-	Semakin berkurangnya penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada masyarakat.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan	
1.	**Tenaga Kerja**	
	-	Produktivitas dan kualitas pencari kerja yang masih rendah;
	-	Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi karena kesenjangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia;
	-	Penempatan TKI masih didominasi oleh TKI informal (asisten rumah tangga);
	-	Perluasan kesempatan kerja masih didominasi oleh sektor informal;
	-	Di bidang Hubungan Industrial, masih banyak pekerja yang belum dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta masih banyak yang belum memiliki sarana hubungan industrial; dan
	-	Perlindungan hak dan kewajiban pekerja masih rendah
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
	-	Masih terdapat perempuan buta huruf;
	-	Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender;
	-	Lembaga Pengarusutamaan Gender belum seluruhnya aktif;
	-	Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;

No.	Permasalahan	
	-	Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
	-	Belum optimalnya pemenuhan hak anak; dan
	-	Organisasi Perempuan belum optimal dilakukan.
3.	**Pangan**	
	-	Masih belum berimbangnya pola konsumsi masyarakat;
	-	Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan;
	-	Masih tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan beras;
	-	Masih rendahnya keanekaragaman pangan dan gizi; dan
	-	Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan (karang kitri).
4.	**Pertanahan**	
	-	Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat;
	-	Masih terkendalanya pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
	-	Banyaknya fasilitas umum yang berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
5.	**Lingkungan Hidup**	
	-	Belum optimalnya sistem dan pengelolaan persampahan;
	-	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
	-	Belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup;
	-	Belum optimalnya pengawasan pentaatan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha;
	-	Belum optimalnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan untuk kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah;
	-	Minimnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha skala kecil;
	-	Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan hidup (air, udara, dan lahan) sehingga tidak cukup tersedianya data dan informasi lingkungan hidup;
	-	Belum optimalnya layanan sistem air limbah permukiman;
	-	Banyaknya sumber air yang berkurang debitnya maupun mati pada musim kemarau;
	-	Belum optimalnya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
	-	Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati; dan
	-	Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis.
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
	-	Belum tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
	-	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
	-	Masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki dokumen kependudukan.
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
	-	Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
	-	Masih adanya Desa dengan status Desa Tertinggal;

No.		Permasalahan
	-	Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu Desa/Sistem Informasi Desa (SID);
	-	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pendampingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
	-	Kurangnya akurasi dan kepatuhan pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan perundang-undangan;
	-	Belum optimalnya manajemen gotong-royong masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan;
	-	Belum optimalnya Badan Usaha Desa (BUMDesa) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) :
		- Belum semua BUMDesa kategori baik dan belum memiliki sektor riil.
		- Belum ada regulasi dalam pengaturan LKM, dan belum optimalnya inventarisasi asset.
	-	Belum optimalnya pengelolaan pasar desa;
	-	Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
	-	Belum optimalnya peran Posyantek dan Wartekdes;
	-	Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan (LK);
	-	Kelompok calon penerima hibah/bantuan banyak yang belum berbadan hukum; dan
	-	Minimnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi tentang Desa.
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
	-	Masih belum terpadunya kebijakan pembangunan kependudukan;
	-	Masih tingginya tingkat kelahiran;
	-	Masih tingginya pernikahan di usia dini;
	-	Masih rendahnya partisipasi ber-KB;
	-	Masih tingginya *Unmetneed* (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi);
	-	Masih rendahnya keluarga yang mempunyai balita ikut Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB;
	-	Masih rendahnya keluarga yang mempunyai remaja ikut Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB;
	-	Masih rendahnya keluarga yang mempunyai lansia ikut Bina Keluarga Lansia (BKL); dan
	-	Masih rendahnya semua keluarga ikut dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
9.	**Perhubungan**	
	-	Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan;
	-	Belum optimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
	-	Kurangnya ketersediaan layanan transportasi yang memadai; dan
	-	Kurang optimalnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
10.	**Komunikasi Dan Informatika**	
	-	Belum optimalnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
	-	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat;
	-	Belum optimalnya sosialisasi program-program pembangunan daerah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dan publikasi; dan

No.		Permasalahan
	-	Kurangnya jumlah SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi untuk mendukung implementasi *e-government*.
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	-	Masih rendahnya jumlah koperasi aktif;
	-	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan koperasi serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian;
	-	Masih kurangnya validitas data koperasi dan UMKM termasuk penerapan IT;
	-	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi;
	-	Masih banyaknya aktivitas sumber pembiayaan non formal;
	-	Masih rendahnya akses pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
	-	Masih tingginya jumlah usaha informal;
	-	Kurangnya kesiapan pelaku koperasi dan UMKM dalam menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA);
	-	Masih sulitnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM;
	-	Masih kurangnya kemitraan koperasi dan UMKM;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan UMKM; dan
	-	Belum optimalnya konektivitas antara koperasi dan UMKM dengan sektor Pariwisata.
12.	**Penanaman Modal**	
	-	Masih rendahnya investasi oleh pihak swasta/pengusaha yang terkendala dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
	-	Pelayanan perijinan dirasakan masih terlalu panjang;
	-	Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang persyaratan dan pelayanan perizinan yang diinginkan;
	-	Masih rendahnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan melalui CSR; dan
	-	Belum optimalnya sinkronisasi persyaratan perizinan.
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**	
	-	Minimnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda;
	-	Masih rendahnya *life-skill* pemuda dan menurunnya jiwa nasionalisme pemuda;
	-	Masih kurangnya sarana prasarana olahraga;
	-	Masih rendahnya prestasi atlet di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
	-	Masih rendahnya cakupan cabang olahraga yang berprestasi.
14.	**Statistik**	
	-	Minimnya ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
	-	Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); dan
	-	Belum optimalnya Pusat Data Pembangunan Daerah.
15.	**Persandian**	
	-	Belum semua Perangkat Daerah yang pelayanan Jaringan persandiannya dalam kondisi baik; dan
	-	Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai.

No.	Permasalahan	
16.	**Kebudayaan**	
	-	Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya dalam rangka penyelamatan aset budaya;
	-	Masih rendahnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni/budaya daerah;
	-	Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan; dan
	-	Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan.
17.	**Perpustakaan**	
	-	Masih minimnya jumlah Perpustakaan Desa (perpusdes) yang aktif;
	-	Rendahnya minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
	-	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan;
	-	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan yang memadai;
	-	Rumah pintar belum sepenuhnya terwujud; dan
	-	Belum tersedianya tutor di rintisan rumah pintar yang berstatus PNS
18.	**Kearsipan**	
	-	Belum semua Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip dengan baik sesuai standar;
	-	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM kearsipan; dan
	-	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Permasalahan	
1.	**Kelautan Dan Perikanan**	
	-	Belum optimalnya penangkapan ikan lepas pantai;
	-	Masih rendahnya produksi perikanan;
	-	Masih rendahnya kualitas ikan hasil tangkapan dan budidaya;
	-	Masih rendahnya mutu, keamanan dan daya saing produk olahan perikanan;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;
	-	Masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
	-	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas dan ijin usaha;
	-	Masih kurangnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
	-	Masih belum optimalnya fungsi dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
	-	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan; dan
	-	Masih kurangnya luasan vegetasi pesisir dalam kondisi baik.
2.	**Pariwisata**	
	-	Kurang memadainya infrastruktur menuju dan di lokasi obyek wisata;
	-	Kurangnya jumlah kunjungan wisata;
	-	Banyaknya prasarana dan sarana pariwisata yang rusak;
	-	Kurangnya sarana pendukung dan kebersihan obyek wisata;

No.		Permasalahan
	-	Kurangnya obyek wisata;
	-	Kurangnya daya tarik wisata, informasi, dan promosi;
	-	Kurangnya regulasi investasi wisata;
	-	Belum adanya penyelenggaraan event pariwisata yang bertaraf nasional/internasional;
	-	Kurangnya sarana prasarana pendukung obyek wisata, daya tarik wisata, informasi, promosi dan investasi wisata;
	-	Kurang memadainya fasilitas umum di kawasan wisata;
	-	SDM dan usaha pelaku wisata belum terstandarisasi/tersertifikasi; dan
	-	Belum adanya sinkronisasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan di sektor pariwisata.
3.	**Pertanian**	
	-	Masih kurangnya sarana produksi pertanian (meliputi benih, pupuk, obat-obatan pertanian, dan alsintan);
	-	Masih kurangnya infrastruktur pertanian meliputi :
		- JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani).
		- JUT (Jalan Usaha Tani) dan JAPROD (Jalan Produksi).
		- Pengembangan sumber air untuk pertanian (Dam parit, embung, irigasi air tanah, irigasi air permukaan, dll).
	-	Alih fungsi lahan pertanian yang meningkat sangat pesat terutama untuk lahan pertanian yang berada di sepanjang jalan raya;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM petani;
	-	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani;
	-	Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida;
	-	Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan perubahan iklim;
	-	Belum optimalnya produksi pertanian di kawasan agropolitan;
	-	Masih kurang tersedianya bibit unggul ternak;
	-	Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
	-	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak (hasil uji Lab terhadap konsentrat pakan non pabrikan yang beredar, 75% konsentrat ada komponen kandungan gizi dibawah standar SNI dan masih rendahnya penggunaan teknologi fermentasi pakan sebagai cadangan pakan yang berkualitas);
	-	Masih kurangnya sarana prasarana peternakan (produksi ternak, pengolahan hasil produksi ternak dan obat-obatan);
	-	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak;
	-	Terancam punahnya plasma nutfah sapi potong lokal asli Trenggalek “Sapi Galekan”;
	-	Kurang optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
	-	Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM peternak;
	-	Kurangnya sarana prasarana pemasaran hasil peternakan yang representatif dan strategis; dan
	-	Belum optimalnya pengolahan dan promosi hasil produksi peternakan.

No.	Permasalahan	
4.	**Perdagangan**	
	-	Tidak stabilnya harga komoditas pertanian;
	-	Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pasar;
	-	Masih rendahnya akses pemasaran produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional;
	-	Masih rendahnya kesadaran pemilik UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dalam menera ulang peralatannya;
	-	Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung pendirian UPT Kemetrologian;
	-	Masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang;
	-	Belum adanya lahan khusus untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
	-	Belum optimalnya pengaturan keberadaan toko modern berjaringan.
5.	**Perindustrian**	
	-	Masih kurangnya industri berbasis pertanian (agro industri);
	-	Masih banyaknya industri non formal yang belum berijin;
	-	Kurangnya validitas data IKM formal dan non formal;
	-	Masih rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga kesadaran pengusaha / wirausahawan untuk mengurus ijin produknya pun ikut rendah;
	-	Masih rendahnya kualitas SDM IKM;
	-	Rendahnya sarana dan prasarana IKM;
	-	Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM;
	-	Masih rendahnya akses permodalan pada IKM; dan
	-	Belum optimalnya konektivitas antara IKM dengan sektor Pariwisata.
6.	**Transmigrasi**	
	-	Minimnya kuota transmigrasi dari Pusat;
	-	Masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan keberangkatan transmigran;
	-	Rendahnya kualitas SDM calon transmigran; dan
	-	Kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No.	Permasalahan	
1.	**Administrasi Pemerintahan**	
	-	Masih rendahnya hasil penilaian implementasi SAKIP Kab. Trenggalek;
	-	Belum seluruh Perangkat Daerah menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
	-	Belum optimalnya penerapan Budaya Kerja dilingkungan pemerintah daerah;
	-	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum belum optimal;
	-	Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas SDM, sarana dan prasarana penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
	-	Belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan BUMD;

No.		Permasalahan
	-	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka managemen pembinaan BUMD;
	-	Keterbatasan aparatur tingkat kecamatan dari segi kompetensi sebagai pelaksana pelayanan serta sebagai pendamping penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
	-	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal; dan
	-	Belum semua kecamatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
2.	**Pengawasan**	
	-	Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
3.	**Perencanaan**	
	-	Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
	-	Ketersediaan data/informasi perencanaan belum optimal dan belum valid;
	-	Masih lemahnya sistem pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
	-	Belum sinkronnya proses perencanaan dan penganggaran; dan
	-	Keterbatasan SDM perencana baik dari segi jumlah, kompetensi dan kualitas.
4.	**Keuangan**	
	-	Belum optimalnya pelaksanaan validasi aset/ Barang Milik Daerah (BMD);
	-	Belum optimalnya pemungutan pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD);
	-	Kurangnya SDM fungsional dalam pemungutan pajak-pajak daerah (penilai, pemeriksa, penyuluh, juru sita pajak daerah); dan
	-	Belum optimalnya implementasi Perda yang berkenaan dengan PAD.
5.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**	
	-	Penataan dan penempatan PNS belum sesuai dengan kompetensi, hasil analisis jabatan dan kebutuhan;
	-	Penyelenggaraan manajemen karier PNS belum optimal;
	-	Belum optimalnya penilaian kinerja PNS secara obyektif;
	-	Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;
	-	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi di bidang kepegawaian;
	-	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur belum optimal dan masih belum sesuai dengan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD);
	-	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat belum optimal; dan
	-	Kurang optimalnya pengelolaan informasi, data dan dokumentasi kepegawaian.
6.	**Penelitian dan Pengembangan**	
	-	Pelaksanaan kegiatan sistem inovasi daerah, penelitian dan pengkajian masih belum berjalan optimal; dan
	-	Belum diterapkannya Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
	-	Belum optimalnya akses dan link kerja sama pengembangan penelitian antar *stakeholders*.

Dari daftar permasalahan di atas kemudian dirumuskan 7 (tujuh) permasalahan utama / makro yang akan dikonversi menjadi menjadi isu-isu strategis yaitu :

1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
2. Pelayanan publik khususnya pelayanan dasar yang banyak dikeluhkan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian terutama yang mengarah pada agrobisnis/agroindustri;
4. Minimnya kerjasama daerah serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
5. Masih tingginya angka pengangguran karena kesenjangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia dan minimnya investasi daerah;
6. Masih tingginya angka kemiskinan; dan
7. Belum optimalnya pembangunan karakter dan revolusi mental.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

4.2.1. Isu Internasional

Setelah resesi global sejak pertengahan Tahun 2008 yang dimulai dengan krisis *mortgage fund* di Amerika Serikat, upaya pemulihan ekonomi dunia yang dimulai sejak akhir 2009, rupanya masih disusul oleh krisis ekonomi lainnya yang berasal dari belahan dunia lain yaitu negara-negara eropa seperti Portugal, Italia, Yunani (*Greece*) dan Spanyol sampai dengan Tahun 2011. Secara umum pemulihan ekonomi global saat ini disebabkan oleh relatif berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Namun berbagai peringatan telah dikemukakan oleh para ekonom dunia, IMF dan Bank Dunia, bahwa pemulihan tersebut memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi dalam lima Tahun ke depan, yaitu: (1) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (2) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (3) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia yang sangat sensitif terhadap konflik politik antar negara. Harga minyak mentah dunia diawal Tahun 2012 sempat menembus level US$ 100 per barrel. Memang setelah sinyal psikologis positif dikeluarkan beberapa lembaga keuangan internasional seperti IMF harga tersebut hingga tahun 2014 perlahan turun ke angka US$ 86 dan bahkan dibawah US$ 60 pada pertengahan tahun 2015. Namun kenaikan ekstrim harga minyak mentah dunia akan sangat mungkin terjadi kembali mengingat negara-negara yang diperkirakan akan mulai pulih kondisi perekonomiannya seperti Amerika Serikat dan Jepang akan meningkatkan permintaan minyak mentah dunia. Berdasarkan prediksi OPEC, jika terjadi peningkatan permintaan konsumsi diatas 6 juta barrel, maka kenaikan harga minyak secara sporadis tidak dapat dielakkan. Sebagai efek domino adalah kenaikan harga komoditas yang tentu akan meningkatkan laju inflasi (Komite Ekonomi Nasional, 2015).

Dalam menghadapi *trend* pelambatan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis keuangan, ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan serta perkiraan lingkungan eksternal pada Tahun 2017 – 2021 mutlak diperlukan. Meskipun diwarnai optimisme, dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh pada masa krisis (*exit strategy*), yang antara lain berupa pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Tantangan eksternal juga berhubungan dengan terjadinya kecenderungan polarisasi perdagangan dunia, serta masih tingginya ketidakseimbangan dalam kinerja perekonomian global. Dari sisi domestik, tantangan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang masih dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti akses likuiditas perbankan yang masih cukup besar, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, pasar keuangan yang dangkal, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil. Tren global memproyeksikan tumbuhnya permintaan yang pesat akan barang-barang konsumsi sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel IV-1.
Tren Global Dalam Permintaan Makanan, Energi, Produk Kesehatan dan Barang Konsumsi

NO.	TREN GLOBAL	DAMPAK
1	Pertumbuhan populasi dunia dari 7 Miliar ke 9 miliar Tahun 2050	- Kekurangan persediaan air bersih - Kenaikan permintaan makanan sekitar 70 %
2	Pertumbuhan populasi lanjut usia	- Tumbuhnya kebutuhan produk dan pelayanan kesehatan
3	Menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energy utama	- Naiknya turunnya harga minyak dunia termasuk di Indonesia
4	Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Pada Tahun 2050, Asia akan berkontribusi 50 dari PDB dunia	- Kenaikan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, baik sisi kuantitas maupun kualitas - Pada Tahun 2050, India & China akan memiliki 100 juta rumah tangga berpendapatan tinggi.
5	Krisis di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat	- Krisis Di eropa dan AS diduga akan mengurangi konsumsi masyarakat di wilayah tsb sehingga diduga akan mengurangi nilai import dari Indonesia

Sumber : Komite Ekonomi Nasional, 2015

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya dan faktor daya modal. Lalu, jika melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan negara lainnya membentuk ASEAN *Community* 2015 atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik.



Gambar IV-2. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tujuan dibuatnya **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015** yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, dengan dibentuknya kawasan ekonomi ASEAN ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi krisis seperti tahun 1997. Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi MEA di akhir tahun 2015, namun banyak peluang yang dapat dilihat dari Ekonomi ASEAN 2015 ini Berdasarkan fakta peringkat daya saing Indonesia periode 2012-2014 berada diposisi 50 dari 144 negara, masih berada dibawah Singapura yang diposisi kedua, Malaysia diposisi ke dua puluh lima, Brunei diposisi dua puluh delapan, dan Thailand diposisi tiga puluh delapan. Melihat kondisi seperti ini, Kabupaten Trenggalek yang secara geografis berada di Selatan Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dan memiliki potensi disektor agroindustri dan maritim maka harus menangkap isu ini sebagai tantangan yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Selain itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga baru saja meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama ***Sustainable Development Goals* (SDGs)**, menggantikan program sebelumnya ***Millennium Development Goals* (MDGs)** yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

Rumusan SDGs disepakati dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah dilaksanakan pada Tanggal 25-27 September 2015 di New York Amerika Serikat dan dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan.

Tujuan dari agenda baru PBB tersebut tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Dokumen SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*) terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan. Tujuan SDGs nantinya harus menjadi bagian dari perencanaan daerah sehingga rumusan yang dihasilkan nanti dapat bersinergi dengan perencanaan nasional.

Tujuan SDGs Tahun 2015-2030 adalah :

1. Tujuan **pertama** : (memiliki 7 target) yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tujuan **kedua** (8 target), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan **ketiga** (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Tujuan **keempat** (10 target) yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan **kelima** (9 target) yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Tujuan **keenam** (8 target), yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Tujuan **ketujuh** (5 target) yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Tujuan **kedelapan** (12 target) yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Tujuan **kesembilan** (8 target) yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Tujuan **kesepuluh** (10 target) yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Tujuan **kesebelas** (10 target) yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Tujuan **keduabelas** (11 target), yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan **ketigabelas** (5 target) yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan **keempatbelas** (10 target) yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Tujuan **kelimabelas** (12 target) yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Tujuan **keenambelas** (12 target), yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Tujuan **ketujuhbelas** (19 target) yaitu memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar IV-3. Ilustrasi 17 Tujuan (Goals) *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Periode RPJMD Kabupaten Trenggalek ini juga adalah periode pertama pelaksanaan SDGs, sehingga pondasi perencanaan daerah harus menjadikan SDGs sebagai pilar utama dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan indikator kinerja pembangunan daerah.

4.2.2. Isu Nasional

Secara umum beberapa kondisi yang perlu diwaspadai oleh Indonesia beberapa tahun yang akan datang adalah tingkat volatilitas rupiah terhadap dollar yang masih cukup tinggi, masih didominasinya arus modal masuk yang bersifat jangka pendek, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, belum lagi masalah politik dan hukum yang dapat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional.

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas, 2015) mengemukakan bahwa dampak positif secara eksternal dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yaitu: 1) Pemerintah negara-negara Uni Eropa mulai menemukan solusi politik penyelesaian krisis keuangannya; 2) Ekonomi di AS mulai tumbuh sangat signifikan. Sedangkan dampak negatifnya : 1) Permintaan domestik turun; 2) Aktifitas perdagangan dunia melambat; 3) Pergerakan arus modal melambat dan volatilitas nilai tukar meningkat; 4) Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam cenderung meningkat; 5) Ketegangan geopolitik di Timur Tengah; 6) Semuanya mempengaruhi harga komoditi primer khususnya minyak mentah dan beras. Adapun dampak negatif secara internal, yaitu :1) Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dan Energi belum memadai; 2) Hambatan Investasi perijinan dan ketidakpastian hukum; 3) Penyimpangan dan Korupsi masih terjadi pada pajak dan APBN; 4) Kekerasan horizontal dan anarki terjadi lagi; 5) Kesiapsiagaan dan kesigapan menangani bencana masih belum memadai; 6) Konflik dan benturan karena masalah pertanahan; dan 7) Persoalan politik lokal Aceh dan Gangguan Keamanan di Papua.

Komite Ekonomi Nasional mengemukakan ada beberapa tantangan bagi ekonomi Indonesia yang perlu diatasi demi memperkuat daya saing di kancah Global seperti disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel IV-2. Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Kancah Global

NO	BIDANG	URAIAN
1	Infrastruktur	Mempercepat pembangunan konektivitas nasional untuk mewujudkan Negara kesatuan secara ekonomi
2	Teknologi	Menurut *World Ekonomic Forum Global Competitiveness Report*, Indonesia berada di rangking 89 (dari 139) dan tertinggal dari Negara-negara di Asia untuk pendaftaran paten. Rangking 77 untuk pemanfaatan teknologi baru, di belakang Malaysia, Thailand, Philippines.
3	Modal Manusia	Indonesia meluluskan 800 ribu lulusan sarjana setiap Tahun. Ke-7 terbesar di dunia setelah (China, India, USA, Russia, Japan,Brazil). Namun saat ini hanya 1 dari setiap 4 anak Indonesia yang berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu: 1). Ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. 2). Tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Sementara menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
4	Birokrasi	Reformasi birokrasi di semua lini : kepemerintahan pusat dan daerah dan penguatan pemerintah desa.
5	*Mindset*	Mendorong gerakan revolusi mental, budaya kerja keras, inovatif, kreatif dan berjiwa wirausaha.

Sumber : Komite Ekonomi Nasional, 2015

Indonesia mempunyai beberapa kelebihan pada sumberdaya alam dan manusia yang berpeluang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Peluang Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel** berikut.

Tabel IV-3. Peluang Ekonomi Indonesia

NO	BIDANG	PELUANG	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN
1	Pertanian	Indonesia salah satu penyedia hasil pertanian dan hayati terbesar di dunia	• Meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen; • Industrialisasi proses pasca panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah; • Penerapan bioteknologi untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan
2	Energi	Indonesia penyedia *energy alternative* dan sumberdaya alam bernilai tambah	• Penerapan teknologi mutakhir dalam proses ekplorasi dan ektraksi sumberdaya alam, serta pada industri pengolahan hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah; • Mengembangkan sumber energy alternative: *Geothermal, Bio-fuel*, matahari, angin, hydrogen
3	Industri	Indonesia merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar dunia	• Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global; • Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sector untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi

Sumber : Komite Ekonomi Nasional, 2015

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.** Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi tersebut juga dituangkan kedalam sasaran yang disebut Nawacita yang dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Revolusi Mental :**
   - Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan
   - Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan
   - Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa
   - Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi
   - Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya
   - Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa
   - Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik

2. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Kedaulatan Pangan**
   - Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru
   - Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa
   - Rehabilitasi jaringan irigasi untuk 3 juta ha lahan sawah
   - Pembangunan pasar
   - Penyediaan kapal pengangkut ternak
   - Pengendalian konversi lahan
   - Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar
   - 1.000 Desa Mandiri Benih
   - Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi
   - Bank Pertanian dan UMKM
   - Peningkatan kemampuan petani
   - Pengendalian impor pangan
   - Reforma agraria 9 juta ha
   - 1.000 Desa Pertanian Organik
   - Peningkatan produksi ikan dan garam

3. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Kemaritiman :**
   - Pemberian akses modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar
   - Pembangunan 100 sentra perikanan
   - Pembangunan 24 pelabuhan perikanan strategis
   - Pemberantasan *illegal, unregulated, unreported fishing*
   - Peningkatan produksi di kawasan *overfishing*
   - Keamanan laut, daerah perbatasan
   - Pengamanan SDA dan ZEE
   - Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 20 juta ha
   - Penambahan kawasan konservasi 700 ha
   - Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir
   - *Best aqua-culture practices* untuk komoditas unggulan
   - Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut
   - Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)
   - Pelabuhan dan armada perintis

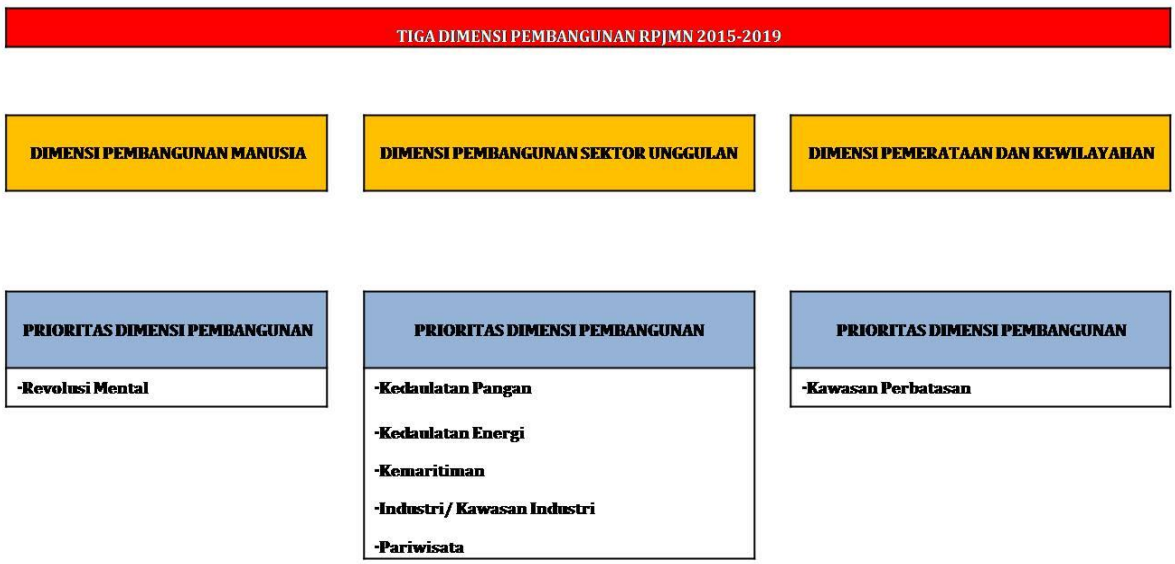
4. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Kedaulatan Energi**
   - Tata kelola industri Migas dan Energi
   - Percepatan pembangunan pembangkit listrik
   - Peningkatan penggunaan batu bara dan gas
   - Realokasi subsidi BBM ke biofuel
   - Peningkatan kapasitas tangki
   - Pembangunan energi baru dan terbarukan
   - Iklim investasi migas yang kondusif
   - Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas
   - Sistem fiskal yang fleksibel
   - Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua
   - Pengendalian impor minyak
   - Pembangunan kilang minyak

5. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Industri/Kawasan Industri**
   - Penyediaan lahan kawasan industri
   - Ketersediaan SDA
   - Konektivitas: Jalan, Pelabuhan Laut dan Bandara, dan Jaringan Komunikasi
   - Ketersediaan energi, air
   - Insentif fiskal dan non fiskal
   - Iklim investasi (PTSP)
   - Perda-perda bermasalah
   - Penyediaan tenaga kerja terampil
   - Sosialisasi mental kewirausahaan
   - *Science dan Techno Park*

6. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Pariwisata**
   - Akses transportasi
   - Akses informasi dan komunikasi
   - Pengembangan budaya lokal
   - Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata

- Kualitas SDM masyarakat lokal
- Ekonomi kreatif berbasis *eco-tourism*
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata
- Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
- Peningkatan jumlah investor nasional

7. **Sasaran Nawacita Prioritas Dimensi Pembangunan: Kawasan Perbatasan**
   - Penyiapan lahan dan kebijakan tata ruang
   - Penguatan infrastruktur diplomasi dan perundingan
   - Koordinasi dan peningkatan sarpras hankam batas darat dan batas laut
   - Peran serta dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk penegasan status warga negara
   - Penyusunan regulasi dan perdagangan lintas batas negara
   - Pengembangan Custom Imigration, Quarantine, Security (CIQS) terpadu
   - Memperkuat koordinasi kelembagaan BNPP
   - Penyedia pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan
   - Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk investasi, ekspor-impor
   - Percepatan penyediaan infrastruktur dasar



Gambar IV-4. Tiga Dimensi Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019

4.2.3. Isu Regional

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditandai oleh tantangan eksternal yang semakin menguat intensitasnya adalah terkait risiko kerentanan pemulihan ekonomi global, yang dapat lebih buruk dari perkiraan awal (*downside risk*). Kompleksitas krisis yang dihadapi Eropa dari jeratan utang, dapat cukup berpengaruh terhadap ekonomi global. Di sisi lain, kombinasi antara risiko pemburukan ekonomi global, tingkat suku bunga di negara maju yang sangat rendah, dan ekses likuiditas global berpotensi menggerakkan modal portofolio global dengan pola dua arah *(two-way capital flows)*. Ini merupakan sumber instabilitas yang akan menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas di negara *emergingmarket* dalam menjaga stabilitas makro dan sistem keuangannya. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Jawa Timur tercatat masih tumbuh stabil dan mengalami percepatan dibandingkan ekonomi kawasan Sumatera atau daerah lain di Jawa.

Grafik IV-1. Capaian Kinerja Ekonomi Jawa Timur

LPE

TAHUN	NASIONAL	JATIM
2012	6,03	6,64
2013	5,58	6,08
2014	5,02	5,86
2015	4,79	5,44

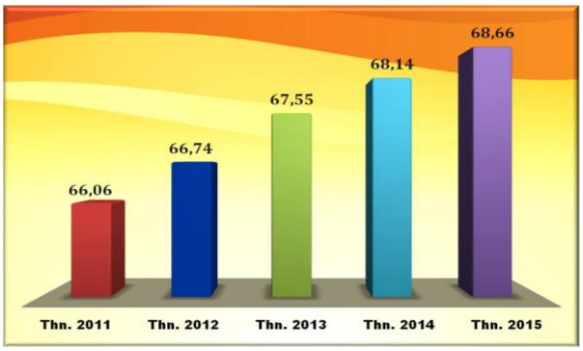
PDRB

TAHUN	NASIONAL (triliun)	JATIM (triliun)	SHARE (%)
2012	8.615,70	1.247,77	14,47
2013	9.524,74	1.382,43	14,51
2014	10.542,69	1.540,69	14,60
2015	11.540,80	1.689,88	14,64

TPT

TAHUN	NASIONAL (%)	JATIM (%)
2009	7,87	5,08
2010	7,14	4,25
2011	6,65	4,16
2012	6,14	4,09
2013	6,17	4,30
2014	5,94	4,19
2015	6,18	4,47

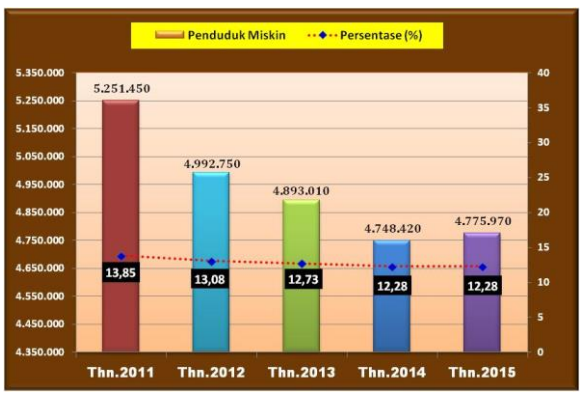
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



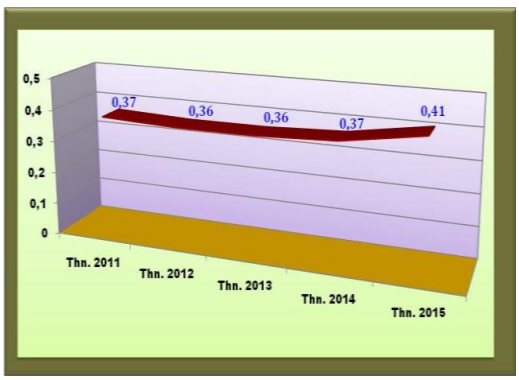
Indeks Pembanguanan Gender



Kemiskinan



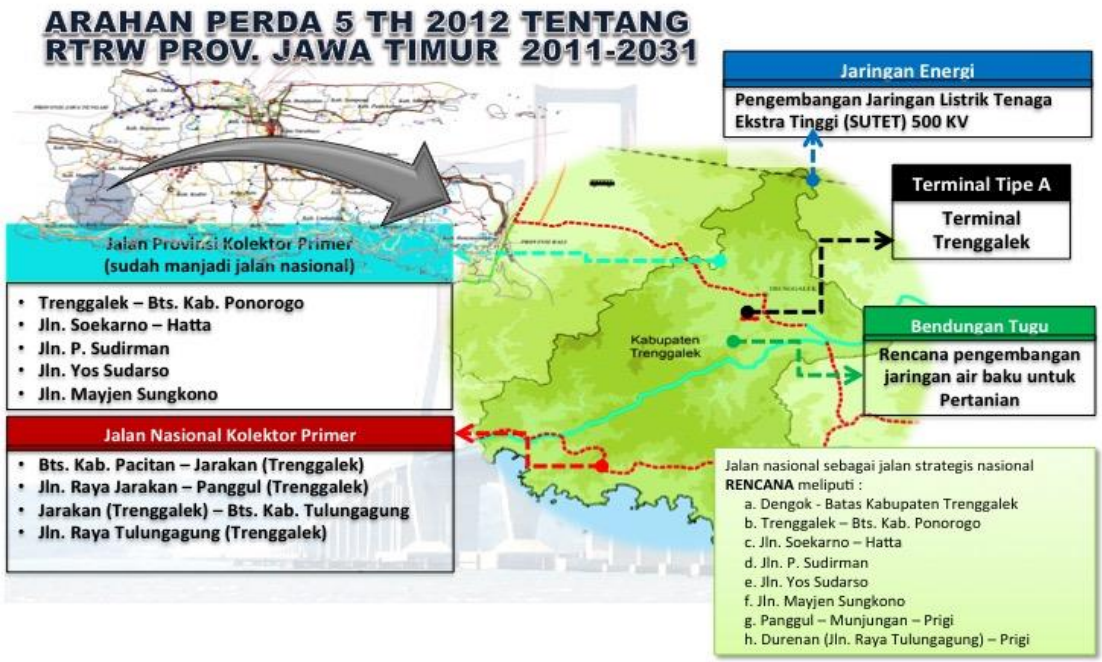
Indeks Gini



TINGKAT KETIMPANGAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH
	> 0.5	0.3 - 0.5	< 0,3

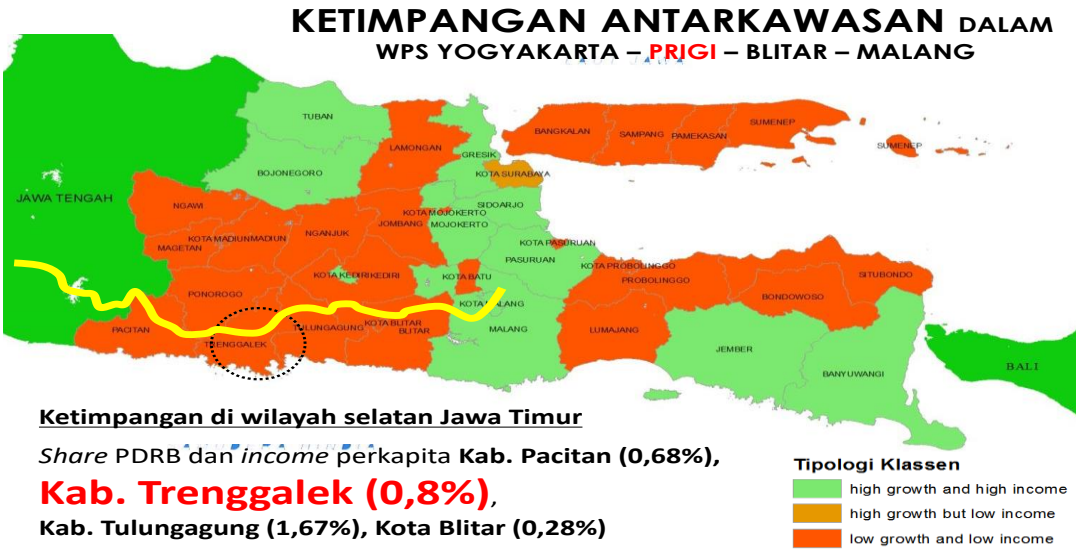
Sumber : Bappeda Provinsi Jatim
****) Angka Sangat Sementara*

Dalam pengembangan kawasan dan pembangunan Kabupaten Trenggalek juga harus memperhatikan isu-isu dan arahan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, sebagaimana ilustrasi pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar IV-5. Isu-Isu dan Arahan Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

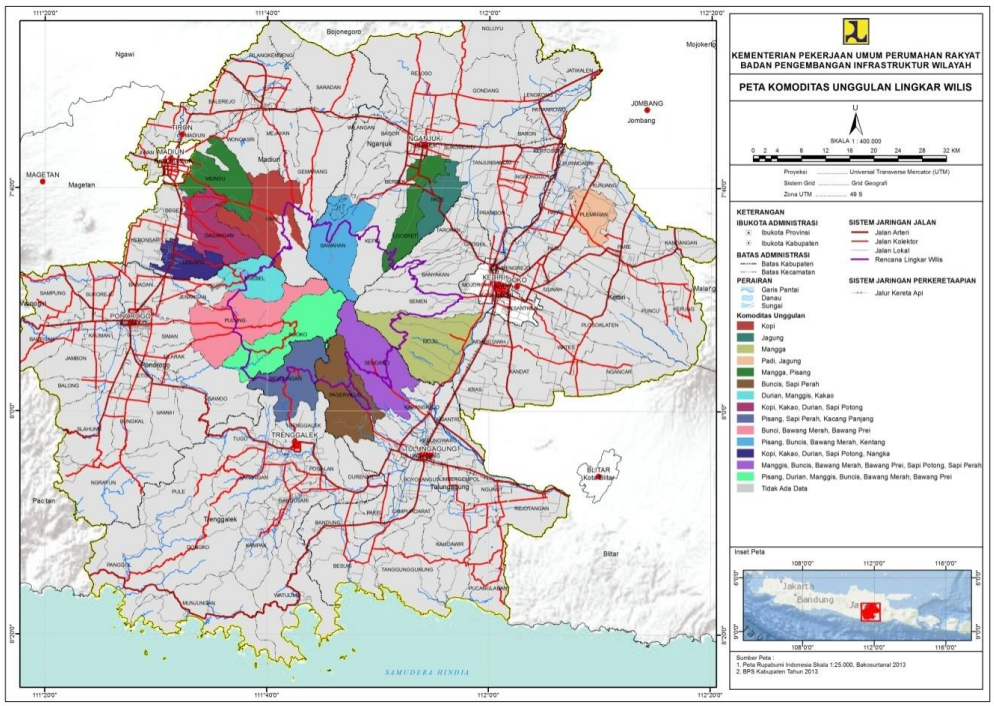
Isu regional lain yang terkait dengan pengembangan regional diantaranya adalah ditetapkannya Kawasan Prigi sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Koridor Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang.



Gambar IV-6. Ketimpangan Antarkawasan Dalam Pengembangan WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang

4.2.4. Isu Wilayah Perbatasan

Ada beberapa program lintas wilayah di Provinsi Jawa Timur, dimana Trenggalek merupakan bagian di dalamnya, diantaranya adalah Kawasan Selingkar Wilis yang dimanifestasikan dalam **TUNGGAL ROGO MANDIRI** (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi kerja sama pengelolaan potensi ekonomi dan wisata Gunung Wilis. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama di tahun 2014 yang bertujuan untuk menggali potensi ekonomi daerah masing-masing, sehingga bisa dikelola dengan optimal. Hasil dari pemetaan potensi daerah itulah yang selanjutnya dirangkum dalam rancangan pembangunan yang terkonsep di masing-masing daerah untuk membangun konektivitas di Kawasan Selingkar Wilis. Peta komoditas unggulan Kawasan Selingkar Wilis disajikan sebagaimana **Gambar** berikut.



Gambar IV-7. Peta Komoditas Unggulan Kawasan Selingkar Wilis

Kabupaten Trenggalek adalah bagian dari *Eks* Karesidenan Kediri (pusat wilayah pembangunan di Kota Kediri) dan kini secara pemerintahan merupakan bagian dari Koordinasi Bakorwil I Madiun (pusat wilayah koordinasi di Kota Madiun) sehingga pembangunan Kabupaten Trenggalek 5 (lima) tahun kedepan harus mempertimbangkan interkonektivitas dengan 2 (dua) pusat pertumbuhan tersebut. Selain itu ada forum koordinasi lain yang melibatkan Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki persamaan potensi, geografis dan budaya seperti Forum Kerjasama daerah perbatasan **GOLEK PAWON** (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Wonogiri) dan **Festival Kesenian Kawasan Selatan/FKKS** (Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan).

4.2.5. Isu Berdasarkan Kebijakan RPJPD, RTRW dan KLHS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012, penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari: sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan meliputi :

a. Pengembangan dan pemantapan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten. Kawasan Perkotaan Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.
b. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan. Kawasan perkotaan Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata, sedangkan Kawasan perkotaan Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri.
c. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak. Kawasan Perkotaan Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri. Kawasan perkotaan Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan serta perdagangan dan jasa skala lokal.

Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perdesaan dikembangkan melalui peningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Strategi pengelolaannya dengan mengintensifkan keterkaitan desa-kota melalui pengembangan **Kawasan Agropolitan**. Kegiatan pokok yang dilakukan untuk pengelolaan kawasan perdesaan melalui pemantapan dan pengembangan **Kawasan Agropolitan** dan **Minapolitan** yang strategis dan potensial serta pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pengelolaan kegiatan pertanian, kelautan, perikanan, agrobisnis, dan agroindustri. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan di beberapa desa di Kabupaten Trenggalek diantaranya :

1. Desa Masaran, Kecamatan Bendungan.
2. Desa Duren, Kecamatan Tugu.
3. Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan.
4. Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan.
5. Desa Ngrayun, Kecamatan Gandusari.
6. Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh.
7. Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule.
8. Desa Watuagung, Kecamatan Dongko.
9. Desa Ngulungwetan, Kecamatan Munjungan.

Untuk sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

a. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas transportasi darat dan laut. Jaringan transportasi darat dilakukan peningkatan peran dan fungsi jalan kabupaten, pengembangan jalan provinsi nasional, pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan (terminal).
b. Sistem jaringan energi, terdiri atas jaringan pipa minyak, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan tenaga listrik dan pengembangan energi alternatif.
c. Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas wilayah sungai (Daerah Aliran Sungai dan Waduk), sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku air bersih dan sistem pengendalian banjir.
d. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas pengembangan jaringan kabel telepon dan internet tersebar di seluruh kecamatan dan jaringan nir kabel melalui penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transciever Station* (BTS) Bersama di seluruh kecamatan.
e. Sistem jaringan prasarana lainnya, berupa sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi sistem jaringan persampahan, air minum, pengelolaan limbah, drainase dan jalur/ruang evakuasi bencana.

Sedangkan kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, memiliki prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu **Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Strategis Segitiga Emas Durenan, Serta Kawasan Strategis Bendungan Tugu**. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan lindung *karst*. Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan strategis sempadan JLS.

Tabel IV-4. Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek

No	Kawasan Strategis	Jenis	Keterangan
1.	Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Kerjasama Regional	– KAD Golekpawon Kerjasama pembangunan daerah di wilayah perbatasan Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Wonogiri – KAD Selingkar Wilis Kerjasama Pengembangan Wilayah di Selingkar Gunung Wilis oleh 6 Kabupaten meliputi Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponogoro, Madiun, Kediri dan Nganjuk
		Kawasan Pariwisata	– Membentuk *link* wisata nasional; – Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata, pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata – Obyek wisata alam berupa pantai, gua, pemandian, pegunungan serta Obyek wisata sejarah dan budaya.

No	Kawasan Strategis	Jenis	Keterangan
		Kawasan Segitiga Emas Durenan	Optimalisasi pemanfaatan lokasi strategis Kota Durenan yang berada di Tiga Kutub pertumbuhan yaitu ibukota Kabupaten Trenggalek, ibukota Kabupaten Tulungagung dan kawasan wisata Watulimo.
		Kawasan Bendungan Tugu	Penyediaan air irigasi, air baku, pengendalian banjir kali Keser, potensi perikanan dan pariwisata. Mengairi sawah penduduk seluas 4.203 Ha yang meliputi wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Gandusari serta Kecamatan Durenan.
		Kawasan Minapolitan	Pengembangan Perikanan Tangkap di Kecamatan Munjungan, Panggul, Watulimo Pengembangan Perikanan Budidaya di Kecamatan Bendungan/Kecamatan Lain
		Kawasan Agropolitan	Potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura. Pengembangan di desa2 Kecamatan Bendungan dan Watulimo
2.	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Hutan Lindung	Rencana luasan kawasan hutan lindung sebesar 17.620 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
		Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai	Sepanjang kiri-kanan sungai atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pada kawasan DAS, disyaratkan hulu sampai hilir minimal 30% harus dihijaukan.
		Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai	Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
		Kawasan Lindung Karst	Secara administrasi kawasan *karst* ini mencakup Gua Lowo di Kecamatan Watulimo dan Pelang.
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berbasis ekologis minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
3.	Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)	Pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul dapat memicu perkembangan kawasan terbangun di sekitarnya. Kawasan yang perlu mendapat perhatian adalah sepanjang sempadan jalan sebesar 20 meter.

Sumber : RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/provinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan. Indikasi waktu pelaksanaan RTRW terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi : Tahap I (tahun 2012-2017), Tahap II (tahun 2018-2022), Tahap III (tahun 2023-2027) dan Tahap IV (tahun 2028-2032).

Pengembangan perkotaan Trenggalek sebagai pusat Pemerintahan Daerah dan pusat pengembangan utama di Kabupaten Trenggalek, melalui;

a. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, dan kawasan industri;
b. Pengembangan agropolitan dan minapolitan serta pertanian tanaman pangan;
c. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
d. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional dan nasional;
e. Pembangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan;
f. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
a. Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
b. Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan SDM pada semua sector untuk menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Trenggalek

Identifikasi isu strategis merupakan bagian dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, ada 5 (lima) pilar pembangunan yang akan menjadi pendekatan dalam merumuskan isu-isu strategis di Kabupaten Trenggalek yaitu : 1) Pelayanan Dasar, 2) Infrastruktur, 3) Bina Ekonomi Rakyat, 4) Kesejahteraan Sosial dan 5) Tata Kelola Pemerintahan.

Pemenuhan pelayanan dasar akan dirumuskan berdasarkan kehandalan, kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna layanan serta kondisi pemenuhan standar. Kondisi infrastruktur akan dianalisis dan dievaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Bina Ekonomi Rakyat dirumuskan melalui upaya mendorong keunggulan ekonomi daerah serta pembinaan pelaku ekonomi rakyat. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial akan diarahkan untuk penyusunan isu-isu strategis yang terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan isu-isu strategis yang dilaksanakan dengan pendekatan pilar pembangunan tata kelola pemerintahan, dirumuskan melalui akuntabilitas dan pemantauan kinerja serta pengelolaan aparatur. **Gambar** dibawah ini menjelaskan pilar pembangunan daerah yang berkualitas.



Gambar IV-8. Pilar Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima;
3. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis/agroindustri;
4. Sinergitas pembangunan daerah dan penguatan pemerintahan desa;
5. Perluasan lapangan kerja serta peningkatan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
6. Percepatan pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan pembangunan karakter dan revolusi mental.

Isu-isu strategis di atas kemudian perlu di beri bobot dan nilai skala kondisi saat ini untuk menentukan prioritas perhatian terhadap isu.

Tabel IV-5. Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar (signifikan) terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional	40
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Merupakan isu yang kondisi permasalahannya dirasa mendesak	20
4	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	**100**

Tabel menunjukkan bahwa ada 4 pertimbangan dalam memprioritaskan perhatian terhadap isu-isu strategis dengan bobot masing-masing. Tabel berikutnya menunjukkan skor untuk penentuan prioritas perhatian.

Tabel IV-6. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total skor	Urutan Prioritas
		1	2	3	4		
1	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	5	6	7	6	580	3
2	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima	7	7	6	5	620	1
3	Revitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis/agroindustri	6	5	5	7	600	2
4	Sinergitas pembangunan daerah dan penguatan pemerintahan desa	3	4	2	3	290	5
5	Perluasan lapangan kerja serta peningkatan investasi daerah yang berwawasan lingkungan	4	3	1	4	330	4
6	Percepatan pengentasan kemiskinan	1	2	4	1	170	7
7	Peningkatan pembangunan karakter dan revolusi mental	2	1	3	2	210	6

Berdasarkan **Tabel** di atas dapat ditarik kesimpulan urutan prioritas perhatian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima;
2. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis/agroindustri;
3. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
4. Perluasan lapangan kerja serta peningkatan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
5. Sinergitas pembangunan daerah dan penguatan pemerintahan desa;
6. Peningkatan pembangunan karakter dan revolusi mental; dan
7. Percepatan pengentasan kemiskinan.

1. **Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima;**

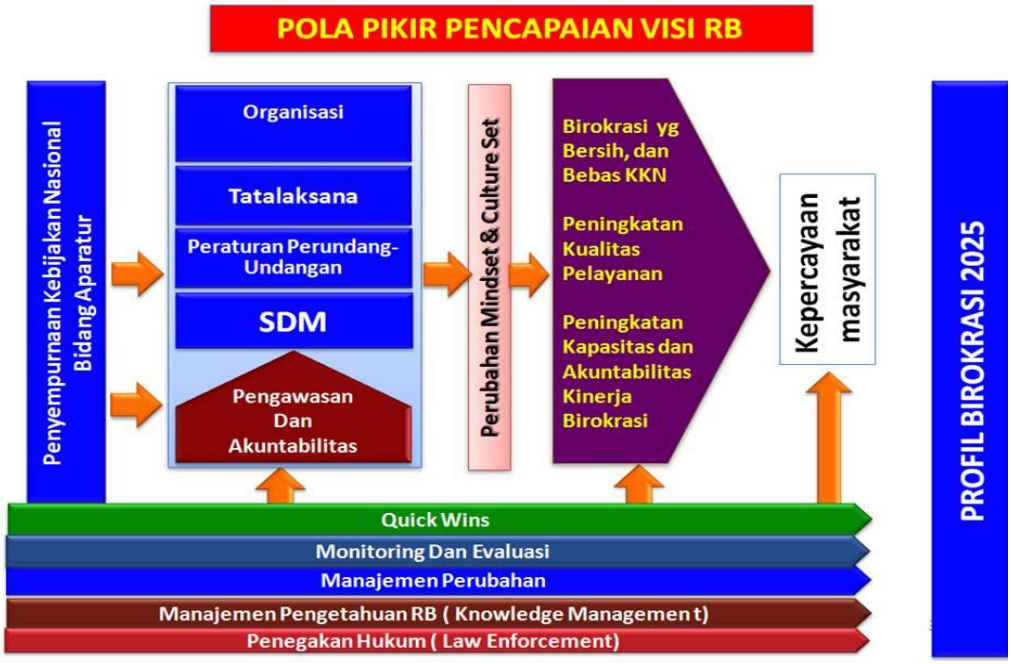
Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kabupaten Trenggalek memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan yang berkualitas. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah, pada umumnya diakibatkan struktur organisasi pemerintah daerah yang masih besar dan dalam pelaksanaan tupoksi masih saling tumpang tindih sehingga menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim serta pelaksanaan standar pelayanan minimal belum maksimal. Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antar pemerintah di level pemerintahan daerah, kecamatan dan desa juga masih belum optimal. Keterbatasan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, ditunjukkan dengan masih terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai proses modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan SDM di sektor pemerintahan. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkit potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi harus terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi, netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas ASN.

Hal yang perlu dilakukan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diawali melalui rekruitmen pejabat struktural berdasarkan kapasitas, kompetensi dan prestasi kerja, lalu menetapkan grand desain reformasi birokrasi, penerapan standar operasional Perangkat Daerah, serta optimalisasi penerapan pelayanan terpadu di kecamatan.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan pencapaian Visi Reformasi Birokrasi sebagaimana ilustrasi pada **Gambar** berikut, kebijakan dalam RPJMD harus selaras dengan konsep **Grand Desain Reformasi Birokrasi** yang akan diimplementasikan.



Gambar IV-9. Pola Pikir Pencapaian Reformasi Birokrasi

Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar diatas, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Kementerian. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mengubah mind set dan cultural set birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke- 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yaitu : 1) Reformasi Birokrasi Yang Bersih dan Bebas KKN, 2) Peningkatan Pelayanan dan 3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Ketiga sasaran tersebut berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dan akhir pencapaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025. Beberapa indikator kinerja yang terkait isu reformasi birokrasi masih belum seperti yang diharapkan, diantaranya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang masih mendapatkan predikat nilai C serta Oprini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih mendapatkan predikat/opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi dalam usaha peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan diantaranya adalah : 1) terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, 2) terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (*internal*) maupun sumber dana dari luar daerah (*eksternal*); 3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; 4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, serta kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional; serta 5) belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah.

Reformasi birokrasi diterapkan agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional, serta mengefektifkan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memperbaiki kualitas dan etos kerja pegawai melelui perbaikan sistem rekruitmen, sistem promosi, sistem mutasi, dan sistem penonaktifan dan pemberhentian pegawai, melakukan pengangkatan pejabat eselon II (pejabat pimpinan tinggi) melalui proses uji kepatutan dan kelayakan atau **lelang jabatan**. Upaya reformasi birokrasi ini akan berjalan seiring dengan upaya mendorong efisiensi dalam belanja rutin birokrasi dan optimalisasi penganggaran pembangunan.

Dalam mewujudkan Trenggalek sebagai "**Smart Regency**", tentunya pemenuhan akses dalam bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan harus menerapkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi. *Smart Regency*, diarahkan untuk mencapai komunitas dan masyarakat yang lebih aman, sehat, mudah dan sejahtera dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan inovasi-inovasi terkait peningkatan kinerja, efisiensi, dan kedekatan dengan warga.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik serta harus segera diselesaikan adalah masih banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan atau ketidaknyamanan dalam hal mengurus KTP, KK, maupun Akta Kelahiran. Gedung pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kependudukan masih butuh terus dibenahi untuk perbaikan pelayanan. Selain itu masyarakat yang hendak mengurus perijinan untuk bisnis juga merasakan kerumitan dalam urusan tersebut. Seperti dalam hal untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), masyarakat harus melengkapi perijinan yang lain seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin HO dan sebagainya. Sebagai pemilik modal, para investor menuntut kemudahan dan kelancaran dalam pengurusan perijinan agar ada jaminan berinvestasi.

Camat sebagai pimpinan wilayah di Kecamatan, memiliki peran strategis dalam pelayanan publik terdepan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan wilayah, perencanaan pembangunan kecamatan serta penyelesaian konflik-konflik sosial masyarakat, dan diharapkan peran ini akan terus bertambah seiring dengan penambahan pendelegasian wewenang untuk mewujudkan **Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN)**.

Terkait sektor kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya, dibutuhkan peningkatan SDM birokrasi dengan penguatan sistem kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas serta kualitas layanan demi terwujudnya pelayanan yang handal dan menjangkau seluruh masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, serta Gizi Buruk, dan beberapa masalah terhadap peningkatan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) ditunjang karena belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang layak, terutama bagi masyarakat keluarga miskin, serta kurangnya tenaga medis dan paramedis, juga sarana prasarana kesehatan. Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil paling besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati, sehingga program promosi kesehatan akan menjadi prioritas di sektor kesehatan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas perlu diimbangi dengan **peningkatan manajemen layanan sesuai standar** (**akreditasi**). Beberapa puskesmas dapat ditingkatkan kualitas pelayanan sebagai **Puskesmas Plus sebagai rintisan RSUD** seperti Puskesmas Panggul dan Baruharjo, sedangkan Puskesmas Watulimo akan dikembangkan menjadi **Puskesmas Wisata** karena berada di lokasi pariwisata. Puskesmas-puskesmas lainnya juga dapat dikembangkan menjadi puskesmas ramah anak atau dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal wilayah. RSUD dr. Soedomo yang menjadi satu satunya Rumah Sakit milik pemerintah daerah, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya serta perbaikan manajemen layanan sesuai standar, serta pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan dokter umum.

Untuk peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan dapat dilaksanakan dengan optimalisasi sinergi dengan program pemerintah pusat dan proporsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan baik secara langsung melalui institusi pendidikan swasta termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Dibutuhkan suatu kebijakan dan program yang mendukung terjaminnya pemenuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek, diantaranya peningkatan aksesibilitas dengan penyediaan moda transportasi untuk siswa sekolah yang ramah anak serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu hingga ke Perguruan Tinggi.

Urusan Pendidikan hingga saat ini masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dalam hal kualitas pendidikan yang diarahkan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, kelengkapan sarana prasarana pendidikan dan penyempurnaan kurikulum. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tenaga pendidik (guru) belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, karena masih terkosentrasi di wilayah padat penduduk, sedangkan di daerah yang jauh dari pusat kota seperti di Kecamatan Panggul, Munjungan dan Bendungan masih kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima siswa di sekolah di wilayah datar dan wilayah pegunungan, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah daerah untuk mendistribusikan tenaga pendidik yang lebih merata di seluruh wilayah Trenggalek khususnya di daerah “atas” atau pegunungan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu strategis pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai landasan **pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*)**.

2. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis/agroindustri

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) *2015* diharapkan dapat mendorong negara-negara di kawasan ini meningkatkan daya saing mereka. Bagi Kabupaten Trenggalek, MEA dapat menjadi peluang dan tantangan. Implikasi dari MEA adalah pasar yang terbuka luas untuk arus barang dan jasa serta investasi antar negara ASEAN di mana hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, MEA 2015 memberikan konsekuensi terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka. Karena itu, peningkatan daya saing merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Trenggalek (31,36 %), dimana lebih dari 50% penduduk bergerak di sektor ini. Kultur masyarakat Kabupaten Trenggalek juga masih dominan dipengaruhi sektor pertanian dalam arti luas. Keterbatasan lahan produktif di Kabupaten Trenggalek menciptakan kebutuhan yang mendasar untuk diterapkannya upaya peningkatan produktifitas sektor pertanian serta nilai tambah produk pertanian. Selain dari itu, masih rentannya petani sebagai pelaku ekonomi sekala kecil, dari mata rantai tata niaga yang merugikan, serta tantangan berat dalam menanggung resiko usaha yang seringkali berkaitan dengan faktor eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mewujudkan pemberdayaan kepada para petani secara menyeluruh, dari mulai masukan, proses hingga keluaran sektor pertanian. Pendekatan pemberdayaan petani secara menyeluruh akan ditempuh dengan pendekatan fisik dan non fisik. **Pengembangan agropolitan** yang selama ini menggunakan pendekatan fisik semata kurang memperhatikan aspek sistem keruangan atau pengembangan wilayah, menyebabkan kurang efektifnya dampak atas pembangunan sarana dan prasarana fisik. Untuk itu, Agropolitan perlu dikembangkan dengan memperhatikan kaidah sistem keruangan berbasis pusat pertumbuhan kawasan pedesaan, dan memadukan aspek fisik dan non fisik sehingga pendekatan proyek dalam mencapai keluaran fisik berubah menjadi pendekatan program dalam mencapai manfaat menyeluruh.

Secara keseluruhan, maka program-program harus dititik beratkan secara garis besar kepada hal-hal berikut :

a) Peningkatan produktifitas dan daya saing sektor prtanian baik kegiatan primer maupun turunan atau hilir yang bernilai tambah (agroindustri) untuk mewujudkan tatanan agribisnis yang berbasis komoditas unggulan dengan memberdayakan perekonomian rakyat;
b) Khususnya terkait agribisnis dan agro industri, tiga aspek penguatan akan didorong, yaitu : 1). Penerapan teknologi produksi maupun pengolahan yang tepat guna dan berdaya saing baik dari segi kualitas maupun keekonomian; 2). Pemantapan jejaring pemasaran; dan 3). Peningkatan kases terhadap permodalan;
c) Pengembangan **kawasan agropolitan/minapolitan/agrominapolitan** sesuai dengan kaidah penataan ruang dan pengembangan wilayah, sebagai pusat pertumbuhan kecamatan serta embrio kota kecamatan. Hal ini terkait dengan prinsip penyediaan sarana-prasarana (infrastruktur) sektor pertanian yang handal dan terintegrasi dengan strategi pengembangan permukiman perdesaan; dan
d) Meningkatkan sumber daya manusia sektor pertanian dengan memantabkan kapasitas dan fungsi kelembagaan dan penyuluh pertanian.

Pembangunan dan pengembangan pertanian di Kab. Trenggalek agak sulit jika hanya mengutamakan tanaman pangan, karena luas sawah di Kabupaten Trenggalek sulit untuk dikembangkan. Justru pertanian yang harus dikembangkan adalah tanaman perkebunan, karena sebagian besar wilayah Kab. Trenggalek merupakan daerah pegunungan. Tanaman perkebunan yang dibudidayakan seharusnya tanaman yang berorientasi pasar agrobisnis (*on farm* dan *off farm*), seperti kakao, buah-buahan, kayu sengon, kopi dan sebagainya. Kegiatan pascapanen merupakan bagian integral dari pengembangan agribisnis, yang dimulai dari aspek produksi bahan mentah sampai pemasaran produk akhir. Peran kegiatan pascapanen menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu sub-sistem agribisnis yang mempunyai peluang besar dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk agribisnis. Dibanding dengan produk segar, produk olahan mampu memberikan nilai tambah yang sangat besar. Daya saing komoditas di Trenggalek masih lemah, karena selama ini hanya mengandalkan keunggulan komparatif dengan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (*factor–driven*), sehingga produk yang dihasilkan didominasi oleh produk primer atau bersifat natural *recources-based* dan *unskilled-labor intensive*.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan beberapa komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian lima tahun mendatang (2016 – 2021) yaitu: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kopi, kakao, cengkeh, kelapa, durian, manggis, salak, pisang, biofarmaka (jahe, temulawak dan jahe), janggelan dan nilam, sapi perah, sapi potong, kambing PE. Dari komoditas-komoditas tersebut, teridentifikasi 8 komoditas yang memiliki prospek untuk dikembangkan agroindustrinya yaitu: 1) Ubi kayu, 2) Kopi, 3) Kakao, 4) Cengkeh, 5) Kelapa, 6) Durian, 7) Janggelan, dan 8) Nilam.

Ubi Kayu : Ubi Kayu/Singkong (*Cassava*) adalah tanaman yang sangat serbaguna. Ubi Kayu merupakan salah satu tanaman, yang tidak menghasilkan limbah saat diproses, karena semuanya, daun, batang dan umbinya, dapat dimanfaatkan. Beberapa produk turunan dari singkong (beberapa sudah disebutkan di atas) meliputi: 1) Gari, 2) Tepung Tapioka untuk roti, mie, dan produk kecantikan, 3) Cassava Chips (keripik singkong), 4) Etanol, 5) Adhesive Gusi, 6) Pakan Ternak, 7) Pemanis (gula), 8) MSG, 9) Lem dll. Daerah pengembangan : 14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek

Kopi : Dari sekian banyak jenis biji kopi yang dijual di pasaran, hanya terdapat 2 jenis varietas utama, yaitu kopi arabika (*Coffea arabica*) dan robusta (*Coffea robusta*). Tiap jenis kopi ini memiliki keunikannya masing-masing dan pasarnya sendiri. Selain dapat dimanfaatkan untuk berbagai variasi minuman, ampas kopi dapat digunakan untuk pupuk kompos. Daerah penghasil dan pengembangan Dilem Wilis Kecamatan Bendungan.

Kakao : Biji cokelat (atau biji kakao, juga sering disebut "*cocoa"* dan "kakao") merupakan biji *Theobroma cacao* berlemak yang telah dikeringkan dan difermentasi, yang diekstrak untuk menghasilkan cokelat padat (*cocoa solids*) dan lemak kakao (*cocoa butter*). Kedua hasil ekstrak tersebut merupakan bahan-bahan dasar pembuatan cokelat, serta sejumlah produk makanan lainnya. Pengolahan hasil kakao memiliki prospek serta nilai jual yang tinggi, dengan memanfaatkan produk alternatif yang mampu mengantisipasi aspek akan kehilangan/penurunan hasil produksi biji kakao. Secara skematis tahap diversifikasi produk olahan biji kakao menjadi produk, terbagi menjadi 4 bentuk : 1) Pulpa (Es Juice, *Nata de cocoa*), 2) Pasta, dan Lemak, 3) Bubuk coklat, dan 4) Lemak. Daerah sentra pengembangan di Kecamatan Karangan.

Cengkeh : Cengkeh merupakan salah satu komoditas sub-sektor perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Hasil utama tanaman cengkeh adalah bunganya yang dipanen pada saat kelopak bunga belum mekar. Bunga cengkeh kering merupakan salah satu bahan baku utama untuk rokok kretek. Potensi tanaman cengkeh yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah daun cengkeh (daun gugur) dan tangkai bunga. Produk olahan yang dapat dihasilkan dari bunga, daun dan tangkai bunga (gagang) adalah (1) minyak cengkeh, (2) eugenol dari minyak cengkeh dan (3) senyawa turunan dari eugenol. Daerah penghasil di Kecamatan Watulimo, Munjungan, Dongko dan Panggul.

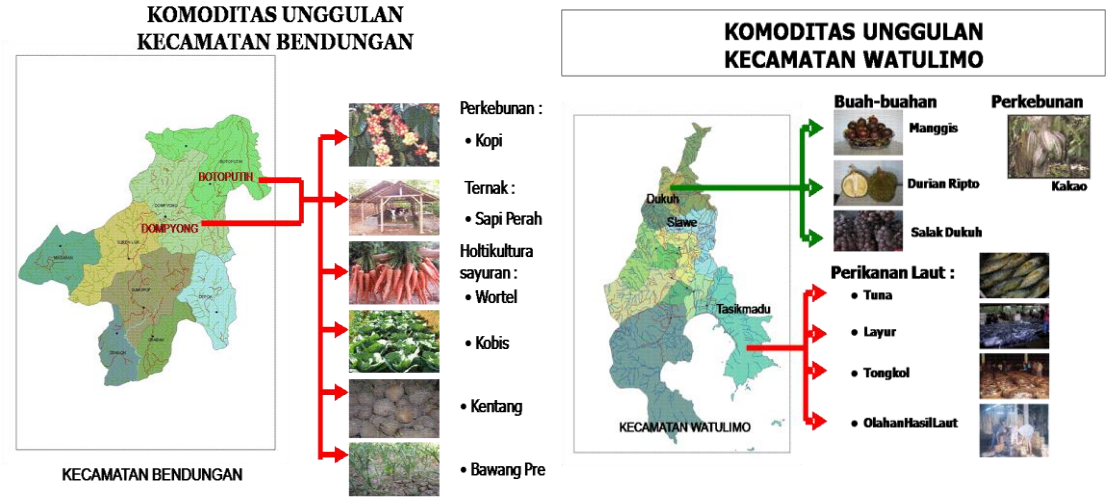
Kelapa : komoditas kelapa memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non-pangan. Pengembangan produk utama, produk turunan, dan produk samping dari kelapa ditujukan untuk mengejar perolehan nilai tambah domestik (*retained domestic value added*) secara maksimal. Dari pohon industri kelapa yang mempunyai prospek pasar meliputi *nata de coco*, minuman isotonik air kelapa, *desiccated coconut*, santan kelapa, *virgin coconut oil*, pakan ternak, arang tempurung, arang aktif, tepung tempurung kelapa, serat sabut kelapa, dan produk turunan (oleokimia) dari *virgin coconut oil* (minyak kelapa murni). Air kelapa merupakan cairan yang mempunyai kandungan gizi, terutama mineral, yang sangat baik untuk tubuh manusia, sehingga air kelapa berpotensi dijadikan minuman *isotonic drink*. Daerah penghasil di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul.

Durian : Durian (*Durio Zibethinus*) merupakan salah satu tanaman tropis yang menghasilkan buah yang lezat sehingga banyak digemari. Pada saat musim berbuah durian banyak dipasarkan dalam keadaan segar dengan tingkat harga yang bervariasi. Pada umumya buah durian dikonsumsi dalam keadaan segar dan hanya sedikit yang diolah jadi produk olahan. Salah satu usaha yang perlu dilakukan petani adalah menguasai beberapa teknologi pengolahan buah durian sehinga tercipta beberapa alternatif penjualan, selain itu juga harus dikuasai beberapa teknologi pengawetan buah durian sehinga buah durian dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Produk turunan durian : Buah Durian (dodol, selai, wajik dll), Biji Durian (tepung, kerupuk, jenang/dodol), Kulit Durian (Kertas dan Briket). Daerah penghasil Kampak dan Watulimo.

Janggelan : Cincau hitam (*Mesona palustris BL*) atau janggelan merupakan bahan pangan tradisional yang dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Penelitian dan pengujian khasiat ekstrak cincau hitam juga membuktikan bahwa ekstrak cincau hitam bersifat antioksidan, imunomodulator, hepatoprotektor, antikanker, antihipertensi dan antidiare. Daerah penghasil di Kecamatan Pule.

Nilam : Nilam merupakan salah satu komoditi ekspor yang dimiliki Indonesia yang cukup tinggi nilainya, Minyak nilam merupakan salah satu dari beberapa jenis yang termasuk ke dalam kelompok minyak atsiri atau essential oils yang merupakan komoditi ekspor Indonesia. Minyak nilam hingga saat ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis-jenis minyak atsiri lainnya. Hal ini dikarenakan tanaman nilam dapat tumbuh baik pada berbagai kondisi lahan yang terdapat di Indonesia termasuk di Trenggalek. Daerah penghasil dan pengembangan produksi nilam di Kecamatan Pule, Kampak dan Watulimo.

Agropolitan/Minapolitan/Agrominapolitan merupakan kota pertanian/perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya Sistem dan Usaha Agribisnis/Minabisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, kegiatan Pembangunan Pertanian/ Perikanan di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Trenggalek ditetapkan di Kecamatan Bendungan dan Watulimo dimana produk-produk yang dihasilkan disajikan sebgaimana **Gambar** berikut :



Gambar IV-10. Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan

Sebagai bagian pengembangan kawasan bagian barat (Tugu-Karangan-Pule), perlu dikembangkan kawasan agrominapolitan baru sebagai program peningkatan perekonomian dan industri pertanian pasca dibangunnya Bendungan Tugu di kawasan Nglinggis. Kawasan ini akan menjadi embrio pusat pertanian dan sebagai pintu masuk dan keluar produk hasil pertanian dan perikanan khususnya ke daerah Madiun-Solo-Jogjakarta.

Sumberdaya kelautan dan perikanan ternyata juga belum secara maksimal dimanfaatkan, karena keterbatasan para nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan maupun pengolahan ikan hasil tangkapan. Untuk itu, penguasaan nelayan/pembudidaya/pengolah ikan terhadap teknologi penangkapan ikan, pembudidayaan dan pengolahan ikan hasil tangkapan perlu dilakukan terus menerus. Dalam konteks budidaya perikanan berkelanjutan (*eco-aquaculture*), penerapan CBIB (cara budidaya ikan yang baik) harus sudah menjadi keniscayaan bahkan mestinya kedepan masyarakat sudah mulai sadar bahwa CBIB merupakan suatu kebutuhan. Implementasi Sistem Jaminan Mutu harus secara konsisten diterapkan terhadap semua unit usaha akuakultur. Pemerintah daerah sebagai regulator, sudah seharusnya memberikan acuan bagi pengelolaan budidaya yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan, dengan membuat sebuah regulasi yang efektif.

Berdasarkan tempat budidaya yang dilakukan, perikanan budidaya laut dapat digolongkan menjadi budidaya perikanan di laut dan budidaya perikanan laut yang dilakukan di darat (pesisir). Budidaya perikanan di laut contohnya budidaya karamba jaring apung sedangkan budidaya yang dilakukan di darat adalah budidaya kolam beton dan tambak.

Usaha tambak merupakan bentuk yang paling dikenal, karena telah dilakukan dan dikembangkan sejak lama, baik secara tradisional maupun dengan cara-cara modern. Demikian pula usaha budidaya dalam kolam-kolam beton terutama untuk kepentingan pembenihan (*hatchery*). Model-model tersebut terus berkembang, dan kini muncul pula konsep *sea farming*, budidaya laut terpadu yang menggabungkan beberapa sistem budidaya di atas, di antaranya meliputi: (a) pembenihan (*hatchery*), (b) tambak laut (*enclosure*), (c) *pen culture*, (d) tambang apung (l*ongline*), (e) jaring-karamba laut (*cage culture*), dan (f) *sea ranching* di paparan terumbu. Konsep sea farming didasarkan atas gagasan bahwa pemanenan ikan (dan biota laut lainnya) hanya dapat lestari apabila diimbangi dengan upaya restocking, yakni penyediaan dan pelepasan benih ke lokasi *sea ranching*. Beberapa contoh komoditas yang menjadi unggulan dalam budidaya laut terpadu adalah sebagai berikut:

1) Ikan-ikan karang, seperti berbagai jenis kerapu (kerapu macan, kerapu lumpur dll), beronang, kakap putih kakap merah dan bandeng;
2) Krustasea, seperti udang windu, udang vannamei, lobster, rajungan dan kepiting bakau;
3) Moluska, seperti tiram mutiara, kerang abalon, dan kerang hijau; dan
4) Rumput laut.

Dalam rangka pengolahan dan pemasaran produk perikanan, dibutuhkan suatu sentra pengolahan perikanan terpadu yang higienis dan dapat dijadikan sebagai rujukan destinasi wisata. Sentra pemindangan Ikan di bengkorok, pabrik Es dan pabrik tepung ikan dapat menjadi etalase awal dalam rangka mewujudkan kawasan sentra pengolahan perikanan terpadu.

Dalam konservasi sumberdaya pesisir, konservasi Ekosistem Hutan Mangrove di Cengkrong-Watulimo dan konservasi Penyu Hijau di Taman Kili-Kili-Panggul perlu terus dikembangkan sebagai kawasan wisata edukatif. Sebagai bagian dalam pengembangan Prigi sebagai Kota Maritim Baru (**Gambar**), pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dan rencana pembangunan Pelabuhan Niaga bisa menjadi pemicu berkembangnya sektor industri kelautan dan perikanan.



Gambar IV-11. Konsep Pengembangan Prigi menjadi Kota Maritim Baru

Ancaman krisis pangan di Kabupaten Trenggalek cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal ini berarti krisis pangan di Kabupaten Trenggalek akan benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan.

Perkembangan bisnis yang terkonsentrasi di wilayah urban (perkotaan) dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Pada sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah. Hal ini antara lain yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

Secara garis besar, beberapa kelemahan sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek, antara lain karena:

1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bisnis, permukiman dan pusat perkantoran;
2) rendahnya nilai tukar produk pertanian dan kesenjangan antara sektor pertanian dengan industri yang cenderung bersifat asimetris;
3) lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi tidak efisien dan merugikan petani;
4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian;
5) mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak bersahabat dengan pasar;
6) kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas;
7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis; dan
8) pemakaian pupuk organik masih rendah dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan tanpa didukung ketersediaan pupuk anorganik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan upaya yang bersifat preventif dan berkesinambungan. Kegiatan yang ada diupayakan untuk mewaspadai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan mutu pangan, serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangannya.

Beberapa langkah strategis yang dapat

- Swasembada Pajale melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian (didukung dengan pembangunan Bendungan Tugu);
- Revitalisasi Perkebunan Kopi di Dilem Wilis;
- Tindak lanjut Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pemetaan Koordinat LP2B (12.785 ha);
- Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian (Agropolitan, Minapolitan dan Agrominapolitan);
- Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Pertanian dan Alsintan;
- Penguatan Kelembagaan dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani;
- Mewujudkan Rumah Coklat di UPH Kakao Karangan; dan
- Hutan Kota sebagai ikon baru Trenggalek.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Trenggalek tentunya harus segera beradaptasi untuk mempersiapkan diri menyongsong MEA 2015. Masalah Pembangunan Infrastruktur tetap menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Belum meratanya dukungan infrastruktur yang meliputi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, serta penyehatan lingkungan. Penyediaan infrastruktur akan didasari pemantapan aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilapangan. Perencanaan teknis dan kedisiplinan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pendekatan proaktif dalam merwat serta menanggulangi infrastrukur. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran, maka perlu ada upaya optimalisasi dalam memastikan potensi ekonomi strategis Trenggalek dapat terjaga dengan tersedianya aksesibilitas yang memadai. Terkait aksesibilitas dari segi jaringan regional, akan diperkuat integrasi aspek makro melalui infrastruktur lintas Kabupaten.

Salah satu isu strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah Pengembangan Prigi sebagai pelabuhan antarpulau di pesisir selatan dengan potensi dermaga mampu disandari kapal berbobot 50.000 *Dead Weight Tonnage* (DWT). Pelabuhan Prigi merupakan bagian dari pengembangan koridor Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, salah satu dari 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan mengadopsi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang terdapat kawasan pengembangan industri, kawasan strategis pariwisata, pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan serta keterpaduan terhadap kota-kota di kawasan pesisir selatan.



Gambar IV-12. WPS Pusat Pertumbuhan Yogyakarta-Prigi-Blitar- Malang

Penyediaan infrastruktur akan didasari pemantapan aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilapangan. Perencanaan teknis dan kedisiplinan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pendekatan proaktif dalam merwat serta menanggulangi infrastrukur. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran, maka perlu ada upaya optimalisasi dalam memastikan potensi ekonomi strategis Trenggalek dapat terjaga dengan tersedianya aksesibilitas yang memadai. Terkait aksesibilitas dari segi jaringan regional, akan diperkuat integrasi aspek makro melalui infrastruktur lintas Kabupaten.

Berdasarkan data Dinas PU Bina Marga dan Pengairan tahun 2015, dari total panjang jalan kabupaten seluruhnya 931,23 km, dalam kondisi baik 66,27%, sedang 18,14%, rusak ringan 10,01 %, dan rusak berat 5,58%. Sementara itu, banyak bangunan air yang rusak sehingga mengganggu kebutuhan masyarakat akan air baik untuk air minum maupun untuk pertanian. Mengingat bentangan pantai di Kabupaten Trenggalek yang panjang, maka permasalahan yang berkenaan aspek kewilayahan perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama terkait dengan pengembangan **Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS**).

Sebagai sinergi dengan pengembangan infrastruktur jalan pantai selatan, akan dilakukan penataan kota kecamatan di pesisir selatan Trenggalek (Panggul, Munjungan, dan Watulimo), untuk mewujudkan kota pantai yang berdaya saing dalam mendorong reorientasi ekonomi Trenggalek ke pesisir selatan sejalan dengan upaya pengembangan daya saing indonesia sebagai poros maritim dunia, serta terwujudnya destinasi pariwisata yang menarik. Khusus Kecamatan Watulimo, akan dikembangkan **Kota Maritim Baru Prigi** yang akan didukung dengan realisasi pembangunan **Pelabuhan Niaga** di Prigi dimana hingga akhir tahun 2015 telah disusun dokumen *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engeneering Design* (DED) nya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Proyek **Bendungan Tugu** yang telah diawali pelaksanaan *ground breaking* Bendungan Tugu pada Tahun 2013 dan diperkirakan akan selesai pada Tahun 2018 harus didukung dengan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, perbaikan aksesibilitas jalan dan jembatan dari dan menuju lokasi proyek. Terkait program pertanian maka harus dipastikan ketersediaan infarstruktur pengairan, terutama dalam bersinergi kedepannya dengan rencana pembangunan bendungan, serta perhatian khusus pada daerah yang rentan kekeringan, dengan pengembangan embung-embung secara lebih disiplin perencanaan teknis. Pengembangan wilayah disekitar Bendungan sebagai salah satu proyek strategis nasional dibutuhkan untuk membuka akses dengan wilayah sekitarnya adalah pembangunan jalan-jalan baru salah satunya yaitu pembangunan/pengembangan jalan tembus Kayen-Ngepeh yang menghubungkan Kecamatan Tugu dengan Kecamatan Karangan.

Dalam mendukung program strategis nasional yang dapat memberikan dampak besar bagi perumbuhan ekonomi masyarakat Trenggalek, seperti fasilitasi percepatan realisasi pembangunan bendungan Tugu; percepatan persiapan pembangunan **Bendungan Bagong** dan **Bendungan Kampak** yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan Pantai Selatan (Pansela) Trenggalek (Watulimo-Munjungan-Panggul), percepatan pembangunan Jalan Nasional/JLS-Durenan-Pogalan-Karangan-Suruh-Panggul, percepatan pembangunan Jalan Nasional Trenggalek–Ponorogo. Sedangkan dalam kerjasama wilayah tentunya pemerintah harus bekerja pro-aktif agar pengembangan Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis **TUNGGALROGO MANDIRI** (Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo- Madiun-Nganjuk- Kediri) dan Kawasan **GOLEK PAWON** (Ponorogo-Trenggalek-Pacitan-Wonogiri) segera terealisasi.

Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya sehingga degradasi lingkungan banyak terjadi. Selain itu sistem pengelolaan pertanahan yang ada juga kurang optimal, padahal pengelolaan pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan tata ruang sebagai acuan koordinasi, keberlanjutan kelestarian alam serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Peningkatan fungsi dan ketersediaan **Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan** juga akan menjadi prioritas sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Hijau. Luas RTH Publik Perkotaan di kabupaten Trenggalek baru mencapai 8,20% masih jauh dari ketentuan yang minimal 20% RTH Publik. **Gambar** dibawah ini mendeskripsikan keterkaitan perencanaan tata ruang dan upaya percepatan realisasi SPM bidang penataan ruang.



Gambar IV-13. Keterkaitan Perencanaan Tata Ruang dan Pemenuhan Ruang Terbuka Hjau (RTH)

Untuk pemenuhan infrastruktur dasar, perlu alokasi anggaran yang cukup dalam rangka meningkatkan sanitasi permukiman, drainase, air bersih, MCK dan persampahan agar tercipta lingkungan yang sehat bagi masyarakat Trenggalek hingga ke pelosok. Setiap daerah juga harus mewujudkan target nasional terkait dengan pelayanan pemenuhan infrastruktur, diantaranya pemenuhan ***Universal Acces (100-0-100)*** yaitu target 100 persen pemenuhan akses sanitasi, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen layanan air bersih (**Gambar**). Khusus pemenuhan akses sanitasi persampahan, dibutuhkan tempat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah batu untuk melayani seluruh penduduk Trenggalek. Kondisi eksisting, Trenggalek baru memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Srabah di Kecamatan Bendungan, sehingga direncanakan pembangunan 2 (dua) TPA baru, yaitu di Kecamatan Watulimo dan Panggul. Pengelolaan sampah juga dapat diterapkan melalui **Bank Sampah** dan pendekatan ***Bio-engineering***.



Gambar IV-14. *Universal Acces (100-0-100)*

Untuk infrastruktur dan sarana prasarana perhubungan, dibutuhkan kajian tentang perencanaan transportasi untuk meningkatkan cakupan layanan jaringan transportasi daerah. Terminal Bis perlu adanya peningkatan status menjadi Tipe A dan optimalisasi pengembangan Sub Terminal Watulimo, Panggul dan Durenan.

Kabupaten Trenggalek memiliki banyak potensi daerah yang jika pengelolaannya dikelola lebih optimal akan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya sektor maritim dan pariwisata. Perkembangan **industri pariwisata** dapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional yang berdampak pada penerimaan PAD. Maka pemerintah daerah sebagai fasilitator mempunyai fungsi yang strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata melalui perbaikan perencanaan, pembangunan, regulasi kebijakan pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga pariwisata daerah dapat memberikan *multiplier effect* ke sektor-sektor lainnya. Sementara itu, keindahan alam pegunungan dan pantai-pantai yang selama ini menjadi kawasan wisata bahari dan wisata alam perlu diintegrasikan agar mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Beberapa hal yang menjadi isu-isu stretagis di sektor pariwisata adalah :

1) Penataan Perencanaan Pariwisata (RIPPDA → masuk prolegda Tahun 2016, RIPOW, *Lay Out* Plan per Kawasan Wisata);
2) Promosi dan Informasi yang lebih intensif (internet, media sosial, pameran, media cetak, media elektronik, *direct selling*, kemitraan dengan *travel agent);*
3) Penciptaan *Branding* dan logo Pariwisata Trenggalek
4) Pemenuhan sarana prasarana di destinasi wisata;
5) Pemberdayaan Pokdarwis dan masyarakat di destinasi wisata;
6) Pengembangan desa wisata (Desa Dompyong Kecamatan Bendungan, Desa Watuagung dan Sawahan Kecamatan Watulimo);
7) Eksplorasi destinasi wisata baru (*View* Banyon, Jurug Waru, Pantai Ngampiran, Bendungan Tugu dll);
8) Peningkatan keterlibatan komunitas pemuda dan industri kreatif dalam promosi sektor pariwisata; dan
9) Peningkatan PAD di sektor pariwisata.

4. Perluasan Lapangan Kerja serta Peningkatan Investasi Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Untuk mendorong terciptanya kesiapan daerah dalam menghadapi MEA 2015, sangat diperlukan peran aktif para pelaku usaha untuk mampu berkembang, serta melahirkan berbagai terobosan secara tepat. Sejalan dengan itu, lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, harus memberikan akses yang luas kepada rakyat, terutama bagi pelaku UKM agar dapat lebih tumbuh dan berkembang.

Kompleksitas permasalahan ekonomi secara umum masih rendah yang ditandai dengan menurunnya investasi daerah, kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan rendahnya ketrampilan yang dibutuhkan bursa tenaga kerja. Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis *knowledge, skill* dan *attitude*, serta keterampilan sosial *(social skill).* Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya suasana hubungan industrial yang ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi.

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Investasi juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain.

Upaya peningkatan investasi daerah secara terpadu akan dititikberatkan melalui perbaikan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal, dan peningkatan efektifitas promosi dan kerjasama investasi. Perlu upaya untuk mendorong secara fokus, terwujudnya profesionalisme dalam **pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** dan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** sehingga lembaga–lembaga ini dapat memainkan peran sebagai lokomotif pembangunan daerah dan juga sebagai motor investasi daerah baik melalui sumber daya permodalan mandiri maupun dalam mendorong kerjasama investasi.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan didorong sebagai pilar investasi yang pro ekonomi rakyat, dengan turut diwujudkannya iklim usaha yang sehat dan kondusif, dan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah. Produk-produk UKM unggulan harus didorong bersertifikat mutu. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus terus digalakkan untuk menangkap peluang usaha yang selama ini tidak tergarap oleh pelaku ekonomi Trenggalek sendiri. Peran aktif pemerintah dalam menjembatani BUMDes, koperasi dan UMKM di Trenggalek dengan para pihak termasuk pula dunia di luar Trenggalek perlu ditingkatkan agar terwujud peluasan kerjasama investasi dan perwujudan peluang usaha yang adil dan menyejahterakan bagi pelaku ekonomi kerakyatan.

Investasi daerah akan terus didorong sesuai potensi Trenggalek sebagai daerah wisata, ekonomi agro (pertanian) dan maritim (perikanan). Potensi peran ***Corporate Social Responsibility*** **(CSR)** secara lebih efektif dapat dioptimalkan dalam mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.

Kondisi prasarana dan sarana pendukung yang mempengaruhi investasi daerah adalah meliputi sarana dan prasarana transportasi, , perdagangan, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain. Kondisi prasarana dan sarana pendukung tersebut di Kabupaten Trenggalek harus terus ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya. Khusus untuk **peningkatan sarana dan prasarana perdagangan**, revitalisasi pasar-pasar tradisional dapat menjadi isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. **Pasar Pon** yang menjadi pasar utama dan terletak di pusat kota Trenggalek harus segera direvitalisasi sehingga menjadi ikon perdagangan yang sehat, ramah terhadap pengunjung dan jika kapasitasnya ditambah juga dapat meningkatkan investasi daerah. Pasar di kawasan selatan Trenggalek seperti di Kecamatan Panggul dapat juga dikembangkan untuk mewujudkan kawasan ekonomi/perdagangan baru.

Birokrasi perijinan juga merupakan salah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Perbaikan mekanisme perijinan menjadi perijinan satu pintu sudah diterapkan di Kab. Trenggalek dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga hanya perlu perbaikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang sistem perijinan terpadu ini sehingga dapat meningkatkan investasi daerah. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Sehingga dibutuhkan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang dapat menjamin investor dalam menginvestasikan dananya di Kabupaten Trenggalek.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,12%, turun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,93 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dialami oleh Kabupaten Trenggalek, tapi juga dialami lingkup regional, provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,44 % dan diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,79 %. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :

a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM),

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana SDM nya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b) Faktor Sumber Daya Alam (SDA),
Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada SDA dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan SDMnya dalam mengelola SDA yang tersedia. SDA yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d) Faktor Budaya,
Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, boros, KKN, dan lain-lain.

e) Faktor Sumber Daya Modal,
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Lima faktor tersebut diatas perlu menjadi perhatian, untuk kembali mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Seluruh program prioritas pembangunan juga harus diarahkan untuk mendukung peningkatan fungsi faktor-faktor tersebut, sehingga akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sektor UMKM dan industri kreatif menjadi sektor kunci dalam upaya peningkatan daya saing daerah. Diharapkan ada upaya-upaya berupa kebijakan pemerintah daerah untuk membangkitkan UMKM dan industri lokal, sehingga produk baik itu dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Isu-isu strategis dalam pengembangan sektor UMKM adalah : 1) Optimalisasi pengelolaan produk unggulan daerah; 2) Peningkatan daya saing produk UMKM & ekonomi kreatif melalui standarisasi produk UMKM melalui **Program GEMILANG** (Gerakan Mutu Industri Cemerlang); 3) Pengembangan jejaring pasar dan kemitraan; 4) Pengembangan agroindustri; 5) Peningkatan investasi daerah (termasuk industri manufaktur); dan 6) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tahun 2015 persentase koperasi aktif naik menjadi 190 koperasi atau naik 31,10% dibandingkat Tahun 2014, dimana 63,16% diantaranya dinilai sebagai **koperasi sehat**. Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut dimungkinkan

karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif.

Peningkatan kualitas dan daya saing dapat diimplementasikan melalui pengembangan Balai Latih Kerja (BLK) menjadi ***Techno Park*** **atau Laboratorium Kriya** yang menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai sarana pendidikan, sebagai balai latihan kerja, dan tempat untuk mengembangkan kewirausahaan.

Techno Park/Laboratorium Kriya juga memuat tiga unsur yang saling bersinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat. Nantinya setiap kota akan dibangun, sehingga Kabupaten Trenggalek punya *Techno Park* yang dikembangkan sesuai keunggulan dan potensi masing-masing. Diharapkan pengembangan *Techno Park* ini menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas SDM dalam menyongsong era globalisasi, termasuk di dalamnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Tahun 2015.

Sebagai daerah yang terus berkembang, pertumbuhan penduduk dan seluruh aktivitasnya di Kabupaten Trenggalek menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain.

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di berbagai negara, karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi antara lain melalui penggunaan energi alternatif dan produk energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif dan terbarukan (***renewable energy***) secara terus-menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Kabupaten Trenggalek pada khususnya.

Pemanasan global dan perubahan iklim yang sekarang tengah terjadi diperkirakan masih akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek seperti banjir dan tanah longsor merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan untuk peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fokus adaptasi pembangunan perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti area sumberdaya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan. Arah Kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan dengan tujuan pembangunan millenium (*MDGs*/***SDGs***).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa sebuah pola cuaca *El Nino* akan sangat mungkin mempengaruhi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dan dapat mengakibatkan terlambatnya musim hujan dan curah hujan yang di bawah normal. Sebaliknya fenomena *La Nina* menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah, bahkan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Peningkatan curah hujan ini sangat tergantung dari intensitas *La Nina* tersebut.

Oleh sebab itu daerah perlu mengantisipasi atau menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya *El Nino* dan *La Nina*. BMKG meramalkan bahwa *El Nino* dapat menyebabkan cuaca kering di sebelah barat Pasifik dan Australia, yang akan beresiko pada penurunan hasil panen. Sedangkan La *Nina* berpotensi untuk menyebabkan gagal panen akibat banjir. Beberapa daerah juga berpotensi longsor akibat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area, yaitu masing-masing berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan; pembangunan ekonomi dan sosial; investasi; dan perencanaan tata ruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, berbagai implikasi dari perubahan iklim telah menjadikan derita orang miskin menjadi berlipat kali. Para nelayan tidak bisa melaut, karena gelombang besar. Para petani miskin di pedesaan semakin menderita, karena lahan-Iahan pertaniannya terancam banjir kala musim penghujan dan terancam kekeringan saat musim kemarau. Tempat tinggal mereka juga terancam tanah longsor.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi ini, maka diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap perusakan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), persiapan dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif. Semua itu menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif.

5. Sinergitas Pembangunan Daerah dan Penguatan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ada beberapa kegiatan Strategis Nasional yang berada di Kabupaten Trenggalek diantaranya Penyelesaian Bendungan Tugu, Pelaksanaan Bendungan Bagong, Perencanaan Bendungan Kampak, Pembangunan Jalan Lintas Selatan, dan Pembangunan Kawasan Selingkar Wilis. Kegiatan Strategis Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek merupakan satu isu strategis karena kegiatan/program tersebut saat ini sedang ditunggu-tunggu pelaksanaannya oleh masyarakat Trenggalek, dan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kegiatan/program Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat masih sangat membutuhkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah khususnya pada tahap pengadaan tanah dan penanganan permasalahan sosial.

Tahun 2015 dan 2016 adalah masa transisi kepemimpinan daerah sehingga akan menjadi periode penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan atau RPJMD sehingga dibutuhkan sinergitas pembangunan antar pemangku kepentingan di daerah. RPJMD yang akan disusun berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Pada periode 2014 dan 2015 juga telah terbit beberapa regulasi baru diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), telah membawa dampak perubahan yang besar terhadap Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana UU-ASN menekankan pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) guna membangun manusia secara kompetensi dan bermartabat, yang selalu dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menjadikan

momentum ini untuk perbaikan struktur dan kelembagaan yang menunjang peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai berlaku efektif sejak Tahun 2015. Sepanjang Tahun 2014 yang lalu adalah masa transisi bagi masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyiapkan segala perangkat pelaksana teknis dalam mengimplementasikan UU tentang Desa tersebut. Yang seharusnya disiapkan oleh daerah dalam menyongsong implementasi Undang-Undang tentang Desa. **Pertama**, Konsep Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa. Asas kemandirian dan subsidaritas yang menjadi roh UU tentang Desa akan menempatkan sektor ekonomi sebagai pondasi pembangunan masyarakat desa. Ekonomi desa akan menjadi poros utama pembangunan masyarakat bangsa di masa depan. Desa akan bermetamorfosis dari sekedar entitas ekonomi yang tergantung kepada daerah menjadi poros ekonomi negara. Problematika ekonomi masyarakat perkotaan berikut problem klasik turunannya akan mengurai seiring dengan kebangkitan ekonomi desa. Desain pembangunan ekonomi desa melalui pemetaan potensi desa ini akan menjadi acuan masyarakat agar usaha yang dicanangkan benar-benar berakar dan mempunyai orientasi ekonomi yang berkelanjutan (*economic sustainability*). Sehingga kebangkitan ekonomi masyarakat pedesaan dapat mengembalikan fungsi desa sebagai gantungan hidup dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat. **Kedua**, Proteksi terhadap kebijakan lokal. Selain sektor ekonomi, UU tentang desa juga memberikan efek perubahan terhadap aspek sosial-politik. Dari sisi politik misalnya, digelontorkannya ADD antara 800 juta-1,4 milyar per-Desa akan memancing tingginya partisipasi politik masyarakat. Selain itu, pembaharuan periodesasi jabatan, mekanisme penyaringan kepemimpinan dan perluasan kesempatan dalam berkompetisi memberikan ruang politik yang cukup besar. Ditambah dengan jaminan ditanggungnya biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 akan menambah angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terbukanya ruang politik tersebut akan mengakibatkan munculnya disparitas politik dan akhirnya mengarah pada disharmoni sosial. **Ketiga**, Peningkatan Kualitas SDM. Ditengah-tengah perubahan besar yang akan terjadi di tingkat desa, maka keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Sektor pemerintahan desa, ekonomi, pembangunan maupun sektor pemberdayaan akan membutuhkan injeksi SDM yang berkualitas. Maka dari itu diperlukan akselerasi peningkatan kualitas SDM ditingkatan desa. **Keempat**, Penyiapan Regulasi. Dalam menyongsong diberlakukannya UU tentang Desa, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah ialah menyiapkan aturan teknis baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Desa sebagai tindak lanjut / amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan pelaksananya. Keberadaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, sinergitas dapat diwujudkan dengan upaya mendorong pembangunan desa. Pemerintah desa akan menjadi ujung tombak perwujudan pembangunan desa, dengan prasyarat tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

Penekanan pada pengembangan agroindustri, kegiatan padat karya termasuk dalam penyediaan infrastruktur perdesaan, peningkatan akses informasi termasuk terkait tata niaga komoditas unggulan, pengelolaan lembaga keuangan tingkat desa, perluasan tempat kerja dan penguasaan teknologi tepat guna. Hal-hal ini akan diarahkan untuk tergalinya potensi modal sosial dan modal sumber daya manusia perdesaan.

Konsep **Desa Adopsi** dengan melibatkan *stakeholder* perguruan tinggi, sebagai upaya dalam rangka optimalisasi potensi serta percepatan pembangunan desa yang menjadikan suatu obyek sasaran suatu program atau penelitian sehingga segala potensi dan masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan pendekatan akademis.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Selama ini penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang baru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan efektif akan berlaku pada Tahun 2017. Banyaknya Perda maupun Perbup yang akan dilahirkan tentunya harus berlandaskan visi pembangunan ekonomi, sosial dan politik daerah, serta menghindari terjadinya benturan aturan (*conflict of rule*).

Dalam upaya melaksanakan sinergitas pembangunan daerah, tentunya juga tak lepas dari peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan, sehingga program-program pembangunan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan utama yang harus segera ditangani secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait.

6. Pengembangan Karakter dan Revolusi Mental

Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi, krisis etik, krisis kepercayaan diri, dan krisis kepercayaan sosial. Kemiskinan, pengangguran, tingginya angka buta huruf, banyaknya kriminalitas, korban meninggal akibat penyalahgunaan Narkoba dan rendahnya daya saing merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadi daerah yang produktif, kreatif, inovatif dan kompetitif dalam persaingan global. Dampak negatif globalisasi seperti *individualism, materialism, hedonism, liberalism*, dan kapitalisme semakin menggejala dan mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa sudah banyak dilupakan. Oleh karena itu perlu kembali ditanamkan kepada rakyat Indonesia untuk kembali ke jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengembalikan jati diri dan karakter bangsa adalah melalui revolusi mental. **Revolusi mental** merupakan bentuk proses transformasi pembentukan karakter bangsa. Di dalam revolusi mental ditegaskan bahwa karakter dan kesejahteraan bangsa dapat tercipta diawali dari lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Revolusi mental diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur ini diharapkan dapat menjadi karakter yang menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Gerakan revolusi mental ini harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menangani program pembangunan keluarga secara operasional, yang program utamanya adalah memperkuat implementasi pemberdayaan keluarga.

Agar berbagai program pemerintahan dapat berjalan optimal, perlu adanya revolusi mental. Saat melihat lebih detail ke aspek mentalitas atau budaya kerja, SDM berkualitas lebih menonjol di dunia swasta dibandingkan pemerintah. Di dunia swasta pada umumnya, budaya kerja yang baik sudah tercipta. Jadi, revolusi mental akan difokuskan pada birokrasi pemerintahan yang mampu menunjang daya saing nasional. Pengejawantahan revolusi mental tersebut terlihat dalam tujuh budaya birokrasi yang baik, antara lain melayani bukan ingin dilayani, mempermudah bukan mempersulit, mempercepat bukan memperlambat, saling melengkapi bukan saling meniadakan, memperbaiki bukan mencari-cari kesalahan, memberikan kinerja yang terbaik bukan ingin diberi, dan tepat waktu bukan jam karet.

Ruang publik memiliki akses jangkauan yang sangat luas dan pada umumnya mudah dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Tempat-tempat seperti taman kota, pusat perbelanjaan, pasar, alun-alun kota, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan banyak orang untuk berkumpul merupakan lokasi yang strategis dalam upaya pengenalan budaya kepada masyarakat. Lokasi-lokasi yang strategis inilah yang kiranya bisa membantu upaya pengenalan budaya dengan lebih efektif dan masif.

Ruang publik yang nyaman dan aman akan membuat masyarakat antusias untuk datang dan berkumpul disana. Kondisi ruang publik yang terbebas dari gangguan seperti asap rokok, polusi visual (tumpukan sampah, grafiti yang tidak pada tempatnya, baliho atau poster kampanye, dan lain-lain), dan tindak kriminalitas (pencopetan, pelecehan seksual, kekerasan, dan lain-lain) merupakan sesuatu yang wajib untuk direalisasikan. Harapannya adalah agar masyarakat bersedia untuk datang ke ruang publik dan antusias apabila ada acara atau kegiatan yang diadakan di ruang publik tersebut. Untuk memiliki rasa cinta dan bangga akan suatu kebudayaan, masyarakat harus tahu terlebih dahulu kebudayaan apa yang mereka miliki dan seperti apa wujudnya. Supaya masyarakat mengetahuinya maka mereka perlu diperlihatkan, dikenalkan akan kebudayaan tersebut. Ruang publik adalah media paling memungkinkan untuk menyampaikan maksud ini kepada masyarakat. Memupuk rasa cinta dan bangga ini dapat dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas tertentu yang terkait dengan suatu kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan berkomitmen terhadap perencanaan dan **pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah**, dengan mengelola keragaman dan warisan budaya daerah, termasuk sebagai bagian yang terintegrasi di dalam strategi pengembangan ekonomi kreatif. Program-program yang menitikberatkan kepada peningkatan iman dan taqwa akan juga diprioritaskan sebagai pondasi perwujudan akhlak mulia, demi pembentukan kepribadian masyarakat secara utuh. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong terwujudnya sebuah forum bagi para

pemuka agama untuk berperan aktif bersama pemerintah dalam pembangunan karakter masyarakat.

Pembinaan kepada para pemuda untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia harus diberikan wadah yang berkelanjutan, karena untuk berkreatifitas karena pemuda akan menjadi garda terdepan dalam menumbuhkan jiwa pelopor, wirausaha dan kepemimpinan. Pembinaan potensi para pemuda juga harus seiiring dengan pembinaan di bidang olahraga untuk mencapai prestasi baik di level regional provinsi maupun di level nasional.

7. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Tantangan di bidang sosial di Kabupaten Trenggalek adalah adanya kesenjangan sosial, kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Dalam banyak hal, kesenjangan sosial akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan dan ter-subordinasi.

Pada sisi lain, kemiskinan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan. Kemiskinan akhirnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-wilayah dan antar yang dikuasai dan yang menguasai. Kemiskinan juga akan melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Kondisi perekonomian yang belum· sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

Dalam hal ini kemudahan ekonomi, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif. Karena masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek banyak bekerja di sektor pertanian, pembangunan pertanian dengan berbasis agrobisnis harus terus dikembangkan. Karena letak geografis Kabupaten Trenggalek yang bergunung-gunung, pembangunan pertanian harus diarahkan pada produk perkebunan dan bukan tanaman pangan.

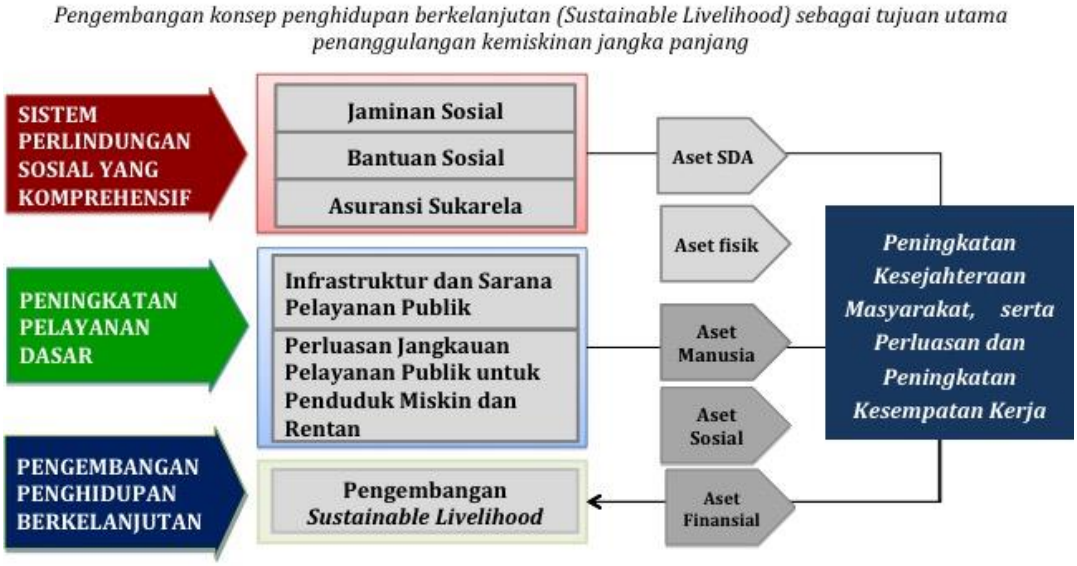
Untuk mengurangi pengangguran, pelatihan-pelatihan ketrampilan dan pengembangan sekolah kejuruan harus digalakkan. Kurikulum sekolah kejuruan dan alat-alat praktek harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga kualitas lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengikuti perkembangan pasar kerja. Di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga dituntut kreatifitas dan inovasi untuk mendukung perekonomian rakyat.

Upaya mensinergikan dan mengintegrasikan program-program kemiskinan menjadi catatan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah karena selama ini anggaran pro-fakir miskin (*pro poor*) tersebar di berbagai program/kegiatan Perangkat Daerah dan dijalankan secara sektoral/parsial. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pemerintah daerah mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, agar ada sinergitas program-program yang ada di lapangan sehingga efektif mengangkat harkat dan martabat fakir miskin.

Pada umumnya kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua keluarga miskin terlahir dari keluarga miskin sebelumnya. Tingkat pendidikan keluarga miskin juga tidak berbeda dengan tingkat pendidikan orangtua mereka. Keluarga miskin cenderung tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya pada jenjang yang lebih tinggi. Kemiskinan secara alamiah menyebabkan keturunannya terhambat pada berbagai akses kehidupan. Kepala keluarga miskin umumnya tingkat pendidikannya rendah, demikian juga dengan anak-anak mereka. Artinya keluarga miskin sekarang ini juga berpeluang untuk melahirkan keluarga miskin berikutnya, bila tidak ada perubahan mendasar yang mengubah kehidupannya. Keluarga miskin tersebut umumnya terlahir, tumbuh, berkembang, bersekolah, bermain dan bahkan berumah tangga pada lingkungan yang sama hingga sekarang ini yang kondisinya tidak lebih baik. Keluarga miskin umumnya sedikit memiliki aset ekonomi produktif.

Beberapa program strategis Nasional untuk penanggulangan kemiskinan seperti **PNPM Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B),** ***Anti Poverty Program*** **(APP)**, dan program strategis Provinsi Jawa Timur perlu didukung dan diadopsi implementasi pelaksanaannya oleh daerah agar hasilnya lebih optimal dalam bentuk program-program daerah. PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan

. Program-program tersebut dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. **Program "TRENGGALEK" Trengginas Galang Ekonomi** menjadi program yang digulirkan di tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 diharapkan salah satu solusi pemerintah daerah dalam usaha mengurangi angka kemiskinan.



Gambar IV-15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang

"Program Penanggulangan Kemiskinan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip "**Gotong Royong**".



Gambar IV-16. Ilustrasi "Gotong Royong" dalam penanggulangan Kemiskinan

Dalam pengelolaan program, pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu **pengelolaan terpadu program kemiskinan dan kerentanan satu atap**, yang nantinya mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan perangkat daerah yang sasarannya adalah penduduk miskin.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

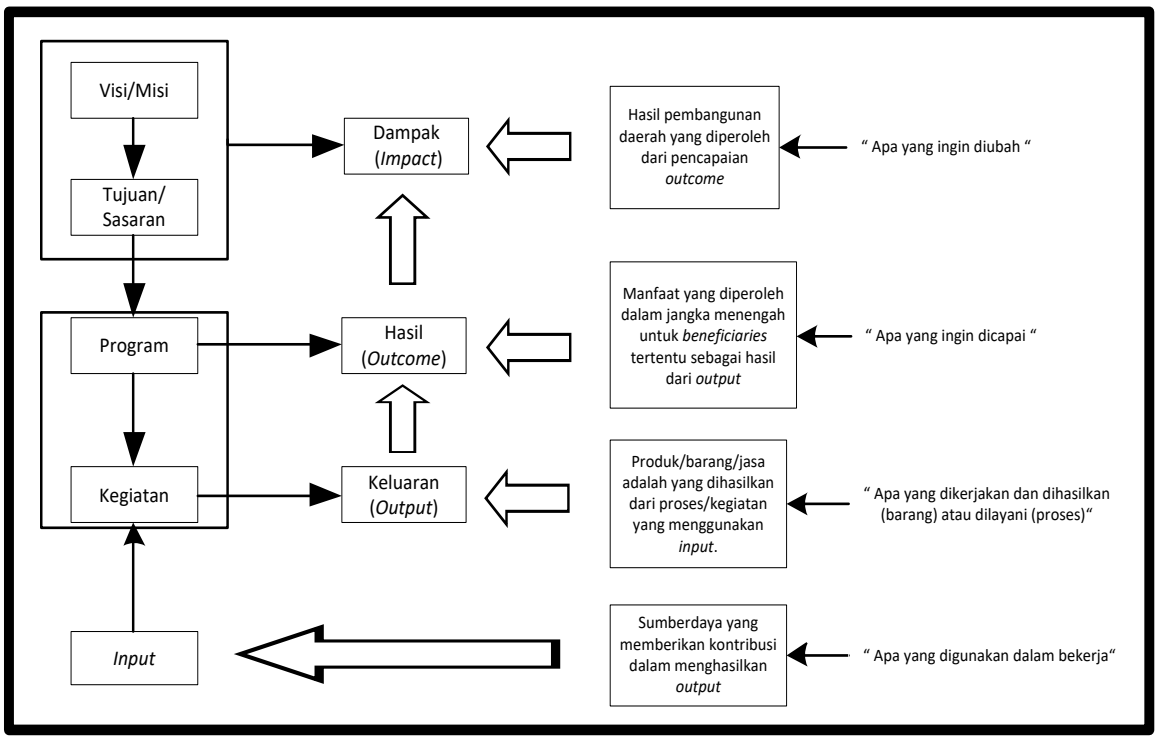


BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan ditetapkan, perlu dirumuskan upaya pencapaian yang terencana, terukur, dan sistematis dalam bentuk tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek ini, adalah penjabaran visi dan misi yang dilengkapi dengan indikator dan target capaian 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian Visi dalam RPJMD adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan Misi dalam RPJMD adalah adalah apa yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang merupakan bagian paling strategis dalam penyusunan RPJMD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar V-1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Dari **Gambar** di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria ***Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bond*** dan ***Continously improve*** **(*SMART*-C).** Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur.

5.1. VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc. dan H. MOCHAMAD NUR ARIFIN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"

Penjelasan :

"MAJU" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

"ADIL" berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

"SEJAHTERA" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

"BERKEPRIBADIAN" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat trenggalek; dan

"IMAN DAN TAKWA" berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Trenggalek, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Trenggalek.

Tabel V-1. Perbandingan Visi RPJMD dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kab. Trenggalek

DOKUMEN PERENCANAAN	PERBANDINGAN VISI
RPJPN Tahun 2005-2025	"INDONESIA YANG **MAJU**, MANDIRI, **ADIL** DAN MAKMUR"
RPJMN Tahun 2014-2019	"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN **BERKEPRIBADIAN** BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"
RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025	"MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA TIMUR PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT **ADIL** DAN MAKMUR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945"
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2013-2018	"JAWA TIMUR LEBIH **SEJAHTERA**, BERKE**ADIL**AN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK
RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025	"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK **SEJAHTERA** DAN BERAKHLAK"
RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021	**"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA**"

5.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan **Visi**, maka disusun **Misi** yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Visi tersebut dilaksanakan dengan 7 (tujuh) **Misi** yaitu :

1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
5. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;
6. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
7. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tabel V-2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

VISI	MISI		NAWA CITA/ JALAN PERUBAHAN JOKOWI-JK
"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"	1	Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;	**MENGHADIRKAN NEGARA YANG BEKERJA**
	2	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;	**KEMANDIRIAN YANG MENYEJAHTERAKAN**
	3	Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;	
	4	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;	
	5	Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;	**REVOLUSI MENTAL**
	6	Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan	
	7	Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.	

Tabel V-3. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Nawacita, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Trenggalek

NO	MISI RPJMD	KETERKAITAN			
		NAWA CITA	RPJMN	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJPD Kab. Trenggalek
1.	Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;	Mendukung NAWA CITA Nomor 2 dan 5	Mendukung Misi RPJMN Nomor 2 dan 3	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 4	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 6
2.	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;	Mendukung NAWA CITA Nomor 6 dan 7	Mendukung Misi RPJMN Nomor 5	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 2	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 1
3.	Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;	Mendukung NAWA CITA Nomor 3 dan 6	Mendukung Misi RPJMN Nomor 1 dan 6	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 3	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 5
4.	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;	Mendukung NAWA CITA Nomor 6 dan 7	Mendukung Misi RPJMN Nomor 1 5, dan 6	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 2	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 3 dan 4
5.	Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;	Mendukung NAWA CITA Nomor 2 dan 4	Mendukung Misi RPJMN Nomor 1 2, dan 3	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 4 dan 5	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 7
6.	Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan	Mendukung NAWA CITA Nomor 8 dan 9	Mendukung Misi RPJMN Nomor 7	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 5	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 2
7.	Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.	Mendukung NAWA CITA Nomor 1	Mendukung Misi RPJMN Nomor 4	Mendukung Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 1	Mendukung Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Nomor 2 dan 3

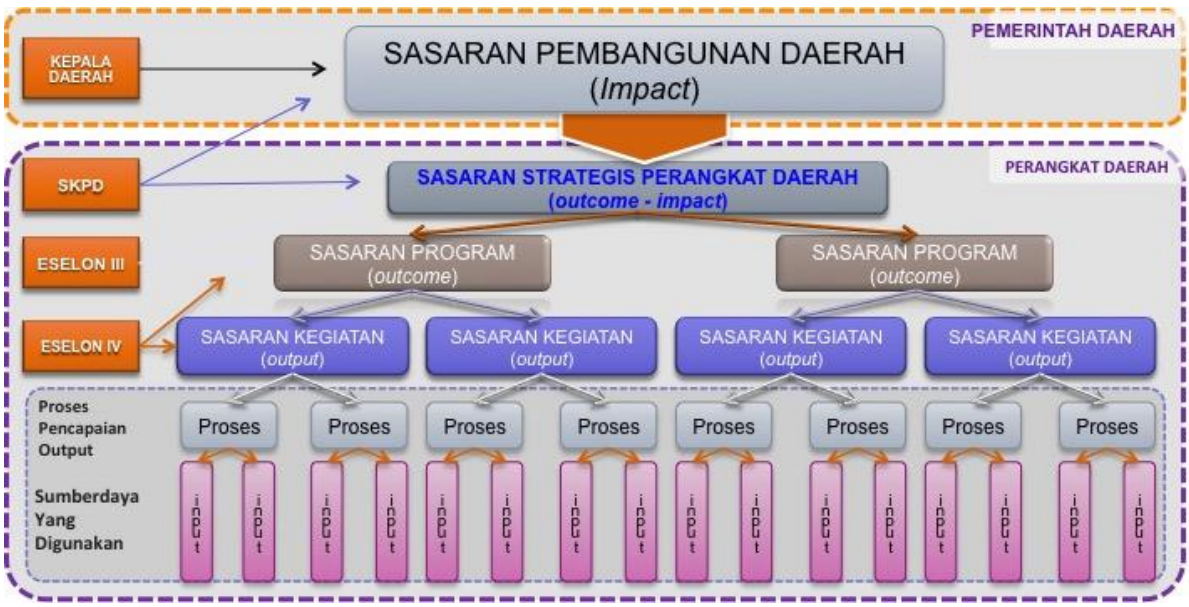
5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu ditetapkan **tujuan pembangunan daerah (*goal*)** yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, **pembangunan Tahap Ketiga di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2015-2019)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

1. Peningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2. Peningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
3. Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian;
4. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Peingkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatkan pelayanan prima;
8. Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana; dan
9. Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penjabaran visi misi kepala daerah harus menerapkan sasaran pembangunan daerah yang akan diacu oleh perangkat daerah untuk menetapkan sasaran strategis, sebagaimana penjelasan pada **Gambar** berikut :



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016

Gambar V-2. Pohon Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Penjabaran Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama** : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

   Tujuan :

   1.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik

   Sasaran :

   1.1.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

   1.2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

   Sasaran :

   1.2.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
   1.2.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan

2. **Misi Kedua** : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;

   Tujuan :

   2.1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

   Sasaran :

   2.1.1. Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
   2.1.2. Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan

3. **Misi Ketiga** : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;

   Tujuan :

   3.1. Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastuktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis

   Sasaran :

   3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis
   3.1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi
   3.1.3. Meningkatnya daya saing wisata

4. **Misi Keempat** : Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

Tujuan :

4.1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Sasaran :

4.1.1. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja
4.1.2. Meningkatnya investasi di daerah
4.1.3. Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan

4.2.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran :

4.2.1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.2.2. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

5. **Misi Kelima** : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

Tujuan :

5.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan;

Sasaran :

5.1.1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

5.2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa

Sasaran :

5.2.1. Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

6. **Misi Keenam** : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;

Tujuan :

6.1. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat

Sasaran :

6.1.1. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6.1.2. Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat

7. **Misi Ketujuh** : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tujuan :

7.1.Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat

Sasaran :

7.1.1. Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Sasaran pada dokumen RPJMD adalah sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat daerah dan nasional yang akan menjadi indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah juga terdapat sasaran strategis yang akan menjadi indikator keberhasilan Kepala Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah akan menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dalam upaya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan maka disajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel V-4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	**Misi 1 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;**	1.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik	1.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		1.2.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				1.2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan
2	**Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;**	2.1	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
				2.1.2	Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
3	**Misi 3 : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;**	3.1.	Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastuktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis	3.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis
				3.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi
				3.1.3	Meningkatnya daya saing wisata
4	**Misi 4: Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;**	4.1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	4.1.1	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja
				4.1.2	Meningkatnya investasi di daerah
				4.1.3	Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.2.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				4.2.2	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
5.	**Misi 5 : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;**	5.1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	5.1.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan
		5.2.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	5.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
6	**Misi 6 : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;**	6.1	Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat	6.1.1	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
				6.1.2	Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat
7	**Misi 7 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.**	7.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat	7.1.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

5.4. IDENTIFIKASI INDIKATOR DAN TARGET SASARAN

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 merupakan dokumen strategis Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang juga telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, maka janji- janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini dan merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian visi dan misi. Janji-janji dimaksud tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Visi Misi Bupati terpilih nantinya akan dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran.

Tabel berikut ini adalah rumusan hubungan tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya, dimana penjabaran ini nantinya akan diacu Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Tabel V-5. Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
							2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Takwa															
Misi 1 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;															
1.1	**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**54,19**	**74,00-75,00**	1.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Profesionallitas ASN	**N/A**	81,84	82,71	83,00	84,00	85,00	**85,00**	86,00	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)
							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	**C (44,77)**	CC (50,94)	B (60,02)	B	BB	BB	**BB**	BB	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	**N/A**	B (77,99)	B (77,97)	78,00	79,00	80,00	**80,00**	81,00	Urusan Pemerintahan Terkait Dengan Pelayanan Publik
							Indeks *e-Government*	**N/A**	2,82 (Baik)	3,09 (Baik)	3,10 (Baik)	3,15 (Baik)	3,20 (Baik)	**3,20 (Baik)**	3,30 (Baik)	Urusan Persandian, Kearsipan, Urusan Statistik, Urusan Komunikasi dan Informatika
							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**N/A**	N/A	N/A	3,00	3,25	3,50	**3,50**	3,75	
							Opini BPK	**Wajar Dengan Pengecua-lian (WDP)**	Wajar Dengan Pengecua-lian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) *)	Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP)	**Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP)**	Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (dan Urusan Pertanahan

Tujuan		Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
								2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	**Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,25**	**69,25-69,75**	1.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ *Mean Years of Schooling* (MYS)	**7,18**	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	**7,23**	7,24	Urusan Pendidikan
							Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	**98,65**	100,18	99,99	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00	
							Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SD	**N/A**	4,74	5,46	5,66	5,86	6,06	**6,06**	6,26	
							Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SMP	**N/A**	4,69	5,31	5,63	5,93	6,23	**6,23**	6,53	
							Rata-rata Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang telah menuju dari SNP 3 ke SNP 4	**N/A**	15,35	86,10	86,20	87,20	88,20	**88,20**	89,20	
							Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	**80,03**	86,18	88,94	90,44	91,94	92,94	**92,94**	93,94	
							Indeks Minat Baca	**N/A**	2,37	2,41	2,42	2,43	2,44	**2,44**	2,45	Urusan Perpustakaan
					1.2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	**72,91**	72,95	73,15	72,96	72,97	72,98	**72,98**	72,99	Urusan Kesehatan dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Angka Kesakitan DBD	**98,23**	167,70	53,10	52,00	51,00	50,00	**50,00**	49,00	
							Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/TB)	**0,73**	0,68	0,60	0,72	0,72	0,71	**0,71**	0,70	
							Prevalansi Balita Stunting	**31,20**	21,60	23,60	26,30	25,20	24,10	**24,10**	24,00	
							Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup	**7,95**	6,57	6,13	6,80	6,50	6,20	**6,20**	6,00	
							Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**110,38**	65,73	104,21	106,81	104,08	101,34	**101,34**	98,60	

Tujuan		Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
								2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;																
2.1	**Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**	**Indeks Gini (*Gini Ratio*)**	**0,37**	**0,33-0,34**	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Ketersediaan Pangan Daerah									Urusan Pangan
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	**5,03**	**5,15-5,20**			a. Padi (ton)	**170.660,66**	196.451,00	181.393,00	187.047,44	189.866,12	192.726,64	**192.726,64**	195.630,00	
		PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	**19,78**	**27,51-29,11**			b. Jagung (ton)	**80.672,95**	88.135,00	59.333,00	60.523,97	61.738,49	62.977,37	**62.977,37**	64.241,02	
							c. Kedelai (ton)	**9.793,20**	8.492,00	10.575,00	9.720,65	9.824,77	9.929,85	**9.929,85**	10.035,86	
							d. Ubi Kayu (ton)	**298.117,95**	174.805,00	218,818,00	221.225,78	223.658,97	226.119,21	**226.119,21**	228.606,53	
							e. Daging	**4.329,75**	3.504,38	3.425,94	4.866,75	5.061,75	5.264,25	**5.264,25**	5.264,25	
							f. Telor	**2.194,34**	2.548,45	3.247,26	2.389,59	2.484,92	2.584,52	**2.584,52**	2.584,52	
							g. Susu	**5.331,98**	5.896,95	8.919,39	5.994,57	6.114,28	6.236,51	**6.236,51**	6.236,51	
							h. Ikan	**24.325,46**	7.464,70	22.239,69	19.215,53	21.252,61	23.316,18	**23.316,18**	23.316,18	
							Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	**87,89**	89,30	87,50	87,70	87,85	88,00	**88,00**	88,20	
					2.1.2	Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	PDRB Sektor Pertanian (Juta Rupiah)	**4.282.706,59**	4.635.704,90	5.084.126,32	5.501.282,18	5.918.438,03	6.335.593,89	**6.335.593,89**	6.752.749,74	Urusan Pertanian
							Nilai Tukar Petani (NTP)	**N/A**	116,00	114,00	115,00	115,00	116,00	**116,00**	116,00	
							Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**N/A**	117,00	116,00	116,00	117,00	118,00	**118,00**	119,00	Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan		Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
								2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 3 : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;																
3.1	**Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastuktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**51,79**	**80,00-82,50**	3.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan (%)	**64,96**	71,12	78,09	80,00	85,00	90,00	**90,00**	90,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perhubungan
							Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik (%)	**90,07**	92,05	96,39	97,59	98,80	100,00	**100,00**	100,00	
							Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	**38,71**	43,00	46,21	49,00	52,00	55,00	**55,00**	55,00	
					3.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi	Persentase Penduduk Perdesaan yang dapat mengakses air bersih (%)	**16,09**	20,81	22,68	30,25	34,98	39,70	**39,70**	39,70	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi (%)	**52,88**	61,50	80,33	80,46	90,15	100,00	**100,00**	100,00	
							Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	**40,32**	45,16	89,85	92,58	96,29	100,00	**100,00**	100,00	
							Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	**1,50**	21,50	74,78	83,18	92,58	100,00	**100,00**	100,00	
					3.1.3	Meningkatnya daya saing wisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	**581.614**	595.938	677.178	800.000	900.000	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan
							Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	**1,00**	1,00	1,00	1,25	1,35	1,50	**1,50**	1,50	

Tujuan		Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
								2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 4: Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;																
4.1	**Meningkatkan daya saing tenaga kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)**	**4,46**	**3,25-3,35**	4.1.1	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	**74,43**	N/A	71,27	71,38	71,49	71,73	**71,73**	71,73	Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
							Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	**95,54**	96,93	96,52	96,55	96,65	96,75	**96,75**	96,80	
					4.1.2	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah investasi (Milyar Rp)	**165,00**	232,00	266,27	275,00	365,00	400,00	**1.500,00**	600,00	Urusan Penanaman Modal
					4.1.3	Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan	Persentase Koperasi Aktif (%)	**32,62**	48,09	50,00	51,40	52,79	54,19	**54,19**	55,59	Urusan Koperasi dan UKM
							Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing (%)	**19,23**	23,20	49,83	69,45	85,47	100,00	**100,00**	15,47	
							Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing (%)	**21,43**	35,00	41,00	64,29	78,57	100,00	**100,00**	100,00	Urusan Perindustrian
							Persentase pasar daerah dalam kondisi baik (%)	**21,74**	26,09	69,57	73,91	82,61	82,61	**82,61**	86,96	Urusan Perdagangan
4.2.	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**64,17**	**67,00-67,50**	4.2.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :									Urusan Lingkungan Hidup
							- Indeks Kualitas Air	**36,67**	45,83	55,83	46,20	46,40	46,60	**46,80**	46,80	
							- Indeks Kualitas Udara	**95,19**	95,59	80,79	95,67	95,71	95,75	**95,79**	95,79	
							- Indeks Tutupan Vegetasi	**61,53**	61,53	62,00	63,00	64,00	65,00	**65,00**	65,00	
					4.2.2	Meningkatnya penyelenggara-an penanggul-angan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	**14,65**	14,65	17,20	19,11	21,02	23,57	**23,57**	26,11	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan		Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada masa transisi	Urusan Pemerintahan
								2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 5 : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;																
5.1	**Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**92,22**	**93,18-93,20**	5.1.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**65,58**	66,21	66,98	68,00	69,00	70,00	**70,00**	71,00	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	**40,00**	50,00	55,00	55,00	65,00	65,00	**65,00**	75,00	
5.2	**Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa**	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**0,64**	**0,69-0,70**	5.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Maju (Desa)	**21**	30	30	40	45	50	**50**	55	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 6 : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;																
6.1	**Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat**	**Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)**	**60,95**	**69,00-70,00**	6.1.1	Meningkatnya suasana yang nyaman, aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Angka Kriminalitas	**5,86**	4,50	3,89	< 5,40	< 5,20	< 5,00	**< 5,00**	< 5,00	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					6.1.2	Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	**N/A**	N/A	N/A	58,50	59,00	60,00	**60,00**	60,50	
Misi 7 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah																
7.1	**Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat**	**Angka Kemiskinan (%)**	**13,39**	**11,50-12,00**	7.1.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (orang)	**92.284**	91.527	89.826	86.863	83.556	80.234	**80.234**	76.899	Urusan Sosial
							Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	**2,18**	1,74	1,71	2,00	1,90	1,80	**1,80**	1,70	
							Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,59**	0,37	0,40	0,50	0,45	0,40	**0,40**	0,35	

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021





BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategi focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

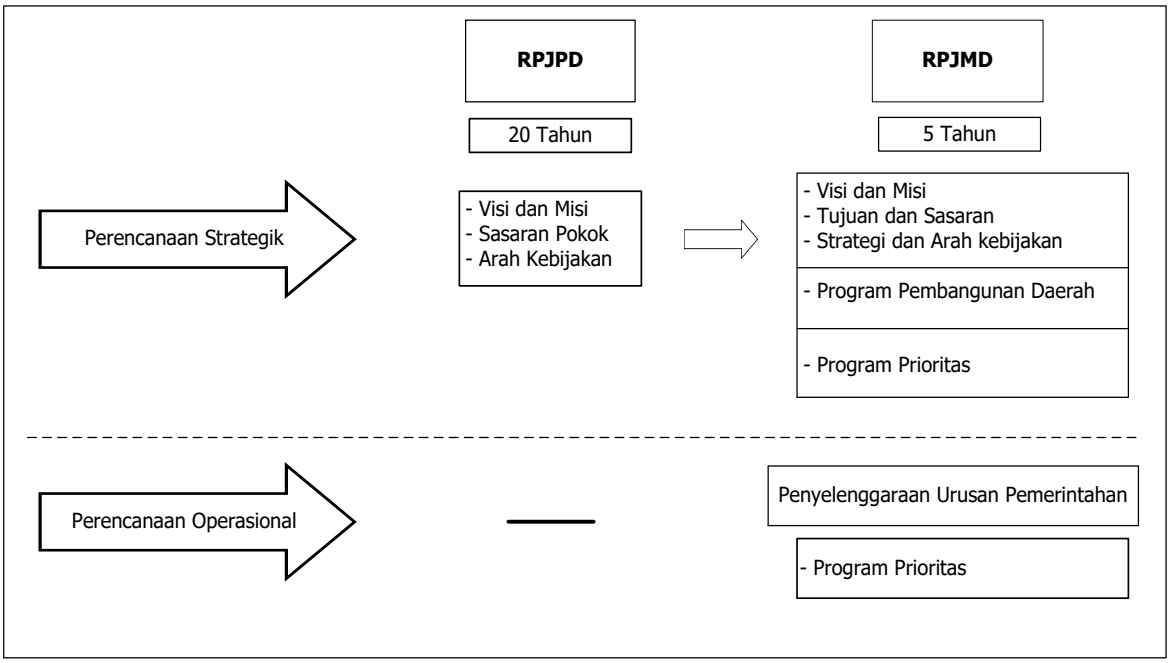
Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting ntuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategi objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategis dalam menjamin bahwa trnasformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. **Perencanaan Strategis** yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. **Perencanaan Operasional** yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:



Gambar VI-1. Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional

Dibutuhkan komitmen agar strategi yang telah disepakati juga dijalankan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

a) Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
b) Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
c) Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
d) Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
e) Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menjawab isi-isu strategis yang telah disusun maka dirumuskan garis besar strategi pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagaimana **Gambar** dibawah ini.



Gambar VI-2. Garis Besar Strategi Pembangunan Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Adapun strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel VI-1. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik	1.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan penyusunan formasi ASN secara elektronik yang sesuai kebutuhan dan standar kompetensi jabatan	Penyusunan formasi ASN dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menyelenggarakan seleksi penerimaan calon ASN secara terbuka, transparan, bebas KKN dan objektif untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;	Penyelenggaraan seleksi Calon ASN dengan menggunakan sistem CAT melalui tes TKD dan TKB bagi yang lulus TKD serta wawancara bagi yang lulus TKD dan TKB	–	–	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan orientasi dan pembekalan bagi calon ASN baik di dalam ruangan maupun di lapangan dengan didukung tenaga yang kompeten dan profesional	–	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui seleksi terbuka untuk jabatan struktural	Lelang Jabatan untuk Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi)	–	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengembangkan kompetensi dan kapasitas ASN melalui pendidikan formal dan nonformal	Pemberian kesempatan kepada PNS untuk menempuh pendidikan sesuai ketentuan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis/ Fungsional, Bimtek/Seminar /Lokakarya/ Workshop	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengembangkan karir PNS berdasarkan formasi	Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan Assesment (Penilaian) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi sesuai dengan standar kompetensi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan Seleksi Pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penguatan jabatan fungsional secara kualitas dan kuantitas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menyelenggarakan sinkronisasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi berbasis web	Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur maupun teknologi informasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengoptimalkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Administrasi	Peningkatan kualitas produk hukum daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Perluasan cakupan kinerja JDIH	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan fungsi kesekretariatan daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Akuntabilkitas Kinerja dan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemkab Trenggalek yang lebih terarah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas sistem layanan persandian pemerintah daerah	Perluasan cakupan layanan persandian pemerintah daerah	–	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas sistem dan mekanisme pelayanan, pendataan, penataan dan penyimpanan arsip daerah	Pengembangan e-office meliputi juga e-arsip, sehingga semua satuan kerja dapat mengakses rujukan dengan cepat, mudah dan hemat	–	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan pelayanan sistem komunikasi dan informasi	Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kerjasama dengan pihak lain/CSR dalam pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan penyebarluasan informasi melalui kerjasama dengan media baik lokal hingga skala nasional	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas database kependudukan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Mendekatkan tempat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Masyarakat	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan serta kapasitas Sekretariat DPRD	Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan aparatur dalam mendukung pelaksanaan fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemenuhan sarana prasarana Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah	Pengusulan formasi kebutuhan tenaga pengawas internal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengiriman calon peserta diklat pembentukan APIP (Sertifikat).	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penambahan jumlah obyek pemeriksaan.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyampaian umpan balik tindak lanjut hasil pemeriksaan.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan gelar pengawasan per wilayah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan publik.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas Pelayanan di Kelurahan	Mendukung Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Administrasi	Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Peningkatan akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan pembangunan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan daerah	Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan bagi aparatur perencana	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kompetensi aparatur perencana Perangkat Daerah baik teknis, manajerial maupun administratif	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembentukan Studio Perencanaan / Tim Klinik Perencanaan dan Penganggaran	–	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Penguatan database perencanaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Peningkatan koordinasi dan kerjasama, baik antar Perangkat Daerah, stakeholder terkait, lembaga independen/swasta, perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas data/informasi statistik pembangunan daerah	Penyediaan data statistik yang akurat dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembentukan Forum Data	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang efektif, efisien, dan terintegrasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Optimalisasi Pusat Data Pembangunan Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Sinergi dengan seluruh satuan kerja serta peningkatan SDM dan anggaran untuk penyempurnaan data	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Sinergi Eksternal dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Meningkatkan sinergitas kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program pembangunan nasional, provinsi dan daerah sekitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan lembaga lainnya dalam upaya percepatan pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Pelaksanaan kajian/penelitian yang mendukung pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Pelaksanaan penelitian dan diskusi publik yang melibatkan stakeholders terkait dan tim ahli baik itu dengan Lembaga Independen maupun dengan Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan sinergitas pengelola keuangan	Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah baik teknis, managerial maupun administratif.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan dan perluasan jaringan kinerja inter dan antar instansi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan daerah	Penyediaan dokumen anggaran secara tepat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumberdaya organisasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan aksebilitas informasi layanan perbendaharaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan perbendaharaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyebarluasan informasi layanan perbendaharaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyederhanaan alur layanan perbendaharaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola Barang Milik Daerah	Peningkatan kompetensi pengelola Barang Milik Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengembangan Sistem aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan legalitas kepemilikan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan penertiban Barang Milik Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan transparansi anggaran	Transparansi anggaran melalui pemanfaatan sistem informasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pembenahan Administrasi Data Penagihan dan Pelaksanaan Penagihan Aktif	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembenahan Sistem dan Prosedur Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan Cakupan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peninjauan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai Dasar Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penambahan Jumlah Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengkajian Tarif Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Melaksanakan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Web	Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pelaksanaan Pelayanan Keliling	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Transparansi Pemanfaatan Objek Retribusi Pelayanan Pasar Daerah	Penyediaan Sistem Informasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pelayanan Pasar Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintahan daerah	Sertifikasi tanah aset milik pemerintah daerah yang belum disertifikasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan JLS dan pembangunan kawasan strategis lainnya	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1.2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, kapasitas dan kepastian dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberian bantuan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar	✓	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				kepastian/ keterjaminan dalam layanan Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah	✓	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar	✓	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar	✓	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar	✓	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD dan SMP	✓	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan pendataan pendidikan secara menyeluruh guna mendapatkan data dan statistik pendidikan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pengoptimalan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan pendidikan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Implementasi konsep *Active Learning Classroom (*ACL)	–	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengembangan sistem pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Non Formal dan Informal	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal dan Informal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas sistem dan mekanisme pelayanan perpustakaan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Promosi gemar membaca ke masyarakat dengan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Promosi Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana" ke masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Menerapkan e-library agar memudahkan orang untuk mengakses katalog	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan sarana prasarana perpustakaan agar menjadi destinasi wisata literasi yang nyaman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan kapasitas lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpustakaan	Peningkatan kapasitas lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan pemberdayaan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Relokasi puskesmas dan jaringannya	✔	✔	✔	–	–	–
					Pembangunan / rehabilitasi puskesmas dan jaringannya	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Akselerasi Penurunan Angka Kesakitan dan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir	Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, remaja dan lansia	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengoptimalkan tata laksana penyakit menular, penyakit tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan	Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kuantitas dan kualitas Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha serta koordinasi lintas sektor	Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberdayaan masyarakat/swasta dalam jaminan kesehatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	Rekruitmen sumber daya kesehatan yang dibutuhkan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelatihan sumber daya kesehatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Standarisasi sumber daya kesehatan dalam pelayanan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, tepat, inovatif, dan manusiawi	Peningkatan jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO), Panduan Praktek Klinik (PPK) dan Pencapaian SPM	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pencapaian akreditasi dan ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan	Peningkatan kompetensi dan pemenuhan SDM kesehatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menggalakkan program serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja akan memudahkan dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan KB dan pembangunan keluarga	Pengendalian kuantitas penduduk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan kepesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Pembangunan keluarga melalui peningkatan peran serta Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel VI-2. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Peningkatan distribusi pangan masyarakat ke wilayah yang akses pangannya rendah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (Karang kitri)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan keanekaragaman pangan masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan konsumsi protein dan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan beras	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		2.1.2	Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani	Peningkatan ketrampilan petani dengan memberikan alih teknologi pertanian berbasis agrobisnis / agroindustri	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan pembinaan kepada Gapoktan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberdayaan Koperasi Tani (Koperta)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan infrastruktur pertanian	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyempurnaan Konsep LPPB (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan penyusunan RPTME (Rancangan Pertanian Terpadu & Manajemen Energi)	✔	✔	✔	–	–	–
					System of Rice Intensification (SRI) – sistem terpadu untuk tingkatkan efisiensi & produktivitas serta kualitas hasil	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Jajar Legowo – teknik penempatan penanaman untuk maksimalkan sinar matahari	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Mekanisasi pemanenan (combine harvester mini) – tingkatkan efisiensi biaya panen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Manajemen Perkebunan Rakyat dan sinergi desa wisata dilem	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Menerapkan standarisasi mutu dan mendorong keunggulan produk agroindustri	Standarisasi mutu produk agroindustri Trenggalek	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengembangan industri turunan yang disinergikan dengan strategi pengelolaan budidaya primer	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatnya populasi dan produksi ternak	Peningkatan populasi dan produksi ternak serta agribisnis peternakan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk peternakan	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan peternakan serta peningkatan SDM.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil peternakan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Penerapan Teknologi kelautan dan perikanan yang sesuai standar	Peningkatan Penerapan Teknologi kelautan dan perikanan yang sesuai standar	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penerapan *eco-aquaculture*	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyusunan Standar operasional dan mutu usaha perikanan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait	Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Implementasi tata niaga sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pelestarian dan pengawasan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan berbasis partisipasi masyarakat	Peningkatan pelestarian dan pengawasan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan berbasis partisipasi masyarakat	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam Laut	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabel VI-3. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1	Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastuktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis	3.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemutakhiran database jalan dan jembatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan konektivitas layanan jalan dan jembatan di wilayah strategis	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Merubah pola perencanaan kegiatan dari pelaksanaan ditahun yang sama menjadi perencanaan mendahului pelaksanaan ditahun fiskal sebelumnya, dimana pola ini memberikan manfaat terkait kualitas perencanaan yang lebih matang dan waktu pelaksanaan yang bisa lebih awal di tahun fiskal berikutnya.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Memperbaiki sistem manajemen aset jalan dan pengairan untuk mengoptimalkan penanganan aset dalam keterbatasan, termasuk penguatan kualitas perencanaan jaringan dan teknologi yang lebih tepat bagi jalan dengan topografi pegunungan.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Mengimplementasikan segitiga pembangunan wilayah (Prigi-Kota Trenggalek - Panggul)	Mengembangkan Infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa serta mewujudkan kota maritim Prigi & kawasan perdagangan baru Panggul	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum	Pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan irigasi dan sumber daya air	Penyusunan database jaringan irigasi dan sumber daya air	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum	Pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan, kualitas pelayanan angkutan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan sarana operasional perhubungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan Jumlah Prasarana perlengkapan Jalan dan perawatan secara berkala (Rambu, Marka, Guadrail, PJU, dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan sarana dan prasarana Terminal Bus/MPU, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perparkiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penataan trayek angkutan umum/perintis/pelajar /mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan Disiplin Pengoperasian kendaraan wajib uji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan Pelayanan lalu lintas dan Angkutan Pos Komando Taktis (POSKOTIS).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan keselamatan transportasi laut	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana transportasi laut	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan serta peran serta steakholder maupun masyarakat.	Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia perhubungan melalui pelatihan, diklat dan penugasan sebagai PNS tugas belajar pada Akademi Transportasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Peningkatan Pembinaan Transportasi Wilayah Kab. Trenggalek melalui forum lalu lintas (FORLANTAS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Pembinaan, pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas dan awak kendaraan umum teladan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan ketersediaan lahan untuk RTH publik di perkotaan	Peningkatan luasan RTH publik di perkotaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan *database* RTH	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lansekap dan desain sarana prasarana perkotaan & pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang nyaman & produktif bagi penghuni & wisatawan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi di jalur protokol	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung	Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyediaan *database* bangunan gedung	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menata dan mengembangkan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Perwujudan penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan pengendalian tata ruang daerah melalui evaluasi dokumen tata ruang	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pengefektifan pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		3.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi	Meningkatkan cakupan layanan air bersih	Penyediaan *database* dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Dukungan program nasional 100-0-100	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan cakupan layanan air bersih	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan cakupan layanan air limbah	Peningkatan cakupan layanan air limbah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah sistem komunal	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan	Peningkatan layanan pengangkutan sampah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan cakupan layanan penyediaan drainase	Peningkatan cakupan layanan penyediaan drainase	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan lingkungan permukiman sehat dan aman	Peningkatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan rumah sehat dan aman	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		3.1.3	Meningkatnya daya saing wisata	Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata serta pengembangan daya tarik wisata menjadi destinasi wisata	Penyediaan regulasi dan perencanaan pembangunan kepariwisataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Penyelenggaraan promosi wisata dengan memanfaatkan kemajuan di bidang advertising dan teknologi informasi	Penyelenggaraan promosi wisata secara langsung, melalui media sosial, media masa, pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan lembaga pemasaran pariwisata, pameran, dan diversifikasi atraksi serta produk industri pariwisata	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata serta mengoptimalkan kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan	Peningkatan peran serta masyarakat dan kualitas pelaku wisata	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabel VI-4. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	4.1.1	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja	Peningkatan produktivitas dan kualitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyebarluasan informasi kesempatan kerja dan bursa kerja, serta pengembangan wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja	Penegakan norma ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		4.1.2	Meningkatnya investasi di daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah	Pengendalian, pengawasan dan transparasi pelayanan perizinan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan informasi secara transparan tentang Pelayanan Perizinan, Investasi dan Produk Unggulan Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan investasi di daerah	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		4.1.3	Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan	Menumbuhkan koperasi baru dan meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang berdaya saing	Penumbuhan dan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, akses permodalan, jaringan pemasaran, kemitraan dan pembinaan serta pengawasan koperasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kualitas kelembagaan, permodalan, jaringan pemasaran, kemitraan, penggunaan teknologi, diversifikasi dan standarisasi produk UMKM	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas IKM yang berdaya saing pasar	Penumbuhan IKM baru dan peningkatan mutu, variasi, daya saing produk, penerapan teknologi baru dan legalitas IKM	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penerapan Trenggalek Gemilang (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) dengan pendekatan komunal branding	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Spesialisasi ekonomi pada produksi hilir	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Eksposisi dan penyusunan konsep display produk berbasis daya tarik wisata	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	Peningkatan pengawasan barang beredar, UTTP yang standar, stabilisasi harga, promosi, revitalisasi pasar rakyat dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Menuju pasar mandiri lewat program sekolah pasar dan revitalisasi pasar berbasis destinasi wisata belanja	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.2.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menurunkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan/usaha	Pengawasan terhadap pantaatan hukum lingkungan hidup	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemantuan terhadap kualitas lingkungan hidup	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyelenggaraan gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (My DarLing)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Manajemen Bank sampah dan Bio-Engineering	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Green Invesment	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelesaian kasus hukum lingkungan dengan pengenaan sanksi administrasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan akses informasi LH dan juga kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberian pembinaan dan dukungan kepada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian alam	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan lahan kritis serta pelestarian sumber mata air	Reklamasi terhadap kerusakan lingkungan, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis dan sumber mata air	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati	Pelestarian tanaman langka	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTH KP)	Pemeliharaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		4.2.2	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana	Peningkatan peran serta aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam managemen penanggulangan bencana	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabel VI-5. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	5.1.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Mengintegrasikan, mengkoordinasikan upaya peningkatan PUG dalam pemenuhan hak anak dan perempuan secara berkesinambungan	Peningkatan peran serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam Pembangunan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatkan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	5.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan, SDM aparatur pemerintahan desa dan perbaikan menajemen tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan kelembagaan desa dan masyarakat serta pendampingan desa	Pelatihan SDM aparatur dan penerapan sistem tata kelola pemerintahan desa	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penguatan fungsi kelembagaan desa dan kemasyarakatan melalui Bulan Bakti Gotong Royong dan Lomba Desa	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Implementasi Desa Adopsi dan Ngantor di Desa	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberian *Soetran Award* untuk Kepala Desa berprestasi	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan desa	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Mempermudah akses usaha ekonomi masyarakat desa melalui keikutsertaan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Memfasilitasi tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Memaksimalkan lembaga-lembaga keuangan mikro desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabel VI-6. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 6

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat	6.1.1	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Menumbuhkan patriotisme, budaya prestasi, jiwa kewirausahaan, semangat profesionalitas dan meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan	Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyelenggaraan pembinaan pemuda di bidang kepemimpinan. kepeloporan, bela negara dan kewirausahaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Mendorong partisipasi pemuda dan komunitas dalam kegiatan kompetisi, apresiasi pemuda dan kegiatan kepemudaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Membina dan mengembangkan olahraga prestasi serta olahraga rekreasi	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan pembinaan untuk meningkatkan kualitas organisasi olahraga dan pelaku olahraga	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Koordinasi dengan unsur penyelenggara Kamtibmas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap gangguan kamtibmas	Peningkatan Kerja sama dengan Unsur Penyelenggaran Kamtibmas melalui Forum Kewasdaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Inteljen Daerah (Kominda) dalam menciptakan keamanan dan Ketertiban	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Menggali dan Memantapkan kembali Rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa, Kesadaran bela Negara, Seni dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat.	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat melalui Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan.	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Meningkatkan kerjasama penegakan Supermasi Hukum dengan Instansi terkait yang membindangi Penegakan Hukum dan HAM	Peningkatan Kerjasama Penegakan Supermasi Hukum dengan Instansi terkait yang membidangi Penegakan Hukum dan HAM	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Ormas /LSM	Peningkatan Validasi data dan pengawasan Ormas/LSM	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan Fasilitasi untuk menciptakan komunikasi Antar Tokoh Umat Beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Tokoh Agama dan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan dukungan terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Aman, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.	Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosilisasi pendidikan politik.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dan kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik	Peningkatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	Penyusunan Tim Koordinasi Terpadu dan regulasi daerah mengenai P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Peningkatan kopetensi Anggota Satpol PP untuk mengikuti Diklat teknis dan fungsional	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penegakan Perundang-undangan Daerah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan linmas	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6.1.2	Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kesalehan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Intensifikasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat (BAZ), diutamakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan intensitas dialog antar umat beragama	Pelibatan ulama atau pemuka agama dalam pembahasan dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan sosial masyarakat	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tabel VI-7. Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 7

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.1	Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial rakyat	7.1.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Sinergitas dan "Gotong Royong" dalam percepatan penanggulangan Kemiskinan	Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Satu Pintu	–	✔	✔	✔	✔	✔
					Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penerapan prinsip Gotong Royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Implementasi program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dari level desa hingga kabupaten	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Meningkatkan kualitas dan jangkauan pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial	Pemberdayaan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan PMKS lainnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Peningkatan dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta eks penderita penyakit kronis	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tujuan		Sasaran Pembangunan Daerah		Strategi	Kebijakan	KERANGKA WAKTU					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik) dan Korban Pasung, serta peningkatan upaya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar/berhadapan hukum/diperlakukan salah, perempuan terlantar/berhadapan hukum/diperlakukan salah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Penanganan korban bencana melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan shelter	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembinaan sosial dan pelatihan Ketrampilan bagi anak/remaja terlantar luar panti	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar dalam panti	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembinaan sosial, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat	✔	✔	✔	✔	✔	✔
					Pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peningkatan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				Pemberangkatan transmigran dan pelatihan ketrampilan/berusaha bagi calon transmigran	Pemberangkatan transmigran dan pelatihan ketrampilan/berusaha bagi calon transmigran	✔	✔	✔	✔	✔	✔

6.2. ARAH DAN KEBIJAKAN

Visi yang telah ditetapkan oleh pasangan Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc dan H. Mochamad Nur Arifin (PEMIMPIN) merupakan sebuah janji politik yang harus dituangkan ke dalam RPJMD periode 2016-2021. Visi tersebut adalah "**TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"**.

Melalui proses konsultasi publik, terminologi "**maju**" dibahas secara seksama dengan pendekatan yang bertujuan memancing pemikiran kritis dari segenap lapisan masyarakat yang terlibat dalam konsultasi publik tersebut. Kemajuan Trenggalek bukanlah sekedar kemajuan yang digambarkan melalui keberadaan kota metropolis seperti DKI Jakarta dan Surabaya yang memiliki gedung pencakar langit, mal yang mewah dan besar, kawasan industri yang masif, industri *high-tech* yang membutuhkan investasi sangat tinggi, serta perumahan ala *real estate* yang dihuni kebanyakan penduduk kota. Trenggalek juga tidak digambarkan sebagai kawasan pariwisata yang memiliki resort nan mewah seperti kawasan Nusa Dua Bali.

Masyarakat Trenggalek dalam konsultasi publik justru mengharapkan kemajuan Trenggalek yang terinspirasi: 1) Kreativitas parade perancang busana di gelaran internasional *Jember Fashion Carnaval*, 2) Keasrian *amphitheatre* yang ada di pantai Bali, 3) Kreativitas UMKM yang mengusung kemasan produk yang tidak kalah menariknya dibanding produk-produk korporasi besar, masuknya batik Trenggalek ke gerai-gerai ekslusif di kota-kota besar, 4) Berkembangnya desa wisata dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan mempertahankan keasrian alam persawahan dan kearifan lokal, 5) Pengembangan *glamorous camping* untuk menarik wisatawan kelas menengah ke atas tanpa harus mengembangkan resort ekslusif ala Nusa Dua Bali, 6) Lansekap perkotaan dengan konsep *street mall* seperti yang berada di Kuta *Square* Bali, 7) Lansekap pantai yang dibangun menjadi kawasan kota pantai dengan ruang pejalan kaki yang nyaman dan terkesan modern, 8) Pertanian modern dengan menggunakan teknologi *greenhouse*, 9) Desa-desa wisata dengan arsitektur yang bercita rasa tinggi walau tetap ada nilai tradisional serta dengan lansekap yang asri dan menyatu dengan alam, 10) Penyelenggaraan event agrowisata dengan kemasan yang tidak kalah dibandingkan negeri jiran Malaysia serta 11) Pagelaran seni budaya serta music dengan penataan panggung dan cahaya yang layak untuk ditayangkan di layar kaca nasional.

Setelah persepsi mengenai kemajuan telah disamakan, maka dilakukan analisa kesenjangan untuk melihat kondisi Trenggalek hari ini dan kebutuhan pembangunan untuk menuju ke titik kemajuan yang diharapkan. Hasil analisa ringkas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VI-8. Arah Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Subyek	Kondisi Trenggalek	Arah Pembangunan
Pertanian	Masih didominasi petani yang belum akrab dengan teknologi terkini, sehingga terkesan kuno dan tidak menarik bagi generasi muda dan terdidik.	Mengembangkan kelompok tani yang menguasai teknologi pertanian terkini dan memberdayakan generasi muda dan terdidik.
Pariwisata	Destinasi pariwisata masih belum memiliki kemasan yang menjual.	Melakukan pengembangan kemasan destinasi pariwisata dengan arsitektur yang bercita rasa tinggi dan memenuhi selera pasar wisatawan.
Pagelaran Seni Budaya	Masih cenderung kurang megah dan tidak di standar yang layak disajikan di audiens kelas nasional maupun internasional.	Mengembangkan kapasitas penyelenggaraan pagelaran yang berstandar tinggi dan memiliki nilai tontonan yang efektif untuk mengangkat citra Trenggalek.

Subyek	Kondisi Trenggalek	Arah Pembangunan
UKM	Kemasan masih cenderung tidak menarik, dan produk UKM tidak memberikan kesan bahwa Trenggalek sudah maju.	Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kemasan dan pencitraan merek yang sesuai selera pasar dari produk-produk UKM Trenggalek.
Event Agrowisata	Dikemas seadanya dan tidak pada tataran yang menarik untuk wisatawan domestic maupun mancanegara.	Menyelenggarakan event agrowisata sebagai event pariwisata dengan promosi yang memadai untuk meningkatkan citra Trenggalek sebagai daerah agrowisata yang memiliki komoditas agro berkualitas.
Desa Wisata	Kawasan desa wisata masih cenderung belum melibatkan arsitektur yang bercita rasa dan lansekap belum ada.	Mengembangkan percantikan wajah rumah-rumah desa dan lansekap lingkungan desa yang berpotensi menjadi kawasan desa wisata serta yang berada di jalur-jalur transportasi utama.
Batik Trenggalek	Batik Trenggalek belum masuk ke gerai-gerai ekslusif, cenderung hanya di pameran-pameran saja.	Mendorong peningkatan kualitas dan penyortiran desain batik yang memenuhi selera pasar, dan membangun aliansi untuk distribusi di jalur pemasaran yang efektif dan ekslusif.
Street Mall	Kawasan pusat perbelanjaan Trenggalek didominasi pertokoan dengan dekorasi tampak depan dan penataan gerai yang tidak menarik dan terkesan kuno atau tidak berkelas	Mendorong peningkatan kenyamanan dan desain estetika kawasan pusat perbelanjaan dengan konsep *street mall* yang disertai perbaikan gerai-gerai atau toko-toko baik dari tampak luar maupun interior toko.
Lansekap Pantai	Lansekap pantai di kota-kota pantai belum terbentuk dan terkesan tidak tertata.	Penataan kawasan pantai sebagai karakteristik kota pantai yang modern tetapi tetap asri dan sinergis dengan pemandangan alam pesisir.

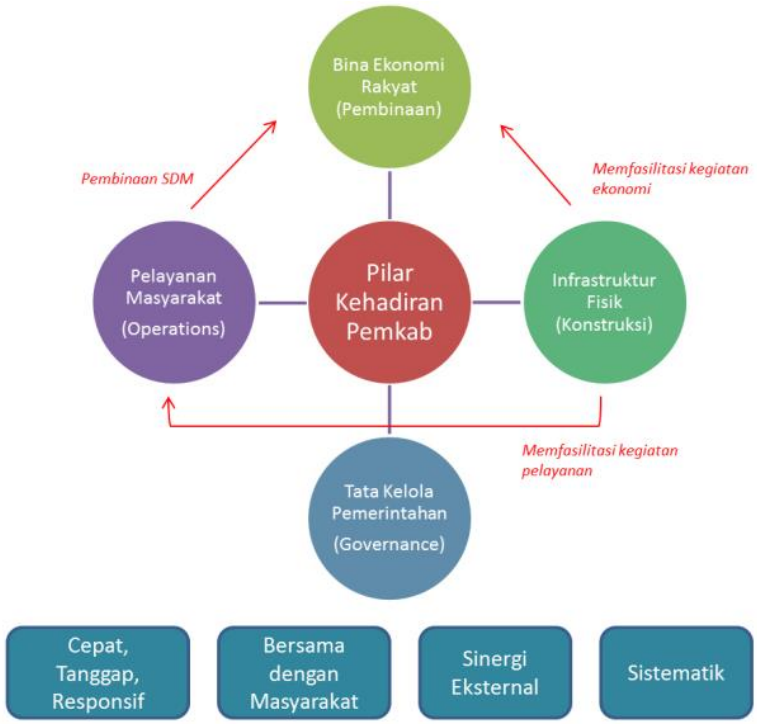
Hasil : Forum Konsultasi Publik RPJMD, 2016

Tabel diatas memberikan rangkuman yang tidak menyeluruh, namun memberikan gambaran besar mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kemajuan yang diharapkan masyarakat Trenggalek. Jika dilakukan intisari yang lebih ringkas, maka arah pembangunan diatas dapat dikaitkan dengan keinginan untuk: 1) memiliki produk UKM yang berkualitas dan memiliki eksistensi di pasar nasional maupun internasional, 2) memiliki event dan daya tarik pariwisata yang memposisikan Trenggalek menjadi daerah yang asri dan bercita rasa tinggi, 3) memiliki kawasan perkotaan yang tertata rapi dan modern terutama di kota pantai, dengan pusat perbelanjaan yang menarik sesuai konsep *street mall*, dan 4) mendorong sektor pertanian sebagai sektor yang menerapkan teknologi dan mampu menarik generasi muda dan terdidik.

Keempat hal ini menunjukkan masyarakat bukan hanya berharap pemerintah hadir sebagai penyedia pelayanan dasar maupun infrastruktur konvensional, tetapi dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi Trenggalek serta mendorong estetika terbangun baik dalam fasilitas publik maupun dalam penataan gerai-gerai pusat perbelanjaan. Ini memiliki dampak yang signifikan karena upaya pemerintah selama ini dalam membangun sektor pariwisata dan ekonomi serta mengembangkan estetika kota dan pusat perbelanjaan masyarakt, dipandang belum membawa kemajuan yang diharapkan.

Untuk itu, pemerintahan Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun mendatang perlu melakukan perubahan yang signifikan dalam mendorong perekonomian Trenggalek, bukan sekedar menyediakan infrastruktur maupun membangun prasarana pelayanan dasar, tetapi juga dalam mengangkat kapasitas dan daya saing perekonomian Trenggalek.

Secara umum, pemerintah Kabupaten memiliki empat fungsi utama: 1) membangun sarana dan prasarana fisik; 2) menyediakan dan mengoperasikan pelayanan publik; 3) membina ekonomi rakyat; dan 4) melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan utama bagi Trenggalek kedepannya adalah dalam melaksanakan fungsi ketiga dengan efektif, dan disamping itu bagaimana pelaksanaan fungsi kesatu dapat efektif mendorong fungsi ketiga dan kedua ditengah keterbatasan anggaran. Fungsi keempat, termasuk diantaranya tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan, seringkali dipandang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, namun pada kenyataannya dalam birokrasi, mutlak bahwa tata kelola yang tidak efektif akan berdampak kepada akuntabilitas maupun efektivitas pembangunan secara keseluruhan.



Gambar VI-3. Pembagian Fungsi pemerintahan Berdasarkan *Skill* Set dan Program Fungsional

Disamping itu, di era pemerintahan yang baru, masyarakat memiliki tuntutan agar dalam menjalankan keempat fungsi itu, dipenuhi karakteristik yang mencerminkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat dan mampu membawa perubahan bukan saja dari sisi birokrasi tetapi juga dalam membangun karakter bangsa. Keempat karakter tersebut adalah: 1) pemerintahan yang cepat, tanggap dan responsif terhadap situasi masyarakat; 2) pemerintah yang memiliki kebersamaan dengan masyarakat; 3) pemerintah yang mampu membangun sinergi eksternal yang efektif untuk membawa Trenggalek terkoneksi ke percaturan nasional maupun internasional sembari membawa manfaat pembangunan; dan 4) pendekatan pembangunan yang sistematik sehingga setiap kegiatan pembangunan membawa Trenggalek menuju kearah kemajuan yang diharapkan.

Sebagai ilustrasi, penyediaan infrastruktur fisik yang cepat, tanggap dan responsif, dapat dicontohkan sebagai respon cepat pemerintah dalam menangani aduan terkait jalan yang berlubang dan drainase yang tersumbat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi informasi untuk sistem pengaduan yang real time serta langsung tayang di laman publik internet, dan langsung tersambung ke tim yang siaga merespon kepada aduan masyarakat. Ilustrasi lain dari kebersamaan dengan masyarakat, adalah program pembangunan sarana pariwisata yang melibatkan peran serta masyarakat semisal konsultasi pengemasan destinasi pariwisata dengan kelompok sadar wisata atau melibatkan masyarakat dalam mengembangkan homestay yang berkualitas bagi wisatawan.

Kerangka teoritis peran pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik kepemimpinan yang ingin diwujudkan, selain dipadukan dengan visi misi terutama terkait definisi kemajuan, juga dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang diidentifikasi secara komprehensif. Secara garis besar, selain dari hasil identifikasi kesenjangan dalam ciri-ciri kemajuan yang telah dibahas sebelumnya, terdapat hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian utama diantaranya: 1) tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan adanya kesenjangan pendapatan mengingat PDRB per kapita Trenggalek sebenarnya berada di angka kurang lebih Rp16 juta per kapita atau per kepala; 2) angka partisipasi SMA sederajat yang baru berada di kisaran 70 persen; 3) pengangguran yang meningkat dua kali lipat dibandingkan lima tahun yang lalu; 4) fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar masih belum memenuhi standar atau kondisi yang prima; 5) cakupan sanitasi yang masih rendah dihitung dari persentase desa yang sudah ODF (*Open Fefecation Free*); 6) rendahnya cakupan penduduk yang terlindung dengan skema BPJS; 7) kondisi infrastruktur ekonomi dimana proporsi yang dalam kondisi tidak prima cukup signifikan; 8) rendahnya penerapan IT dan informasi publik berbasis web di kalangan Perangkat Daerah; dan 9) belum terwujudnya pelayanan satu pintu yang efisien termasuk desentralisasi pelayanan ke tingkat kecamatan.

Pertimbangan terhadap karakteristik ekonomi Trenggalek turut dilakukan untuk memformulasikan strategi pembangunan prioritas. Dari segi geografis, Trenggalek didominasi kawasan pegunungan, dan setengah wilayah Trenggalek adalah hutan yang dalam pengelolaannya mayoritas berada dibawah Perum Perhutani sebagai pengelola hutan negara. Apabila dilakukan simulasi, lahan datar yang tersedia apabila dikonversi masif menjadi lahan sawah produktif non tadah hujan, hanya mampu memberikan rata-rata pendapatan per keluarga sebesar Rp. 600.000 hingga Rp. 1.200.000 per bulan. Untuk itu, diperlukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dari lahan hutan Negara sesuai kaidah pengelolaan hutan lestari, termasuk pengembangan hasil hutan non kayu seperti hilirisasi industri getah pinus dan komoditas lain yang dapat tumbuh dibawah naungan. Pemanfaatan lahan hutan negara untuk pariwisata, peternakan dan perikanan juga dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan.

Berdasarkan Data BPS, sekitar 31 persen ekonomi Trenggalek berasal dari sektor pertanian primer, sedangkan 15 persen berasal dari jasa dan perdagangan dan 14 persen berasal dari industri pengolahan. Sisanya masing-masing berkisar 5-7 persen mencakup diantaranya konstruksi, pertambangan, informasi komunikasi dan administrasi pemerintah. Contoh industri rumah tangga yang dominan di Trenggalek adalah anyaman bambu dengan 6.500 unit, bata merah dengan 4.850 unit, genteng dengan 1.600 unit, gula kelapa dengan 1.152 unit, kerupuk dengan 910 unit, dan meubel dengan 610 unit. Hampir keseluruhan industri rumah tangga ini mengandalkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari alam Trenggalek.

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan sesuai UU 23/2014, serta 7 (tujuh) misi Bupati Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan Wakil Bupati H. Mochamad Nur Arifin, maka strategi prioritas pembangunan secara umum dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk memenuhi standar kelengkapan serta kinerja yang memuaskan masyarakat. Hal ini melibatkan investasi fisik terkait bangunan dan peralatan, serta investasi sistem pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi tepat guna diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan.
2. Mengembangkan infrastruktur kawasan, terutama perkotaan termasuk kota pesisir/pantai, yang mencerminkan cita rasa arsitektur serta pemahaman terhadap selera pasar wisatawan dan kenyamanan bagi penduduk yang memiliki ekspektasi lebih tinggi.
3. Mewujudkan kawasan perkotaan pesisir yang efektif untuk menjadi motor perekonomian, mendorong pariwisata pesisir, dan menjadi habitat yang nyaman bagi penduduk dengan tingkat kapasitas pendidikan dan profesional yang relatif tinggi. Hal ini melibatkan konektivitas yang memadai untuk adanya konsentrasi kegiatan atau aglomerasi dari *hinterland* ke kota tersebut.
4. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan mendorong efektivitas sistem retribusi dan basis pajak serta pengelolaan aset dan investasi daerah. Pendekatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi senantiasa memperhatikan perbaikan pelayanan pemerintah terhadap subyek retribusi atau pajak sehingga dampak positif terhadap pembangunan atau pelayanan dari pembayaran tersebut bagi subyek retribusi atau pajak dapat dirasakan. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan efektivitas penarikan pendapatan juga perlu didorong.
5. Membina pelaku ekonomi industri UKM dari perspektif daya saing serta pelaksanaan fasilitasi peningkatan peluang usaha, untuk turut berperan serta dalam meningkatkan eksistensi dan citra merek terkait Trenggalek di pasar nasional maupun global, serta dalam mewujudkan kehidupan perkotaan atau pariwisata yang nyaman.
6. Mengembangkan destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik dan mampu mengangkat citra Trenggalek serta bersinergi dengan upaya mendorong produk industri UKM Trenggalek. Pengembangan destinasi disinergikan dengan promosi dan event terkait pariwisata dengan pendekatan yang mencerminkan strategi pemasaran terkini.
7. Mendorong kemajuan sektor agro, termasuk pemanfaatan lahan hutan secara lestari, yang terintegrasi dengan pengembangan industri hilir, dimana penerapan teknologi tepat guna termasuk teknologi informasi diharapkan selain meningkatkan produktivitas, dapat mendorong minat generasi terdidik dan muda untuk membawa warna baru dalam sektor pertanian Trenggalek. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan rantai nilai dan tata niaga yang lebih berpihak kepada petani melalui penciptaan nilai tambah dan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat yaitu koperasi. Kemajuan sektor agro diharapkan bersinergi dengan agrowisata.
8. Menciptakan kekokohan kehidupan bermasyarakat dengan pembangunan serta pembinaan lembaga dan elemen sosial politik, serta pemberdayaan lembaga dan elemen keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter tangguh dan berintegritas dengan berlandaskan iman dan takwa.
9. Mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dengan pelayanan yang prima dan upaya terpadu mengentaskan kemiskinan.
10. Mendorong peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan secara obyektif dan tulus.

Setiap pemerintah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran sehingga perlu menentukan prioritas secara seksama. Secara garis besar, Trenggalek ingin mencapai kemajuan yang dicerminkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai serta kemajuan sektor ekonomi yang digambarkan dengan daya saing pelaku ekonomi serta perannya dalam mewujudkan ruang publik yang mencerminkan modernitas. Kesemua hal ini perlu sekiranya ditopang dengan adanya daya beli masyarakat yang memadai. Untuk itu upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat perlu didorong, dengan memperhatikan pula kesenjangan ekonomi yang ada saat ini sehingga perlu ada keberpihakan dan perhatian terhadap pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat.

Dengan keterbatasan lahan non hutan dan adanya kawasan pegunungan, maka perlu dikaji alokasi pemanfaatan ruang terutama di lahan datar demi optimalisasi produktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya mencapai swasembada pangan. Sebagai ilustrasi, kawasan dengan potensi layanan jasa dan perdagangan perkotaan memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dan peluang kerja lebih besar dibandingkan lahan sawah, sehingga perlu dikaji secara matang keputusan untuk menetapkan lahan sawah berkelanjutan di kawasan perkotaan. Selain itu, optimalisasi aset daerah akan sulit dicapai manakala lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dibatasi penggunaannya untuk persawahan, sedangkan fungsi utama lain seperti fasilitas publik yang dapat menjadi katalis pembangunan SDM maupun ekonomi sekitar justru sangat diperlukan.

Untuk itu, Trenggalek selama lima tahun kedepan akan memfokuskan pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan tujuan: 1) menyediakan pelayanan publik yang prima; 2) membentuk ruang kawasan terutama perkotaan yang nyaman dan produktif serta mendorong fasilitas publik sebagai katalis peningkatan perekonomian kota termasuk sektor jasa, perdagangan termasuk pemasaran industri pengolahan; 3) mendorong konektivitas yang prima di jalan kabupaten (antar kecamatan), dan jalan antar desa yang memiliki keterkaitan strategis dengan upaya mendorong aglomerasi ekonomi di pusat-pusat kawasan serta mendorong sektor industri pengolahan; 4) mendorong konektivitas dan infrastruktur kawasan untuk daerah pariwisata.

Prioritas diatas, terutama terkait fokus pembangunan sarpras fisik pembentukan ruang kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata akan berkaitan dengan penataan kawasan yang mempertimbangkan kegiatan ekonomi sehingga bukan saja terbatas kepada infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, tetapi juga ruang publik yang membawa estetika seperti contohnya pengembangan kawasa pasar yang menjadi cikal bakal dari *street mall*. Pemerintah bahkan dimungkinkan mendorong pemanfaatan aset daerah untuk membangun daya tarik kawasan perkotaan sebagai katalis perekonomian, seperti pusat seni budaya dan perfilman, kawasan kuliner, dan sentra ekonomi ritel lainnya. Pengembangan seperti ini akan sangat terintegrasi dengan penyelenggaraan event dan kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan, serta dalam kaitan dengan upaya mendorong sektor jasa perdagangan dan pemasaran produk industri UMKM.

Implikasi dari pendekatan tersebut diatas terhadap postur anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi standar minimum investasi pembangunan dan pengoperasian pelayanan dasar
2. Mengkaji ulang prioritas pembangunan infrastruktur dasar sesuai arah pengembangan kawasan perkotaan sebagai motor ekonomi baru Trenggalek termasuk keterkaitan dengan *hinterland*. Hal ini diharapkan mendorong efisiensi ruang anggaran pembangunan infrastruktur untuk memberi ruang bagi pengembangan sarpras fisik yang berkaitan langsung dengan upaya mendorong sektor jasa, perdagangan dan pariwisata.

3. Meningkatkan peran pemerintah dalam membina industri UKM termasuk dari segi promosi, sertifikasi mutu, dan sinergisitas dengan sektor pariwisata.
4. Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung penyelenggaraan event yang memiliki dampak positif meningkatkan citra Trenggalek sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk kepercayaan terhadap produk unggulan Trenggalek di sektor agro.
5. Meningkatkan penerapan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mendorong efektivitas pembangunan.

Sebagai konsekuensi, maka diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang berkaitan dengan urusan industri (berbasis agro sehingga terintegrasi dengan sektor ekonomi primer), koperasi, perdagangan, baik bersifat fisik (pengembangan pusat kegiatan ekonomi dan gerai ekonomi kreatif) maupun kegiatan non fisik (semisal standarisasi mutu, promosi dan pencitraan produk) yang ditargetkan tuntas dalam dua tahun, yaitu 2017 dan 2018. Diperlukan setidaknya keberpihakan APBD untuk melakukan diversifikasi ekonomi Trenggalek menuju sektor ekonomi hilir termasuk agroindustry, pariwisata, jasa dan perdagangan. Anggaran ini harus dipadukan dengan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga peran serta sektor swasta. Selain itu pemerintah perlu mendorong peningkatan komunikasi publik termasuk hubungan media dan komunikasi eksternal sebagai bagian dari strategi promosi terintegrasi.

Selanjutnya belanja infrastruktur dasar kembali ditingkatkan di Tahun 2019, dan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan akan dipertahankan untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Pada Tahun 2020, Pemerintah akan fokus pada pembanguan sektor pariwisata dan juga perlu berinvestasi untuk pembenahan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan teknologi informasi (*e-government*) untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Tahun 2021 sebagai masa transisi, pembangunan diarahkan pada pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk percepatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dengan mengimplementasikan dan mengoptimalkan program-program padat karya serta pemberdayaan masyarakat desa yang menyerap lapangan kerja produktif.

Tabel VI-9. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH					
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
"PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS AGRIBISNIS / AGROINDUSTRI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN DIDORONG INFRASTRUKTUR DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING"	"PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAJUAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN"	"MENDORONG PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF, INFRASTRUKTUR TANGGUH DAN PELAYANAN DASAR YANG PRIMA"	"SINERGITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRA-STRUKTUR BERKUALITAS UNTUK MENINGKAT-KAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN"	Ditentukan pada penyusunan RKPD Tahun 2020	Ditentukan pada penyusunan RKPD Tahun 2021

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang inheren disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capainnya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Bab ini menyajikan uraian kebijakan umum beserta program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan umum dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan dan metodologi. Untuk mempermudah implementasi pelaksanaan kebijakan umum maka disusun konsep paradigma baru sebagaimana **Gambar** berikut :



Gambar VII-1. Paradigma Baru Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, maka kebijakan umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

   Kebijakan Umum :
   - ❖ Penyusunan formasi ASN dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja
   - ❖ Penyelenggaraan seleksi Calon ASN dengan menggunakan sistem CAT melalui tes TKD dan TKB bagi yang lulus TKD serta wawancara bagi yang lulus TKD dan TKB,
   - ❖ Penyelenggaraan orientasi dan pembekalan bagi calon ASN baik di dalam ruangan maupun di lapangan dengan didukung tenaga yang kompeten dan profesional
   - ❖ Lelang Jabatan untuk Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi)
   - ❖ Pemberian kesempatan kepada PNS untuk menempuh pendidikan sesuai ketentuan
   - ❖ Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek/Seminar/Lokakarya/ Workshop
   - ❖ Penyelenggaraan Assesment (Penilaian) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
   - ❖ Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi sesuai dengan standar kompetensi
   - ❖ Penyelenggaraan Seleksi Pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
   - ❖ Penguatan jabatan fungsional secara kualitas dan kuantitas
   - ❖ Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur maupun teknologi informasi
   - ❖ Peningkatan kualitas produk hukum daerah
   - ❖ Perluasan cakupan kinerja JDIH
   - ❖ Peningkatan fungsi kesekretariatan daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
   - ❖ Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah
   - ❖ Akuntabilkitas Kinerja dan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemkab Trenggalek yang lebih terarah
   - ❖ Perluasan cakupan layanan persandian pemerintah daerah
   - ❖ Pengembangan *e-office* meliputi juga *e-arsip*, sehingga semua satuan kerja dapat mengakses rujukan dengan cepat, mudah dan hemat
   - ❖ Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
   - ❖ Peningkatan kerjasama dengan pihak lain/CSR dalam pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
   - ❖ Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
   - ❖ Peningkatan penyebarluasan informasi melalui kerjasama dengan media baik lokal hingga skala nasional
   - ❖ Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan ISO

- Peningkatan kualitas database kependudukan
- Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Mendekatkan tempat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Masyarakat
- Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan aparatur dalam mendukung pelaksanaan fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan
- Pemenuhan sarana prasarana Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan
- Pengusulan formasi kebutuhan tenaga pengawas internal
- Pengiriman calon peserta diklat pembentukan APIP (Sertifikat).
- Penambahan jumlah obyek pemeriksaan.
- Penyampaian umpan balik tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Pelaksanaan gelar pengawasan per wilayah
- Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan publik.
- Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Mendukung Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan
- Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah
- Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan pembangunan
- Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan bagi aparatur perencana
- Peningkatan kompetensi aparatur perencana Perangkat Daerah baik teknis, manajerial maupun administratif
- Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
- Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- Pembentukan Studio Perencanaan / Tim Klinik Perencanaan dan Penganggaran
- Penguatan database perencanaan
- Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama, baik antar Perangkat Daerah, stakeholder terkait, lembaga independen/swasta, perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan
- Peningkatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

- Penyediaan data statistik yang akurat dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah
- Pembentukan Forum Data
- Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang efektif, efisien, dan terintegrasi
- Optimalisasi Pusat Data Pembangunan Daerah
- Sinergi dengan seluruh satuan kerja serta peningkatan SDM dan anggaran untuk penyempurnaan data
- Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah baik teknis, managerial maupun administratif.
- Peningkatan dan perluasan jaringan kinerja inter dan antar instansi
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah
- Penyediaan dokumen anggaran secara tepat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumberdaya organisasi
- Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan perbendaharaan
- Penyebarluasan informasi layanan perbendaharaan
- Penyederhanaan alur layanan perbendaharaan
- Peningkatan kompetensi pengelola Barang Milik Daerah
- Pengembangan Sistem aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait
- Pelaksanaan penertiban Barang Milik Daerah
- Transparansi anggaran melalui pemanfaatan sistem informasi
- Pembenahan Administrasi Data Penagihan dan Pelaksanaan Penagihan Aktif
- Pembenahan Sistem dan Prosedur Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peningkatan Cakupan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peninjauan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai Dasar Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penambahan Jumlah Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pengkajian Tarif Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
- Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pelaksanaan Pelayanan Keliling
- Penyediaan Sistem Informasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pelayanan Pasar Daerah
- Sertifikasi tanah aset milik pemerintah daerah yang belum disertifikasi
- Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan JLS dan pembangunan kawasan strategis lainnya
- Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pemberian bantuan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah
- Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu
- Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD, SMP, SMA dan SMK
- Pelaksanaan pendataan pendidikan secara menyeluruh guna mendapatkan data dan statistik pendidikan
- Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan
- Pengoptimalan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan pendidikan
- Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen
- Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta
- Pengembangan sistem pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Pelaksanaan seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi
- Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan
- Penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan
- Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan

- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
- Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
- Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
- Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
- Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK
- Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal dan Informal
- Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal
- Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal
- Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional
- Relokasi puskesmas dan jaringannya
- Pembangunan / rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
- Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting
- Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, remaja dan lansia
- Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular
- Peningkatan kuantitas dan kualitas Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- Pemberdayaan masyarakat/swasta dalam jaminan kesehatan
- Rekruitmen sumber daya kesehatan yang dibutuhkan
- Pelatihan sumber daya kesehatan
- Standarisasi sumber daya kesehatan dalam pelayanan
- Peningkatan jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau
- Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO), Panduan Praktek Klinik (PPK) dan Pencapaian SPM
- Pencapaian akreditasi dan ISO Kesehatan
- Peningkatan kompetensi dan pemenuhan SDM kesehatan
- Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar

2. **Misi Kedua** : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;

Kebijakan Umum :

- Peningkatan distribusi pangan masyarakat ke wilayah yang akses pangannya rendah
- Peningkatan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (Karang kitri)
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- Peningkatan konsumsi protein dan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan beras
- Peningkatan ketrampilan petani dengan memberikan alih teknologi pertanian berbasis agrobisnis / agroindustri
- Peningkatan pembinaan kepada Gapoktan
- Pemberdayaan Koperasi Tani (Koperta)
- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- Peningkatan infrastruktur pertanian
- Penyempurnaan Konsep LPPB (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan penyusunan RPTME (Rancangan Pertanian Terpadu & Manajemen Energi)
- *System of Rice Intensification* (SRI) – sistem terpadu untuk tingkatkan efisiensi & produktivitas serta kualitas hasil
- Jajar Legowo – teknik penempatan penanaman untuk maksimalkan sinar matahari
- Mekanisasi pemanenan (combine harvester mini) – tingkatkan efisiensi biaya panen
- Manajemen Perkebunan Rakyat dan sinergi desa wisata dilem
- Standarisasi mutu produk agroindustri Trenggalek
- Pengembangan industri turunan yang disinergikan dengan strategi pengelolaan budidaya primer
- Peningkatan populasi dan produksi ternak serta agribisnis peternakan
- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Peningkatan pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan peternakan serta peningkatan SDM.
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil peternakan
- Peningkatan penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang sesuai standart
- Penerapan *eco-aquaculture*
- Penyusunan standar operasional dan mutu usaha perikanan
- Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
- Peningkatan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
- Optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait

- Implementasi tata niaga sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan
- Peningkatan pelestarian dan pengawasan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan berbasis partisipasi masyarakat
- Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut
- Peningkatan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

3. **Misi Ketiga** : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;

Kebijakan Umum :

- Pemutakhiran database jalan dan jembatan
- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
- Peningkatan konektivitas layanan jalan dan jembatan di wilayah strategis
- Merubah pola perencanaan kegiatan dari pelaksanaan ditahun yang sama menjadi perencanaan mendahului pelaksanaan ditahun fiskal sebelumnya, dimana pola ini memberikan manfaat terkait kualitas perencanaan yang lebih matang dan waktu pelaksanaan yang bisa lebih awal di tahun fiskal berikutnya.
- Memperbaiki sistem manajemen aset jalan dan pengairan untuk mengoptimalkan penanganan aset dalam keterbatasan, termasuk penguatan kualitas perencanaan jaringan dan teknologi yang lebih tepat bagi jalan dengan topografi pegunungan.
- Mengembangkan Infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa serta mewujudkan kota maritim Prigi & kawasan perdagangan baru Panggul
- Pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum
- Penyusunan database jaringan irigasi dan sumber daya air
- Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air
- Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi
- Pemenuhan sarana dan prasarana pekerjaan umum
- Peningkatan luasan RTH publik di perkotaan
- Penyediaan *database* RTH
- Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- *Landscape* & desain sarana prasarana perkotaan & pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang nyaman & produktif bagi penghuni & wisatawan
- Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Desain serta penataan bangunan dan kegiatan ekonomi di jalur protokol
- Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung
- Penyediaan *database* Bangunan Gedung
- Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten
- Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten
- Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen rencana tata ruang wilayah kecamatan
- Pelaksanaan evaluasi dokumen rencana detail tata ruang kecamatan

- Perwujudan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang
- Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang
- Peningkatan pengendalian tata ruang daerah melalui evaluasi dokumen tata ruang
- Pengefektifan pengendalian tata ruang melalui penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase
- Dukungan program nasional 100-0-100
- Peningkatan cakupan layanan air bersih
- Peningkatan cakupan layanan air limbah
- Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah sistem komunal
- Peningkatan layanan pengangkutan sampah
- Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
- Peningkatan cakupan layanan penyediaan drainase
- Peningkatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas
- Peningkatan rumah sehat dan aman
- Peningkatan sarana operasional perhubungan
- Peningkatan Jumlah Prasarana perlengkapan Jalan dan perawatan secara berkala (Rambu, Marka, Guadrail, PJU, dll)
- Peningkatan sarana dan prasarana Terminal Bus/MPU, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perparkiran
- Penataan trayek angkutan umum/perintis/pelajar/mahasiswa
- Peningkatan Disiplin Pengoperasian kendaraan wajib uji
- Peningkatan Pelayanan lalu lintas dan Angkutan Pos Komando Taktis (POSKOTIS).
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana transportasi laut
- Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia perhubungan melalui pelatihan, diklat dan penugasan sebagai PNS tugas belajar pada Akademi Transportasi.
- Peningkatan Pembinaan Transportasi Wilayah Kab. Trenggalek melalui forum lalu lintas (FORLANTAS)
- Pembinaan, pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas dan awak kendaraan umum teladan
- Penyediaan regulasi dan perencanaan pembangunan kepariwisataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata
- Penyelenggaraan promosi wisata secara langsung, melalui media sosial, media masa, pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan lembaga pemasaran pariwisata, pameran, dan diversifikasi atraksi serta produk industri pariwisata
- Peningkatan peran serta masyarakat dan kualitas pelaku wisata

4. **Misi Keempat** : Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

Kebijakan Umum :

- Peningkatan produktivitas dan kualitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan
- Penyebarluasan informasi kesempatan kerja dan bursa kerja, serta pengembangan wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha
- Penegakan norma ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
- Pengendalian, pengawasan dan transparasi pelayanan perizinan
- Peningkatan informasi secara transparan tentang pelayanan perizinan, investasi dan produk unggulan daerah
- Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan
- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Penumbuhan dan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, akses permodalan, jaringan pemasaran, kemitraan dan pembinaan serta pengawasan koperasi
- Penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kualitas kelembagaan, permodalan, jaringan pemasaran, kemitraan, penggunaan teknologi, diversifikasi dan standarisasi produk UMKM
- Penumbuhan IKM baru dan peningkatan mutu, variasi, daya saing produk, penerapan teknologi baru dan legalitas IKM
- Penerapan Trenggalek Gemilang (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) dengan pendekatan komunal *branding*
- Spesialisasi ekonomi pada produksi hilir
- Eksposisi dan penyusunan konsep display produk berbasis daya tarik wisata
- Peningkatan pengawasan barang beredar, UTTP yang standar, stabilisasi harga, promosi, revitalisasi pasar rakyat dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Menuju pasar mandiri lewat program sekolah pasar dan revitalisasi pasar berbasis destinasi wisata belanja
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup
- Pengawasan terhadap pantaatan hukum lingkungan hidup
- Pemantuan terhadap kualitas lingkungan hidup
- Penyelenggaraan gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (*My DarLing*)
- Manajemen Bank sampah dan *Bio-Engineering*
- *Green Invesment*
- Penyelesaian kasus hukum lingkungan dengan pengenaan sanksi administrasi
- Pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat

- Pemberian pembinaan dan dukungan kepada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian alam
- Reklamasi terhadap kerusakan lingkungan, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis dan sumber mata air
- Pelestarian tanaman langka
- Pemeliharaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan
- Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta peningkatan bangunan konservasi
- *Piloting* tanaman bawah tegakan nilai ekonomis tinggi berorientasi pendekatan pasar dan kapasitas produksi, serta menyiapkan produksi hilir dibawah naungan koperasi pertanian
- Peningkatan kesadaran, ketrampilan, IPTEK dan penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan
- Peningkatan cakupan pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*) khususnya : *mikrohydro*, solar, angin dan *biofuel*.
- Peningkatan peran serta aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam managemen penanggulangan bencana dan kebakaran
- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
- Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran

5. **Misi Kelima** : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

Kebijakan Umum :

- Peningkatan peran serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam Pembangunan
- Peningkatkan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Pengendalian kuantitas penduduk
- Peningkatan kepesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi
- Pembangunan keluarga melalui peningkatan peran serta Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)
- Pelatihan SDM aparatur dan penerapan sistem tata kelola pemerintahan desa
- Penguatan fungsi kelembagaan desa dan kemasyarakatan melalui Bulan Bakti Gotong Royong dan Lomba Desa
- Implementasi Desa Adopsi dan Ngantor di Desa
- Pemberian *Soetran Award* untuk Kepala Desa berprestasi
- Sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan desa
- Mempermudah akses usaha ekonomi masyarakat desa melalui keikutsertaan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Memfasilitasi tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal

- Memaksimalkan lembaga-lembaga keuangan mikro desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Meningkatkan sinergitas kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program pembangunan nasional, provinsi dan daerah sekitar
- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan lembaga lainnya dalam upaya percepatan pembangunan daerah
- Pelaksanaan kajian/penelitian yang mendukung pembangunan daerah
- Penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- Pelaksanaan penelitian dan diskusi publik yang melibatkan stakeholders terkait dan tim ahli baik itu dengan Lembaga Independen maupun dengan Perguruan Tinggi
- Optimalisasi peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan daerah

6. **Misi Keenam** : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;

Kebijakan Umum :

- Pembinaan kelompok seni/budaya serta penyelenggaraan event dan gelar seni
- Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesenian, penyediaan sarana dan prasarana pelestarian, ekspresi dan apresiasi seni/budaya
- Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi kepemudaan
- Penyelenggaraan pembinaan pemuda di bidang kepemimpinan. kepeloporan, bela negara dan kewirausahaan
- Mendorong partisipasi pemuda dan komunitas dalam kegiatan kompetisi, apresiasi pemuda dan kegiatan kepemudaan
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
- Penyelenggaraan pembinaan untuk meningkatkan kualitas organisasi olahraga dan pelaku olahraga
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga
- Peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka
- Promosi gemar membaca ke masyarakat dengan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)
- Promosi Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana" ke masyarakat
- Menerapkan *e-library* agar memudahkan orang untuk mengakses katalog
- Peningkatan sarana prasarana perpustakaan agar menjadi destinasi wisata literasi yang nyaman
- Peningkatan pemberdayaan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang perpustakaan
- Peningkatan kerja sama dengan Unsur Penyelenggaran Kamtibmas melalui Forum Kewasdaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Inteljen Daerah (Kominda) dalam menciptakan keamanan dan Ketertiban

- ❖ Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat melalui Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan.
- ❖ Peningkatan Kerjasama Penegakan Supermasi Hukum dengan Instansi terkait yang membidangi Penegakan Hukum dan HAM
- ❖ Peningkatan Validasi data dan pengawasan Ormas/LSM
- ❖ Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Tokoh Agama dan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- ❖ Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosilisasi pendidikan politik.
- ❖ Peningkatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu.
- ❖ Penyusunan Tim Koordinasi Terpadu dan regulasi daerah mengenai P4GN (Penyalahgunaan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba)
- ❖ Penegakan Perundang-undangan Daerah
- ❖ Peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan linmas
- ❖ Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
- ❖ Intensifikasi penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat (BAZ), diutamakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- ❖ Pelibatan ulama atau pemuka agama dalam pembahasan dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan sosial masyarakat

7. **Misi Ketujuh** : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kebijakan Umum :

- ❖ Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional
- ❖ Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Satu Pintu
- ❖ Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*)
- ❖ Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan
- ❖ Penerapan prinsip Gotong Royong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
- ❖ Implementasi program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dari level desa hingga kabupaten
- ❖ Pemberdayaan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan PMKS lainnya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- ❖ Peningkatan dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta eks penderita penyakit kronis

- Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik) dan Korban Pasung, serta peningkatan upaya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar/berhadapan hukum/diperlakukan salah, perempuan terlantar/berhadapan hukum/diperlakukan salah
- Penanganan korban bencana melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan shelter
- Pembinaan sosial dan pelatihan Ketrampilan bagi anak/remaja terlantar luar panti
- Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar dalam panti
- Pembinaan sosial, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat
- Pembinaan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial
- Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peningkatan nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial
- Pemberangkatan transmigran dan pelatihan ketrampilan/berusaha bagi calon transmigran

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah dirumuskan kebijakan umum, maka ditentukanlah program pembangunan daerah. Berbagai program prioritas yang telah dipilih melalui beberapa tahap pembahasan pada masing-masing strategi, akan dijabarkan dalam program-program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat masing-masing strategi untuk menunjukkan alur strategi dan kelogisannya dalam mencapai sasaran terkait.

Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan pendekatan perencanaan holistik-tematik dengan menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan Holistik – Tematik

Pengertian Holistik adalah suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata *holistic* ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Jika kata *holistic* ini dipakai dalam rangka pelayanan kepada orang lain, maka mempunyai arti layanan yang diberikan kepada sesama atau manusia secara utuh, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual yang mendapatkan perhatian seimbang.

Pengertian Tematik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tema (pokok permasalahan). Pendekatan tematik diartikan sebagai suatu sistem yang menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan / terpusat pada satu pokok permasalahan / tema, sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah.

2) Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.

3) Pendekatan Spasial

Spasial diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah atau wilayah sebagai suatu entitas (kesatuan) bebas yang pengembangannya tidak terkait dengan kota, daerah atau wilayah lain.

Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah bersifat mandiri, meskipun pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu dan dapat digunakan sebagai bagian dari pola pembangunan nasional, akan tetapi pembangunan di daerah juga merupakan instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah. Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan kebijakan penataan ruang. Untuk mendukung upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan 5 (lima) Program Lintas Perangkat daerah dan 8 (delapan) Program Kewilayahan sebagai implementasi pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana **Gambar** berikut.



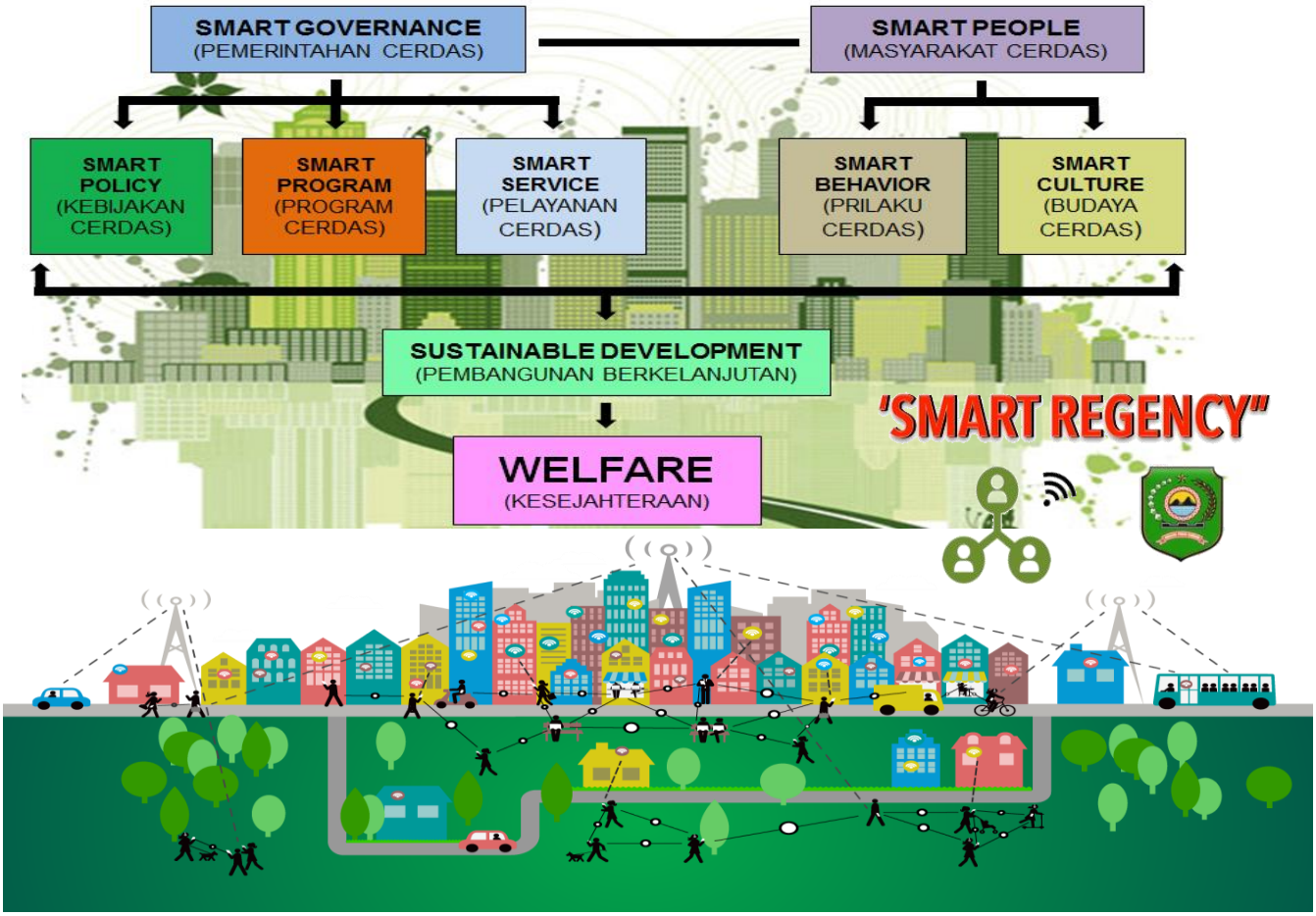


Gambar VII-2. Perencanaaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

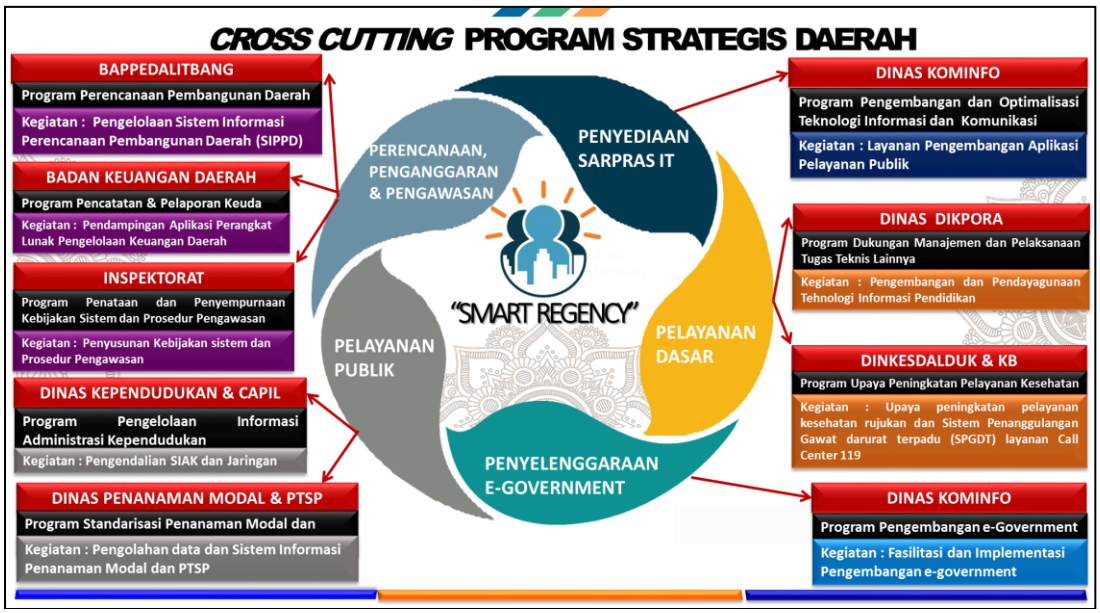
7.2.1. Program Lintas Perangkat Daerah

SMART REGENCY

"SMART REGENCY" merupakan konsep kabupaten cerdas untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan dilakukan dengan efisien dan memanfaatkan teknologi. Hal itu untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Konsep **"SMART REGENCY"** dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sebenarnya ini merupakan ungkapan untuk sebuah daerah yang dapat mengoptimalkan teknologi untuk sistem pemerintahan dan komunikasi antara warga masayarakat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengetahui kebutuhan, keluh kesah, atau usulan-usulan aspirasi dari warga secara langsung. Pemerintah perlu mengetahui "suara akar rumput" langsung dari masyarakat dengan ini pelayanan pemerintahan ke masyarakat akan menjadi lebih tepat sasaran, karena kebijakan pemerintah akan sesuai dengan keinginan warga. Laporan kejadian-kejadian di wilayah daerah juga langsung dapat dikirimkan oleh individu masyarakat langsung kepada Pemerintah Daerah. Skema makro impementasi dan Cross Cutting Program "SMART REGENCY" disajikan sebagaimana **Gambar** dibawah ini.



Gambar VII-3. Skema " SMART REGENCY" di Kabupaten Trenggalek



Gambar VII-4. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*Smart Regency*"

Dalam mendukung Program **SMART REGENCY**, ada 2 (dua) sasaran utama yaitu mewujudkan pemerintahan cerdas (***Smart Governance***) dan masyarakat yang cerdas (***Smart People***). Untuk ***Smart Governance*** terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan Cerdas (*Smart Policy*), Program Cerdas (*Smart Program*), Pelayanan Cerdas (*Smart Service*). Sementara Untuk ***Smart People*** terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Perilaku Cerdas (*Smart Behaviour*) dan Budaya Cerdas (*Smart Culture*). Program ini dijalankan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Program SMART REGENCY ini didukung beberapa sub program lintas perangkat daerah seperti Reformasi Birokrasi, WAJAR 12 Tahun, GERBANG ANGKASA BIRU, GENCAR, Kabupaten Layak Anak, PATEN, dan P4GN.

✓ **REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan tidak justru melenceng dari yang diagendakan.

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand Design Reformasi Birokrasi* Indonesia adalah "**Terwujudnya pemerintahan kelas dunia**". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025.

Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil refomasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek maka harus mengacu 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang ada pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelakansaan refomasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9 (Sembilan) Program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

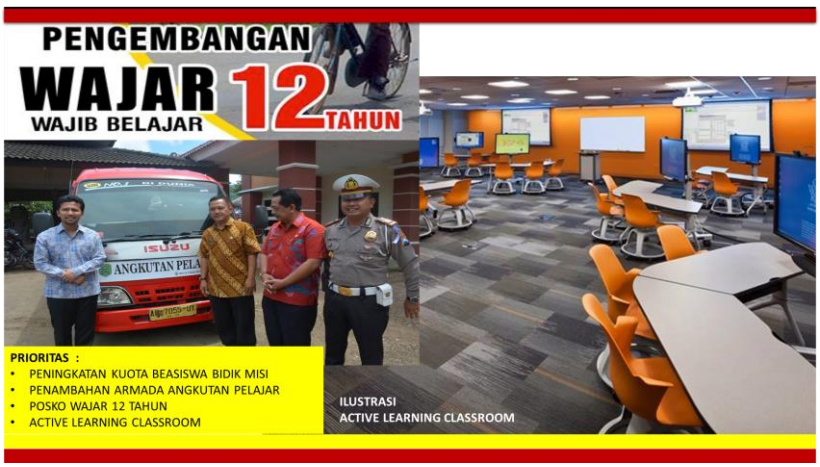
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Keterbukaan informasi public sebagai wujud *good governance* harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaraanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

✓ **WAJAR (Wajib Belajar) 12 Tahun**

Pada prinsipnya sudah menjadi keharusan untuk menyukseskan Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun karena program ini juga merupakan program Provinsi Jawa Timur. Sehingga meskipun mulai Tahun 2017 kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) berada di pemerintah propinsi, tetapi terkait koordinasi penjaringan terhadap anak usia SMA/SMK dalam upaya pemerataan akses kita tidak lepas begitu saja. Hal ini sudah dimulai dengan membentuk posko WAJAR 12 Tahun yang bertempat di UDPK se Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan adanya posko ini terjadi sinergi kegiatan antara pihak terkait yaitu : Camat, Kades/Lurah, kepala SMP/MTs dalam melacak dan mengarahkan lulusan SMP/MTs/Paket B untuk melanjutkan pendidikan, terutama untuk anak-anak yang tidak mampu. Di posko ini pula bisa diperoleh informasi fasilitasi pemerintah terhadap penyuksesan WAJAR 12 Tahun, seperti peran BOS, Program Indonesia Pintar, untuk membantu siswa dalam menyelesaikan sekolah di tingkat SMA/SMK/MA maupun Paket C. Selanjutnya ke depan telah direncanakan lebih lanjut sejenis kelompok kerja (Pokja) yang membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Angka Transisi (melanjutkan) dan APK pendidikan menengah hingga WAJAR 12 Tahun bisa tercapai dengan segera.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan WAJAR 12 tahun tahun di Kabupaten Trenggalek. Yaitu, sisi legislasinya, prakteknya, dan konsep dasarnya. Dalam hal legislasi, pemerintah daerah juga harus menunggu revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat menguatkan regulasi yang mengatur Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada sisi prakteknya, masih ada hambatan dalam hal infrastruktur baik kualitas dan kuantitas. Dalam hal konsep dasar, diharapkan program WAJAR 12 tahun tidak hanya dilihat dari jumlah sekolah menengah atas saja, karena ilmu itu bisa didapatkan dalam pelatihan kerja, atau sekolah informal lainnya. Sudah banyak masyarakat yang memberikan perhatian kepada pendidikan setingkat sekolah menengah atas utamanya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam peningkatan sarana dan prasarana di sektor pendidikan akan dikembangkan konsep *Active Learning Classroom (ACL)* yang merupakan upaya menciptakan ruang kelas yang medorong konsep pembelajar aktif dimana desain pembelajaran berbasis *team work collaboration*, diskusi studi kasus dan didukung perangkat multimedia mutakhir yang akan mencetak lulusan yang meiliki kompetensi unggul dan kreatif.



Gambar VII-5. Ilustrasi Pengembangan WAJAR 12 Tahun

- ✓ **GERBANG ANGKASA BIRU** (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

Sinergi kebijakan perencanaan bidang kesehatan di Tingkat Nasional dan di Tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten merupakan salah satu strategi dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB). Meskipun AKI dan AKB di Kabupaten Trenggalek lebih rendah daripada angka Kematian Provinsi Jawa Timur, namun masih belum bisa diturunkan (stagnan).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2015/2016 di munculkan inovasi Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Akselerasi Penurunan Angka Kesakitan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir yang disingkat GERBANG ANGKASA BIRU. Gerbang Angkasa Biru merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan (sebagai sumber daya manusia) melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Trenggalek.



Gambar VII-6. Skema "GERBANG ANGKASA BIRU"

Anak kerdil (stunting) yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Trenggalek ternyata tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 % tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. 10 (sepuluh) desa yang dikategorikan desa stunting di Kabupaten Trenggalek yaitu : Desa Botoputih Kecamatan Bendungan, Desa Kayen Kecamatan Karangan, Desa Cakul Kecamatan Dongko, Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan, Desa Puru, Nglebo, Ngrandu dan Mlinjon Kecamatan Suruh.

Kerangka Intervensi Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu : **Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif**.

1. Kerangka Intervensi Stunting yang pertama adalah **Intervensi Gizi Spesifik**. Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan **berkontribusi pada 30% penurunan stunting**. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita diantaranya :
   a. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil;
   b. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan;
   c. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.
2. Kerangka Intervensi Stunting yang kedua adalah **Intervensi Gizi Sensitif**. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan **berkontribusi pada 70% Intervensi Stunting**. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik sebagai berikut:
   a. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
   b. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
   c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
   d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
   e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   f. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
   g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
   h. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal;
   i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
   j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
   k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
   l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

✓ **GEMA MELEKAT** (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat)

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui **"FORUM"** atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut **"FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT"** atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Forum Kabupaten Trenggalek Sehat adalah wadah bagi masyarakat Trenggalek untuk menyalurkan aspirasinya dan berpatisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya. Tujuan dibentuknya Forum Kabupaten Trenggalek Sehat adalah Tercapainya kondisi Kabupaten Trenggalek yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja dan berkarya bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program pembangunan berwawasan kesehatan, sehingga dapat maningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui perberdayaan forum yang disepakati masyarakat.
2. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah kabupaten dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujutkan sinergi pembangunan yang baik.
3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten tersebut secara mandiri.
4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menigkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik.

Untuk mendukung kinerja Forum Kabupaten Trenggalek Sehat, dibentuk **"TIM PEMBINA KABUPATEN TRENGGALEK SEHAT"** untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah, yang *dikoordinasikan oleh* Kepala Badan Perencanaan Daerah dengan anggota dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Selain itu juga dibentuk **Forum Komunikasi Desa Sehat** yang merupakan wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya diwilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa Sehat untuk mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.

Kelompok Kerja (pokja) Desa Sehat merupakan wadah bagi masyarakat desa / kelurahan di kecamatan perkotaan / di pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja. Program Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan yang ditetapkan dikelompokkan dalam 9 (sembilan) tatanan berdasarkan tatanan/kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut :

1. **Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat**
2. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi sehat
3. Tatanan Pertambangan Sehat
4. Tatanan Hutan Sehat *)
5. Tatanan Industri & Perkantoran yang Sehat
6. **Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat**
7. **Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi**
8. **Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri**
9. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat *).

Program Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Trenggalek dimulai Tahun 2006 dengan fokus kegiatan pembentukan kelembagaan meliputi kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat dan menyepakati dua tatanan Kabupaten Sehat yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri dan tatanan pariwisata sehat dan menjadikan sembilan kecamatan sebagai wilayah implementasi Program Kabupaten Sehat. Kegiatan ini sempat vakum beberapa tahun dan pada Tahun 2012 mulai dihidupkan kembali dengan mereorganisasi kelembagaan di tingkat kabupaten. Pada perkembangannya berdasarkan evaluasi dari provinsi bahwasannya kabupaten/kota yang baru mengikuti program Kabupaten Sehat diwajibkan untuk mengimplementasikan **2 (dua) tatanan wajib** yakni **tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri** dan **tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat**. Sehingga tatanan pariwisata sehat dirubah menjadi tatanan permukiman sarana dan prasarana sehat.

Selanjutnya ditingkat kabupaten dilaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh Perangkat Daerah Tim Pembina dan Kecamatan yang dipimpin langsung oleh bapak Bupati Trenggalek. Di tingkat kecamatan juga telah dilaksanakan sosialisasi dan pembentukan kelembagaan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Di tingkat desa/kelurahan dibentuk pula kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat yang diputuskan oleh Surat Keputusan Bupati. Pada Tahun 2015 disepakati untuk menambah wilayah tatanan di tingkat kecamatan dan desa yakni Kecamatan Karangan sehingga program Kabupaten Sehat telah mengadop 10 kecamatan dan 63 desa/kelurahan. Pada Tahun 2015, untuk pertama kalinya Forum Trenggalek Sehat mengikuti Verifikasi Tingkat Nasional Program Kabupaten/Kota Sehat, dan pada akhir tahun 2015 Kabupaten Trenggalek berhasil meraih Penghargaan Tingkat Nasional Swasti Saba Padapa.

Pada Tahun 2016-2017 Kabupaten Trenggalek juga telah berhasil meraih Penghargaan Tingkat Nasional Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan) dimana telah lolos verifikasi tingkat nasional dengan mengimplementasikan 4 (empat) tatanan yaitu : **Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat, Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat, Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi**, dan **Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri.**



Gambar VII-7. Jejaring Program Kab/Kota Sehat

Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan diberikan oleh Pemerintah pada Bulan November
dalam rangka peringatan hari kesehatan Nasional

Ada 3 penghargaan yang diberikan Pemerintah dalam Pelaksanaan Kab./Kota Sehat, Yaitu :

1. PADAPA (Pemantapan) *)
   Minimal 2 tatanan (Tatanan 1 dan 8)
2. WIWERDA (Pembinaan)
   3 – 4 tatanan
3. WISTARA (Pengembangan)
   > 5 tatanan



Gambar VII-8. Implementasi "GEMA MELEKAT"



Gambar VII-9. Arah Pembangunan Sektor Kesehatan

Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati, sehingga program promosi kesehatan akan menjadi prioritas di sektor kesehatan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas perlu diimbangi dengan peningkatan manajemen layanan sesuai standar (akreditasi). Beberapa puskesmas dapat ditingkatkan kualitas pelayanan sebagai Puskesmas Plus sebagai rintisan RSUD seperti Puskesmas Panggul dan Baruharjo, sedangkan Puskesmas Watulimo akan dikembangkan menjadi Puskesmas Wisata karena berada di lokasi pariwisata. Puskesmas-puskesmas lainnya juga dapat dikembangkan menjadi puskesmas ramah anak atau dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal wilayah. RSUD dr. Soedomo yang menjadi satu satunya Rumah Sakit milik pemerintah daerah, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya serta perbaikan manajemen layanan sesuai standar, serta pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan dokter umum. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dimungkinkan dapat dibiayai dari dana Non APBD baik dana dari pusat maupun dana pinjaman.



Gambar VII-10. Ilustrasi Pengembangan RSUD dr. Soedomo Trenggalek

✓ **GENCAR (Generasi Gemar Baca dan Pintar)**

Tradisi membaca di kalangan masyarakat yang terbilang masih rendah perlu mendapat perhatian serius dari seluruh kalangan hingga level desa/kelurahan. Program budaya baca bukan sekadar membangun atau mempercantik perpustakaan. Program budaya baca juga bukan sekadar menambah koleksi buku. Program budaya baca adalah sebuah upaya untuk membuat anak suka membaca. Diantaranya adalah melalui kegiatan pembiasaan membaca dan mendekatkan bahan bacaan kepada para siswa, Mobil Perpustakaan Keliling, pengembangan perpustakaan desa, Rumah Pintar, dan pelaksanaan kegiatan literasi untuk masyarakat.



Gambar VII-11. Dokumentasi "GENCAR"

✓ **Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat , keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintah yang mengarah pada upaya transformasi **Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of Child*)** dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembanganunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu daerah.

Faktor-Faktor Kunci Yang Menetukan Keberhasilan Kabupaten Layak Anak :

1. Adanya Kebijakan, Dukungan Politis dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kota/Kab sampai Kelurahan dan Desa;
2. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak;
3. Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai;
4. Anak anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan;
5. Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, Media, Swasta, Toma dan Toga dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri;
6. Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku kewajiban;
7. Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan pelaporan;
8. Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan, dsb;
9. Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan;
10. Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/Lurah

Tabel VII-1. Stakeholder yang terlibat dalam Program KLA

NO.	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PERAN
1.	FORKOPIMDA (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim 0806, Kapolres, Kajati, Ketua PN)	Pelindung Gugus Tugas KLA
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang)	Ketua Gugus Tugas KLA
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)	Ketua Harian Gugus Tugas KLA
5.	Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, Bag Adm Pemerintahan, Kabid Sosbud dan Pemerintahan Bappedalitbang, Kasubid Sosial dan Kesra Bappedalitbang, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A, dan Kasubid Perlindungan Anak Dinsos P3A	Gugus Penguatan Kelembagaan
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra, PN Trenggalek, Dispendukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Kesbangpol, Bag Hukum Setda, Bag Protokol dan Rumah Tangga Setda, Camat, Ketua IBI	Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan
7.	Ketua Korpri, Disnakertransos, Kementerian Agama, Bag Kesra, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua DWP, Ketua GOW, KADIN, Bank Jatim, BRI, BNI, BPR Jwalita, Bank Jatim, STKIP, Koalisi Perempuan Indonesia	Gugus Tugas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
8.	Dinas Kesehatan Dalduk KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komidag, Dinas Pertanian dan Pangan, Bag Kesra, RSUD, IDI, IBI, PPNI, PMI, Pokja IV PKK, Telkom, Ketua Forum Trenggalek Sehat	Gugus Tugas Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
9.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PU BMP, Dinas PU Perkimsih, Dinas Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dewan Kesenian, Pokja II PKK, IGTKI, HIMPAUDI, Forum PAUD, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musker Kasek SMP dan SMA, Sanggar Tari	Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
10.	Dinas Sosial P3A, Polres, Kejaksaan, BPBD, Rutan, Satpol PP dan Kebakaran, Bag Kesra, BNN, Kasek SLB, Kepala SD, SMP, SMA Inklusi, Pokja I Tim Penggerak PKK, Ketua Bhayangkari, FOKAT	Gugus Tugas Perlindungan Khusus

✓ **Penanggulangan Bencana**

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang sangat berpotensi terhadap berbagai macam bencana, diantaranya:

a. Gempa Bumi

Tingkat risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Trenggalek cukup bervariasi, dimana daerah dengan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi tersebar di seluruh wilayah Trenggalek. Untuk daratan Trenggalek, tingkat risiko tinggi terkonsentrasi di wilayah Trenggalek, Durenan, Gandusari, Pule dan Dongko.

b. Tsunami

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1.689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2.145 ha.

c. Longsor

Terdapat dua faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Risiko bencana longsor di Kabupaten Trenggalek terbagi atas 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi; namun secara umum risiko bencana ini di wilayah Trenggalek adalah sedang. Tingkat risiko tinggi berada di wilayah Kecamatan Bendungan Pogalan, Durenan, Karangan, Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Trenggalek dan Pule.

a. Banjir

Kondisi fisiografis Kabupaten Trenggalek yang dilalui oleh sungai-sungai besar telah berkontribusi pada tingginya resiko bencana banjir di wilayah ini, termasuk banjir yang diiringi oleh tanah longsor.

Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah. Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar ± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan.

Luasan kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan.

b. **Angin Puting Beliung**

Angin puting beliung adalah badai besar yang terjadi di laut tropis dan sub tropis. Untuk angin puting beliung, tingkat risiko bencana ini di wilayah Kabupaten Trenggalek secara umum dikategorikan ke dalam tingkat sedang. Namun masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi, antara lain di wilayah Durenan, Pogalan, Gandusari, Kampak, Trenggalek, Bendungan, Karangan dan Tugu.

c. Kawasan Kekeringan

Wilayah Kabupaten Trenggalek yang rawan kekeringan meliputi beberapa Kecamatan : Kecamatan Bendungan, Pogalan, Kampak, Watulimo, Suruh, Karangan, Pule, Panggul, Dongko, Munjungan, Trenggalek, Tugu dan Durenan.

Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Permasalahan utama dari akibat konversi lahan ini adalah munculnya lahan kritis yang berdampak buruk bagi lahan tersebu. Dampak adanya lahan kritis ini adalah kekeringan panjang terjadi dimusim kemarau dan banjir serta longsor di musim hujan. Sampai saat ini masalah banjir di musim penghujan dan masalah kekeringan di musim kemarau menjadi permasalahan di sebagian wilayah di Kabupaten Trenggalek.



Gambar VII-12. Dokumentasi Penyaluran Air Bersih Saat Kekeringan

Kabupaten Trenggalek memiliki kondisi wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dan hutan, sedangkan yang berupa dataran berada di daerah yang rendah. Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dengan demikian keberadaan pegunungan dan hutan sangat mempengaruhi kondisi sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek, demikian juga halnya terhadap kondisi sumber daya air. Terlebih lagi hidrogeologi wilayah Kabupaten Trenggalek sebagian besar (sekitar 81%) mempunyai produktivitas air yang rendah/langka. Daerah ini berada di daerah pegunungan, sedangkan daerah dengan produktivitas air tinggi berada di sebagian kecil Kecamatan Bendungan yang merupakan hulu Sungai Ngasinan. Sungai ini merupakan sungai terbesar yang ada dan merupakan muara bagi sebagian besar sungai di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian perubahan fungsi lahan di kawasan hulu DAS terutama dari hutan, berdampak pada berkurangnya fungsi resapan air dan meningkatnya perbedaan debit maksimum minimum, erosi dan sedimentasi. Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali akan meningkatkan potensi bahaya banjir, kekeringan dan tanah longsor. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sumber daya air. Penurunan fungsi hidrologi kawasan hutan di Kabupaten Trenggalek diantaranya disebabkan oleh penebangan pohon di hutan kawasan Perhutani yang tidak segera dihutankan kembali. Untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan cara menghutankan kembali kawasan hutan yang gundul dan rusak.

Selain Konversi Lahan, dampak El Nino yang melanda Kawasan Asia Tenggara dekade terakhir menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Kemarau panjang yang terjadi mengakibatkan kekeringan di 13 wilayah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Dari 13 daerah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Trenggalek, Kecamataan Panggul dan Kecamatan Suruh merupakan wilayah yang berpotensi kekeringan paling banyak yakni 6 (enam) desa, sedangkan selanjutnya adalah Kecamatan Dongko, Kecamatan Karangan dan Kecamatan Pule masing-masing 4 (empat) desa.

Berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/1072/406.004/2014 tentang Perubahan Atas Putusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/997/406.004/2014 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan terdapat 63 Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek mengalami dampak kekeringan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan akibat musim kemarau telah meluas ke beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek, yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Desa dan Kecamatan yang mengalami kekeringan tersebut diantaranya :

a. Kecamatan Panggul, yakni Desa Besuki, Desa Ngrencak, Desa Karangtengah, Desa Terbis, Desa Panggul dan Desa Ngrambingan;
b. Kecamatan Dongko, yakni Desa Cakul, Desa Petung, Desa Pandean, Desa Salamwates dan Desa Dongko;
c. Kecamatan Suruh yakni Desa Mlinjon, Desa Puru, Desa Wonokerto, Desa Ngrandu, Desa Gamping dan Desa Suruh;
d. Kecamatan Kampak yakni Desa Timahan, Desa Ngadimulyo dan Desa Bogoran.
e. Kecamatan Tugu yakni Desa Ngepeh, Desa Duren, Desa Gading dan Desa Prambon
f. Kecamatan Watulimo yakni Desa Watulimo, Desa Watuagung, Desa Ngembel, Desa Dukuh dan Desa Gemaharjo;
g. Kecamatan Karangan yakni Desa Kayen, Desa Jatiprahu, Desa Sumber, Desa Kangarangan, Desa Ngentrong dan Desa Prambon;

h. Kecamatan Bendungan yakni Desa Sengon dan Desa Depok;
i. Kecamatan Trenggalek yakni Desa Sumberdadi dan Desa Parakan;
j. Kecamatan Pogalan yakni Desa Pogalan;
k. Kecamatan Pule yakni Desa Sukokidul, Desa Puyung, Desa Sidomulyo, Desa Joho, Desa Kembangan, dan Desa Karanganyar
l. Kecamatan Munjungan yakni Desa Sobo, Desa Ngulungkulon, Desa Ngulungwetan, Desa Besuki, Desa Munjungan, Desa Karangturi dan Desa Tawing; dan
m. Kecamatan Durenan, yakni Desa Gador.



Gambar VII-13. Dokumentasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

✓ **PATEN** (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan)

Sejalan dengan era otonomi daerah, perubahan konsep penyelenggaraan publik atau **PATEN** mewujudkan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang Iebih cepat, mudah, tidak diskriminatif dan transparan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang disingkat **PATEN**, merupakan inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perijinan/non perijinan di tingkat Kecamatan, utamanya bagi kecamatan yang Ietaknya jauh dari ibukota Kabupaten/Kota dan sulit dijangkau karena faktor geografis dan infrastruktur yang masih belum memadai.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (**PATEN**) bahwa pada seluruh Kecamatan se Indonesia pada Tahun 2014 di harapkan sudah dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan **(PATEN**). Perbaikan fasilitas kecamatan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan. Seluruh kewenangan yang telah didelegasikan ke kecamatan di Kabupaten Trenggalek harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- ✓ **P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)**

Berdasarkan data pecandu Narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), terus berupaya menanggulangi masalah yang kian menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda kita. P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam implementasinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan. Tindakan ini meliputi advokasi, inseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Masyarakat dalam pilar pertama ini dibagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan addict atau pecandu yang sampai saat ini jumlahnya telah mencapai 1,98 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, dan golongan masyarakat rentan terhadap narkoba. Golongan kedua ini yang menjadi sasaran utama pilar pertama, agar jangan sampai mereka menyeberang menjadi golongan addict. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. Pilar ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, tidak hanya instansi pemerintah atau LSM, agar golongan rentan narkoba bisa menjadi imun. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan. Bentuknya dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Pilar keempat adalah rehabilitasi. Dalam tahap ini salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat seminar. Pilar kelima mencakup bidang hukum dan kerjasama. Pilar pendukung ini dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa.

Dalam mendukung Program P4GN dibutuhkan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan pembentukan Tim Koordinasi Terpadu (TKT) P4GN. Pembentukan TKT P4GN di seluruh struktur pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa-kelurahan itu mengacu pada instruksi pemerintah melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Narkoba. TKT P4GN yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perwakilan perangkat terkait selanjutnya diharapkan berperan dalam mendorong masyarakat, terutama kalangan pecandu narkoba, untuk melaporkan diri ke BNNK dan melakukan rehabilitasi secara mandiri.

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek akan bersinergi dengan BNN dan stakeholder terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi bahaya Narkoba, untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa.

PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU PLUS

Pengembangan Pertanian Terpadu adalah sebuah program unggulan di sektor Pertanian secara luas meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam rangka mewujudkan usaha pertanian yang berwawasan lingkungan. Selain dilaksanakan dengan sistim organik, usaha pertanian yang dilakukan bersifat nir limbah *(zero waste)* karena limbah yang ada akan dimanfaatkan sebagai pupuk maupun energi.

Komponen yang ada pada pengembangan pertanian terpadu setidaknya meliputi :

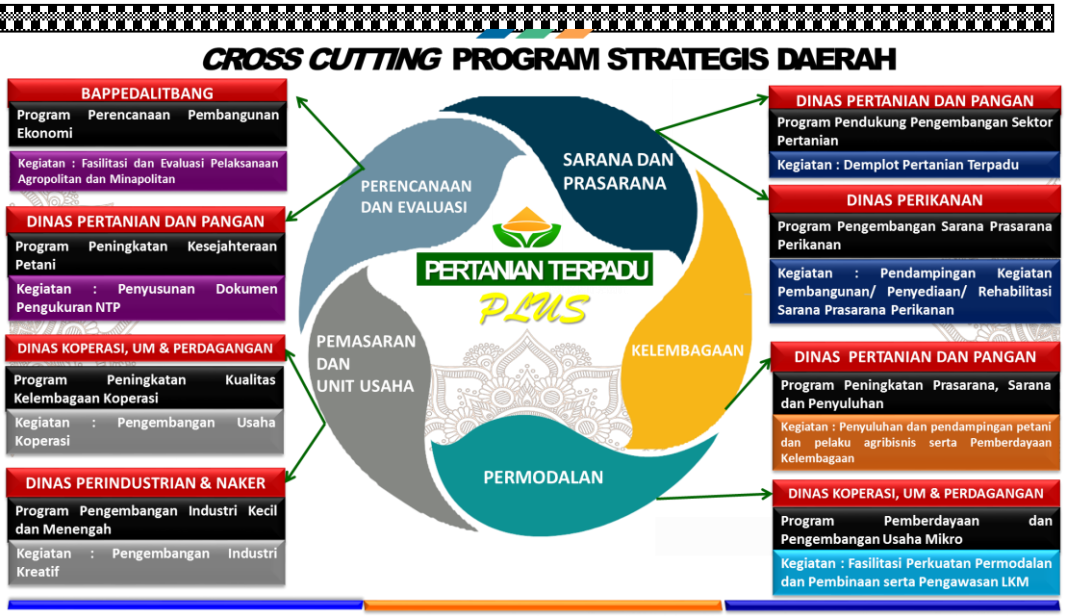
a. Usaha budidaya tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu);
b. Usaha budidaya ternak (sapi, kambing, unggas);
c. Usaha budidaya ikan (lele, gurami, nila, patin);
d. Penanaman hijauan makanan ternak;
e. Pembuatan pakan alami;
f. Pembuatan pupuk organik dari kotoran ternak dan limbah tanaman;
g. Pembuatan bio gas (bila memungkinkan);
h. Pembangunan rumah sehat ;
i. Pembangunan gedung pertemuan/sarasehan/penyuluhan/edukasi; dan
j. Sarana prasarana prasarana penunjang lainnya.

Lokasi yang dipilih sebagai percontohan adalah pada tanah asset Pemda yang memenuhi kelayakan secara teknis untuk dilaksanakan usaha pertanian terpadu. Sedangkan untuk pengembangan, inovasi pengembangan pertanian terpadu bisa diadopsi oleh masyarakat di lahan masing-masing atau pada kawasan tertentu.

Visualisasi usaha pertanian terpadu sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar VII-14. Visualisasi usaha pertanian terpadu



Gambar VII-15. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*Pertanian Terpadu Plus*"



Gambar VII-16. Ilustrasi Pengembangan Pertanian Terpadu

Adapun perencanaan kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Trenggalek disajikan sebagaimana Gambar berikut :



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2017

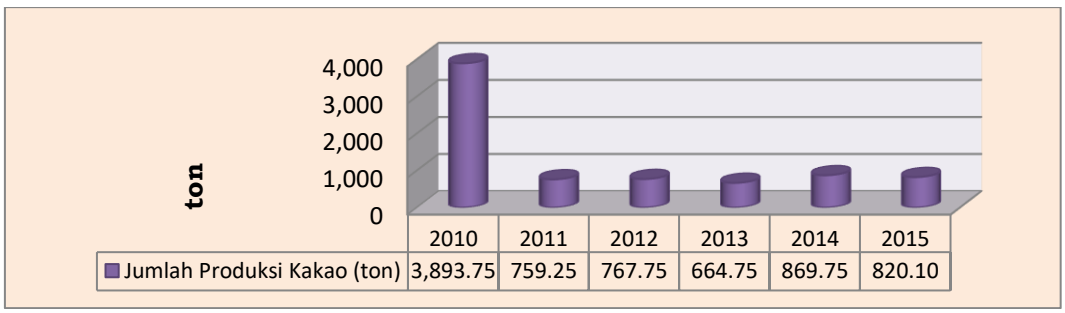
Gambar VII-17. Skema Integrasi Pengembangan Pertanian Terpadu

Program pengembangan Pertanian Terpadu Plus ini akan didukung dengan beberapa sub program lintas perangkat daerah seperti Kakao Land dan Rumah Coklat, *International Durio Forestry*, Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis, SPR dan RINTIS DESA, serta Konservasi Penyu dan Mangrove

✓ **Kakao Land dan Rumah Coklat**

Pengembangan **Kakao *Land*** pada dasarnya adalah sebuah program unggulan pada bidang perkebunan terkait dengan pengembangan potensi kakao atau yang dikenal dengan coklat di Kabupaten Trenggalek, dimana telah disusun menjadi sebuah kawasan khusus yang meliputi beberapa kecamatan, yaitu : Kecamatan Karangan, Suruh, Dongko, Kampak, Tugu dan Gandusari, dengan pusat kawasan berada di **Kecamatan Suruh.** Hamparan kebun kakao di Kecamatan Suruh direncanakan untuk menjadi tujuan **wisata edukasi** dalam rangka mempelajari lebih jauh tentang budidaya tanaman kakao. Dengan produksi kakao yang berkisar 800 ton per tahun sebagaimana dalam grafik di bawah ini, kakao berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat tingginya permintaan pasar akan biji kakao dan olahannya.

Grafik VII-1. Produksi Komoditas Kakao Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2017

Sebagai kelanjutan mata rantai agribisnis, terdapat UPH (Unit Pengolahan Hasil) Kakao di Desa Karangan Kecamatan Karangan yang telah mulai membuat produk olahan berupa coklat bubuk, coklat pasta, permen, serbuk minuman coklat 3 in 1, dan lain-lain.

Landscape telah dirancang, dan diharapkan Tahun 2018 akan dapat diwujudkan tempat **wisata edukasi** kakao yang dinamakan **"Rumah Coklat"**. Fasilitas yang direncanakan meliputi :

- Kebun kakao mini
- Tempat pengolahan kakao
- Ruang edukasi kakao
- Tempat mengolah coklat bagi pengunjung
- Kuliner serba coklat
- Toko produk olahan coklat
- Mushola
- Tempat parkir
- dll.

Ke depan diharapkan bahwa Kakao Land dan Rumah Coklat merupakan salah satu paket wisata baru yang menarik dan prospektif bagi wisatawan baik dalam maupun luar daerah. Penggambaran perencanaan dan integrasi Program adalah sebagai berikut :



Gambar VII-18.
Pengembangan Kakao Land dan Rumah Coklat

✓ ***International Durio Forestry***

Kawasan hutan durian terluas di Asia berlokasi di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo. Total ada sekitar 650 hektar lahan yang telah ditanami ribuan buah durian jenis unggul. Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mencanangkan wilayah ini sebagai Kawasan ***International Durio Forestry***. Menteri pertanian juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Lokasi Desa Sawahan sendiri selama ini telah dikenal sebagai desa penghasil durian. Produksi buah durian telah dikirim ke berbagai daerah seperti Surabaya, Malang hingga Jakarta. Sebagian besar lahan hutan durian ini berada di kawasan hutan yang terbagi hutan produksi, tanah pesanggem dan tanah milik masyarakat. Persentase 70 tanah hutan dan 30 persen tanah rakyat. Bahkan masih banyak ditemukan pohon buah durian yang berusia ratusan tahun. Salah satunya pohon durian yang ditanam Tahun 1875 jenis durian *ribbenthinum*. Pohon durian ini memiliki diameter mencapai 282 cm berlokasi petak 162 RPH Kampak Selatan. Buah durian memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga perlu dibuat *branding* pemasaran. yaitu durian unggul dari ***International Durio Forestry*** di hutan Watulimo. Diharapkan buah durian Trenggalek bisa menjadi ikon durian Indonesia.



Gambar VII-19. ***International Durio Forestry***

- ✓ **Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis**

Diutara pusat Kota Trenggalek jaman sejarah penjajahan Hindia Belanda, tepatnya di perkebunan Dilem Wilis Kecamatan Bendungan, pemerintahan saat itu mewariskan cagar budaya yang cukup mengesankan yaitu 300 Ha luasan perkebunan kopi lengkap dengan pabrik pengolahannya. Perkebunan kopi yang dulunya pernah mengalami masa kejayaan milik Van Dilem ini lama tertidur karena banyaknya faktor yang menyebabkan. Melihat potensi yang cukup besar dari perkebunan dan pabrik kopi Van Dilem, Pemerintah Trenggalek bermaksud menghidupkan kembali pabrik dan perkebunan kopi yang lama tertidur ini.

Kontruksi bangunan pabrik yang sederhana akan tetapi memiliki kekuatan dan sistematis yang cukup baik. Sayangnya pada era reformasi Tahun 1998 tumbuhan kopi peninggalan sejarah ini dibabat habis oleh warga. Menurut informasi warga pabrik ini sudah dibangun sejak Tahun 1929. Sekitar pemerintahan Hindia Belanda yang dimiliki Mr. Van Dilem. Pabrik ini merupakan pabrik yang terintegrasi yang menerapkan sistem *blue technology*, yang artinya mesin pabrik disini dirancang tidak menggunakan aliran listrik, batu bara ataupun energi lainnya, melainkan cukup menggunakan tenaga air saja. Kapasitas produksi pabrik ini dalam sehari dapat mencapai kapasitas produksi 5 ton kopi.

Ada satu varietas kopi peninggalan jaman Belanda yang masih tumbuh meskipun jarang namanya *arabika vandimir*, yang berasal dari kata arabika milik Van Menir. Varietas kopi ini terkenal sangat enak, bahkan hama buah sangat suka dengan buah kopi jenis ini. Diharapkan nantinya Kebun Kopi Van Dilem bisa menjadi sentra ekonomi rakyat yang merupakan poros pariwisata Trenggalek di wilayah Utara.



Gambar VII-20. Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis

- ✓ **Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan Rekayasa Intensifikasi Ternak Induk Sapi Pedesaan (RINTIS DESA)**

Berangkat dari kondisi peternakan saat ini yang didominasi oleh usaha peternakan skala kecil dengan ciri-ciri : rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah dan menyebar, ternak dipelihara sebagai tabungan hidup, jiwa kewirausahaan yang rendah, lahan pemeliharaan tidak jelas, usaha dilakukan secara turun menurun dan sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak, kondisi yang demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok. Alternatif solusi terhadap kenyataan diatas maka dibentuk suatu Sentra Peternakan Rakyat (SPR) untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang *feaseble*, *bankable* dan berdaya saing.

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).

Diadakannya SPR berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam SPR adalah : Satu manajemen, Penguatan pelayanan, Penguatan kelembagaan, Peningkatan SDM, Kemandirian usaha, Integrasi kewenangan, Pendampingan (Litbang dan PT), Multi produk dan komoditas. Pengembangan kawasan Sentra Peternakan Rakyat di Kabupaten Trenggalek direncanakan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang terbentuk 10 (sepuluh) SPR.

Dinas Peternakan saat ini juga sedang mengembangkan suatu inovasi dalam upaya intensifikasi induk sapi yang ada di desa yaitu **RINTIS DESA** (Rekayasa Intensifikasi Ternak Induk Sapi Pedesaan).



Gambar VII-21. Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan RINTIS DESA

✓ **Konservasi Mangrove dan Penyu**

Pada Tahun 2000 telah terjadi penebangan mangrove secara besar – besaran di Pantai Cengkrong, Desa Karanggandu, Kec. Watulimo karena masyarakat beranggapan bahwa mangrove merupakan tempat bersaranggnya nyamuk dan adanya reformasi. Pada Tahun 2002 masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) "Kejung Samudra" melakukan pemeiharaan dan penanaman mangrove, sehingga kondisi mangrove bisa pulih kembali.

Setelah adanya POKMASWAS tersebut kondisi kawasan mangrove semakin tahun semakin bagus, sehingga atas permohonan POKMASWAS, Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2012 membuat jembatan pantau dengan tujuan untuk mempermudah Pokmaswas dalam melakukan pengawasan mangrove.

Dengan adanya jembatan tersebut menimbulkan adanya ekowisata mangrove yang semakin tahun semakin banyak dikunjungi para wisatawan,sehingga menimbulkan permasalahan baru, karena semakin banyak orang yang membuat kios/bangunan untuk berjualan dan mendirikan MCK, sehingga kawasan cengkrong perlu dibenahi dan ditata ulang.

Dari kenyataan terebut di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani, karena kawasan konservasi mangrove berada di kawasan Perhutani dengan luasan seitar 50 Ha dan pada saat sekarang telah dibahas mengenai Perjanjian Kerjasamanya oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek. Semoga dengan adanya Perjajnian Kerjasama nantinya kawasan Cengkrong bisa ditata dengan rapi dan keberadaan POKMASWAS tidak akan tersisih, karena POKMASWAS yang telah merintis cengkrong, sehingga menjadi baik seperti saat ini.



Gambar VII-22. Dokumentasi Konservasi Mangrove

Konservasi penyu Taman Kili – Kili berada di Desa Wonocoyo, Kec. Panggul dengan luas areal sekitar 25 Ha di atas tanah milik perhutan (Tanah TN). Penyu (Pasiran) yang sering ditemukan di Taman Kili-Kili selama ini ada 3 (tiga) jenis. Diantaranya penyu hijau atau dikenal dengan nama *green turtle (Chelonia mydas*), penyu sisik atau dikenal dengan nama *Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)* dan penyu belimbing atau dikenal dengan nama *Leatherback turtle (Dermochelys olivacea).* Dari ketiga jenis itu, Penyu Belimbing adalah penyu terbesar yang pernah mereka temukan. Dengan ukuran sekitar 2 (dua) meter dengan berat kurang lebih 700 – 800 kg.

Karena kurangnya pemahaman bahwa Penyu termasuk hewan yang dilindungi maka sering kali yang dilakukan masyarakat ketika menjumpai Penyu bertelur adalah mengambil telur-telurnya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Setiap tahunnya menurut pengakuan mereka tidak kurang dari 40 sarang telur Penyu yang ditemukan dan diambil. Rata-rata setiap sarangnya tidak kurang dari seratus butir telur. Namun setelah diadakan Workshop Konservasi Penyu dari Pihak Pemerintah di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek pada tanggal 18 – 19 Mei 2011, dimana dalam Workshop tersebut dipaparkan bahwa Penyu merupakan hewan yang keberadaannya sangat rentan dan dilindungi tidak hanya tingkat Nasional tetapi juga ditingkat Internasional.

Setelah mengikuti Workshop tersebut, maka mereka sepakat untuk menjaga penyu dan membuat tempat konservasi penyu, sehingga pada Tahun 2011 dimulailah kegiatan konservasi dan sampai sekarang kegiatan makin eksis, hingga Tahun 2015 sudah ada ± 110 ekor induk penyu yang bertelur dan sudah melepas tukik (anak Penyu) ± 10.000 ekor. Adapun sarana yang sudah ada adalah pos jaga, pagar keliling tempat pemeliharaan tukik, kolam fiber, rumah tempat bak fiber serta kanopi untuk keamanan rumah tempat pemeliharaan tukik.



Gambar VII-23. Dokumentasi Konservasi Penyu

TRENGGALEK MEMBANGUN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnyapun kurang optimal. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari aksesbilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi dan tranportasi.

Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan perkembangan daerah otonom terutama dari segi demografi. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar juga akan meningkat. Permintaan akan kebutuhan infrastruktur mendasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, dan air minum akan meningkat. Selain itu isu lainnya yang dihadapi oleh daerah yang mulai berkembang adalah permukiman kumuh termasuk rumah yang tidak layak huni. Atas dasar kondisi inilah, pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai tahun 2017 melakukan pengukuran atas kinerja palayanan dasar kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur terdiri atas sejumlah variabel sektor yang dianggap mewakili kualitas pembangunan infrastruktur daerah yaitu penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, serta pengurangan luas kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

Realisasi Indeks layanan infrastruktur Kabupaten Trenggalek tahun 2017 sebesar 72,87% tersebut merupakan rata-rata dari beberapa capaian yaitu persentase jalan kondisi baik sebesar 78,09%, persentase jembatan kondisi baik sebesar 96,39%, persentase irigasi kondisi baik sebesar 46,21%, persentase akses sanitasi sebesar 80,33%, persentase akses air minum sebesar 65,98%, persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 53,28% dan persentase RTLH yang tertangani sebesar 89,85%. Trenggalek Membangun adalah Program Lintas perangkat Daerah/Program strategis daerah yang menjadi barometer percepatan peningkatan layanan infrstruktur daerah.



Gambar VII-24. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*Trenggalek Membangun*"

✓ **Trenggalek Menuju 100-0-100**

Program 100-0-100 merupakan solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih, ketersediaan rumah yang layak huni, serta lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Program 100-0-100 merujuk pada target 100% kemudahan mengakses air bersih, 0% luasan kawasan kumuh, dan 100% lingkungan yang sanitasinya berkategori sehat.

Program 100-0-100 di Kabupaten Trenggalek memang tidak mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, dibutuhkan adanya kolaborasi diantara seluruh stakeholder pemangku kepentingan termasuk pelibatan dunia usaha dan adanya partisipasi masyarakat serta keberadaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) yang merupakan transformasi dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Namun, mengingat sangat pentingnya penanganan kawasan permukiman kumuh untuk mengendalikan makin berkembangnya kawasan-kawasan kumuh yang telah diidentifikasi dan untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh yang baru maka Pemerintah Daerah memgang peranan penting sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangka mendukung upaya Kabupaten Trenggalek menuju 100-0-100 disajikan sebagaimana penjelasan pada **Gambar** berikut.



1. Sistem Penyediaan air minum melalui Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat), dimana penerima manfaat air minum terlibat mulai dari penyusunan Rencana Kerja Masyarakat sampai dengan operasional pemeliharaan sehingga diharapkan keberlangsungan layanan air minum tetap terjaga. 2. -Pembangunan SPAM Perdesaan untuk desa-desa rawan air 3. Pemberdayaan HIPPAM dan BPSPAMS untuk menjaga keberlangsungan layanan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber air Bayong 5. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di ibukota Kecamatan (IKK)/ perkotaan.	1. Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan dengan SK Bupati 2. Pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh perkotaan. 3. Pembangunan/ peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PU PERA 4. Pembangunan RUSUNAWA 5. Penyusunan Database Perumahan	1. Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai panduan pembangunan sanitasi skala Kabupaten 2. Pemicuan untuk Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Rencana Pembangunan TPA baru di Kecamatan Panggul dan Munjungan 4. Optimalisasi fungsi TPA Srabah dan TPA Bengkorok 5. Pembangunan IPAL Skala Perkotaan, Program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Gambar VII-25. Langkah-langkah Strategis Trenggalek menuju 100-0-100

Untuk itu perlu disiapkan kebijakan, strategi dan program-program penanganan permukiman kumuh yang terpadu, berbasis kawasan, partisipatif, adil dan berkelanjutan serta terintegrasi dan sinkron dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Seluruh stakeholder harus bersinergi untuk pencapaian target 100-0-100 pada Tahun 2019.

✓ **Trenggalek "MY DARLING"**

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan prakarsa mulia dan bentuk tanggung jawab yang dikembangkan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan pemerintah Kota/Kabupaten guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan 8 atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kota hijau akan dapat terwujud oleh adanya kesadaran, niat baik, perencanaan yang cermat, kerja keras yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan secara sinergi, serta terlembaga dalam suatu sistem tatanan secara kuat yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Karakter P2KH merupakan faktor kunci dalam perwujudan Kota Hijau yang berkelanjutan, diantaranya:

- **Inovatif** : berorientasi pada aksi nyata dan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan.
- **Partisipatif** : P2KH diselenggarakan melalui kolaborasi aktif pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat (gerakan kolektif kota hijau).
- **Sinergis** : P2KH sebagai platform untuk sektor-sektor, sekaligus pemberdayaan bagi seluruh stakeholder.

Penyelenggaraan P2KH diharapkan dapat menjadi tonggak pembelajaran serta penyempurnaan konsep dan langkah-langkah dalam membangun sinergi bersama pemerintah kota dan kabupaten untuk mewujudkan kota yang mampu menyandang delapan atribut kota hijau.

P2KH dilaksanakan melalui prinsip-prinsip yang meliputi:

1. *Performance-based* untuk roll-over dana stimulan.
2. *Local-led development*dalam rangka pemberdayaan/peningkatan kapasitas lokal dan membangun ownership atas proses dan produk.
3. Fasilitasi pada penguatan 3 atribut utama (perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan komunitas hijau).
4. Perluasan spectrum Kota Hijau dengan pengembangan 3 atribut lanjutan yaitu *green building, green waste* dan *green energy*.
5. *Optimized project-cycle* (siklus perencanaan, pemrograman, pembangunan, pemeliharaan, dan evaluasi yang singkat) dan berorientasi pada aksi nyata.

Urban labs yaitu media pembelajaran bersama yang dapat didiseminasikan dan direplikasikan secara luas.

P2KH dimaksudkan untuk menjabarkan amanat UUPR (Undang-Undang Penataan Ruang) tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sbagai RTH dan menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu "*Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau*", berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional.

Secara umum, P2KH bertujuan untuk melakukan inisiasi melalui kemitraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan kota hijau. Secara rinci pelaksanaan program ini terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lokal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kapasitas Daerah dalam mewujudkan tersedianya RTH.
3. Meningkatkan kapasitas Daerah dalam mewujudkan konsumsi energi yang efisien.

4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan air yang efektif.
5. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan bangunan hijau.
7. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.



Gambar VII-26. Implementasi Trenggalek "My Darling"

Secara umum, sasaran P2KH adalah terselenggaranya upaya perwujudan atribut Kota Hijau, melalui:

1. Tersusunnya Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) sebagai dasar pelaksanaan perwujudan atribut kota hijau di tingkat lokal secara terpadu;
2. Komunitas hijau di Kota/Kabupaten dapat teridentifikasi;
3. Terwujudnya peningkatan peran serta komunitas hijau dalam rangka mencapai 8 (delapan) atribut kota hijau secara bertahap;
4. Kegiatan P2KH terintegrasi dengan program Ditjen Cipta Karya yaitu Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100;
5. Terbangunnya RTH yang berkualitas sehingga menjadi standar acuan pembangunan RTH di Indonesia.
6. Termanfaatkannya produk Penelitian dan Pengembangan PUPR dalam perencanaan dan pembangunan RTH.
7. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH pada kota dan kabupaten peserta P2KH, yang mulai dikaitkan dengan atribut kota hijau lainnya seperti *green transportation, green waste, green water,* dan *green energy*.

✓ **Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Kabupaten Trenggalek dianugerahi pemandangan alam yang sangat indah di berbagai sudut wilayah, baik berupa pantai, gunung, gua, air terjun, dan lain-lain. Berbagai potensi tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, disamping tetap menjaga kelestariannya.

Saat ini terdapat 5 (lima) destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan target PAD, yaitu Pantai Prigi, Pantai Pasir Putih Karanggongso & Pantai Simbaronce, Pantai Pelang dan Guo Lowo dan Kolam Renang Tirta Jwalita. Keberagaman potensi menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Bersinggungannya aktivitas pariwisata dengan aktivitas perikanan, pedagang di area wisata yang tidak tertib dan belum tertata dengan baik, kebersihan pantai yang kurang, sarana prasarana yang secara umum belum memadai dan berbagai permasalahan lainnya cukup menguras banyak energi. Pembenahan dan penataan terus dilakukan yang dipadukan dengan promosi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Trenggalek.

Dengan penambahan 1 (satu) destinasi pariwisata per tahun, sampai dengan akhir Tahun 2020 ditargetkan ada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pengembangan destinasi pariwisata diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisata dari 642.855 orang pada Tahun 2015 menjadi 1.000.000 orang pada Tahun 2020 dan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Regulasi tentang Kepariwisataan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Trenggalek ditargetkan menjadi Peraturan Daerah di Tahun 2016 untuk diterapkan hingga 15 tahun ke depan (2016-2031). Keberadaan 2 (dua) Perda tersebut akan menjadi panduan arah kebijakan pembangunan pariwisata ke depan.

Pengembangan Destinasi Pariwisata tentunya tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata “seorang diri”, melainkan harus didukung oleh Perangkat Daerah yang lain mengingat kepariwisataan merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Perangkat Daerah yang harus mendukung adalah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas PU Perkimsih, Dinas Koperindag, Dinas Perhubungan Kominfo, dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Kerjasama dengan PT. PERHUTANI perlu segera dituntaskan dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Trenggalek yang berdaya saing.

TRENGGALEK GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu bersaing di pasar Asean. Berdasarkan data BPS Tahun 2015, Kabupaten Trenggalek memiliki hampir 24 ribu perusahaan, tepatnya 23.375 perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan termasuk di dalamnya Industri Kreatif yang memberikan kontribusi sebesar 14% terhadap PDRB.

Adapun jenis dan jumlah usaha Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- 8.500 industri anyaman bambu
- 4.850 industri bata merah
- 1.600 industri genteng
- 1.152 industri gula kelapa
- 910 industri kerupuk
- 250 industri tahu
- 100 industri alat rumah tangga
- 7.500 industri lainnya termasuk tekstil.

Data juga menunjukkan bahwa 97,6% industri tersebut merupakan industri formal, sedangkan sisanya sebesar 2,4% merupakan industri formal. Industri non formal menyerap 95 % tenaga kerja di sektor industri dan hanya menghasilkan 35% dari total produksi sektor industri. Pengolahan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada **Tabel** di bawah ini.

Tabel VII-2. Industri Formal vs Industri Non Formal

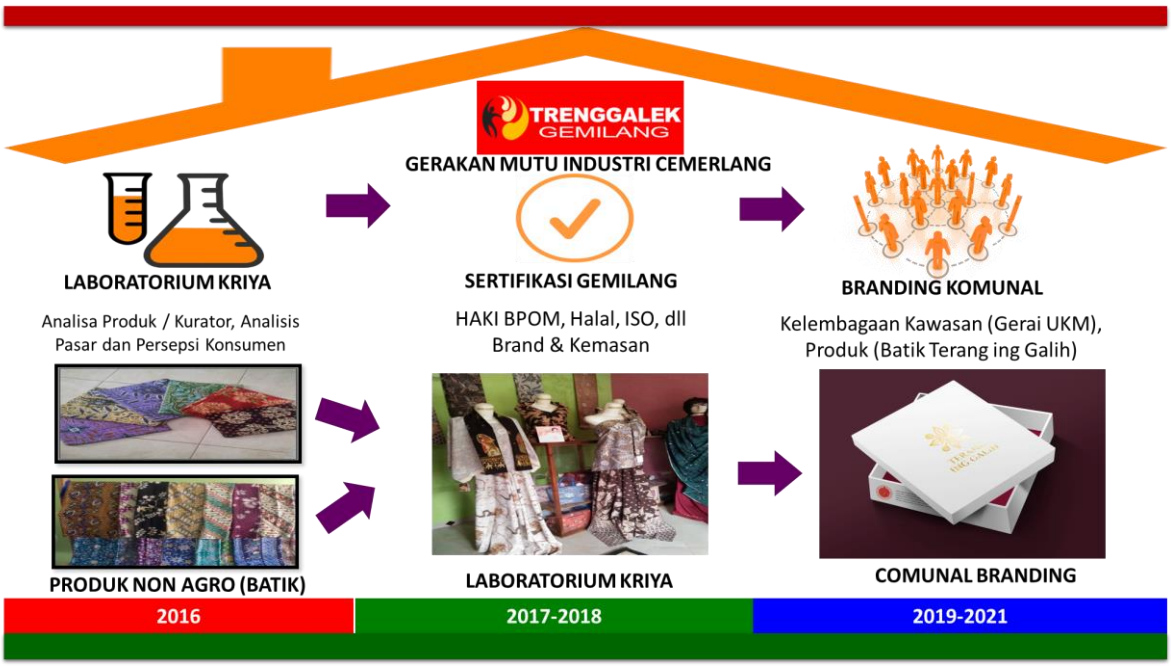
No.	Uraian	Industri Formal	Industri Non Formal	Jumlah	Prosentase Industri Non Formal terhadap Total Industri Pengolahan
1.	Jumlah perusahaan	465	23.228	23.963	97,6%
2.	Jumlah tenaga kerja	3.735 orang	65.325 orang	69.060 orang	95%
3.	Nilai investasi	Rp. 35,9 Miliar	Rp. 50 Miliar	Rp. 85,9 Miliar	58,2%
4.	Nilai produksi	Rp. 1,1 Triliun	Rp. 573,6 Miliar	Rp. 1,6 Triliun	35,5%
5.	Kontribusi terhadap PDRB	9%	5%	14,0 %	

Untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri khususnya produk-produk dari industri non formal, maka akan diimplementasikan sebuah program yang disebut **Trenggalek "GEMILANG" (Gerakan Mutu Industri Cemerlang**). Trenggalek GEMILANG adalah konsep *communal branding* dan penerapan standar mutu serta kualitas produk Trenggalek sehingga mampu bersaing di pasaran. Dengan didukung keberadaan Laboratorium Kriya, maka para pelaku industri di Kabupaten Trenggalek akan mendapatkan wawasan mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran. Semua pemahaman akan diberikan oleh para kurator yang ada dalam laboratorium. Produk-produk industri utamanya industri kreatif ditingkatkan mutunya sehingga diharapkan produk-produk khas Trenggalek dikenal, dapat diterima dan mampu bersaing di pasar regional, nasional bahkan internasional. *Cross cutting* dan infografik program Trenggalek GEMILANG (Agro maupun Non Agro) disajikan sebagaimana **Gambar** berikut.

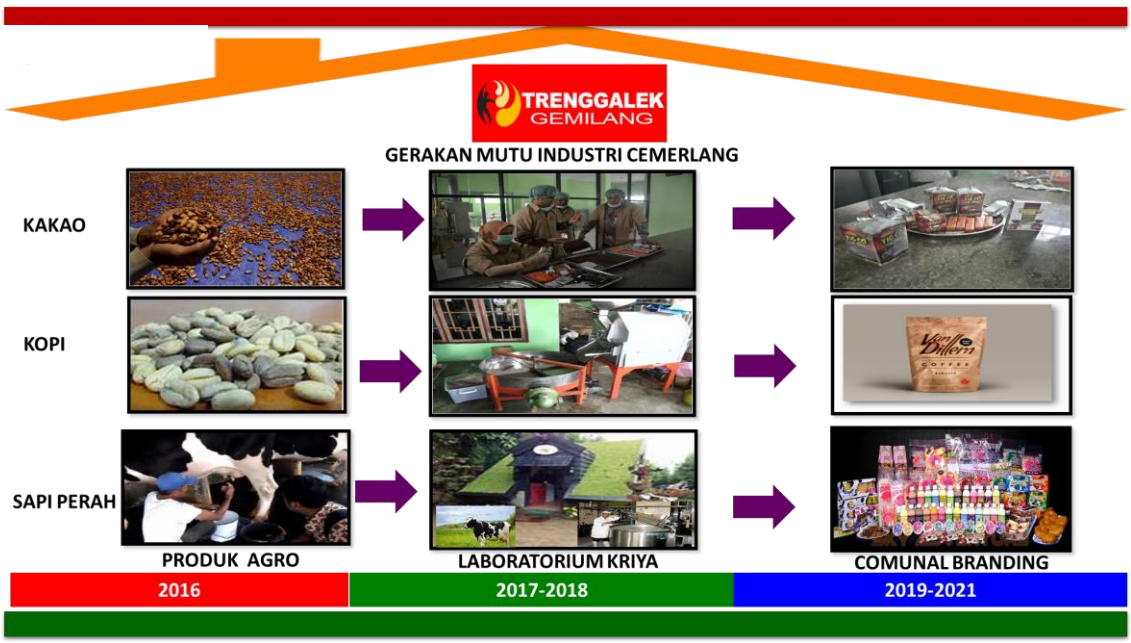


Gambar VII-27. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*Trenggalek GEMILANG*"

Infografik dari Program Trenggalek GEMILANG adalah sebagai berikut :



Gambar VII-28. Infografik Trenggalek "GEMILANG" Produk Non Agro



Gambar VII-29. Infografik Trenggalek "GEMILANG" Produk Agro

✓ **Pasar Rakyat Mandiri (Sekolah Pasar)**

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Indonesia menganut Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) sebagai basis perekonomian yang memiliki prinsip bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi ini akan berjalan jika semua aktivitas ekonomi disatukan dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan.

Karena itu perwujudan ekonomi kerakyatan haruslah bertumpu pada pembangunan manusia sebagai aktor pembangunan. Pembangunan dan pemberdayaan manusia dilakukan dengan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor perdagangan dan UMKM, revitalisasi pasar dimulai dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pedagang, baik individual maupun komunal. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan *khitah* pasar tradisional sebagai bangun ekonomi yang sarat dengan kebersamaan dan kreativitas.

Pemberdayaan pedagang sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan di pasar tradisional tersebut dilakukan melalui **Sekolah Pasar**, yaitu lembaga pembelajaran yang menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pelaku pasar rakyat. Ia membuka diri baik bagi pedagang, pemasok, pengecer, konsumen, dan semua pihak yang menaruh kepedulian. Ia adalah wahana belajar bersama, bertukar pikiran, serta tempat persemaian gagasan inovasi dan pemajuan pasar rakyat ke depan. Sekolah Pasar Rakyat juga menjadi media rintisan pembersatuan ekonomi pra pelaku pasar rakyat yang kiranya kini masih tercerai berai. Ia akan menjadi penerekat dan perapat barisan pegiat industri desa, koperasi sejati, dan pasar rakyat.

Program utama Sekolah Pasar Rakyat ada tiga yakni :

1. **Kelas Pasar**, adalah program pertemuan rutin yang bersifat klasikal dan diskusi.
2. **Klinik Pasar**, adalah program pendampingan langsung untuk pedagang dan koperasi.
3. **Pendidikan Konsumen**, adalah program kampanye kepada masyarakat luas agar tidak meninggalkan pasar rakyat.

Saat ini kondisi pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek sangat memprihatinkan. Kendati secara fisik telah digelontor dana untuk pembangunan dan perbaikan, namun secara esensi aktivitas pasar tradisional mengalami penurunan. Mulai dari sepinya pembeli sebagai akibat maraknya pasar modern sampai dengan lilitan hutang yang menjerat para pedagang akibat ulah bank-bank ilegal atau rentenir.

Untuk itulah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 s.d. 2021 ini pemerintah daerah berinisiatif melaksanakan program Sekolah Pasar Rakyat sehingga pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek kembali berjaya dalam menyangga perekonomian nasional.

Selain Sekolah Pasar, Pemkab Trenggalek juga memiliki Program "GANGSAR" yaitu pemberian kredit lunak tanpa agunan kepada pedagang pasar. Kredit berasal dari dana CSR ataupun dana APBD Kabupaten yang dikelola oleh PT. BPR Jwalita, diberikan kepada Koperasi Pedagang Pasar, untuk disalurkan kepada para pedagang di pasar tersebut (anggota koperasi). Oleh karena itu semua pasar daerah secara bertahap diharapkan segera membentuk Koperasi Pasar dengan embrio Paguyuban Pasar yang sudah ada.

Adapun Pasar Daerah yang ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit yaitu:

1. Pasar Pon (Kecamatan Trenggalek)
2. Pasar Basah (Kecamatan Trenggalek)
3. Pasar Burung (Kecamatan Trenggalek)
4. Pasar Sore (Kecamatan Trenggalek)
5. Pasar Subuh (Kecamatan Trenggalek)
6. Pasar Jarakan (Kecamatan Trenggalek)
7. Pasar Hewan (Kecamatan Trenggalek)
8. Pasar Sukosari (Kecamatan Trenggalek)
9. Pasar Rejowinangun (Kecamatan Trenggalek)
10. Pasar Karangan (Kecamatan Karangan)
11. Pasar Pule (Kecamatan Pule)
12. Pasar Sawungan (Kecamatan Pule)
13. Pasar Tugu (Kecamatan Tugu)
14. Pasar Dongko (Kecamatan Dongko)
15. Pasar Panggul (Kecamatan Panggul)
16. Pasar Gandusari (Kecamatan Gandusari)
17. Pasar Jongke (Kecamatan Gandusari)
18. Pasar Kampak (Kecamatan Kampak)
19. Pasar Munjungan (Kecamatan Munjungan)
20. Pasar Bendorejo (Kecamatan Pogalan)
21. Pasar Durenan (Kecamatan Durenan)
22. Pasar Kamulan (Kecamatan Durenan)
23. Pasar Sebo (Kecamatan Watulimo)

Foto – foto :



Pasar Pon
(Kec. Trenggalek)



Pasar Basah
(Kec. Trenggalek)



Pasar Burung
(Kec. Trenggalek)



Pasar Sore
(Kec. Trenggalek)



Pasar Subuh
(Kec. Trenggalek)



Pasar Jarakan
(Kec. Trenggalek)



Pasar Hewan
(Kec. Trenggalek)



Pasar Sukosari
(Kec. Trenggalek)



Pasar Rejowinangun
(Kec. Trenggalek)



Pasar Bendorejo
(Kec. Pogalan)



Pasar Pule
(Kec. Pule)



Pasar Sawungan
(Kec. Pule)



Pasar Tugu
(Kec.Tugu)



Pasar Panggul
(Kec.Panggul)



Pasar Gandusari
(Kec. Gandusari)



Pasar Kampak
(Kec. Kampak)



Pasar Karangan
(Kec. Karangan)



Pasar Sebo
(Kec. Watulimo)



Pasar Kamulan
(Kec. Durenan)



Pasar Durenan
(Kec. Durenan)



Pasar Munjungan
(Kec. Munjungan)



Pasar Dongko
(Kec. Dongko)



Pasar Jongke
(Kec. Gandusari)

Gambar VII-30. Dokumentasi Pasar Daerah di Kab. Trenggalek

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pasar daerah yang membutuhkan anggaran cukup besar seperti Pasar Pon maka dimungkinkan pembiayaan dari dana Non APBD baik dari dana Pusat maupun dana pinjaman.

GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa **Program Penanggulangan Kemiskinan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan data kemiskinan makro, penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2011-2016 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 101.200 jiwa (14,90%) kemudian untuk Tahun 2014 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 89.968 jiwa (13,10%). Sedangkan pada Tahun 2015 data terbaru dari BPS jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 92.170 jiwa (13,39%) dan kembali turun pada Tahun 2016 menjadi 91.490 jiwa (13,24%). Dari data tersebut, angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun angka ini masih di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur (11,75%) dan Nasional (10,80%) sehingga perlu upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan Data Agregat Kemiskinan Menurut Status Kesejahteraan Basis Data Perpadu (PBDT) Tahun 2017, Jumlah Rumah Tangga Sasaran desil 1-4 (40% terendah di Indonesia) di Kabupaten Trenggalek mencapai 83.078 Rumah Tangga. Sedangkan jumlah individu sasaran desil 1-4 di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 261.554 jiwa atau 33,79 % dari Total Jumlah Penduduk (hasil registrasi penduduk) di Kabupaten Trenggalek pada akhir Tahun 2016 yang mencapai 773.926 jiwa (Dispendukcapil Kab. Trenhggalek).

Dengan menggunakan data dari BDT, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu meminimalisasi kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial. Agar data yang dihasilkan valid, akurat dan dapat digunakan sebagai alat dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan. Dalam proses pendataan juga harus bebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk intervensi politik, karena kesalahan data bisa berakibat perampasan hak orang miskin. Sulitnya usaha penurunan angka kemiskinan bukan hanya disebabkan langsung dari sisi manusianya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi geografis, pendidikan, ekonomi, sistem religi dan sosial budaya yang masih kental tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Kemiskinan menjadi indikator pencapaian pembangunan. Di lima tahun ke Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan.

Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) yang telah di-launching pada awal pemerintahan Dr. Emil Elestianto, M.Sc dan H. Mochamad Nur Arifin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021, merupakan program lintas perangkat daerah yang menjadi barometer percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan prinsip “Gotong Royong”.



Gambar VII-31. *Cross Cutting* Program Strategis Daerah "*GERTAK*"

Peran dan fungsi TKPKD sebagai lembaga yang mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan. TKPKD harus didorong untuk membuat terobosan seperti pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan, penyusunan basis data kemiskinan yang mandiri dan terintegrasi, penentuan dan perumusan golden standart kemiskinan agar tidak terjadi misklasifikasi dalam penentuan data/ angka kemiskinan serta kampanye masif Program GERTAK ke seluruh lapisan masyarakat.

Sulitnya usaha penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tentu bukan hanya disebabkan langsung dari sisi manusianya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi geografis, pendidikan, ekonomi, sistem religi dan sosial budaya yang masih kental tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan di daerah.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan penanganannya dilakukan lintas sektor, sehingga melahirkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangat tergantung pada efektifitas program dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu dibutuhkan data yang akurat, kemitraan produktif dan partisipasi dari segenap komponen masyarakat.

Ada beberapa *thematic issue* yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun satu hambatan klise yang sering terjadi di masyarakat adalah pola pikir di masyarakat yang bersedia dicap dengan status miskin ketika digulirkan bantuan ke masyarakat. Masalah kemiskinan ini bukan sekedar masalah program, atau berapa besar dana yang digulirkan, tapi lebih pada masalah moral. Ada *soft campaign* yang harus diberikan pada masyarakat, bahwa ada yang lebih berhak menerima. Program sebagus apapun tapi kalau rasa keadilan itu tidak tercapai akhirnya tetap akan timbul konflik sosial di masyarakat. Maka dengan masyarakat mendefinisikan sendiri standar dan status kesejahteraannya, maka dengan sendirinya telah terbangun sistem yang menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan program kemiskinan.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, maka perubahan/inovasi yang ditawarkan, yaitu melakukan penguatan peran TKPKD dan pengembangan sebuah sistem manajemen penanggulangan kemiskinan terintegrasi melalui *Self Define Poverty System* (SDPS). SDPS ini pada prinsipnya merupakan sistem yang disusun dalam implementasi strategi Program GERTAK yaitu melalui :

1. **Golden Standart Klasifikasi;**
   Penguatan peran TKPKD harus diawali melalui penguatan peran dan kapasitas pemerintah desa selaku satuan kerja terkecil. Definisi dari kemiskinan dan program kemiskinan disepakati melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan **(Musdes/Muskel GERTAK)**. Selanjutnya dalam forum dilakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu terakhir melalui pengklasifikasian yang komperhensif oleh perwakilan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. Proses ini diharapkan akan meningkatkan ketepatan sasaran rumah tangga dan individu penerima program perlindungan sosial seperti PKH, Raskin/Rastra, KIS, KIP, GSC, Jalin Matra dan Program lainnya.

2. **Mekanisme Mutasi;**
   Untuk mewujudkan manajemen data kemiskinan yang valid dan *update*, maka dibutuhkan pendekatan teknologi informasi terintegrasi dan partisipatif. Hal ini diimplementasikan melalui penyusunan **GERTAK Online** sebagai Sistem Manajemen Data Kemiskinan Terintegrasi, sehingga Program-Program Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek akan menggunakan satu basis data untuk sasaran penerima programnya. Sementara sistem ini juga ditunjang dengan aplikasi berbasis android dinamakan **GERTAK Apps**. GERTAK Apps dapat digunakan sebagai media layanan pengaduan dan pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat survey rumah tangga miskin telah disesuaikan berdasarkan parameter Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial. GERTAK *Apps* dan GERTAK *Online* ini diharapkan dapat secara optimal digunakan mulai tingkat kabupaten sampai dengan desa, dengan mengacu pada konektivitas dan kesatuan data pada semua unit pelayanan yang terintegrasi. Tahun 2018 ini Program GERTAK juga akan menerapkan **Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)** yang bersinergi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dimana kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan proses pelaksanaan pemuktahiran data sesuai dengan kondisi daerah masing–masing.

3. **Sistem Rujukan Terpadu (SRT);**
   Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan termarginalkan maka dibentuk Posko GERTAK merupakan wujud Implementasi Sistem Rujukan Terpadu (SRT). **Posko GERTAK** ini adalah Pusat Sedekah Informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Dalam Posko GERTAK ini, selain menjadi Sekretariat TKPKD dan Sekretariat SDGs, terdapat pelayanan pengaduan yang melibatkan beberapa OPD terkait, BAZNAS, BPJS, Forum CSR, TKSK dan pengelola program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Trenggalek. Posko GERTAK ini telah diresmikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa pada 18 April 2017 yang lalu.

Selain itu untuk mendukung pelayanan Posko GERTAK juga telah dikukuhkan **Task Force Posko GERTAK (Pasukan Pink)** bertepatan pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017. Pasukan Pink terdiri dari Komunitas Peduli Sosial yang secara sukarela membantu Pemerintah Daerah untuk memastikan bantuan program penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

4. Bina Ekonomi Rakyat;

Dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui : pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta akses sanitasi dan air bersih. *Anty Poverty Program* (APP), JAPRI (JAdi Pengusaha mandiRI), KEPEL (Kelompok Peningkatan Ekonomi Lokal), Kredit Gangsar, Trenggalek GEMILANG, Pengembangan Pertanian Terpadu, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan **Program Padat Karya** lainnya yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

5. Evaluasi dan Redefinisi.

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan restrukturisasi kelembagaan TKPKD yang menyesuaikan dengan penyelenggaran dan kebutuhan Program GERTAK dan sekaligus pembentukan Sekretariat SDGs dimana upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda utama dunia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Peran TKPKD harus ditingkatkan melalui penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitas, Monitoring dan Evaluasi. Semua kegiatan TKPKD didokumentasikan melalui media informasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dinamakan "**Jurnal GERTAK**".

Melalui Implementasi ***Self Define Poverty System*** **(SDPS)** ini diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan mampu memenuhi prinsip-prinsip: 1) **Efektif dan efisien**, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; 2) **Responsif dan equaly**, dimana pemerintah harus hadir pada seluruh masyarakat yang membutuhkan utamanya kepada masyarakat miskin dan termarginalkan; 3) **Transparan**, dimana seluruh informasi yang dibutuhkan terkait kemiskinan dapat dengan mudah diakses oleh instansi terkait maupun masyarakat; 4) **Akuntabel**, dimana penyaluran program-program kemiskinan berdasarkan dengan data kemiskinan yang *up to date*, terpercaya dan terintegrasi; dan 5) **Partisipatif**, melibatkan komponen masyarakat sebagai faktor penggerak utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan RPJMD, sinergitas program penanggulangan kemiskinan akan didokumentasikan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan akan dievaluasi setiap tahunnya dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kemiskinan daerah (LP2KD). Adapun ilustrasi i0mplementasi Program GERTAK disajikan sebagiamana **Gambar** berikut.



Gambar VII-32. Ilustrasi Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan

Pada tahun 2018 dalam rangka mendukung Program GERTAK maka direncanakan penerapan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang bersinergi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dimana kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan proses pelaksanaan pemuktahiran data sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing – masing. Program GERTAK ini juga didukung dengan sub program lintas perangkat daerah seperti Desa Adopsi dan Ngantor Di Desa.

- ✓ **Desa Adopsi**

Rekayasa percepatan pembangunan serta perubahan menuju kemakmuran Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan dengan kebijakan pemerintah daerah. Seperti halnya dengan proyeksi pemerintahan pusat yang mengedepankan pembangunan dimulai dari desa, Dengan program pembangunan desa berkualitas diharapkan kemajuan Trenggalek benar-benar terwujud.

Desa adopsi adalah konsep kerjasama dengan menggandeng perguruan tinggi yang mengadopsi, diharapkan desa mendapatkan teknologi dan ilmu terkini dari perguruan tinggi tersebut. Selain itu perguruan tinggi yang mengadopsi desa nantinya dapat membantu desa menyusun RPJM Desa yang baik, serta menumbuhkan potensi desa sebaga sumber penguatan desa itu sendiri. Beberapa akademisi asal Trenggalek yang menjadi dosen siap menjadi mentor Desa Adopsi. Diharapkan nantinya para akademisi ini dapat membantu desa dalam penyusunan RPJMDES, membantu memberikan saran kepada desa dalam mengelola BUMDES ataupun APBDES. Sehingga Desa dapat mengelola dengan baik pembangunan dan pemerintahannya. Beberapa program-program pembangunan telah diinisiasi bersama Perguruan-Perguruan Tinggi diantaranya : Pengembangan *Science Techno Park* (STP) Atsiri, Fasilitasi CSR, Pengalengan Ikan Skala Kecil, *Eco-Friendly Aquaculture*, Sertifikasi Pedangan Kuliner Ikan, Pengolahan Produk Agro, Pengolahan Janggelan, Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana, Pendirian SMK Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan (Kuliah Kerja Nyata) KKN serta kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

- ✓ **Ngantor di Desa**

Untuk memastikan sebuah kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dibutuhkan pengawasan langsung ke bawah, sehingga telah dicanangkan "**Ngantor di Desa**" dengan cara berkantor di desa dan bermalam di rumah warga, bukan dengan seremonial belaka. Dengan berkantor di desa dan bermalam di rumah warga, maka pembuat kebijakan akan bisa segera memutuskan apakah program yang dibuat sudah tepat atau harus direvisi dan bahkan dihentikan sama sekali. Kehadiran pemerintah di masyarakat harus bisa menyelesaikan persoalan, tidak cuma mendengarkan persoalan, dimana harus dituntaskan terfokus secara prioritas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa maka telah diselenggarakan penilaian dan pemberian penghargaan "**SOETRAN AWARD**" kepada Desa-Desa inovatif dalam penyelenggraaan pemerintahan desa. Penilaian penghargaan ini melibatkan tim penilai independen dari Perguruan Tinggi dan OPD terkait.



PROGRAM NGANTOR DI DESA

Desa Membangun

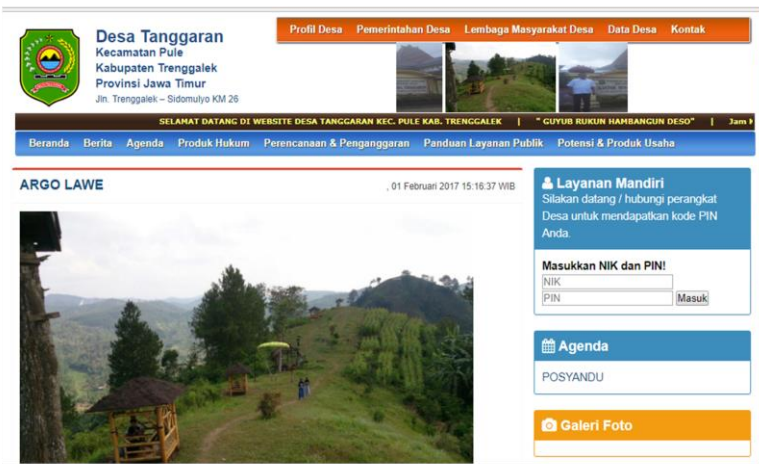
PROGRAM DESA ADOPSI







PENINGKATAN KUALITAS PEMERINTAHAN DESA



PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)

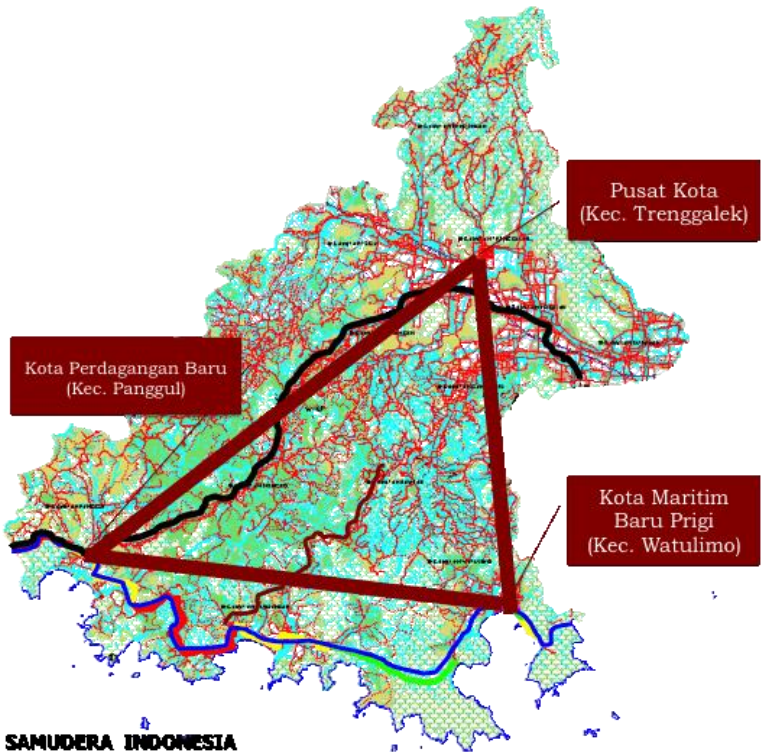


TRANSPARANSI APBD DESA

Gambar VII-33. Program Desa Adopsi dan Ngantor Di Desa

7.2.2. Program Kewilayahan

1. Program Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul – Pusat Kota Trenggalek - Kota Maritim Baru Prigi)



Gambar VII-34. Konsep Segitiga Pembangunan Wilayah

Kota Maritim Baru Prigi

Pelabuhan Prigi merupakan bagian dari pengembangan koridor Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, salah satu dari 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) dari mengadopsi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Beberapa hal yang melatar belakangi perlunya pengembangan kota maritim baru prigi diantaranya adalah pertama Prigi termasuk dalam WPS Yogya – Prigi – Blitar – Malang.

Dalam Kelompok Wilayah Pengembangan Strategis, WPS Yogya-Prigi-Blitar-Malang termasuk dalam WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dimana dalam kawasan tersebut terdapat kawasan pengembangan industri, kawasan pariwisata, pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan serta keterpaduan terhadap kota-kota. Beberapa aspek yang mendukung kebutuhan pengembangan kota baru prigi diantaranya adalah pertama adanya kebutuhan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Jawa bagian selatan, Kedua adanya potensi adalah pengembangan (di bidang perikanan, pariwisata, dan pertanian) di kws Prigi, dan yang ketiga adanya rencana pembangunan infrastruktur regional (pelabuhan laut, pelabuhan perikanan nusantara, dan Jalan Lintas Selatan Jawa sebagai jalan nasional).

Fungsi kota maritim adalah kota sebagai pusat produksi, koleksi, dan distribusi komoditas perikanan. Kota Maritim Prigi akan menjadi pusat pengembangan ekonomi (sentra produksi, simpul kegiatan koleksi – distribusi dan jasa transportasi serta keuangan untuk mendukung pengembangan kawasan dan potensi laut sesuai sektor unggulannya. Prigi memiliki keterkaitan sinergis antar kota-kota Pesisir dengan kota lainnya sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan penyebaran kegiatan produksi.



a. Termasuk dalam **WPS Yogya – Prigi – Blitar – Malang**
b. Adanya **kebutuhan pengembangan pusat pertumbuhan baru** di Jawa bagian selatan
c. Adanya potensi pengembangan (di bidang **perikanan, pariwisata, dan pertanian**) di kws Prigi
d. Adanya **rencana pembangunan infrastruktur regional** (pelabuhan laut, pelabuhan perikanan nusantara, dan Jalan Lintas Selatan Jawa sebagai jalan nasional)

Gambar VII-35. Potensi Pengembangan Maritim Baru Prigi

Program utama mendukung kota baru maritim prigi diantaranya adalah :

1. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut
   Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut di Prigi telah diusulkan dalam revisi Permenhub No. KM 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan Pra-FS Pelabuhan Laut (Pengumpan menuju pengumpul). Rencana pembangunan pelabuhan niaga sebelumnya telah disusun sampai dengan DED oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan karakteristik pelabuhan mampu menampung kapal hingga 3000 DWT (death wight tone), Panjang 90m dan draft 5m, Full loaded draft + clearance = 6m, Sistem dermaga dolphin untuk fasilitas sandar dan tambat.
   Penerbitan revisi dimaksud ditargetkan selesai pada bulan April-Mei 2016. Hierarki pelabuhan masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat (usulan daerah sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional).
2. Penyediaan Air Baku dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Maritim Prigi Pembangunan Jalan Prigi – Karanggongso sepanjang 1 Km
3. Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Munjungan – Prigi (6,54 km) Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Prigi – Karangongso (2,92 km)
4. Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Durenan – Prigi (28.1 km) Preservasi rutin jembatan Cengkrong Preservasi rutin jembatan Damas Preservasi rutin jembatan Prigi 2 Rekonstruksi Realignment Ruas Jalan 135 Durenan – Prigi sepanjang 2 km

5. Penyusunan masterplan untuk pengembangan kota baru Prigi Kota Maritim Selatan Jawa
6. Penyediaan Perumahan Rakyat dalam mendukung pembangunan inkubasi kawasan Ponorogo Trenggalek-Tulungagung-Prigi-Panggul-Popoh (114 unit)
7. Penyediaan perumahan rakyat dalam mendukung pembangunan kota baru Prigi (114 unit)
8. Pembangunan rumah susun nelayan (114 unit)
9. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Prigi
10. Pembangunan MCK Umum
11. Pembangunan TPS di beberapa spot diantaranya Pasir Putih, Prigi, Pasar Prigi

Kota Perdagangan Baru Panggul

Kecamatan Panggul adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Trengggalek. Kecamatan yang memiliki jumlah Desa 17 Desa ini terletak 59 km sebelah barat daya kota trenggalek,setengah wilayahnya adalah pegunungan yang mengitari dataran rendah melingkar luas dari barat , utara ke timur sampai pantai di sebelah selatan dan membentuk lembah yang luas dengan teluknya , wilayah tanah subur mencakup daerah aliran sungai yang mengalir sampai samudra indonesia.

Jalur transportasi menuju tempat tersebut masih dalam masa pengembangan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat yang meningkat pesat. Perekonomian tergolong kecamatan yang memiliki perekonomian menengah; pasar kecamatan panggul merupakan pasar terbesar kedua di kabupaten trenggalek, dikarenakan daerahnya strategis dilewati Jalur JLS dan berbatasan dengan Pacitan. Pengembangan Pasar Panggul akan menjadi prioritas program untuk membuka kawasan perdagangan baru di selatan Trenggalek.



Gambar VII-36. Kondisi Kawasan Perdagangan di Kecamatan Panggul

Pusat Kota Trenggalek

Kecamatan Trenggalek meruapakan Ibukota Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, layanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten. Dalam rangka pengembangan wilayah sebagai ibukota Kabupaten perlu dibuka akses jalan baru baik skala Kabupaten maupun jalan lingkungan. Salah satu akses yang doperlukan untuk pengembangan kota adalah jalan tembus Soekarno-Hatta sebagai *landmark* kota dan akses menuju RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

2. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan, merupakan suatu gerakan pengembangan kawasan yang bertumpu pada sektor pertanian, dimana merupakan salah satu implementasi langsung di daerah dalam rangka memacu perekonomian masyarakat. **Agropolitan** adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyedeiaan sarana pertanian), agribisnis hilir (*processing* dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa–jasa pendukungnya.

Agropolitan ini menjadi pilihan program pembangunan karena sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat agraris. Pengembangan kawasan agropolitan dapat dijadikan alternatif solusi dalam pengembangan kawasan perdesaan tanpa melupakan kawasan perkotaan. Melalui pengembangan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura. Adanya dukungan aksesibilitas (dengan keberadaan Jalan Lintas Selatan) yang baik dan dukungan kebijakan pemerintah sehingga pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten Trenggalek sangat cocok untuk dilaksanakan.

Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA), s**ecara umum** tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan. **Secara khusus** tujuan PKA adalah: a) mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, b) mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, c) mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, d) mengurangi kemiskinan, e) mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, dan f) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan analisis potensi, kesesuaian lahan, dan analisis lokasi, Kecamatan Watulimo dan Bendungan ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan agropolitan, dilakukan dengan memacu pertumbuhan kawasan pertanian, serta mengurangi kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, sehingga mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian dan sekitarnya. Agar terjadi suatu keseimbangan, maka kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan dengan kawasan perkotaan (*urban-rural linkages)* secara dinamis. Oleh karena itu struktur ruang Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan pada jenjang kawasan agropolitan yaitu jenjang pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemanfaatannya di kawasan produksi pertanian dan sekitarnya serta pemanfaatan ruangnya. Kawasan agropolitan juga diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dengan adanya hierarkhi keruangan desa yaitu adanya pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya yang membentuk kawasan agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional, sistem pusat-pusat permukiman provinsi dan sistem pusat-pusat permukiman kabupaten.

Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung pendapatan petani dengan sasaran pengembangan sarana dan prasarana dasar yang mampu memberikan dampak posistif bagi produktifitas petani harus dilakukan. Oleh karena itu dalam kebijakan kegiatan pokok diprioritaskan pada kegiatan antara lain :

1. Memperbaiki aksesibilitas terutama melalui perbaikan kualitas jalan.
2. Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat.
3. Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan daerah.
4. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha kecil dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
6. Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal.
7. Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan komoditas pertanian diarahkan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agrobisnis. Pengembangan sistem agrobisnis dapat diartikan sebagai cara pandang dengan menekankan pada tiga hal, yaitu :

1. Melalui pembangunan agrobisnis, pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi kependekatan yang berdasarkan bisnis.
2. Pembangunan pertanian bukan semata merupakan sektoral, namun juga terkait oleh agroindustri hulu, agroindustri hilir dan lembaga jasa penunjang.
3. Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pengembangan wilayah.

Beberapa dasar normatif perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 050/5074/201.2/2006 perihal Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Watulimo sebagai Kawasan Agropolitan di Kabupaten Trenggalek, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2006 tentang Strategi Daerah (STRADA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 – 2009, serta Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 228 Tahun 2006 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Kabupaten Trenggalek sebenarnya embrionya sudah dimulai sejak tahun 2004, tetapi *action* nyata dari Trenggalek melalui Bappeda dan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Trenggalek mulai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengadakan penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu studi Master Plan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Bendungan dan studi Masterplan Agropolitan Kawasan Selatan di Kecamatan Watulimo. Perencanaan induk tersebut seterusnya ditindaklanjuti dengan penyusunan perencanaan strategis *(strategic planning),* yaitu dengan disusunnya dokumen Strategi Daerah (STRADA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007– 2009 yang didalamnya berisikan perencanaan aspek-aspek yang utama (yang strategis). Serta disusunnya perencanaan operasional, dengan adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek. STRADA dan RAD Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek, berisikan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di 2 (dua) wilayah, yaitu Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Watulimo.

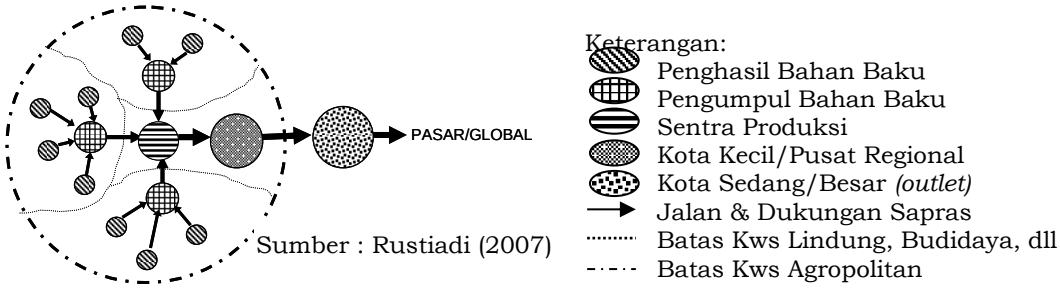
Pengembangan Kawasan Agropolitan di setiap daerah berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat mendominasi dan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh yang lain dan seterusnya. Bila proses ini dapat berjalan lancar maka dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan. Penetapan kawasan agropolitan dirancang dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap daerah. Pada akhirnya, konsep gerakan agropolitan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mendorong perekonomian daerah, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi; menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah yang lebih berimbang; mengatasi masalah-masalah pembangunan wilayah perdesaan; dan meningkatkan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Program pengembangan agropolitan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam agropolitan bersifat protektif, *development*, fasilitatif, regulasi dan redistribusi.

Dalam aplikasi konsep agropolitan, beberapa kebijakan dasar pengembangan agropolitan yang ditetapkan pemerintah, diantaranya:

1. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), melalui pemberdayaan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (*on-farm*) tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (*processing* dan pemasaran) dan jasa pendukungnya.
2. Memberikan kemudahan melalui penyediaan sarana/prasarana guna mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, mulai dari subsistem usahatani/*on-farm*, hulu, hilir, dan jasa penunjang.
3. Agar terjadi sinergi daya pengembangan tenaga kerja, komoditi yang akan dikembangkan hendaknya yang bersifat *export base* bukan *row base*, dengan demikian hendaknya konsep pengembangan kawasan agropolitan mencakup agrobisnis, *agroprocessing* dan agroindustri.
4. Diarahkan pada *consumer oriented* melalui sistem keterkaitan desa-kota (u*rban-rural linkage).* Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan perdesaan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan pola ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan.

Keterkaitan Desa-Kota dalam Konsep pengembangan kawasan Agropolitan dapat dijelaskan dengan **Gambar** berikut.



Sumber : Rustiadi (2007)

Gambar VII-37. Skema Keterkaitan Desa-Kota dalam Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Selain Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Bendungan, kecamatan yang potensial untuk ditetapkan sebagai kawasan agropolitan adalah Kecamatan Pule. Fungsi dalam kawasan agropolitan adalah sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, pasar konsumen produk non pertanian, pusat industri pertanian dan penyedia pekerjaan non pertanian. Sedangkan desa-desa di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Bendungan yang merupakan unit-unit pengembangan kawasan agropolitan mempunyai fungsi sebagai pusat produksi pertanian, intensifiksi pertanian, pusat pendapatan pedesaan (melayani permintaan barang-barang non pertanian), produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian. Komoditas yang diunggulkan adalah sapi perah, ubi jalar, durian, manggis, salak, cengkeh, janggelan dan kakao. Pasar agropolitan dapat dikembangkan di Kecamatan Bendungan, Watulimo dan Pule.

Terkait dengan pengembangan agropolitan di wilayah Kecamatan Pule, hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/789/406.013/2009 telah dilaksanakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek, yang pada intinya adalah mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka perancangan jenis-jenis inovasi serta program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga terlihat nyata dalam pengembangan wilayah Agropolitan yaitu Kecamatan Watulimo, Bendungan serta rencana pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pule.

Komoditas unggulan utama Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Kabupaten Trenggalek adalah sapi perah, durian, manggis dan salak tanpa melupakan potensi alami di Kabupaten Trenggalek secara umum yaitu ubi kayu, cengkeh, kakao, nilam dan janggelan. Untuk populasi sapi perah, utamanya adalah di Kecamaan Bendungan, sementara untuk komoditas durian, manggis dan salak merupakan komoditas andalan dari Kecamatan Watulimo.

Untuk melihat keberhasilan pengembangan agropolitan tersebut, maka selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat kesejahteraan petani adalah indeks nilai tukar petani (NTP). Indeks NTP ini mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan Petani dalam berproduksi dan konsumsi barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga.

Berhasilnya pembangunan agropolitan tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengimplementasikan masing-masing komponen sistem agropolitan, mulai kelembagaan petani, teknologi agribisnis, sarana pertanian, pengolahan dan jasa penunjang, permodalan agribisnis dan pasar hasil pertanian. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pertumbuhan kawasan agropolitan, ternyata belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan agropolitan. Pada saat ini ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Trenggalek antara lain:

1. masih rendahnya pemahaman para stakeholder terhadap hakekat konsepsi pengembangan kawasan agropolitan (belum tersosialisasikan sampai tataran yang paling rendah);
2. koordinasi lintas institusi di masih belum optimal;
3. lemahnya komitmen antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. masih terlihat lemahnya akses petani terhadap sumber pemodalan, informasi dan teknologi maupun pasar;
5. pengendalian kegiatan belum tertata dengan baik;

6. masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kawasan agropolitan yang dibutuhkan;
7. masih tingginya pergeseran alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif menyempit;
8. minimnya infrastruktur perdesaan;
9. rendahnya daya saing produk; dan
10. rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan.

Hal tersebut di atas merupakan refleksi permasalahan perekonomian di perdesaan. Oleh karena itu diperlukan strategi membangkitkan pembangunan ekonomi yang mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas penduduk di perdesaan yang hidup di sektor pertanian. Menyikapi berbagai permasalahan dalam pembangunan pertanian tersebut dan sejalan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, diperlukan komitmen dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak dunia usaha/swasta.

Diharapkan pada Tahun 2020, Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) sudah sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, melalui :

1. Meningkatnya infrastruktur pendukung PKA;
2. Meningkatnya standarisasi komoditas agropolitan;
3. meningkatnya akses permodalan;
4. Munculnya pusat-pusat pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan agropolitan (*off farm*) menuju pada agrobisnis dan agroindustri;
5. meningkatnya kapasitas dan kelembagaan SDM (aparatur, petani dan kelembagaan petani) di kawasan PKA; dan
6. adanya laboratorium usaha atau klinik bisnis serta penggunaan informasi teknologi.

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah. Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan tangkap (laut) dan budidaya (darat/ air tawar).

Mengingat Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kawasan pesisir, dimana ada tiga kecamatan berbatasan langsung dengan laut, maka khusus untuk sektor perikanan ini dikembangkan di beberapa wilayah tersebut.

a. Perikanan Tangkap
   Sektor perikanan tangkap yang terdapat di Kabupaten Trenggalek, banyak dikembangkan di daerah pesisir diantaranya di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Munjungan. Pusat kegiatan minapolitan tangkap ini yang dijadikan pusat adalah Kecamatan Watulimo.
b. Perikanan Budidaya
   Sektor perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek, diantaranya adalah perikanan budidaya air tawar, yang dikembangkan di Kecamatan Bendungan, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Trenggalek dengan Kecamatan Bendungan sebagai pusat minapolitan budidaya.

Program Minapolitan bertujuan untuk melakukan percepatan dalam pengembangan wilayah dan kegiatan perikanan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, tidak hanya pada tahap budidaya *(on farm)* tetapi juga pengolahan dan pemasarannya *(off farm)*. Beberapa dasar normatif dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Trenggalek adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai Kawasan Minapolitan, dimana dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa KKP telah menetapkan 197 Kawasan Minapolitan di 33 Provinsi di Indonesia dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian mengacu pada Surat Gubernur Jawa Timur No. 523/738/202.2/2011 Tanggal 2 Maret 2011 perihal Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/185/406.013/2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan, serta Surat Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/186/406.013/2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek.

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu bersinergi dengan bidang pembangunan ekonomi daerah yang lain, antara lain adalah pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat serta ekonomi kerakyatan yang mengandalkan sumber daya perikanan. Sektor perikanan mempunyai potensi besar sebagai salah satu daya ungkit ekonomi daerah harus mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Pembangunan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Trenggalek dengan komoditas unggulan ikan lele dan nila, tidak lagi berorientasi kepada peningkatan produksi semata, tetapi lebih ditekankan pada peningkatan taraf hidup dan pendapatan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi, terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pengembangan ekonomi wilayah.

Arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya air tawar
2. Pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan
3. Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
4. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan
5. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat
6. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi konservasi lingkungan untuk kelestarian ekosistem
7. Pengembangan kawasan pertambakan perlu diatur secara serasi dengan kawasan hutan bakau maupun industri hasil pertanian
8. Kawasan pertambakan dapat dialihfungsikan atas pertimbangan tertentu
9. Pengembangan perikanan darat diarahkan pada kawasan tegalan dan bercampur dengan permukiman

Jika pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Trenggalek dengan lokasi sentral kegiatan Kecamatan Watulimo dan pengembangan kawasan minapolitan budidaya Kabupaten Trenggalek dengan lokasi sentral kegiatan adalah Desa Sumurup Kecamatan Bendungan ini berhasil, maka diharapkan akan memberikan dampak positif secara langsung berupa peningkatan pendapatan dan kualitas hidup, khusus para pembudidaya ikan baru, serta masyarakat secara umum disekitarnya, sehingga program pemerataan ekonomi sampai tingkat daerah dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud secara bertahap.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pengembangan minapolitan adalah bagaimana menjalin keterkaitan vertikal yang harmonis antara sub sistem pembenihan, sub sistem pendederan, sub sistem pembesaran, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerjasama yang lebih aktif di antara sub sistem tersebut di dalam mengembangkan komoditi ikan nila dan lele, penyaluran tenaga kerja budidaya yang lebih efisien dan terserap lebih efektif, pembentukan pasar ikan dan olahannya, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di pedesaan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan keterlibatan segala pihak, termasuk sektor swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan mina-industri secara profesional. Masih rendahnya *rate of return* sektor perikanan hingga saat ini ternyata berdampak serius kepada rendahnya minat investor swasta untuk menanamkan modalnya di sektor ini.

Sesuai SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/185/406.013/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Trenggalek tanggal 2 Pebruari 2010, Kecamatan Bendungan ditetapkan sebagai pusat pengembangan minapolitan budidaya dan Kecamatan Watulimo sebagai pusat minapolitan tangkap. Dengan mempertimbangkan aspek disribusi dan peluang pasar yang besar, maka sasaran pokok atau target yang ingin dicapai untuk menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai sentra pengembangan kawasan minapolitan adalah :

1. Pembangunan *Project Management Unit* (PMU) sebagai institusi yang bertanggungjawab akan keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Trenggalek yang berkelanjutan. PMU nantinya mengkoordinasikan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam hal konsultasi manajemen, teknis budaya dan pengolahan, permodalan, kepastian berusaha dan kepastian pemasaran, termasuk upaya ekspor dalam segar maupun olahan, seperti daging *fillet;*
2. Pengembangan atau pembangunan infrastruktur di kawasan pengembangan minapolitan;
3. Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan perikanan, yang meliputi KUB yang sudah ada, Kelompok Usaha Bersama Minabisnis (KUBM);
4. Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
5. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penanganan pasca panen, pengolahan ikan dan sistem pemasaran yang masih tradisional.

Melihat perkembangan Minapolitan sejauh ini, muncul konsep ideal dimana Pusat Pengembangan Minapolitan menjadi inti (*core bussiness*) dari sebuah kawasan khusus yang berbasis pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti sarana dan prasarana, fasilitas umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, jaringan pemasaran. Sebagai sentra produksi, daerah pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Untuk melihat keberhasilan pengembangan minapolitan tersebut, maka selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya nelayan dan petani ikan. Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat kesejahteraan nelayan adalah indeks nilai tukar nelayan (NTN). Indeks NTN ini mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual nelayan dengan produk yang dibutuhkan nelayan dalam berproduksi dan konsumsi barang dan jasa untuk keperluan rumah tangga.

Berhasilnya pembangunan minapolitan tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengimplementasikan masing-masing komponen sistem minapolitan, mulai kelembagaan petani ikan dan nelayan, teknologi perikanan, sarana prasarana perikanan, pengolahan dan jasa penunjang, permodalan agribisnis dan pemasaran produk perikanan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pertumbuhan kawasan minapolitan, ternyata belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan minapolitan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek, secara umum pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek mengalami berbagai dinamika pasang surut, disatu sisi secara nyata sudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tapi disisi yang lain masih terlalu lambat, mengingat kita sudah melaksanakannya selama lebih dari 5 (lima) tahun. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek antara lain: a) pemahaman para stakeholder terhadap hakekat konsepsi pengembangan kawasan minapolitan belum tersosialisasikan sampai tataran yang paling rendah; b) koordinasi lintas institusi di masih belum optimal; c) lemahnya komitmen antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) masih terlihat lemahnya akses nelayan dan petani ikan terhadap sumber pemodalan, informasi dan teknologi maupun pasar; e) pengendalian kegiatan belum tertata dengan baik, dan f) masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kawasan minapolitan yang dibutuhkan.

Diharapkan pada tahun 2020, Pengembangan Kawasan Minapolitan (PKM) sudah pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, dimana diharapkan sudah pada tahap pengolahan dan pemasaran produk perikanan (*off farm*) menuju pada minaindustri. Hal ini bisa dilakukan melalui :

1. Meningkatnya semua infrastruktur pendukung minapolitan;
2. Meningkatnya standarisasi produk minapolitan;
3. meningkatnya akses permodalan;
4. Munculnya pusat-pusat pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan minapolitan (*off farm*) menuju pada minabisnis dan minaindustri;
5. meningkatnya kapasitas dan kelembagaan SDM (aparatur, nelayan, petani ikan serta kelembagaan nelayan dan petani ikan) di kawasan pengembangan kawasan minapolitan;
6. adanya laboratorium usaha atau klinik bisnis pendukung usaha,
7. pemanfaatan informasi teknologi;

3. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan

Pasar Pon di Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu pasar tradisional yang telah berusia lebih dari 80 tahun dan merupakan *"icon"* Kota Trenggalek. Pasar Pon dan sekitarnya merupakan kawasan pusat perdagangan di wilayah kota Trenggalek. Selain Pasar Pon dan Pasar Basah, di kawasan tersebut terdapat banyak toko, warung kuliner, jasa, terminal MPU, perkantoran, hotel/penginapan dan permukiman penduduk. Pasar Akik (batu mulia) telah diresmikan Bupati Trenggalek pada Tahun 2014, berada di dalam kawasan terminal MPU Kecamatan Trenggalek. Di sekitar Pasar Basah masih terdapat banyak lahan sawah baik milik masyarakat maupun asset Pemda Kabupaten Trenggalek. Kesan yang muncul secara umum adalah bahwa kawasan di pusat kota Trenggalek tersebut kurang tertata dan ditambah dengan kemacetan yang terjadi di sekitar Pasar Pon akibat tidak adanya tempat parkir dan area bongkar muat yang representatif.

Berpijak pada hal tersebut, pada Tahun 2015 telah disusun sebuah dokumen perencanaan Kawasan Pasar Pon dengan konsep Pasar Pon sebagai sebuah kawasan perdagangan yang utuh dan representatif. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 menetapkan Kecamatan Trenggalek sebagai pusat kawasan Perdagangan dan Jasa, sehingga kawasan Pasar Pon layak untuk dikembangkan sebagai Kawasan Perdagangan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatan pelayanan di bidang perdagangan dan jasa serta pelayanan umum untuk masyarakat Trenggalek. Selain itu, konsep pembangunan Kawasan perdagangan tersebut juga mempertimbangkan kesejahteraan pedagang, keseimbangan lingkungan, dan nilai estetika dengan menonjolkan karakter Kabupaten Trenggalek.



Sumber : DED Perencanaan Kawasan Perdagangan Pasar Pon, 2017

Gambar VII-38. Ilustrasi Pengembangan Kawasan Perdagangan

Berdasarkan dokumen perencanaan kawasan perdagangan Pasar Pon, akan direvitalisasi berbagai prasarana pokok sebagai berikut:

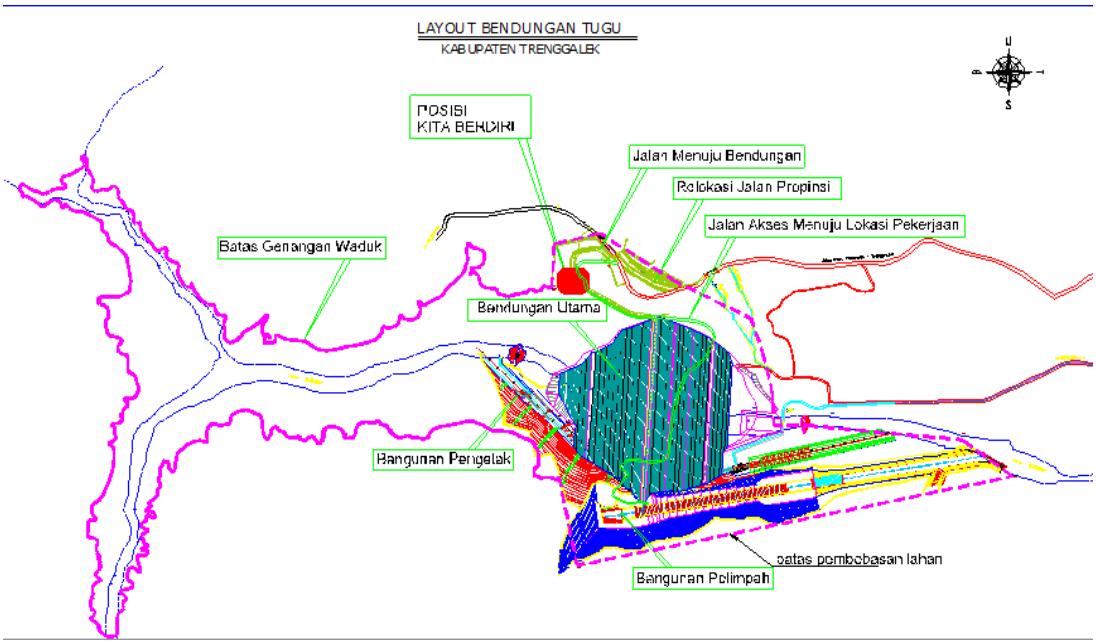
1. Pasar tradisional SNI berada di eks Pasar Basah;
2. Pasar modern (mini mall) berada di eks Pasar Pon (kering);
3. Sentra kuliner di eks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Taman Kota (RTH) berada di eks Hotel Gotong Royong dan Alga Plaza;
5. Terminal MPU direnovasi, disesuaikan dengan pengembangan pasar tradisional; dan
6. Dibangun akses jalan baru antara Pasar Bunga menuju Pasar Basah.

Melalui pengembangan dan penataan kawasan perdagangan Pasar Pon yang terintegrasi dan representatif diharapkan bahwa kota Trenggalek ke depan akan mempunyai "wajah baru" sehingga memiliki daya saing dan akan memudahkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hiburan sekaligus menjadi kebanggaan baru atas kelengkapan fasilitas skala perkotaan.

4. Program Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong

BENDUNGAN TUGU

Pembangunan Bendungan Tugu merupakan kegiatan pengembangan sub basin Kali Ngrowo yang merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan wilayah Kali Brantas yang memanfaatkan aliran sungai Kali Keser. Bendungan Tugu terletak di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Daerah genangan Bendungan Tugu meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek. Daerah genangan untuk wilayah Kabupaten Ponorogo, adalah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo seluas 119.568,11 m^2 (11,96 Ha = 25,28%) dan wilayah Kabupaten Trenggalek adalah desa Nglinggis Kecamatan Tugu seluas 353.636,73 m^2 (35,36 Ha= 74,72%). Lahan Perhutani yang terkena Daerah Genangan dan Sabuk Hijau Seluas 23,26 Ha, Perhutani Wilayah Desa Tumpuk (Ponorogo) = 8,9Ha sedangkan Perhutani Wilayah Trenggalek = 14,36 Ha.



Gambar VII-39. Layout Bendungan Tugu

Tujuan Pembangunan Bendungan Tugu adalah untuk mengembangkan areal irigasi dan meningkatkan intensitas tanam dari areal irigasi yang telah ada, penyediaan air baku, untuk pengendalian banjir Kali Keser, mengembangkan bidang perikanan air tawar, membuka lapangan kerja yang baru di bidang pariwisata bagi masyarakat sekitarnya.

Secara teknis Bendungan Tugu adalah Bendungan Tipe Urugan Batuan dengan inti tegak (zonal), Tinggi bendungan 81 m, Panjang Bendungan 437,27 m, dengan lebar puncak 12 m, kapasitas tampung efektif adalah 8,18 x $10^6 m^3$, yang bermanfaat dalam penyediaan air irigasi DI Ngasinan seluas 1.200 Ha dan air baku sebesar 400 liter/detik.

Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Bendungan Tugu sampai dengan Januari 2016 telah mencapai 36,91%. Perkerjaan tersebut meliputi Pekerjaan Main Dam yaitu galian pondasi Main Dam Sisi Kiri, Pekerjaan Pengelak/Konduit yaitu galian pondasi pengelak sisi kanan dari hulu ke hilir dan Pekerjaan galian tanah relokasi. Untuk proses pembangunan Saluran Pengelak dan Spillway sebagian lokasi melewati permukiman warga yang telah bebas.

Beberapa permasalahan yang ada saat ini adalah pertama, masalah tanah Perhutani, yaitu dengan adanya PP No.105/2015 dan PP No.104/2015 yang mengatur tetang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum seperti pembangunan Bendungan belum ada Peraturan Menteri yang mendukung SOP-nya. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap Peraturan pendukung PP tersebut sampai ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan diharapkan Pemprov Jatim turut serta membantu koordinasi ke pusat terkait Permen pendukung tersebut. Masalah yang lain adalah kebutuah lahan/tanah untuk lokasi borrow area dan Quarry yang belum terbebaskan. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pembaharuan Penetapan Lokasi untuk pembebasan tanah Bendungan Tugu berikut Pengusulan penetapan Tim Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN Jatim.



Gambar VII-40. Lokasi dan Proses Pembangunan Bendungan Tugu

Pelaksanaan konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga urutan-urutan pelaksanaannya yang efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih. Jadwal kerja yang telah dibuat dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan. Walaupun demikian kondisi alam terkadang akan merubah jadwal dan sistem kerja, sehingga diperlukan pengawasan dan tata kerja yang disiplin sehingga diharapkan target Pembangunan Bendungan Tugu Tahun 2018 dapat dipenuhi.

Secara umum urutan pekerjaan dilakukan mulai dari pembuatan jalan akses (*acces road*), pembuatan *base camp* dan mobilisasi, pembuatan saluran pengelak, pembuatan *cofferdam*, penggalian pondasi, penimbunan, penutupan alur sungai dan penutupan saluran pengelak. Program dan skedul pelaksanaan serta jenis dan kapasitas pekerjaan supaya disusun secara teliti yang didasarkan pada karakteristik masing-masing pekerjaan dari setiap komponen bendungan. Juga perlu dipertimbangan terhadap kondisi medan pelaksanaannya. Selain itu dalam rangka penataan kawasan Bendungan Tugu sebagai kawasan wisata, penataan lingkungan/permukiman dilaksanakan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas infrastruktur Jalan, Drainase Permukiman, Tembok Penahan Jalan/Tembok Penahan Tebing, Sanitasi Permukiman, Sarana Air Minum, Listrik serta pembangunan Anjungan Cerdas. Pengembangan wilayah di sekitar bendungan sebagai salah satu proyek strategis nasional dibutuhkan untuk membuka akses dengan wilayah sekitarnya adalah pembangunan jalan-jalan baru salah satunya yaitu : Pembangunan/Pengembangan Halan Tembus Kayen-Ngepeh yang menghubungkan Kecamatan Tugu dengan Kecamatan Karangan.

Anjungan cerdas merupakan suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana induk kawasan inkubasi yang telah disusun sebelumnya. Anjungan cerdas dirancang sebagai outlet yang berperan sebagai tempat promosi aktivitas wisata alternatif beserta produk unggulan lokal setempat. Pelayanan publik tersebut disediakan untuk melengkapi fungsi utama anjungan cerdas sebagai tempat peristirahatan untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan di jalan yang terletak di pinggir jalan arteri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah memilih beberapa lokasi yang akan menjadi ***pilot project*** pembangunan anjungan cerdas, yaitu di kawasan **Bendungan Tugu Trenggalek, Jawa Timur dan Rambut Siwi Jembrana, Bali.**

Anjungan Cerdas Bendungan Tugu yang berlokasi di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, terintregasi dengan wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang. Rencana Lokasi Anjungan Cerdas berjarak kira-kira 1 Km dari batas Kabupaten Ponorogo dan 8 Km dari Kota Trenggalek. Lokasi rencana Anjungan ini berbatasan dengan bendungan sisi pada selatan, Jalan Nasional Ponorogo – Trenggalek pada sisi Utara, Tanah Kebun masyarakat disisi Barat dan sisi Timur. Rencananya anjungan cerdas ini akan dibangun diatas lahan seluas ± 4,7 Ha. Anjungan Cerdas akan dibangun berdampingan dan terintegrasi dengan bendungan. Anjungan Cerdas ini akan menyajikan pemandangan menarik dengan “meminjam bentangan alam” Bendungan Tugu. Anjungan Cerdas ini juga akan menyajikan informasi mengenai infrastruktur yang ada di Bendungan tersebut.



Gambar VII-41. Ilustrasi Anjungan Cerdas, Bendungan Tugu

Adapun tema umum Anjungan Cerdas ini ***adalah Showcase Produk Agro dan Wisata Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya***. Anjungan Cerdas ini di kembangkan sebagai outlet ekonomi lokal di jalan nasional untuk menangkap potensi ekonomi lokal dan menghubungkannya ke jaringan regional dan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut adal sejumlah elemen utama dalam pengembangan anjungan pelayanan jalan yang harus dipenuhi.

1. Anjungan disusun oleh tiga elemen utama-produk, pengguna, dan lokasi- yang mana semuanya harus mendapatkan perhatian yang sama.
2. Lokasi harus berdekatan dengan area wisata, berada pada jalur menuju area wisata, atau setidaknya memiliki potensi yang besar untuk menarik arus wisatawan.
3. Kapasitas pelaku utama pengembangan harus ditingkatkan –komunitas lokal (termasuk kelompok tani dan pemerintah daerah) harus mengerti cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal, dan
4. Kerja sama antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah mutlak dibutuhkan untuk memulai hingga untuk mengelola anjungan pelayanan jalan.

Konsep Anjungan Cerdas Bendungan Tugu pada dasarnya mengadaptasi konsep Michi-no Eki di jepang dan bencmark 'Three Gorges DAM' di yilling District, Yinchang, Huberi, China. Konsep yang diadaptasi dari michi-no- Eki sendiri adalah konsep untuk membangun rest area di lokasi strategis di jalan nasional sekaligus memasarkan produk khusu lokal siap jual, restoran dan toko souvenir Michi-no-Eki berorientasi pada kawasan wisata, sementara konsep ' Three Gorjes DAM' yang diadaptasi adalah pusat informasi insfrastruktur sekaligus tempat wisata.

Maka konsep yang di usung pada pembangunan Anjungan Cerdas Bendungan Tugu adalah membangun sebuah rest area di jalan nasional yang terintegrasi dengan Bendungan Tugu yang berorientasi pada keindahan bendungan (wisata air), dimana pada Anjungan Cerdas tersebut terdapat produk khusus lokal (comunity-based). Untuk mendukung fungsi tersebut, program ruang yang akan di bangun pada najungan cerdas ini adalah :

1. Pusat Komoditas lokal terpadu, yaitu: pusat komoditi lokal, pusat informasi galeri, ruang pertemuan, museum.
2. Rest area berupa: tempat ibadah, tempat istirahat, MCK, tempat makan.
3. Wisata panorama berupa tempat wisata alam: Promenade, viewing deck, amphitheater, area outbod, gardu pandang, playgound.

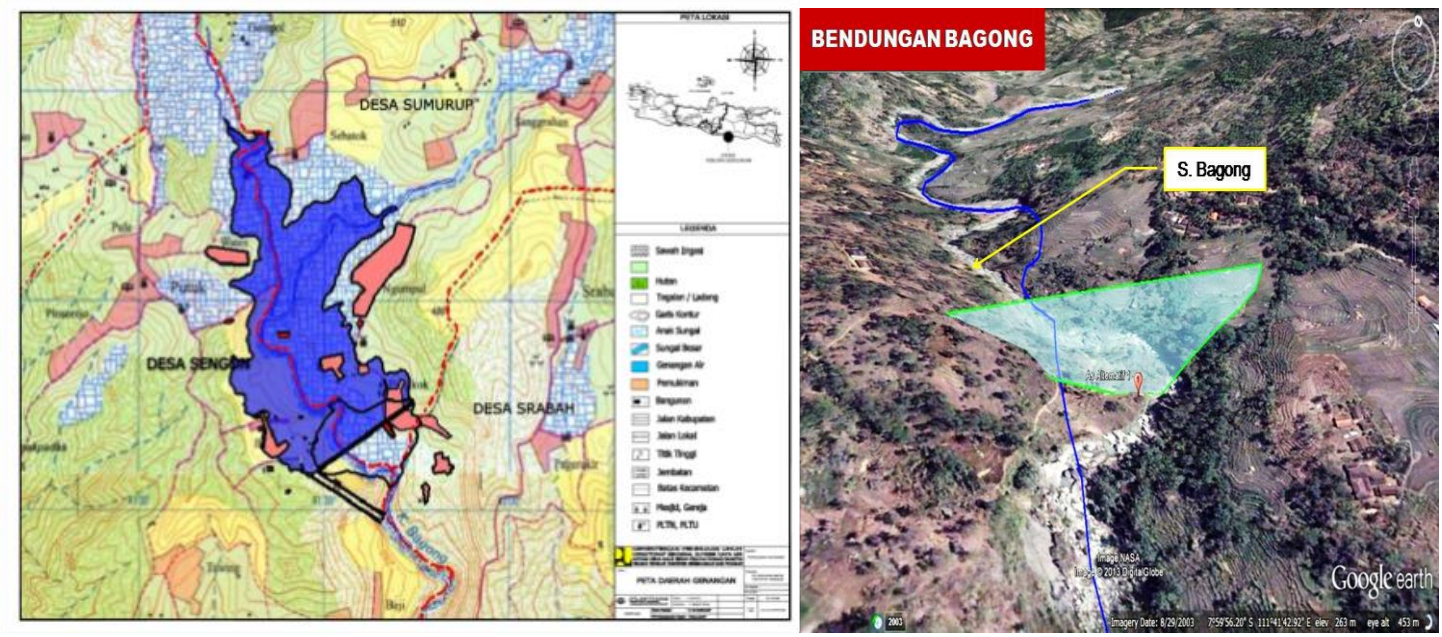


Gambar VII-42. Konsep Anjungan Cerdas di Kawasan Strategis Bendungan Tugu

BENDUNGAN BAGONG

Dalam rangka pengendalian bencana banjir, pemenuhan kebutuhan air baku dan air irigasi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan serangkaian usaha secara terus menerus pembangunan infrastruktu Sumber Daya Air. Salah satu upaya untuk yang ditempuh adalah melalui Pemerintah Pusat merencanakan Pembangunan Bendungan Bagong.

Selain untuk pengendalian banjir maka Bendungan Bagong memiliki potensi multiguna, yaitu mencukupi area Irigasi seluas 854 Ha (DI Bagong) dan 146 Ha di Kecamatan Pogalan, irigasi dengan peningkatan produksi 300% (padi-padi-palawija), penyediaan air baku di wilayah kabupaten Trenggalek, serta obyek baru pariwisata. Tipe Bendungan Bagong adalah Urugan Zonal dengan Inti Tegak, dengan Tinggi Bendungan 82 m, anjang AS Bendungan ± 579 m, luas genangan optimal ± 74,3 Ha, Perkiraan volume tampungan ± 15,5 Juta m3, Rencana Anggaran Biaya diperkirakan sebesar Rp. 673 Milyar, Lokasi As di Sungai Bagong ± 9,5 Km di hulu pertemuan Sungai Bagong dan Sungai Ngasinan (sebelah utara kota trenggalek).



Gambar VII-43. Layout Bendungan Bagong

Saat ini rencana pembangunan Bendungan Bagong pada tahap Study LARAP/Study Relokasi dan Permukiman Kembali yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Studi terkait rencana Pembangunan Bendungan Bagong yang telah dilaksanakan adalah :

1. *Feasibility Study* (FS) Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek (Tahun 2013)
2. Survey Investigasi dan Desain (SID) Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek (Tahun 2014)
3. Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek (Tahun 2015)

Bendungan Bagong direncanakan dapat dimulai pembangunan fisiknya pada Tahun 2018. Sebelum proses pelaksanaan pembangunan fisik, permasalahan relokasi dan permukiman kembali merupakan pekerjaan yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan khususnya antara pelaksana BBWS Brantas dan Pemerinatah Kabupaten Trenggalek. Beberapa Program/Kegiatan yang diperlukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik bendungan diantaranya :

1. Pengadaan Tanah milik Warga Terkena Dampak (WTD)
2. Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan
3. Fasilitasi Relokasi/Permukiman Kembali (WTD)
4. Pembangunan Sarana Prasarana di lokasi relokasi seperti, Jalan, Drainase Permukiman, Tembok Penahan Jalan/Tembok Penahan Tebing, Sanitasi Permukiman, Sarana Air Minum, Listrik.
5. Pemberian Program seperti Jaminan Hidup (JADUP) kepada warga terkena
6. Pemberian Bantuan Program seperti Pelatiahan, Bibit Tanaman Buah-buahan-hortikultura, Ternak, Tanaman Pelindung

Diharapkan Pasca Pembangunan Bendungan Bagong dan pengembangan manfaatnya akan memberikan dampak social ekonomi yang positif terhadap masyarakat di Kabupaten Trenggalek antara lain :

1. Sektor Pertanian
   Dengan dibangunnya Bendungan Bagong, maka intensitas tanam di DI Bagong dapat meningkat, dari lahan kurang air menjadi lahan pertanian dengan suplai air cukup sehingga produksi hasil pertanian juga mengalami peningkaatan. Selain itu, dengan adanya suplai air irigasi secara kontinyu terutama di musim kemarau serta perbaikan pola tata tanama dan tata cara tanam, maka kebutuhan pasar semakin terpenuhi
2. Sektor Kesejahteraan Masyarakat
   Sebagian besar penduduk Kecamatan Bendungan bermata pencaharian sebagai petani, dengan adanya tambahan suplai air dar Bendungan Bgong diharapkan produksi pertanian dapat meningkat dan seklaigus meningkatkan pendapatan petani. Selain itu juga dengan adanya Bendungan Bagong, jumlah lapangan pekerjaan akan bertambah sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Trenggalek, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi waduk dapat meningkat lebih baik.
3. Sektor Ekonomi
   Dengan terjaminnya ketersediaan air dari Waduk Bagong maka Kabupaten Trengglaek khususnya Kecamatan Bendungan, Trenggalek dan Pogalan serta sekitarnya dapat meningkatkan pendapatn masyarakat baik petani maupun non-petani dengn hasil pertanian yang berkualitas dan berkuantitas. Dengan terbangunya sarana dan prasarana umum dari adanya pembangunan Bendungan Bagong akan membuka obyek pariwisata, menambah lapangan pekerjaan dan, meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek.
4. Sektor Lingkungan Hidup
   Bermanfaat untuk konservasi air, dengan menahan air lebih lama di dart sebelum mengalir kembali ke laut akan memberikan waktu untuk meresap sehingga memberikan konstribusi terhadap pengisian kembli air tanah. Hal ini berdampak positif terhadap sumur-sumur air tanah milik penduduk disekitaarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sekitar sungai Bagong maupun anak-anak sungainya tidak terdapat Satwa Dan Tanaman Lindung, Sumber Daya Alam, Cagar Budaya, maupun sumber daya wisata tertentu.

5. Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

JLS merupakan Program Strategis Nasional, dicanangkan Presiden RI pada Tahun 2004 di Blitar melalu kesepakatan 5 Gubernur Pulau Jawa dan Status JLS ditetapkan menjadi jalan Strategis Nasional sesuai Kepmen PU 631/KPTS/M/2009. Pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat secepatnya direalisasikan, karena selama ini wilayah Jawa Timur bagian selatan terpinggirkan dan pembangunan masyarakatnya tertinggal apabila dibandingkan dengan masyarakat yang hidup diwilayah utara Jawa Timur. Meskipun kondisi topografi wilayah Kabupaten Trenggalek didominasi oleh daerah pegunungan dengan gunung-gunung berbatu dan kapur yang relative kurang subur, namun kawasan ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan seperti pertanian. perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan, industri, kelautan, perikanan dan peternakan. Dengan dibangunnya infrastruktur Jalur Lintas Selatan diharapkan akan memberi angin segar bagi pertumbuhan perekonomian diwilayah Kabupaten Trenggalek. **Gambar** dibawah ini menjelaskan rencana jaringan jalan lintas selatan di Provinsi Jawa Timur.



Gambar VII-44. Peta Rencana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur

JLS di Kabupaten Trenggalek melewati 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul. Trase pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek sepanjang 65,76 Km atau 127,86 Ha yang terdiri dari Lahan penduduk sepanjang 19,20 Km atau 16,12 Ha (12,60%) dan Kawasan Hutan yang dikelola Perhutani sepanjang 46,56 Km atau 111,74 Ha (87,40%).

Pembangunan JLS ini sebagian menggunakan kawasan hutan sepanjang ± 274, 44 Km (44%) dari total panjang jalan yang akan dibangun. Kegiatan pembangunan JLS yang menggunakan kawasan hutan dilakukan dengan prosedur penggunaan kawasan hutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan

bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan JLS Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pembangunan JLS mendapatkan kewajiban penyiapan lahan berupa pembebasan lahan penduduk dan penyediaan lahan kompensasi sebagai pengganti pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam perkembanganya seiring perubahan regulasi, pada Tahun 2015 terbit PP terkait dengan pembangunan JLS yaitu Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 105 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan PP tersebut penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial tidak lagi harus menyediakan lahan kompensasi namun dengan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Dalam perkembangan rencana pembangunan JLS Kabupaten Trengggalek terjadi 3 kali terjadi perubahan trase. Sampai dengan Ijin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Trase JLS untuk Kawasan Hutan berubah menjadi sepanjang ± 183,94 Ha atau 52 Km, penduduk 25, 52 km sehingga total Panjang 77,02 Km. Panjang JLS di Kabupaten Trenggalek setelah Perubahan Trase sepanjang 77,02 Km (sebelumnya 65,76 km), terdiri dari Lahan Hutan sepanjang 52,50 Km (sebelumnya 46,56 Km), Lahan Penduduk Sepanjang 24,52 Km (sebelumnya 19,20 Km).

Sampai dengan saat ini masih terdapat Lahan yang berada di Kawasan Hutan dan lahan milik penduduk yang harus dibebaskan sesuai data berikut :

Tabel VII-3. Pembebasan Lahan JLS

No	Nama Ruas	Lhn Hutan (Km)	Lhn Penduduk (Km)			Total (Km)
		Belum	Bebas	Belum	Jml	
1	Besuki-Wonocoyo-Banjar-Nglebeng	9,44	7,85	0,92	8,769	18,21
2	Ngulungwetan-Ngulungkulon-Craken-Masaran-Tawing-Bendoroto	20,04	3,71	11,21	14,915	34,96
3	Bendoroto-Karanggandu-Besuki-Tasikmadu	23,01	2,40	-	0,836	23,85
	T O T A L	**52,50**	**13,96**	**12,124**	**24,52**	**77,02**

Beberapa hal dalam upaya Percepatan Pembangunan JLS di Kab. Trenggalek saat ini adalah adanya Trase JLS yang definitif selain untuk persyaratan perpanjangan persetujuan prinsip dan dispensasi juga untuk kejelasan pelaksanaan pengukuran, percepatan pengukuran kawasan hutan maupun lahan masyarakat, baik teknis maupun pengadministrasian keuangan, percepatan tata cara pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaksanaan pengadaan tanah yang terkoordinasi dengan baik antar pihak yang bekerjasama. Demikan pula kebijakan percepatan pembangunan JLS sebagai program strategis nasional dari Pemerintah Pusat diperlukan untuk menjembatani ketidaksinkronan aturan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Perhutani.



Gambar VII-45. Peta Jaringan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Trenggalek

Bagi Kabupaten Trenggalek, percepatan JLS merupakan target yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Panjang Jalan yang direncankan adalah sepanjang 75,712 km, panjang jembatan sepanjang 619 m. Sampai dengan Desember 2015 realisasi yang telah diapai adalah Lahan yang belum dibuka sepanjang 18,848, lapis pondasi dan aspal sepanjang 21,13 km dan pembangunan jembatan sepanajang 459 m. Data realisasi fisik sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel VII-4. *Progress* Realisasi Fisik Pembangunan JLS di Jawa Timur

KABUPATEN	REALISASI FISIK – Status Desember 2015							
	RENCANA		REALISASI					
	Panjang Jalan (km)	Panjang Jembatan (m)	Buka Lahan (km)	Lahan Belum Dibuka	Lapis Pondasi	Aspal (Km)	Rigid (km)	Pembangunan Jembatan
1. Pacitan	87.435	1545	87.435	-	87.435	83.94		1545
2. Trenggalek	75.712	619	56.864	18.848	21.13	21.13		459
3. Tulungagung	55.1	918	31.25	23.85	9.43	9.43		183
4. Biltar	64.2	1082	25.8	38.4	-	-		295
5. Malang	137.325	985	137.325	-	102.195	102.195		605
6. Lumajang	64.5	596	64.5	-	39	39	20.225	596
7. Jember	83.5	1536	51.5	32	23.8	4		487
8. Banyuwangi	106.1	741	98.6	7.5	81	71.3	13	176
JUMLAH	673.872	8022	553.274	120.598	363.99	330.995	33.225	4346
Prosentase			82.10%	17.90%	54.01%	49.12%	4.93%	54.18%

Selain itu untuk mendukung pengembangan wilayah dengan adanya JLS, perlu kiranya perencanaan pengembangan jalan sebagai sirip JLS diantaranya Jalan Alternatif Kampak-Munjungan yang menghubungkan JLS dengan ruas Jalan nasional.

6. Program Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis

Berdasarkan fakta empiris, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya untuk terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya suatu daerah juga bergantung pada daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan.

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kerjasama antar wilayah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu inisiasi kerjasama antar daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan.

Salah satunya adalah Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dimana menjadi program kerjasama antar beberapa kabupaten yang ada disekitar lereng Gunung Wilis, yang meliputi Kawasan yang ada di lereng Gunung Wilis adalah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri yang memiliki potensi kesuburan tanah dan keindahan alam maka diinisiasi Kerjasama Regional Selingkar Wilis atau dikenal dengan "**TUNGGAL ROGO MANDIRI**". Fokus dari Kerjasama Regional Selingkar Wilis adalah infrastruktur, pariwisata, dan pertanian.



Gambar VII-46. Peta Kawasan Selingkar Wilis

Dalam Konteks WPS, Lingkar Wilis memiliki letak yang strategis diantara 2 WPS, yakni WPS Semarang - Surabaya dan WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang. Kedua WPS ini merupakan koridor penting di Pulau Jawa. Di bagian utara, WPS Semarang-Surabaya merupakan WPS pusat pertumbuhan terpadu, sementara di bagian selatan, WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang merupakan WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang. WPS Semarang-Surabaya di bagian utara memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kawasan disekitarnya karena keberadaan koridor kutub perdagangan dan jasa di Surakarta-Semarang dsk dan GKS-Surabaya dsk, keberadaan industri dan shipping di Semarang dan Surabaya, serta keberadaan industri nasional di Surakarta dan Madiun. Sementara itu WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang di bagian selatan juga memiliki potensi pariwisata budaya dan alam yang cukup signifikan dalam mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

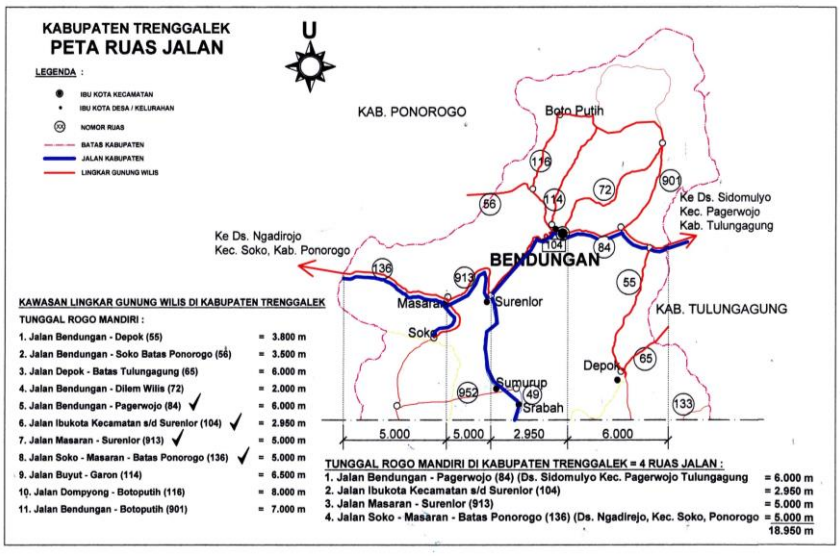
Dengan posisi strategis Kawasan Lingkar Wilis, bagi Kabupaten Trenggalek harus mampu memanfaatkan posisi tersebut melalui skenario pengembangan yang terintegrasi. Saat ini Sekretariat Bersama (Sekber) KAD Selingkar Wilis berada di Kabupaten Trenggalek. Tujuan utama Kerjasamasa Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis adalah mengurangi kesenjangan masyarakat antardaerah dengan cara memaksimalkan potensi Kawasan di selingkar Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Tanggal 11 Juni 2014, bertempat di Kabupaten Trenggalek telah ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dari 6 Kabupaten di selingkar Wilis difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Naskah Perjanjian dan Kerjasama ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Infrastruktur Jalan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Wilayah Selingkar Wilis. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan yang menjadi akse/koneksitas 6 Kabupaten di Selingkar Wilis, akan dapat membuka isolasi wilayah, meningkatkan mobilitas penduduk, mengurangi biaya transportasi dan menjadi trigger/pemicu produktivitas sektor ekonomi lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui efek berganda. Saat ini sedang disusun Feasibility Study (FS) Trase Selingkar Wilis oleh Balai Pengembangan Jalan Nasional V (BPJN-V) Kementerian PUPR.

Pengembangan Jalan Selingkar Wilis direncanakan sebagai berikut:

- Kebutuhan jalan berdasarkan *demand* pergerakan, khusunya pariwisata, pertanian, agropolitan;
- Status dan Fungsi jalan yang akan dikembangkan adalah jalan nasional dengan fungsi Jalan Kolektor Primer (JKP-1);
- Konsep Jalan adalah lingkar dan radial, memiliki interkoneksi dengan jaringan jalan eksisting, memiliki akses langsung setiap wilayah;
- Pemenuhan persyaratan geometrik jalan, diantaranya adalah jari-jari tikungan dan kelandaian jalan
- Status lahan, mayoritas adalah lahan konservasi dan lahan produktif milik Perhutani sehingga dibutuhkan pembebasan lahan.

Rencana pembangunan Jalan Selingkar Wilis di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Trase sementara sepanjang 18,95 km, terdiri dari Ruas Bendungan-Pagerwojo sepanjang 6 km, Ruas Ibukota Kecamatan-Surenlor sepanjang 2,95 km, Ruas Masaran-Surenlor sepanjang 5 km, dan Ruas Sooko-Masaran-Batas Ponorogo sepanjang 5 km.



Gambar VII-47. Peta Ruas Jalan Selingkar Wilis di Kabupaten Trenggalek

Disamping pembangunan jaringan jaringan jalan trase utama selingkar wilis, kebutuhan infrastruktur yang lain adalah :

Bidang Jalan dan Jembatan :

a. Peningkatan Jalan lokal penghubung dari/ke kawasan perkotaan menuju jalan selingkar wilis yaitu dari kawasan perkotaan Trenggalek menuju Kecamatan Bendungan;
b. Pembangunan Jalan dari Trase Lingkar Wilis ke arah puncak menuju obyek-obyek wisata berupa akses alam, hiking track, trail dengan tujuan menghubungkan trase lingkar dengan klaster destinasi wisata maupun simpul produksi agro;
c. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT);
d. Pembangunan Sarpras Pendukung Jalan Selingkar Wilis;
e. Pengembangan Jalan Penghubung Jalur Lingkar Selatan dengan Kawasan Trenggalek dengan Tulungagung;
f. Peningkatan dan perbaikan jembatan; dan
g. Perlunya perencanaan/pengembangan jalan penunjang diantaranya Jalan Lingkar Kota Bendungan untuk pengembangan Kota Bendungan dan Jalan Tembus Sumberdadi-Depok untuk aksesibilitas menghubungkan Kecamatan Bendungan dengan Kecamatan Trenggalek.

Bidang Sumber Daya Air:

a. Pembangunan Bendungan Bagong Kecamatan Bendungan;
b. Pembangunan Embung Selobale di Desa Botoputih dan Embung Pakel di Desa Dompyong Kecamatan Bendungan;
c. Pembangunan Air Baku; dan
d. Pembangunan Jaringan Irigasi.

Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan:

a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Bendungan;
b. Pembangunan Drainase di Kecamatan Bendungan;
c. Pembangunan Jaringan Air Limbah di Kecamatan Bendungan;
d. Pembangunan Sistem IPAL dan Persampahan di Kecamatan Bendungan; dan
e. Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan bagi wisatawan.

7. Pengembangan Desa Wisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, dapat dikatakan pariwisata merupakan energy pendorong bagi pembangunan masyarakat. Sejalan dengan dinamika perkembangannya pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development, village tourism, ecotourism,* yang menjadi pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan.

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Formula utama desa wisata terwujud dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat lokal. Kehidupan dan keaslian desa wisata yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, suatu desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah. Terkait dengan pemodelan desa wisata, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan yaitu; partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat, dan keaslian. Keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi produk wisata pedesaan. Unsur-unsur keaslian produk wisata yang utama adalah kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan kebanggaan daerah diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya secara khusus berkaitan dengan perilaku, integritas, dan keramahan masyarakat setempat.

Untuk menentukan apakah sebuah desa wisata dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik desa wisata, diperlukan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota propinsidan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem Kepercayaan dan Kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di Kabupaten Trenggalek mulai dikembangkan Desa Wisata yaitu di Desa Sawahan, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Desa Wisata menawarkan keindahan alam, tradisi dan budaya masyarakat setempat serta kekhasan sumberdaya alam dan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kelembagaan yang berperan utamanya adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata).

Desa Sawahan menawarkan keindahan sawah dan sungai, tradisi permainan adat, produksi durian, masakan khas dari daun pakis serta olahan khas gula aren yang disajikan sebagai souvenir kepada wisatawan, mengikuti berbagai permainan rakyat (gasing, memanah, dll). Sebagai tempat menginap, tersedia beberapa *homestay* di rumah penduduk. Masyarakat yang ramah dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang handal membuat kunjungan ke Desa Sawahan semakin berkesan.

Desa Watuagung menyajikan pemandangan Gunung Sepikul yang unik, olah raga *rock climbing*, ketenangan suasana desa, kuliner aneka olahan dari singkong, menonton wayang, membuat caping (topi petani) dan berbagai kegiatan lain yang menarik.

Desa Dompyong Kecamatan Bendungan, dengan udara yang sejuk menyajikan agrowisata kebun kopi, pabrik kopi peninggalan Belanda, wisata edukasi peternakan dengan keberadaan kandang koloni sapi perah, air terjun Coban Rambat, *outbond*, kuliner nasi gegok, kopi “Van Ndilem” dan susu sapi yang menyehatkan.

Saat ini telah terbentuk 3 (tiga) Desa Wisata, diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2020 setidaknya terbentuk 7 (tujuh) Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek, tentunya dengan ciri khas yang berbeda-beda satu sama lain.



Desa Wisata Sawahan, Kec Watulimo



Desa Wisata Watuagung, Kec Watulimo



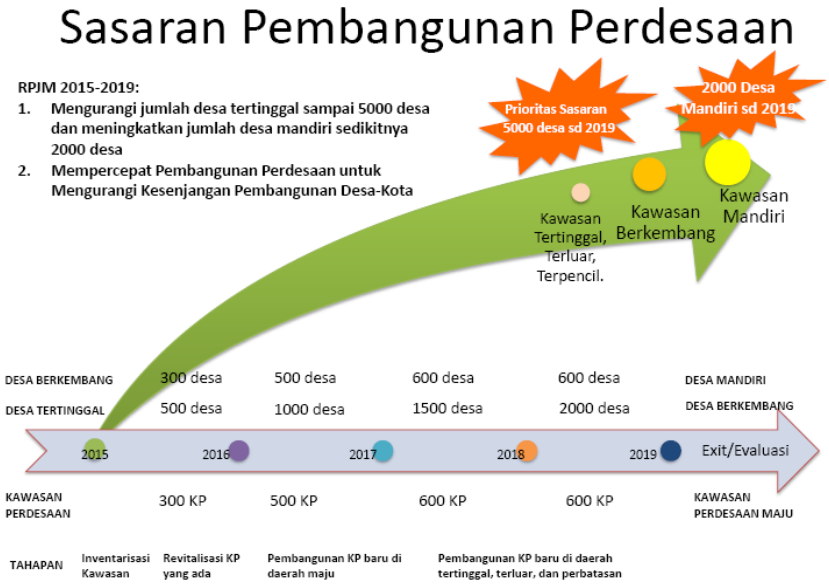


Desa Wisata Dompyong Kec. Bendungan

Gambar VII-48. Dokumentasi Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek

8. Pengembangan Kawasan Perdesaan Strategis

Latar belakang perlunya pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis adalah masih tingginya angka kemiskinan nasional sebesar 13,8% pada Tahun 2014, menurun dari Tahun 2005 sebesar 20%. Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar ada di wilayah perdesaan disebabkan karena prasarana dan sarana dasar sebagian masih dibawah SPM serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan perdesaan masih merupakan kawasan yang tertinggal, stagnan atau pun *survive* sehingga diperlukan adanya arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan strategis dengan menjamin menjamin keberlanjutan pembangunan (*sustainability*) dan menjamin memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.



Gambar VII-49. Sasaran Pembangunan Perdesaaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis adalah satu konsep pembangunan di kawasan perdesaan sebagai sistem wilayah dengan aktifitas utama adalah pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1), Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Tiga Pilar Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi : Pertama, Revitalisasi Desa melalui penataan ruang yang partisipatif; Kedua, Revitalisasi Bisnis melalui pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Antar Desa dan Kemitraan Usaha; serta Ketiga, Revitalisasi SDM melalui penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan melalui pendampingan.

Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan di kawasan perdesaan. Sasaran pembangunan perdesaan berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkaatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa, serta mempercepat pembangunan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan desa-kota.

Dalam rangka pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan Strategis ini dilaksanakan dengan strategi :

a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
b. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
c. Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah dan wasta termasuk kerjasama pengelolaan BUM Desa;
d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
e. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

Di Kabupaten Trenggalek pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Lokus pengembangan ada di kawasan yang terdiri beberapa desa di satru kecamatan, dengan beberapa produk yang diunggulkan. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui penyediaan sarana-prasarana infrastruktur pendukung pengembangan potensi unggulan, sedangkan untuk pengembangan produk unggulan sendiri diharapkan dari Pemerintah Daerah agar dapat mensinergikan program/kegiatan pendukungnya. Pada Tahun 2016, telah disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Desa Strategis (Kecamatan Pule) oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kecamatan lain yang rencana akan dikembangkan Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah Kecamatan Bendungan, Kecamatan Panggul, Kecamatan Watulimo, dan Kecamatan Durenan.

Beberapa Program/Kegiatan Indikatif pendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis diantaranya:

1. Prasarana Sumber daya Air
   - Pembangunan peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan tambak.
   - Pengelolaan dan konservasi sumberdaya air.
2. Prasarana Jalan dan Jembatan
   - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
   - Peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
   - Pembangunan jalan pedesaan, jalan usaha tani;
   - Pembangunan jembatan;
3. Perhubungan
   - Pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
   - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi.
4. Perumahan dan Pemukiman (Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Drainase)
   - Peningkatan dan pembangunan perumahan pemukiman.
   - Peningkatan dan pembangunan air bersih di Ibukota Kecamatan dan desa.
   - Peningkatan dan pembangunan sistem sanitasi, drainase lingkungan dan persampahan.
   - Penataan kawasan perumahan pada kawasan kumuh

Tabel VII-5. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	**Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat**																	
1.1	**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**54,19**	**67,89**		**70,88**		**72,00-73,00**		**73,00-74,00**		**74,00-75,00**		**74,00-75,00**		**75,00-76,00**		
1.1.1	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**	**N/A**	**81,84**		**82,00**		**83,00**		**84,00**		**85,00**		**85,00**		**86,00**		
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	**N/A**	**81,39**		**81,50**		**81,75**		**82,00**		**82,25**		**82,25**		**82,5**		
		Indeks *e-Government*	**N/A**	**2,82 (Baik)**		**2,90 (Baik)**		**3,00 (Baik)**		**3,10 (Baik)**		**3,20 (Baik)**		**3,20 (Baik)**		**3,30 (Baik)**		
		Opini BPK	**Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**	**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**		**Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP)**		
1.1.1.1	**Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur**	Persentase data ASN yang akurat	100%	100%	-	100%	545.594.542	100%	1.670.669.000	100%	1.944.500.000	100%	2.425.000.000	100%	6.585.763.542	100%	2.425.000.000	BKD
		Persentase Keputusan Penetapan status kepegawaian	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.1.1.2	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	14,56%	N/A	-	35%	1.780.748.550	40%	1.902.810.000	45%	2.025.000.000	50%	2.025.000.000	60%	7.733.558.550	60%	2.025.000.000	BKD
		Persentase ASN yang melanggar disiplin	N/A	N/A		0,14%		0,13%		0,12%		0,11%		0,11%		0,11%		
1.1.1.3	**Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	-	100%	509.554.019	100%	884.000.000	100%	1.165.000.000	100%	1.285.000.000	100%	3.843.554.019	100%	1.285.000.000	BKD
1.1.1.4	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik	100%	100%	-	100%	4.449.838.401	100%	4.782.800.000	100%	4.686.000.000	100%	5.041.000.000	100%	18.959.638.401	100%	5.341.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.1.5	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Jumlah kerjasama daerah	N/A	N/A	-	25 kerjasama daerah	323.684.419	25 kerjasama daerah	375.000.000	25 kerjasama daerah	350.000.000	25 kerjasama daerah	450.000.000	25 kerjasama daerah	1.498.684.419	25 kerjasama daerah	450.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.6	**Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Pembinaan/ fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	-	100%	1.715.806.126	100%	1.860.000.000	100%	1.844.000.000	100%	2.090.000.000	100%	7.509.806.126	100%	2.290.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.7	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	-	1.090 Kebijakan	2.090.895.580	1.080 kebijakan	2.375.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	4.465.895.580	N/A	-	Sekretariat Daerah
		Jumlah pengunjung SJDIH	N/A	N/A		9.000 Pengunjung JDIH		6.000 Pengunjung JDIH		N/A		N/A		N/A	-	N/A		Sekretariat Daerah
		Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	N/A	N/A		100%		100%		N/A		N/A		N/A	-	N/A		Sekretariat Daerah
		Jumlah desa sadar hukum	N/A	N/A		N/A		2 Desa		N/A		N/A		N/A	-	N/A		Sekretariat Daerah
1.1.1.8	**Program Penataan dan Pelayanan Hukum**	Jumlah Kebijakan yang sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A		N/A		N/A		1.080 kebijakan	2.320.000.000	1.080 kebijakan	2.775.000.000	1.080 kebijakan	5.095.000.000	1.080 kebijakan	2.775.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Pengunjung JDIH	N/A	N/A		N/A		N/A		6.000 pengunjung website JDIH		6.000 pengunjung website JDIH		6.000 pengunjung website JDIH	-	6.000 pengunjung website JDIH		Sekretariat Daerah
		Jumlah Desa Sadar Hukum	N/A	N/A		N/A		N/A		2 Desa		2 Desa		2 Desa	-	2 Desa		Sekretariat Daerah
		Persentase Terselenggaranya bantuan hukum dan terfasilitasinya penyelesaian permasalahan hukum	N/A	N/A		N/A		N/A		100%		100%		100%	-	100%		Sekretariat Daerah
1.1.1.9	**Program Pendukung Peningkatan Perekonomian**	Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	473.189.947	100%	415.000.000	N/A	-	N/A	-	100%	888.189.947	N/A	-	Sekretariat Daerah
1.1.1.10	**Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah**	Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100%	415.000.000	100%	540.000.000	100%	955.000.000	100%	540.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	N/A	N/A		N/A		N/A		100%		100%		100%	-	100%		Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.1.11	**Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi dengan Mass media**	Persentase informasi pembangunan daerah dan potensi daerah yang terpublikasikan	100%	100%	-	100%	1.609.774.170	100%	1.664.400.000	100%	1.530.000.000	100%	2.250.000.000	100%	7.054.174.170	100%	2.750.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.13	**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	-	100%	1.628.717.275	100%	1.722.775.000	100%	1.965.000.000	100%	2.050.000.000	100%	7.366.492.275	100%	2.250.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.14	**Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah**	Luasan kawasan hutan/ lahan yang dimanfaatkan untuk Pengembangan Wilayah Strategis Daerah	N/A	N/A	-	30Ha	327.477.566	30Ha	2.639.200.000	30Ha	550.000.000	30Ha	1.050.000.000	30Ha	4.566.677.566	30Ha	1.050.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.15	**Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	C	CC		B	910.239.831	B	1.190.075.000	B	1.370.000.000	BB	1.476.600.000	BB	4.946.914.831	BB	1.476.600.000	Sekretariat Daerah
		Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Sekretariat Daerah
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A		B		B		B		B		B	-	B		Sekretariat Daerah
1.1.1.16	**Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD**	Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		100%	116.251.199	100%	1.460.000.000	100%	57.230.500.000	100%	58250000000	100%	117.056.751.199	100%	58.250.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.17	**Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**	Jumlah Ketentuan di Bidang Cukai yang dipublikasikan/ disosialisasikan	N/A	-	-	1 Ketentuan	182.691.053	1 Ketentuan	300.000.000	1 Ketentuan	500.000.000	1 Ketentuan	550.000.000	1 Ketentuan	1.532.691.053	1 Ketentuan	550.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.1.18	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	-	100%	4.782.895.125	100%	6.844.454.250	100%	9.876.791.500	100%	9.876.791.500	100%	31.380.932.375	100%	9.876.791.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.1.1.19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96%	97%	-	85%	5.635.759.823	85%	2.557.448.750	85%	1.331.163.500	90%	1.331.163.500	99%	10.855.535.573	90%	1.331.163.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.1.1.20	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98%	98%	-	100%	2.749.319.125	100%	2.982.580.000	100%	2.960.180.000	100%	2.960.180.000	100%	11.652.259.125	100%	2.960.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.1.21	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	155.000.000	100%	55.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.927.036.165	100%	2.510.476.525	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	9.237.512.690	100%	2.500.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	893.984.643	100%	417.801.000	100%	397.801.000	100%	417.801.000	100%	2.127.387.643	100%	417.801.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	752.127.180	100%	509.160.000	100%	267.040.000	100%	292.040.000	100%	1.820.367.180	100%	292.040.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100%	-	-	-	100%	85.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	535.000.000	100%	250.000.000	RSUD dr. Soedomo
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.549.343.385	100%	1.707.848.500	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	8.257.191.885	100%	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	850.209.042	100%	1.222.045.500	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.672.254.542	100%	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	180.205.400	100%	187.220.000	100%	185.000.000	100%	190.000.000	100%	742.425.400	100%	195.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	100%	178.313.050	100%	195.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.173.313.050	100%	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	97%	-	100%	1.061.093.637	100%	1.442.718.000	100%	1.476.200.000	100%	1.476.200.000	100%	5.456.211.637	100%	1.500.000.000	Dinas PKPLH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97%	100%	-	100%	204.120.650	100%	247.500.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	1.051.620.650	100%	350.000.000	Dinas PKPLH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	224.095.000	100%	208.700.000	100%	223.800.000	100%	223.800.000	100%	880.395.000	100%	223.800.000	Dinas PKPLH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	198.500.000	100%	198.500.000	100%	397.000.000	100%	198.500.000	Dinas PKPLH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	92%	100%	-	100%	626.583.428	100%	1.465.928.000	100%	1.743.000.000	100%	1.800.000.000	100%	5.635.511.428	100%	1.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97%	100%	-	100%	266.876.851	100%	725.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	1.781.876.851	100%	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	100%	-	100%	117.566.000	100%	94.000.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	425.566.000	100%	110.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	270.945.543	100%	242.300.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	1.088.245.543	100%	325.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	129.598.141	100%	115.000.000	100%	95.000.000	100%	125.000.000	100%	464.598.141	100%	125.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	77.090.000	100%	78.700.000	100%	88.800.000	100%	105.000.000	100%	349.590.000	100%	110.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	649.845.775	100%	887.467.700	100%	712.500.000	100%	750.000.000	100%	2.999.813.475	100%	800.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	179.819.400	100%	365.000.000	100%	245.000.000	100%	275.000.000	100%	1.064.819.400	100%	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	97.982.000	100%	95.500.000	100%	112.500.000	100%	125.000.000	100%	430.982.000	100%	125.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	-	-	100%	35.409.500	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	195.409.500	100%	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	581.104.216	100%	603.231.000	100%	703.575.000	100%	725.000.000	100%	2.612.910.216	100%	750.000.000	Dinas Sosial P3A
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	430.463.838	100%	599.254.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.729.717.838	100%	350.000.000	Dinas Sosial P3A
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	77.715.000	100%	83.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	330.715.000	100%	85.000.000	Dinas Sosial P3A
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	100%	104.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	304.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	397.370.742	100%	515.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	1.962.370.742	100%	600.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94%	94%	-	95%	288.525.683	96%	775.000.000	97%	375.000.000	98%	500.000.000	98%	1.938.525.683	98%	600.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	84.292.100	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	155.000.000	100%	529.292.100	100%	175.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	155.000.000	100%	90.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.029.675.413	100%	1.141.227.400	100%	1.154.500.000	100%	1.250.000.000	100%	4.575.402.813	100%	1.300.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97%	98%	-	99%	973.336.775	99%	488.200.000	99%	695.000.000	99%	750.000.000	99%	2.906.536.775	99%	800.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	140.227.500	100%	163.867.600	100%	160.500.000	100%	165.000.000	100%	629.595.100	100%	175.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	115.020.000	100%	45.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	360.020.000	100%	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	688.639.443	100%	631.500.000	100%	650.000.000	100%	675.000.000	100%	2.645.139.443	100%	700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	90%	-	90%	248.479.900	90%	180.000.000	90%	445.000.000	90%	445.000.000	90%	1.318.479.900	90%	445.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	134.438.000	100%	140.000.000	100%	155.000.000	100%	200.000.000	100%	629.438.000	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	70%	70%	-	70%	36.894.140	90%	199.200.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	636.094.140	90%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	99%	-	100%	11.680.242.383	100%	10.033.700.000	100%	10.090.540.000	100%	11.088.884.589	100%	42.893.366.972	100%	12.088.884.589	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	99%	-	100%	1.281.713.083	100%	422.090.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	2.663.803.083	100%	500.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	113.924.000	100%	117.710.000	100%	140.000.000	100%	153.855.822	100%	525.489.822	100%	163.855.822	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	32.491.731	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	162.491.731	100%	60.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	359.343.423	100%	1.066.710.000	100%	514.083.980	100%	564.597.775	100%	2.504.735.178	100%	595.476.312	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	100%	483.936.075	100%	460.390.000	100%	233.568.720	100%	300.000.000	100%	1.477.894.795	100%	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	N/A	-	100%	89.001.000	100%	96.520.000	100%	98.252.000	100%	110.000.000	100%	393.773.000	100%	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	N/A	N/A	-	100%	36.387.531	100%	50.000.000	100%	113.014.000	100%	125.000.000	100%	324.401.531	100%	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	489.708.191	100%	988.223.000	100%	1.438.991.000	100%	1.438.991.000	100%	4.355.913.191	100%	1.438.991.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	136.576.200	100%	681.737.500	100%	292.000.000	100%	339.900.000	100%	1.450.213.700	100%	350.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	119.093.000	100%	210.684.000	100%	269.309.000	100%	314.692.400	100%	913.778.400	100%	325.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	87.300.000	100%	90.000.000	100%	177.300.000	100%	100.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	100%	-	100%	499.707.606	100%	661.867.000	100%	757.867.000	100%	833.653.700	100%	2.753.095.306	100%	853.653.700	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	100%	-	100%	152.137.565	100%	236.813.000	100%	236.813.000	100%	260.494.300	100%	886.257.865	100%	260.494.300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	100%	-	100%	111.812.500	100%	107.030.000	100%	107.030.000	100%	117.733.000	100%	443.605.500	100%	117.733.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	N/A	-	N/A	-	100%	83.040.000	100%	91.344.000	100%	174.384.000	100%	91.344.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	389.312.409	100%	604.905.000	100%	644.535.000	100%	664.535.000	100%	2.303.287.409	100%	684.535.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	196.868.350	100%	387.575.000	100%	262.550.000	100%	275.000.000	100%	1.121.993.350	100%	300.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	91.678.000	100%	88.490.000	100%	92.915.000	100%	92.915.000	100%	365.998.000	100%	92.915.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	446.913.075	100%	670.580.000	100%	626.000.000	100%	656.000.000	100%	2.399.493.075	100%	676.000.000	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	141.451.000	100%	216.600.000	100%	247.100.000	100%	375.000.000	100%	980.151.000	100%	400.000.000	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	145.845.000	100%	153.820.000	100%	143.900.000	100%	155.000.000	100%	598.565.000	100%	160.000.000	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	183.000.000	100%	183.000.000	100%	366.000.000	100%	183.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.401.001.753	100%	1.400.000.000	100%	1.527.000.000	100%	1.557.000.000	100%	5.885.001.753	100%	1.607.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	627.528.525	100%	678.560.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.556.088.525	100%	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	108.862.500	100%	119.000.000	100%	122.000.000	100%	132.000.000	100%	481.862.500	100%	132.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.538.238.726	100%	1.562.455.500	100%	1.800.500.000	100%	1.800.500.000	100%	6.701.694.226	100%	1.800.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	85%	2.625.840.031	90%	743.513.350	90%	675.000.000	90%	750.000.000	100%	4.794.353.381	95%	800.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	N/A	-	100%	425.864.584	100%	281.000.000	100%	284.500.000	100%	284.500.000	100%	1.275.864.584	100%	284.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	100%	137.800.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	337.800.000	100%	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	3.890.741.045	100%	4.060.500.000	100%	4.000.000.000	100%	4.250.000.000	100%	16.201.241.045	100%	4.750.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	1.304.536.830	100%	1.068.800.000	100%	1.350.000.000	100%	1.650.000.000	100%	5.373.336.830	100%	2.000.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	670.869.133	100%	705.000.000	90%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	2.925.869.133	100%	900.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	401.411.705	100%	445.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	1.746.411.705	100%	550.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	706.666.777	100%	977.643.750	100%	1.201.833.498	100%	1.275.838.242	100%	4.161.982.267	100%	1.375.838.242	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93,25%	100%	-	100%	1.150.196.690	100%	1.408.960.250	100%	2.735.482.852	100%	2.735.482.852	100%	8.030.122.644	100%	2.735.482.852	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,91%	100%	-	100%	125.737.000	100%	148.730.000	100%	143.360.000	100%	175.870.000	100%	593.697.000	100%	175.870.000	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	91,99%	100%	-	100%	316.829.855	100%	477.035.000	-	-	100%	300.000.000	100%	1.093.864.855	100%	350.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	188.228.607	100%	933.716.500	100%	757.462.000	100%	811.396.000	100%	2.690.803.107	100%	831.396.000	Kecamatan Trenggalek
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	215.458.300	100%	320.853.500	100%	353.445.000	100%	506.391.500	100%	1.396.148.300	100%	506.391.500	Kecamatan Trenggalek
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	78.840.000	100%	151.140.000	100%	156.140.000	100%	161.140.000	100%	547.260.000	100%	161.140.000	Kecamatan Trenggalek
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	46.805.000	100%	53.240.000	100%	100.045.000	100%	53.240.000	Kecamatan Trenggalek
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	190.786.819	100%	237.300.000	100%	245.000.000	100%	250.000.000	100%	923.086.819	100%	250.000.000	Kecamatan Pogalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	190.331.300	100%	164.000.000	100%	192.000.000	100%	192.000.000	100%	738.331.300	100%	192.000.000	Kecamatan Pogalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	78.992.000	100%	76.500.000	100%	78.000.000	100%	80.000.000	100%	313.492.000	100%	80.000.000	Kecamatan Pogalan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	234.460.643	100%	269.053.500	100%	285.958.850	100%	300.000.000	100%	1.089.472.993	100%	325.000.000	Kecamatan Durenan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	85%	-	90%	188.613.100	95%	119.252.500	95%	131.177.750	100%	145.000.000	100%	584.043.350	100%	150.000.000	Kecamatan Durenan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	64.870.000	100%	78.219.500	100%	97.029.450	100%	100.000.000	100%	340.118.950	100%	100.000.000	Kecamatan Durenan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	228.837.265	100%	218.609.000	100%	223.200.000	100%	230.000.000	100%	900.646.265	100%	230.000.000	Kecamatan Bendungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	214.451.600	100%	167.790.000	100%	117.540.000	100%	182.000.000	100%	681.781.600	100%	200.000.000	Kecamatan Bendungan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	71.700.000	100%	82.020.000	100%	86.460.000	100%	100.000.000	100%	340.180.000	100%	100.000.000	Kecamatan Bendungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	199.851.004	100%	209.186.500	100%	230.000.500	100%	255.000.000	100%	894.038.004	100%	260.000.000	Kecamatan Karangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	90%	153.970.800	95%	125.260.000	95%	134.446.000	100%	154.000.000	100%	567.676.800	100%	165.000.000	Kecamatan Karangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	64.975.000	100%	70.783.000	100%	70.783.000	100%	82.500.000	100%	289.041.000	100%	90.000.000	Kecamatan Karangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	198.640.183	100%	185.012.000	100%	162.430.500	100%	200.000.000	100%	746.082.683	100%	220.000.000	Kecamatan Tugu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	80%	80%	-	100%	212.739.000	100%	151.200.000	100%	111.373.000	100%	130.575.000	100%	605.887.000	100%	150.575.000	Kecamatan Tugu
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	73.823.000	100%	85.450.000	100%	94.680.000	100%	100.000.000	100%	353.953.000	100%	100.000.000	Kecamatan Tugu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	229.104.158	100%	239.531.000	100%	259.323.000	100%	259.323.000	100%	987.281.158	100%	259.323.000	Kecamatan Pule
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	147.290.025	100%	132.353.000	100%	162.898.000	100%	189.853.000	100%	632.394.025	100%	209.853.000	Kecamatan Pule
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	57.532.000	100%	80.544.000	100%	83.284.000	100%	83.284.000	100%	304.644.000	100%	83.284.000	Kecamatan Pule
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	273.403.254	100%	287.790.500	100%	294.959.000	100%	305.500.000	100%	1.161.652.754	100%	325.500.000	Kecamatan Suruh
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	166.279.600	100%	100.725.000	100%	112.000.000	100%	120.000.000	100%	499.004.600	100%	120.000.000	Kecamatan Suruh
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	76.200.000	100%	80.252.500	100%	82.000.000	100%	100.000.000	100%	338.452.500	100%	100.000.000	Kecamatan Suruh
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	322.258.209	100%	290.127.000	100%	290.127.000	100%	352.470.000	100%	1.254.982.209	100%	372.470.000	Kecamatan Kampak
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	211.936.700	100%	188.740.000	100%	188.740.000	100%	219.265.000	100%	808.681.700	100%	219.265.000	Kecamatan Kampak
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	64.220.000	100%	64.220.000	100%	72.000.000	100%	74.220.000	100%	274.660.000	100%	74.220.000	Kecamatan Kampak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	163.683.837	100%	171.666.000	100%	195.743.550	100%	221.619.566	100%	752.712.953	100%	251.619.566	Kecamatan Gandusari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	212.982.800	100%	87.584.050	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	480.566.850	100%	125.000.000	Kecamatan Gandusari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	63.787.500	100%	62.467.500	100%	71.613.000	100%	82.000.000	100%	279.868.000	100%	85.000.000	Kecamatan Gandusari
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	276.699.039	100%	263.447.600	100%	273.911.600	100%	318.771.750	100%	1.132.829.989	100%	338.771.750	Kecamatan Watulimo
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	131.838.900	100%	106.330.000	100%	113.388.000	100%	128.659.300	100%	480.216.200	100%	150.000.000	Kecamatan Watulimo
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	78.580.000	100%	82.083.500	100%	88.562.500	100%	99.321.750	100%	348.547.750	100%	100.000.000	Kecamatan Watulimo
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	234.746.959	100%	270.820.850	100%	319.925.500	100%	325.000.000	100%	1.150.493.309	100%	325.000.000	Kecamatan Panggul
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	90%	138.004.100	95%	144.700.000	95%	122.306.350	100%	170.000.000	100%	575.010.450	100%	175.000.000	Kecamatan Panggul
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	79.895.000	100%	77.000.000	100%	87.500.000	100%	90.000.000	100%	334.395.000	100%	95.000.000	Kecamatan Panggul

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	269.380.800	100%	249.445.500	100%	253.742.500	100%	272.250.000	100%	1.044.818.800	100%	282.250.000	Kecamatan Dongko
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	90%	118.358.400	95%	87.530.000	95%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	485.888.400	100%	170.000.000	Kecamatan Dongko
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	87.744.000	100%	80.764.000	100%	80.000.000	100%	86.000.000	100%	334.508.000	100%	86.000.000	Kecamatan Dongko
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	253.716.635	100%	264.951.000	100%	264.951.000	100%	278.200.000	100%	1.061.818.635	100%	298.200.000	Kecamatan Munjungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%		-	100%	157.031.500	100%	131.130.000	100%	131.130.000	100%	137.690.000	100%	556.981.500	100%	150.000.000	Kecamatan Munjungan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	67.775.000	100%	69.435.000	100%	69.435.000	100%	72.910.000	100%	279.555.000	100%	75.000.000	Kecamatan Munjungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	126.322.000	-	-	-	-	-	-	100%	126.322.000	-	-	Kelurahan Surodakan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	14.120.000	-	-	-	-	-	-	100%	14.120.000	-	-	Kelurahan Surodakan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	22.753.000	-	-	-	-	-	-	100%	22.753.000	-	-	Kelurahan Surodakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	96.570.838	-	-	-	-	-	-	100%	96.570.838	-	-	Kelurahan Sumbergedong
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	15.268.750	-	-	-	-	-	-	100%	15.268.750	-	-	Kelurahan Sumbergedong
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	23.575.000	-	-	-	-	-	-	100%	23.575.000	-	-	Kelurahan Sumbergedong
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	76.677.435	-	-	-	-	-	-	100%	76.677.435	-	-	Kelurahan Ngantru
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	9.003.450	-	-	-	-	-	-	100%	9.003.450	-	-	Kelurahan Ngantru
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	34.710.000	-	-	-	-	-	-	100%	34.710.000	-	-	Kelurahan Ngantru
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	79.088.333	-	-	-	-	-	-	100%	79.088.333	-	-	Kelurahan Tamanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	85.600.000	-	-	-	-	-	-	100%	85.600.000	-	-	Kelurahan Tamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	18.400.500	-	-	-	-	-	-	100%	18.400.500	-	-	Kelurahan Tamanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	117.325.000	-	-	-	-	-	-	100%	117.325.000	-	-	Kelurahan Kelutan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	40.627.700	-	-	-	-	-	-	100%	40.627.700	-	-	Kelurahan Kelutan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	27.420.000	-	-	-	-	-	-	100%	27.420.000	-	-	Kelurahan Kelutan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	98%	-	98%	442.531.817	98%	404.688.000	98%	404.688.000	98%	427.000.000	98%	1.678.907.817	100%	447.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	83%	83%	-	85%	323.319.500	85%	290.000.000	90%	290.000.000	90%	390.000.000	95%	1.293.319.500	90%	490.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79%	79%	-	79%	80.330.000	60%	115.000.000	65%	115.000.000	70%	126.500.000	70%	436.830.000	75%	126.500.000	Inspektorat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.051.731.800	100%	1.300.060.000	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	5.451.791.800	100%	1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	98%	477.125.400	98%	700.000.000	98%	1.250.000.000	98%	1.300.000.000	98%	3.727.125.400	98%	1.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	N/A	-	100%	115.021.000	100%	136.940.000	100%	136.940.000	100%	136.940.000	100%	525.841.000	100%	136.940.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.021.468.240	100%	1.010.421.000	100%	1.110.000.000	100%	1.210.000.000	100%	4.351.889.240	100%	1.310.000.000	Badan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	100%	2.568.369.895	100%	1.776.255.000	100%	600.000.000	100%	750.000.000	100%	5.694.624.895	100%	800.000.000	Badan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	N/A	-	100%	430.258.000	100%	476.475.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	1.936.733.000	100%	515.000.000	Badan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	N/A	**N/A**	-	100%	198.498.899	100%	49.520.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	368.018.899	100%	60.000.000	Badan Keuangan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	551.960.804	100%	524.061.000	100%	590.000.000	100%	705.000.000	100%	2.371.021.804	100%	705.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98%	98%	-	98%	424.640.920	98%	310.000.000	98%	340.000.000	98%	365.000.000	98%	1.439.640.920	98%	400.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	100%	113.531.000	100%	120.960.000	100%	133.000.000	100%	140.000.000	100%	507.491.000	100%	140.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian Daerah
1.1.1.22	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Penduduk ber KTP-el	83%	86%	-	88%	174.100.200	91%	161.835.000	93%	215.000.000	94%	290.000.000	94%	840.935.200	94%	300.000.000	Dinas Dukcapil
		Persentase kepemilikan KK	N/A	N/A		85%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas Dukcapil
1.1.1.23	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran	76%	80%	-	85%	86.799.870	86%	87.520.000	88%	95.000.000	90%	170.000.000	90%	439.319.870	91%	175.000.000	Dinas Dukcapil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	N/A	N/A		40%		45%		50%		55%		55%	-	60%		Dinas Dukcapil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas Dukcapil
1.1.1.24	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	N/A	N/A	-	96%	475.123.500	97%	278.000.000	97%	480.000.000	97%	697.000.000	97%	1.930.123.500	97%	700.000.000	Dinas Dukcapil
1.1.1.25	**Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data	N/A	N/A	-	100%	349.686.186	100%	321.850.000	100%	300.000.000	100%	360.000.000	100%	1.331.536.186	100%	400.000.000	Dinas Dukcapil
		Persentase Inovasi Pelayanan	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas Dukcapil
		Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK	N/A	N/A		7%		11%		15%		21%		21%	-	26%		Dinas Dukcapil
1.1.1.26	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase jenis pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	-	100%	1.427.035.956	100%	1.663.156.000	100%	1.663.156.000	100%	1.663.156.000	100%	6.416.503.956	100%	1.663.156.000	Dinas Dukcapil
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pelayanan sipil	B (70,37)	B (75,00)		B (78,00)		B (80,00)		A (82,00)		A (85,00)		A (85,00)	-	A (85,00)		Dinas Dukcapil
		Rasio Penduduk ber KTP-el	83%	86%		88%		91%		93%		94%		94%	-	94%		Dinas Dukcapil
		Rasio percepatan penyelesaian KTP, KK, dan Akta Kelahiran dalam satu hari	0%	18%		30%		40%		50%		60%		60%	-	60%		Dinas Dukcapil
		Rasio Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran	76%	80%		84%		88%		92%		94%		94%	-	94%		Dinas Dukcapil
		Rasio Penerbitan Akta Kematian	26%	30%		35%		40%		45%		50%		50%	-	50%		Dinas Dukcapil
		Rasio Validitas Data Penduduk	95%	96%		97%		98%		99%		99%		99%	-	99%		Dinas Dukcapil
1.1.1.27	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD	82,83%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Sekretariat DPRD
1.1.1.28	**Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda)	23 Raperda	21 Raperda	-	31 Raperda	10.004.380.556	22 Raperda	4.629.357.500	22 Raperda	5.346.189.000	22 Raperda	6.449.377.500	108 Raperda	26.429.304.556	22 Raperda	7.449.377.500	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Sekretariat DPRD
1.1.1.29	**Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD**	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	100%	100%		100%	2.829.079.112	100%	9.425.763.500	100%	8.073.134.650	100%	8.073.134.650	100%	28.401.111.912	100%	9.218.932.500	Sekretariat DPRD
1.1.1.30	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	N/A	20%	-	40%	1.031.268.584	60%	1.850.000.000	80%	1.929.891.700	100%	2.083.500.000	100%	6.894.660.284	100%	2.083.500.000	Inspektorat
1.1.1.31	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	Persentase Tenaga Pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian	60%	0,95	-	95%	130.238.400	95%	220.000.000	95%	252.450.000	95%	277.695.000	95%	880.383.400	95%	277.695.000	Inspektorat
1.1.1.32	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	Persentase kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan yang diterbitkan/ditetapkan	N/A	N/A	-	100%	63.760.000	-	-	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	126.760.000	100%	33.000.000	Inspektorat
1.1.1.33	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	100%	-	100%	387.580.227	100%	954.945.000	100%	1.219.450.000	100%	1.319.450.000	100%	3.881.425.227	100%	1.419.450.000	Kecamatan Trenggalek
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	64%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	327.670.598	100%	403.400.000	100%	441.200.000	100%	491.200.000	100%	1.663.470.598	100%	541.200.000	Kecamatan Pogalan
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	100%	-	100%	454.136.402	100%	472.619.500	100%	499.978.950	100%	549.978.950	100%	1.976.713.802	100%	599.978.950	Kecamatan Durenan
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	64%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	333.562.000	100%	436.001.000	100%	552.220.000	100%	602.220.000	100%	1.924.003.000	100%	652.220.000	Kecamatan Bendungan
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	326.372.500	100%	453.380.000	100%	498.380.000	100%	548.380.000	100%	1.826.512.500	100%	598.380.000	Kecamatan Karangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	407.547.750	100%	515.797.500	100%	643.976.000	100%	693.976.000	100%	2.261.297.250	100%	743.976.000	Kecamatan Tugu
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	437.356.600	100%	434.945.000	100%	456.868.000	100%	506.868.000	100%	1.836.037.600	100%	556.868.000	Kecamatan Pule
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	266.776.700	100%	358.091.000	100%	412.900.000	100%	462.900.000	100%	1.500.667.700	100%	512.900.000	Kecamatan Suruh
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	213.575.000	100%	336.110.000	100%	403.330.000	100%	453.330.000	100%	1.406.345.000	100%	503.330.000	Kecamatan Kampak
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	319.473.000	100%	517.639.000	100%	567.000.000	100%	617.000.000	100%	2.021.112.000	100%	667.000.000	Kecamatan Gandusari
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	391.359.500	100%	474.761.000	100%	525.760.000	100%	575.760.000	100%	1.967.640.500	100%	625.760.000	Kecamatan Watulimo
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	488.785.500	100%	629.200.000	100%	716.989.000	100%	766.989.000	100%	2.601.963.500	100%	816.989.000	Kecamatan Panggul
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	323.589.000	100%	447.003.000	100%	476.000.000	100%	526.000.000	100%	1.772.592.000	100%	576.000.000	Kecamatan Dongko
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	-	-	100%	330.979.500	100%	451.785.000	100%	526.785.000	100%	576.785.000	100%	1.886.334.500	100%	626.785.000	Kecamatan Munjungan
		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		
		Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	-	-		-		100%		100%		100%		100%	-	100%		
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	-	100%	66.376.100	-	-	-	-	-	-	100%	66.376.100	-	-	Kelurahan Surodakan
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	-	100%	83.139.000	-		-		-		100%	83.139.000	-	-	Kelurahan Sumbergedong
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	-	100%	82.804.000	-		-		-		100%	82.804.000	-	-	Kelurahan Ngantru
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	-	100%	71.673.600	-		-		-		100%	71.673.600	-	-	Kelurahan Tamanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	-	100%	77.446.600	-		-		-		100%	77.446.600	-	-	Kelurahan Kelutan
1.1.1.34	**Program Pengelolaan Sistem Kearsipan**	Jumlah Perangkat Daerah dan lembaga yang mengelola arsip dengan baik sesuai standar	N/A	N/A	-	3 Perangkat Daerah / Lembaga	224.042.300	15 Perangkat Daerah / Lembaga	278.920.000	30 Perangkat Daerah / Lembaga	300.000.000	40 Perangkat Daerah / Lembaga	320.000.000	40 Perangkat Daerah / Lembaga	1.122.962.300	40 Perangkat Daerah / Lembaga	340.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.1.1.35	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	100%	278.301.850	100%	478.145.000	100%	838.733.950	100%	879.999.999	100%	2.475.180.799	100%	879.999.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.36	**Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet	N/A	N/A	-	100%	327.824.304	100%	190.630.000	100%	1.433.166.800	100%	1.433.166.800	100%	3.384.787.904	100%	1.433.166.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi publik secara optimal	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.37	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	Persentase KIM yang terbina	100%	100%	-	100%	123.979.635	100%	95.000.000	100%	239.540.150	100%	250.000.000	100%	708.519.785	100%	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.38	**Program Pengembangan e-Government**	Jumlah PD yang telah menerapkan penyelengaraan Pemerintahan Berbasis IT	N/A	N/A	-	5 PD	287.229.000	5 PD	210.000.000	5 PD	1.710.000.000	5 PD	850.000.000	5 PD	3.057.229.000	5 PD	750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.39	**Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpublikasi secara Elektronik	N/A	N/A	-	100%	458.397.401	100%	358.000.000	100%	550.000.000	100%	575.000.000	100%	1.941.397.401	100%	575.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.40	**Program Peningkatan Layanan Persandian**	Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan IT di Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	100%	72.099.231	100%	130.000.000	100%	117.799.550	100%	120.000.000	100%	439.898.781	100%	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.41	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Pelaksanaan Pembangunan yang *Uptodate*	N/A	N/A	-	100%	51.947.000	100%	64.605.000	100%	131.165.550	100%	140.000.000	100%	387.717.550	100%	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.42	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	325.107.767	100%	225.000.000	100%	628.760.000	100%	650.000.000	100%	1.828.867.767	100%	700.000.000	Bappeda Litbang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase dukungan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Bappeda Litbang
1.1.1.43	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**				-		719.319.775		750.000.000		590.000.000		750.000.000		2.809.319.775		750.000.000	Bappeda Litbang
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkada	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen		Bappeda Litbang
		Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Bappeda Litbang
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	96 dokumen	96 dokumen		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2017)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2018)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2019)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2020)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2020)	-	80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2021)		Bappeda Litbang
1.1.1.44	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**				-		985.458.140		1.950.000.000		-		-		2.935.458.140		-	Bappeda Litbang
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		-		-		3 dokumen	-	-		Bappeda Litbang
		Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		-		-		100%	-	-		Bappeda Litbang
1.1.1.45	**Program Perencanaan Perekonomian**				-		-		-		1.150.000.000		1.250.000.000		2.400.000.000		1.350.000.000	Bappeda Litbang
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	3 dokumen	-		-		-		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	-	3 dokumen		Bappeda Litbang
		Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian yang diatas 75%	100%	-		-		-		100%		100%		100%	-	100%		Bappeda Litbang
1.1.1.45	**Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan**				-		1.314.972.772		1.325.000.000		1.650.000.000		1.750.000.000		6.039.972.772		1.950.000.000	Bappeda Litbang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	-	6 dokumen		Bappeda Litbang
		Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Bappeda Litbang
1.1.1.46	**Program Perencanaan Fisik dan Prasarana**				-		1.323.024.400		940.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		5.003.024.400		1.470.000.000	Bappeda Litbang
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah Keciptakaryaan dan SDA yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen	-	8 Dokumen		Bappeda Litbang
		Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Bappeda Litbang
		Jumlah Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	15 rekomendasi pemanfaatan ruang	15 rekomendasi pemanfaatan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaatan ruang	-	15 rekomendasi pemanfaan ruang		Bappeda Litbang
1.1.1.47	**Program Perencanaan Umum Tata Ruang**	Jumlah dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	-	-	-	5 Dokumen	1.002.194.200	2 Dokumen	865.000.000	N/A	-	N/A	-	7 Dokumen	1.867.194.200	N/A	-	Bappeda Litbang
1.1.1.48	**Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	146.669.800	6 Dokumen	250.000.000	N/A	-	N/A	-	8 Dokumen	396.669.800	N/A	-	Bappeda Litbang
1.1.1.49	**Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	100%	100%	-	100%	177.581.000	100%	250.000.000	N/A	-	N/A	-	100%	427.581.000	N/A	-	Bappeda Litbang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.1.50	**Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	11 Dokumen	525.000.000	11 Dokumen	525.000.000	11 Dokumen	1.050.000.000	11 Dokumen	625.000.000	Bappeda Litbang
1.1.1.51	**Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**	Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	N/A	N/A	-	100%	285.498.016	100%	550.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	1.585.498.016	100%	500.000.000	Bappeda Litbang
1.1.1.52	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase risalah sidang dan SKTJM yang ditindaklanjuti	50%	50%	-	55%	493.195.000	60%	744.900.000	65%	849.900.000	70%	900.000.000	70%	2.987.995.000	75%	949.900.000	Badan Keuangan Daerah
		Menurunnya tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah	50%	50%		45%		40%		40%		30%		30%	-	25%		Badan Keuangan Daerah
1.1.1.53	**Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran**	Persentase dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	85%	85%	-	90%	1.483.905.650	90%	2.155.000.000	92%	2.155.000.000	92%	2.155.000.000	92%	7.948.905.650	95%	2.155.000.000	Badan Keuangan Daerah
		Menurunnya jumlah pergeseran anggaran akibat kesalahan penyusunan anggaran	8	7		6		5		4		3		3		2		Badan Keuangan Daerah
1.1.1.54	**Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	-	100%	822.349.220	100%	1.097.175.000	100%	1.097.175.000	100%	1.097.175.000	100%	4.113.874.220	100%	1.097.175.000	Badan Keuangan Daerah
1.1.1.55	**Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	92%	-	90%	1.608.215.611	90%	1.820.516.000	90%	1.384.425.000	90%	1.384.425.000	90%	6.197.581.611	90%	1.384.425.000	Badan Keuangan Daerah
1.1.1.56	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak - Pajak Daerah**	Persentase peningkatan pajak-pajak daerah	7%	12%	-	17%	990.151.822	21%	2.054.250.000	26%	2.000.000.000	31%	2.000.000.000	31%	7.044.401.822	36%	2.000.000.000	Badan Keuangan Daerah
1.1.1.57	**Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak - Pajak Daerah**	Persentase wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	70%	70%	-	80%	285.625.000	80%	525.000.000	90%	550.000.000	90%	550.000.000	90%	1.910.625.000	90%	550.000.000	Badan Keuangan Daerah
1.2	**Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,25**	**67,78**		68,10		68,25-68,75		68,75-69,25		69,25-69,75		69,25-69,75		69,75-70,25		
1.2.1	**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan**	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS)**	**7,18**	**7,19**		**7,20**		**7,21**		**7,22**		**7,23**		**7,23**		**7,24**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	**98,65**	**100,18**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SD	**N/A**	**4,74**		**5,20**		**5,66**		**6,12**		**6,58**		**6,58**		**6,60**		
		Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SMP	**N/A**	**4,69**		**5,16**		**5,63**		**6,10**		**6,57**		**6,57**		**6,60**		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	**80,03**	**86,18**		**87,03**		**87,88**		**88,73**		**89,58**		**89,58**		**90,00**		
		Indeks Minat Baca	**N/A**	**2,37 (Kadang-Kadang)**		**2,38**		**2,39**		**2,40**		**2,41**		**2,41**		**2,42**		
1.2.1.1	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**						2.008.724.300		1.799.340.000		2.010.000.000		2.051.200.000		7.869.264.300		2.051.200.000	Dinas Dikpora
		Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun	N/A	70,00		73,20		74,00		75,00		76,00		76,00	-	77,00		Dinas Dikpora
1.2.1.2	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar**						57.399.445.988		48.764.140.000		48.764.140.000		49.764.140.000		204.691.865.988		51.764.140.000	Dinas Dikpora
		Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun	99,43	99,10		99,64		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka kelulusan sekolah SD/MI	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka melanjutkan sekolah SD/ MI	99,52	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00		Dinas Dikpora
		Prosentase ruang kelas SD kondisi baik	84,36%	85,38%		87,90%		88,87%		92,36%		99,34%		99,34%	-	99,69%		Dinas Dikpora
1.2.1.3	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama**						27.918.355.408		26.786.000.000		27.286.000.000		27.286.000.000		109.276.355.408		28.286.000.000	Dinas Dikpora
		Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun	97,86	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs	99,52	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinas Dikpora
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,28	0,21		0,20		0,19		0,18		0,17		0,17	-	0,16		Dinas Dikpora
		Persentase ruang kelas SMP kondisi baik	90,59%	90,70%		92,72%		95,51%		96,64%		97,77%		97,77%	-	98,89%		Dinas Dikpora
1.2.1.4	**Program Pendidikan Masyarakat**						398.479.325		1.267.560.000		590.000.000		590.000.000		2.846.039.325		590.000.000	Dinas Dikpora
		Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun	0,18%	0,15%		0,14%		0,13%		0,12%		0,11%		0,11%	-	0,10%		Dinas Dikpora

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.2.1.5	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga**						171.864.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		621.864.500		150.000.000	Dinas Dikpora
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-13 Tahun	N/A	N/A		90,00		90,45		90,90		91,35		91,35	-	91,8		Dinas Dikpora
1.2.1.6	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**					-	1.308.783.450	-	3.041.050.000	-	2.297.900.000	-	2.305.900.000	-	8.953.633.450		2.305.900.000	Dinas Dikpora
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi	81,63%	85,71%		90,00%		92,70%		95,48%		98,34%		98,34%	-	99,33%		Dinas Dikpora
		Rasio Guru terhadap Murid SD/MI/Paket A	1:12	1:12		1:11		1:11		1:11		1:11		1:11	-	1:11		Dinas Dikpora
		Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs/Paket B	1:13	1:12		1:12		1:12		1:12		1:12		1:12	-	1:11		Dinas Dikpora
1.2.1.7	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**					-	1.032.857.400	-	1.316.050.000	-	1.215.000.000	-	1.215.000.000	-	4.778.907.400	-	1.215.000.000	Dinas Dikpora
		Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani	N/A	N/A		8 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan	-	9 Kegiatan		Dinas Dikpora
1.2.1.8	**Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan**	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	N/A	N/A	-	55,25%	917.672.000	57,50%	1.070.000.000	59,75%	1.050.000.000	62,00%	1.150.000.000	62,00%	4.187.672.000	64,25%	1.050.000.000	Dinas Dikpora
1.2.1.9	**Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga**	Jumlah prestasi olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional	N/A	23 Kejuaran	-	24 Kejuaran	1.516.173.800	25 Kejuaran	3.505.775.000	26 Kejuaran	3.055.000.000	27 Kejuaran	3.255.000.000	27 Kejuaran	11.331.948.800	28 Kejuaran	3.555.000.000	Dinas Dikpora
1.2.1.10	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Jumlah pemanfaat perpustakaan	16.582 orang	16.750 orang	-	25.000 orang	395.229.524	35.000 orang	865.259.000	35.000 orang	950.000.000	35.000 orang	1.010.000.000	163.332 orang	3.220.488.524	35.000 orang	1.100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah pengunjung rumah pintar	8451 orang	12.500 orang		10.228 orang		13.228 orang		14.228 orang		15.228 orang		73.863 orang	-	15.228 orang		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.2.2	**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan**	**Angka Harapan Hidup (AHH)**	**72,91**	**72,95**		**72,96**		**72,96**		**72,97**		**72,98**		**72,98**		**72,99**		
		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**29,19**	**33,26**		**35,00**		**40,00**		**45,00**		**50,00**		**50,00**		**50,00**		
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/TB)	**0,73**	**0,68**		**0,73**		**0,72**		**0,72**		**0,71**		**0,71**		**0,70**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup	**7,95**	**6,57**		**6,40**		**6,30**		**6,20**		**6,10**		**6,10**		**6,00**		
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**110,38**	**65,73**		**109,55**		**106,81**		**104,08**		**101,34**		**101,34**		**98,60**		
1.2.2.1	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah**	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		87,6%		88,00%	81.477.750	88,40%	-	88,80%	-	90,20%	-	90,50%	81.477.750	90,50%	-	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		95,20%		95,50%		95,80%		96,00%		96,30%		96,50%	-	96,50%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar		94,00%		94,50%		95,00%		95,30%		95,80%		96,00%	-	96,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		85,00%		85,20%		85,50%		85,70%		85,80%		86,00%	-	86,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar		71,70%		71,80%		71,90%		72,00%		72,00%		72,50%	-	72,50%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.2	**Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga**	Persentase Kunjungan Bayi Paripurna	91%	91,74%		91,80%	652.051.050	91,90%	225.000.000	91,92%	749.669.000	91,93%	750.000.000	91,95%	2.376.720.050	91,95%	750.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,86%	85,00%		85,20%		85,50%		85,70%		85,80%		86,00%	-	86,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	71%	71,70%		71,80%		71,90%		72,00%		72,00%		72,50%	-	72,50%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97%	99,41%		99,42%		99,43%		99,43%		99,44%		99,50%	-	99,50%		Dinkes Dalduk KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	66,50%		66,51%		66,52%		66,53%		66,54%		66,55%	-	66,55%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.3	**Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)**	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	88,46%	87,6%		88%	2.425.405.350	88,40%	2.358.540.000	88,80%	2.666.665.000	90,20%	2.683.540.000	90,50%	10.134.150.350	90,50%	2.683.540.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	93,05	95,20%		95,50%		95,80%		96,00%		96,30%		96,50%	-	96,50%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	91,90%	94,00%		94,50%		95,00%		95,30%		95,80%		96,00%	-	96,00%		Dinkes Dalduk KB
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,67%	97,65%		97,75%		97,85%		97,95%		98,15%		98,25%	-	100,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Bumil KEK	13,90%	13,80%		13,70%		13,60%		13,50%		13,40%		13,40%	-	13,40%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil	88,46%	89,62%		89,75%		89,80%		89,84%		89,88%		90%	-	90,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	89,94%	89,94%		90%		90,50%		91%		91,50%		90%	-	90,00%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.4	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	Persentase Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk	100%	100%		100%	527.991.925	100%	200.000.000	100%	575.946.000	100%	600.000.000	100%	1.903.937.925	100%	600.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada bayi	99,32%	103,44%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada Balita	98,53%	97,08%		97,10%		97,20%		97,30%		97,40%		97,50%	-	97,50%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Penimbangan (D /S)	84,07%	87,21%		87,25%		87,30%		87,40%		87,50%		87,60%	-	87,60%		Dinkes Dalduk KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	98,31%	98,38%		98,40%		98,40%		98,40%		98,40%		98,40%	-	98,40%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri	6,21%	15,75%		15,75%		15,79%		15,80%		15,85%		15,88%	-	15,88%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.5	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase Keluarga Sehat	N/A	N/A		7%	1.192.776.885	8%	1.925.000.000	9%	1.791.260.000	10%	1.825.000.000	10%	6.734.036.885	11%	1.825.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase UKBM yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase masyarakat dengan tingkat pengetahuan tetang kesehatan baik	N/A	N/A		50%		55%		60%		65%		70%	-	70%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.6	**Program Penyehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan Olah Raga**	Persentase desa ODF	45%	59%		73%	420.491.300	86%	219.900.000	100%	242.820.501	100%	250.000.000	100%	1.133.211.801	100%	250.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase rumah tangga yang memiliki air memenuhi syarat	64%	65%		66%		67%		68%		69%		70%	-	70%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase TTU yang memenuhi syarat	78,0%	80,87%		82%		83%		84%		85%		86%	-	86%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	63,0%	66,52%		68%		70%		72%		74%		75%	-	75%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan	N/A	N/A		40%		42,00%		45%		47,00%		47%	-	50,00%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase murid yang tingkat kebugarannya baik	N/A	N/A		40%		42,00%		45%		47,00%		47%	-	50,00%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.7	**Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa**	Angka Bebas Jentik (ABJ)	79,98%	88,1		90	1.284.273.045	92	767.804.000	94	1.500.566.300	> 95	1.580.566.300	> 95	5.133.209.645	> 95	1.580.566.300	Dinkes Dalduk KB
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS	13%	58,40%		63%		68%		73%		78%		78%	-	78%		Dinkes Dalduk KB
		Case Notification Rate TB Paru	53,81	53,81		55		57,5		60		62,5		65	-	65		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kasus klinis malaria yang diperiksa sediaan darah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
		Penemuan Penderita diare (Case detection rate)	90,73	90,73		90		89		88		87		86	-	86		Dinkes Dalduk KB
		Persentase RTF Rate penderita kusta	100%	> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %	-	> 90 %		Dinkes Dalduk KB
		Penemuan kasus pneumonia balita	69,08	69,08		69		68,5		68		67,5		67	-	67		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Balita mendapatkan Pelayanan Imunisasi	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-	80%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Murid SD/MI mendapatkan pelayanan imunisasi	≥95%	≥95%		≥95%		≥95%		≥95%		≥95%		≥95%	-	≥95%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Desa UCI	73%	86%		88%		90%		92%		94%		95%	-	95%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase KLB ditangani dalam waktu kurang dari 24 Jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9%	25%		30%		35%		50%		60%		70%	-	70%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7%	55%		60%		65%		70%		75%		80%	-	80%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	55%	55%		60%		65%		70%		75%		80%	-	80%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.8	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	100%	-	100%	8.518.616.559	100%	13.501.490.000	100%	13.501.489.994	100%	13.501.489.994	100%	49.023.086.547	100%	13.501.489.994	Dinkes Dalduk KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.2.2.9	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan**	Persentase Puskesmas Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	N/A	100%		100%	42.791.599.438	100%	46.294.592.600	100%	46.811.888.000	100%	46.811.888.000	100%	182.709.968.038	100%	46.811.888.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase BLUD menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.10	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Persentase pemenuhan obat	100%	144%		100%	6.490.529.040	100%	5.541.811.000	100%	6.011.770.000	100%	6.011.770.000	100%	24.055.880.040	100%	6.011.770.000	Dinkes Dalduk KB
1.2.2.11	**Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman**	Persentase Apotek sesuai standar	100%	100%		100%	135.691.050	100%	109.310.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	465.001.050	100%	110.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Toko Obat sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Makanan yang diperiksa memenuhi syarat	97%	97%		97%		98%		98%		99%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase pengelola obat puskesmas dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.12	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya**	Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai standar	59%	59%		68%	16.966.398.028	86%	17.298.941.000	95%	16.115.674.949	100%	17.115.674.949	100%	67.496.688.926	100%	18.115.674.949	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Puskesmas dengan Prasarana sesuai standar	18%	18%		64%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.13	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar	59,00%	59,00%		68,00%	5.218.115.605	86,00%	3.000.000.000	95,00%	6.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	21.218.115.605	100%	7.000.000.000	Dinkes Dalduk KB
1.2.2.14	**Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart	70%	70%		75%	481.236.350	80%	135.954.000	85%	140.000.000	90%	150.000.000	95%	907.190.350	95%	150.000.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase Tenaga Non Kesehatan sesuai standart	55%	55%		60%		65%		70%		75%		75%	-	75%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.15	**Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer	70%	70%		70%	8.295.576.898	75%	10.449.919.875	75%	11.184.328.794	80%	11.086.748.749	80%	41.016.574.316	80%	11.086.748.749	Dinkes Dalduk KB
		Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan	22%	15%		15%		15%		15%		15%		15%	-	15%		Dinkes Dalduk KB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Masyarakat Memanfaatkan Pelayanan SPGDT tertangani	N/A	85,71%		95%		95%		95%		95%		95%	-	95%		Dinkes Dalduk KB
		Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diawasi / dibina	N/A	N/A		20%		35%		40%		45%		55%	-	55%		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.16	**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Persentase PUS Dilayani KB		81	-	82	2.465.383.727	83	4.995.359.000	84	5.066.740.000	85	5.166.740.000	85	17.694.222.727	85	5.366.740.000	Dinkes Dalduk KB
		Persentase peserta KB Aktif MKJP	22,41	22,41		25		27,5		30		35		40	-	40		Dinkes Dalduk KB
		Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	83	83		84		85		86		87		87,5	-	87,5		Dinkes Dalduk KB
1.2.2.17	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	100%	-	100%	49.208.168	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	199.208.168	100%	50.000.000	RSUD dr. Soedomo
1.2.2.18	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	46,15%	53,85%	-	61,54%	4.176.183.293	69,23%	10.000.000.000	84,62%	4.500.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	25.676.183.293	100,00%	7.000.000.000	RSUD dr. Soedomo
1.2.2.19	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di rumah sakit	73%	75%	-	78%	7.659.062.085	100%	3.415.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.500.000.000	100%	17.874.062.085	100%	3.500.000.000	RSUD dr. Soedomo
1.2.2.20	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	46,15%	53,85%	-	61,54%	18.542.104.035	69,23%	6.449.387.000	84,62%	6.449.387.000	100,00%	6.449.387.000	100,00%	37.890.265.035	100%	6.449.387.000	RSUD dr. Soedomo
1.2.2.21	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah**	Persentase pasien di IGD yang dilayani < 5 menit	100%	100%	-	100%	89.919.921.662	100%	78.870.039.000	100%	94.000.000.000	100%	110.000.000.000	100%	372.789.960.662	100%	128.000.000.000	RSUD dr. Soedomo
		Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS	50,21‰	50,00‰		48,00‰		46,00‰		45,00‰		44,50‰		44,50‰	-	44,50‰		RSUD dr. Soedomo
		Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS	26,72‰	26,50‰		26,00‰		25,00‰		25,00‰		24,50‰		24,50‰	-	24,50‰		RSUD dr. Soedomo
		Bed Occupancy Rate (BOR)	69,00%	70,00%		71,00%		72,00%		73,00%		74,00%		74,00%	-	75,00%		RSUD dr. Soedomo
		Average Length of Stay (ALOS)	5,70 hari	5,75 hari		5,80 hari		5,85 hari		5,90 hari		6,00 hari		6,00 hari	-	6,00 hari		RSUD dr. Soedomo
		Bed Turn Over (BTO)	59,91 kali	57,00 kali		55,00 kali		53,00 kali		52,50 kali		50 kali		50 kali	-	50 kali		RSUD dr. Soedomo
		Turn Over Interval (TOI)	2,61 kali	2,50 kali		2,40 kali		2,30 kali		2,20 kali		2,10 kali		2,10 kali	-	2,10 kali		RSUD dr. Soedomo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Cash Ratio	122%	125%		128%		130%		133%		135%		140%	-	140%		RSUD dr. Soedomo
		Rentabilitas	128%	130%		128%		130%		130%		130%		135%	-	135%		RSUD dr. Soedomo
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71,75	72,00		72,50		73,00		73,50		75,00		75,00	-	75,00		RSUD dr. Soedomo
1.2.2.22	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit	77,78%	81,52%	-	90,22%	-	93,48%	-	97,83%	130.000.000	98,91%	150.000.000	98,91%	280.000.000	98,91%	175.000.000	RSUD dr. Soedomo
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 1					-		**440.052.041.657**		**437.528.385.050**		**512.629.004.938**		**546.845.395.437**		**1.937.054.827.081**		**578.413.098.374**	
2	**Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan**																	
2.1	**Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**	**Indeks Gini (Gini Ratio)**	**0,37**	**0,36**		**0,35**		**0,34-0,35**		**0,34-0,35**		**0,33-0,34**		**0,33-0,34**		**0,33-0,34**		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	**5,03**	**5,00**		**5,02**		**5,05-5,10**		**5,10-5,15**		**5,15-5,20**		**5,15-5,20**		**5,20-5,25**		
		PDRB per-kapita (Juta Rupiah)	**19,78**	**21,58**		**23,28**		**24,30-25,90**		**25,90-27,51**		**27,51-29,11**		**27,51-29,11**		**29,11-31,51**		
2.1.1	**Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan**	**Ketersediaan Pangan Daerah (ton) :**																
		a. Padi	**170.660,66**	**146.098,29**		**174.955,00**		**177.574,00**		**180.234,00**		**182.879,00**		**182.879,00**		**182.879,00**		
		b. Jagung	**80.672,95**	**67.528,21**		**83.826,00**		**85.492,00**		**87.193,00**		**88.928,00**		**88.928,00**		**88.928,00**		
		c. Kedelai	**9.793,20**	**6.702,96**		**9.773,00**		**9.866,00**		**9.961,00**		**10.056,00**		**10.056,00**		**10.056,00**		
		d. Kacang Tanah	**298.117,95**	**361.760,00**		**304.712,00**		**308.065,00**		**311.453,00**		**314.879,00**		**314.879,00**		**314.879,00**		
		e. Ubi Kayu	**4.329,75**	**4.501,50**		**4.679,25**		**4.866,75**		**5.061,75**		**5.264,25**		**5.264,25**		**5.264,25**		
		f. Daging	**2.194,34**	**2.273,85**		**2.297,82**		**2.389,59**		**2.484,92**		**2.584,52**		**2.584,52**		**2.584,52**		
		g. Telor	**5.331,98**	**5.597,52**		**5.877,40**		**5.994,57**		**6.114,28**		**6.236,51**		**6.236,51**		**6.236,51**		
		h. Susu	**24.325,46**	**26.289,16**		**17.203,00**		**19.215,53**		**21.252,61**		**23.316,18**		**23.316,18**		**23.316,18**		
		i. Ikan	**170.660,66**	**146.098,29**		**174.955,00**		**177.574,00**		**180.234,00**		**182.879,00**		**182.879,00**		**182.879,00**		
		Pola konsumsi masyarakat yang berimbang sesuai skor PPH (Pola Pangan Harapan)	**87,89**	**89,30**		**88,50**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		
2.1.1.1	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**				-		600.058.810		755.905.000		800.000.000		1.305.000.000		3.460.963.810		1.500.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		PPH tingkat ketersediaan	70,86	81,92		81,92		81,92		81,93		81,94		81,94		81,95		Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Cadangan Pangan	12,60	17,60		17,60 ton		27,60 ton		37,60 ton		47,60 ton		47,60		57,60 ton		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah kalori kelompok bahan pangan	1.792 kkal/kapita/har	1.783,90 kkal/kapita/hari		1.760,30 kkal/kapita/hari		1.762 kkal/kapita/hari		1.764 kkal/kapita/hari		1.766 kkal/kapita/hari		1.766 kkal/kapita/hari		1.768 kkal/kapita/hari		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2	**Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan**	**PDRB Sektor Pertanian (Juta Rupiah)**	**4.282.706,59**	**4.635.704,90**		**5.084.126,32**		**5.501.282,18**		**5.918.438,03**		**6.335.593,89**		**6.335.593,89**		**6.752.749,74**		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	**N/A**	**116,00**		**113,00**		**114,00**		**115,00**		**116,00**		**116,00**		**117,00**		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**N/A**	**117,00**		**112,00**		**114,00**		**116,00**		**118,00**		**118,00**		**120,00**		
2.1.2.1	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Jumlah produktivitas tanaman pangan :			-		898.744.024		1.362.974.000		1.125.000.000		1.800.000.000		5.186.718.024		1.800.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Padi	62,22 Ku/Ha	59,78 Ku/Ha		59,70 Ku/Ha		59,88 Ku/Ha		60,06 Ku/Ha		60,24 Ku/Ha		60,24 Ku/Ha		60,42 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jagung	63,51 Ku/Ha	61,91 Ku/Ha		60,42 Ku/Ha		64,08 Ku/Ha		64,28 Ku/Ha		64,47 Ku/Ha		64,47 Ku/Ha		64,66 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Kedelai	19,59 Ku/Ha	19,69 Ku/Ha		15,58 Ku/Ha		20,18 Ku/Ha		20,39 Ku/Ha		20,59 Ku/Ha		20,59 Ku/Ha		20,80 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ubi Kayu	240,50 Ku/Ha	246,08 Ku/Ha		224,39 Ku/Ha		244,13 Ku/Ha		245,35 Ku/Ha		246,57 Ku/Ha		246,57 Ku/Ha		247,80 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah produktivitas Hortikultura (Ku/Ha) :																
		Durian	144,28 Ku/Ha	321,10 Ku/Ha		119,38 Ku/Ha		155,37 Ku/Ha		159,26 Ku/Ha		163,24 Ku/Ha		163,24 Ku/Ha		167,32 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Manggis	58,76 Ku/Ha	85,4 Ku/Ha		92,5 Ku/Ha		64,21 Ku/Ha		66,13 Ku/Ha		68,12 Ku/Ha		68,12 Ku/Ha		70,16 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Salak	174,00 Ku/Ha	174,10 Ku/Ha		175,54 Ku/Ha		179,27 Ku/Ha		181,07 Ku/Ha		182,88 Ku/Ha		182,88 Ku/Ha		184,70 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pisang	122,01 Ku/Ha	107,50 Ku/Ha		145,49 Ku/Ha		129,48 Ku/Ha		132,07 Ku/Ha		134,71 Ku/Ha		134,71 Ku/Ha		137,40 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Cabai	48,10 Ku/Ha	47,00 Ku/Ha		41 Ku/Ha		48,83 Ku/Ha		49,07 Ku/Ha		49,31 Ku/Ha		49,31 Ku/Ha		49,56 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Bawang Merah	90,00 Ku/Ha	63,00 Ku/Ha		62,4 Ku/Ha		90,81 Ku/Ha		91,08 Ku/Ha		91,36 Ku/Ha		91,36 Ku/Ha		91,63 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Sayur - sayuran lainnya	246,98 Ku/Ha	135,75 Ku/Ha		94,76 Ku/Ha		255,55 Ku/Ha		258,48 Ku/Ha		261,44 Ku/Ha		261,44 Ku/Ha		264,44 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Biofarmaka	107,46 Ku/Ha	285,00 Ku/Ha		259,87 Ku/Ha		198,03 Ku/Ha		199,02 Ku/Ha		200,01 Ku/Ha		200,01 Ku/Ha		201,01 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Bunga	N/A	-		0,22 Ku/Ha		0,13 Ku/Ha		0,15 Ku/Ha		0,18 Ku/Ha		0,18 Ku/Ha		0,20 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Janggelan	2,10 Kw/Ha	12,60 Ku/Ha		111,63 Ku/Ha		126,00 Ku/Ha		127,30 Ku/Ha		128,50 Ku/Ha		128,50 Ku/Ha		129,80 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.2	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan**	Jumlah produktivitas perkebunan :			-		1.796.224.534		1.880.544.900		1.820.000.000		2.487.000.000		7.983.769.434		2.487.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Kakao	3,60 Ku/Ha	5,70 Ku/Ha		5,80 Ku/Ha		3,71 Ku/Ha		3,75 Ku/Ha		3,78 Ku/Ha		3,78 Ku/Ha		3,82 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Kelapa	9,80 Ku/Ha	16,99 Ku/Ha		11,73 Ku/Ha		9,95 Ku/Ha		10,00 Ku/Ha		10,05 Ku/Ha		10,05 Ku/Ha		10,10 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Cengkeh	8,80 Ku/Ha	7,25 Ku/Ha		2,36 Ku/Ha		2,33 Ku/Ha		8,91 Ku/Ha		2,34 Ku/Ha		2,34 Ku/Ha		2,35 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Kopi	7,60 Ku/Ha	9,77 Ku/Ha		8,26 Ku/Ha		7,83 Ku/Ha		7,91 Ku/Ha		7,99 Ku/Ha		7,99 Ku/Ha		8,07 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
		Nilam	16,15 Ku/Ha	42,60 Ku/Ha		48,55 Ku/Ha		49,82 Ku/Ha		50,49 Ku/Ha		51,46 Ku/Ha		51,46 Ku/Ha		52,43 Ku/Ha		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.3	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**				-		7.488.266.770		9.123.462.500		6.616.000.000		7.604.000.000		30.831.729.270		8.604.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya :																Dinas Pertanian dan Pangan
		Kelompok tani	N/A	N/A		56		36		38		40		40		42		Dinas Pertanian dan Pangan
		Gapoktan	N/A	N/A		15		11		13		15		15		17		Dinas Pertanian dan Pangan
		KWT	N/A	N/A		46		32		35		37		37		39		Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo	20%	30%		40%		50%		60%		70%		70%		80%		Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Luasan penerapan teknologi SRI	5%	10%		15%		25%		35%		45%		45%		10%		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah infrastruktur Pertanian yang terbangun :																Dinas Pertanian dan Pangan
		a. Jalan Usaha Tani	10.239 meter	11.263 meter		16.691,5 meter		13.628 meter		14.991 meter		16.490 meter		16.490 meter		18.139 meter		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		b. JITUT	8.085 meter	8.894 meter		8345,8 meter		10.761 meter		11.838 meter		13.021 meter		13.021 meter		14.323 meter		Dinas Pertanian dan Pangan
		c. Dam Parit	26 unit	28 unit		25 unit		21 Unit		23 unit		25 unit		25 unit		29 unit		Dinas Pertanian dan Pangan
		d. Irigasi Air Tanah	N/A	N/A		86 unit sumur bor		66 unit sumur bor		72 unit sumur bor		78 unit sumur bor		78 unit sumur bor		84 unit sumur bor		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah sarana pertanian yang diadakan	5 unit	10 unit		16 unit		10 unit		10 unit		10 unit		50 unit		10 unit		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah P3A yang berbadan hukum	47 kelompok	13 kelompok		22 kelompok		7 kelompok		25 kelompok		25 kelompok		139 kelompok		14 kelompok		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.4	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Nilai Tukar Petani (NTP)	N/A	116,00	-	114,00	-	115,00	200.000.000	115,00	200.000.000	116,00	200.000.000	116,00	600.000.000	116,00	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.5	**Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian**	Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian	100%	100%	-	100%	1.806.817.353	100%	3.922.225.000	100%	4.175.000.000	100%	4.175.000.000	100%	14.079.042.353	100%	4.175.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.6	**Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku**	Jumlah produksi tembakau dengan kadar nikotin rendah	N/A	N/A	-	N/A	-	10,33 Ku/Ha	-	10,38 Ku/Ha	400.000.000	10,43 Ku/Ha	400.000.000	10,43 Ku/Ha	800.000.000	10,48 Ku/Ha	400.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.7	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan**				-		1.519.225.150		1.070.725.000		1.675.000.000		2.050.000.000		6.314.950.150		2.650.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah populasi ternak (ekor):																Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	32.668 ekor	34.300 ekor		36.000 ekor		37.440 ekor		38.938 ekor		40.496 ekor		40.496 ekor		42.116 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi perah	4.831 ekor	5.070 ekor		5.320 ekor		5.426 ekor		5.535 ekor		5.646 ekor		5.646 ekor		5.759 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	362.287 ekor	380.400 ekor		399.400 ekor		419.300 ekor		440.300 ekor		462.300 ekor		462.300 ekor		485.400 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	10.230 ekor	10.700 ekor		11.250 ekor		11.800 ekor		12.400 ekor		13.050 ekor		13.050 ekor		13.700 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Unggas	3.195.816 ekor	3.301.780 ekor		3.411.424 ekor		3.524.490 ekor		3.641.680 ekor		3.763.193 ekor		3.763.193 ekor		3.889.030 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Produksi (ton):																Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging	5.773 ton	6.002 ton		6.239 ton		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Telur	3.008 ton	3.117 ekor		3.230 ekor		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		- Susu	6.325 ton	6.640 ton		6.972 ton		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	26 ekor	26 ekor		30 ekor		34 ekor		38 ekor		42 ekor		42 ekor		46 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		Kelahiran hasil IB	12.297 ekor	12.900 ekor		13.550 ekor		14.230 ekor		14.940 ekor		15.690 ekor		15.690 ekor		16.470 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase nilai tambah produk peternakan																Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging	20%-30%	20% - 30%		24%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Telur	30%-40%	30% - 40%		33%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Susu	15%-25%	15% - 25%		20%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.8	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**				-		462.026.350		520.355.500		550.000.000		995.000.000		2.527.381.850		995.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloasis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	N/A	2 unit		5 unit (+3 unit)		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	1.110 ekor sapi	500 ekor sapi		2.500 ekor sapi		5000 ekor		6000 ekor		6000 ekor		20.500 ekor		6.500 ekor		Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.2.9	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.866,352 ton	4.185,760 ton	-	4.534,81 ton	1.019.176.600	4.901,59 ton	1.100.000.000	5.297,23 ton	1.200.000.000	5.724,04 ton	1.235.000.000	5.724,04 ton	4.554.176.600	6.184,51 ton	1.235.000.000	Dinas Perikanan
		Jumlah produksi benih ikan	27.892.150 ekor	N/A		29.018.993 ekor		29.599.373 ekor		30.191.360 ekor		30.795.187 ekor		30.795.187 ekor	-	35.301.716 ekor		Dinas Perikanan
2.1.2.10	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	24.733,492 ton	N/A	-	15.683,813 ton	852.989.400	17.683,81 ton	946.000.000	19.683,813 ton	1.050.000.000	21.683,813 ton	1.850.000.000	21.683,813 ton	4.698.989.400	23.683,813 ton	2.000.000.000	Dinas Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan	18,35 ton	19,27 ton		20,19 ton		21,11 ton		22,03 ton		22,95 ton		22,95 ton	-	23,87 ton		Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1.2.11	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	Jumlah ikan yang didiversifikasi	10.804,66 ton	11.344,90 ton	-	11.912,15 ton	874.057.500	12.507,76 ton	1.410.000.000	13.133,15 ton	1.300.000.000	13.789,81 ton	1.430.000.000	13.789,81 ton	5.014.057.500	14.479,39 ton	1.500.000.000	Dinas Perikanan
		Jumlah Ikan Yang Dipasarkan	N/A	-	-	11.592,53 ton		12.859,31 ton		14.154,95 ton		1.5481,76 ton		1.5481,76 ton	-	16.842,23 ton		Dinas Perikanan
2.1.2.12	**Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan**	Jenis sarana prasarana perikanan	N/A	N/A	-	2 jenis	2.161.358.300	2 jenis	1.484.963.000	2 jenis	1.484.963.000	2 jenis	1.484.963.000	8 jenis	6.616.247.300	2 Jenis	1.534.963.000	Dinas Perikanan
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 2					**-**		**19.478.944.791**		**23.777.154.900**		**22.395.963.000**		**27.015.963.000**		**92.668.025.691**		**29.080.963.000**	
3	**Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis**																	
3.1	**Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastuktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**51,79**	**62,88**		**72,87**		**75,00-77,50**		**77,50-80,00**		**80,00-82,50**		**80,00-82,50**		**82,50-85,00**		
3.1.1	**Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis**	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan (%)**	**64,96**	**71,12**		**73,00**		**75,00**		**80,00**		**85,00**		**85,00**		**87,00**		
		Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik (%)	**90,07**	**92,05**		**94,04**		**96,03**		**98,01**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	**38,71**	**43,00**		**46,00**		**49,00**		**52,00**		**55,00**		**55,00**		**55,00**		
3.1.1.1	**Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	64,96%	71,12%		73%	112.892.409.849	75%	75.853.090.000	80%	73.340.000.000	85%	102.935.000.000	85%	365.020.499.849	87%	108.340.000.000	Dinas PUPR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	90,07%	92,05%		94,04%		96,03%		98,01%		100%		100%	-	100%		Dinas PUPR
3.1.1.2	**Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	60%	60%		65%	28.172.388.090	65%	9.996.500.000	68%	29.350.000.000	80%	30.350.000.000	80%	97.868.888.090	80%	35.350.000.000	Dinas PUPR
		Persentase jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	69,52%	69,52%		72,38%		74,29%		74,29%		84,76%		84,76%	-	84,76%		Dinas PUPR
		Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	70%	70%		74%		74%		80%		90%		90%	-	90%		Dinas PUPR
		Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	50%	50%		50%		50%		66,67%		70%		70%	-	70%		Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.1.1.3	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam kondisi baik	N/A	N/A		33%	838.057.500	-	-	-	-	-	-	33%	838.057.500	-	-	Dinas PUPR
3.1.1.4	**Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Persentase Panjang talud yang dipelihara	9%	20%		27%	25.737.570.000	37%	11.350.811.000	47%	13.730.000.000	57%	13.730.000.000	57%	64.548.381.000	67%	15.730.000.000	Dinas PUPR
3.1.1.5	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang siap pakai	84%	84%		84%	2.033.022.238	84%	1.600.000.000	84%	2.400.000.000	84%	2.400.000.000	84%	8.433.022.238	84%	2.400.000.000	Dinas PUPR
3.1.1.6	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database**	Persentase Data Jalan dan Jembatan yang disusun/dimutakhirkan	N/A	100%		100%	800.111.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	1.200.111.000	100%	100.000.000	Dinas PUPR
		Persentase Data Irigasi dan Sumber Daya Air yag disusun	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas PUPR
3.1.1.7	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	38,71%	43%		46%	22.437.138.450	49%	13.563.000.000	52%	18.635.000.000	55%	18.635.000.000	55%	73.270.138.450	55%	22.635.000.000	Dinas PUPR
		Persentase luas areal sawah yang diairi irigasi	42,11%	46%		51%		56%		61%		66%		66%	-	66%		Dinas PUPR
3.1.1.8	**Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Persentase dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berhasil disusun	100%	100%		100%	1.743.342.000	100%	650.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	7.193.342.000	100%	2.400.000.000	Dinas PUPR
3.1.1.9	**Program Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah**	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	47%	62%		66%	6.062.690.000	71%	3.140.000.000	74%	14.350.000.000	77%	14.350.000.000	77%	37.902.690.000	77%	24.935.000.000	Dinas PUPR
3.1.1.10	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	Persentase penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab	35,64%	N/A	-	65,53%	11.858.518.470	81,48%	17.871.200.000	100%	13.950.000.000	100%	14.950.000.000	100%	58.629.718.470	100%	15.950.000.000	Dinas PUPR
3.1.1.10	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**				-		650.540.503		9.505.000.000		990.000.000		1.146.899.999		12.292.440.502		1.146.899.999	Dinas Perhubungan
		Persentase pelayanan lalu lintas dan angkutan	91%	85,00%		87%		N/A		N/A		N/A		95%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	10%	6,67%		6,5%		N/A		N/A		N/A		6%	-	N/A		Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	77%	78,00%		79%		N/A		N/A		N/A		82%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	N/A	49,55%		50,45%		63,80%		66,77%		69,73%		69,73%	-	74,18%		Dinas Perhubungan
3.1.1.11	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**				-		3.152.090.227		1.399.000.000		1.250.460.000		1.250.460.000		7.052.010.227		1.250.460.000	Dinas Perhubungan
		Persentase alat uji kir yang terpelihara	100%	100%		100%		N/A		N/A		N/A		100%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	N/A	84%		84%		84%		84%		84%		84%	-	84%		Dinas Perhubungan
3.1.1.12	**Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas**				-		2.199.136.441		1.757.660.000		2.559.000.000		5.345.534.636		11.861.331.077		5.345.534.636	Dinas Perhubungan
		Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan:													-			Dinas Perhubungan
		a. Rambu	68,07%	71,33%		75,27%		N/A		N/A		N/A		92,47%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		b. Marka	56,96%	67,77%		77,77%		N/A		N/A		N/A		112,77%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		c. Guardrail	16,26%	19,24%		22,82%		N/A		N/A		N/A		38,42%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum) terpasang	112,21%	108,19%		107,52%		N/A		N/A		N/A		105,50%	-	N/A		Dinas Perhubungan
		Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan yang tersedia:													-			Dinas Perhubungan
		a. Rambu	N/A	33,29%		33,46%		33,62%		33,82%		34,09%		34,09%	-	34,49%		Dinas Perhubungan
		b. Marka	N/A	7,04%		7,94%		8,13%		9,03%		9,92%		9,92%	-	10,82%		Dinas Perhubungan
		c. Guardrail	N/A	0,15%		0,16%		0,17%		0,17%		0,18%		0,18%	-	0,18%		Dinas Perhubungan
		d. LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	N/A	33,28%		33,30%		33,43%		33,55%		33,65%		33,65%	-	33,76%		Dinas Perhubungan
3.1.1.13	**Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan**				-		539.759.000		599.340.000		850.000.000		850.000.000	6,00%	2.839.099.000		850.000.000	Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	10%	N/A		6,50%		N/A		N/A		N/A		6,00%	-	N/A		Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas Perhubungan
3.1.2	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi**	**Persentase Penduduk yang dapat mengakses air bersih (%)**	**16,09**	**20,81**		**25,53**		**30,25**		**34,98**		**39,70**		**39,70**		**39,70**		
		Persentase Penduduk yang dapat mengakses Sanitasi (%)	**52,88**	**60,98**		**70,91**		**80,46**		**90,15**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Persentase Rumah Layak Huni (%)	**96,65**	**96,94**		**97,40**		**97,85**		**98,31**		**98,77**		**98,77**		**99,23**		
		Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	**1,24**	**17,71**		**34,18**		**50,65**		**67,12**		**82,34**		**0,00**		**0,00**		
3.1.2.1	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman**	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	40,32%	45,16%	-	58,87%	22.771.075.663	72,58%	17.209.099.000	86,29%	18.201.500.000	100%	20.201.500.000	100%	78.383.174.663	100%	24.201.500.000	Dinas PKPLH
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	1,50%	20%		20%		20%		20%		18,50%		100%	-	100%		Dinas PKPLH
		Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	30,35%	39,36%		54,29%		69,37%		84,61%		99,95%		99,95%	-	99,95%		Dinas PKPLH
3.1.2.2	**Program Pengembangan/ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	37,03%	50,00%	-	62,22%	7.283.633.535	74,81%	3.706.680.000	87,41%	6.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	26.990.313.535	100%	12.000.000.000	Dinas PKPLH
3.1.2.3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/Non Perpipaan Perdesaan**	Persentase Penduduk Perdesaan yang Mendapat Akses Air Bersih	16,09%	20,81%	-	25,53%	6.472.373.450	30,25%	11.004.245.000	34,98%	12.300.000.000	39,70%	13.300.000.000	44,42%	43.076.618.450	44,42%	14.300.000.000	Dinas PKPLH
4.2.1.5	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Drainase	80,06%	81,64%	-	85,60%	-	89,95%	-	94,73%	6.200.000.000	100%	6.525.000.000	100%	12.725.000.000	100%	8.525.000.000	Dinas PKPLH
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%	-	100%		Dinas PKPLH
4.2.1.1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	Persentase Pengelolaan Sampah	28,57%	42,86%	-	57,14%	-	71,43%	-	85,71%	7.250.000.000	100%	13.780.000.000	100%	21.030.000.000	100%	13.780.000.000	Dinas PKPLH
3.1.3	**Meningkatnya daya saing wisata**	**Jumlah Kunjungan Wisata (orang)**	**581.614**	**595.938**		**750.000**		**800.000**		**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		
3.1.2.4	**Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya**				-		2.377.175.067		2.215.000.000		2.215.000.000		2.650.000.000		9.457.175.067		3.650.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase BCB/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	19%	19%		34%		56%		78%		100%		100%	-	100%		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sanggar/kelompok kesenian yang aktif	50%	56%		62%		68%		75%		81%		81%	-	100%		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.1.3.1	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	5 obyek wisata	6 obyek wisata	-	8 obyek wisata	3.844.519.575	10 obyek wisata	2.700.000.000	12 obyek wisata	2.700.000.000	14 obyek wisata	8.275.000.000	14 obyek wisata	17.519.519.575	16 obyek wisata	12.275.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase rata-rata pertumbuhan pengunjung setiap destinasi wisata	9%	10%		17%		7%		13%		11%		11%	-	20%		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.1.3.2	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	584.414 orang	642.855 orang	-	750.000 orang	1.218.359.886	800.000 orang	1.086.000.000	900.000 orang	1.086.000.000	1.000.000 orang	1.400.000.000	1.000.000 orang	4.790.359.886	1.200.000 orang	1.400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.1.3.2	**Program Pengembangan Kemitraan**	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kepariwisataan	180	235	-	235	351.182.270	235	450.000.000	235	550.000.000	235	700.000.000	1.175	2.051.182.270	250	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata	N/A	N/A		2		4		6		8		8	-	10		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 3					-		**263.435.093.214**		**185.856.625.000**		**230.406.960.000**		**285.274.394.635**		**964.973.072.849**		**327.264.394.635**	
4	**Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat**																	
4.1	**Meningkatkan daya saing tenaga kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)**	**4,46**	**3,07**		**4,35-4,40**		**4,30-4,35**		**4,25-4,30**		**4,20-4,25**		**4,20-4,25**		**4,15-4,20**		
4.1.1	**Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)**	**74,43**	**75,59**		**75,10**		**75,40**		**75,70**		**76,00**		**76,00**		**76,00**		
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	**95,54**	**96,93**		**95,70**		**95,80**		**95,90**		**96,00**		**96,00**		**96,00**		
4.1.1.1	**Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	88,89%	36,36%	-	60,61%	763.949.000	69,70%	580.000.000	84,85%	150.000.000	100%	200.000.000	79%	1.693.949.000	78%	250.000.000	Dinas Perinaker
		Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	N/A	20%		40%		60%		-		-		100%		-		
4.1.1.2	**Program peningkatan kesempatan kerja**	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja	51,54%	59%	-	62%	473.181.500	-	830.000.000	-	1.865.000.000	-	1.865.000.000	-	5.033.181.500	-	2.000.000.000	Dinas Perinaker

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD dan AKAN) terhadap pencari kerja yang terdaftar	N/A	-		-		63%		64%		65%		65%		67%		
4.1.1.3	**Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan (PP), peraturan kerja bersama (PKB), dan perjanjian kerja (PK)	N/A	N/A	-	57%	285.476.100	-	700.000.000	-	450.000.000	-	700.000.000	57%	2.135.476.100	-	725.000.000	Dinas Perinaker
		Persentase perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/ Peraturan Kerja Bersama (PKB)	N/A	N/A		-		69%		83%		100%		77%		40%		
4.1.1.4	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**	Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	80%	1.425.000.000	100%	1.425.000.000	100%	2.850.000.000	100%	1.425.000.000	Dinas Perinaker
4.1.1.5	**Program Transmigrasi regional**	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	N/A	N/A	-	100%	221.258.230	100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	1.421.258.230	100%	500.000.000	Dinas Perinaker
4.1.2	**Meningkatnya investasi di daerah**	**Jumlah investasi (Milyar Rp)**	**165,00**	**232,00**		**260,00**		**275,00**		**365,00**		**400,00**		**1500,00**		**600,00**		
4.1.2.1	**Program Pengembangan Penanaman Modal**	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	165 Milyar	200 Milyar	-	260 Milyar	420.384.105	275 Milyar	381.200.000	365 Milyar	410.700.000	400 Milyar	451.770.000	1.500 Milyar	1.664.054.105	600 Milyar	501.770.000	Dinas PM PTSP
4.1.2.2	**Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP**	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Penanaman Modal dan Perizinan	N/A	82	-	82	616.358.152	84	565.250.000	84	703.250.000	86	773.575.000	86	2.658.433.152	86	803.575.000	Dinas PM PTSP
4.1.2.3	**Program Pelayanan Perizinan**	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	-	100%	389.124.689	100%	381.800.000	100%	501.300.000	100%	551.430.000	100%	1.823.654.689	100%	581.430.000	Dinas PM PTSP
4.1.3	**Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan**	**Persentase Koperasi Sehat (%)**	**19,64**	**25,00**		**30,00**		**35,00**		**40,00**		**45,00**		**45,00**		**50,00**		
		Persentase Usaha Mikro yang Berdaya Saing (%)	**20,00**	**33,60**		**48,00**		**68,00**		**84,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing (%)	**21,43**	**35,00**		**50,00**		**64,29**		**78,57**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik (%)	**21,74**	**26,09**		**34,78**		**43,48**		**52,17**		**69,57**		**69,57**		**73,91**		
4.1.3.1	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan dan dikembangkan	N/A	360	-	420	2.331.725.992	370	1.361.518.000	370	1.100.000.000	370	2.475.000.000	1530	7.268.243.992	370	2.500.000.000	Dinas Komidag
4.1.3.2	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Jumlah koperasi aktif	N/A	N/A	-	394	777.036.243	426	696.550.000	459	700.000.000	492	928.070.000	492	3.101.656.243	525	1.000.000.000	Dinas Komidag
		Jumlah Anggota Koperasi	N/A	N/A		99.491		103.817	-	108.142,50	-	112.468,20	-	112.468,20	-	116.793,90		
		Jumlah Koperasi Sehat	N/A	N/A		150		200		250		300		300	-	300		
4.1.3.3	**Program Pengelolaan Pasar Daerah**	Persentase Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara	100%	100%	-	100%	512.499.900	100%	746.500.000	100%	37.350.000.000	100%	1.320.000.000	100%	39.928.999.900	100%	2.320.000.000	Dinas Komidag
		Jumlah pedagang pasar yang dibina	50			30		40		0%		0%		70		0%		
		Persentase Pasar Daerah yang dibangun dan direvitalisasi	0%			0%		0%		22%		13%		13%		13%		
4.1.3.4	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	6.509	7.000	-	4.000	269.242.142	4.500	2.650.000.000	-	-	-	300.000.000	5.500	3.219.242.142	-	400.000.000	Dinas Komidag
4.1.3.5	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai target dan tepat sasaran	N/A	N/A	-	25%	157.514.100	25%	128.850.000	-	-	-	150.000.000	100%	436.364.100	-	150.000.000	Dinas Komidag
		Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	N/A	N/A		100%		100%		-		-		100%	-	-		
		Persentase promosi perdagangan yang dilaksanakan/ diikuti	N/A	N/A		100%		100%		-		-		100%	-	-		
4.1.3.6	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan**	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	22%	N/A	-	22%	4.600.370.103	22%	13.700.000.000	-	2.100.000.000	-	12.100.000.000	22%	32.500.370.103	-	15.100.000.000	Dinas Komidag
4.1.3.7	**Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan**	Persentase Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	N/A	N/A	-	13%	11.960.000	13%	50.000.000	-	-	-	50.000.000	27%	111.960.000	-	50.000.000	Dinas Komidag

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.1.3.8	**Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan**	Persentase UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	60,71%	712.400.000	62,67%	1.045.000.000	62,67%	1.757.400.000	64,62%	1.045.000.000	Dinas Komidag
		Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	N/A	N/A		N/A	-	N/A	-	100%		100%		100%		100%		
4.1.3.9	**Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**	Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi	N/A	N/A	-	30%	1.220.241.615	62%	2.955.000.000	72%	2.290.000.000	83%	2.550.000.000	83%	9.015.241.615	50%	2.750.000.000	Dinas Perinaker
4.1.3.10	**Program Pembinaan Industri**	Persentase industri tembakau yang dibina	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	33%	125.000.000	67%	125.000.000	67%	250.000.000	67%	150.000.000	Dinas Perinaker
4.2	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**64,17**	**67,04**		**64,00-65,00**		**65,00-66,00**		**66,00-67,00**		**67,00-68,00**		**67,00-68,00**		**67,00-68,00**		
4.2.1	**Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan**	**Indeks Kualitas Air**	**36,67**	**45,83**		**46,00**		**46,20**		**46,40**		**46,60**		**46,80**		**46,80**		
		Indeks Kualitas Udara	**95,19**	**95,59**		**95,63**		**95,67**		**95,71**		**95,75**		**95,79**		**95,79**		
		Indeks Tutupan Vegetasi	**61,53**	**61,53**		**62,00**		**63,00**		**64,00**		**65,00**		**65,00**		**65,00**		
4.2.1.1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	Persentase Pengelolaan Sampah	28,57%	42,86%		57,14%	9.134.326.882	71,43%	9.155.177.000	-	-	-	-	100%	18.289.503.882	-	-	Dinas PKPLH
4.2.1.2	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	100%	-	100%	843.723.718	100%	927.825.000	100%	1.025.000.000	100%	1.307.710.000	100%	4.104.258.718	100%	1.307.710.000	Dinas PKPLH
		Persentase Pemantauan Status Mutu Air dan udara	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas PKPLH
		Persentase Pembinaan dan Pentaatan Lingkungan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		Dinas PKPLH
4.2.1.3	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Bertambahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	N/A	N/A	-	-	-	100%	962.000.000	100%	800.000.000	100%	1.464.500.000	100%	3.226.500.000	100%	1.464.500.000	Dinas PKPLH
4.2.1.4	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Persentase Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup	N/A	N/A	-	100%	485.440.050	100%	469.500.000	100%	325.000.000	100%	811.055.000	100%	2.090.995.050	100%	811.055.000	Dinas PKPLH
4.2.1.5	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Drainase	80,06%	81,64%	-	85,60%	15.568.375.900	89,95%	13.127.506.000	-	-	-	-	100%	28.695.881.900	-	-	Dinas PKPLH
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	50%	60%		70%		80%		-		-		100%	-	-		Dinas PKPLH
4.2.2	**Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**Persentase Desa Tangguh Bencana (%)**	**14,65**	**14,65**		**17,20**		**19,11**		**21,02**		**23,57**		**23,57**		**26,11**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.2.2.1	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	67%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	BPBD
4.2.2.2	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	23 desa/kel	23 desa/kel	-	4 desa/kel	684.889.668	3 desa/kel	835.000.000	4 desa/kel	630.000.000	4 desa/kel	700.000.000	15 desa/kel	2.849.889.668	4 desa/kel	750.000.000	BPBD
4.2.2.3	**Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana**	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	100%	100%	-	100%	638.610.922	100%	555.000.000	100%	1.700.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.893.610.922	100%	2.100.000.000	BPBD
		Persentase distribusi logistik Penanggulangan Bencana pada daerah bencana	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		BPBD
4.2.2.4	**Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana**	Persentase dokumen identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana	100%	100%	-	100%	44.685.026	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	219.685.026	100%	75.000.000	BPBD
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 4					-		**40.450.374.037**		**52.208.676.000**		**54.712.650.000**		**33.868.110.000**		**181.239.810.037**		**38.760.040.000**	
5	**Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak**																	
5.1	**Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**92,76**	**92,81**		**92,80-92,85**		**92,85-92,90**		**92,90-92,95**		**92,95-93,00**		**92,95-93,00**		**93,00-93,05**		
5.1.1	**Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**65,58**	**66,21**		**67,00**		**68,00**		**69,00**		**70,00**		**70,00**		**71,00**		
		Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	**40,00**	**50,00**		**55,00**		**60,00**		**65,00**		**70,00**		**70,00**		**75,00**		
5.1.1.1	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun	N/A	N/A	-	29,41%	462.267.102	58,82%	436.600.000	82,35%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.898.867.102	100%	500.000.000	Dinsos P3A
		Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk	5	5		5		10		15		20		20	-	20		Dinsos P3A
		Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk	N/A	2		2		7		10		13		13	-	13		Dinsos P3A
		Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	N/A	21,43%		21,43%		57,14%		71,43%		85,71%		85,71%	-	85,71%		Dinsos P3A
5.1.1.2	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk	N/A	N/A	-	1 Desa	48.969.429	2 Desa	205.000.000	3 Desa	135.000.000	4 Desa	150.000.000	4 Desa	538.969.429	4 Desa	200.000.000	Dinsos P3A
		Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk	N/A	N/A		1 Desa		2 Desa		3 Desa		4 Desa		4 Desa	-	4 Desa		Dinsos P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.1.1.3	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak	N/A	14,29%	-	14,29%	266.598.778	23,81%	160.000.000	33,33%	160.000.000	42,86%	170.000.000	42,86%	756.598.778	52,38%	200.000.000	Dinsos P3A
5.1.1.4	**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	N/A	N/A	-	20 Orang	36.297.000	25 Orang	-	30 Orang	100.000.000	35 Orang	100.000.000	35 Orang	236.297.000	40 orang	100.000.000	Dinsos P3A
5.2	**Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa**	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**0,64**	**0,65**		**0,65-0,66**		**0,66-0,67**		**0,67-0,68**		**0,68-0,69**		**0,68-0,69**		**0,69-0,70**		
5.2.1	**Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat**	**Jumlah Desa Maju (Desa)**	**21**	**30**		**35**		**40**		**45**		**50**		**50**		**55**		
5.2.1.1	**Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				-		1.061.946.623		1.123.000.000		1.450.000.000		1.624.999.990		5.259.946.613		1.750.000.000	Dinas PMD
		Persentase desa yang telah menyusun Perdes tentang SPM desa	N/A	N/A		N/A		9%		46%		100%		100%	-	100%		Dinas PMD
		Persentase SDM aparatur desa yang meningkatkan kompetensinya	N/A	N/A		10%		10%		10%		10%		40%	-	10%		Dinas PMD
		Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina	N/A	N/A		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064	-	7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		Dinas PMD
		Persentase desa yang tertib administrasi	N/A	N/A		25%		25%		25%		25%		100%	-	25%		Dinas PMD
5.2.1.2	**Program Pelaksanaan Menejemen Pembangunan Desa**				-		1.061.700.150		1.120.500.000		1.020.000.000		1.120.000.000		4.322.200.150		1.120.000.000	Dinas PMD
		Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan	N/A	N/A		40%		60%		80%		100%		100%	-	100%		Dinas PMD
		Persentase Desa yang mampu menyusun pelaporan keuangan desa sesuai peraturan perundangan dan berbasis IT	N/A	N/A		40%		60%		80%		100%		100%	-	100%		Dinas PMD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase desa yang mampu menggerakan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai swadaya di atas 1% nilai APBDesa	N/A	N/A		5%		10%		20%		30%		30%	-	40%		Dinas PMD
5.2.1.3	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan**				-		984.446.740		1.125.000.000		1.130.000.000		1.210.000.000		4.449.446.740		1.210.000.000	Dinas PMD
		Jumlah Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif yang Berdaya	N/A	N/A		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		80 Kelompok	-	20 Kelompok		Dinas PMD
		Jumlah inovator TTG, Wartekdes dan Posyantek	N/A	N/A		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		8 Inovator, 8 karya TTG, 16 Wartekdes yang aktif dan 14 Posyantek yang aktif	-	2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		Dinas PMD
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 5					-		**3.922.225.822**		**4.170.100.000**		**4.495.000.000**		**4.874.999.990**		**17.462.325.812**		**5.080.000.000**	
6	**Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa**																	
6.1	**Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat**	**Indeks Kebahagiaan *(Index of Happiness)***	**60,95**	**63,92**		**65,00-66,00**		**66,00-67,00**		**67,00-68,00**		**68,00-69,00**		**68,00-69,00**		**69,00-70,00**		
6.1.1	**Meningkatnya suasana yang nyaman, aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**	**Angka Kriminalitas**	**5,86**	**4,50**		**< 5,60**		**< 5,40**		**< 5,20**		**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		
6.1.1.1	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	Persentase Penyelesaian Konflik Suku, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	-	100%	278.260.000	100%	484.500.000	100%	445.000.000	100%	500.000.000	100%	1.707.760.000	100%	500.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.1.1.2	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	Jumlah Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat	N/A	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	-	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	519.910.291	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	862.200.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	1.313.700.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	1.320.000.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	4.015.810.291	100%	1.350.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.1.1.3	**Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**	Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan	100%	100%	-	100%	51.715.000	100%	53.700.000	-	-	-	-	100%	105.415.000	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.1.1.4	**Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi**	Jumlah Ormas Yang Terdaftar (Legal)	N/A	5 Ormas Yang Terdaftar	-	5 Ormas Yang Terdaftar	176.658.000	5 Ormas Yang Terdaftar	663.800.000	5 Ormas Yang Terdaftar	579.000.000	5 Ormas Yang Terdaftar	579.000.000	5 Ormas Yang Terdaftar	1.998.458.000	5 Ormas Yang Terdaftar	600.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah Parpol yang Mendapat Bantuan	N/A	10 Parpol yang mendapat bantuan	-	10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan	-	10 Parpol yang mendapat bantuan		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.1.1.5	**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**	Pembentukan Panitian Ranham dan Tim fasilitasi Ranham yang nantinya menyusun program Ham Kabupaten Trenggalek	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.1.1.6	**Program Peningkatan Kepatuhan Implementasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	-	100%	34.899.400	-	-	-	-	-	-	100%	34.899.400	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.7	**Program Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah**	Persentase kasus pelanggaran yang disclesaikan	100%	100%	-	100%	263.292.705	100%	325.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000	100%	1.188.292.705	100%	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.8	**Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**	Persentase kegiatan yang difasilitasi dan ditangani pengamanannya	100%	100%	-	100%	431.652.803	100%	635.000.000	100%	590.000.000	100%	650.000.000	100%	2.306.652.803	100%	650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.9	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	Persentase anggota Satlinmas yang telah mengikuti diklat/pembinaan	100%	100%	-	100%	125.874.500	100%	1.400.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	3.175.874.500	100%	850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.10	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	66,67%	72,22%	-	77,78%	151.780.000	83,33%	365.000.000	88,89%	200.000.000	94,44%	250.000.000	94,44%	966.780.000	94,44%	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.11	**Program Pengembangan Sumber Daya aparatur**	Persentase anggota Satpol PPK yang mengikuti Pelatihan	100%	100%	-	100%	283.583.865	100%	370.000.000	100%	440.000.000	100%	600.000.000	100%	1.693.583.865	100%	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.1.12	**Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**	Persentase kasus Barang Kena Cukai Ilegal yang ditindaklajuti	N/A	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
6.1.2	**Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat**	**Indeks Kesalehan Sosial**	**N/A**	**N/A**		**58,00**		**58,50**		**59,00**		**60,00**		**60,00**		**60,50**		
6.1.2.1	**Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya**	Persentase Dukungan Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang berjalan optimal	100%	100%	-	100%	1.844.254.537	100%	2.180.000.000	100%	2.239.500.000	100%	2.734.999.999	100%	8.998.754.536	100%	2.734.999.999	Sekretariat Daerah
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 6					-		**4.161.881.101**		**7.439.200.000**		**6.957.200.000**		**8.033.999.999**		**26.592.281.100**		**8.084.999.999**	
7	**Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah**																	
7.1	**Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat**	**Angka Kemiskinan (%)**	**13,39**	**13,24**		**12,75-13,25**		**12,00-12,75**		**11,25-12,00**		**10,50-11,25**		**10,50-11,25**		**9,75-10,50**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.1.1	**Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial**	**Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (orang)**	**92.170**	**91.490**		**89.990**		**87.990**		**85.490**		**82.170**		**82.170**		**79.670**		
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	**2,18**	**1,74**		**2,10**		**2,00**		**1,90**		**1,80**		**1,80**		**1,70**		
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,59**	**0,37**		**0,55**		**0,50**		**0,45**		**0,40**		**0,40**		**0,35**		
7.1.1.1	**Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)	20,26%	21,24%	-	28,43%	469.892.000	34,63%	650.000.000	42,83%	782.000.000	50,02%	882.000.000	50,02%	2.783.892.000	57,22%	882.000.000	Dinsos P3A
7.1.1.2	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)	4,12%	53,13%	-	54,07%	197.481.500	55,10%	855.700.000	57,16%	582.075.000	58,19%	682.075.000	58,19%	2.317.331.500	59,22%	782.075.000	Dinsos P3A
		Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)	13,34%	13,96%	-	28,01%		29,43%		30,96%		32,75%		32,75%	-	32,75%		Dinsos P3A
7.1.1.3	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	59,23%	62,23%	-	63,25%	1.058.131.026	65,59%	871.915.000	67,93%	1.100.000.000	70,27%	1.200.000.000	70,27%	4.230.046.026	72,62%	1.300.000.000	Dinsos P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	59,62%	60,00%	-	80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		95,00%	-	95,00%		Dinsos P3A
7.1.1.4	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	8,41%	10,59%	-	11,00%	118.727.500	11,50%	150.000.000	12,00%	145.000.000	12,50%	150.000.000	12,50%	563.727.500	12,50%	150.000.000	Dinsos P3A
7.1.1.5	**Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan /bantuan sosial) (%)	6,02%	6,77%	-	8,55%	214.048.580	9,43%	300.000.000	10,49%	270.000.000	11,55%	270.000.000	12,05%	1.054.048.580	12,61%	270.000.000	Dinsos P3A
7.1.1.6	**Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)	31,62%	38,47%	-	80,83%	78.119.000	82,00%	125.000.000	84,00%	130.000.000	86,00%	130.000.000	88,00%	463.119.000	88,00%	130.000.000	Dinsos P3A
		Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	4,92%	9,70%	-	9,70%		9,70%		12,12%		12,12%		17,14%	-	18,18%		Dinsos P3A
7.1.1.7	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	16,47%	19,41%	-	20,00%	60.835.200	22,00%	84.000.000	24,00%	97.350.000	26,00%	100.000.000	26,00%	342.185.200	26,00%	100.000.000	Dinsos P3A
7.1.1.8	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	2,15%	4,84%	-	7,54%	124.841.500	10,23%	150.000.000	13,37%	175.000.000	16,51%	175.000.000	16,51%	624.841.500	20,09%	175.000.000	Dinsos P3A
7.1.1.9	**Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial**	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial	N/A	N/A	-	1 model	130.354.050	2 model	205.800.000	2 model	300.000.000	3 model	300.000.000	3 model	936.154.050	3 model	300.000.000	Dinsos P3A
Jumlah Kebutuhan Anggaran Misi 7					**-**		**2.452.430.356**		**3.392.415.000**		**3.581.425.000**		**3.889.075.000**		**13.315.345.356**		**4.089.075.000**	

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB VIII



INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD ini berisi program-program yang disesuaikan dengan perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan pendanaan akan menghasilkan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program-program pembangunan Kabupaten Trenggalek mengacu pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya.

Pagu indikatif tiap urusan pemerintahan akan diproyeksikan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas *riil* anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2). Menentukan kerangka pendanaan tiap-tiap urusan pemerintahan sesuai dengan beban target kinerja;
3). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah menentukan kerangka pendanaan urusan pemerintahan; dan
4). Menghitung alokasi pagu Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan program-program juga memperhatikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan baik dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang akan disusun. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan dukungan program yang bersifat rutin yang terdiri dari :

UMUM		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah (sesuai PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib :

1.01	**Pendidikan**	
	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	03	Program Pendidikan Menengah
	04	Program Pendidikan Non Formal
	05	Program Pendidikan Luar Biasa
	06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	07	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.02	**Kesehatan**	
	01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	03	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	04	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	06	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	07	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	08	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
	09	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
	13	Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan
	14	Gerbang Angkasa Biru
	15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	16	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
	17	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
	18	Program Peningkatan Kesehatan Aparatur
	19	Program Lingkungan Sehat
	20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1.03	**Pekerjaan Umum**	
	01	Program pembangunan jalan dan jembatan
	02	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	03	Program pembangunan turap/talud/bronjong
	04	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	05	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
	06	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	07	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	08	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Daerah Irigasi
	09	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.04	**Perumahan**	

	01	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Perumahan
	02	Program Pengembangan Perumahan
	03	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	04	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	05	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman
	06	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.05	**Penataan Ruang**	
	01	Program Perencanaan Tata Ruang
	02	Program Pemanfaatan Ruang
	03	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.06	**Perencanaan Pembangunan**	
	01	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
	02	Program perencanaan pembangunan daerah
	03	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	04	Program perencanaan sosial dan budaya
	05	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.07	**Perhubungan**	
	01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	02	Pogram peningkatan pelayanan angkutan
	03	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
	04	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	05	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1.08	**Lingkungan Hidup**	
	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	02	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
	03	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	04	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	05	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.09	**Pertanahan**	
	01	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	02	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.10	**Kependudukan dan Catatan Sipil**	
	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.11	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
	01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	03	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
	04	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.12	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**	
	01	Program Keluarga Berencana
	02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	03	Program pelayanan kontrasepsi
	04	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
	05	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
	06	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
1.13	**Sosial**	
	01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	02	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	03	Program pembinaan anak terlantar
	04	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
	05	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
	06	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
	07	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	08	Program Pelayanan Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Non Formal
1.14	**Tenaga Kerja**	
	01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	02	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

	03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.15	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
	01	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
	02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	03	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	04	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.16	**Penanaman Modal**	
	01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	03	Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan
1.17	**Kebudayaan**	
	01	Program Pengembangan Nilai Budaya
	02	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	03	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.18	**Pemuda dan Olah Raga**	
	01	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	02	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
	03	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
	05	Program Fasilitasi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.19	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	
	01	Program peningkatan disiplin aparatur
	02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	03	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	04	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	05	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
	06	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	07	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
	08	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
	09	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	10	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
	11	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
	12	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
1.20	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian**	
	01	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	02	Program peningkatan disiplin aparatur
	03	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
	04	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	05	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	06	Program Pengembangan dan peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah
	07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	08	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	09	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	11	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	12	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
	13	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
1.21	**Ketahanan Pangan**	
	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.22	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
	01	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	02	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	03	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan
	04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	05	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
	06	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	07	Program Pemberdayaan Teknologi
	08	Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.23	**Statistik**	

	01	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.24	**Kearsipan**	
	01	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1.25	**Komunikasi dan Informatika**	
	01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	02	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
	03	Program kerjasama informasi dengan mas media
	04	Program Pengumpulan Informasi
1.26	**Perpustakaan**	
	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Pilihan :

2.01	**Pertanian**	
	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	03	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	04	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	05	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	06	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	07	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	08	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
	09	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.02	**Kehutanan**	
	01	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	02	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	03	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	04	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
	05	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2.03	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	
	01	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
	02	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.04	**Pariwisata**	
	01	Program pengembangan pemasaran pariwisata
	02	Program pengembangan destinasi pariwisata
	03	Program pengembangan Kemitraan
2.05	**Kelautan dan Perikanan**	
	01	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
	02	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
	03	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
	04	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
	05	Program pengembangan budidaya perikanan
	06	Program pengembangan perikanan tangkap
	07	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	08	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2.06	**Perdagangan**	
	01	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	02	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	03	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2.07	**Perindustrian**	
	01	Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.08	**Transmigrasi**	
	01	Program transmigrasi regional

Total jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sejumlah **176 program Perangkat Daerah** (4 program diantaranya adalah program rutin),

Sementara program pembangunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

1.01	**Pendidikan**	
	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
	04	Program Pendidikan Masyarakat
	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
	06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	07	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.02	**Kesehatan**	
	01	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah
	02	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
	03	Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
	04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	05	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	06	Program Penyehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan Olahraga
	07	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa
	08	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	09	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
	10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	11	Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman
	12	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
	13	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	14	Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan
	15	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	18	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
	20	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
	21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.03	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	
	01	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
	02	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	03	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	04	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	06	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database
	07	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	08	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	09	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
1.04	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	
	01	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman
	02	Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	03	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
	04	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
	05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan
1.05	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**	
	01	Program Peningkatan Kepatuhan Implementasi pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	02	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	03	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	04	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

	05	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	06	Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur
	07	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
	08	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	09	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
	10	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
	11	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	12	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
	13	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
	14	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana
1.06	**Sosial**	
	01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	02	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	03	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	04	Program Pembinaan Anak Terlantar
	05	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	06	Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo
	07	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
	08	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	09	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

2.01	**Tenaga Kerja**	
	01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	02	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	04	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
2.02	**Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**	
	01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	03	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
	04	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2.03	**Pangan**	
	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.04	**Pertanahan**	
	01	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.05	**Lingkungan Hidup**	
	01	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan
	02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	03	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	04	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
	05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
2.06	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	
	01	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	02	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
	03	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	04	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	05	Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	
	01	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
	02	Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa
	03	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan
2.08	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
	01	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut
	02	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**Perhubungan**	
	01	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
	02	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	03	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas
	04	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan

2.10	**Komunikasi Dan Informatika**	
	01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	02	Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
	03	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	04	Program Pengembangan e-Government
	05	Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	
	01	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
	02	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.12	**Penanaman Modal**	
	01	Program Pengembangan Penanaman Modal
	02	Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP
	03	Program Pelayanan Perizinan
2.13	**Kepemudaan Dan Olahraga**	
	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
	02	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.14	**Statistik**	
	01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2.15	**Persandian**	
	01	Program Peningkatan Layanan Persandian
2.16	**Kebudayaan**	
	01	Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya
2.17	**Perpustakaan**	
	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.18	**Kearsipan**	
	01	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan :

3.01	**Kelautan Dan Perikanan**	
	01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	03	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	04	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan
3.02	**Pariwisata**	
	01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	02	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	03	Program Pengembangan Kemitraan
3.03	**Pertanian**	
	01	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura
	02	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan
	03	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	04	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	05	Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian
	06	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
	07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan
	08	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3.04	**Perdagangan**	
	01	Program Pengelolaan Pasar Daerah
	02	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	03	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
	04	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
	05	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
	06	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan
3.05	**Perindustrian**	
	01	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	02	Program Pembinaan Industri
3.06	**Transmigrasi**	
	01	Program Transmigrasi Regional

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Yang Menjadi Kewenangan Daerah :

4.01	**Administrasi Pemerintahan**	
	01	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	02	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	03	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
	04	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	05	Program Penataan dan Pelayanan Hukum
	06	Program Pendukung Peningkatan Perekonomian
	07	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
	08	Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
	09	Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
	10	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	11	Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah
	12	Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah
	13	Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD
	14	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau
	15	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	16	Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
	17	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
4.02	**Pengawasan**	
	01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	02	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	03	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
4.03	**Perencanaan**	
	01	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
	02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	03	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	04	Program Perencanaan Perekonomian
	05	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
	06	Program Perencanaan Fisik dan Prasarana
	07	Program Perencanaan Umum Tata Ruang
	08	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
	09	Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
	10	Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
4.04	**Keuangan**	
	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	02	Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
	03	Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah
	04	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	05	Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah
	06	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah
4.05	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	
	01	Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur
	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	03	Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian
4.06	**Penelitian dan Pengembangan**	
	01	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka disusun pula program-program prioritas Non Nomenklatur dalam rangka mewujudkan perencananaan holistik-tematik, integratif dan spasial yang terdiri dari Program Lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan.

	PROGRAM LINTAS PERANGKAT DAERAH	
	01	SMART Regency
	02	Pertanian Terpadu Plus
	03	Trenggalek Membangun
	04	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)
	05	GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)
	PROGRAM KEWILAYAHAN	
	01	Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul – Pusat Kota Trenggalek - Kota Maritim Baru Prigi)
	02	Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan
	03	Pengembangan Kawasan Perdagangan
	04	Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong
	05	Pembangunan Jalan Lintas Selatan
	06	Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis
	07	Pengembangan Desa Wisata
	08	Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaaan

Total jumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017-2021 sejumlah **178 program Perangkat Daerah** (4 program diantaranya adalah program rutin), **5 program lintas perangkat daerah (program strategis daerah)** dan **8 program kewilayahan**. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan berdasarkan perangkat daerah disajikan dalam **Lampiran.** Sedangkan **Tabel** dibawah ini menjelaskan hasil rekapitulasi kerangka pendanaan menurut urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Tabel VIII-1.
Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX	Non Urusan	83.062.078.978	76.277.135.207	77.083.134.575	80.521.435.100	85.980.283.546	402.924.067.405	90.244.288.633
X.XX.XX	Umum	83.062.078.978	76.277.135.207	77.083.134.575	80.521.435.100	85.980.283.546	402.924.067.405	90.244.288.633
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	443.679.018.405	549.449.274.197	442.116.868.475	513.080.130.538	580.557.879.992	2.528.883.171.607	638.973.879.992
1.01	Pendidikan	24.228.843.360	90.238.510.370	82.939.140.000	82.313.040.000	83.262.240.000	362.981.773.730	86.262.240.000
1.02	Kesehatan	190.313.219.068	215.828.709.516	200.812.688.475	215.831.465.538	236.626.064.992	1.059.412.147.589	255.651.064.992
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	209.726.420.442	200.716.729.127	116.353.401.000	154.305.000.000	184.900.000.000	866.001.550.569	211.890.000.000
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.156.812.950	36.527.082.648	31.920.024.000	49.951.500.000	63.806.500.000	196.361.919.598	72.806.500.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.628.163.440	3.685.812.180	6.699.200.000	7.097.700.000	8.074.000.000	29.184.875.620	8.275.000.000
1.06	Sosial	1.625.559.145	2.452.430.356	3.392.415.000	3.581.425.000	3.889.075.000	14.940.904.501	4.089.075.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	42.819.754.805	67.019.632.155	83.165.585.000	54.760.012.000	63.656.067.424	311.421.051.384	66.955.997.434
2.01	Tenaga Kerja	1.685.573.765	1.522.606.600	2.110.000.000	3.890.000.000	4.190.000.000	13.398.180.365	4.400.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	694.991.009	814.132.309	801.600.000	895.000.000	920.000.000	4.125.723.318	1.000.000.000
2.03	Pangan	1.165.621.700	600.058.810	755.905.000	800.000.000	1.305.000.000	4.626.585.510	1.500.000.000
2.04	Pertanahan	2.100.853.959	11.858.518.470	17.871.200.000	13.950.000.000	14.950.000.000	60.730.572.429	15.950.000.000
2.05	Lingkungan Hidup	13.926.866.524	26.031.866.550	24.642.008.000	2.150.000.000	3.583.265.000	70.334.006.074	3.583.265.000
2.06	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.452.145.455	2.512.745.712	2.512.361.000	2.753.156.000	3.180.156.000	12.410.564.167	3.238.156.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.950.896.268	3.108.093.513	3.368.500.000	3.600.000.000	3.954.999.990	16.982.489.771	4.080.000.000

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.778.945.877	2.465.383.727	4.995.359.000	5.066.740.000	5.166.740.000	21.473.168.604	5.366.740.000
2.09	Perhubungan	3.600.428.966	6.541.526.171	13.261.000.000	5.649.460.000	8.592.894.635	37.645.309.772	8.592.894.635
2.10	Komunikasi dan Informatika	667.099.535	1.475.732.190	1.331.775.000	4.771.440.900	3.988.166.799	12.234.214.424	3.888.166.799
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	2.121.843.685	3.108.762.235	2.058.068.000	1.800.000.000	3.403.070.000	12.491.743.920	3.500.000.000
2.12	Penanaman Modal	1.116.861.716	1.425.866.946	1.328.250.000	1.615.250.000	1.776.775.000	7.263.003.662	1.886.775.000
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	3.776.314.947	2.433.845.800	4.575.775.000	4.105.000.000	4.405.000.000	19.295.935.747	4.605.000.000
2.14	Statistik	404.005.057	51.947.000	64.605.000	131.165.550	140.000.000	791.722.607	150.000.000
2.15	Persandian	-	72.099.231	130.000.000	117.799.550	120.000.000	439.898.781	125.000.000
2.16	Kebudayaan	2.886.620.804	2.377.175.067	2.215.000.000	2.215.000.000	2.650.000.000	12.343.795.871	3.650.000.000
2.17	Perpustakaan	278.771.038	395.229.524	865.259.000	950.000.000	1.010.000.000	3.499.259.562	1.100.000.000
2.18	Kearsipan	211.914.500	224.042.300	278.920.000	300.000.000	320.000.000	1.334.876.800	340.000.000
3	Urusan Pilihan	40.663.549.285	31.286.033.802	47.887.599.900	68.809.363.000	54.225.963.000	242.872.508.987	64.420.963.000
3.01	Kelautan dan Perikanan	4.723.803.650	4.907.581.800	4.940.963.000	5.034.963.000	5.999.963.000	25.607.274.450	6.269.963.000
3.02	Pariwisata	7.480.248.805	5.414.061.731	4.236.000.000	4.336.000.000	10.375.000.000	31.841.310.536	14.375.000.000
3.03	Pertanian	18.289.909.400	13.971.304.181	18.080.286.900	16.561.000.000	19.711.000.000	86.613.500.481	21.311.000.000
3.04	Kehutanan	4.364.746.014	-	-	-	-	4.364.746.014	-
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral	54.710.500	-	-	-	-	54.710.500	-
3.06	Perdagangan	4.829.557.827	5.551.586.245	17.275.350.000	40.162.400.000	14.965.000.000	82.783.894.072	19.065.000.000
3.07	Perindustrian	570.129.089	1.220.241.615	2.955.000.000	2.415.000.000	2.675.000.000	9.835.370.704	2.900.000.000
3.08	Transmigrasi	350.444.000	221.258.230	400.000.000	300.000.000	500.000.000	1.771.702.230	500.000.000

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	43.740.030.139	49.920.915.617	64.119.368.000	118.007.262.300	125.381.744.099	401.169.320.155	130.177.441.949
4.01	Administrasi Pemerintahan	28.660.821.209	33.896.483.349	41.905.048.000	96.360.160.600	102.470.949.099	303.293.462.257	106.566.746.949
4.02	Pengawasan	853.835.750	1.225.266.984	2.070.000.000	2.212.341.700	2.394.195.000	8.755.639.434	2.394.195.000
4.03	Perencanaan	4.075.353.907	5.994.327.854	6.555.000.000	5.913.760.000	6.295.000.000	28.833.441.761	6.845.000.000
4.04	Keuangan	7.295.298.985	5.683.442.303	8.396.841.000	8.036.500.000	8.086.600.000	37.498.682.288	8.136.500.000
4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.854.720.288	2.835.897.111	4.642.479.000	5.134.500.000	5.735.000.000	21.202.596.399	5.735.000.000
4.06	Penelitian dan Pengembangan	-	285.498.016	550.000.000	350.000.000	400.000.000	1.585.498.016	500.000.000
	JUMLAH	653.964.431.612	773.952.990.978	714.372.555.950	835.178.202.938	909.801.938.061	3.887.270.119.538	990.772.571.008

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021





BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dibutuhkan indikator kinerja yang mendeskripsikan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam RPJMD ini dirumuskan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Rumusan target kinerja Tahun 2016-2021 memperhatikan data performance/ hasil capaian kinerja Tahun 2011-2015 dan realisasi capaian Tahun 2016 dan 2017.

Perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja harus dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis;
b. *Well Defined,* yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
c. *Measurable,* yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
d. *Approriate,* yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja;
e. *Reliable,* yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
f. *Verifiable,* yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator; dan
g. *Cost-effective,* kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (***SMART-C***).

Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran, kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

9.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 akan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. IKU pada Perubahan RPJMD ini merupakan Indikator Tujuan yang dapat direpresentasikan sebagai indikator pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih IKU dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam **Tabel** berikut:

Tabel IX-1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**54,19**	68,38	70,88	72,00-73,00	73,00-74,00	74,00-75,00	**74,00-75,00**	75,00-76,00
2	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,25**	67,78	68,10	68,25-68,75	68,75-69,25	69,25-69,75	**69,25-69,75**	69,75-70,25
3	**Indeks Gini (*Gini Ratio*)**	**0,37**	0,36	0,35	0,34-0,35	0,34-0,35	0,33-0,34	**0,33-0,34**	0,33-0,34
4	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)**	**5,03**	5,00	5,02	5,05-5,10	5,10-5,15	5,15-5,20	**5,15-5,20**	5,20-5,25
5	**PDRB Per Kapita (Juta Rp.)**	**19,78**	21,58	23,28	24,30-25,90	25,90-27,51	27,51-29,11	**27,51-29,11**	29,11-31,51
6	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**51,79**	62,88	72,87	75,00-77,50	77,50-80,00	80,00-82,50	**80,00-82,50**	82,50-85,00
7	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)**	**4,46**	3,07	3,48	3,45-3,55	3,35-3,45	3,25-3,35	**3,25-3,35**	3,15-3,25
8	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**64,17**	67,04	65,79	66,00-66,50	66,50-67,00	67,00-67,50	**67,00-67,50**	67,50-68,00
9	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**92,22**	92,81	93,14	93,14-93,16	93,16-93,18	93,18-93,20	**93,18-93,20**	93,20-93,22
10	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**0,64**	0,65	0,66	0,67-0,68	0,68-0,69	0,69-0,70	**0,69-0,70**	0,70-0,71
11	**Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)**	**60,95**	63,92	65,11	67,00-68,00	68,00-69,00	69,00-70,00	**69,00-70,00**	70,00-71,00
12	**Angka Kemiskinan (%)**	**13,39**	13,24	12,96	12,00-12,50	11,50-12,00	11,00-11,50	**11,00-11,50**	10,50-11,00

Catatan : Realisasi IKU berdasarkan Realisasi Kinerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016-2017

9.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator capaian program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaiaginin yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan ini merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang akan direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, IKD dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah rekapitulasi indikator tujuan, sasaran RPJMD dan Program Prioritas yang juga merupakan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Beberapa substansi IKD juga diambil dari kinerja yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kinerja utama OPD yang berkaitan langsung menunjang capaian tujuan dan sasaran kinerja pembangunan daerah. IKD Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dijabarkan sebagaimana **Tabel** dibawah ini.

Tabel IX-2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	(Produk Domestik Regional Bruto pada tahun n - Produk Domestik Regional Bruto pada tahun (n-1)) / Produk Domestik Regional Bruto pada tahun (n-1) x 100%	**5,03**	5,00	5,02	5,05-5,10	5,10-5,15	5,15-5,20	**5,15-5,20**	5,20-5,25
1.2	PDRB (ADHK)	Juta Rp	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rp.)	**10.500.809**	11.026.549	11.579.006	12.242.966	12.946.936	13.723.752	**13.723.752**	14.581.487
	PDRB (ADHB)	Juta Rp	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rp.)	**13.632.406**	14.915.998	16.133.954	17.635.578	18.969.968	20.304.359	**20.304.359**	21.638.750
1.3	PDRB per-kapita	Juta Rp	(Jumlah PDRB ADHB / Jumlah penduduk)	**19,78**	21,58	23,28	24,30-25,90	25,90-27,51	27,51-29,11	**27,51-29,11**	29,11-31,51
1.4	Laju inflasi	%	Indeks Harga Konsumen (IHK) Periode tahun berenaan - IHK tahun sebelumnya	**5,55**	4,19	3,00	4,00	3,90	3,80	**3,80**	3,70
1.5	Indeks Gini (*Gini Ratio*)	Poin	GR = 1 – Jumlah fi [Yi + Yi-1] Ket : fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.	**0,37**	0,36	0,35	0,34-0,35	0,34-0,35	0,33-0,34	**0,33-0,34**	0,33-0,34
1.6	Angka Kemiskinan	%	(Jumlah Penduduk Miskin/ Total Jumlah Penduduk Hasil sensus BPS) x 100%	**13,39**	13,24	12,96	12,00-12,50	11,50-12,00	11,00-11,50	**11,00-11,50**	10,50-11,00
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	(Jumlah pengangguran terbuka / Jumlah angkatan kerja) × 100%	**4,46**	3,07	3,48	3,45-3,55	3,35-3,45	3,25-3,35	**3,25-3,35**	3,15-3,25
1.8	Indeks Pembangunan Manusia ()	Poin	Menggunakan metode pengukuran IPM terbaru dimana menggunakan Rata-rata Ukur. ***IPM***=3√(Indeks Kesehatan × Indeks Pendidikan × Indeks Daya Beli)	**67,25**	67,78	68,10	68,25-68,75	68,75-69,25	69,25-69,75	**69,25-69,75**	69,75-70,25

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan**										
1.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ *Mean Years of Schooling* (MYS)	tahun	Mean Years of Schooling (MYS) https://jatim.bps.go.id	**7,18**	7,19	7,20	7,21	7,22	7,23	**7,23**	7,24
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	%	((Jumlah siswa usia 7-15 tahun / jumlah penduduk usia 7-15 tahun)) x 100	**98,65**	100,18	99,99	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
1.3	Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SD	Kategori Capaian	Nilai SNP Jenjang SD (Sumber data : pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)	**N/A**	4,74	5,46	5,66	5,86	6,06	**6,06**	6,26
1.4	Nilai Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Kategori Capaian	Nilai SNP Jenjang SMP (Sumber data : pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)	**N/A**	4,69	5,31	5,63	5,93	6,23	**6,23**	6,53
1.5	Rata-rata Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang telah menuju dari SNP 3 ke SNP 4	%	((Jumlah Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang telah menuju SNP 4)/ (Jumlah Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP)) X 100 (Data teknis bersumber dari : Raport Mutu Pendidikan Dasar/ Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan/ pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)	**N/A**	15,35	86,10	86,20	87,20	88,20	**88,20**	89,20
1.6	Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat	%	((Jumlah siswa SMP/MTs/ Sederajat yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK) / (Jumlah lulusan siswa SMP/MTs)) X 100	**80,03**	86,18	88,94	90,44	91,94	92,94	**92,94**	93,94
2	**Kesehatan**										
2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	**72,91**	73,03	73,15	73,25	73,35	73,45	**73,45**	73,55
2.2	Angka Kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	(Jumlah Kasus DBD dalam 1 tahun/ Jumlah Penduduk pada tahun yang sama) x 100.000	**98,23**	167,70	53,10	52,00	51,00	50,00	**50,00**	49,00
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	(Jumlah balita gizi buruk ditemukan dalam tahun ybs / jumlah balita yang ditimbang dalam tahun ybs x 100%	**0,73**	0,68	0,60	0,60	0,60	0,59	**0,59**	0,59
2.4	Prevalensi Balita Stunting	%	(Jumlah balita pendek dan sangat pendek / Jumlah Balita yang di survey dalam pemantauan status gizi) x 100	**31,20**	22,40	23,60	26,30	25,20	24,10	**24,10**	24,00
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	(Jumlah kematian bayi / jumlah kelahiran hidup) x 1.000	**7,95**	6,57	6,13	6,12	6,11	6,10	**6,10**	6,00
2.6	Angka Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	(Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun / jumlah kelahiran hidup) x 100.000	**110,38**	65,73	104,21	103,81	102,08	101,34	**101,34**	100,60

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Sosial**										
3.1.	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial ditetapkan 10 indikator yaitu, 1) Memberi (Caring), 2) Peduli (Giving), 3) Menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, 4) Tidak memaksakan nilai, 5) Tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda, 6) Keterlibatan dalam demokrasi, 7) Keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan (*Good governance*), 8) Mencegah kekerasan, 9) Konservasi lingkungan, dan 10) Restorasi lingkungan.	**N/A**	N/A	N/A	58,50	59,00	60,00	**60,00**	60,50
3.2	Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	Jumlah Penduduk Miskin tahun berkenaan berdasarkan data susenas (Sumber Data Susenas)	**92.284**	91.527	89.826	86.863	83.556	80.234	**80.234**	76.899
3.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. (Sumber Data Susenas)	**2,18**	1,74	1,71	2,00	1,90	1,80	**1,80**	1,70
3.4.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. (Sumber Data Susenas)	**0,59**	0,37	0,40	0,50	0,45	0,40	**0,40**	0,35
3.5.	Persentase PMKS yang ditangani	%	(PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS) × 100%	**77,54**	78,98	85,64	86,00	86,50	87,00	**87,00**	87,50
4	**Tenaga Kerja**										
4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	(Jumlah angkatan kerja / Jumlah penduduk usia kerja) × 100%	**74,43**	N/A	71,27	71,38	71,49	71,73	**71,73**	71,73
4.2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	(Jumlah penduduk bekerja / Jumlah angkatan kerja) × 100%	**95,54**	96,93	96,52	96,55	96,65	96,75	**96,75**	96,80

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA											
1	**Kebudayaan**										
1.1	Persentase seni budaya yang dikelola sebagai daya tarik wisata	%	(Jumlah seni budaya yang dikelola sebagai daya tarik wisata / Jumlah seni budaya yang ada) x 100	**8,00**	12,00	16,00	19,00	23,00	27,00	**27,00**	41,00
2	**Pemuda dan Olah Raga**										
2.1	Jumlah pemuda wirausaha yang terbentuk	orang	Jumlah pemuda wirausaha yang terbentuk	**40**	80	70	72	74	76	**76**	78
2.2	Jumlah penambahan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	unit	Jumlah penambahan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	**8**	4	3	3	3	3	**24**	3
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	**Pendidikan**										
1.1.	APK PAUD	%	(Jumlah siswa PAUD / Jumlah penduduk usia 3 sampai 6 tahun) X 100%	**82,03**	84,10	85,77	86,00	87,00	88,00	**88,00**	89,00
1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A) / (Jumlah penduduk usia 7-12 tahun)	**92,59**	95,18	96,59	97,09	97,59	98,09	**98,09**	98,59
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	(Jumlah siswa usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)	**80,22**	82,75	88,35	88,50	88,75	89,00	**89,00**	89,25
1.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	(Jumlah semua siswa sekolah SD/MI/Paket A) / (Jumlah penduduk usia 7-12 tahun)	**101,66**	100,02	105,74	105,79	105,84	105,89	**105,89**	105,94
1.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	%	(Jumlah semua siswa SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)	**101,02**	101,84	106,90	106,92	106,94	106,96	**106,96**	106,98
1.6.	Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B	%	(Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B/ JUMLAH semua Sekolah Dasar (SD) X 100	**43,03**	50,1	98,42	98,45	98,50	98,55	**98,55**	99,00
1.7.	Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	%	(Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B/ Jumlah semua Sekolah Menengah Pertama (SMP)) X 100	**77,21**	85,89	86,75	86,80	86,85	86,90	**86,90**	86,95

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat	%	Jumlah jenis layanan pembinaan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan/ jumlah jenis layanan pembinaan pendidikan masyakat X 100%	**N/A**	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
1.9	Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan	Kategori Capaian	Nilai capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Data teknis bersumber dari : Raport Mutu Pendidikan Dasar/ Sistem Penjamininan Mutu Pendidikan/ pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)	**N/A**	4,94	5,80	6,00	6,20	6,25	**6,25**	6,50
1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	Poin	(Hasil penjumlahan nilai rata-rata tertimbang dari 8 unsur pelayanan)x25	**N/A**	N/A	81,00	82,00	83,00	84,00	**84,00**	85,00
2	**Kesehatan**										
2.1	**Pelayanan Kesehatan Dasar**										
2.1.1	Persentase Puskesmas dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar	%	(Jumlah Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh puskesmas yang ada) dikali 100	**0,00**	63,64	72,33	81,82	90,91	100,00	**100,00**	100,00
2.1.2	Persentase Sumber Daya Masyarakat Kesehatan sesuai standar	%	(Jumlah SDMK sesuai standar pada kurun waktu satu tahun / Jumlah jumlah seluruh SDMK yang ada) dikali 100	**0,00**	0,00	72,33	75,00	80,00	85,00	**90,00**	95,00
2.2	**Pelayanan Kesehatan Rujukan**										
2.2.1	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar	%	(Jumlah Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar / Jml seluruh Elemen akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar) x 100%	**N/A**	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	**80,00**	80,00
2.2.2	Capaian SPM di Rumah Sakit	%	(Jumlah indikator SPM tercapai / jml seluruh indikator SPM) x 100%	**77,78**	82,00	82,80	93,00	98,00	100,00	**100,00**	100,00
2.2.3	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan RS	Poin	Total Nilai persepsi per unsur / total unsur terisi x nilai penimbang	**71,75**	72,00	75,80	77,00	78,00	79,00	**79,00**	80,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
3.1	Indeks Layanan Infrastruktur	%	(∑ (Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik+Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik+Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik+Persentase Akses Sanitasi+Persentase Akses Air Minum+Persentase Penurunan Kawasan Kumuh+Persentase Penurunan RTLH)	**51,79**	62,88	72,87	75,00-77,50	77,50-80,00	80,00-82,50	**80,00-82,50**	82,50-85,00
3.2	Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab dan Berkeselamatan	%	(Panjang Jalan Kabupaten Kondisi mantab / Panjang Keseluruhan Jalan Kab.) x 100	**64,96**	71,12	78,09	80,00	85,00	90,00	**90,00**	90,00
3.3	Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik	%	(Jumlah Jembatan yang Berfungsi Baik / Jumlah Keseluruhan Jembatan) x 100	**90,07**	92,05	96,39	97,59	98,80	100,00	**100,00**	100,00
3.4	Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik / Panjang Keseluruhan Jaringan Irigasi) x 100	**38,71**	43,00	46,21	49,00	52,00	55,00	**55,00**	55,00
3.5	Persentase Bangunan Sumber Daya Air yang berfungsi baik	%	(Panjang Talud dalam Kondisi Baik / Panjang Talud yang seharusnya mendapat penanganan) x 100	**N/A**	N/A	34,52	25,00	28,00	31,00	**31,00**	31,00
3.6	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Layak	%	(Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Layak / Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Ada) x 100	**N/A**	N/A	54,70	55,66	56,62	57,58	**57,58**	57,58
3.7	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	%	(Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Telah Disusun / Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Seharusnya Disusun) x 100	**50,00**	62,50	77,78	77,78	77,78	100,00	**100,00**	100,00
3.8	Persentase luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum	%	(Luasan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah dibebaskan / Luasan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Yang direncanakan untuk Dibebaskan) x 100	**0,00**	8,34	12,91	47,24	69,47	91,70	**91,70**	91,70
3.9	Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum	Hektar	Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum	**0,00**	0,00	1,14	3,30	6,30	9,30	**9,30**	9,30

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
4.1	Ketersediaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	20% dari Luas Wilayah Perkotaan	**13,65**	18,29	23,08	27,58	32,23	36,87	**36,87**	36,87
4.2	Masyarakat yang Mendapat Layanan Air bersih	Jiwa	Akumulasi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih	**345.300**	478.365	526.056	637.820	717.547	797.275	**797.275**	797.275
4.3	Persentase Penduduk perdesaan yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	Jumlah Penduduk Perdesaan yang Terlayani / Jumlah Penduduk (797.275)	**16,09**	20,81	22,68	30,25	34,98	39,70	**39,70**	39,70
4.4	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi	%	Rata-rata Persentase Capaian Program	**52,88**	61,50	80,33	80,46	90,15	100,00	**100,00**	100,00
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (3.301 RTLH)	**40,32**	45,16	89,85	92,58	96,29	100,00	**100,00**	100,00
4.6	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	**1,50**	21,50	74,78	83,18	92,58	100,00	**100,00**	100,00
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**										
5.1	Indeks Kebahagiaan *(Index of Happiness)*	%	Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.	**60,95**	63,92	65,11	67,00-68,00	68,00-69,00	69,00-70,00	**69,00-70,00**	70,00-71,00
5.2	Persentase konflik antar masyarakat yang diselesaikan	%	(Jumlah konflik masyarakat yang dapat diselesaikan / Jumlah konflik masyarakat yang terjadi) x 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
5.3	Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	%	(Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih / Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih) x 100%	**67,70**	-	-	60,00	65,00	68,00	**68,00**	-

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ LSM yang aktif	%	(Jumlah Ormas/LSM yang aktif / Jumlah Ormas/LSM terdaftar) X 100%	**35,00**	37,00	42,31	41,00	43,00	44,00	**44,00**	44,00
5.5	Jumlah Kerusuhan /Kericuhan yang ditangani	kali	Menunjukkan penurunan jumlah kerusuhan / kericuhan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek	**-**	-	0	-	-	-	**-**	-
5.6	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk	WMK	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk	**1**	-	1	1	-	1	**4**	4
5.7	Persentase bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	%	(Jumlah kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat/ Jumlah seluruh kejadian bencana) X 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
5.8	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	%	(Jumlah desa rawan bencana yang difasilitasi pembentukan menjadi tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana) X 100 %	**14,65**	14,65	17,20	19,11	21,02	23,57	**23,57**	26,11
5.9	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan pasca bencana)	%	(Jumlah kejadian bencana yang tertangani secara optimal/Jumlah seluruh kejadian bencana) X 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
6	**Sosial**										
6.1	Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan nasional	%	(Jumlah penduduk yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan / Jumlah penduduk yang seharusnya tercover) × 100%	**82,55**	91,78	92,97	93,00	93,25	93,50	**93,50**	93,75
6.2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	(Jumlah PSKS / Jumlah PMKS) × 100%	**8,42**	16,77	17,54	18,00	19,00	20,00	**20,00**	20,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	**Tenaga Kerja**										
1.1.	Persentase penempatan tenaga kerja	%	(Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja terdaftar) × 100%	**81,25**	82,00	91,00	88,01	91,02	92,01	**92,01**	92,01
1.2.	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan pada jabatan formal	%	(Jumlah penempatan PMI formal / Jumlah penempatan PMI) × 100%	**40,40**	43,00	30,00	35,00	40,00	41,00	**41,00**	42,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	(Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Pekerja Formal) × 100%	**38,82**	39,00	98,00	43,00	45,00	47,00	**47,00**	49,00
1.4.	Persentase perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	(Jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / Jumlah perselisihan ketenagakerjaan) × 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	(IPM perempuan/ IPM laki-laki)	**92,22**	92,81	93,14	93,14-93,16	93,16-93,18	93,18-93,20	**93,18-93,20**	93,20-93,22
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Menunjukkan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	**65,58**	66,21	66,98	68,00	69,00	70,00	**70,00**	71,00
2.3	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	%	(Skor KLA yang diperoleh/Skor Maksimal KLA) x 100%	**40,00**	50,00	55,00	55,00	65,00	65,00	**65,00**	75,00
2.4	Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti/ Jumlah kasus yang dilaporkan) x 100%	**65,00**	71,28	75,00	79,00	83,00	87,00	**87,00**	87,00
2.5	Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG	%	(Jumlah OPD yang menerapkan PPRG / Jumlah OPD) x 100%	**27,03**	27,03	38,46	53,85	69,23	84,62	**84,62**	84,62
3	**Pangan**										
3.1	Ketersediaan Pangan		Ketersediaan Pangan								
	a. Padi	ton		**170.660,66**	196.451,00	181.393,00	187.047,44	189.866,12	192.726,64	**192.726,64**	195.630,00
	b. Jagung	ton		**80.672,95**	88.135,00	59.333,00	60.523,97	61.738,49	62.977,37	**62.977,37**	64.241,02
	c. Kedelai	ton		**9.793,20**	8.492,00	10.575,00	9.720,65	9.824,77	9.929,85	**9.929,85**	10.035,86
	d. Ubi Kayu	ton		**298.117,95**	174.805,00	218,818,00	221.225,78	223.658,97	226.119,21	**226.119,21**	228.606,53
	e. Daging	ton		**4.329,75**	3.504,38	3.425,94	4.866,75	5.061,75	5.264,25	**5.264,25**	5.264,25
	f. Telur	ton		**2.194,34**	2.548,45	3.247,26	2.389,59	2.484,92	2.584,52	**2.584,52**	2.584,52
	g. Susu	ton		**5.331,98**	5.896,95	8.919,39	5.994,57	6.114,28	6.236,51	**6.236,51**	6.236,51
	h. Ikan	ton		**24.325,46**	7.464,70	22.239,69	19.215,53	21.252,61	23.316,18	**23.316,18**	23.316,18
3.2	Cadangan Pangan	ton	Cadangan Pangan	**12,60**	12,60	12,60	22,60	32,60	42,60	**42,60**	52,60
3.3	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	PPH	Pola konsumsi masyarakat yang berimbang sesuai skor PPH (Pola Pangan Harapan)	**87,89**	89,30	87,50	87,70	87,85	88,00	**88,00**	88,20

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Pertanahan**										
4.1	Persentase Tanah Milik Pemkab yang disertifikasi	%	(Jumlah bidang tanah milik Pemkab yang sudah bersertifikat / Jumlah seluruh bidang tanah milik Pemkab) X 100%	**62,98**	87,98	47,52	92,98	95,48	97,98	**97,98**	97,98
5	**Lingkungan Hidup**										
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Komposit pengukuran Indeks Kualitas, Udara dan Tutupan Vegetasi	**64,17**	67,04	65,79	66,00-66,50	66,50-67,00	67,00-67,50	**67,00-67,50**	67,50-68,00
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	Hasil Pengukuran kualitas air	**36,67**	45,83	55,83	55,83	55,83	56,67	**56,67**	56,67
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	Hasil Pengukuran kualitas udara	**95,19**	95,59	80,79	81,47	83,11	83,91	**83,91**	95,79
	c. Indeks Tutupan Vegetasi	Poin	Hasil pengukuran tutupan vegetasi	**61,53**	61,53	62,00	62,05	62,07	62,07	**65,00**	65,00
5.2	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Pengaduan yang Masuk	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
6.1	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK	%	Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK / jumlah penduduk seluruhnya x 100%	**94,71**	91,90	99,91	99,92	99,95	100,00	**100,00**	100,00
6.2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	**B (70,37)**	B (76,27)	B (77,13)	B (79,00)	B (81,00)	A (82,00)	**A (82,00)**	A (82,00)
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
7.1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	1/3 x (Indeks Sosial +Indeks Ekonomi +Indeks Lingkungan)	**0,64**	0,65	0,66	0,67-0,68	0,68-0,69	0,69-0,70	**0,69-0,70**	0,70-0,71
7.2	Jumlah Desa Maju	Desa	Jumlah Desa Ketegori Maju	**21**	30	30	40	45	50	**50**	55
7.3	Jumlah jenis Lembaga Desa yang aktif	Jenis Lembaga Desa	Jumlah jenis Lembaga Desa yang aktif	**3**	3	3	3	3	3	**3**	3
7.4	Persentase Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan	%	(Jumlah Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan/ Jumlah Desa) x100	**N/A**	50,00	82,24	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100
7.5	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Yang berdaya	%	(Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang berdaya/Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat) x 100	**N/A**	19,29	41,93	30,61	36,27	41,93	**41,93**	47,59
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
8.1	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	‰	Σ (Jumlah kelahiran /wanita usia reproduktif umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)	**2,08**	2,08	2,03	2,00	1,96	1,92	**1,92**	1,89
8.2	Persentase KB Aktif	%	(Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah PUS) x 100	**73,00**	75,40	81,37	73,85	74,00	74,25	**74,25**	74,50

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Perhubungan**										
9.1	Persentase jumlah MPU yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	(Jumlah MPU yang memenuhi yang persyaratan teknis dan laik jalan tahun berjalan./ Jumlah MPU yang memperoleh izin trayek tahun berjalan) x 100	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
9.2	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	(Jumlah kendaraan wajib uji yang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan./jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kir tahun berjalan)) x 100	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
9.3	Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan	%	(Panjang jalan kabupaten yang sudah terpasang prasarana perlengkapan jalan/Panjang jalan Kabupaten) x100	**19,67**	20,33	21,19	22,00	23,00	24,34	**24,34**	26,36
10	**Komunikasi dan Informatika**										
10.1	Indeks *e-Government*	%	Hasil Penghitungan e-Government Ket: 1,00 – 1,49 = sangat kurang 1,50 – 2,49 = kurang 2,50 – 3,49 = baik 3,50 – 4,00 = sangat baik	**N/A**	2,82 (Baik)	3,09 (Baik)	3,10 (Baik)	3,15 (Baik)	3,20 (Baik)	**3,20 (Baik)**	3,30 (Baik)
10.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut. Ket : 4,2 - 5,0 = memuaskan 3,5 - < 4,2 = sangat baik 2,6 - < 3,5 = baik 1,8 - < 2,6 = cukup < 1,8 = kurang	**N/A**	N/A	N/A	3,00	3,25	3,50	**3,50**	3,75
10.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TI / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	**N/A**	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
10.4	Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani	%	(Jumlah Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani / Jumlah permintaan yang masuk) x 100	**N/A**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
10.5	Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi dan Persandian	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah diselesaikan kasus keamanan Informasi dan Persandian / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	**N/A**	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
11.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	%	(Jumlah Koperasi Aktif pada tahun berkenaan/ Jumlah Koperasi keseluruhan pada tahun berkenaan) x 100%	**32,62**	48,09	50,00	51,40	52,79	54,19	**54,19**	55,59
11.2	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing (%)	%	(Jumlah Usaha Mikro Yang Berdaya Saing/ Jumlah Usaha Mikro Yang dibina) x 100%	**19,23**	23,20	49,83	69,45	85,47	100,00	**100,00**	15,47
12	**Penanaman Modal**										
12.1	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Poin	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	**N/A**	82,00	89,48	84,00	84,00	86,00	**86,00**	86,00
12.2	Jumlah realisasi nilai investasi	Milyar Rp	Jumlah realisasi nilai investasi tahun berkenanan	**165,00**	232,00	266,27	275,00	365,00	400,00	**1.500,00**	600,00
12.3	Persentase peningkatan jumlah izin yang terbit	%	{(Jumlah izin yang terbit pada tahun n) - (Jumlah izin yang terbit pada tahun n -1) / (Jumlah izin yang terbit pada tahun N-1)} X 100	-	17,29	5,92	5,00	5,00	5,00	**37,29**	5,00
13	**Kepemudaan dan Olahraga**										
13.1	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	%	(Jumlah Pemuda yang berpartisipsi dan Aktif dalam pembangunan/ Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun) X 100	**4,66**	5,75	28,29	29,00	30,00	31,00	**31,00**	32,00
13.2	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	Atlet	(Jumlah Atlet Olahraga yang beprestasi baik kabupaten/provinsi/ nasional/internasional)	**21**	23	24	25	26	27	**27**	28
14	**Statistik**										
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan Data Statistik / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	**N/A**	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
14.2	Persentase buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan	%	(Jumlah buku atau dokumen stratistik yang dihasilkan / Jumlah buku ataudokumen stratistik yang dibutuhkan) x 100%	**80,00**	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**Persandian**										
15.1	Persentase pelayanan Jaringan persandian di Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	(Jumlah Perangkat Daerah dengan pelayanan persandian dalam kondisi baik/ Jumlah Perangkat Daerah yang ada) x 100%	**72,92**	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
16	**Kebudayaan**										
16.1	Persentase Benda Cagar Budaya/situs/seni yang dilestarikan	%	(Jumlah Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan) / (Jumlah Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang ada) x 100	**42,00**	47,00	50,00	54,00	58,00	62,00	**62,00**	70,00
17	**Perpustakaan**										
17.1	Indeks Minat Baca	Poin	"*The American Customer Satisfaction Index* (ASCI) Indeks berskala 1 – 4 dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 0 – 1,49 (Tidak Pernah) = Rendah 1,50 – 2,49 (Kadang-Kadang) = Menengah 2,50 – 3,49 (Sering) dan = Tinggi 3,50 – 4 (Selalu) = Sangat Tinggi	**N/A**	2,37 (Kadang-kadang)	2,41 (Kadang-kadang	2,42	2,43	2,44	**2,44**	2,45
17.2	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) layanan perpustakaan	Poin	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	**N/A**	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	**75,00**	76,00
17.3	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun yang berkenaan	**16.582**	16.750	29.673	29.700	29.800	30.000	**30.000**	30.100
17.4	Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif	Unit	Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif pada tahun berkenaan	**41**	46	57	60	65	70	**70**	80
18	**Kearsipan**										
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Secara Baku /Jumlah Perangkat Daerah keseleuruhan) x 100 %	**N/A**	N/A	7,50	15,00	30,00	45,00	**45,00**	60,00
18.2	Persentase jenis data/informasi/arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan	%	(Jumlah jenis data/informasi/arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan/ Jumlah Datadata/informasi/arsip) x 100 %	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
18.3	Persentase data Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Secara Baku /Jumlah Perangkat Daerah keseleuruhan) x 100 %	**14,58**	39,58	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Pilihan											
1	**Kelautan dan Perikanan**										
1.1	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Poin	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	**N/A**	117,00	116,00	116,00	117,00	118,00	**118,00**	119,00
1.2	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Poin	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	**N/A**	N/A	N/A	103,00	104,00	105,00	**105,00**	106,00
1.3	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	Angka Konsumsi Ikan	**23,51**	28,20	28,12	28,50	29,00	29,50	**29,50**	30,00
1.4	Jumlah Produksi perikanan	ton	Jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan	**28.618,19**	8.782,00	22.927,51	23.793,90	26.190,46	28.618,19	**28.618,19**	31.079,58
1.5	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	**N/A**	N/A	5.953.951.950	6.211.600.000	6.943.200.000	7.647.800.000	**7.647.800.000**	8.406.400.000
2	**Pariwisata**										
2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	Jumlah Kunjungan Wisata	**581.614**	595.938	677.178	800.000	900.000	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000
2.2	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	hari	Rata-Rata Hari Lama Tinggal Wisatawan	**1,00**	1,00	1,00	1,25	1,35	1,50	**1,50**	1,50
2.3	Jumlah Destinasi Wisata yang tumbuh	obyek	Jumlah Destinasi Wisata yang tumbuh sampai dengan tahun berkenaan	**5**	6	8	10	12	14	**14**	16
2.4	Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha	%	(Jumlah industri pariwisata yang bersertifikat usaha / Jumlah seluruh industri pariwisata) X 100	**N/A**	N/A	2,00	2,00	4,00	7,00	**7,00**	9,00
3	**Pertanian**										
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)/ Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	**N/A**	116,00	114,00	115,00	115,00	116,00	**116,00**	116,00
3.2	PDRB Sektor Pertanian	(Juta Rupiah)	PDRB Menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sektor pertanian secara umum	**4.282.706,59**	4.666.970,47	5.084.126,32	5.501.282,18	5.918.438,03	6.335.593,89	**6.335.593,89**	6.752.749,74
3.3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan :										
	Padi	ton	Jumlah produksi padi pada tahun yang bersangkutan	**184.604**	210.925	187.226	193.036	195.932	198.871	**198.871**	201.854
	Jagung	ton	Jumlah produksi jagung pada tahun yang bersangkutan	**90.959**	98.668	66.897	68.235	69.600	70.992	**70.992**	72.411
	Kedelai	Ton	Jumlah produksi Kedelai pada tahun yang bersangkutan	**10.326**	9.202	11.551	10.648	10.758	10.869	**10.869**	10.981

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ubi Kayu	ton	Jumlah produksi Ubi Kayu pada tahun yang bersangkutan	**350.727**	205.653	228.245	230.756	233.294	235.860	**235.860**	238.455
3.4	Jumlah Produksi Hortikultura :										
	Durian	ton	Jumlah produksi Durian pada tahun yang bersangkutan	**15.731,40**	41.934,40	11.476,70	18.211,06	19.121,62	20.077,70	**20.077,70**	21.081,58
	Manggis	ton	Jumlah produksi Manggis pada tahun yang bersangkutan	**1.976,60**	3.451,90	2.746,50	2.159,88	2.224,68	2.291,42	**2.291,42**	2.360,16
	Salak	ton	Jumlah produksi Salak pada tahun yang bersangkutan	**5.041,90**	5.170,20	6.412,00	5.194,67	5.246,62	5.299,09	**5.299,09**	5.352,08
	Pisang	ton	Jumlah produksi Pisang pada tahun yang bersangkutan	**16.786,60**	16.175,90	21.019,60	17.295,25	17.468,20	17.642,89	**17.642,89**	17.819,31
	Cabai	ton	Jumlah produksi Cabai pada tahun yang bersangkutan	**437,60**	393,30	54,50	471,25	483,03	495,10	**495,10**	507,48
	Bawang Merah	ton	Jumlah produksi Bawang Merah pada tahun yang bersangkutan	**63,00**	25,20	93,60	65,49	66,34	67,20	**67,20**	68,07
	Sayur - sayuran Lainnya	ton	Jumlah produksi sayur-sayuran pada tahun yang bersangkutan	**709,20**	379,60	891,19	739,80	750,30	760,94	**760,94**	771,74
	Bunga	ton	Jumlah produksi bunga pada tahun yang bersangkutan	**-**	-	1,12	0,13	0,15	0,18	**0,18**	0,20
	Biofarmaka	ton	Jumlah produksi biofarmaka pada tahun yang bersangkutan	**5.370,70**	5.962,44	9.027,29	5.615,11	5.698,49	5.782,85	**5.782,85**	5.869,59
	Janggelan	ton	Jumlah produksi Janggelan pada tahun yang bersangkutan	**243,00**	544,53	3.330,00	3.363,30	3.396,93	3.430,90	**3.430,90**	3.465,21
3.5	Jumlah Produksi Perkebunan :										
	Kakao	ton	Jumlah produksi Kakao pada tahun yang bersangkutan	**820,10**	1.171,90	1.306,91	922,33	968,45	1.016,87	**1.016,87**	1.121,10
	Kelapa	ton	Jumlah produksi Kelapa pada tahun yang bersangkutan	**10.399,60**	15.960,14	11.509,73	10.556,38	10.609,16	10.662,20	**10.662,20**	10.715,51
	Cengkeh	ton	Jumlah produksi cengkeh pada tahun yang bersangkutan	**2.462,96**	1.838,12	593,40	582,62	2.462,96	594,28	**594,28**	606,16
	Kopi	ton	Jumlah produksi Kopi pada tahun yang bersangkutan	**291,95**	316.32	304,19	300,80	303,80	306,84	**306,84**	309,91
	Nilam	ton	Jumlah produksi Nilam pada tahun yang bersangkutan	**231,64**	920	2.743,20	2.458,20	2.507,30	2.557,50	**2.557,50**	2.608,60
	Tembakau	ton	Jumlah produksi Tembakau pada tahun yang bersangkutan	**94,80**	35,83	54,71	55,26	55,82	56,38	**56,38**	56,94

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6	Jumlah sertifikat produk pertanian	Produk	Jumlah produk pertanian yang bersertifikat	**3**	6	7	12	17	22	**22**	27
3.7	Jumlah Produksi Peternakan :										
	a. Daging	ton	Jumlah produksi daging pada tahun yang bersangkutan	5.773,00	5.817,00	5.896,20	6.487,00	6.745,00	7.014,00	**7.014,00**	7.295,00
	b. Telur	ton	Jumlah produksi telur pada tahun yang bersangkutan	3.008,00	3.137,00	3.733,59	3.347,00	3.468,00	3.594,00	**3.594,00**	3.724,00
	c. Susu	ton	Jumlah produksi susu pada tahun yang bersangkutan	6.325,00	6.995,00	10.580,20	7.320,00	7.686,00	8.070,00	**8.070,00**	8.474,00
3.8	Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	unit	Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	-	-	5	8	11	14,00	**14**	17
6	**Perdagangan**										
6.1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	(Jumlah Pasar Daerah yang dalam kondisi baik pada tahun berkenaan/ Jumlah Pasar Daerah yang ada) x 100%	**21,74**	26,09	69,57	73,91	82,61	82,61	**82,61**	86,96
7	**Perindustrian**										
7.1	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing	%	(Jumlah IKM yang berdaya saing/ Jumlah IKM yang dibina) x 100%	**21,43**	35,00	41,00	64,29	78,57	100,00	**100,00**	100,00
8	**Transmigrasi**										
8.1	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	KK	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	**25**	16	11	5	5	5	**67**	5
8.2	Persentase KK transmigran yang menetap di daerah penempatan	KK	(Jumlah KK transmigran yang menetap di daerah penempatan sampai dengan tahun berjalan/ Jumlah KK yang diberangkatkan) x 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah											
1	**Administrasi Pemerintahan**										
1.1.	**Sekretariat Daerah**										
1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	Poin	Rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit pelayanan publik. Kategori: Sangat Baik (81,26-100), Baik (62,51-81,25), Kurang Baik (43,76-62,50) dan Tidak baik (25-43,75) N/A 80,00	**N/A**	B (77,99)	B (77,97)	78,00	79,00	80,00	**80,00**	81,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Nilai LPPD	Poin	Penilaian dari Tim Kementerian Dalam Negeri	**3,1493 (Sangat Tinggi)**	3,1493 (Sangat Tinggi)	3,2556 (Sangat Tinggi)	3,2556 (Sangat Tinggi)	3,2556 (Sangat Tinggi)	3,2556 (Sangat Tinggi)	**3,2556 (Sangat Tinggi)**	3,2556 (Sangat Tinggi)
1.1.3	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan efisien	%	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang /Jumlah Paket yang dilimpahkan x 100%	**97,28**	98,62	96,93	96,48	96,48	96,48	**96,48**	96,48
1.1.4	Persentase usulan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	(Jumlah usulan kebijakan yang ditindalanjuti menjadi kebijakan/Jumlah seluruh usulan kebijakan) x 100 %	**100,00**	100,00	99,91	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
1.1.5	Persentase layanan hukum yang diberikan	%	(Jumlah layanan hukum yang difasilitasi / Jumlah pengajuan layanan hukum) x100	**86**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
1.1.6	Persentase Policy brief bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	(Jumlah Rekomendasi yang di Tindak Lanjuti/ Jumlah Rekomendasi) x 100%	**N/A**	N/A	100,00	43	57	57	**57**	57
1.1.7	Persentase Penyampaian Dokumen PK dan LKjIP baik Kabupaten maupun Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	Untuk LKJiP terselesaikan per tanggal 31 Maret ; PK 1 bulan setelah pengesahan APBD	**N/A**	N/A	100	100	100	100	**100**	100
1.1.8	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	Jumlah PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran/Jumlah semua PD x 100%	**100**	100	100	100	100	100	**100**	100
1.1.9	Rata-rata IKM	%	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat	**N/A**	N/A	B (2,51 - 3,25)	B (2,51 - 3,25)	B (2,51 - 3,25)	B (2,51 - 3,25)	**B (2,51 - 3,25)**	B (2,51 - 3,25)
1.1.10	Persentase kerjasama daerah yang disepakati	%	Jumlah kerjasama daerah yang disepakati /Jumlah usulan kerjasama daerah x 100%	**100**	100	100	100	100	100	**100**	100
1.1.11	Persentase permasalahan kesejahteraan masyarakat yang tertangani	%	(Jumlah permasalahan kesejahteraan masyarakat yang tertangani/ jumlah permasalahan kesejahteraan masyarakat yang dilaporkan) x 100%	**80**	80	100	90	90	90	**90**	90
1.1.12	Jumlah fasilitasi dukungan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan sosial budaya	kegiatan	Jumlah fasilitasi dukungan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan sosial budaya	**8**	6	7	7	7	7	**7**	7

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	**Sekretariat DPRD**										
1.2.1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	Hasil Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	**N/A**	84,50	97,68	85,50	86,00	86,50	**86,50**	87,00
1.3	**Kecamatan**										
1.3.1	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	%	(Jumlah kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti/Jumlah kasus konflik yang dilaporkan) x 100%	**N/A**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	%	(Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu /Jumlah desa) x 100%	**N/A**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**Pengawasan**										
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi	**54,19**	68,38	70,88	72,00-73,00	73,00-74,00	74,00-75,00	**74,00-75,00**	75,00-76,00
2.2	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) oleh Kemenpan RB	**C (44,77)**	CC (50,94)	B (60,02)	B	BB	BB	**BB**	BB
2.3	Persentase Peningkatan Pengawasan	%	(Jumlah Tindak lanjut temuan pemeriksaan internal yang terselesaikan pada tahun berjalan/ Jumlah temuan tahun berjalan) x 100%	**60,00**	65,00	27,51	75,00	80,00	95,00	**95,00**	100,00
2.4	Persentase OPD dengan Nilai AKIP minimal B	%	(Jumlah OPD dengan Nilai AKIP minimal B / Jumlah seluruh OPD) X 100%	**10,00**	40,00	46,66	85,00	95,00	100,00	**100,00**	100,00
2.5	Persentase penanganan terhadap pengaduan	%	(Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah seluruh kasus) X 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
3	**Perencanaan**										
3.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik/Jumlah seluruh dokumen perencanaan yg telah ditetapkan) x 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Persentase capaian sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (*outcome*) minimal 75 %	%	(Jumlah Sasaran di RPJMD yang capaian targetnya min 75 % /Jumlah Sasaran RPJMD yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan) x 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
4	**Keuangan**										
4.1	Opini BPK	Opini	Opini BPK terhadap LKPD	**WDP**	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP**	WTP
4.2	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	%	(Jumlah dokumen keuangan yang tepat waktu / jumlah dokumen keuangan yang harus disusun) x 100%	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
4.3	Persentase Aset tanah kabupaten Trenggalek yang bersertifikat	%	Jumlah aset tanah yang bersertifikat / jumlah seluruh aset tanah x 100%	**62,98**	67,00	69,00	70,00	70,00	70,00	**70,00**	70,00
4.4	Persentase aset (Tanah dan Bangunan) yang dimanfaatkan	%	Jumlah aset pemerintah daerah (tanah dan bangunan) yang dimanfaatkan / jumlah seluruh aset pemerintah daerah (tanah dan bangunan) x 100%	**60,00**	60,00	65,00	65,00	65,00	66,00	**66,00**	67,00
4.5	Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	((Jumlah PAD Tahun Berkenaan-Jumlah PAD Tahun Lalu) / Jumlah PAD Tahun Lalu) x 100%	**7,00**	11,70	16,50	16,80	17,20	17,50	**17,50**	18,00
4.6	Persentase Penyerapan Anggaran	%	(Jumlah penyerapan anggaran / Jumlah target Belanja) x 100%	**84,29**	91,83	90,82	92,02	92,05	93,00	**93,00**	93,00
4.7	Presentase Perangkat Daerah yang mengelola Aset dengan baik	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Aset dengan baik / Jumlah seleruh Perangkat Daerah) x 100%	**91,66**	93,75	93,33	95,55	95,55	95,55	**95,55**	95,55
5	**Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**										
5.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Indexprof = Kompetensi Gap + Kinerja + Kompensasi + Disiplin	**N/A**	81,84	82,71	83,00	84,00	85,00	**85,00**	85,00
5.2	Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya	%	(Jumlah pegawai sesuai kompetensinya / jumlah seluruh pegawai tahun berjalan) x 100%	**N/A**	70,00	96,30	87,00	88,00	89,00	**90,00**	90,00
5.3	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat Pegawai) terhadap pelayanan kepegawaian	Poin	Menunjukkan indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	**82,04**	82,10	80,38	82,50	83,00	83,50	**84,00**	84,00

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Kinerja pada Masa Transisi
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Penelitian dan Pengembangan**										
6.1	Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	(Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan / jumlah seluruh hasil litbang) x 100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	100,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
Fokus Iklim Berinvestasi											
1.1	Angka kriminalitas	Poin per 10.000 penduduk	(Jumlah kasus kriminal pada tahun berkenaan / Jumlah Penduduk pada tahun berkenaan) x 10.000	**5,86**	4,50	3,89	< 5,40	< 5,20	< 5,00	**< 5,00**	< 5,00
1.2	Lama Proses Perijinan	hari	Lama Proses Perijinan	**3,00**	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**2,00**	2,00
Fokus Sumber Daya Manusia											
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	(Jumlah lulusan S1/S2/S3) / (Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Penduduk pada tahun berkenaan) x 100%	**2,20**	2,19	2,56	2,30	2,40	2,50	**2,50**	2,60
1.2	Rasio ketergantungan	%	(Jumlah penduduk usia 0-14 tahun+ Jumlah penduduk usia > 60 tahun)/ Jumlah penduduk usia 15-59 tahun) x 100%	**56,22**	56,23	56,24	56,25	56,26	56,27	**56,27**	56,28

Catatan : Realisasi IKD berdasarkan Realisasi Kinerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016-2017

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021





BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perlu disepakati dalam RPJMD untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah pada masa transisi dan dalam rangka menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1) Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan APBD pada masa transisi yaitu tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada periode berikutnya
2) RKPD masa transisi bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3) RKPD masa transisi juga menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya;
4) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.
5) Penyusunan RKPD setelah masa transisi, selama RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, berpedoman pada RPJPD serta RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Seluruh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini;
3) Dalam hal pelaksanaan Perubahan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, maka tidak perlu mengubah Perda Perubahan RPJMD;
4) Terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk setelah Perubahan RPJMD ditetapkan, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu perubahan RPJMD;
5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
6) Evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terhadap indikator kinerja makro pembangunan daerah (*intermediate outcome*) sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja sasaran dan program (*outcome*);
7) Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang penyusunannya dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
8) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Trenggalek merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9) RKPD Kabupaten Trenggalek harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
10) Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Trenggalek, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah dapat mengacu pada indikator tujuan, sasaran dan program pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021;

11) Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah daerah belum mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dengan prinsip gotong royong, dunia usaha maupun lembaga lainnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (*PPP*), *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha, Pinjaman Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional; dan
12) Dalam hal yang terkait dengan inovasi daerah yang belum terakomodir di dalam RPJMD untuk mendukung upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, maka inovasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB XI
PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain : efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pembangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 diarahkan sesuai kewenangan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang memuat program-program, dalam kerangka investasi pemerintah daerah, pelayanan publik, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan kepada semua *stakeholder*.

Untuk mengoperasionalkan program yang ada di RPJMD perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Goverment*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, pihak swasta; (6) Mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Dokumen RPJMD, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati, disusun dengan **pendekatan teknokratik** yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek, **pendekatan *top-down* dan *bottom-up*** yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra-PD, **pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses, *Focus Group Discussion* (FGD), Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta **pendekatan politis**, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada inovasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada RKPD dan melalui upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang **Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa**.

Trenggalek, 29 Juni 2018

BUPATI TRENGGALEK

EMIL ELESTIANTO DARDAK

LAMPIRAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



TABEL REKAPITULASI KERANGKA PENDANAAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX	**Non Urusan**	**83.062.078.978**	**76.277.135.207**	**77.083.134.575**	**80.521.435.100**	**85.980.283.546**	**402.924.067.405**	**90.244.288.633**
X.XX.XX	**Umum**	**83.062.078.978**	**76.277.135.207**	**77.083.134.575**	**80.521.435.100**	**85.980.283.546**	**402.924.067.405**	**90.244.288.633**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.100.928.664	-	-	-	-	6.100.928.664	-
2	Dinas Kesehatan	2.749.273.633	-	-	-	-	2.749.273.633	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	179.334.000	-	-	-	-	179.334.000	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	4.787.304.989	-	-	-	-	4.787.304.989	-
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan	9.861.947.071	-	-	-	-	9.861.947.071	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.440.128.000	-	-	-	-	1.440.128.000	-
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.265.069.807	-	-	-	-	12.265.069.807	-
8	Kantor Lingkungan Hidup	1.123.353.166	-	-	-	-	1.123.353.166	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.609.949.434	-	-	-	-	1.609.949.434	-
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	604.245.044	-	-	-	-	604.245.044	-
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.559.035.692	-	-	-	-	1.559.035.692	-
12	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	925.258.679	-	-	-	-	925.258.679	-
13	Kantor Perizinan dan Penanaman Modal	929.026.145	-	-	-	-	929.026.145	-
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.821.819.334	-	-	-	-	2.821.819.334	-
15	Satuan Polisi Pamong Praja	769.192.381	-	-	-	-	769.192.381	-
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	543.264.768	-	-	-	-	543.264.768	-
17	Sekretariat Daerah	8.794.334.393	-	-	-	-	8.794.334.393	-
18	Sekretariat DPRD	2.995.655.790	-	-	-	-	2.995.655.790	-
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.412.697.773	-	-	-	-	3.412.697.773	-
20	Inspektorat	767.317.947	-	-	-	-	767.317.947	-
21	Badan Kepegawaian Daerah	952.039.906	-	-	-	-	952.039.906	-
22	Kecamatan Trenggalek	443.781.131	-	-	-	-	443.781.131	-
23	Kecamatan Pogalan	428.478.255	-	-	-	-	428.478.255	-
24	Kecamatan Durenan	477.511.235	-	-	-	-	477.511.235	-
25	Kecamatan Bendungan	436.944.221	-	-	-	-	436.944.221	-
26	Kecamatan Karangan	354.229.960	-	-	-	-	354.229.960	-
27	Kecamatan Tugu	486.398.658	-	-	-	-	486.398.658	-
28	Kecamatan Pule	400.736.191	-	-	-	-	400.736.191	-
29	Kecamatan Suruh	403.381.721	-	-	-	-	403.381.721	-
30	Kecamatan Kampak	582.103.999	-	-	-	-	582.103.999	-
31	Kecamatan Gandusari	368.607.590	-	-	-	-	368.607.590	-
32	Kecamatan Watulimo	472.251.728	-	-	-	-	472.251.728	-
33	Kecamatan Panggul	373.807.060	-	-	-	-	373.807.060	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Kecamatan Dongko	438.283.200	-	-	-	-	438.283.200	-
35	Kecamatan Munjungan	430.510.938	-	-	-	-	430.510.938	-
36	Kelurahan Surodakan	157.162.249	-	-	-	-	157.162.249	-
37	Kelurahan Sumbergedong	126.514.490	-	-	-	-	126.514.490	-
38	Kelurahan Ngantru	132.651.865	-	-	-	-	132.651.865	-
39	Kelurahan Tamanan	182.627.173	-	-	-	-	182.627.173	-
40	Kelurahan Kelutan	174.805.785	-	-	-	-	174.805.785	-
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.553.523.163	-	-	-	-	2.553.523.163	-
42	Dinas Pendapatan	1.877.389.101	-	-	-	-	1.877.389.101	-
43	Kantor Ketahanan Pangan	561.664.232	-	-	-	-	561.664.232	-
44	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.173.707.226	-	-	-	-	1.173.707.226	-
45	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	669.819.397	-	-	-	-	669.819.397	-
46	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	2.081.788.479	-	-	-	-	2.081.788.479	-
47	Dinas Peternakan	1.260.765.965	-	-	-	-	1.260.765.965	-
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	821.457.350	-	-	-	-	821.457.350	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	-	13.167.974.073	12.434.483.000	14.218.135.000	14.223.135.000	54.043.727.073	14.223.135.000
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	3.573.147.988	3.437.437.525	3.064.841.000	3.109.841.000	13.185.267.513	3.209.841.000
3	RSUD Dr. Soedomo	-	-	85.000.000	220.000.000	230.000.000	535.000.000	250.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	2.758.070.877	3.312.114.000	3.885.000.000	3.890.000.000	13.845.184.877	3.995.000.000
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	1.489.309.287	1.898.918.000	2.148.500.000	2.248.500.000	7.785.227.287	2.272.300.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-	1.011.026.279	2.284.928.000	2.245.000.000	2.302.000.000	7.842.954.279	2.310.000.000
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	477.633.684	436.000.000	458.800.000	530.000.000	1.902.433.684	560.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	963.056.675	1.397.967.700	1.120.000.000	1.210.000.000	4.691.024.375	1.300.000.000
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.089.283.054	1.389.485.000	1.238.575.000	1.260.000.000	4.977.343.054	1.285.000.000
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	770.188.525	1.435.000.000	1.095.000.000	1.285.000.000	4.585.188.525	1.465.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.258.259.688	1.838.295.000	2.110.000.000	2.265.000.000	8.471.554.688	2.375.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.108.451.483	1.150.700.000	1.450.000.000	1.520.000.000	5.229.151.483	1.545.000.000
13	Dinas Perhubungan	-	13.108.371.197	10.613.500.000	10.750.540.000	11.772.740.411	46.245.151.608	12.812.740.411
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	968.668.029	1.673.620.000	958.918.700	1.099.597.775	4.700.804.504	1.230.476.312
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	745.377.391	1.880.644.500	2.087.600.000	2.183.583.400	6.897.205.291	2.213.991.000
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	763.657.671	1.005.710.000	1.184.750.000	1.303.225.000	4.257.342.671	1.323.225.000
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	677.858.759	1.080.970.000	1.000.000.000	1.072.450.000	3.831.278.759	1.127.450.000
18	Dinas Perikanan	-	734.209.075	1.041.000.000	1.200.000.000	1.369.000.000	4.344.209.075	1.419.000.000
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	2.137.392.778	2.197.560.000	2.249.000.000	2.339.000.000	8.922.952.778	2.439.000.000
20	Dinas Pertanian dan Pangan	-	4.589.943.341	2.724.768.850	2.810.000.000	2.985.000.000	13.109.712.191	3.085.000.000
21	Sekretariat Daerah	-	6.267.558.713	6.279.300.000	6.500.000.000	7.200.000.000	26.246.858.713	8.200.000.000
22	Sekretariat DPRD	-	2.299.430.322	3.012.369.000	4.080.676.350	4.487.191.094	13.879.666.766	4.637.191.094
23	Kecamatan Trenggalek	-	482.526.907	1.405.710.000	1.313.852.000	1.532.167.500	4.734.256.407	1.552.167.500

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Kecamatan Pogalan	-	460.110.119	477.800.000	515.000.000	522.000.000	1.974.910.119	522.000.000
25	Kecamatan Durenan	-	487.943.743	466.525.500	514.166.050	545.000.000	2.013.635.293	575.000.000
26	Kecamatan Bendungan	-	514.988.865	468.419.000	427.200.000	512.000.000	1.922.607.865	530.000.000
27	Kecamatan Karangan	-	418.796.804	405.229.500	435.229.500	491.500.000	1.750.755.804	515.000.000
28	Kecamatan Tugu	-	485.202.183	421.662.000	368.483.500	430.575.000	1.705.922.683	470.575.000
29	Kecamatan Pule	-	433.926.183	452.428.000	505.505.000	532.460.000	1.924.319.183	552.460.000
30	Kecamatan Suruh	-	515.882.854	468.768.000	488.959.000	525.500.000	1.999.109.854	545.500.000
31	Kecamatan Kampak	-	598.414.909	543.087.000	550.867.000	645.955.000	2.338.323.909	665.955.000
32	Kecamatan Gandusari	-	440.454.137	321.717.550	347.356.550	403.619.566	1.513.147.803	461.619.566
33	Kecamatan Watulimo	-	487.117.939	451.861.100	475.862.100	546.752.800	1.961.593.939	588.771.750
34	Kecamatan Panggul	-	452.646.059	492.520.850	529.731.850	585.000.000	2.059.898.759	595.000.000
35	Kecamatan Dongko	-	475.483.200	417.739.500	463.742.500	508.250.000	1.865.215.200	538.250.000
36	Kecamatan Munjungan	-	478.523.135	465.516.000	465.516.000	488.800.000	1.898.355.135	523.200.000
37	Kelurahan Surodakan	-	163.195.000	-	-	-	163.195.000	-
38	Kelurahan Sumbergedong	-	135.414.588	-	-	-	135.414.588	-
39	Kelurahan Ngantru	-	120.390.885	-	-	-	120.390.885	-
40	Kelurahan Tamanan	-	183.088.833	-	-	-	183.088.833	-
41	Kelurahan Kelutan	-	185.372.700	-	-	-	185.372.700	-
42	Inspektorat	-	846.181.317	809.688.000	809.688.000	943.500.000	3.409.057.317	1.063.500.000
43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	1.643.878.200	2.137.000.000	2.886.940.000	3.036.940.000	9.704.758.200	3.236.940.000
44	Badan Keuangan Daerah	-	4.218.595.034	3.312.671.000	2.285.000.000	2.535.000.000	12.351.266.034	2.685.000.000
45	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.090.132.724	955.021.000	1.063.000.000	1.310.000.000	4.418.153.724	1.345.000.000
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**443.679.018.405**	**549.449.274.197**	**442.116.868.475**	**513.080.130.538**	**580.557.879.992**	**2.528.883.171.607**	**638.973.879.992**
1.01	**Pendidikan**	**24.228.843.360**	**90.238.510.370**	**82.939.140.000**	**82.313.040.000**	**83.262.240.000**	**362.981.773.730**	**86.262.240.000**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.228.843.360	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	-	90.238.510.370	82.939.140.000	82.313.040.000	83.262.240.000	362.981.773.730	86.262.240.000
1.02	**Kesehatan**	**190.313.219.068**	**215.828.709.516**	**200.812.688.475**	**215.831.465.538**	**236.626.064.992**	**1.059.412.147.589**	**255.651.064.992**
	Dinas Kesehatan	77.240.121.151	-	-	-	-	-	-
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	95.482.230.273	102.028.262.475	107.402.078.538	109.476.677.992	491.629.370.429	110.476.677.992
	BLUD RSUD Dr. Soedomo	113.073.097.917	120.346.479.243	98.784.426.000	108.429.387.000	127.149.387.000	567.782.777.160	145.174.387.000
1.03	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**209.726.420.442**	**200.716.729.127**	**116.353.401.000**	**154.305.000.000**	**184.900.000.000**	**866.001.550.569**	**211.890.000.000**
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	144.506.867.950	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	65.219.552.492	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	200.716.729.127	116.353.401.000	154.305.000.000	184.900.000.000	866.001.550.569	211.890.000.000
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**14.156.812.950**	**36.527.082.648**	**31.920.024.000**	**49.951.500.000**	**63.806.500.000**	**196.361.919.598**	**72.806.500.000**
	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan	14.156.812.950	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	36.527.082.648	31.920.024.000	49.951.500.000	63.806.500.000	196.361.919.598	72.806.500.000

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**3.628.163.440**	**3.685.812.180**	**6.699.200.000**	**7.097.700.000**	**8.074.000.000**	**29.184.875.620**	**8.275.000.000**
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.538.794.631	-	-	-	-	-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-	1.291.083.273	3.195.000.000	2.380.000.000	2.900.000.000	11.304.877.904	2.900.000.000
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.278.679.000	1.026.543.291	2.064.200.000	2.337.700.000	2.399.000.000	9.106.122.291	2.450.000.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	810.689.809	1.368.185.616	1.440.000.000	2.380.000.000	2.775.000.000	8.773.875.425	2.925.000.000
1.06	**Sosial**	**1.625.559.145**	**2.452.430.356**	**3.392.415.000**	**3.581.425.000**	**3.889.075.000**	**14.940.904.501**	**4.089.075.000**
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.625.559.145	-	-	-	-	-	-
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2.452.430.356	3.392.415.000	3.581.425.000	3.889.075.000	14.940.904.501	4.089.075.000
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**42.819.754.805**	**67.019.632.155**	**83.165.585.000**	**54.760.012.000**	**63.656.067.424**	**311.421.051.384**	**66.955.997.434**
2.01	**Tenaga Kerja**	**1.685.573.765**	**1.522.606.600**	**2.110.000.000**	**3.890.000.000**	**4.190.000.000**	**13.398.180.365**	**4.400.000.000**
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.685.573.765	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	1.522.606.600	2.110.000.000	3.890.000.000	4.190.000.000	13.398.180.365	4.400.000.000
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**694.991.009**	**814.132.309**	**801.600.000**	**895.000.000**	**920.000.000**	**4.125.723.318**	**1.000.000.000**
	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	694.991.009	-	-	-	-	-	-
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	814.132.309	801.600.000	895.000.000	920.000.000	4.125.723.318	1.000.000.000
2.03	**Pangan**	**1.165.621.700**	**600.058.810**	**755.905.000**	**800.000.000**	**1.305.000.000**	**4.626.585.510**	**1.500.000.000**
	Kantor Ketahanan Pangan	1.165.621.700	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pertanian dan Pangan	-	600.058.810	755.905.000	800.000.000	1.305.000.000	4.626.585.510	1.500.000.000
2.04	**Pertanahan**	**2.100.853.959**	**11.858.518.470**	**17.871.200.000**	**13.950.000.000**	**14.950.000.000**	**60.730.572.429**	**15.950.000.000**
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	55.990.840	-	-	-	-	-	-
	Sekretariat Daerah	2.044.863.119	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	11.858.518.470	17.871.200.000	13.950.000.000	14.950.000.000	60.730.572.429	15.950.000.000
2.05	**Lingkungan Hidup**	**13.926.866.524**	**26.031.866.550**	**24.642.008.000**	**2.150.000.000**	**3.583.265.000**	**70.334.006.074**	**3.583.265.000**
	Kantor Lingkungan Hidup	13.926.866.524	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	26.031.866.550	24.642.008.000	2.150.000.000	3.583.265.000	70.334.006.074	3.583.265.000
2.06	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**1.452.145.455**	**2.512.745.712**	**2.512.361.000**	**2.753.156.000**	**3.180.156.000**	**12.410.564.167**	**3.238.156.000**
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.452.145.455	2.512.745.712	2.512.361.000	2.753.156.000	3.180.156.000	12.410.564.167	3.238.156.000
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**2.950.896.268**	**3.108.093.513**	**3.368.500.000**	**3.600.000.000**	**3.954.999.990**	**16.982.489.771**	**4.080.000.000**
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.950.896.268	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.108.093.513	3.368.500.000	3.600.000.000	3.954.999.990	16.982.489.771	4.080.000.000
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**3.778.945.877**	**2.465.383.727**	**4.995.359.000**	**5.066.740.000**	**5.166.740.000**	**21.473.168.604**	**5.366.740.000**
	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.778.945.877	-	-	-	-	-	-
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	2.465.383.727	4.995.359.000	5.066.740.000	5.166.740.000	21.473.168.604	5.366.740.000

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09	**Perhubungan**	**3.600.428.966**	**6.541.526.171**	**13.261.000.000**	**5.649.460.000**	**8.592.894.635**	**37.645.309.772**	**8.592.894.635**
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.428.966	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	-	6.541.526.171	13.261.000.000	5.649.460.000	8.592.894.635	37.645.309.772	8.592.894.635
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	**667.099.535**	**1.475.732.190**	**1.331.775.000**	**4.771.440.900**	**3.988.166.799**	**12.234.214.424**	**3.888.166.799**
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	667.099.535	-	-	-	-	-	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.475.732.190	1.331.775.000	4.771.440.900	3.988.166.799	12.234.214.424	3.888.166.799
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah**	**2.121.843.685**	**3.108.762.235**	**2.058.068.000**	**1.800.000.000**	**3.403.070.000**	**12.491.743.920**	**3.500.000.000**
	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	2.121.843.685	-	-	-	-	-	-
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	3.108.762.235	2.058.068.000	1.800.000.000	3.403.070.000	12.491.743.920	3.500.000.000
2.12	**Penanaman Modal**	**1.116.861.716**	**1.425.866.946**	**1.328.250.000**	**1.615.250.000**	**1.776.775.000**	**7.263.003.662**	**1.886.775.000**
	Kantor Perizinan dan Penanaman Modal	1.116.861.716	-	-	-	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	1.425.866.946	1.328.250.000	1.615.250.000	1.776.775.000	7.263.003.662	1.886.775.000
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	**3.776.314.947**	**2.433.845.800**	**4.575.775.000**	**4.105.000.000**	**4.405.000.000**	**19.295.935.747**	**4.605.000.000**
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.776.314.947	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	-	2.433.845.800	4.575.775.000	4.105.000.000	4.405.000.000	19.295.935.747	4.605.000.000
2.14	**Statistik**	**404.005.057**	**51.947.000**	**64.605.000**	**131.165.550**	**140.000.000**	**791.722.607**	**150.000.000**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	404.005.057	-	-	-	-	-	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	51.947.000	64.605.000	131.165.550	140.000.000	791.722.607	150.000.000
2.15	**Persandian**	**-**	**72.099.231**	**130.000.000**	**117.799.550**	**120.000.000**	**439.898.781**	**125.000.000**
	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	72.099.231	130.000.000	117.799.550	120.000.000	439.898.781	125.000.000
2.16	**Kebudayaan**	**2.886.620.804**	**2.377.175.067**	**2.215.000.000**	**2.215.000.000**	**2.650.000.000**	**12.343.795.871**	**3.650.000.000**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	430.460.250	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.456.160.554	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	2.377.175.067	2.215.000.000	2.215.000.000	2.650.000.000	12.343.795.871	3.650.000.000
2.17	**Perpustakaan**	**278.771.038**	**395.229.524**	**865.259.000**	**950.000.000**	**1.010.000.000**	**3.499.259.562**	**1.100.000.000**
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	278.771.038	-	-	-	-	-	-
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	395.229.524	865.259.000	950.000.000	1.010.000.000	3.499.259.562	1.100.000.000
2.18	**Kearsipan**	**211.914.500**	**224.042.300**	**278.920.000**	**300.000.000**	**320.000.000**	**1.334.876.800**	**340.000.000**
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	211.914.500	-	-	-	-	-	-
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	224.042.300	278.920.000	300.000.000	320.000.000	1.334.876.800	340.000.000
3	**Urusan Pilihan**	**40.663.549.285**	**31.286.033.802**	**47.887.599.900**	**68.809.363.000**	**54.225.963.000**	**242.872.508.987**	**64.420.963.000**
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	**4.723.803.650**	**4.907.581.800**	**4.940.963.000**	**5.034.963.000**	**5.999.963.000**	**25.607.274.450**	**6.269.963.000**
	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.723.803.650	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perikanan	-	4.907.581.800	4.940.963.000	5.034.963.000	5.999.963.000	25.607.274.450	6.269.963.000
3.02	**Pariwisata**	**7.480.248.805**	**5.414.061.731**	**4.236.000.000**	**4.336.000.000**	**10.375.000.000**	**31.841.310.536**	**14.375.000.000**
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.480.248.805	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	5.414.061.731	4.236.000.000	4.336.000.000	10.375.000.000	31.841.310.536	14.375.000.000
3.03	**Pertanian**	**18.289.909.400**	**13.971.304.181**	**18.080.286.900**	**16.561.000.000**	**19.711.000.000**	**86.613.500.481**	**21.311.000.000**
	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	15.763.181.270	-	-	-	-	-	-
	Dinas Peternakan	2.526.728.130	-	-	-	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dinas Pertanian dan Pangan	-	13.971.304.181	18.080.286.900	16.561.000.000	19.711.000.000	86.613.500.481	21.311.000.000
3.04	**Kehutanan**	**4.364.746.014**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.364.746.014**	**-**
	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	4.364.746.014	-	-	-	-	4.364.746.014	-
3.05	**Energi dan Sumber Daya Mineral**	**54.710.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.710.500**	**-**
	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	54.710.500	-	-	-	-	54.710.500	-
3.06	**Perdagangan**	**4.829.557.827**	**5.551.586.245**	**17.275.350.000**	**40.162.400.000**	**14.965.000.000**	**82.783.894.072**	**19.065.000.000**
	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	3.103.231.327	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pendapatan	1.726.326.500	-	-	-	-	-	-
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	5.551.586.245	17.275.350.000	40.162.400.000	14.965.000.000	82.783.894.072	19.065.000.000
3.07	**Perindustrian**	**570.129.089**	**1.220.241.615**	**2.955.000.000**	**2.415.000.000**	**2.675.000.000**	**9.835.370.704**	**2.900.000.000**
	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	570.129.089	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	1.220.241.615	2.955.000.000	2.415.000.000	2.675.000.000	9.835.370.704	2.900.000.000
3.08	**Transmigrasi**	**350.444.000**	**221.258.230**	**400.000.000**	**300.000.000**	**500.000.000**	**1.771.702.230**	**500.000.000**
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	350.444.000	-	-	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	221.258.230	400.000.000	300.000.000	500.000.000	1.771.702.230	500.000.000
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**43.740.030.139**	**49.920.915.617**	**64.119.368.000**	**118.007.262.300**	**125.381.744.099**	**401.169.320.155**	**130.177.441.949**
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	**28.660.821.209**	**33.896.483.349**	**41.905.048.000**	**96.360.160.600**	**102.470.949.099**	**303.293.462.257**	**106.566.746.949**
	Sekretariat Daerah	10.969.692.340	15.672.820.104	20.964.250.000	75.000.000.000	79.257.599.999	201.864.362.443	80.457.599.999
	Sekretariat DPRD	10.942.864.669	12.833.459.668	14.055.121.000	13.419.323.650	14.522.512.150	65.773.281.137	16.668.310.000
	Kecamatan Trenggalek	466.307.000	387.580.227	954.945.000	1.219.450.000	1.319.450.000	4.347.732.227	1.419.450.000
	Kecamatan Pogalan	435.090.000	327.670.598	403.400.000	441.200.000	491.200.000	2.098.560.598	541.200.000
	Kecamatan Durenan	539.500.000	454.136.402	472.619.500	499.978.950	549.978.950	2.516.213.802	599.978.950
	Kecamatan Bendungan	419.082.000	333.562.000	436.001.000	552.220.000	602.220.000	2.343.085.000	652.220.000
	Kecamatan Karangan	488.823.000	326.372.500	453.380.000	498.380.000	548.380.000	2.315.335.500	598.380.000
	Kecamatan Tugu	574.135.000	407.547.750	515.797.500	643.976.000	693.976.000	2.835.432.250	743.976.000
	Kecamatan Pule	417.638.600	437.356.600	434.945.000	456.868.000	506.868.000	2.253.676.200	556.868.000
	Kecamatan Suruh	452.484.200	266.776.700	358.091.000	412.900.000	462.900.000	1.953.151.900	512.900.000
	Kecamatan Kampak	333.789.000	213.575.000	336.110.000	403.330.000	453.330.000	1.740.134.000	503.330.000
	Kecamatan Gandusari	300.306.900	319.473.000	517.639.000	567.000.000	617.000.000	2.321.418.900	667.000.000
	Kecamatan Watulimo	523.289.000	391.359.500	474.761.000	525.760.000	575.760.000	2.490.929.500	625.760.000
	Kecamatan Panggul	578.050.000	488.785.500	629.200.000	716.989.000	766.989.000	3.180.013.500	816.989.000
	Kecamatan Dongko	430.912.200	323.589.000	447.003.000	476.000.000	526.000.000	2.203.504.200	576.000.000
	Kecamatan Munjungan	407.418.000	330.979.500	451.785.000	526.785.000	576.785.000	2.293.752.500	626.785.000
	Kelurahan Surodakan	66.376.100	66.376.100	-	-	-	132.752.200	-
	Kelurahan Sumbergedong	83.139.000	83.139.000	-	-	-	166.278.000	-
	Kelurahan Ngantru	82.804.000	82.804.000	-	-	-	165.608.000	-
	Kelurahan Tamanan	71.673.600	71.673.600	-	-	-	143.347.200	-
	Kelurahan Kelutan	77.446.600	77.446.600	-	-	-	154.893.200	-

NO.	URURUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
		2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah	2021 (Masa Transisi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02	**Pengawasan**	**853.835.750**	**1.225.266.984**	**2.070.000.000**	**2.212.341.700**	**2.394.195.000**	**8.755.639.434**	**2.394.195.000**
	Inspektorat	853.835.750	1.225.266.984	2.070.000.000	2.212.341.700	2.394.195.000	8.755.639.434	2.394.195.000
4.03	**Perencanaan**	**4.075.353.907**	**5.994.327.854**	**6.555.000.000**	**5.913.760.000**	**6.295.000.000**	**28.833.441.761**	**6.845.000.000**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.075.353.907	-	-	-	-	-	-
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	5.994.327.854	6.555.000.000	5.913.760.000	6.295.000.000	28.833.441.761	6.845.000.000
4.04	**Keuangan**	**7.295.298.985**	**5.683.442.303**	**8.396.841.000**	**8.036.500.000**	**8.086.600.000**	**37.498.682.288**	**8.136.500.000**
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.688.558.135	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pendapatan	3.606.740.850	-	-	-	-	-	-
	Badan Keuangan Daerah	-	5.683.442.303	8.396.841.000	8.036.500.000	8.086.600.000	37.498.682.288	8.136.500.000
4.05	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**2.854.720.288**	**2.835.897.111**	**4.642.479.000**	**5.134.500.000**	**5.735.000.000**	**21.202.596.399**	**5.735.000.000**
	Badan Kepegawaian Daerah	2.854.720.288	2.835.897.111	4.642.479.000	5.134.500.000	5.735.000.000	21.202.596.399	5.735.000.000
4.06	**Penelitian dan Pengembangan**	**-**	**285.498.016**	**550.000.000**	**350.000.000**	**400.000.000**	**1.585.498.016**	**500.000.000**
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	285.498.016	550.000.000	350.000.000	400.000.000	1.585.498.016	500.000.000
	JUMLAH	**653.964.431.612**	**773.952.990.978**	**714.372.555.950**	**835.178.202.938**	**909.801.938.061**	**3.887.270.119.538**	**990.772.571.008**

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0			**Non Urusan**				**83.062.078.978**		**76.277.135.207**		**77.083.134.575**		**80.521.435.100**		**85.980.283.546**		**403.572.364.229**		**90.244.288.633**	
0	**00**		**Umum**				**83.062.078.978**		**76.277.135.207**		**77.083.134.575**		**80.521.435.100**		**85.980.283.546**		**403.572.364.229**		**90.244.288.633**	
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				**6.100.928.664**		**13.167.974.073**		**12.434.483.000**		**14.218.135.000**		**14.223.135.000**		**60.144.655.737**		**14.223.135.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	1.973.766.498	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.973.766.498	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai asset dalam kondisi baik	95,81%	97,00%	2.235.802.716	-	-	-	-	-	-	-	-	98,50%	2.235.802.716	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	1.891.359.450	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.891.359.450	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	-	100%	4.782.895.125	100%	6.844.454.250	100%	9.876.791.500	100%	9.876.791.500	100%	31.380.932.375	100%	9.876.791.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95,81%	97%	-	85,00%	5.635.759.823	85,00%	2.557.448.750	85,00%	1.331.163.500	90,00%	1.331.163.500	98,50%	10.855.535.573	90,00%	1.331.163.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	98%	-	100%	2.749.319.125	100%	2.982.580.000	100%	2.960.180.000	100%	2.960.180.000	100%	11.652.259.125	100%	2.960.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	155.000.000	100%	55.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**2.749.273.633**		**3.573.147.988**		**3.437.437.525**		**3.064.841.000**		**3.109.841.000**		**15.934.541.146**		**3.209.841.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.353.388.758	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.353.388.758	-	-	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	922.597.080	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	922.597.080	-	-	Dinas Kesehatan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan	100%	100%	473.287.795	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	473.287.795	-	-	Dinas Kesehatan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase SDM mendapatkan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	100%	1.927.036.165	100%	2.510.476.525	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	9.237.512.690	100%	2.500.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	100%	893.984.643	100%	417.801.000	100%	397.801.000	100%	417.801.000	100%	2.127.387.643	100%	417.801.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	752.127.180	100%	509.160.000	100%	267.040.000	100%	292.040.000	100%	1.820.367.180	100%	292.040.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo				**179.334.000**		**-**		**85.000.000**		**220.000.000**		**230.000.000**		**714.334.000**		**250.000.000**	
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100%	179.334.000	-	-	100%	85.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	714.334.000	100%	250.000.000	RSUD dr. Soedomo
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**4.787.304.989**		**2.758.070.877**		**3.312.114.000**		**3.885.000.000**		**3.890.000.000**		**18.632.489.866**		**3.995.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase layanan operasional dan administrasi perkantoran	100%	100%	1.146.360.380	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.146.360.380	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai asset dalam kondisi baik	100%	100%	3.325.206.109	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.325.206.109	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, serta administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang dihasilkan	100%	100%	148.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	148.325.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	167.413.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	167.413.500	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.549.343.385	100%	1.707.848.500	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	8.257.191.885	100%	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	850.209.042	100%	1.222.045.500	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.672.254.542	100%	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	180.205.400	100%	187.220.000	100%	185.000.000	100%	190.000.000	100%	742.425.400	100%	195.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	100%	178.313.050	100%	195.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.173.313.050	100%	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				**10.985.300.237**		**1.489.309.287**		**1.898.918.000**		**2.148.500.000**		**2.248.500.000**		**18.770.527.524**		**2.272.300.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase layanan operasional dan administrasi perkantoran	100%	100%	481.409.121	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	481.409.121	-	-	Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai asset dalam kondisi baik	100%	100%	8.985.185.450	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.985.185.450	-	-	Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, serta administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang dihasilkan	100%	11 dok	256.525.500	-	-	-	-	-	-	-	-	51 dok	256.525.500	-	-	Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	138.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	138.827.000	-	-	Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	373.058.766	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	373.058.766	-	-	Kantor Lingkungan Hidup
0	00	02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100%	665.614.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	665.614.400	-	-	Kantor Lingkungan Hidup
0	00	03	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan dokumen perencanan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	84.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	84.680.000	-	-	Kantor Lingkungan Hidup
0	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,00%	96,50%	-	100%	1.061.093.637	100%	1.442.718.000	100%	1.476.200.000	100%	1.476.200.000	100%	5.456.211.637	100%	1.500.000.000	Dinas PKPLH
0	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	97,24%	99,50%	-	100%	204.120.650	100%	247.500.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	1.051.620.650	100%	350.000.000	Dinas PKPLH
0	00	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100%	-	100%	224.095.000	100%	208.700.000	100%	223.800.000	100%	223.800.000	100%	880.395.000	100%	223.800.000	Dinas PKPLH
0	00	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	198.500.000	100%	198.500.000	100%	397.000.000	100%	198.500.000	Dinas PKPLH
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran				**769.192.381**		**1.011.026.279**		**2.284.928.000**		**2.245.000.000**		**2.302.000.000**		**8.612.146.660**		**2.310.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase kecukupan Penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi	92,08%	100%	200.790.731	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200.790.731	-	-	Satpol PP
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Aset dalam kondisi baik	96,75%	20%	240.176.800	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	240.176.800	-	-	Satpol PP
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan,Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89,86%	100%	86.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	86.060.000	-	-	Satpol PP
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	242.164.850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	242.164.850	-	-	Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,08%	100%	-	100%	626.583.428	100%	1.465.928.000	100%	1.743.000.000	100%	1.800.000.000	100%	5.635.511.428	100%	1.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96,75%	100%	-	100%	266.876.851	100%	725.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	1.781.876.851	100%	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89,86%	100%	-	100%	117.566.000	100%	94.000.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	425.566.000	100%	110.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				**543.264.768**		**477.633.684**		**436.000.000**		**458.800.000**		**530.000.000**		**2.445.698.452**		**560.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	225.480.480	100%	270.945.543	100%	242.300.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	1.313.726.023	100%	325.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi baik	100%	100%	199.561.788	100%	129.598.141	100%	115.000.000	100%	95.000.000	100%	125.000.000	100%	664.159.929	100%	125.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
0	00	03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	100%	100%	36.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.365.000	-	-	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
0	00	04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	81.857.500	100%	77.090.000	100%	78.700.000	100%	88.800.000	100%	105.000.000	100%	431.447.500	100%	110.000.000	Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**2.553.523.163**		**963.056.675**		**1.397.967.700**		**1.120.000.000**		**1.210.000.000**		**7.244.547.538**		**1.300.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	498.961.108	100%	649.845.775	100%	887.467.700	100%	712.500.000	100%	750.000.000	100%	3.498.774.583	100%	800.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	1.994.262.055	100%	179.819.400	100%	365.000.000	100%	245.000.000	100%	275.000.000	100%	3.059.081.455	100%	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	00	03	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan dokumen perencanan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.300.000	100%	97.982.000	100%	95.500.000	100%	112.500.000	100%	125.000.000	100%	491.282.000	100%	125.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	-	-	100%	35.409.500	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	195.409.500	100%	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**604.245.044**		**1.089.283.054**		**1.389.485.000**		**1.238.575.000**		**1.260.000.000**		**5.264.221.044**		**1.285.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	348.808.646	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	348.808.646	-	-	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	154.757.398	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	154.757.398	-	-	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100.679.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.679.000	-	-	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	581.104.216,00	100%	603.231.000,00	100%	703.575.000,00	100%	725.000.000,00	100%	2.420.602.000,00	100%	750.000.000,00	Dinas Sosial P3A
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,76%	99,80%	-	99,85%	430.463.838,00	99,90%	599.254.000,00	99,95%	350.000.000,00	99,95%	350.000.000,00	99,95%	1.606.374.000,00	100%	350.000.000,00	Dinas Sosial P3A
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	77.715.000,00	100%	83.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	85.000.000,00	Dinas Sosial P3A
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	-	-	-	-	-	100%	104.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	333.000.000,00	100%	100.000.000,00	Dinas Sosial P3A
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**1.559.035.692**		**770.188.525**		**1.435.000.000**		**1.095.000.000**		**1.285.000.000**		**6.144.224.217**		**1.465.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100%	100,00	560.944.692	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	560.944.692	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,76%	99,80	771.419.650	-	-	-	-	-	-	-	-	99,95	771.419.650	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7 dokumen	8 dokumen	226.671.350	-	-	-	-	-	-	-	-	36 dokumen	226.671.350	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	397.370.742	100%	515.000.000	100%	500.000.000,00	100%	550.000.000	100%	1.962.370.742	100%	600.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94%	94%	-	95%	288.525.683	96%	775.000.000	97%	375.000.000	98%	500.000.000	98,00%	1.938.525.683	98%	600.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	84.292.100	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	155.000.000	100%	529.292.100	100%	175.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	155.000.000	100%	90.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				**1.609.949.434**		**2.258.259.688**		**1.838.295.000**		**2.110.000.000**		**2.265.000.000**		**11.047.168.000**		**2.375.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	618.732.703	100%	1.029.675.413	100%	1.141.227.400	100%	1.154.500.000	100%	1.250.000.000	100%	5.121.600.000	100%	1.300.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97%	98%	590.297.551	99%	973.336.775	99%	488.200.000	99%	695.000.000	99%	750.000.000	99%	4.575.128.000	99%	800.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	00	03	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	234.669.350	100%	140.227.500	100%	163.867.600	100%	160.500.000	100%	165.000.000	100%	845.240.000	100%	175.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	166.249.830	100%	115.020.000	100%	45.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	505.200.000	100%	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**1.173.707.226**		**1.108.451.483**		**1.150.700.000**		**1.450.000.000**		**1.520.000.000**		**6.402.858.709**		**1.545.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Jumlah belanja jasa kantor	-		576.571.226		-		-		-		-		576.571.226		-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	-	100%	495.165.500		-		-		-		-	100%	495.165.500		-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Kelancaran pengelolaan keuangan sesuai aturan	-	100%	101.970.500		-		-		-		-	100%	101.970.500		-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Peningkatan kinerja karyawan	-		-		-		-		-		-		-		-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	688.639.443	100%	631.500.000	100%	650.000.000	100%	675.000.000	100%	2.645.139.443	100%	700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	90%	-	90%	248.479.900	90%	180.000.000	90%	445.000.000	90%	445.000.000	90%	1.318.479.900	90%	445.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	134.438.000	100%	140.000.000	100%	155.000.000	100%	200.000.000	100%	629.438.000	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	70%	70%	-	70%	36.894.140	90%	199.200.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	636.094.140	90%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Dinas Perhubungan				**12.265.069.807**		**13.108.371.197**		**10.613.500.000**		**10.750.540.000**		**11.772.740.411**		**58.510.221.415**		**12.812.740.411**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,00%	99%	11.706.471.679	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	11.706.471.679	-	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	99%	404.686.728	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	404.686.728	-	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	115.077.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	115.077.000	-	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	38.834.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	38.834.400		-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	99%	-	100%	11.680.242.383	100%	10.033.700.000	100%	10.090.540.000	100%	11.088.884.589	100%	42.893.366.972	100%	12.088.884.589	Dinas Perhubungan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	99%	-	100%	1.281.713.083	100%	422.090.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	2.663.803.083	100%	500.000.000	Dinas Perhubungan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	113.924.000	100%	117.710.000	100%	140.000.000	100%	153.855.822	100%	525.489.822	100%	163.855.822	Dinas Perhubungan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	32.491.731	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	162.491.731	100%	60.000.000	Dinas Perhubungan
			Dinas Komunikasi dan Informatika				-		**968.668.029**		**1.673.620.000**		**958.918.700**		**1.099.597.775**		**4.700.804.504**		**1.230.476.312**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	359.343.423	100%	1.066.710.000	100%	514.083.980	100%	564.597.775	100%	2.504.735.178	100%	595.476.312	Dinas Komunikasi dan Informatika
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	100%	483.936.075	100%	460.390.000	100%	233.568.720	100%	300.000.000	100%	1.477.894.795	100%	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	-	100%	89.001.000	100%	96.520.000	100%	98.252.000	100%	110.000.000	100%	393.773.000	100%	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	N/A	N/A	-	100%	36.387.531	100%	50.000.000	100%	113.014.000	100%	125.000.000	100%	324.401.531	100%	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan				**925.258.679**		**745.377.391**		**1.880.644.500**		**2.087.600.000**		**2.183.583.400**		**7.822.463.970**		**2.213.991.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	419.608.065	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	419.608.065	-	-	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100%	204.733.864	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	204.733.864	-	-	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	176.234.100	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	176.234.100	-	-	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat		100%	124.682.650	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	124.682.650	-	-	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	63%	489.708.191	90%	988.223.000	90%	1.438.991.000	90%	1.438.991.000	90%	4.355.913.191	90%	1.438.991.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	78%	136.576.200	90%	681.737.500	90%	292.000.000	90%	339.900.000	90%	1.450.213.700	90%	350.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	-	97%	119.093.000	100%	210.684.000	100%	269.309.000	100%	314.692.400	100%	913.778.400	100%	325.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	87.300.000	100%	90.000.000	100%	177.300.000	100%	100.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Dinas Penanaman Modal dan PTSP				**929.026.145**		**763.657.671**		**1.005.710.000**		**1.184.750.000**		**1.303.225.000**		**5.186.368.816**		**1.323.225.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	543.974.245	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	543.974.245	-	-	Kantor Perizinan dan Penanaman Modal
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100%	186.021.100	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	186.021.100	-	-	Kantor Perizinan dan Penanaman Modal
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	199.030.800	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	199.030.800	-	-	Kantor Perizinan dan Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	100%	-	100%	499.707.606	100%	661.867.000	100%	757.867.000	100%	833.653.700	100%	2.753.095.306	100%	853.653.700	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	100%	-	100%	152.137.565	100%	236.813.000	100%	236.813.000	100%	260.494.300	100%	886.257.865	100%	260.494.300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	100%	-	100%	111.812.500	100%	107.030.000	100%	107.030.000	100%	117.733.000	100%	443.605.500	100%	117.733.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100%	83.040.000	100%	91.344.000	100%	174.384.000	100%	91.344.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**669.819.397**		**677.858.759**		**1.080.970.000**		**1.000.000.000**		**1.072.450.000**		**4.501.098.156**		**1.127.450.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase kecukupan Penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi	100%	100%	316.097.599		-		-		-		-	100%	316.097.599		-	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	265.880.798		-		-		-		-	100%	265.880.798		-	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan,Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	87.841.000		-		-		-		-	100%	87.841.000		-	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur yang lebih baik		-	-		-		-		-		-	-	-		-	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase kecukupan Penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi	100%	100%	-	100%	389.312.409	100%	604.905.000	100%	644.535.000	100%	664.535.000	100%	2.303.287.409	100%	684.535.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	196.868.350	100%	387.575.000	100%	262.550.000	100%	275.000.000	100%	1.121.993.350	100%	300.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan,Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	91.678.000	100%	88.490.000	100%	92.915.000	100%	92.915.000	100%	365.998.000	100%	92.915.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur yang lebih baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Dinas Perikanan				**821.457.350**		**734.209.075**		**1.041.000.000**		**1.200.000.000**		**1.369.000.000**		**5.165.666.425**		**1.419.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase tertib administrasi dan kelancaran program	100%	100%	522.025.850		-		-		-		-	100%	522.025.850		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	138.625.500		-		-		-		-	100%	138.625.500		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	160.806.000		-		-		-		-	100%	160.806.000		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase kapasitas sumberdaya aparatur	-	-	-		-		-		-		-	-	-		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	446.913.075	100%	670.580.000	100%	626.000.000	100%	656.000.000	100%	2.399.493.075	100%	676.000.000	Dinas Perikanan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	141.451.000	100%	216.600.000	100%	247.100.000	100%	375.000.000	100%	980.151.000	100%	400.000.000	Dinas Perikanan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	145.845.000	100%	153.820.000	100%	143.900.000	100%	155.000.000	100%	598.565.000	100%	160.000.000	Dinas Perikanan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	183.000.000	100%	183.000.000	100%	366.000.000	100%	183.000.000	Dinas Perikanan
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				**2.821.819.334**		**2.137.392.778**		**2.197.560.000**		**2.249.000.000**		**2.339.000.000**		**11.744.772.112**		**2.439.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.600.067.620	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.600.067.620	-	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	1.092.787.714	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.092.787.714	-	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	128.964.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	128.964.000	-	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	60	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	1.401.001.753	100%	1.400.000.000	100%	1.527.000.000	100%	1.557.000.000	100%	5.885.001.753	100%	1.607.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	-	100%	627.528.525	100%	678.560.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.556.088.525	100%	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	108.862.500	100%	119.000.000	100%	122.000.000	100%	132.000.000	100%	481.862.500	100%	132.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dinas Pertanian dan Pangan				**3.904.218.676**		**4.589.943.341**		**2.724.768.850**		**2.810.000.000**		**2.985.000.000**		**17.013.930.867**		**3.085.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	707.252.043		-		-		-		-	100%	707.252.043		-	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	85%	876.948.464		-		-		-		-	100%	876.948.464		-	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	497.587.972		-		-		-		-	100%	497.587.972		-	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	442.797.036		-		-		-		-	100%	442.797.036		-	Dinas Peternakan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	572.126.584		-		-		-		-	100%	572.126.584		-	Dinas Peternakan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	104.421.545		-		-		-		-	100%	104.421.545		-	Dinas Peternakan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	141.420.800									100%	141.420.800			Dinas Peternakan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	208.158.587		-		-		-		-	100%	208.158.587		-	Kantor Ketahanan Pangan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	273.065.895		-		-		-		-	100%	273.065.895		-	Kantor Ketahanan Pangan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	80.439.750		-		-		-		-	100%	80.439.750		-	Kantor Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.538.238.726	100%	1.562.455.500	100%	1.800.500.000	100%	1.800.500.000	100%	6.701.694.226	100%	1.800.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	85%	2.625.840.031	90%	743.513.350	90%	675.000.000	90%	750.000.000	100%	4.794.353.381	95%	800.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	-	100%	425.864.584	100%	281.000.000	100%	284.500.000	100%	284.500.000	100%	1.275.864.584	100%	284.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	-	-	-	-	-	100%	137.800.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	337.800.000	100%	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
			Sekretariat Daerah				**8.794.334.393**		**6.267.558.713**		**6.279.300.000**		**6.500.000.000**		**7.200.000.000**		**35.041.193.106**		**8.200.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.980.530.454	100%	3.890.741.045	100%	4.060.500.000	100%	4.000.000.000	100%	4.250.000.000	100%	22.181.771.499	100%	4.750.000.000	Sekretariat Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	2.170.501.739	100%	1.304.536.830	100%	1.068.800.000	100%	1.350.000.000	100%	1.650.000.000	100%	7.543.838.569	100%	2.000.000.000	Sekretariat Daerah
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	643.302.200	100%	670.869.133	100%	705.000.000	90%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	3.569.171.333	100%	900.000.000	Sekretariat Daerah
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	401.411.705	100%	445.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	1.746.411.705	100%	550.000.000	Sekretariat Daerah
			Sekretariat DPRD				**2.995.655.790**		**2.299.430.322**		**3.012.369.000**		**4.080.676.350**		**4.487.191.094**		**16.875.322.556**		**4.637.191.094**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor Dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	716.514.592	100%	706.666.777	100%	977.643.750	100%	1.201.833.498	100%	1.275.838.242	100%	4.878.496.859	100%	1.375.838.242	Sekretariat DPRD
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93,25%	100%	794.906.950	100%	1.150.196.690	100%	1.408.960.250	100%	2.735.482.852	100%	2.735.482.852	100%	8.825.029.594	100%	2.735.482.852	Sekretariat DPRD
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90,91%	100%	130.375.400	100%	125.737.000	100%	148.730.000	100%	143.360.000	100%	175.870.000	100%	724.072.400	100%	175.870.000	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	91,99%	100%	1.353.858.848	100%	316.829.855	100%	477.035.000	-	-	100%	300.000.000	100%	2.447.723.703	100%	350.000.000	Sekretariat DPRD
			Kecamatan Trenggalek				**443.781.131**		**482.526.907**		**1.405.710.000**		**1.313.852.000**		**1.532.167.500**		**5.178.037.538**		**1.552.167.500**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	325.428.131	100%	188.228.607	100%	933.716.500	100%	757.462.000	100%	811.396.000	100%	3.016.231.238	100%	831.396.000	Kecamatan Trenggalek
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	52.853.000	100%	215.458.300	100%	320.853.500	100%	353.445.000	100%	506.391.500	100%	1.449.001.300	100%	506.391.500	Kecamatan Trenggalek
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	65.500.000	100%	78.840.000	100%	151.140.000	100%	156.140.000	100%	161.140.000	100%	612.760.000	100%	161.140.000	Kecamatan Trenggalek
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	-	-	-	-	-	-	-	100%	46.805.000	100%	53.240.000	100%	100.045.000	100%	53.240.000	Kecamatan Trenggalek
			Kecamatan Pogalan				**428.478.255**		**460.110.119**		**477.800.000**		**515.000.000**		**522.000.000**		**2.403.388.374**		**522.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	198.266.255	100%	190.786.819	100%	237.300.000	100%	245.000.000	100%	250.000.000	100%	1.121.353.074	100%	250.000.000	Kecamatan Pogalan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	165.958.000	100%	190.331.300	100%	164.000.000	100%	192.000.000	100%	192.000.000	100%	904.289.300	100%	192.000.000	Kecamatan Pogalan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	64.254.000	100%	78.992.000	100%	76.500.000	100%	78.000.000	100%	80.000.000	100%	377.746.000	100%	80.000.000	Kecamatan Pogalan
			Kecamatan Durenan				**477.511.235**		**487.943.743**		**466.525.500**		**514.166.050**		**545.000.000**		**2.491.146.528**		**575.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	336.008.135	100%	234.460.643	100%	269.053.500	100%	285.958.850	100%	300.000.000	100%	1.425.481.128	100%	325.000.000	Kecamatan Durenan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	85%	82.873.100	90%	188.613.100	95%	119.252.500	95%	131.177.750	100%	145.000.000	100%	666.916.450	100%	150.000.000	Kecamatan Durenan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	58.630.000	100%	64.870.000	100%	78.219.500	100%	97.029.450	100%	100.000.000	100%	398.748.950	100%	100.000.000	Kecamatan Durenan
			Kecamatan Bendungan				**436.944.221**		**514.988.865**		**468.419.000**		**427.200.000**		**512.000.000**		**2.359.552.086**		**530.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	218.020.821	100%	228.837.265	100%	218.609.000	100%	223.200.000	100%	230.000.000	100%	1.118.667.086	100%	230.000.000	Kecamatan Bendungan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	148.473.400	100%	214.451.600	100%	167.790.000	100%	117.540.000	100%	182.000.000	100%	830.255.000	100%	200.000.000	Kecamatan Bendungan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	70.450.000	100%	71.700.000	100%	82.020.000	100%	86.460.000	100%	100.000.000	100%	410.630.000	100%	100.000.000	Kecamatan Bendungan
			Kecamatan Karangan				**354.229.960**		**418.796.804**		**405.229.500**		**435.229.500**		**491.500.000**		**2.104.985.764**		**515.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	246.120.460	100%	199.851.004	100%	209.186.500	100%	230.000.500	100%	255.000.000	100%	1.140.158.464	100%	260.000.000	Kecamatan Karangan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	61.962.400	90%	153.970.800	95%	125.260.000	95%	134.446.000	100%	154.000.000	100%	629.639.200	100%	165.000.000	Kecamatan Karangan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	46.147.100	100%	64.975.000	100%	70.783.000	100%	70.783.000	100%	82.500.000	100%	335.188.100	100%	90.000.000	Kecamatan Karangan
			Kecamatan Tugu				**486.398.658**		**485.202.183**		**421.662.000**		**368.483.500**		**430.575.000**		**2.192.321.341**		**470.575.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	385.092.258	100%	198.640.183	100%	185.012.000	100%	162.430.500	100%	200.000.000	100%	1.131.174.941	100%	220.000.000	Kecamatan Tugu
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	80%	80%	33.833.900	100%	212.739.000	100%	151.200.000	100%	111.373.000	100%	130.575.000	100%	639.720.900	100%	150.575.000	Kecamatan Tugu
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	67.472.500	100%	73.823.000	100%	85.450.000	100%	94.680.000	100%	100.000.000	100%	421.425.500	100%	100.000.000	Kecamatan Tugu
			Kecamatan Pule				**400.736.191**		**433.926.183**		**452.428.000**		**505.505.000**		**532.460.000**		**2.325.055.374**		**552.460.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	249.519.791	100%	229.104.158	100%	239.531.000	100%	259.323.000	100%	259.323.000	100%	1.236.800.949	100%	259.323.000	Kecamatan Pule
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	85.341.400	100%	147.290.025	100%	132.353.000	100%	162.898.000	100%	189.853.000	100%	717.735.425	100%	209.853.000	Kecamatan Pule
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	65.875.000	100%	57.532.000	100%	80.544.000	100%	83.284.000	100%	83.284.000	100%	370.519.000	100%	83.284.000	Kecamatan Pule
			Kecamatan Suruh				**403.381.721**		**515.882.854**		**468.768.000**		**488.959.000**		**525.500.000**		**2.402.491.575**		**545.500.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	281.239.121	100%	273.403.254	100%	287.790.500	100%	294.959.000	100%	305.500.000	100%	1.442.891.875	100%	325.500.000	Kecamatan Suruh
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	55.451.600	100%	166.279.600	100%	100.725.000	100%	112.000.000	100%	120.000.000	100%	554.456.200	100%	120.000.000	Kecamatan Suruh
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	66.691.000	100%	76.200.000	100%	80.252.500	100%	82.000.000	100%	100.000.000	100%	405.143.500	100%	100.000.000	Kecamatan Suruh
			Kecamatan Kampak				**582.103.999**		**598.414.909**		**543.087.000**		**550.867.000**		**645.955.000**		**2.920.427.908**		**665.955.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	324.503.596	100%	322.258.209	100%	290.127.000	100%	290.127.000	100%	352.470.000	100%	1.579.485.805	100%	372.470.000	Kecamatan Kampak
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	191.900.403	100%	211.936.700	100%	188.740.000	100%	188.740.000	100%	219.265.000	100%	1.000.582.103	100%	219.265.000	Kecamatan Kampak
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	65.700.000	100%	64.220.000	100%	64.220.000	100%	72.000.000	100%	74.220.000	100%	340.360.000	100%	74.220.000	Kecamatan Kampak
			Kecamatan Gandusari				**368.607.590**		**440.454.137**		**321.717.550**		**347.356.550**		**403.619.566**		**1.881.755.393**		**461.619.566**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	290.209.590	100%	163.683.837	100%	171.666.000	100%	195.743.550	100%	221.619.566	100%	1.042.922.543	100%	251.619.566	Kecamatan Gandusari
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	24.743.000	100%	212.982.800	100%	87.584.050	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	505.309.850	100%	125.000.000	Kecamatan Gandusari
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	53.655.000	100%	63.787.500	100%	62.467.500	100%	71.613.000	100%	82.000.000	100%	333.523.000	100%	85.000.000	Kecamatan Gandusari
			Kecamatan Watulimo				**472.251.728**		**487.117.939**		**451.861.100**		**475.862.100**		**546.752.800**		**2.433.845.667**		**588.771.750**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	304.846.228	100%	276.699.039	100%	263.447.600	100%	273.911.600	100%	318.771.750	100%	1.437.676.217	100%	338.771.750	Kecamatan Watulimo
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	104.213.500	100%	131.838.900	100%	106.330.000	100%	113.388.000	100%	128.659.300	100%	584.429.700	100%	150.000.000	Kecamatan Watulimo
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	63.192.000	100%	78.580.000	100%	82.083.500	100%	88.562.500	100%	99.321.750	100%	411.739.750	100%	100.000.000	Kecamatan Watulimo
			Kecamatan Panggul				**373.807.060**		**452.646.059**		**492.520.850**		**529.731.850**		**585.000.000**		**2.433.705.819**		**595.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	244.304.160	100%	234.746.959	100%	270.820.850	100%	319.925.500	100%	325.000.000	100%	1.394.797.469	100%	325.000.000	Kecamatan Panggul
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	52.532.900	90%	138.004.100	95%	144.700.000	95%	122.306.350	100%	170.000.000	100%	627.543.350	100%	175.000.000	Kecamatan Panggul
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	76.970.000	100%	79.895.000	100%	77.000.000	100%	87.500.000	100%	90.000.000	100%	411.365.000	100%	95.000.000	Kecamatan Panggul
			Kecamatan Dongko				**438.283.200**		**475.483.200**		**417.739.500**		**463.742.500**		**508.250.000**		**2.303.498.400**		**538.250.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	294.582.200	100%	269.380.800	100%	249.445.500	100%	253.742.500	100%	272.250.000	100%	1.339.401.000	100%	282.250.000	Kecamatan Dongko
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	61.961.000	90%	118.358.400	95%	87.530.000	95%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	547.849.400	100%	170.000.000	Kecamatan Dongko

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	81.740.000	100%	87.744.000	100%	80.764.000	100%	80.000.000	100%	86.000.000	100%	416.248.000	100%	86.000.000	Kecamatan Dongko
			Kecamatan Munjungan				**430.510.938**		**478.523.135**		**465.516.000**		**465.516.000**		**488.800.000**		**2.328.866.073**		**523.200.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	300.004.738	100%	253.716.635	100%	264.951.000	100%	264.951.000	100%	278.200.000	100%	1.361.823.373	100%	298.200.000	Kecamatan Munjungan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%		70.082.200	100%	157.031.500	100%	131.130.000	100%	131.130.000	100%	137.690.000	100%	627.063.700	100%	150.000.000	Kecamatan Munjungan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.424.000	100%	67.775.000	100%	69.435.000	100%	69.435.000	100%	72.910.000	100%	339.979.000	100%	75.000.000	Kecamatan Munjungan
			Kelurahan Surodakan				**157.162.249**		**163.195.000**		**-**		**-**		**-**		**320.357.249**		**-**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	119.309.249	100%	126.322.000	-	-	-	-	-	-	100%	245.631.249	-	-	Kelurahan Surodakan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	9.300.000	100%	14.120.000	-	-	-	-	-	-	100%	23.420.000	-	-	Kelurahan Surodakan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	28.553.000	100%	22.753.000	-	-	-	-	-	-	100%	51.306.000	-	-	Kelurahan Surodakan
			Kelurahan Sumbergedong				**126.514.490**		**135.414.588**		**-**		**-**		**-**		**261.929.078**		**-**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	97.340.740	100%	96.570.838	-	-	-	-	-	-	100%	193.911.578	-	-	Kelurahan Sumbergedong
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	15.173.750	100%	15.268.750	-	-	-	-	-	-	100%	30.442.500	-	-	Kelurahan Sumbergedong
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	14.000.000	100%	23.575.000	-	-	-	-	-	-	100%	37.575.000	-	-	Kelurahan Sumbergedong
			Kelurahan Ngantru				**132.651.865**		**120.390.885**		**-**		**-**		**-**		**253.042.750**		**-**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	91.681.915	100%	76.677.435	-	-	-	-	-	-	100%	168.359.350	-	-	Kelurahan Ngantru
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	10.756.950	100%	9.003.450	-	-	-	-	-	-	100%	19.760.400	-	-	Kelurahan Ngantru
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	30.213.000	100%	34.710.000	-	-	-	-	-	-	100%	64.923.000	-	-	Kelurahan Ngantru
			Kelurahan Tamanan				**182.627.173**		**183.088.833**		**-**		**-**		**-**		**365.716.006**		**-**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	86.585.673	100%	79.088.333	-	-	-	-	-	-	100%	165.674.006	-	-	Kelurahan Tamanan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	75.000.000	100%	85.600.000	-	-	-	-	-	-	100%	160.600.000	-	-	Kelurahan Tamanan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	21.041.500	100%	18.400.500	-	-	-	-	-	-	100%	39.442.000	-	-	Kelurahan Tamanan
			Kelurahan Kelutan				**174.805.785**		**185.372.700**		**-**		**-**		**-**		**360.178.485**		**-**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	118.140.035	100%	117.325.000	-	-	-	-	-	-	100%	235.465.035	-	-	Kelurahan Kelutan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%	23.965.750	100%	40.627.700	-	-	-	-	-	-	100%	64.593.450	-	-	Kelurahan Kelutan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	32.700.000	100%	27.420.000	-	-	-	-	-	-	100%	60.120.000	-	-	Kelurahan Kelutan
			Inspektorat				**767.317.947**		**846.181.317**		**809.688.000**		**809.688.000**		**943.500.000**		**4.176.375.264**		**1.063.500.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	98%	404.235.972	98%	442.531.817	98%	404.688.000	98%	404.688.000	98%	427.000.000	98%	2.083.143.789	100%	447.000.000	Inspektorat
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	83%	83%	255.394.975	85%	323.319.500	85%	290.000.000	90%	290.000.000	90%	390.000.000	95%	1.548.714.475	90%	490.000.000	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79%	79%	107.687.000	79%	80.330.000	60%	115.000.000	65%	115.000.000	70%	126.500.000	70%	544.517.000	75%	126.500.000	Inspektorat
4	**03**	**01**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**1.440.128.000**		**1.643.878.200**		**2.137.000.000**		**2.886.940.000**		**3.036.940.000**		**11.144.886.200**		**3.236.940.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	901.171.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	901.171.400	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,98%	98%	414.778.300	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	414.778.300	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	00	03	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	124.178.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	124.178.300	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.051.731.800	100%	1.300.060.000	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	5.451.791.800	100%	1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	98%	477.125.400	98%	700.000.000	98%	1.250.000.000	98%	1.300.000.000	98%	3.727.125.400	98%	1.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	-	100%	115.021.000	100%	136.940.000	100%	136.940.000	100%	136.940.000	100%	525.841.000	100%	136.940.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	**04**	**01**	**Badan Keuangan Daerah**				**5.290.086.874**		**4.218.595.034**		**3.312.671.000**		**2.285.000.000**		**2.535.000.000**		**17.641.352.908**		**2.685.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	744.491.235	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	744.491.235	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Nilai aset dalam kondisi baik	98,72%	99%	2.336.183.638	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.336.183.638	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	293.773.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	293.773.700	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	100%	100%	38.249.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	38.249.200	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,15%	100%	1.375.939.746	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.375.939.746	-	-	Dinas Pendapatan
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,40%	100%	296.725.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	296.725.900	-	-	Dinas Pendapatan
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	100%	204.723.455	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	204.723.455	-	-	Dinas Pendapatan
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	-	100%	1.021.468.240	100%	1.010.421.000	100%	1.110.000.000	100%	1.210.000.000	100%	4.351.889.240	100%	1.310.000.000	Badan Keuangan Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Nilai aset dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	100%	2.568.369.895	100%	1.776.255.000	100%	600.000.000	100%	750.000.000	100%	5.694.624.895	100%	800.000.000	Badan Keuangan Daerah
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	-	100%	430.258.000	100%	476.475.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	1.936.733.000	100%	515.000.000	Badan Keuangan Daerah
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	N/A	N/A	-	100%	198.498.899	100%	49.520.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	368.018.899	100%	60.000.000	Badan Keuangan Daerah
4	05	01	**Badan Kepegawaian Daerah**				**952.039.906**		**1.090.132.724**		**955.021.000**		**1.063.000.000**		**1.310.000.000**		**5.370.193.630**		**1.345.000.000**	
0	00	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	498.241.381	100%	551.960.804	100%	524.061.000	100%	590.000.000	100%	705.000.000	100%	2.869.263.185	100%	705.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	00	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,80%	97,90%	323.732.025	98%	424.640.920	98,10%	310.000.000	98,20%	340.000.000	98,25%	365.000.000	98,30%	1.763.372.945	98,30%	400.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	00	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	130.066.500	100%	113.531.000	100%	120.960.000	100%	133.000.000	100%	140.000.000	100%	637.557.500	100%	140.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	00	04	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Aparatur yang telah mengikuti orientasi peningkatan kinerja	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
JUMLAH							**83.062.078.978**		**76.277.135.207**		**77.083.134.575**		**80.521.435.100**		**85.980.283.546**		**403.572.364.229**		**90.244.288.633**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**24.228.843.360**		**90.238.510.370**		**82.939.140.000**		**82.313.040.000**		**83.262.240.000**		**362.981.773.730**		**86.262.240.000**	
1	**01**		**Pendidikan**				**24.228.843.360**		**90.238.510.370**		**82.939.140.000**		**82.313.040.000**		**83.262.240.000**		**362.981.773.730**		**86.262.240.000**	
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				**24.228.843.360**		**90.238.510.370**		**82.939.140.000**		**82.313.040.000**		**83.262.240.000**		**362.981.773.730**		**86.262.240.000**	
1	01	01	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**				**3.218.282.975**										**3.218.282.975**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	82,03	82,23										82,42				
1	01	02	**Program Pendidikan Dasar**				**18.085.389.265**									-	**18.085.389.265**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,18	7,20										7,6				
				Angka Harapan Lama Bersekolah	12,08	12,10										12,9				
				Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)	99,43	100,00										100,00				
				Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15)	97,86	100,00										100,00				
				Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A	1:12	1:12										1:11				
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket B	1:13	1:12										1:11				
				Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi bangunan baik	84,36%	85,38%										99,34%				
				Persentase Ruang Kelas SMP kondisi bangunan baik	97,78%	90,70%										99,77%				
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00										0,00				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,28	0,40										0,00				
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00										100,00				
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00										100,00				
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,52	100,00										100,00				
1	01	03	**Program Pendidikan Menengah**				**1.258.662.800**										**1.258.662.800**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ Paket C	58,71	65,00										73,00				
				Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA/ Paket C	1:12	1:11										1:11				
				Persentase Ruang Kelas SMA kondisi bangunan baik	99,56%	100,00%										99,18%				
				Persentase Ruang Kelas SMK kondisi bangunan baik	99,39%	94,17%										98,83%				
				Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,24	0,60										0,20				
				Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00										100,00				
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	80,03	82,00										90,00				
1	01	04	**Program Pendidikan Non Formal dan Informal**				**157.784.850**										**157.784.850**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Penduduk Buta Aksara > 15 TH	0,18%	0,15%										0,03%				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
1	01	05	**Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**				**209.359.500**										**209.359.500**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Ruang Kelas SLB kondisi bangunan baik	100%	78,57%										98,21%				
				Jumlah Sekolah Inklusi	18	18										18				
				Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapat layanan pendidikan	439	450										450				
1	01	06	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**				**1.032.696.320**									-	**1.032.696.320**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru bersertifikat Pendidik	81,63%	85,71%										98,34%				
1	01	07	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**				**266.667.650**									-	**266.667.650**			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Berfungsinya Informasi Manajemen Pendidikan	100%	100%										100%				
1	01	15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**						2.008.724.300		1.799.340.000		2.010.000.000		2.051.200.000		7.869.264.300		2.051.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun	N/A	70,00		73,20		74,00		75,00		76,00		76,00		77,00		
1	01	16	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar**						57.399.445.988		48.764.140.000		48.764.140.000		49.664.140.000		204.591.865.988		51.664.140.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun	99,43	99,10		99,64		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka kelulusan sekolah SD/MI	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka melanjutkan sekolah SD/ MI	99,52	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Persentase ruang kelas SD kondisi baik	84,36%	85,38%		87,90%		88,87%		92,36%		99,34%		99,34%		99,69%		
1	01	17	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama**						27.918.355.408		26.786.000.000		27.286.000.000		27.286.000.000		109.276.355.408		28.286.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun	97,86	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka putus sekolah SMP/MTs	0,28	0,21		0,20		0,19		0,18		0,17		0,17		0,16		
				Persentase ruang kelas SMP kondisi baik	90,59%	90,70%		92,72%		95,51%		96,64%		97,77%		97,77%		98,89%		
1	01	18	**Program Pendidikan Masyarakat**						398.479.325		1.267.560.000		590.000.000		590.000.000		2.846.039.325		590.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun	0,18%	0,15%		0,14%		0,13%		0,12%		0,11%		0,11%		0,10%		
1	01	19	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga**						171.864.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		621.864.500		150.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka partisiasi PAUD, SD/ MI dan SMP/ MTs	N/A	N/A		90,00		90,45		90,90		91,35		91,35		91,80		
1	01	20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**					-	1.308.783.450	-	2.856.050.000	-	2.297.900.000	-	2.305.900.000	-	8.768.633.450		2.305.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi	81,63%	85,71%		90,00%		92,70%		95,48%		98,34%		98,34%		99,33%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Rasio Guru terhadap Murid SD/MI/Paket A	10,96	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
				Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs/Paket B	14,31	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
1	01	21	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**					-	1.032.857.400	-	1.316.050.000	-	1.215.000.000	-	1.215.000.000	-	4.778.907.400	-	1.215.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani	N/A	N/A		8 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		9 Kegiatan		
JUMLAH							**24.228.843.360**		**90.238.510.370**		**82.939.140.000**		**82.313.040.000**		**83.262.240.000**		**362.981.773.730**		**86.262.240.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**190.313.219.068**		**215.828.709.516**		**200.812.688.475**		**215.831.465.538**		**236.626.064.992**		**1.059.412.147.589**		**255.651.064.992**	
1	**02**		**Kesehatan**				**190.313.219.068**		**215.828.709.516**		**200.812.688.475**		**215.831.465.538**		**236.626.064.992**		**1.059.412.147.589**		**255.651.064.992**	
			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**77.240.121.151**		**95.482.230.273**		**102.028.262.475**		**107.402.078.538**		**109.476.677.992**		**491.629.370.429**		**110.476.677.992**	
1	02	01	**Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan**	Persentase ketersediaan obat	95,14%	100%	4.913.120.623									100%	4.913.120.623			Dinas Kesehatan
1	02	02	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	18,73%	15%	44.552.174.816									15%	44.552.174.816			Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan	22,54%	15%	-									15%	-			
				Persentase puskesmas terakreditasi		17%	-									100%	-			
				Persentase Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	75	80%	-									100%	-			
1	02	03	**Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman**	Persentase sarana pelayanan kesehatan dan PIRT teregistrasi	72%	75%	168.649.300									85%	168.649.300			Dinas Kesehatan
1	02	04	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase desa siaga aktif	100%	100%	2.161.589.900									100%	2.161.589.900			Dinas Kesehatan
				Persentase Taman Posyandu	54,97	56%	-									60%	-			
				Persentase Rumah Tangga Sehat	27,44	30%										50%	-			
1	02	05	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan**	Persentase BLUD yang dapat mengelola dana sesuai standar	4,35	82,61										100,00	-			Dinas Kesehatan
1	02	07	**Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	13,25%	30,00%										100,00%	-			Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB	62,54	67,00%										87,00%	-			
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9,03	10										50	-			
				Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6,77	10										60	-			
				Persentase Pelayanan hygiene sanitasi pangan	2,81	14,94%										33,04%	-			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase Desa ODF	44,59	58,60%										100%	-			
1	02	08	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya**	Persentase Puskesmas dengan Gedung sesuai standar	54,55	72,73	16.321.701.241									100,00	16.321.701.241			Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan Peralatan sesuai standar	0,00%	18,18%										100,00	-			
				Persentase Pustu, Ponkesdes, Polindes yg sesuai standart	11,36	12,50										23,86	-			
1	02	09	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Usia Lanjut**	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100										100	-			Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	16,70	25										50	-			
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	63,84	70										78	-			
1	02	10	**Program Peningkatan Mutu Manajemen Dan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase Tenaga kesehatan sesuai standar di puskesmas	0,75	41,83	2.224.256.811									100	2.224.256.811			Dinas Kesehatan
1	02	11	**Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)**	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai Standar	88,46	88,71	1.416.108.920									97	1.416.108.920			Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin Sesuai Standar	93,05	96										100	-			
1	02	15	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	Persentase Puskesmas dengan Gedung sesuai standar	54,55	72,73	3.345.423.135									100,00	3.345.423.135			Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan Peralatan sesuai standar	0,00%	18,18%										100,00	-			
1	02	16	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	Persentase Balita Gizi Buruk Dengan BB/U	0,73%	0,73%	340.920.700									0,70%	340.920.700			Dinas Kesehatan
				Persentase Balita Stunting	21,27	21										16	-			
1	02	17	**Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita**	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Sesuai Standar	96,67	91	73.025.800									95	73.025.800			Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase Pelayanan kesehatan balita Sesuai Standar	84,86	89										92	-			
1	02	18	**Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Persentase Ponkesdes dengan Kinerja Baik sesuai standart	60%	65%										65%	-			Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas dengan nilai kinerja baik	0%	4,55%										4,55%				
				Persentase Sarana Pelayanan Rujukan yang mempunyai Ijin Operasional																
				Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan	22,54%	15%										15%				
1	02	19	**Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa**	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	13,25%	30%										30%	-			Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB	62,54%	67%										67%				
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9,03%	10%										10%				
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6,77%	10%										10%				
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat			94,59%	330.772.000										330.772.000			
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			82,66%	596.487.406										596.487.406			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			99,60%	459.736.700										459.736.700			
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			6,40%	95.855.150										95.855.150			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja			96,80%	240.298.650										240.298.650			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
1	02	15	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah**	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		87,6%	-	88,00%	81.477.750	88,40%	-	88,80%	-	90,20%	-	90,50%	81.477.750	90,50%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		95,20%		95,50%		95,80%		96,00%		96,30%		96,50%		96,50%		
				Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar		94,00%		94,50%		95,00%		95,30%		95,80%		96,00%		96,00%		
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		85,00%		85,20%		85,50%		85,70%		85,80%		86,00%		86,00%		
				Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar		71,70%		71,80%		71,90%		72,00%		72,00%		72,50%		72,50%		
1	02	16	**Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga**	Persentase Kunjungan Bayi Paripurna	91%	91,74%	-	91,80%	652.051.050	91,90%	225.000.000	91,92%	749.669.000	91,93%	750.000.000	91,95%	2.376.720.050	91,95%	750.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,86%	85,00%		85,20%		85,50%		85,70%		85,80%		86,00%		86,00%		
				Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	71%	71,70%		71,80%		71,90%		72,00%		72,00%		72,50%		72,50%		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97%	99,41%		99,42%		99,43%		99,43%		99,44%		99,50%		99,50%		
				Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%	66,50%		66,51%		66,52%		66,53%		66,54%		66,55%		66,55%		
1	02	17	**Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)**	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	88,46%	87,6%	-	88%	2.425.405.350	88,40%	2.358.540.000	88,80%	2.666.665.000	90,20%	2.683.540.000	90,50%	10.134.150.350	90,50%	2.683.540.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	93,05	95,20%		95,50%		95,80%		96,00%		96,30%		96,50%		96,50%		
				Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	91,90%	94,00%		94,50%		95,00%		95,30%		95,80%		96,00%		96,00%		
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,67%	97,65%		97,75%		97,85%		97,95%		98,15%		98,25%		100%		
				Persentase Bumil KEK	13,90%	13,80%		13,70%		13,60%		13,50%		13,40%		13,40%		13,40%		
				Persentase Pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil	88,46%	89,62%		89,75%		89,80%		89,84%		89,88%		90%		90%		
				Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	89,94%	89,94%		90%		90,50%		91%		91,50%		90%		90%		
1	02	18	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	Persentase Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk	100%	100%	-	100%	527.991.925	100%	200.000.000	100%	575.946.000	100%	600.000.000	100%	1.903.937.925	100%	600.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada bayi	99,32%	103,44%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada Balita	98,53%	97,08%		97,10%		97,20%		97,30%		97,40%		97,50%		97,50%		
				Persentase Penimbangan (D /S)	84,07%	87,21%		87,25%		87,30%		87,40%		87,50%		87,60%		87,60%		
				Persentase Rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	98,31%	98,38%		98,40%		98,40%		98,40%		98,40%		98,40%		98,40%		
				Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri	6,21%	15,75%		15,75%		15,79%		15,80%		15,85%		15,88%		15,88%		
1	02	19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase Keluarga Sehat	N/A	N/A	-	7%	1.192.776.885	8%	1.925.000.000	9%	1.791.260.000	10%	1.825.000.000	10%	6.734.036.885	11%	1.825.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase UKBM yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase masyarakat dengan tingkat pengetahuan tetang kesehatan baik	N/A	N/A		50%		55%		60%		65%		70%		70%		
1	02	20	**Program Penyehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan Olah Raga**	Persentase desa ODF	45%	59%	-	73%	420.491.300	86%	219.900.000	100%	242.820.501	100%	250.000.000	100%	1.133.211.801	100%	250.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase rumah tangga yang memiliki air memenuhi syarat	64%	65%		66%		67%		68%		69%		70%		70%		
				Persentase TTU yang memenuhi syarat	78,0%	80,87%		82%		83%		84%		85%		86%		86%		
				Persentase TPM yang memenuhi syarat	63,0%	66,52%		68%		70%		72%		74%		75%		75%		
				Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan	N/A	N/A		40%		42%		45%		47%		47%		50%		
				Persentase murid yang tingkat kebugarannya baik	N/A	N/A		40%		42%		45%		47%		47%		50%		
1	02	21	**Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa**	Angka Bebas Jentik (ABJ)	79,98%	88,1	-	90	1.284.273.045	92	767.804.000	94	1.500.566.300	> 95	1.580.566.300	> 95	5.133.209.645	> 95	1.580.566.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS	13%	58,40%		63%		68%		73%		78%		78%		78%		
				Case Notification Rate TB Paru	53,81	53,81		55		57,5		60		62,5		65		65		
				Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase kasus klinis malaria yang diperiksa sediaan darah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Penemuan Penderita diare (Case detection rate)	90,73	90,73		90		89		88		87		86		86		
				Persentase RTF Rate penderita kusta	100%	> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		> 90 %		
				Penemuan kasus pneumonia balita	69,08	69,08		69		68,5		68		67,5		67		67		
				Persentase Balita mendapatkan Pelayanan Imunisasi	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
				Persentase Murid SD/MI mendapatkan pelayanan imunisasi	*≥95%*	*≥95%*		*≥95%*		*≥95%*		*≥95%*		*≥95%*		*≥95%*		*≥95%*		
				Persentase Desa UCI	73%	*86%*		*88%*		*90%*		*92%*		*94%*		*95%*		*95%*		
				Persentase KLB ditangani dalam waktu kurang dari 24 Jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9%	*25%*		*30%*		*35%*		*50%*		*60%*		*70%*		*70%*		
				Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7%	55%		60%		65%		70%		75%		80%		80%		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	*55%*	*55%*		*60%*		*65%*		*70%*		*75%*		*80%*		*80%*		
1	02	22	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Puskesmas melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif, fungsi manajemen puskesmas, ukbm serta kerjasama lintas sektor	100%	100%	-	100%	8.518.616.559	100%	13.501.490.000	100%	13.501.489.994	100%	13.501.489.994	100%	49.023.086.547	100%	13.501.489.994	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	23	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan**	Persentase Puskesmas Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	N/A	100%	-	100%	42.791.599.438	100%	46.294.592.600	100%	46.811.888.000	100%	46.811.888.000	100%	182.709.968.038	100%	46.811.888.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase BLUD menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	24	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Persentase pemenuhan obat	100%	144%	-	100%	6.490.529.040	100%	5.541.811.000	100%	6.011.770.000	100%	6.011.770.000	100%	24.055.880.040	100%	6.011.770.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	25	**Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman**	Persentase Apotek sesuai standar	100%	100%	-	100%	135.691.050	100%	109.310.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	465.001.050	100%	110.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Toko Obat sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Makanan yang diperiksa memenuhi syarat	97%	97%		97%		98%		98%		99%		100%		100%		
				Persentase pengelola obat puskesmas dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	26	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya**	Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai standar	59%	59%	-	68%	16.966.398.028	86%	17.298.941.000	95%	16.115.674.949	100%	17.115.674.949	100%	67.496.688.926	100%	18.115.674.949	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
				Persentase Puskesmas dengan Prasarana sesuai standar	18%	18%		64%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	27	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar	59%	59%	-	68%	5.218.115.605	86%	3.000.000.000	95%	6.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	21.218.115.605	100%	7.000.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	28	**Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart	70%	70%	-	75%	481.236.350	80%	135.954.000	85%	140.000.000	90%	150.000.000	95%	907.190.350	95%	150.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Tenaga Non Kesehatan sesuai standart	55%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		75%		
1	02	29	**Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer	70%	70%	-	70%	8.295.576.898	75%	10.449.919.875	75%	11.184.328.794	80%	11.086.748.749	80%	41.016.574.316	80%	11.086.748.749	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan	22%	15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		
				Persentase Masyarakat Memanfaatkan Pelayanan SPGDT tertangani	N/A	85,71%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diawasi / dibina	N/A	N/A		20%		35%		40%		45%		55%		55%		
			RSUD dr. Soedomo				**113.073.097.917**		**120.346.479.243**		**98.784.426.000**		**108.429.387.000**		**127.149.387.000**		**567.782.777.160**		**145.174.387.000**	
1	02	21	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	100%	79.402.622	100%	49.208.168	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	278.610.790	100%	50.000.000	RSUD dr. Soedomo
1	02	26	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	46,15%	53,85%	1.441.454.720	61,54%	4.176.183.293	69,23%	10.000.000.000	84,62%	4.500.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	27.117.638.013	100,00%	7.000.000.000	RSUD dr. Soedomo
1	02	28	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di rumah sakit	73%	75%	9.684.724.735	78%	7.659.062.085	100%	3.415.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.500.000.000	100%	27.558.786.820	100%	3.500.000.000	RSUD dr. Soedomo
1	02	29	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	46,15%	53,85%	34.513.740.438	61,54%	18.542.104.035	69,23%	6.449.387.000	84,62%	6.449.387.000	100,00%	6.449.387.000	100,00%	72.404.005.473	100,00%	6.449.387.000	RSUD dr. Soedomo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
1	02	30	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah**	Persentase pasien di IGD yang dilayani < 5 menit	100%	100%	67.353.775.402	100%	89.919.921.662	100%	78.870.039.000	100%	94.000.000.000	100%	110.000.000.000	100%	440.143.736.064	100%	128.000.000.000	RSUD dr. Soedomo
				Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS	50,21‰	50,00‰		48,00‰		46,00‰		45,00‰		44,50‰		44,50‰		44,50‰		
				Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS	26,72‰	26,50‰		26,00‰		25,00‰		25,00‰		24,50‰		24,50‰		24,50‰		
				Bed Occupancy Rate (BOR)	69,00%	70,00%		71,00%		72,00%		73,00%		74,00%		74,00%		75,00%		
				Average Length of Stay (ALOS)	5,70 hari	5,75 hari		5,80 hari		5,85 hari		5,90 hari		6,00 hari		6,00 hari		6,00 hari		
				Bed Turn Over (BTO)	59,91 kali	57,00 kali		55,00 kali		53,00 kali		52,50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		
				Turn Over Interval (TOI)	2,61 kali	2,50 kali		2,40 kali		2,30 kali		2,20 kali		2,10 kali		2,10 kali		2,10 kali		
				Cash Ratio	122%	125%		128%		130%		133%		135%		140%		140%		
				Rentabilitas	128%	130%		128%		130%		130%		130%		135%		135%		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71,75	72,00		72,50		73,00		73,50		75,00		75,00		75,00		
1	02	31	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit	77,78%	81,52%	-	90,22%	-	93,48%	-	97,83%	130.000.000	98,91%	150.000.000	98,91%	280.000.000	98,91%	175.000.000	RSUD dr. Soedomo
			JUMLAH				**190.313.219.068**		**215.828.709.516**		**200.812.688.475**		**215.831.465.538**		**236.626.064.992**		**1.059.412.147.589**		**255.651.064.992**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang dosertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**209.726.420.442**		**200.716.729.127**		**116.353.401.000**		**154.305.000.000**		**184.900.000.000**		**866.001.550.569**		**211.890.000.000**	
1	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**209.726.420.442**		**200.716.729.127**		**116.353.401.000**		**154.305.000.000**		**184.900.000.000**		**866.001.550.569**		**211.890.000.000**	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**209.726.420.442**		**200.716.729.127**		**116.353.401.000**		**154.305.000.000**		**184.900.000.000**		**866.001.550.569**		**211.890.000.000**	
1	03	01	**Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	64,96	70,00	43.559.458.900									95,00	43.559.458.900			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
				Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	90,07	92,05										100,00	-			
				Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	50,00	50,00										50,00	-			
				Persentase jumlah jembatan yang ditingkatkan	85,00	85,00										85,00	-			
1	03	02	**Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	60,00	60,00	64.613.808.250									60,00	64.613.808.250			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
				Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	69,52	69,52										69,52	-			
				Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	70,00	70,00										70,00	-			
				Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	50,00	50,00										50,00	-			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	03	03	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	Persentase panjang drainase yang dibangun	20,00	28,00	3.509.235.000									28,00	3.509.235.000			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	04	**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**	Persentase volume turap/ talud/ bronjong yang dbangun	20,00	24,00	7.342.338.000									24,00	7.342.338.000			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	05	**Program Pengembangan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya**	Persentase Panjang talud yang dipelihara	9,00	20,00	2.636.946.000									20,00	2.636.946.000			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	06	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	Persentase jumlah sarana prasarana yang siap pakai	84,00	84,00	207.518.800									84,00	207.518.800			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	07	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database**	Persentase Penyusunan/Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	-	100,00	178.035.000									100,00	178.035.000			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
				Persentase Penyusunan Data Irigasi dan Sumber Daya Air	-	-										100,00	-			
1	03	08	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	Persentase peningkatan kondisi jaringan irigasi	39,00	43,00	22.459.528.000									43,00	22.459.528.000			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
				Persentase peningkatan luas areal sawah sawah yang diairi	42,11	46,00										46,00	-			
1.1	03	09	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/Non Perpipaan Perdesaan**	Persentase Penduduk Perdesaan yang mendapatkan akses air minum yang aman	16,09%	20,81%										34,68%	-			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1	03	12	**Program Pembangunan / Renovasi Gedung Sarana dan Prasarana Pemerintah**	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	47%	62%	25.756.089.192									100%	25.756.089.192			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
1.1	03	13	**Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Dokumen RTBL yang tersusun	2 dok	2 dok										8 dok	-			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
1.1	03	14	**Program Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**	Persentase luasan RTH Publik di perkotaan	93%	95%	1.858.273.950									100%	1.858.273.950			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
				Dokumen RTH yang tersusun	1 dok	1 dok										5 dok	-			
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam kondisi baik		92,74	7.231.818.700										7.231.818.700			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			97,76	5.698.136.100										5.698.136.100			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan			96,47	23.974.551.050										23.974.551.050			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
			Program Perencanaan Tata Ruang				236.895.000										236.895.000			
			Program Pemanfaatan Ruang				249.560.000										249.560.000			
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				214.228.500										214.228.500			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1	03	01	**Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	64,96%	71,12%	-	73%	112.892.409.849	75%	75.853.090.000	80%	73.340.000.000	85%	102.935.000.000	85%	365.020.499.849	87%	108.340.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	90,07%	92,05%		94,04%		96,03%		98,01%		100%		100%		100%		
1.1	03	02	**Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	60%		-	65%	28.172.388.090	65%	9.996.500.000	68%	29.350.000.000	80%	30.350.000.000	80%	97.868.888.090	80%	35.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	69,52%			72,38%		74,29%		74,29%		84,76%		84,76%		84,76%		
				Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	70%			74%		74%		80%		90%		90%		90%		
				Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	50%			50%		50%		66,67%		70%		70%		70%		
1.1	03	03	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	33%	838.057.500	-	-	-	-	-	-	33%	838.057.500	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1	03	04	**Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Persentase Panjang talud yang dipelihara	9%	20%	-	27%	25.737.570.000	37%	11.350.811.000	47%	13.730.000.000	57%	13.730.000.000	57%	64.548.381.000	67%	15.730.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1	03	05	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang siap pakai	84%	84%	-	84%	2.033.022.238	84%	1.600.000.000	84%	2.400.000.000	84%	2.400.000.000	84%	8.433.022.238	84%	2.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1	03	06	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database**	Persentase Data Jalan dan Jembatan yang disusun/dimutakhirkan	N/A	100%	-	100%	800.111.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	1.200.111.000	100%	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Data Irigasi dan Sumber Daya Air yag disusun	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%	-	100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1	03	07	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	38,71%	43%	-	46%	22.437.138.450	49%	13.563.000.000	52%	18.635.000.000	55%	18.635.000.000	55%	73.270.138.450	55%	22.635.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase luas areal sawah yang diairi irigasi	42,11%	46%		51%		56%		61%		66%		66%	-	66%		
1.1	03	24	**Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Persentase dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berhasil disusun	100%	100%	-	100%	1.743.342.000	100%	650.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	7.193.342.000	100%	2.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1	03	23	**Program Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah**	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	47%	62%	-	66%	6.062.690.000	71%	3.140.000.000	74%	14.350.000.000	77%	14.350.000.000	77%	37.902.690.000	77%	24.935.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			JUMLAH				**209.726.420.442**		**200.716.729.127**		**116.353.401.000**		**154.305.000.000**		**184.900.000.000**		**866.001.550.569**		**211.890.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**14.156.812.950**		**36.527.082.648**		**31.920.024.000**		**49.951.500.000**		**63.806.500.000**		**196.361.919.598**		**72.806.500.000**	
1	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**14.156.812.950**		**36.527.082.648**		**31.920.024.000**		**49.951.500.000**		**63.806.500.000**		**196.361.919.598**		**72.806.500.000**	
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				**14.156.812.950**		**36.527.082.648**		**31.920.024.000**		**49.951.500.000**		**63.806.500.000**		**196.361.919.598**		**72.806.500.000**	
1	04	01	**Program Pengembangan dan Peningkatan kawasan Perumahan dan Permukiman**	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)	36,66%	45,16%	280.995.000									100,00	280.995.000			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
				Jumlah Data Base perumahan yang disusun	N/A	2 dokumen										2 dokumen	-			
			Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Perumahan			98,91	123.985.000										123.985.000			
			Program Pengembangan Perumahan			99,75	2.094.649.000										2.094.649.000			
			Program Lingkungan Sehat Perumahan			87,54	11.517.469.950										11.517.469.950			
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman			91,65	139.714.000										139.714.000			
1	4	15	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman**	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	40,32%	45,16%	-	58,87%	22.771.075.663	72,58%	17.209.099.000	86,29%	18.201.500.000	100%	20.201.500.000	100%	78.383.174.663	100%	24.201.500.000	Dinas PKPLH
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	1,50%	20%		20%		20%		20%		18,50%		100%		100%		
				Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	30,35%	39,36%		54,29%		69,37%		84,61%		99,95%		99,95%		100%		
1	4	16	**Program Pengembangan/ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	37,03%	50,00%	-	62,22%	7.283.633.535	74,81%	3.706.680.000	87,41%	6.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	26.990.313.535	100,00%	12.000.000.000	Dinas PKPLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	4	17	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/Non Perpipaan Perdesaan**	Persentase Penduduk Perdesaan yang Mendapat Akses Air Bersih	16,09%	20,81%	-	25,53%	6.472.373.450	30,25%	11.004.245.000	34,98%	12.300.000.000	39,70%	13.300.000.000	44,42%	43.076.618.450	44,42%	14.300.000.000	Dinas PKPLH
2	03	19	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Drainase	80,06%	81,64%	-	85,60%	-	89,95%	-	94,73%	6.200.000.000	100%	6.525.000.000	100%	12.725.000.000	100%	8.525.000.000	Dinas PKPLH
				Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
2	03	15	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	Persentase Penduduk yang Terlayani Pengangkutan Sampah	28,57%	42,86%	-	57,14%	-	71,43%	-	85,71%	7.250.000.000	100%	13.780.000.000	100%	21.030.000.000	100,00%	13.780.000.000	Dinas PKPLH
			JUMLAH				**14.156.812.950**		**36.527.082.648**		**31.920.024.000**		**49.951.500.000**		**63.806.500.000**		**196.361.919.598**		**72.806.500.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Proritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**3.628.163.440**		**3.685.812.180**		**6.699.200.000**		**7.097.700.000**		**8.074.000.000**		**29.184.875.620**		**8.275.000.000**	
1	**05**		**Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**				**3.628.163.440**		**3.685.812.180**		**6.699.200.000**		**7.097.700.000**		**8.074.000.000**		**29.184.875.620**		**8.275.000.000**	
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran				**1.538.794.631**		**1.291.083.273**		**3.195.000.000**		**2.380.000.000**		**2.900.000.000**		**11.304.877.904**		**2.900.000.000**	
1	05	01	**Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**	Persentase penyelesaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan bupati	100%	100%	1.140.334.048									100%	1.140.334.048			Satpol PP
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	15%	15%										90%				
1	05	02	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	Persentase Jumlah Kerusuhan /Kericuan di Kabupaten Trenggalek	0%	0%	242.155.583									0%	242.155.583			Satpol PP
				Angka kriminalitas	5,86	5,60										5,20	-			
			Program peningkatan disiplin aparatur			99,88	156.305.000										156.305.000			
1	05	15	**Program Peningkatan Kepatuhan Implementasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	-	100%	34.899.400	-	-	-	-	-	-	100%	34.899.400	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	16	**Program Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah**	Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	263.292.705	100%	325.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000	100%	1.188.292.705	100%	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	17	**Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**	Persentase kegiatan yang difasilitasi dan ditangani pengamanannya	100%	100%	-	100%	431.652.803	100%	635.000.000	100%	590.000.000	100%	650.000.000	100%	2.306.652.803	100%	650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	18	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	Persentase anggota Satlinmas yang telah mengikuti diklat/pembinaan	100%	100%	-	100%	125.874.500	100%	1.400.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	3.175.874.500	100%	850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	05	19	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	66,67%	72,22%	-	77,78%	151.780.000	83,33%	365.000.000	88,89%	200.000.000	94,44%	250.000.000	94,44%	966.780.000	94,44%	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	27	**Program Pengembangan Sumber Daya aparatur**	Persentase anggota Satpol PPK yang mengikuti Pelatihan	100%	100%	-	100%	283.583.865	100%	370.000.000	100%	440.000.000	100%	600.000.000	100%	1.693.583.865	100%	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	05	28	**Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**	Persentase kasus Barang Kena Cukai Ilegal yang ditindaklajuti	N/A	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				**1.278.679.000**		**1.026.543.291**		**2.064.200.000**		**2.337.700.000**		**2.399.000.000**		**9.106.122.291**		**2.450.000.000**	
1	05	20	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	Persentase Penyelesaian Konflik Suku, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	261.700.000	100%	278.260.000	100%	484.500.000	100%	445.000.000	100%	500.000.000	100%	1.969.460.000	100%	500.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	21	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	Jumlah Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat	N/A	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	418.300.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	519.910.291	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	862.200.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	1.313.700.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	1.320.000.000	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial , P4GN)	4.434.110.291	100%	1.350.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	22	**Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**	Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan	100%	100%	81.179.000	100%	51.715.000	100%	53.700.000	-	-	-	-	100%	186.594.000	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	23	**Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi**	Jumlah Ormas Yang Terdaftar (Legal)	N/A	5 Ormas Yang Terdaftar	489.000.000	5 Ormas Yang Terdaftar	176.658.000	5 Ormas Yang Terdaftar	663.800.000	5 Ormas Yang Terdaftar	579.000.000	5 Ormas Yang Terdaftar	579.000.000	5 Ormas Yang Terdaftar	2.487.458.000	5 Ormas Yang Terdaftar	600.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah Parpol yang Mendapat Bantuan	N/A	10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		10 Parpol yang mendapat bantuan		
1	05	28	**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**	Pembentukan Panitian Ranham dan Tim fasilitasi Ranham yang nantinya menyusun program Ham Kabupaten Trenggalek	100%	100%	28.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	28.500.000	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**810.689.809**		**1.368.185.616**		**1.440.000.000**		**2.380.000.000**		**2.775.000.000**		**8.773.875.425**		**2.925.000.000**	
1	05	19	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	66,67%	100,00%	274.895.956	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	274.895.956	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	05	24	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	23 desa/kel	23 desa/kel	204.486.560	4 desa/kel	684.889.668	3 desa/kel	835.000.000	4 desa/kel	630.000.000	4 desa/kel	700.000.000	15 desa/kel	3.054.376.228	4 desa/kel	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	25	**Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana**	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	100%	100%	292.789.650	100%	638.610.922	100%	555.000.000	100%	1.700.000.000	100%	2.000.000.000	100%	5.186.400.572	100%	2.100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase distribusi logistik Penanggulangan Bencana pada daerah bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	26	**Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana**	Persentase dokumen identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana	100%	100%	38.517.643	100%	44.685.026	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	258.202.669	100%	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			JUMLAH				**3.628.163.440**		**3.685.812.180**		**6.699.200.000**		**7.097.700.000**		**8.074.000.000**		**29.184.875.620**		**8.275.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**1.625.559.145**		**2.452.430.356**		**3.392.415.000**		**3.581.425.000**		**3.889.075.000**		**14.940.904.501**		**4.089.075.000**	
1	**06**		**Sosial**				**1.625.559.145**		**2.452.430.356**		**3.392.415.000**		**3.581.425.000**		**3.889.075.000**		**14.940.904.501**		**4.089.075.000**	
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**1.625.559.145**		**2.452.430.356**		**3.392.415.000**		**3.581.425.000**		**3.889.075.000**		**14.940.904.501**		**4.089.075.000**	
1	06	01	**Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)	20,26	21,24	368.404.000									79,48	368.404.000			Dinas Nakertransos
1	06	02	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)	7,34	94,68	803.084.595									100,00	803.084.595			Dinas Nakertransos
				Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)	13,34	13,96	-									445 orang PMKS; 385 orang disosialisasi				
1	06	03	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	Jumlah anak terlantar usia remaja (15 -18 tahun) yang telah dibina	153,00	203,00	50.577.000									14,33	50.577.000			Dinas Nakertransos
1	06	04	**Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial) (%)	6,02	6,94	140.546.900									54,79	140.546.900			Dinas Nakertransos
1	06	05	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	Cakupan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)	31,62	38,47	97.894.000									700 orang (200 hari)	97.894.000			Dinas Nakertransos

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase peningkatan anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan) (%)	5	10	-									220				
1	06	06	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan) (%)	112,00	132,00	56.939.400									12,16	56.939.400			Dinas Nakertransos
1	06	07	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS (%)	7,30	9,12	108.113.250									15 kali	108.113.250			Dinas Nakertransos
1	06	15	**Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)	20,26%	21,24%	-	28,43%	469.892.000	34,63%	650.000.000	42,83%	782.000.000	50,02%	882.000.000	50,02%	2.783.892.000	57,22%	882.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)	4,12%	53,13%	-	54,07%	197.481.500	55,10%	855.700.000	57,16%	582.075.000	58,19%	682.075.000	58,19%	2.317.331.500	59,22%	782.075.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)	13,34%	13,96%	-	28,01%		29,43%		30,96%		32,75%		32,75%	-	32,75%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	17	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	59,23%	62,23%	-	63,25%	1.058.131.026	65,59%	871.915.000	67,93%	1.100.000.000	70,27%	1.200.000.000	70,27%	4.230.046.026	72,62%	1.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	59,62%	60,00%	-	80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		95,00%	-	95,00%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	18	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	8,41%	10,59%	-	11,00%	118.727.500	11,50%	150.000.000	12,00%	145.000.000	12,50%	150.000.000	12,50%	563.727.500	12,50%	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	19	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial) (%)	5,28%	5,94%	-	8,55%	214.048.580	9,43%	300.000.000	10,49%	270.000.000	11,55%	270.000.000	11,55%	1.054.048.580	12,61%	270.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	20	**Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)	31,62%	38,47%	-	80,83%	78.119.000	82,00%	125.000.000	84,00%	130.000.000	86,00%	130.000.000	88,00%	463.119.000	88,00%	130.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	4,92%	9,70%	-	9,70%		9,70%		12,12%		12,12%		12,12%	-	18,18%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	21	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	16,47%	19,41%	-	20,00%	60.835.200	22,00%	84.000.000	24,00%	97.350.000	26,00%	100.000.000	26,00%	342.185.200	26,00%	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	22	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	2,15%	4,84%	-	7,54%	124.841.500	10,23%	150.000.000	13,37%	175.000.000	16,51%	175.000.000	16,51%	624.841.500	20,09%	175.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	23	**Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial**	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial	N/A	N/A	-	1 model	130.354.050	2 model	205.800.000	2 model	300.000.000	3 model	300.000.000	3 model	936.154.050	3 model	300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			JUMLAH				**1.625.559.145**		**2.452.430.356**		**3.392.415.000**		**3.581.425.000**		**3.889.075.000**		**14.940.904.501**		**4.089.075.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.685.573.765**		**1.522.606.600**		**2.110.000.000**		**3.890.000.000**		**4.190.000.000**		**13.398.180.365**		**4.400.000.000**	
2	**01**		**Tenaga Kerja**				**1.685.573.765**		**1.522.606.600**		**2.110.000.000**		**3.890.000.000**		**4.190.000.000**		**13.398.180.365**		**4.400.000.000**	
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							**1.685.573.765**		**1.522.606.600**		**2.110.000.000**		**3.890.000.000**		**4.190.000.000**		**13.398.180.365**		**4.400.000.000**	
2	01	01	**Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	Jumlah pencari kerja yang dilatih ketrampilan	160 orang	240 orang	1.103.582.300									1400 orang	1.103.582.300			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
2	01	02	**Program peningkatan kesempatan kerja**	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja (%)	51,54	59,00	365.712.500									72,00	365.712.500			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
				jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja melalui sosialisasi/ radio/TV/spanduk; Pelayanan tenaga kerja (Operasional pelayanan BKOL /Bursa Kerja Online, Operasional pelayanan kartu pencari kerja/Kartu Ak1-5) secara online, Operasional pelayanan Sisko KTKLN/Sistem Komputerisasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, rekomendasi paspor TKI); dan pelaksanaan job fair	12 kali: 3.195 dilayani	12 kali; 4000 dilayani; 1 kali job fair									84 kali; 22.750 dilayani; 5 kali job fair				Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
2	01	03	**Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	Jumlah usulan UMK; Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi UMK; mediasi penyelesaian kasus PHI; Jumlah masyarakat/tenaga kerja yang mendapatkan sosialisasi pemasyarakatan HI	1 usulan; 50 perusahaan; 100% kasus; 400 orang	1 usulan; 50 perusahaan; 100% kasus; 300 orang	216.278.965									5 usulan; 320 perusahaan; 100% kasus; 2.100 orang	216.278.965			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
2	01	15	**Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	88,89%	36,36%	-	60,61%	763.949.000	69,70%	580.000.000	84,85%	150.000.000	100%	200.000.000	79%	1.693.949.000	78%	250.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	N/A	20%		40%		-		-		-		-		-		
2	01	16	**Program peningkatan kesempatan kerja**	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja	51,54%	59%	-	62%	473.181.500	-	830.000.000	-	1.865.000.000	-	1.865.000.000	-	5.033.181.500	-	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD dan AKAN) terhadap pencari kerja yang terdaftar	N/A	-		-		63%		64%		65%		65%		67%		
2	01	17	**Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan (PP), peraturan kerja bersama (PKB), dan perjanjian kerja (PK)	N/A	N/A	-	57%	285.476.100	-	600.000.000	-	450.000.000	-	700.000.000	57%	2.035.476.100	-	725.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/ Peraturan Kerja Bersama (PKB)	N/A	N/A		-		69%		83%		100%		77%		40%		
2	01	18	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**	Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	N/A	N/A	-	N/A	-	60%	100.000.000	80%	1.425.000.000	100%	1.425.000.000	100%	2.950.000.000	100%	1.425.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
JUMLAH							**1.685.573.765**		**1.522.606.600**		**2.060.000.000**		**3.177.500.000**		**3.477.500.000**		**11.923.180.365**		**3.687.500.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**694.991.009**		**814.132.309**		**801.600.000**		**895.000.000**		**920.000.000**		**4.125.723.318**		**1.000.000.000**	
2	**02**		**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				**694.991.009**		**814.132.309**		**801.600.000**		**895.000.000**		**920.000.000**		**4.125.723.318**		**1.000.000.000**	
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**694.991.009**		**814.132.309**		**801.600.000**		**895.000.000**		**920.000.000**		**4.125.723.318**		**1.000.000.000**	
2	02	01	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Persentase cakupan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	65%	65%	443.407.205									100%	443.407.205			Badan Pemberdayaan Perempuan,. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	02	02	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,92	72,38	117.578.334									74,92	117.578.334			Badan Pemberdayaan Perempuan,. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	02	03	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	Angka Melek Huruf Perempuan	92%	99,90%	134.005.470									100%	134.005.470			Badan Pemberdayaan Perempuan,. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	02	04	**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	40 %	43 %	-									53 %	-			Badan Pemberdayaan Perempuan,. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	02	15	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun	N/A	N/A	-	29,41%	462.267.102	58,82%	436.600.000	82,35%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.898.867.102	100%	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk	5	5		5		10		15		20		20		20		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk	N/A	2		2		7		10		13		13		13		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	N/A	21,43%		21,43%		57,14%		71,43%		85,71%		85,71%		85,71%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	16	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk	N/A	N/A	-	1 Desa	48.969.429	2 Desa	205.000.000	3 Desa	135.000.000	4 Desa	150.000.000	4 Desa	538.969.429	4 Desa	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk	N/A	N/A		1 Desa		2 Desa		3 Desa		4 Desa		4 Desa		4 Desa		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	17	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak	N/A	14,29%	-	14,29%	266.598.778	23,81%	160.000.000	33,33%	160.000.000	42,86%	170.000.000	42,86%	756.598.778	52,38%	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	18	**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	N/A	N/A	-	20 Orang	36.297.000	25 Orang	-	30 Orang	100.000.000	35 Orang	100.000.000	35 Orang	236.297.000	40 orang	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			JUMLAH				**694.991.009**		**814.132.309**		**801.600.000**		**895.000.000**		**920.000.000**		**4.125.723.318**		**1.000.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Proritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.165.621.700**		**600.058.810**		**755.905.000**		**800.000.000**		**1.305.000.000**		**4.626.585.510**		**1.500.000.000**	
2	**03**		**Pangan**				**1.165.621.700**		**600.058.810**		**755.905.000**		**800.000.000**		**1.305.000.000**		**4.626.585.510**		**1.500.000.000**	
			Dinas Pertanian dan Pangan				**1.165.621.700**		**600.058.810**		**755.905.000**		**800.000.000**		**1.305.000.000**		**4.626.585.510**		**1.500.000.000**	
2	03	01	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**	Ketersediaan Pangan			1.165.621.700										1.165.621.700			Kantor Ketahanan Pangan
				a. Padi	170.660,66	146.098,29										177.719,89				
				b. Jagung	80.672,95	67.528,21										86.648,27				
				c. Kedelai	9.793,20	6.702,96										8.821,35				
				d. Kacang Tanah	2.739,69	2.127,49										2.131,15				
				e. Ubi Kayu	298.117,95	361.760,00										407.164,45				
				f. Daging	4.329,75	4.501,50										5.260,50				
				g. Telur	2.194,34	2.273,85										2.621,82				
				h. Susu	5.331,98	5.597,52										6.803,01				
				i. Ikan	24.325,46	26.289,16										34.371,77				
				Angka Kecukupan Gizi (AKG) masyarakat																
				a. Energi (kkal/kapita/hari)	5.630,00	5.655,00										5.765,00				
				b. Protein (gr/hari)	283,84	291,56										342,39				
				Pola konsumsi masyarakat yang berimbang sesuai skor PPH (Pola Pangan Harapan)	87,89	88,00										90,00				
2	03	15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**				-		600.058.810		755.905.000		800.000.000		1.305.000.000		3.460.963.810		1.500.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				PPH tingkat ketersediaan	70,86	81,92		81,92		81,92		81,93		81,94		81,94		81,95		
				Persentase Cadangan Pangan	12,60%	12,60%		12,60%		22,60%		32,60%		42,60%		42,60%		52,60%		
				Jumlah kalori kelompok bahan pangan	1.792 kkal/kapita/hari	1.783,90 kkal/kapita/hari		1.760,30 kkal/kapita/hari		1.762 kkal/kapita/hari		1.764 kkal/kapita/hari		1.766 kkal/kapita/hari		1.766 kkal/kapita/hari		1.768 kkal/kapita/hari		
			JUMLAH				**1.165.621.700**		**600.058.810**		**755.905.000**		**800.000.000**		**1.305.000.000**		**4.626.585.510**		**1.500.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**2.100.853.959**		**11.858.518.470**		**17.871.200.000**		**13.950.000.000**		**14.950.000.000**		**60.730.572.429**		**15.950.000.000**	
2	**04**		**Pertanahan**				**2.100.853.959**		**11.858.518.470**		**17.871.200.000**		**13.950.000.000**		**14.950.000.000**		**60.730.572.429**		**15.950.000.000**	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**2.100.853.959**		**11.858.518.470**		**17.871.200.000**		**13.950.000.000**		**14.950.000.000**		**60.730.572.429**		**15.950.000.000**	
2	04	01	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Aset Daerah**	Persentase Tanah milik Pemkab yang sudah disertifikasi	62,98%	87,98%	55.990.840									97,98%	55.990.840			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	04	02	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	Penataan,penguasaan,pemillikan,penggunaan dan pemanfataaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 kawasan	2 kawasan	757.986.276										757.986.276			Sekretariat Daerah
2	04	03	**Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah, Penyerahan dan Pengadaan Tanah Kompensasi Atas Pinjam Pakai Kawasan Hutan			743.920.287										743.920.287			Sekretariat Daerah
2	04	04	**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	Pelaksanaan Fasilitasi pengembangan wilayah strategis di kawasan selatan Trenggalek, kawasan selingkar wilis, kawasan sekitar pembangunan bendungan dan kawasan strateggis baru lainnya	N/A		542.956.556										542.956.556			Sekretariat Daerah
2	04	15	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	Persentase penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab	35,64%	N/A	-	65,53%	11.858.518.470	81,48%	17.871.200.000	100%	13.950.000.000	100%	14.950.000.000	100%	58.629.718.470	100%	15.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			JUMLAH				**2.100.853.959**		**11.858.518.470**		**17.871.200.000**		**13.950.000.000**		**14.950.000.000**		**60.730.572.429**		**15.950.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**13.926.866.524**		**26.031.866.550**		**24.642.008.000**		**2.150.000.000**		**3.583.265.000**		**70.334.006.074**		**3.583.265.000**	
2	**05**		**Lingkungan Hidup**				**13.926.866.524**		**26.031.866.550**		**24.642.008.000**		**2.150.000.000**		**3.583.265.000**		**70.334.006.074**		**3.583.265.000**	
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				**13.926.866.524**		**26.031.866.550**		**24.642.008.000**		**2.150.000.000**		**3.583.265.000**		**70.334.006.074**		**3.583.265.000**	
2	05	01	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Pemantauan status mutu air	-	100%	1.310.151.280									100%	1.310.151.280			Kantor Lingkungan Hidup
2	05	02	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Bertambahnya Sumber Mata Air	265 titik	12 titik	193.550.000									617 titik	193.550.000			Kantor Lingkungan Hidup
2	05	03	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Pemenuhan Informasi pengelolaan Lingkungan Hidup	100% (6 dokumen SLHD mulai tahun 2009-2015	100%	169.177.650									100%	169.177.650			Kantor Lingkungan Hidup
2	05	04	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Persentase pemeliharaan RTH	100%	100%	1.221.709.500									100%	1.221.709.500			Kantor Lingkungan Hidup
2	03	05	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	Persentase Pengangkutan dan pengelolaan sampah	29%	43%	11.032.278.094									100%	11.032.278.094			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
2	03	06	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	Persentase Penduduk yang terlayani jaringan sanitasi/ drainase yang memadai	50%	60%										100%	-			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
2	03	15	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	Persentase Pengelolaan Sampah	28,57%	42,86%	-	57,14%	9.134.326.882	-	9.155.177.000	-	-	-	-	-	18.289.503.882	-	-	Dinas PKPLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Penduduk yang Terlayani Pengangkutan Sampah	-	-		-		71,43%		-		-		100%		-		
2	05	16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	100%	-	100%	843.723.718	100%	927.825.000	100%	1.025.000.000	100%	1.307.710.000	100%	4.104.258.718	100,00%	1.307.710.000	Dinas PKPLH
				Persentase Pemantauan Status Mutu Air	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00%		
				Persentase Pembinaan dan Pentaatan Lingkungan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00%		
2	05	17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Bertambahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	N/A	N/A	-	-	-	100%	962.000.000	100%	800.000.000	100%	1.464.500.000	100%	3.226.500.000	100,00%	1.464.500.000	Dinas PKPLH
2	05	18	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Persentase Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup	N/A	N/A	-	100%	485.440.050	100%	469.500.000	100%	325.000.000	100%	811.055.000	100%	2.090.995.050	100,00%	811.055.000	Dinas PKPLH
2	03	19	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Drainase	80,06%	81,64%	-	85,60%	15.568.375.900	89,95%	13.127.506.000	-	-	-	-	100%	28.695.881.900	-	-	Dinas PKPLH
				Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	50%	60%		70%		80%		-		-		100%		-		
			JUMLAH				**13.926.866.524**		**26.031.866.550**		**24.642.008.000**		**2.150.000.000**		**3.583.265.000**		**70.334.006.074**		**3.583.265.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.452.145.455**		**2.512.745.712**		**2.512.361.000**		**2.753.156.000**		**3.180.156.000**		**12.410.564.167**		**3.238.156.000**	
2	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**1.452.145.455**		**2.512.745.712**		**2.512.361.000**		**2.753.156.000**		**3.180.156.000**		**12.410.564.167**		**3.238.156.000**	
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**1.452.145.455**		**2.512.745.712**		**2.512.361.000**		**2.753.156.000**		**3.180.156.000**		**12.410.564.167**		**3.238.156.000**	
2	06	15	**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Penduduk ber KTP-el	83%	86%	-	88%	174.100.200	91%	161.835.000	93%	215.000.000	94%	290.000.000	94%	840.935.200	94%	300.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan KK	N/A	N/A		85%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	06	16	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran	76%	80%	-	85%	86.799.870	86%	87.520.000	88%	95.000.000	90%	170.000.000	90%	439.319.870	91%	175.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penerbitan Akta Kematian	N/A	N/A		40%		45%		50%		55%		55%		60%		
				Persentase Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	06	17	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	N/A	N/A	-	96%	475.123.500	97%	278.000.000	97%	480.000.000	97%	697.000.000	97%	1.930.123.500	97%	700.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	06	18	**Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data	N/A	N/A	-	100%	349.686.186	100%	321.850.000	100%	300.000.000	100%	360.000.000	100%	1.331.536.186	100%	400.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Inovasi Pelayanan	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK	N/A	N/A		7%		11%		15%		21%		21%		26%		
2	06	19	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Persentase penunjang pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	1.452.145.455	100%	1.427.035.956	100%	1.663.156.000	100%	1.663.156.000	100%	1.663.156.000	100%	7.868.649.411	100%	1.663.156.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pelayanan sipil	B (70,37)	B (75,00)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Rasio Penduduk ber KTP-el	83%	86%		88%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
				Rasio percepatan penyelesaian KTP, KK, dan Akta Kelahiran dalam satu hari	0%	18%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
			JUMLAH				**1.452.145.455**		**2.512.745.712**		**2.512.361.000**		**2.753.156.000**		**3.180.156.000**		**12.410.564.167**		**3.238.156.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**2.950.896.268**		**3.108.093.513**		**3.368.500.000**		**3.600.000.000**		**3.954.999.990**		**16.982.489.771**		**4.080.000.000**	
2	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**2.950.896.268**		**3.108.093.513**		**3.368.500.000**		**3.600.000.000**		**3.954.999.990**		**16.982.489.771**		**4.080.000.000**	
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**2.950.896.268**		**3.108.093.513**		**3.368.500.000**		**3.600.000.000**		**3.954.999.990**		**16.982.489.771**		**4.080.000.000**	
2	07	01	**Program Pelaksanaan Menejemen dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	Persentase APBDesa yang selaras RKPDesa	78%	152 desa										152 desa	-			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	07	02	**Program Perencanaan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa**	Persentase RPJMDesa yang selaras RPJMD	60%	125 desa										152 desa	-			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase RKPDesa yang selaras RPJMDesa	80%	139 desa										152 desa				
2	07	03	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Peran Perempuan di Perdesaan**	Jumlah Desa Cepat Berkembang	-	15 desa										27 desa	-			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	-	30 LPM										150 LPM				
2	07	04	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)**	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mandiri	280 Kelompok	5 Kelompok										305 kelompok	-			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			91,99	843.102.715										843.102.715			
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			82,94	829.357.665										829.357.665			
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			91,31	401.743.836										401.743.836			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			97,5	360.746.592										360.746.592			
			Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			92,35	170.845.000										170.845.000			
			Program Pemberdayaan Teknologi			67,57	253.382.940										253.382.940			
			Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			91,72	91.717.520										91.717.520			
2	07	15	**Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				-		1.061.946.623		1.123.000.000		1.450.000.000		1.624.999.990		5.259.946.613		1.750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa yang telah menyusun Perdes tentang SPM desa	N/A	N/A		N/A		9%		46%		100%		100%	-	100%		
				Persentase SDM aparatur desa yang meningkatkan kompetensinya	N/A	N/A		10%		10%		10%		10%		40%	-	10%		
				Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina	N/A	N/A		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064	-	7 Jenis Lembaga Desa /152 desa jumlah 1064		
				Persentase desa yang tertib administrasi	N/A	N/A		25%		25%		25%		25%		100%	-	25%		
2	07	16	**Program Pelaksanaan Menejemen Pembangunan Desa**				-		1.061.700.150		1.120.500.000		1.020.000.000		1.120.000.000		4.322.200.150		1.120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan	N/A	N/A		40%		60%		80%		100%		100%	-	100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Desa yang mampu menyusun pelaporan keuangan desa sesuai peraturan perundangan dan berbasis IT	N/A	N/A		40%		60%		80%		100%		100%	-	100%		
				Persentase desa yang mampu menggerakan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai swadaya di atas 1% nilai APBDesa	N/A	N/A		5%		10%		20%		30%		30%	-	40%		
2	07	17	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan**				-		984.446.740		1.125.000.000		1.130.000.000		1.210.000.000		4.449.446.740		1.210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif yang Berdaya	N/A	N/A		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		80 Kelompok	-	20 Kelompok		
				Jumlah inovator TTG, Wartekdes dan Posyantek yang aktif	N/A	N/A		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		8 Inovator, 8 karya TTG, 16 Wartekdes yang aktif dan 14 Posyantek yang aktif	-	2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 3 Posyantek yang aktif		
			JUMLAH				**2.950.896.268**		**3.108.093.513**		**3.368.500.000**		**3.600.000.000**		**3.954.999.990**		**16.982.489.771**		**4.080.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**3.778.945.877**		**2.465.383.727**		**4.995.359.000**		**5.066.740.000**		**5.166.740.000**		**21.473.168.604**		**5.366.740.000**	
2	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**3.778.945.877**		**2.465.383.727**		**4.995.359.000**		**5.066.740.000**		**5.166.740.000**		**21.473.168.604**		**5.366.740.000**	
			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**3.778.945.877**		**2.465.383.727**		**4.995.359.000**		**5.066.740.000**		**5.166.740.000**		**21.473.168.604**		**5.366.740.000**	
2	08	01	**Program Keluarga Berencana**	Persentase KB Aktif	75%	75,40%	2.807.822.350									75,85%	2.807.822.350			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	Persentase PUS yang istrinya dibawah usia 20 th	0,87%	0,86%	147.778.027									0,82%	147.778.027			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	**Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	82%	83%	527.972.000									85%	527.972.000			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	**Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS**	Persentase Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda	50%	60%	70.920.000									100%	70.920.000			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05	**Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga**	Persentase Layanan Keluarga Sejahtera	77%	80%	179.971.000									84%	179.971.000			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	**Program Pengendalian Penduduk**	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,08	2,05	-									2	-			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program pelayanan kontrasepsi			63,55	44.482.500										44.482.500			Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	08	15	**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut**	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22,41	N/A	-	22,42	2.465.383.727	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	2.465.383.727	N/A	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	79,05	N/A		79,25		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
2	08	15	**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22,41	N/A	-	N/A	-	22,5	4.995.359.000	22,55	5.066.740.000	22,60	5.166.740.000	22,65	15.228.839.000	22,65	5.366.740.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	79,05	N/A		N/A		79,50		79,75		80,00		80,00		80,25		
			JUMLAH				**3.778.945.877**		**2.465.383.727**		**4.995.359.000**		**5.066.740.000**		**5.166.740.000**		**21.473.168.604**		**5.366.740.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**3.600.428.966**		**6.541.526.171**		**13.261.000.000**		**5.649.460.000**		**8.592.894.635**		**37.645.309.772**		**8.592.894.635**	
2	**09**		**Perhubungan**				**3.600.428.966**		**6.541.526.171**		**13.261.000.000**		**5.649.460.000**		**8.592.894.635**		**37.645.309.772**		**8.592.894.635**	
			Dinas Perhubungan				**3.600.428.966**		**6.541.526.171**		**13.261.000.000**		**5.649.460.000**		**8.592.894.635**		**37.645.309.772**		**8.592.894.635**	
2	09	01	**Program peningakatan pelayanan angkutan**	Persentase Pelayanan lalu lintas dan Angkutan	91,00%	85,00%	739.296.003									95,00%	739.296.003			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	10,00%	6,67%										6,00%				
				Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	76,64%	78,00%										82,00%				
2	09	02	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	Persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	100,00%	100,00%	439.921.100									100%	439.921.100			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	09	03	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	Persentase Alat Uji Kir yang terpelihara	100,00%	100,00%	51.723.771									100%	51.723.771			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	09	04	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan :			2.311.388.262										2.311.388.262			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				a. Rambu	68,07%	71,33%										92,47%				
				b. Marka	56,96%	67,77%										112,77%				
				c. Guardrail	16,26%	19,24%										38,42%				
				d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum) terpasang	112,21%	108,19%										105,50%				
2	09	05	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	Persentase Fasilitas LLAJ yang terpelihara	100,00%	50,00%	58.099.830									100%	58.099.830			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	09	15	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**				-		650.540.503		9.505.000.000		990.000.000		1.146.899.999		12.292.440.502		1.146.899.999	Dinas Perhubungan
				Persentase pelayanan lalu lintas dan angkutan	91%	85,00%		87%		N/A		N/A		N/A		95%		N/A		
				Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	10%	6,67%		6,5%		N/A		N/A		N/A		6%		N/A		
				Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	77%	78,00%		79%		N/A		N/A		N/A		82%		N/A		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	N/A	49,55%		50,45%		63,80%		66,77%		69,73%		69,73%		74,18%		
2	09	16	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**				-		3.152.090.227		1.399.000.000		1.250.460.000		1.250.460.000		7.052.010.227		1.250.460.000	Dinas Perhubungan
				Persentase alat uji kir yang terpelihara	100%	100,00%		100%		N/A		N/A		N/A		100%		N/A		
				Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	N/A	84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		
2	09	17	**Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas**				-		2.199.136.441		1.757.660.000		2.559.000.000		5.345.534.636		11.861.331.077		5.345.534.636	Dinas Perhubungan
				Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan:																
				a. Rambu	68,07%	71,33%		75,27%		N/A		N/A		N/A		92,47%		N/A		
				b. Marka	56,96%	67,77%		77,77%		N/A		N/A		N/A		112,77%		N/A		
				c. Guardrail	16,26%	19,24%		22,82%		N/A		N/A		N/A		38,42%		N/A		
				d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum) terpasang	112,21%	108,19%		107,52%		N/A		N/A		N/A		105,50%		N/A		
				Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan yang tersedia:																
				a. Rambu	N/A	33,29%		33,46%		33,62%		33,82%		34,09%		34,09%		34,49%		
				b. Marka	N/A	7,04%		7,94%		8,13%		9,03%		9,92%		9,92%		10,82%		
				c. Guardrail	N/A	0,15%		0,16%		0,17%		0,17%		0,18%		0,18%		0,18%		
				d. LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	N/A	33,28%		33,30%		33,43%		33,55%		33,65%		33,65%		33,76%		
2	09	18	**Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan**				-		539.759.000		599.340.000		850.000.000		850.000.000	6,00%	2.839.099.000		850.000.000	Dinas Perhubungan
				Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	10%	N/A		6,50%		N/A		N/A		N/A		6,00%		N/A		
				Persentase Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
JUMLAH							**3.600.428.966**		**6.541.526.171**		**13.261.000.000**		**5.649.460.000**		**8.592.894.635**		**37.645.309.772**		**8.592.894.635**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**667.099.535**		**1.475.732.190**		**1.331.775.000**		**4.771.440.900**		**3.988.166.799**		**12.234.214.424**		**3.888.166.799**	
2	**10**		**Komunikasi dan Informatika**				**667.099.535**		**1.475.732.190**		**1.331.775.000**		**4.771.440.900**		**3.988.166.799**		**12.234.214.424**		**3.888.166.799**	
			Dinas Komunikasi dan Informatika				**667.099.535**		**1.475.732.190**		**1.331.775.000**		**4.771.440.900**		**3.988.166.799**		**12.234.214.424**		**3.888.166.799**	
2	10	01	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan berbasis WEB	29,17%	35,42%	636.741.383									100%	636.741.383			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan Sistem Informasi Manajemen	10,42%	18,75%										100%				
2	10	02	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi**	Persentase kelompok KIM yang terbina	100%	100%	30.358.152									100%	30.358.152			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	10	15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	100%	278.301.850	100%	478.145.000	100%	838.733.950	100%	879.999.999	100%	2.475.180.799	100%	879.999.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	16	**Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet	N/A	N/A	-	100%	327.824.304	100%	190.630.000	100%	1.433.166.800	100%	1.433.166.800	100%	3.384.787.904	100%	1.433.166.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi publik secara optimal	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	17	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	Persentase KIM yang terbina	100%	100%	-	100%	123.979.635	100%	95.000.000	100%	239.540.150	100%	250.000.000	100%	708.519.785	100%	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	18	**Program Pengembangan e-Government**	Jumlah PD yang telah menerapkan penyelengaraan Pemerintahan Berbasis IT	N/A	N/A	-	5 PD	287.229.000	5 PD	210.000.000	5 PD	1.710.000.000	5 PD	850.000.000	20 PD	3.057.229.000	5 PD	750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	19	**Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpublikasi secara Elektronik	N/A	N/A	-	100%	458.397.401	100%	358.000.000	100%	550.000.000	100%	575.000.000	100%	1.941.397.401	100%	575.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			JUMLAH				**667.099.535**		**1.475.732.190**		**1.331.775.000**		**4.771.440.900**		**3.988.166.799**		**12.234.214.424**		**3.888.166.799**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**2.121.843.685**		**3.108.762.235**		**2.058.068.000**		**1.800.000.000**		**3.403.070.000**		**12.491.743.920**		**3.500.000.000**	
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**				**2.121.843.685**		**3.108.762.235**		**2.058.068.000**		**1.800.000.000**		**3.403.070.000**		**12.491.743.920**		**3.500.000.000**	
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan				**2.121.843.685**		**3.108.762.235**		**2.058.068.000**		**1.800.000.000**		**3.403.070.000**		**12.491.743.920**		**3.500.000.000**	
2	11	01	**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**	Peningkatan Standarisasi Produk UMKM	25	45	580.489.177									125 produk	580.489.177			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
2	11	02	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Pembinaan dan Pengembangan Usaha UMKM	296	376	111.484.002									566 unit	111.484.002			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Penumbuhan Wirausaha Baru	100	160										475 unit	-			
2	11	03	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Pengembangan Jaringan dan Pemasaran Produk UMKM	18	21	745.747.704									34 unit	745.747.704			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Penguatan Kelembagaan dan Permodalan UMKM	110	135	-									315 unit	-			
2	11	04	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	31,10%	40,00%	684.122.802									80,00%	684.122.802			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	80.029 orang	91.384 orang										97.384 orang	-			
				Persentase Koperasi Sehat	19,64%	25,00%										45,00%	-			
2	11	15	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan dan dikembangkan	N/A	420	-	482	2.331.725.992	355	1.361.518.000	290	1.100.000.000	263	2.475.000.000	1810	7.268.243.992	280	2.500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	11	16	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Jumlah koperasi aktif	N/A	N/A	-	358	777.036.243	368	696.550.000	378	700.000.000	388	928.070.000	388	3.101.656.243	398	1.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
				Jumlah Anggota Koperasi	N/A	N/A		89.978		90.336	-	90.694	-	91.052	-	91.052	-	91.410		
				Jumlah Koperasi Sehat	N/A	N/A		30		5		5		5		45	-	5		
			JUMLAH				**2.121.843.685**		**3.108.762.235**		**2.058.068.000**		**1.800.000.000**		**3.403.070.000**		**12.491.743.920**		**3.500.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**1.116.861.716**		**1.425.866.946**		**1.328.250.000**		**1.615.250.000**		**1.776.775.000**		**7.263.003.662**		**1.886.775.000**	
			Penanaman Modal				**1.116.861.716**		**1.425.866.946**		**1.328.250.000**		**1.615.250.000**		**1.776.775.000**		**7.263.003.662**		**1.886.775.000**	
2	**12**		**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**				**1.116.861.716**		**1.425.866.946**		**1.328.250.000**		**1.615.250.000**		**1.776.775.000**		**7.263.003.662**		**1.886.775.000**	
2	12	01	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Jumlah kegiatan pameran investasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan			171.185.400										171.185.400			Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
				Jumlah kerjasama investasi yang dihasilkan																
2	12	02	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Jumlah nilai investasi	165,00	200 Milyar	577.811.016									1650,00	577.811.016			Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
2	12	03	**Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan**	Jumlah izin yang diterbitkan	3238,00	3798	367.865.300									3.798	367.865.300			Kantor Perijinan dan Penanaman Modal
2	12	15	**Program Pengembangan Penanaman Modal**	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	165 Milyar	200 Milyar	-	260 Milyar	420.384.105	275 Milyar	381.200.000	365 Milyar	410.700.000	400 Milyar	451.770.000	1.500 Milyar	1.664.054.105	600 Milyar	501.770.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	16	**Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP**	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Penanaman Modal dan Perizinan	N/A	82	-	82	616.358.152	84	565.250.000	84	703.250.000	86	773.575.000	86	2.658.433.152	86	803.575.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	17	**Program Pelayanan Perizinan**	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	-	100%	389.124.689	100%	381.800.000	100%	501.300.000	100%	551.430.000	100%	1.823.654.689	100%	581.430.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			JUMLAH				**1.116.861.716**		**1.425.866.946**		**1.328.250.000**		**1.615.250.000**		**1.776.775.000**		**7.263.003.662**		**1.886.775.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**3.776.314.947**		**2.433.845.800**		**4.575.775.000**		**4.105.000.000**		**4.405.000.000**		**19.295.935.747**		**4.605.000.000**	
2	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**				**3.776.314.947**		**2.433.845.800**		**4.575.775.000**		**4.105.000.000**		**4.405.000.000**		**19.295.935.747**		**4.605.000.000**	
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				**3.776.314.947**		**2.433.845.800**		**4.575.775.000**		**4.105.000.000**		**4.405.000.000**		**19.295.935.747**		**4.605.000.000**	
2	13	01	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92%	93%	720.224.500									97%	720.224.500			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah pemuda kader dan pemuda pelopor yang terbentuk	204 orang	204 orang										1080 orang	-			
2	13	02	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	Jumlah pemuda wirausaha yang terbentuk	40 orang	-	-									-	-			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	03	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	21 orang	22 orang	1.334.864.810									126 orang	1.334.864.810			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	04	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	8 unit	4 unit	1.667.665.987									22 unit	1.667.665.987			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	05	**Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga**	Jumlah tenaga keolahragaan yang memenuhi standar kompetensi keolahragaan	25 orang	50 orang	53.559.650									250 orang	53.559.650			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan**	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	N/A	N/A	-	55,25%	917.672.000	57,50%	1.070.000.000	59,75%	1.050.000.000	62,00%	1.150.000.000	62,00%	4.187.672.000	64,25%	1.050.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	13	16	**Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga**	Jumlah prestasi olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional	N/A	23 Kejuaran	-	24 Kejuaran	1.516.173.800	25 Kejuaran	3.505.775.000	26 Kejuaran	3.055.000.000	27 Kejuaran	3.255.000.000	27 Kejuaran	11.331.948.800	28 Kejuaran	3.555.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			JUMLAH				**3.776.314.947**		**2.433.845.800**		**4.575.775.000**		**4.105.000.000**		**4.405.000.000**		**19.295.935.747**		**4.605.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Statistik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**404.005.057**		**51.947.000**		**64.605.000**		**131.165.550**		**140.000.000**		**791.722.607**		**150.000.000**	
2	**14**		**Statistik**				**404.005.057**		**51.947.000**		**64.605.000**		**131.165.550**		**140.000.000**		**791.722.607**		**150.000.000**	
			Dinas Komunikasi dan Informatika				**404.005.057**		**51.947.000**		**64.605.000**		**131.165.550**		**140.000.000**		**791.722.607**		**150.000.000**	
2	14	01	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	Persentase buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan	80,00%	100%	404.005.057									100%	404.005.057			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	14	15	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Pelaksanaan Pembangunan yang *Uptodate*	N/A	N/A	-	100%	51.947.000	100%	64.605.000	100%	131.165.550	100%	140.000.000	100%	387.717.550	100%	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			JUMLAH				**404.005.057**		**51.947.000**		**64.605.000**		**131.165.550**		**140.000.000**		**791.722.607**		**150.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				-		**72.099.231**		**130.000.000**		**117.799.550**		**120.000.000**		**439.898.781**		**125.000.000**	
2	**15**		**Persandian**				-		**72.099.231**		**130.000.000**		**117.799.550**		**120.000.000**		**439.898.781**		**125.000.000**	
			Dinas Komunikasi dan Informatika				-		**72.099.231**		**130.000.000**		**117.799.550**		**120.000.000**		**439.898.781**		**125.000.000**	
2	15	01	**Program Peningkatan Layanan Persandian**	Persentase pelayanan Jaringan persandian di Perangkat Daerah dalam kondisi baik (%)	72,92	-										-	-			Sekretariat Daerah
2	15	15	**Program Peningkatan Layanan Persandian**	Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan IT di Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	100%	72.099.231	100%	130.000.000	100%	117.799.550	100%	120.000.000	100%	439.898.781	100%	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			JUMLAH				-		**72.099.231**		**130.000.000**		**117.799.550**		**120.000.000**		**439.898.781**		**125.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**2.886.620.804**		**2.377.175.067**		**2.215.000.000**		**2.215.000.000**		**2.650.000.000**		**12.343.795.871**		**3.650.000.000**	
2	**16**		**Kebudayaan**				**2.886.620.804**		**2.377.175.067**		**2.215.000.000**		**2.215.000.000**		**2.650.000.000**		**12.343.795.871**		**3.650.000.000**	
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				**2.886.620.804**		**2.377.175.067**		**2.215.000.000**		**2.215.000.000**		**2.650.000.000**		**12.343.795.871**		**3.650.000.000**	
2	16	01	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	Jumlah kesenian tradisional khas Trenggalek yang dilestarikan	12 Jenis	17 Jenis	165.390.250									17 Jenis	165.390.250			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	16	03	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**				265.070.000										265.070.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	16	01	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	Jumlah event /pergelaran seni budaya yang dikelola sebagai daya tarik wisata	4	4	164.835.000		-		-		-		-	4	164.835.000		-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	16	02	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	Prosentase BCB/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	19%	19%	901.308.500		-		-		-		-	19%	901.308.500		-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	16	03	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	Prosentase sanggar/kelompok seni dan seniman yang aktif	50%	56%	1.390.017.054		-		-		-		-	56%	1.390.017.054		-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Prosentase kesenian yang dilestarikan	13%	14%										14%				
2	16	15	**Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya**				-		2.377.175.067		2.215.000.000		2.215.000.000		2.650.000.000		9.457.175.067		3.650.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase BCB/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	19%	19%		34%		56%		78%		100%		100%	-	100%		
				Persentase sanggar/kelompok kesenian yang aktif	50%	56%		62%		68%		75%		81%		81%	-	100%		
			JUMLAH				**2.886.620.804**		**2.377.175.067**		**2.215.000.000**		**2.215.000.000**		**2.650.000.000**		**12.343.795.871**		**3.650.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Proritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	**17**		**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**278.771.038**		**395.229.524**		**865.259.000**		**950.000.000**		**1.010.000.000**		**3.499.259.562**		**1.100.000.000**	
2	**17**		**Perpustakaan**				**278.771.038**		**395.229.524**		**865.259.000**		**950.000.000**		**1.010.000.000**		**3.499.259.562**		**1.100.000.000**	
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**278.771.038**		**395.229.524**		**865.259.000**		**950.000.000**		**1.010.000.000**		**3.499.259.562**		**1.100.000.000**	
2	17	01	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah	20.275 eksemplar	800 eksemplar	278.771.038									24.775 eksemplar	278.771.038			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Jumlah pengunjung perpustakaan	16.582 kunjungan	16.750 kunjungan										18.100 kunjungan				
				Frekuensi peminjaman buku	8.533 eksemplar	8.650 eksemplar										44.400 eksemplar				
				Jumlah peminat mobil Perpustakaan Keliling (MPK)	10.837 kunjungan	11.100 kunjungan										58.000 kunjungan				
				Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif	41 perpusdes	5 perpus-des										25 perpusdes				
				Jumlah sentra Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana"	3 sentra	3 sentra										5 sentra				
				Kunjungan Rintisan Rumah Pintar "Jwalita Mudha Karana"	8451 kunjungan	12.500 kunjungan										105.900 kunjungan				
2	17	15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Jumlah pemanfaat perpustakaan	16.582 orang	16.750 orang	-	25.000 orang	395.229.524	35.000 orang	865.259.000	35.000 orang	950.000.000	35.000 orang	1.010.000.000	163.332 orang	3.220.488.524	35.000 orang	1.100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Jumlah pengunjung rumah pintar	8451 orang	12.500 orang		10.228 orang		13.228 orang		14.228 orang		15.228 orang		73.863 orang		15.228 orang		
			JUMLAH				**278.771.038**		**395.229.524**		**865.259.000**		**950.000.000**		**1.010.000.000**		**3.499.259.562**		**1.100.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Proritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	**18**		**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**211.914.500**		**224.042.300**		**278.920.000**		**300.000.000**		**320.000.000**		**1.334.876.800**		**340.000.000**	
2	**18**		**Kearsipan**				**211.914.500**		**224.042.300**		**278.920.000**		**300.000.000**		**320.000.000**		**1.334.876.800**		**340.000.000**	
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**211.914.500**		**224.042.300**		**278.920.000**		**300.000.000**		**320.000.000**		**1.334.876.800**		**340.000.000**	
2	18	01	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	Persentase jenis arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan (%)	100%	100%	211.914.500									100%	211.914.500			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Persentase data Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (%)	15%	16.67%										25%				
2	18	15	**Program Pengelolaan Sistem Kearsipan**	Jumlah Perangkat Daerah dan lembaga yang mengelola arsip dengan baik sesuai standar	-	-	-	3 Perangkat Daerah / Lembaga	224.042.300	15 Perangkat Daerah / Lembaga	278.920.000	30 Perangkat Daerah / Lembaga	300.000.000	40 Perangkat Daerah / Lembaga	320.000.000	40 Perangkat Daerah / Lembaga	1.122.962.300	40 Perangkat Daerah / Lembaga	340.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			JUMLAH				**211.914.500**		**224.042.300**		**278.920.000**		**300.000.000**		**320.000.000**		**1.334.876.800**		**340.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**4.723.803.650**		**4.907.581.800**		**4.940.963.000**		**5.034.963.000**		**5.999.963.000**		**25.607.274.450**		**6.269.963.000**	
3	**01**		**Kelautan dan Perikanan**				**4.723.803.650**		**4.907.581.800**		**4.940.963.000**		**5.034.963.000**		**5.999.963.000**		**25.607.274.450**		**6.269.963.000**	
			Dinas Perikanan				**4.723.803.650**		**4.907.581.800**		**4.940.963.000**		**5.034.963.000**		**5.999.963.000**		**25.607.274.450**		**6.269.963.000**	
3	01	xx	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	Jumlah KUB Yang terbina	44 KUB	60 KUB	106.105.000									60 KUB	106.105.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	01	**Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	Jumlah Masyarakat yang di Sosialisasi Perundang-undangan Perikanan	200 Orang	200 Orang	48.325.000									1.200 Orang	48.325.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	02	**Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**	Jumlah POKMASWAS yang terbentuk sampai dengan tahun yang bersangkutan	10 POKMASWAS	11 POKMASWAS	64.940.000									15 POKMASWAS	64.940.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	03	**Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut**	Luas kawasan Mangrove dalam kondisi baik	85 Ha	85,2 Ha	243.491.500									86 Ha	243.491.500			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	04	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	Produksi Pembesaran	3.866,352 Ton	4.185,76 ton	2.700.646.750									0,00	2.700.646.750			Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi Benih	27.892.150 ekor	28.449.993 ekor										30.795.187 ekor				
				RTP Budidaya	1.998 RTP	2.028 RTP										2.148 RTP				
				Luas Kawasan Perikanan Budidaya	27,96 Ha	28,96 Ha										0				
3	01	05	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Perikanan Tangkap Laut	24.733,492 Ton	26.733, 492 ton	371.622.000									34.733, 492 ton	371.622.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan	18,35 Ton	19,27 ton										22,95 ton				
3	01	06	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	24,01 kg/kapita/tahun	1.005.663.400									26,01 kg/kapita/tahun	1.005.663.400			Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi Ikan yang Didiversifikasi	10.804,664 Ton	11.344,90 ton										13.789,81 ton				
3	01	07	**Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**	Jumlah POKDAKAN yang terbina	30 POKDAKAN	20 pokdakan	183.010.000									20 pokdakan	183.010.000			Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	01	08	**Program Pengembangan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan**	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Perikanan Tangkap	3 paket	-	-									-	-			Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	01	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.866,352 ton	4.185,760 ton	-	4.534,81 ton	1.019.176.600	4.901,59 ton	1.100.000.000	5.297,23 ton	1.200.000.000	5.724,04 ton	1.235.000.000	5.724,04 ton	4.554.176.600	6.184,51 ton	1.235.000.000	Dinas Perikanan
				Jumlah produksi benih ikan	27.892.150 ekor	N/A		29.018.993 ekor		29.599.373 ekor		30.191.360 ekor		30.795.187 ekor		30.795.187 ekor		35.301.716 ekor		
3	01	02	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	24.733,492 ton	N/A	-	15.683,813 ton	852.989.400	17.683,81 ton	946.000.000	19.683,813 ton	1.050.000.000	21.683,813 ton	1.850.000.000	21.683,813 ton	4.698.989.400	23.683,813 ton	2.000.000.000	Dinas Perikanan
				Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan	18,35 ton	19,27 ton		20,19 ton		21,11 ton		22,03 ton		22,95 ton		22,95 ton		23,87 ton		
3	01	03	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	Jumlah ikan yang didiversifikasi	10.804,66 ton	11.344,90 ton	-	11.912,15 ton	874.057.500	12.507,76 ton	1.410.000.000	13.133,15 ton	1.300.000.000	13.789,81 ton	1.430.000.000	13.789,81 ton	5.014.057.500	14.479,39 ton	1.500.000.000	Dinas Perikanan
				Jumlah Ikan Yang Dipasarkan	N/A	-	-	11.592,53 ton		12.859,31 ton		14.154,95 ton		1.5481,76 ton		1.5481,76 ton		16.842,23 ton		
3	01	04	**Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan**	Jenis sarana prasarana perikanan	N/A	N/A	-	2 jenis	2.161.358.300	2 jenis	1.484.963.000	2 jenis	1.484.963.000	2 jenis	1.484.963.000	8 jenis	6.616.247.300	2 Jenis	1.534.963.000	Dinas Perikanan
			JUMLAH				**4.723.803.650**		**4.907.581.800**		**4.940.963.000**		**5.034.963.000**		**5.999.963.000**		**25.607.274.450**		**6.269.963.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**7.480.248.805**		**5.414.061.731**		**4.236.000.000**		**4.336.000.000**		**10.375.000.000**		**31.841.310.536**		**14.375.000.000**	
3	**02**		**Pariwisata**				**7.480.248.805**		**5.414.061.731**		**4.236.000.000**		**4.336.000.000**		**10.375.000.000**		**31.841.310.536**		**14.375.000.000**	
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				**7.480.248.805**		**5.414.061.731**		**4.236.000.000**		**4.336.000.000**		**10.375.000.000**		**31.841.310.536**		**14.375.000.000**	
3	02	01	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	584.414	642.855	1.384.595.655									1.000.000	1.384.595.655			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				PAD Sektor Pariwisata (Rp.)	5.915.720.900	6.507.293.000										10.500.300.000				
3	02	02	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	5 obyek wisata	5 obyek wisata	5.855.952.400									13 obyek wisata	5.855.952.400			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	02	03	**Program Pengembangan Kemitraan**	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi	180 orang	415 orang	239.700.750									1.590 orang	239.700.750			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah desa wisata yang terbentuk	2 Desa	3 Desa										7 Desa	-			
3	02	16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	5 obyek wisata	6 obyek wisata	-	8 obyek wisata	3.844.519.575	10 obyek wisata	2.700.000.000	12 obyek wisata	2.700.000.000	14 obyek wisata	8.275.000.000	14 obyek wisata	17.519.519.575	16 obyek wisata	12.275.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase rata-rata pertumbuhan pengunjung setiap destinasi wisata	9%	10%		17%		7%		13%		11%		11%		20%		
3	02	15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	584.414 orang	642.855 orang	-	750.000 orang	1.218.359.886	800.000 orang	1.086.000.000	900.000 orang	1.086.000.000	1.000.000 orang	1.400.000.000	1.000.000 orang	4.790.359.886	1.200.000 orang	1.400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	02	17	**Program Pengembangan Kemitraan**	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kepariwisataan	180	235	-	235	351.182.270	235	450.000.000	235	550.000.000	235	700.000.000	1.175	2.051.182.270	250	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata	N/A	N/A		2		4		6		8		8		10		
			JUMLAH				**7.480.248.805**		**5.414.061.731**		**4.236.000.000**		**4.336.000.000**		**10.375.000.000**		**31.841.310.536**		**14.375.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2			**Urusan Pilihan**				**18.289.909.400**		**13.971.304.181**		**18.080.286.900**		**16.561.000.000**		**19.711.000.000**		**86.613.500.481**		**21.311.000.000**	
2	**03**		**Pertanian**				**18.289.909.400**		**13.971.304.181**		**18.080.286.900**		**16.561.000.000**		**19.711.000.000**		**86.613.500.481**		**21.311.000.000**	
			Dinas Pertanian dan Pangan				**18.289.909.400**		**13.971.304.181**		**18.080.286.900**		**16.561.000.000**		**19.711.000.000**		**86.613.500.481**		**21.311.000.000**	
3	03	01	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo	20%	30%	374.800.010										374.800.010			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Persentase Luasan penerapan teknologi SRI	5%	10%											-			
3	03	02	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**	Meningkatnya jumlah sarana prasarana pasca panen	4 unit	4 unit	1.202.244.250										1.202.244.250			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
3	03	03	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	Terselenggaranya dan keikutsertaan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan dalam Pameran/Promosi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	6 kegiatan	6 kegiatan	120.103.530										120.103.530			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
3	03	04	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**	Peningkatan petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian	50 orang	125 orang	905.311.878										905.311.878			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
3	03	05	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	Peningkatan jumlah produksi hasil pertanian (Ton) :			13.160.721.602										13.160.721.602			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Padi	184.604 ton	187.373 ton														
				Jagung	90.959 ton	92.778 ton														
				Kedelai	10.326 ton	10.432 ton														
				Ubi Kayu	350.727 ton	354.585 ton														
				Cabai	437,60 ton	448,54 ton														
				Bawang Merah	63 ton	63,82 ton														
				Sayur - sayuran lainnya	709,20 ton	719,26 ton														
				Buah-buahan	41.754,20 ton	43.031,88 ton														
				Biofarmaka	5.370,70 ton	5.451,23 ton														
				Bunga	-	-														
				Janggelan	243 ton	245,43 ton														
				Kakao	820,10 ton	828,30 ton														
				Kelapa	10.399,60 ton	10.451,60 ton														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Cengkeh	2.462,96 ton	560 ton														
				Kopi	291,95 ton	294,87 ton														
				Nilam	231,64 ton	236,27 ton														
				Peningkatan produktivitas hasil pertanian (Kw/Ha) :																
				Padi	62,22 Kw/Ha	62,41 Kw/Ha														
				Jagung	63,51 Kw/Ha	63,70 Kw/Ha														
				Kedelai	19,59 Kw/Ha	19,79 Kw/Ha														
				Ubi Kayu	240,50 Kw/Ha	241,70 Kw/Ha														
				Cabai	48,10 Kw/Ha	48,34 Kw/Ha														
				Bawang Merah	90,00 Kw/Ha	90,27 Kw/Ha														
				Sayur - sayuran lainnya	246,98 Kw/Ha	249,80 Kw/Ha														
				Buah-buahan	107,46 Kw/Ha	109,52 Kw/Ha														
				Biofarmaka	195,10 Kw/Ha	196,07 Kw/Ha														
				Bunga	0 Kw/Ha	0 Kw/Ha														
				Janggelan	2,10 Kw/Ha	2,12 Kw/Ha														
				Kakao	3,60 Kw/Ha	3,64 Kw/Ha														
				Kelapa	9,80 Kw/Ha	9,85 Kw/Ha														
				Cengkeh	8,80 Kw/Ha	2,31 Kw/Ha														
				Kopi	7,60 Kw/Ha	7,68 Kw/Ha														
				Nilam	16,15 Kw/Ha	16,47 Kw/Ha														
				Infrastruktur Pertanian yang terbangun :																
				a. Jalan Usaha Tani	10.239 meter	11.263 meter														
				b. JITUT	8.085 meter	8.894 meter														
				c. Dam Parit	26 unit	28 unit														
3	3	06	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**				600.317.800										600.317.800			Dinas Peternakan
				Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloces	100%	100%														
				Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza	100%	100%														
				Unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	0 unit	2 unit														
				Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	1.110 ekor sapi	500 ekor sapi														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	3	07	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**				1.530.015.630										1.530.015.630			Dinas Peternakan
				Populasi Ternak (ekor):																
				a. Sapi potong	32.668 ekor	34.300 ekor														
				b. Sapi perah	4.831 ekor	5.070 ekor														
				c. Kambing	362.287 ekor	380.400 ekor														
				d. Domba	10.230 ekor	10.700 ekor														
				e. Unggas	3.195.816 ekor	3.301.780 ekor														
				Produksi Ternak (ton):																
				a. Daging	5.773 ton	6.002 ekor														
				b. Telur	3.008 ton	3.117 ekor														
				c. Susu	6.325 ton	6.640 ekor														
				Jumlah kawasan SPR	-	4 SPR														
				Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	26 ekor	26 ekor														
				Kelahiran hasil IB (ekor)	12.297 ekor	12.900 ekor														
3	3	08	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**				339.327.700										339.327.700			Dinas Peternakan
				Kelompok / usaha peternakan yang mendapat fasilitasi promosi / pemasaran	236 kelompok	25 kelompok														
				Unit usaha pasca panen yang menggunakan teknologi pengolahan hasil peternakan	30 unit	35 unit usaha / kelompok (+5 unit)														
3	3	09	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**	Kelompok / unit usaha yang siap menerapkan teknologi peternakan	87 unit / kelompok	25 unit/ kelompok	57.067.000										57.067.000			Dinas Peternakan
3	03	15	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**Jumlah produktivitas tanaman pangan :**			-		898.744.024		1.362.974.000		1.125.000.000		1.800.000.000		5.186.718.024		1.800.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Padi	62,22 Ku/Ha	59,78 Ku/Ha		59,70 Ku/Ha		59,88 Ku/Ha		60,06 Ku/Ha		60,24 Ku/Ha		60,24 Ku/Ha		60,42 Ku/Ha		
				Jagung	63,51 Ku/Ha	61,91 Ku/Ha		60,42 Ku/Ha		64,08 Ku/Ha		64,28 Ku/Ha		64,47 Ku/Ha		64,47 Ku/Ha		64,66 Ku/Ha		
				Kedelai	19,59 Ku/Ha	19,69 Ku/Ha		15,58 Ku/Ha		20,18 Ku/Ha		20,39 Ku/Ha		20,59 Ku/Ha		20,59 Ku/Ha		20,80 Ku/Ha		
				Ubi Kayu	240,50 Ku/Ha	246,08 Ku/Ha		224,39 Ku/Ha		244,13 Ku/Ha		245,35 Ku/Ha		246,57 Ku/Ha		246,57 Ku/Ha		247,80 Ku/Ha		
				Jumlah produktivitas Hortikultura (Ku/Ha) :																
				Durian	144,28 Ku/Ha	321,10 Ku/Ha		119,38 Ku/Ha		155,37 Ku/Ha		159,26 Ku/Ha		163,24 Ku/Ha		163,24 Ku/Ha		167,32 Ku/Ha		
				Manggis	58,76 Ku/Ha	85,4 Ku/Ha		92,5 Ku/Ha		64,21 Ku/Ha		66,13 Ku/Ha		68,12 Ku/Ha		68,12 Ku/Ha		70,16 Ku/Ha		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Salak	174,00 Ku/Ha	174,10 Ku/Ha		175,54 Ku/Ha		179,27 Ku/Ha		181,07 Ku/Ha		182,88 Ku/Ha		182,88 Ku/Ha		184,70 Ku/Ha		
				Pisang	122,01 Ku/Ha	107,50 Ku/Ha		145,49 Ku/Ha		129,48 Ku/Ha		132,07 Ku/Ha		134,71 Ku/Ha		134,71 Ku/Ha		137,40 Ku/Ha		
				Cabai	48,10 Ku/Ha	47,00 Ku/Ha		41 Ku/Ha		48,83 Ku/Ha		49,07 Ku/Ha		49,31 Ku/Ha		49,31 Ku/Ha		49,56 Ku/Ha		
				Bawang Merah	90,00 Ku/Ha	63,00 Ku/Ha		62,4 Ku/Ha		90,81 Ku/Ha		91,08 Ku/Ha		91,36 Ku/Ha		91,36 Ku/Ha		91,63 Ku/Ha		
				Sayur - sayuran lainnya	246,98 Ku/Ha	135,75 Ku/Ha		94,76 Ku/Ha		255,55 Ku/Ha		258,48 Ku/Ha		261,44 Ku/Ha		261,44 Ku/Ha		264,44 Ku/Ha		
				Biofarmaka	107,46 Ku/Ha	285,00 Ku/Ha		259,87 Ku/Ha		198,03 Ku/Ha		199,02 Ku/Ha		200,01 Ku/Ha		200,01 Ku/Ha		201,01 Ku/Ha		
				Bunga	N/A	-		0,22 Ku/Ha		0,13 Ku/Ha		0,15 Ku/Ha		0,18 Ku/Ha		0,18 Ku/Ha		0,20 Ku/Ha		
				Janggelan	2,10 Kw/Ha	12,60 Ku/Ha		111,63 Ku/Ha		126,00 Ku/Ha		127,30 Ku/Ha		128,50 Ku/Ha		128,50 Ku/Ha		129,80 Ku/Ha		
3	03	16	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan**	**Jumlah produktivitas perkebunan :**			-		1.796.224.534		1.880.544.900		1.820.000.000		2.487.000.000		7.983.769.434		2.487.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Kakao	3,60 Ku/Ha	5,70 Ku/Ha		5,80 Ku/Ha		3,71 Ku/Ha		3,75 Ku/Ha		3,78 Ku/Ha		3,78 Ku/Ha		3,82 Ku/Ha		
				Kelapa	9,80 Ku/Ha	16,99 Ku/Ha		11,73 Ku/Ha		9,95 Ku/Ha		10,00 Ku/Ha		10,05 Ku/Ha		10,05 Ku/Ha		10,10 Ku/Ha		
				Cengkeh	8,80 Ku/Ha	7,25 Ku/Ha		2,36 Ku/Ha		2,33 Ku/Ha		8,91 Ku/Ha		2,34 Ku/Ha		2,34 Ku/Ha		2,35 Ku/Ha		
				Kopi	7,60 Ku/Ha	9,77 Ku/Ha		8,26 Ku/Ha		7,83 Ku/Ha		7,91 Ku/Ha		7,99 Ku/Ha		7,99 Ku/Ha		8,07 Ku/Ha		
				Nilam	16,15 Ku/Ha	42,60 Ku/Ha		48,55 Ku/Ha		49,82 Ku/Ha		50,49 Ku/Ha		51,46 Ku/Ha		51,46 Ku/Ha		52,43 Ku/Ha		
3	03	19	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**				-		7.488.266.770		8.973.462.500		6.616.000.000		7.604.000.000		30.681.729.270		8.604.000.000	
				Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya :																
				Kelompok tani	N/A	N/A		56		36		38		40		40		42		
				Gapoktan	N/A	N/A		15		11		13		15		15		17		
				KWT	N/A	N/A		46		32		35		37		37		39		
				Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo	20%	30%		40%		50%		60%		70%		70%	-	80%		
				Persentase Luasan penerapan teknologi SRI	5%	10%		10%		25%		35%		45%		45%		10%		
				Jumlah infrastruktur Pertanian yang terbangun :																
				a. Jalan Usaha Tani	10.239 meter	11.263 meter		16691,5 meter		13.628 meter		14.991 meter		16.490 meter		16.490 meter		18.139 meter		
				b. JITUT	8.085 meter	8.894 meter		8345,8 meter		10.761 meter		11.838 meter		13.021 meter		13.021 meter		14.323 meter		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				c. Dam Parit	26 unit	28 unit		25 Unit		21 Unit		23 unit		25 unit		25 unit		29 unit		
				d. Irigasi Air Tanah	N/A	N/A		86 unit sumur bor		66 unit sumur bor		72 unit sumur bor		78 unit sumur bor		78 unit sumur bor		84 unit sumur bor		
				Jumlah sarana pertanian yang diadakan	5 unit	10 unit		16 unit		10 unit		10 unit		10 unit		50 unit		10 unit		
				Jumlah P3A yang berbadan hukum	47 kelompok	13 kelompok		22 kelompok		7 kelompok		25 kelompok		25 kelompok		139 kelompok		14 kelompok		
3	03	20	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Nilai Tukar Petani (NTP)**	N/A	116,00	-	114,00	-	115,00	200.000.000	115,00	200.000.000	116,00	200.000.000	116,00	600.000.000	116,00	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	03	21	**Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian**	**Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian**	100%	100%	-	100%	1.806.817.353	100%	3.922.225.000	100%	4.175.000.000	100%	4.175.000.000	100%	14.079.042.353	100%	4.175.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	03	22	**Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku**	**Jumlah produktivitas tembakau**	N/A	N/A	-	N/A	-	10,33 Ku/Ha	150.000.000	10,38 Ku/Ha	400.000.000	10,43 Ku/Ha	400.000.000	10,43 Ku/Ha	950.000.000	10,48 Ku/Ha	400.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	03	17	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan**				-		1.519.225.150		1.070.725.000		1.675.000.000		2.050.000.000		6.314.950.150		2.650.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Jumlah populasi ternak (ekor):																
				- Sapi potong	32.668 ekor	34.300 ekor		36.000 ekor		37.440 ekor		38.938 ekor		40.496 ekor		40.496 ekor		42.116 ekor		
				- Sapi perah	4.831 ekor	5.070 ekor		5.320 ekor		5.426 ekor		5.535 ekor		5.646 ekor		5.646 ekor		5.759 ekor		
				- Kambing	362.287 ekor	380.400 ekor		399.400 ekor		419.300 ekor		440.300 ekor		462.300 ekor		462.300 ekor		485.400 ekor		
				- Domba	10.230 ekor	10.700 ekor		11.250 ekor		11.800 ekor		12.400 ekor		13.050 ekor		13.050 ekor		13.700 ekor		
				- Unggas	3.195.816 ekor	3.301.780 ekor		3.411.424 ekor		3.524.490 ekor		3.641.680 ekor		3.763.193 ekor		3.763.193 ekor		3.889.030 ekor		
				Jumlah Produksi (ton):																
				- Daging	5.773 ton	6.002 ton		6.239 ton		-		-		-		-		-		
				- Telur	3.008 ton	3.117 ekor		3.230 ekor		-		-		-		-		-		
				- Susu	6.325 ton	6.640 ton		6.972 ton		-		-		-		-		-		
				Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	26 ekor	26 ekor		30 ekor		34 ekor		38 ekor		42 ekor		42 ekor		46 ekor		
				Kelahiran hasil IB	12.297 ekor	12.900 ekor		13.550 ekor		14.230 ekor		14.940 ekor		15.690 ekor		15.690 ekor		16.470 ekor		
				Persentase nilai tambah produk peternakan																
				- Daging	20%-30%	20% - 30%		24%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		20%-30%		
				- Telur	30%-40%	30% - 40%		33%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		30%-40%		
				- Susu	15%-25%	15% - 25%		20%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		15%-25%		
3	03	18	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**				-		462.026.350		520.355.500		550.000.000		995.000.000		2.527.381.850		995.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloasis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	N/A	2 unit		5 unit (+3 unit)		-		-		-		-		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	1.110 ekor sapi	500 ekor sapi		2.500 ekor sapi		5.000 ekor		6.000 ekor		6.000 ekor		20.500 ekor		6.500 ekor		
JUMLAH							18.289.909.400		13.971.304.181		18.080.286.900		16.561.000.000		19.711.000.000		86.613.500.481		21.311.000.000	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**4.364.746.014**		-		-		-		-		**4.364.746.014**		-	
3	**04**		**Kehutanan**				**4.364.746.014**		-		-		-		-		**4.364.746.014**		-	
			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan				**4.364.746.014**		-		-		-		-		**4.364.746.014**		-	
3	04	16	**Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**				2.769.030.318		-		-		-		-		2.769.030.318		-	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Penanganan Lahan Kritis (Ha)	200 Ha	250 Ha										250				
				Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Teknis (Unit)	8 unit	8 unit										8				
3	04	17	**Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**				1.400.447.056								-		1.400.447.056			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Terlindunginya Sumber Mata Air (unit)	8 unit	10 unit										10 unit				
				Bertambahnya Aset Hutan Kota :																
				Jenis Tanaman (Jenis)	4 jenis	2 jenis										2 jenis				
				Jenis Satwa (Jenis)	0 unit	1 unit										1 jenis				
				Fasilitas Hutan Kota Lainnya (Unit)	5 unit	2 unit										2 unit				
3	04	xx	**Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**				58.827.000										58.827.000			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Pengembangan Hasil Hutan Kayu : (Sengon, Jabon, Mindi, Jati, Gmelina, Akasia,	200 Ha	250 Ha										1.450 Ha				
				Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : (Porang, Bambu, Aren, Pucung, Kemiri)	100 Ha	130 Ha										780 Ha				
				Jumlah Kayu Olahan (m3)	66.116 m3	69.422 m3										84.383 m3				
3	04	xx	**Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan**				93.100.700										93.100.700			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
				Tertib dan Terkendalinya Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan	50 orang	48 orang														
				Bertambahnya Jumlah Pengusaha Yang Berijin	5 pengusaha	2 pengusaha														
3	04	xx	**Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**	Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Hutan Produksi dan Lestari	1 kelompok	1 kelompok	43.340.940									1 kelompok	43.340.940			Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
			JUMLAH				**4.364.746.014**		-		-		-		-		**4.364.746.014**		-	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**54.710.500**		-		-		-		-		**54.710.500**		-	
3	**05**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**				**54.710.500**		-		-		-		-		**54.710.500**		-	
			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi				**54.710.500**		-		-		-		-		**54.710.500**		-	
3	05	01	**Program Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral**	Jumlah penambang tanpa ijin dan berijin	40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Jumlah desa yang belum terlistriki	3	5		-		-		-		-		-	-	-	
				Ketersediaan data bidang pertambangan dan energi	0	0		-		-		-		-		-	-		
				Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan ESDM												-	-			
			Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			49,95	43.456.500										43.456.500			
			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			30,05	11.254.000										11.254.000			
			JUMLAH				**54.710.500**		-		-		-		-		**54.710.500**		-	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**4.829.557.827**		**5.551.586.245**		**17.275.350.000**		**40.162.400.000**		**14.965.000.000**		**82.783.894.072**		**19.065.000.000**	
3	**06**		**Perdagangan**				**4.829.557.827**		**5.551.586.245**		**17.275.350.000**		**40.162.400.000**		**14.965.000.000**		**82.783.894.072**		**19.065.000.000**	
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan				**4.829.557.827**		**5.551.586.245**		**17.275.350.000**		**40.162.400.000**		**14.965.000.000**		**82.783.894.072**		**19.065.000.000**	
3	06	01	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	Jumlah UTTP yang ditera ulang	6.509	7.000	398.333.627									9.500	398.333.627			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Jumlah pedagang yang dibina dan diawasi peredaran barangnya	0	108,00										0	-			
				Stabilisasi harga dan penyediaan informasi harga pasar	0	52										52	-			
3	06	02	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	100%	100%	2.331.316.700									100%	2.331.316.700			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Jumlah laporan monitoring harga kebutuhan pokok	0	52 laporan										52 laporan	-			
				Jumlah lokasi operasi pasar	0	4,00										4,00	-			
3	06	03	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan**	Jumlah sarpras perdagangan yang tersedia	5	6	373.581.000									12	373.581.000			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perdagangan													-			
3	06	04	**Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan**	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina	0	-	-									-	-			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
3	06	03	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan**	Persentase Pasar Daerah yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	13,04%	17%	1.726.326.500									17%	1.726.326.500			Dinas Pendapatan
3	06	05	**Program Pengelolaan Pasar Daerah**	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	-	-	0									-	0			Dinas Pendapatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	06	15	**Program Pengelolaan Pasar Daerah**	Persentase Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara	100%	100%	-	100%	512.499.900	100%	746.500.000	100%	37.350.000.000	100%	1.320.000.000	100%	39.928.999.900	100%	2.320.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
				Jumlah pedagang pasar yang dibina	50			30		30		0		0		60		0		
				Persentase Pasar Daerah yang dibangun dan direvitalisasi	0%			0%		0%		22%		13%		13%		13%		
3	06	16	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	6.509	7.000	-	6.015	269.242.142	6.000	2.650.000.000	-	-	-	300.000.000	6.015	3.219.242.142	-	400.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
3	06	17	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai target dan tepat sasaran	N/A	N/A	-	100%	157.514.100	100%	128.850.000	-	-	-	150.000.000	100%	436.364.100	-	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
				Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	N/A	N/A		100%		100%		-		-		100%		-		
				Persentase promosi perdagangan yang dilaksanakan/ diikuti	N/A	N/A		100%		0%		-		-		100%		-		
3	06	18	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan**	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	22%	N/A	-	22%	4.600.370.103	22%	13.700.000.000	-	2.100.000.000	-	12.100.000.000	22%	32.500.370.103	-	15.100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	06	19	**Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan**	Persentase Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	N/A	N/A	-	13%	11.960.000	13%	50.000.000	-	-	-	50.000.000	27%	111.960.000	-	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	06	20	**Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan**	Persentase UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	60,71%	712.400.000	62,67%	1.045.000.000	62,67%	1.757.400.000	64,62%	1.045.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
				Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100%		100%		100%		100%		
JUMLAH							**4.829.557.827**		**5.551.586.245**		**17.275.350.000**		**40.162.400.000**		**14.965.000.000**		**82.783.894.072**		**19.065.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**570.129.089**		**1.220.241.615**		**2.955.000.000**		**2.415.000.000**		**2.675.000.000**		**9.835.370.704**		**2.900.000.000**	
3	**07**		**Perindustrian**				**570.129.089**		**1.220.241.615**		**2.955.000.000**		**2.415.000.000**		**2.675.000.000**		**9.835.370.704**		**2.900.000.000**	
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**570.129.089**		**1.220.241.615**		**2.955.000.000**		**2.415.000.000**		**2.675.000.000**		**9.835.370.704**		**2.900.000.000**	
3	07	01	**Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal dan berdaya saing	60 unit	100 unit	570.129.089									260 unit	570.129.089			Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
				Jumlah IKM baru yang terbina	20 unit	40 unit										220 unit	-			
				Jumlah IKM kerajinan yang terbina dan jumlah IKM yang ikut dalam even pameran	28 unit	48 unit										268 unit	-			
3	07	15	**Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**	Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi	N/A	N/A	-	30%	1.220.241.615	62%	2.880.000.000	72%	2.290.000.000	83%	2.550.000.000	83%	8.940.241.615,00	50%	2.750.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	07	16	**Program Pembinaan Industri**	Persentase industri tembakau yang dibina	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	75.000.000	33%	125.000.000	67%	125.000.000	67%	325.000.000,00	67%	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			JUMLAH				**570.129.089**		**1.220.241.615**		**2.955.000.000**		**2.415.000.000**		**2.675.000.000**		**9.835.370.704**		**2.900.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Proram Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah
Urusan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3			**Urusan Pilihan**				**350.444.000**		**221.258.230**		**400.000.000**		**300.000.000**		**500.000.000**		**1.771.702.230**		**500.000.000**	
3	**08**		**Transmigrasi**				**350.444.000**		**221.258.230**		**400.000.000**		**300.000.000**		**500.000.000**		**1.771.702.230**		**500.000.000**	
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**350.444.000**		**221.258.230**		**400.000.000**		**300.000.000**		**500.000.000**		**1.771.702.230**		**500.000.000**	
3	08	01	**Program Transmigrasi regional**	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	25	34	350.444.000									59	350.444.000			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
3	08	15	**Program Transmigrasi regional**	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	N/A	N/A	-	100%	221.258.230	100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	1.421.258.230	100%	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			JUMLAH				**350.444.000**		**221.258.230**		**400.000.000**		**300.000.000**		**500.000.000**		**1.771.702.230**		**500.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Administrasi Pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**				**28.279.381.909**		**33.515.044.049**		**41.905.048.000**		**96.360.160.600**		**102.470.949.099**		**302.530.583.657**		**106.566.746.949**	
4	**01**		**Administrasi Pemerintahan**				**28.279.381.909**		**33.515.044.049**		**41.905.048.000**		**96.360.160.600**		**102.470.949.099**		**302.530.583.657**		**106.566.746.949**	
			Sekretariat Daerah				**10.969.692.340**		**15.672.820.104**		**20.964.250.000**		**75.000.000.000**		**79.257.599.999**		**201.864.362.443**		**80.457.599.999**	
4	01	01	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	Pengkoordinasian aspek strategis antara lembaga penyelenggara pemerintahan dengan instansi vertikal		100%	1.796.547.496									100%	1.796.547.496			Sekretariat Daerah
4	01	02	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Kerjasama Antar Daerah dengan Lembaga Pemerintah / Luar Negeri	2 Nota Kerjasama Antar Daerah,9 Nota Kerjasama dengan Pihak Ketiga	2 Nota Kerjasama Antar Daerah,9 Nota Kerjasama dengan Pihak Lainnya	409.962.030									100%	409.962.030			Sekretariat Daerah
4	01	03	**Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	Pelaksanaan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	1.223.065.113									100%	1.223.065.113			Sekretariat Daerah
4	01	04	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Bahan perumusan kebijakan yang efektif di bidang hukum, dan terselenggaranya kegiatan publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum secara optimal	83%	80%	1.677.526.607									100%	1.677.526.607			Sekretariat Daerah
					25 Desa	30 Desa/.Aparatur Pemda										164 Desa/.Aparatur Pemdadan Pembentukan kelompok Kadarkum				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						5 perkara perdata/TUN secara litigasi baik menggunakan jasa advokad maupun jasa Jaksa pengacara negara dan 40 Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi										17 perkara perdata/TUN secara litigasi, 8 perkara Perdata/TUN secara non litigasi serta 240 Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi dan 240 Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara non litigasi				
						7 kajian dan 60 penelitian										47 kajian dan 260 penelitian				
						850 buku 1000pengunjung										4850 buku 5000 pengunjung ,16 kali perawatan, 4 nota kerjasama				
4	01	05	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil (UMK)		30 UMKM	68.934.400										68.934.400			Sekretariat Daerah
				Tewrdatanya Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Trenggalek																
4	01	06	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Meningkatnya produktivitas BUMD			232.514.857										232.514.857			Sekretariat Daerah
4	01	07	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesejarhteraan petani			164.704.864										164.704.864			Sekretariat Daerah
4	01	08	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	Meningjkatnya perkembangan indust			169.705.049										169.705.049			Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	09	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunits Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Meningkatnya Kesejahteraan bagi Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil daaann Penyandang Masalah Kesejahter	N/A	100%	98.505.000										98.505.000			Sekretariat Daerah
4	01	10	**Program Kerjasama Informasi dengan Mass media**	Ketersediaan data, informasi, sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan potensi daerah		100%	1.140.929.354										1.140.929.354			Sekretariat Daerah
4	01	11	**Program Pengumpulan Informasi**	Kelancaran komunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek		100%	278.860.615										278.860.615			Sekretariat Daerah
4	01	12	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Peningkatan kualitas SDM Aparatur			95.865.000										95.865.000			Sekretariat Daerah
4	01	13	**Program Peningkatan Kesehatan Aparatur**	Peningkatan kesehatan Aparatur			129.373.000										129.373.000			Sekretariat Daerah
4	01	14	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	Peningkatan Disiplin Aparatur			345.564.253										345.564.253			Sekretariat Daerah
4	01	15	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan bidang keagamaan,kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya			475.950.669										475.950.669			Sekretariat Daerah
4	01	16	**Program Pelayanan Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Non Formal**	Layanan Bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan kegamaan non formal dpat terlaksana sesuai ketentuan			516.161.355										516.161.355			Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		100%	1.446.565.164										1.446.565.164			Sekretariat Daerah
				Pelaporan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah		25 laporan											-			
4	01	18	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah**	SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi,SDM yang sesuai dengan kompetensi jabatan			698.957.514										698.957.514			Sekretariat Daerah
4	01	01	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik	100%	100%	-	100%	4.449.838.401	100%	4.782.800.000	100%	4.686.000.000	100%	5.041.000.000	100%	18.959.638.401	100%	5.341.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Jumlah kerjasama daerah	N/A	N/A	-	25 kerjasama daerah	323.684.419	25 kerjasama daerah	375.000.000	25 kerjasama daerah	350.000.000	25 kerjasama daerah	450.000.000	25 kerjasama daerah	1.498.684.419	25 kerjasama daerah	450.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	**Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Pembinaan/ fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	-	100%	1.715.806.126	100%	1.860.000.000	100%	1.844.000.000	100%	2.090.000.000	100%	7.509.806.126	100%	2.290.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	-	1.090 Kebijakan	2.090.895.580	1.080 kebijakan	2.375.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	4.465.895.580	N/A	-	Sekretariat Daerah
				Jumlah pengunjung SJDIH	N/A	N/A		9.000 Pengunjung JDIH		6.000 Pengunjung JDIH		N/A		N/A		N/A		N/A		
				Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	N/A	N/A		100%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		
				Jumlah desa sadar hukum	N/A	N/A		N/A		2 Desa		N/A		N/A		N/A		N/A		
			Program Penataan dan Pelayanan Hukum	Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A		N/A		N/A		1.080 kebijakan	2.320.000.000	1.080 kebijakan	2.775.000.000	1.080 kebijakan	5.095.000.000	1.080 kebijakan	2.775.000.000	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Pengunjung SJDIH	N/A	N/A		N/A		N/A		6.000 pengunjung website JDIH		6.000 pengunjung website JDIH		6.000 pengunjung website JDIH		6.000 pengunjung website JDIH		
				Jumlah Desa Sadar Hukum	N/A	N/A		N/A		N/A		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		
				Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	N/A	N/A		N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		
4	01	04	**Program Pendukung Peningkatan Perekonomian**	Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	473.189.947	100%	415.000.000	N/A	-	N/A	-	100%	888.189.947	N/A	-	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100%	415.000.000	100%	540.000.000	100%	955.000.000	100%	540.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	N/A	N/A		N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		
4	01	05	**Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi dengan Mass media**	Persentase informasi pembangunan daerah dan potensi daerah yang terpublikasikan	100%	100%	-	100%	1.609.774.170	100%	1.664.400.000	100%	1.530.000.000	100%	2.250.000.000	100%	7.054.174.170	100%	2.750.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	06	**Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya**	Persentase Dukungan Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang berjalan optimal	100%	100%	-	100%	1.844.254.537	100%	2.180.000.000	100%	2.239.500.000	100%	2.734.999.999	100%	8.998.754.536	100%	2.734.999.999	Sekretariat Daerah
4	01	07	**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	-	100%	1.628.717.275	100%	1.722.775.000	100%	1.965.000.000	100%	2.050.000.000	100%	7.366.492.275	100%	2.250.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	08	**Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah**	Luasan kawasan hutan/ lahan yang dimanfaatkan untuk Pengembangan Wilayah Strategis Daerah	N/A	N/A	-	30Ha	327.477.566	30Ha	2.639.200.000	30Ha	550.000.000	30Ha	1.050.000.000	30Ha	4.566.677.566	30Ha	1.050.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	09	**Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	C	CC		B	910.239.831	B	1.190.075.000	B	1.370.000.000	BB	1.476.600.000	BB	4.946.914.831	BB	1.476.600.000	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A		B		B		B		B		B		B		
4	01	10	**Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD**	Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		100%	116.251.199	100%	1.460.000.000	100%	57.230.500.000	100%	58.250.000.000	100%	117.056.751.199	100%	58.250.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	11	**Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**	Jumlah Ketentuan di Bidang Cukai yang dipublikasikan/ disosialisasikan	N/A	-	-	1 Ketentuan	182.691.053	1 Ketentuan	300.000.000	1 Ketentuan	500.000.000	1 Ketentuan	550.000.000	1 Ketentuan	1.532.691.053	1 Ketentuan	550.000.000	Sekretariat Daerah
			Sekretariat DPRD				**10.942.864.669**		**12.833.459.668**		**14.055.121.000**		**13.419.323.650**		**14.522.512.150**		**65.773.281.137**		**16.668.310.000**	
4	01	14	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD	82,83%	100%	10.942.864.669	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10.942.864.669	-	-	Sekretariat DPRD
4	01	15	**Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda)	23 Raperda	21 Raperda	-	31 Raperda	10.004.380.556	22 Raperda	4.629.357.500	22 Raperda	5.346.189.000	22 Raperda	6.449.377.500	108 Raperda	26.429.304.556	22 Raperda	7.449.377.500	Sekretariat DPRD
				Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	16	**Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD**	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	100%	100%		100%	2.829.079.112	100%	9.425.763.500	100%	8.073.134.650	100%	8.073.134.650	100%	28.401.111.912	100%	9.218.932.500	Sekretariat DPRD
			Kecamatan Trenggalek				**466.307.000**		**387.580.227**		**954.945.000**		**1.219.450.000**		**1.319.450.000**		**4.347.732.227**		**1.419.450.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	466.307.000	-	387.580.227	-	954.945.000	-	1.219.450.000	-	1.319.450.000	100%	4.347.732.227	-	1.419.450.000	Kecamatan Trenggalek
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	64%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Pogalan				**435.090.000**		**327.670.598**		**403.400.000**		**441.200.000**		**491.200.000**		**2.098.560.598**		**541.200.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	435.090.000	-	327.670.598	-	403.400.000	-	441.200.000	-	491.200.000	100%	2.098.560.598	-	541.200.000	Kecamatan Pogalan
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Durenan				**539.500.000**		**454.136.402**		**472.619.500**		**499.978.950**		**549.978.950**		**2.516.213.802**		**599.978.950**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	539.500.000	-	454.136.402	-	472.619.500	-	499.978.950	-	549.978.950	100%	2.516.213.802	-	599.978.950	Kecamatan Durenan
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	64%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Bendungan				**419.082.000**		**333.562.000**		**436.001.000**		**552.220.000**		**602.220.000**		**2.343.085.000**		**652.220.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	419.082.000	-	333.562.000	-	436.001.000	-	552.220.000	-	602.220.000	100%	2.343.085.000	-	652.220.000	Kecamatan Bendungan
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Karangan				**488.823.000**		**326.372.500**		**453.380.000**		**498.380.000**		**548.380.000**		**2.315.335.500**		**598.380.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	488.823.000	-	326.372.500	-	453.380.000	-	498.380.000	-	548.380.000	100%	2.315.335.500	-	598.380.000	Kecamatan Karangan
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Tugu				**574.135.000**		**407.547.750**		**515.797.500**		**643.976.000**		**693.976.000**		**2.835.432.250**		**743.976.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	70%	574.135.000	-	407.547.750	-	515.797.500	-	643.976.000	-	693.976.000	100%	2.835.432.250	-	743.976.000	Kecamatan Tugu
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Pule				**417.638.600**		**437.356.600**		**434.945.000**		**456.868.000**		**506.868.000**		**2.253.676.200**		**556.868.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	417.638.600	-	437.356.600	-	434.945.000	-	456.868.000	-	506.868.000	100%	2.253.676.200	-	556.868.000	Kecamatan Pule

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Suruh				**452.484.200**		**266.776.700**		**358.091.000**		**412.900.000**		**462.900.000**		**1.953.151.900**		**512.900.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	452.484.200	-	266.776.700	-	358.091.000	-	412.900.000	-	462.900.000	100%	1.953.151.900	-	512.900.000	Kecamatan Suruh
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Kampak				**333.789.000**		**213.575.000**		**336.110.000**		**403.330.000**		**453.330.000**		**1.740.134.000**		**503.330.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	55%	-	333.789.000	-	213.575.000	-	336.110.000	-	403.330.000	-	453.330.000	100%	1.740.134.000	-	503.330.000	Kecamatan Kampak
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Gandusari				**300.306.900**		**319.473.000**		**517.639.000**		**567.000.000**		**617.000.000**		**2.321.418.900**		**667.000.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	55%	100%	300.306.900	-	319.473.000	-	517.639.000	-	567.000.000	-	617.000.000	100%	2.321.418.900	-	667.000.000	Kecamatan Gandusari
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Watulimo				**523.289.000**		**391.359.500**		**474.761.000**		**525.760.000**		**575.760.000**		**2.490.929.500**		**625.760.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	523.289.000	-	391.359.500	-	474.761.000	-	525.760.000	-	575.760.000	100%	2.490.929.500	-	625.760.000	Kecamatan Watulimo
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Panggul				**578.050.000**		**488.785.500**		**629.200.000**		**716.989.000**		**766.989.000**		**3.180.013.500**		**816.989.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	578.050.000	-	488.785.500	-	629.200.000	-	716.989.000	-	766.989.000	100%	3.180.013.500	-	816.989.000	Kecamatan Panggul
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Dongko				**430.912.200**		**323.589.000**		**447.003.000**		**476.000.000**		**526.000.000**		**2.203.504.200**		**576.000.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	430.912.200	-	323.589.000	-	447.003.000	-	476.000.000	-	526.000.000	100%	2.203.504.200	-	576.000.000	Kecamatan Dongko
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kecamatan Munjungan				**407.418.000**		**330.979.500**		**451.785.000**		**526.785.000**		**576.785.000**		**2.293.752.500**		**626.785.000**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SOP	64%	100%	407.418.000	-	330.979.500	-	451.785.000	-	526.785.000	-	576.785.000	100%	2.293.752.500	-	626.785.000	Kecamatan Munjungan
				Persentase penyelenggaraan tugas atributif Kecamatan	64%	70%		-		-		-		-		100%		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%		-		-		-		-		100%		-		
				Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	64%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	-	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kelurahan Surodakan				**66.376.100**		**66.376.100**		-		-		-		**132.752.200**		-	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	66.376.100	100%	66.376.100	-	-	-	-	-	-	100%	132.752.200	-	-	Kelurahan Surodakan
			Kelurahan Sumbergedong				**83.139.000**		**83.139.000**		-		-		-		**166.278.000**		-	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	83.139.000	100%	83.139.000	-	-	-	-	-	-	100%	166.278.000	-	-	Kelurahan Sumbergedong
			Kelurahan Ngantru				**82.804.000**		**82.804.000**		-		-		-		**165.608.000**		-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	82.804.000	100%	82.804.000	-	-	-	-	-	-	100%	165.608.000	-	-	Kelurahan Ngantru
			Kelurahan Tamanan				**71.673.600**		**71.673.600**		**-**		**-**		**-**		**143.347.200**		**-**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	71.673.600	100%	71.673.600	-	-	-	-	-	-	100%	143.347.200	-	-	Kelurahan Tamanan
			Kelurahan Kelutan				**77.446.600**		**77.446.600**		**-**		**-**		**-**		**154.893.200**		**-**	
4	01	18	**Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan	100%	100%	77.446.600	100%	77.446.600	-	-	-	-	-	-	100%	154.893.200	-	-	Kelurahan Kelutan
			JUMLAH				**28.279.381.909**		**33.515.044.049**		**41.905.048.000**		**96.360.160.600**		**102.470.949.099**		**302.530.583.657**		**106.566.746.949**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pengawasan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**				**853.835.750**		**1.225.266.984**		**2.070.000.000**		**2.212.341.700**		**2.394.195.000**		**8.755.639.434**		**2.394.195.000**	
4	**02**		**Pengawasan**				**853.835.750**		**1.225.266.984**		**2.070.000.000**		**2.212.341.700**		**2.394.195.000**		**8.755.639.434**		**2.394.195.000**	
			Inspektorat				**853.835.750**		**1.225.266.984**		**2.070.000.000**		**2.212.341.700**		**2.394.195.000**		**8.755.639.434**		**2.394.195.000**	
3	05	15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	Persentase LAKIP Perangkat Daerah (PD) yang dievaluasi	50%	60%	599.286.000									100%	599.286.000			Inspektorat
				Persentase Pelaksanaan Pengawasan / Pemeriksaan	60%	95%										95%	-			
				Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang terselesaikan	91%	60%										95%	-			
				Persentase laporan keuangan pemerintah daerah dengan target menuju WTP	80%	95%										95%	-			
3	05	16	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	Persentase peningkatan kualitas SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	60%	95%	234.199.750									95%	234.199.750			Inspektorat
				Persentase APIP yang mengikuti diklat	25%	25%										90%	-			
3	05	17	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan**	Persentase Satgas SPIP yang mengimplementasikan SPIP sesuai ketentuan	0%	90%	20.350.000									100%	20.350.000			Inspektorat
4	02	15	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	N/A	20%	-	40%	1.031.268.584	60%	1.850.000.000	80%	1.929.891.700	100%	2.083.500.000	100%	6.894.660.284	100%	2.083.500.000	Inspektorat
4	02	16	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	Persentase Tenaga Pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian	60%	95%	-	95%	130.238.400	95%	220.000.000	95%	252.450.000	95%	277.695.000	95%	880.383.400	95%	277.695.000	Inspektorat
4	02	17	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	Persentase kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan yang diterbitkan/ditetapkan	N/A	N/A	-	100%	63.760.000	-	-	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	126.760.000	100%	33.000.000	Inspektorat
			JUMLAH				**853.835.750**		**1.225.266.984**		**2.070.000.000**		**2.212.341.700**		**2.394.195.000**		**8.755.639.434**		**2.394.195.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Perencanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**				**4.075.353.907**		**5.994.327.854**		**6.555.000.000**		**5.651.260.000**		**6.032.500.000**		**28.308.441.761**		**6.532.500.000**	
4	**03**		**Perencanaan**				**4.075.353.907**		**5.994.327.854**		**6.555.000.000**		**5.651.260.000**		**6.032.500.000**		**28.308.441.761**		**6.532.500.000**	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				**4.075.353.907**		**5.994.327.854**		**6.555.000.000**		**5.913.760.000**		**6.295.000.000**		**28.833.441.761**		**6.845.000.000**	
4	03	01	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	108.550.350									100%	108.550.350			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	03	02	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**				1.519.981.260									-	1.519.981.260			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg dirubah	1 dokumen											1 dokumen				
				Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda	1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Persentase dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkada	100%	100%										100%				
				Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan	74,59%	100%										100%				
				Persentase dokumen perencanaan tahunan PD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%										100%				
				Persentase aplikasi (sistem Informasi/ data base) yang dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan	100%	100%										100%				
4	03	03	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**				956.440.308									-	956.440.308			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berhasil disusun	100%	100%										100%				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD		8,73%										7,65%				
4	03	04	**Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan**				1.021.009.290									-	1.021.009.290			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang berhasil disusun	100%	100%										100%				
				Persentase anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diakomodir dalam RKPD		47,25%										47,34%				
4	03	05	**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**				469.372.699									-	469.372.699			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang berhasil	100%	100%										100%				
				Persentase anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diakomodir		44,02%										45,01%				
				Persentase Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	130%	100%										100%				
4	03	06	**Program Perencanaan Umum Tata Ruang**	Persentase dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	-	0%	-									-	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	03	15	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	100%	-	100%	325.107.767	100%	225.000.000	100%	628.760.000	100%	650.000.000	100%	1.828.867.767	100%	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase dukungan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	03	16	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**				-		719.319.775		750.000.000		590.000.000		750.000.000		2.809.319.775		750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkada	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
				Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan	74,59%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	96 dokumen	96 dokumen		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2017)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2018)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2019)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2020)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2020)		80 dokumen (40 Renja PD Tahun 2018 dan 40 dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2021)		
4	03	17	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**				-		985.458.140		1.950.000.000		-		-		2.935.458.140		-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		-		-		3 dokumen		-		
				Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		-		-		100%		-		
4	03	17	**Program Perencanaan Perekonomian**				-		-		-		1.150.000.000		1.250.000.000		2.400.000.000		1.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	3 dokumen	-		-		-		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		
				Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian yang diatas 75%	100%	-		-		-		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	03	18	**Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan**				-		1.314.972.772		1.325.000.000		1.650.000.000		1.750.000.000		6.039.972.772		1.950.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		
				Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	03	19	**Program Perencanaan Fisik dan Prasarana**				-		1.323.024.400		940.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		5.003.024.400		1.470.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah Keciptakaryaan dan SDA yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		
				Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diatas 75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Jumlah Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	15 rekomendasi pemanfaan ruang	15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		15 rekomendasi pemanfaan ruang		
4	03	20	**Program Perencanaan Umum Tata Ruang**	Jumlah dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	N/A	N/A	-	5 Dokumen	1.002.194.200	2 Dokumen	865.000.000	N/A	-	N/A	-	7 Dokumen	1.867.194.200	N/A	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	03	21	**Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	146.669.800	6 Dokumen	250.000.000	N/A	-	N/A	-	8 Dokumen	396.669.800	N/A	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	03	22	**Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	100%	100%	-	100%	177.581.000	100%	250.000.000	N/A	-	N/A	-	100%	427.581.000	N/A	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	03	23	**Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	11 Dokumen	525.000.000	11 Dokumen	525.000.000	11 Dokumen	1.050.000.000	11 Dokumen	625.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			JUMLAH				**4.075.353.907**		**5.994.327.854**		**6.555.000.000**		**5.651.260.000**		**6.032.500.000**		**28.308.441.761**		**6.532.500.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Keuangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**				**7.295.298.985**		**5.683.442.303**		**8.396.841.000**		**8.036.500.000**		**8.086.600.000**		**37.498.682.288**		**8.136.500.000**	
4	**04**		**Keuangan**				**7.295.298.985**		**5.683.442.303**		**8.396.841.000**		**8.036.500.000**		**8.086.600.000**		**37.498.682.288**		**8.136.500.000**	
			Badan Keuangan Daerah				**7.295.298.985**		**5.683.442.303**		**8.396.841.000**		**8.036.500.000**		**8.086.600.000**		**37.498.682.288**		**8.136.500.000**	
4	04	01	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	3.688.558.135									Tepat waktu	3.688.558.135			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Ketepatan waktu dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu										Tepat waktu				
				Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu										Tepat waktu				
4	04	01	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penambahan PAD	14,01%	9,59%	3.606.740.850									10%	3.606.740.850			Dinas Pendapatan
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Pelunasan Pembayaran PBB P2-nya Tidak Melewati Jatuh Tempo	124 Desa/ Kelurahan	157 Desa/ Keluraha n										157 Desa/ Kelurahan				
4	04	15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase risalah sidang dan SKTJM yang ditindaklanjuti	50%	50%	-	55%	493.195.000	60%	744.900.000	65%	849.900.000	70%	900.000.000	70%	2.987.995.000	75%	949.900.000	Badan Keuangan Daerah
				Menurunnya tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah	50%	50%		45%		40%		40%		30%		30%		25%		
4	04	16	**Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran**	Persentase dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	85%	85%	-	90%	1.483.905.650	90%	2.155.000.000	92%	2.155.000.000	92%	2.155.000.000	92%	7.948.905.650	95%	2.155.000.000	Badan Keuangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Menurunnya jumlah pergeseran anggaran akibat kesalahan penyusunan anggaran	8	7		6		5		4		3		3		2		
4	04	17	**Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	-	100%	822.349.220	100%	1.097.175.000	100%	1.097.175.000	100%	1.097.175.000	100%	4.113.874.220	100%	1.097.175.000	Badan Keuangan Daerah
4	04	18	**Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	89,5%	92%	-	90%	1.608.215.611	90%	1.820.516.000	90%	1.384.425.000	90%	1.384.425.000	90%	6.197.581.611	90%	1.384.425.000	Badan Keuangan Daerah
4	04	19	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak - Pajak Daerah**	Persentase peningkatan pajak-pajak daerah	7%	11,70%	-	16,50%	990.151.822	21%	2.054.250.000	26%	2.000.000.000	31%	2.000.000.000	31%	7.044.401.822	36%	2.000.000.000	Badan Keuangan Daerah
4	04	20	**Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak - Pajak Daerah**	Persentase wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	70%	70%	-	80%	285.625.000	80%	525.000.000	90%	550.000.000	90%	550.000.000	90%	1.910.625.000	90%	550.000.000	Badan Keuangan Daerah
			JUMLAH				**7.295.298.985**		**5.683.442.303**		**8.396.841.000**		**8.036.500.000**		**8.086.600.000**		**37.498.682.288**		**8.136.500.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**				**2.854.720.288**		**2.835.897.111**		**4.642.479.000**		**5.134.500.000**		**5.735.000.000**		**21.202.596.399**		**5.735.000.000**	
4	**05**		**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**				**2.854.720.288**		**2.835.897.111**		**4.642.479.000**		**5.134.500.000**		**5.735.000.000**		**21.202.596.399**		**5.735.000.000**	
			Badan Kepegawaian Daerah				**2.854.720.288**		**2.835.897.111**		**4.642.479.000**		**5.134.500.000**		**5.735.000.000**		**21.202.596.399**		**5.735.000.000**	
4	05	01	**Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**	Persentase pemrosesan SK PNS Pensiun tepat waktu	100%	100%	86.591.140									100%	86.591.140			Badan Kepegawaian Daerah
4	05	02	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**				927.110.348										927.110.348			Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase kasus pelanggaran disiplin yang diproses	100%	100%										100%				
				Persentase pemrosesan SK kenaikan pangkat	100%	100%										100%				
				Persentase data ASN yang sudah valid	100%	100%										100%				
				Persentase kebutuhan ASN	N/A	26,45%										0,00%				
4	05	03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara**				1.841.018.800										1.841.018.800			Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	82,34%	83,07%										99,28%	-			
				Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional	108,15%	100%										100%	-			
				Persentase ASN yang mengikuti bimtek/workshop/seminar/sosialisasi	134,31%	100%										100%	-			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	05	15	**Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur**				-		545.594.542		1.670.669.000		1.944.500.000		2.425.000.000		6.585.763.542		2.425.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase data ASN yang akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Keputusan Penetapan status kepegawaian	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	05	16	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**				-		1.780.748.550		1.902.810.000		2.025.000.000		2.025.000.000		7.733.558.550		2.025.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	14,56%	N/A		35%		40%		45%		50%		60%		60%		
				Persentase ASN yang melanggar disiplin	N/A	N/A		0,14%		0,13%		0,12%		0,11%		0,11%		0,11%		
4	05	17	**Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian**				-		509.554.019		1.069.000.000		1.165.000.000		1.285.000.000		4.028.554.019		1.285.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
JUMLAH							**2.854.720.288**		**2.835.897.111**		**4.642.479.000**		**5.134.500.000**		**5.735.000.000**		**21.202.596.399**		**5.735.000.000**	

Tabel.
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Tahun 2021		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4			**Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan**				-		**285.498.016**		**550.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**1.585.498.016**		**500.000.000**	
4	**06**		**Penelitian dan Pengembangan**				-		**285.498.016**		**550.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**1.585.498.016**		**500.000.000**	
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				-		**285.498.016**		**550.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**1.585.498.016**		**500.000.000**	
4	06	15	**Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**	Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	N/A	N/A	-	100%	285.498.016	100%	550.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	1.585.498.016	100%	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			JUMLAH				-		**285.498.016**		**550.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**1.585.498.016**		**500.000.000**	

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK